



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2024**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan bahan pembahasan lebih lanjut Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Madiun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;

27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024.**

**Pasal 1**

Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 yang dilaksanakan bersama *stakeholders*.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

### **Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 10 Juli 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 10 Juli 2023

**a.n WALI KOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 26/G**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

## BAB I PENDAHULUAN

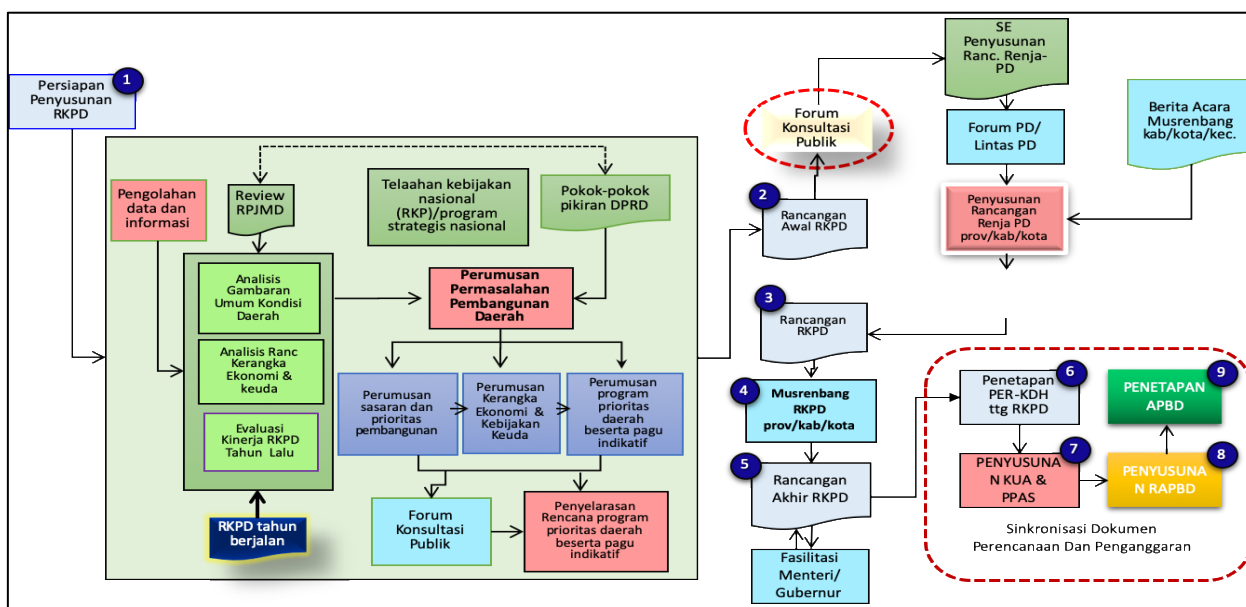
### 1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang harus tersedia bagi daerah dan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau tahunan. Sebagaimana termuat pada Gambar 1.1 dibawah, RKPD memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



**Gambar 1.1**  
**Kedudukan, Peran dan Fungsi RKPD**

Pertama, RKPD secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Kedua, secara normatif, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Ketiga, secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah. Keempat, RKPD secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.



Sumber: Permendagri 86/2017

**Gambar 1.2**  
**Tahapan Penyusunan RKPD**

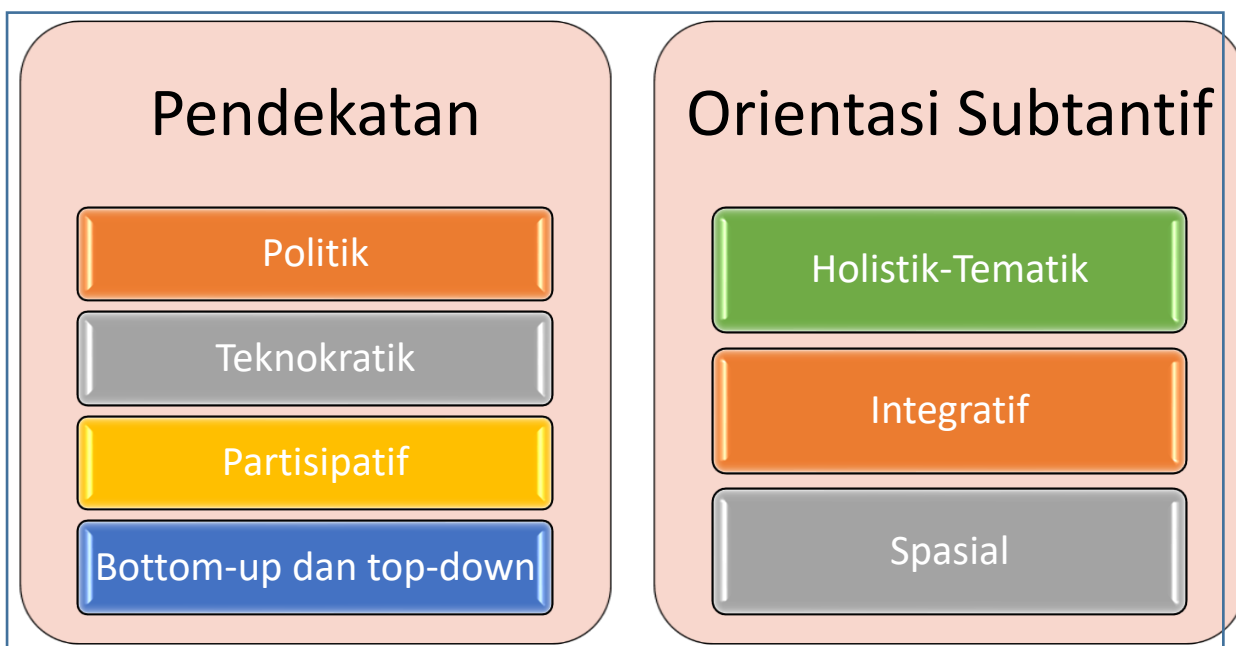
Sebagaimana termuat pada Gambar 1.2 diatas, Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2024 disusun melalui lima tahapan utama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi :

- (1) persiapan penyusunan RKPD;
- (2) penyusunan rancangan awal RKPD;
- (3) Penyusunan rancangan RKPD;
- (4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota;
- (5) perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- (6) penetapan RKPD.

Sebagaimana gambar dibawah, ada 4 (empat) pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024. Keempat pendekatan tersebut adalah : (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, serta (4) pendekatan *bottom up* dan *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up dan top down* merupakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, hingga nasional.





**Gambar 1.3**  
**Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RKPD Kota Madiun**

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.3 diatas, Selain 4 (empat) pendekatan diatas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga berorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait memiliki peran sangat penting. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan adanya pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024 telah melibatkan para pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Para pemangku kepentingan turut berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik. Forum ini yang dilaksanakan guna untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain Forum Konsultasi Publik keterlibatan *stakeholder* juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan dan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan, forum Perangkat Daerah (PD) dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kota. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat ditingkat dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing PD sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD Kota Madiun Tahun 2024 telah berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024. RKPD Tahun 2024 secara praktis merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Kota Madiun periode 2019–2024. Selain itu, penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta RPJPD Kota Madiun 2005-2025. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kota Madiun melibatkan semua *stake holders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh PD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penannggulan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
15. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

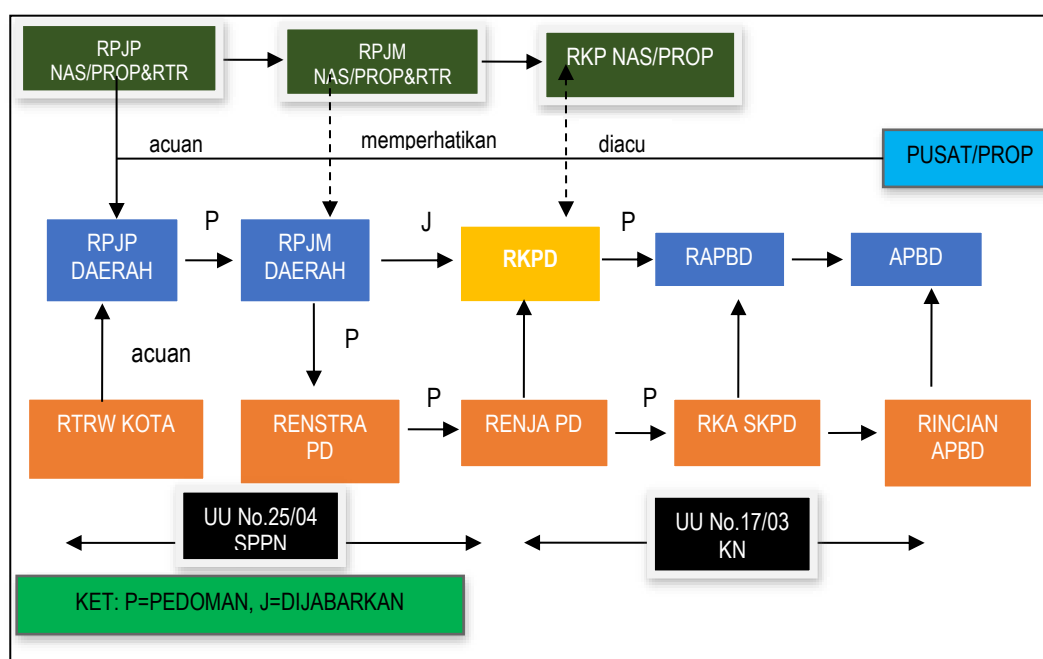
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;
35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2024;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

- 44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
- 45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
- 46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 47. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1.4**  
**Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sebagaimana termuat pada Gambar 1.4 diatas, RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun 2019-2024. RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja perangkat daerah Tahun 2024 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keterkaitan dokumen sebagaimana gambar 1.4 merupakan keselarasan yang harus dijaga serta konsistenitas dokumen perencanaan, RKPD Kota Madiun yang selaras dan mendukung Prioritas Nasional dalam RKP dan Prioritas Provinsi dalam RKPD Provinsi Jawa Timur, selaras dan konsisten dengan RPJMD Kota Madiun terkait Program serta melihat RPJP Kota Madiun, selaian itu juga berpedoman pada RTRW Kota Madiun.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kota Madiun Tahun 2024. Secara khusus, maksud penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang selaras, terintegrasi dan bersinergi dengan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RKP Tahun 2024; dan
  2. Meningkatkan koordinasi dan menyamakan persepsi perencanaan pembangunan antar *stakeholder*, sehingga dokumen perencanaan Tahun 2024 memuat kebijakan publik untuk dapat dijadikan acuan seluruh komponen masyarakat Kota Madiun dalam melaksanakan perannya;
  3. Menyediakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dan menginformasikan arah pelaksanaan pembangunan Tahun 2024; dan
  4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
- Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam menyusun Rancangan dokumen Renja 2024;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
4. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 mengikuti sistematika penulisan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kota Madiun, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan permasalahan pembangunan.

#### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.



**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, dan program pembangunan daerah Tahun 2024.

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII : PENUTUP**

Pada bab penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

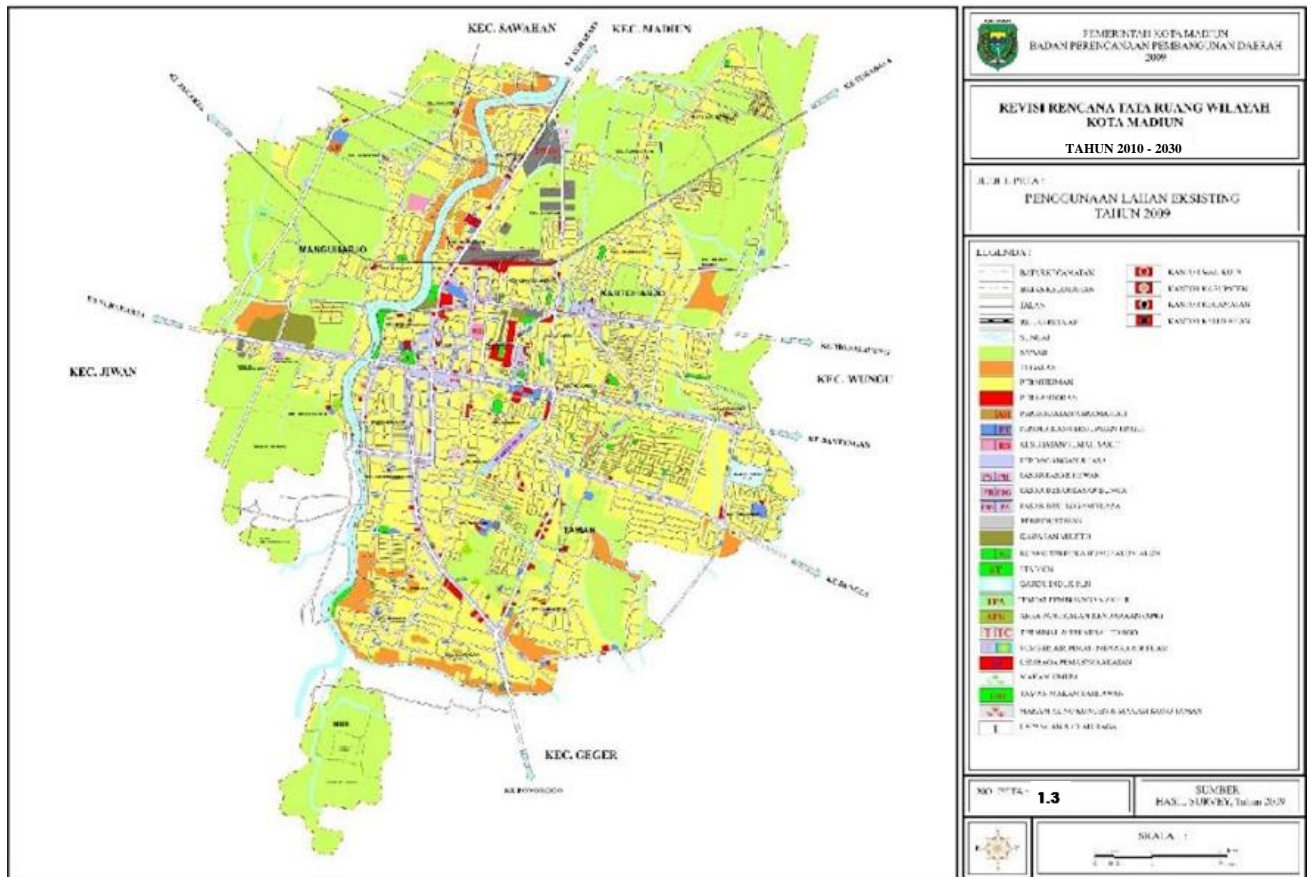
### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa, merupakan salah satu Pemerintahan Kota yang secara administrasi wilayah masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 kelurahan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km<sup>2</sup>, masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan. Secara geografi Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, di sebelah utara;
2. Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, di sebelah selatan;
3. Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, di sebelah timur; dan
4. Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, di sebelah barat.

Melihat kondisi tersebut di atas maka dapat diketahui batas-batas wilayah pada masing-masing kelurahan beserta zona-zona penggunaan lahan sesuai hasil revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun sebagaimana termuat pada Gambar 2.1 dibawah.



Sumber : RTRW Kota Madiun

**Gambar 2. 1**  
**Wilayah Administrasi Kota Madiun**

### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### a. Geografi

##### 1. Posisi Astronomis

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT–112 BT dan 7 LS–8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

##### 2. Kondisi geografis

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga 35°C.

### **3. Kondisi Topografi**

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

### **4. Kondisi Geologi**

Ditinjau dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

### **5. Kondisi Hidrologi**

Secara Hidrologi Kota Madiun terdiri dari air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah selain dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Selain itu terdapat pula anak-anak Sungai Madiun yaitu: Sungai Sono dan Sungai Piring yang merupakan saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

### **6. Kondisi Klimatologi**

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300 mm/bulan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

## 7. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya, sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang. Madiun merupakan daerah urban, sehingga dominasi penggunaan lahannya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo. Sebagai kota urban, Kota Madiun pada tahun 2022 memiliki kawasan terbangun seluas 2.100 Ha atau 63,20% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 1.223 Ha atau sekitar 36,80% dari luas kota yang terbagi atas sawah seluas 884 Ha dan lahan pertanian non sawah seluas 339 Ha.

**Tabel 2. 1 Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2018-2022**

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kawasan Tidak Terbangun						
1.	Sawah	905	892	892	890	884
2.	Lahan Pertanian Non Sawah	372	372	372	359	339
Kawasan Terbangun						
1.	Permukiman beserta Fasilitasnya	2.046	2.059	2.059	2.074	2.100
Luas Lahan Keseluruhan		3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2022

## 8. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Madiun telah disiapkan beberapa kawasan pengembangan seperti kawasan pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Pengembangan pertanian Kota Madiun melalui padi dan palawija dengan luas lahan yang dipertahankan seluas 892 Ha yang tersebar ditiga kecamatan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kedaulatan pangan. Selanjutnya pengembangan perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.

Pemerintah Kota Madiun telah mempersiapkan kawasan pengembangan perkebunan seluas 114 Ha dan kawasan pengembangan industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Selanjutnya perlu adanya perhatian dan pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan. Yang perlu diperhatikan dari pengembangan kawasan untuk permukiman yaitu munculnya pemukiman liar dan kepadatan penduduk dimasa mendatang. Terakhir kawasan pengembangan aktivitas lainnya terdiri dari kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km<sup>2</sup>, dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

## 9. Wilayah Rawan Bencana

Dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Hasil analisis kajian resiko bencana Kota Madiun Tahun 2022 didapat beberapa potensi resiko bencana yang mungkin terjadi yaitu :

- a) Potensi Bahaya Banjir  
dengan sebaran :

**Tabel 2. 2 Hasil analisis kajian resiko bencana Kota Madiun Tahun 2022**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	193,30	-	2,75	196,05	RENDAH
2	Demangan	106,09	48,78	74,5	229,37	RENDAH
3	Josenan	22,36	37,72	84,65	144,73	TINGGI
4	Kejuron	34,71	42,63	84,52	161,86	TINGGI
5	Kuncen	0,12	17,96	24,25	42,33	TINGGI
6	Manisrejo	32,5	98,83	35,31	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	27,49	18,53	81,11	127,13	TINGGI
8	Pandean	92,20	39,34	2,60	134,14	RENDAH
9	Taman	87,42	36,68	5,4	129,5	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	-	29,06	58,22	87,28	TINGGI
11	Sukosari	-	7,57	59,74	67,31	TINGGI
12	Klegen	2,01	44,08	40,97	87,06	SEDANG
13	Rejomulyo	-	28,5	182,47	210,97	TINGGI
14	Pilangbango	2,53	27,5	88,31	118,34	TINGGI
15	Tawangrejo	2,57	71,52	83,43	157,62	TINGGI
16	Kanigoro	2,14	68,62	74,94	145,7	TINGGI
17	Kartoharjo	0,10	57,57	23,72	81,39	SEDANG
18	Kelun	4,81	50,83	74,72	130,36	TINGGI
19	Mangunharjo	36,50	58,39	79,72	174,61	TINGGI

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
20	Sogaten	45,13	35,29	48,22	128,64	TINGGI
21	Patihan	1,53	50,35	83,78	135,66	TINGGI
22	Ngegong	67,66	39,26	29,28	136,2	RENDAH
23	Winongo	93,12	78,76	40,63	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	-	96,74	40,69	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	1,55	36,07	36,41	74,03	TINGGI
26	Nambangan Lor	10,32	40,63	51,99	102,94	TINGGI
27	Nambangan Kidul	10,42	60,08	55,69	126,19	SEDANG
<b>Kota Madiun</b>		<b>876,58</b>	<b>1.221,29</b>	<b>1.548,02</b>	<b>3.645,99</b>	<b>TINGGI</b>

b) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

dengan sebaran :

**Tabel 2. 3 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	196,06	-	196,06	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,5	-	129,5	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegen	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,4	-	81,4	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	-	174,61	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	-	128,63	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	-	212,51	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	-	74,03	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
<b>Kota Madiun</b>		-	<b>3.677,58</b>	-	<b>3.677,58</b>	<b>SEDANG</b>

- c) Potensi Bahaya Gempa Bumi  
dengan sebaran :

**Tabel 2. 4 Potensi Bahaya Gempa Bumi**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	196,05	-	196,05	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,50	-	129,50	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegen	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,40	-	81,40	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	0,56	174,05	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	17,44	111,19	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	9	126,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	3,42	209,09	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	8,9	128,53	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	3,63	70,4	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
<b>Kota Madiun</b>		<b>42,95</b>	<b>3.634,62</b>	-	<b>3.677,57</b>	<b>SEDANG</b>

- d) Potensi Bahaya Kekeringan  
dengan sebaran :

**Tabel 2. 5 Potensi Bahaya Kekeringan**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	-	196,05	196,05	TINGGI
2	Demangan	-	-	229,37	229,37	TINGGI
3	Josenan	-	-	144,73	144,73	TINGGI
4	Kejuron	-	-	161,85	161,85	TINGGI
5	Kuncen	-	-	42,34	42,34	TINGGI
6	Manisrejo	-	-	166,64	166,64	TINGGI
7	Mojorejo	-	-	127,14	127,14	TINGGI
8	Pandean	-	-	133,96	133,96	TINGGI
9	Taman	-	-	129,50	129,50	TINGGI
10	Oro-Oro Ombo	-	-	87,28	87,28	TINGGI
11	Sukosari	-	-	67,31	67,31	TINGGI
12	Klegen	-	-	89,58	89,58	TINGGI
13	Rejomulyo	-	-	210,96	210,96	TINGGI



No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
14	Pilangbango	-	-	118,34	118,34	TINGGI
15	Tawangrejo	-	-	157,53	157,53	TINGGI
16	Kanigoro	-	-	175,03	175,03	TINGGI
17	Kartoharjo	-	-	81,40	81,40	TINGGI
18	Kelun	-	-	130,35	130,35	TINGGI
19	Mangunharjo	-	-	174,61	174,61	TINGGI
20	Sogaten	-	-	128,63	128,63	TINGGI
21	Patihan	-	-	135,66	135,66	TINGGI
22	Ngegong	-	-	136,21	136,21	TINGGI
23	Winongo	-	-	212,51	212,51	TINGGI
24	Madiun Lor	-	-	137,43	137,43	TINGGI
25	Pangongangan	-	-	73,44	73,44	TINGGI
26	Nambangan Lor	-	-	103,04	103,04	TINGGI
27	Nambangan Kidul	-	-	126,09	126,09	TINGGI
<b>Kota Madiun</b>		-	-	<b>3.676,96</b>	<b>3.676,96</b>	<b>TINGGI</b>

e) Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit dengan sebaran :

**Tabel 2. 6 Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	196,05	-	-	196,05	RENDAH
2	Demangan	229,37	-	-	229,37	RENDAH
3	Josenan	144,73	-	-	144,73	RENDAH
4	Kejuron	161,85	-	-	161,85	RENDAH
5	Kuncen	42,34	-	-	42,34	RENDAH
6	Manisrejo	166,64	-	-	166,64	RENDAH
7	Mojorejo	127,14	-	-	127,14	RENDAH
8	Pandean	122,96	-	-	122,96	RENDAH
9	Taman	129,5	-	-	129,5	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	87,28	-	-	87,28	RENDAH
11	Sukosari	67,31	-	-	67,31	RENDAH
12	Klegen	89,58	-	-	89,58	RENDAH
13	Rejomulyo	210,96	-	-	210,96	RENDAH
14	Pilangbango	118,34	-	-	118,34	RENDAH
15	Tawangrejo	157,53	-	-	157,53	RENDAH
16	Kanigoro	175,03	-	-	175,03	RENDAH
17	Kartoharjo	81,40	-	-	81,40	RENDAH
18	Kelun	130,35	-	-	130,35	RENDAH
19	Mangunharjo	174,61	-	-	174,61	RENDAH
20	Sogaten	128,63	-	-	128,63	RENDAH
21	Patihan	135,66	-	-	135,66	RENDAH
22	Ngegong	136,21	-	-	136,21	RENDAH
23	Winongo	212,51	-	-	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	137,43	-	-	137,43	RENDAH
25	Pangongangan	74,03	-	-	74,03	RENDAH
26	Nambangan Lor	103,04	-	-	103,04	RENDAH
27	Nambangan Kidul	126,09	-	-	126,09	RENDAH
<b>Kota Madiun</b>		<b>3.677,56</b>	-	-	<b>3.677,56</b>	<b>RENDAH</b>

- f) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi  
dengan sebaran :

**Tabel 2. 7 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	196,05	-	-	196,05	RENDAH
2	Demangan	229,37	-	-	229,37	RENDAH
3	Josenan	144,73	-	-	144,73	RENDAH
4	Kejuron	161,85	-	-	161,85	RENDAH
5	Kuncen	42,34	-	-	42,34	RENDAH
6	Manisrejo	166,64	-	-	166,64	RENDAH
7	Mojorejo	127,14	-	-	127,14	RENDAH
8	Pandean	133,96	-	-	133,96	RENDAH
9	Taman	129,50	-	-	129,50	RENDAH
10	Oro-Oro Ombo	87,28	-	-	87,28	RENDAH
11	Sukosari	67,31	-	-	67,31	RENDAH
12	Klegen	89,58	-	-	89,58	RENDAH
13	Rejomulyo	210,96	-	-	210,96	RENDAH
14	Pilangbango	118,34	-	-	118,34	RENDAH
15	Tawangrejo	157,53	-	-	157,53	RENDAH
16	Kanigoro	175,03	-	-	175,03	RENDAH
17	Kartoharjo	81,40	-	-	81,40	RENDAH
18	Kelun	130,35	-	-	130,35	RENDAH
19	Mangunharjo	174,61	-	-	174,61	RENDAH
20	Sogaten	128,63	-	-	128,63	RENDAH
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	212,51	-	-	212,51	RENDAH
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	74,03	-	-	74,03	RENDAH
26	Nambangan Lor	103,04	-	-	103,04	RENDAH
27	Nambangan Kidul	126,09	-	-	126,09	RENDAH
<b>Kota Madiun</b>		<b>3.268,27</b>	<b>409,3</b>	<b>-</b>	<b>3.677,57</b>	<b>RENDAH</b>

- g) Bahaya Pandemi Covid-19  
dengan sebaran :

**Tabel 2. 8 Bahaya Pandemi Covid-19**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	65,91	121,45	5,11	192,47	SEDANG
2	Demangan	94,4	130,76	-	225,16	SEDANG
3	Josenan	58,02	69,96	14,1	142,08	SEDANG
4	Kejuron	85,96	68,38	4,55	158,89	RENDAH
5	Kuncen	19,66	19,64	2,27	41,57	RENDAH
6	Manisrejo	15,62	84,48	63,5	163,6	SEDANG
7	Mojorejo	0,76	50,21	73,84	124,81	TINGGI
8	Pandean	9,1	88,78	33,63	131,51	SEDANG
9	Taman	0,03	71,72	55,37	127,12	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	65,59	20,1	85,69	SEDANG
11	Sukosari	32,40	16,66	17,02	66,08	RENDAH
12	Klegen	-	49,11	38,84	87,95	SEDANG
13	Rejomulyo	57,59	109,78	39,76	207,13	SEDANG
14	Pilangbango	72,65	29,68	13,87	116,2	RENDAH

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
15	Tawangrejo	76,64	78,04	-	154,68	SEDANG
16	Kanigoro	55,57	88,44	27,83	171,84	SEDANG
17	Kartoharjo	-	79,92	-	79,92	SEDANG
18	Kelun	60,28	49,26	18,45	127,99	RENDAH
19	Mangunharjo	67,67	92,46	11,30	171,43	SEDANG
20	Sogaten	68,96	47,94	9,41	126,31	RENDAH
21	Patihan	71,49	61,71	-	133,2	SEDANG
22	Ngegong	55,16	74,15	4,43	133,74	SEDANG
23	Winongo	60,55	117,65	30,45	208,65	SEDANG
24	Madiun Lor	24,02	108,55	2,37	134,94	SEDANG
25	Pangongangan	27,26	45,43	-	72,69	SEDANG
26	Nambangan Lor	14,58	82,06	4,52	101,16	SEDANG
27	Nambangan Kidul	25,07	57,18	41,53	123,78	SEDANG
<b>Kota Madiun</b>		<b>1.119,35</b>	<b>1.958,99</b>	<b>532,25</b>	<b>3.610,59</b>	<b>SEDANG</b>

h) Potensi Bahaya Likuefaksi

dengan sebaran :

**Tabel 2. 9 Potensi Bahaya Pandemi Likuefaksi**

No	Kelurahan	Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Banjarejo	-	196,05	-	196,05	SEDANG
2	Demangan	-	229,37	-	229,37	SEDANG
3	Josenan	-	144,73	-	144,73	SEDANG
4	Kejuron	-	161,85	-	161,85	SEDANG
5	Kuncen	-	42,34	-	42,34	SEDANG
6	Manisrejo	-	166,64	-	166,64	SEDANG
7	Mojorejo	-	127,14	-	127,14	SEDANG
8	Pandean	-	133,96	-	133,96	SEDANG
9	Taman	-	129,50	-	129,50	SEDANG
10	Oro-Oro Ombo	-	87,28	-	87,28	SEDANG
11	Sukosari	-	67,31	-	67,31	SEDANG
12	Klegan	-	89,58	-	89,58	SEDANG
13	Rejomulyo	-	210,96	-	210,96	SEDANG
14	Pilangbango	-	118,34	-	118,34	SEDANG
15	Tawangrejo	-	157,53	-	157,53	SEDANG
16	Kanigoro	-	175,03	-	175,03	SEDANG
17	Kartoharjo	-	81,40	-	81,40	SEDANG
18	Kelun	-	130,35	-	130,35	SEDANG
19	Mangunharjo	-	174,61	-	174,61	SEDANG
20	Sogaten	-	128,63	-	128,63	SEDANG
21	Patihan	-	135,66	-	135,66	SEDANG
22	Ngegong	-	136,21	-	136,21	SEDANG
23	Winongo	-	212,51	-	212,51	SEDANG
24	Madiun Lor	-	137,43	-	137,43	SEDANG
25	Pangongangan	-	74,03	-	74,03	SEDANG
26	Nambangan Lor	-	103,04	-	103,04	SEDANG
27	Nambangan Kidul	-	126,09	-	126,09	SEDANG
<b>Kota Madiun</b>		<b>-</b>	<b>3.677,55</b>	<b>-</b>	<b>3.677,55</b>	<b>SEDANG</b>

**b. Demografi**

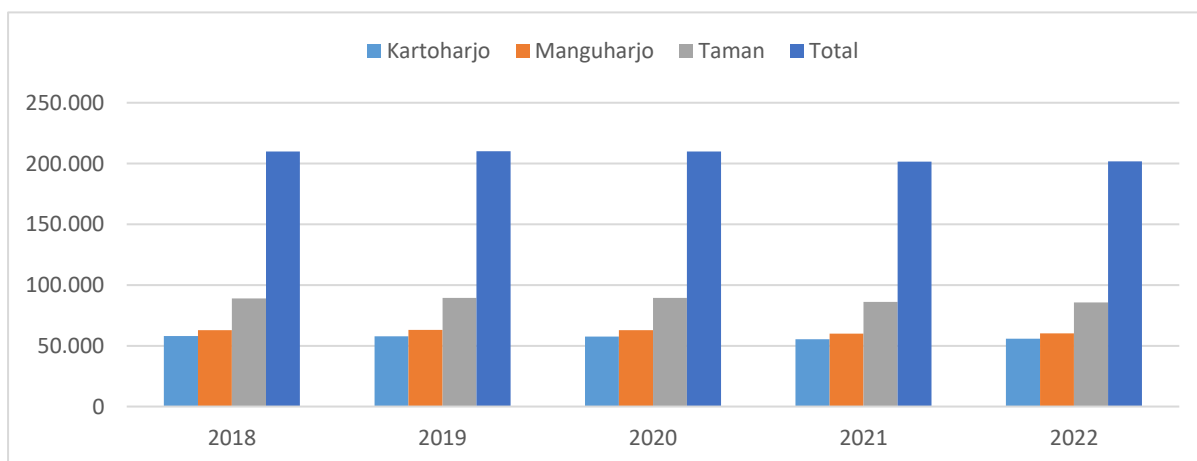
Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 201.760 jiwa, yang tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 55.866 jiwa, Kecamatan Manguharjo 60.167 jiwa, dan Kecamatan Taman 85.727 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kartoharjo	57.927	57.748	57.668	55.458	55.866
2	Manguharjo	62.801	63.017	62.884	59.988	60.167
3	Taman	89.069	89.350	89.398	86.006	85.727
	<b>Total</b>	<b>209.797</b>	<b>210.115</b>	<b>209.950</b>	<b>201.452</b>	<b>201.760</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut Kecamatan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 2**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 diatas, Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018-2022 cenderung merata pada setiap kecamatan. Pertumbuhan jumlah penduduk di beberapa Kecamatan sangat sedikit jumlahnya. Sehingga, selama lima tahun terakhir jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman, disusul Kecamatan Manguharjo, dan terakhir berada pada Kecamatan Kartoharjo.

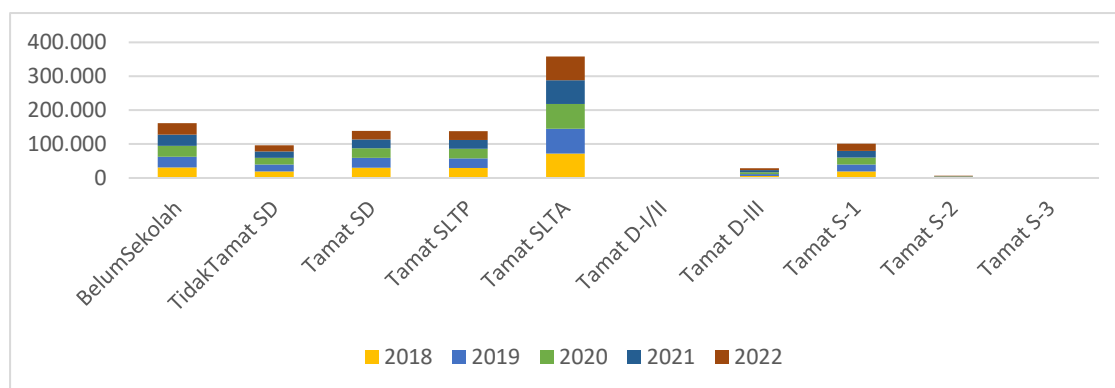
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sampai tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 70.350 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 553 jiwa; D-III 6.033 jiwa; S-1 21.152 jiwa; S-2 1.490 jiwa, dan S-3 47 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2018 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 - 2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	31.258	31.374	32.261	33.177	33.495
Tidak Tamat SD;	19.575	19.887	19.801	18.906	18.483
Tamat SD;	30.169	29.266	28.262	26.006	24.843
Tamat SLTP;	29.487	28.787	28.230	26.027	25.314
Tamat SLTA;	72.405	73.045	73.126	69.421	70.350
Tamat D-I/II;	468	498	502	519	553
Tamat D-III;	5.639	5.761	5.875	5.770	6.033
Tamat S-1;	19.431	20.071	20.442	20.170	21.152
Tamat S-2;	1.334	1.391	1.412	1.415	1.490
Tamat S-3.	31	35	39	41	47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

Adapun grafik jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

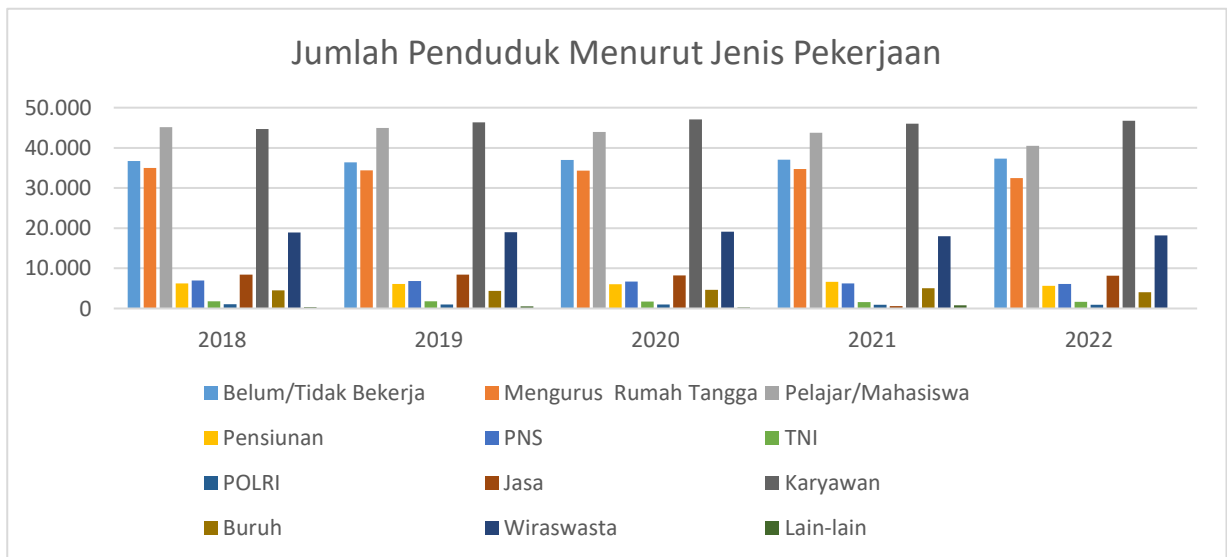
**Gambar 2. 3**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 - 2022**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3 diatas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Madiun kategori tamat SLTA terus meningkat. Begitu pula dengan jumlah penduduk kategori tamat D-I/II, tamat D-III, tamat S-1, tamat S-2, Tamat S-3 yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA. Berikut grafik Jumlah penduduk Kota Madiun menurut jenis pekerjaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2018 – 2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
a. Belum/Tidak Bekerja	36.721	36.390	37.002	37.048	37.292
b. Mengurus Rumah Tangga	34.965	34.412	34.301	34.746	32.468
c. Pelajar/Mahasiswa	45.119	44.940	43.957	43.771	40.495
d. Pensiunan	6.237	6.095	6.046	6.622	5.611
e. PNS	6.992	6.826	6.711	6.252	6.109
f. TNI	1.806	1.771	1.733	1.583	1.632
g. POLRI	1.040	1.027	1.025	955	958
h. Jasa	8.449	8.449	8.213	626	8.140
i. Karyawan	44.679	46.311	46.901	46.023	46.745
j. Buruh	4.489	4.390	4.679	5.022	4.083
k. Wiraswasta	18.945	18.994	19.107	17.992	18.223
l. Lain-lain	355	510	275	812	4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 4**  
**Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2018 - 2022**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.4 diatas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2022 berjumlah 46.745 orang. Sebaliknya penduduk yang Mengurus Rumah Tangga sejak tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan, maka penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya juga cukup banyak yaitu hingga tahun 2022 sebanyak 18.223 orang dan yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 8.140 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada tahun 2022 berjumlah 8.699 orang.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

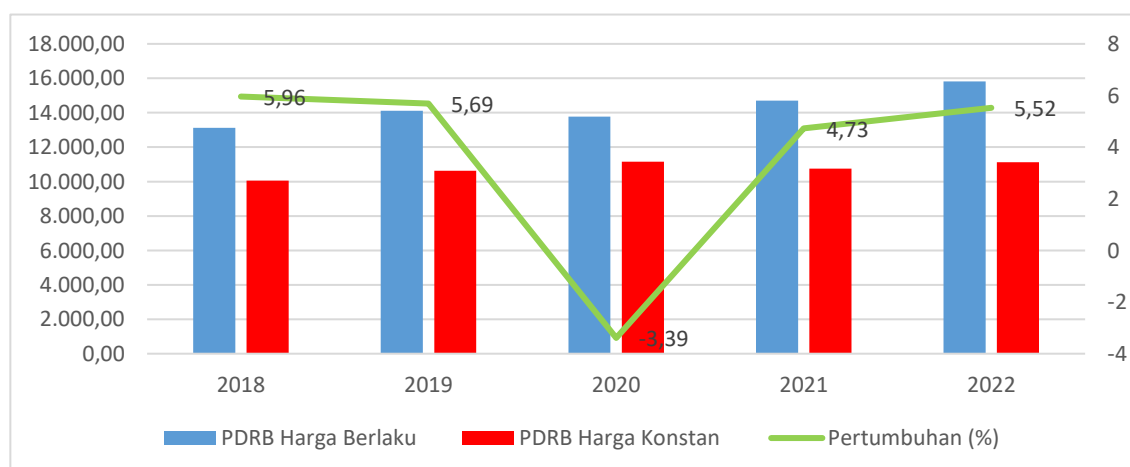
Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total nilai PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 13 Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (Rp. Milyar)**

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019	14.107,33	10.623,07	5,69
2020	13.769,29	10.262,44	-3,39
2021	14.699,83	10.748,10	4,73
2022	15.825,61	11.119,55	5,52

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan Data BPS Kota Madiun, grafik Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 5  
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (Rp. Milyar)**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.5 diatas, Pertumbuhan PDRB Kota Madiun selama periode 2018-2020 menunjukkan tren penurunan, hal ini disebabkan wabah pandemi covid-19, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK mengalami fluktuatif. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2018 mencapai Rp. 13.129,87 milyar dan pada tahun 2020 meningkat mencapai Rp. 13.769,29 milyar. PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari Rp. 10.051,71 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 10.262,44 milyar pada tahun 2020. Pertumbuhan PDRB pada periode tahun 2020-2022 mengalami peningkatan di banding periode sebelumnya 2018-2020.

Salah satu faktor terjadinya tren peningkatan adalah seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19 dan mulai terbukanya aktivitas ekonomi. pada periode tahun 2022 pertumbuhan PDRB sebesar 5,52 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,79 poin dari tahun 2021, dan untuk PDRB ADHB dan ADHK pada periode tahun 2022 berada di posisi 15.825,61 milyar dan 11.119,55 milyar

**b. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 (lima) kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

**Tabel 2. 14 Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

KATEGORI	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
PRA KS	120	0,23%	88	0,17%	88	0,16%	105	0,20%	0	0,00%
KS-I	6.806	12,99%	6.115	11,63%	8.742	15,84%	6.629	12,43%	4.450	8,85%
KS-II	21.322	40,70%	22.001	41,84%	21.822	39,55%	20.168	37,83%	26.414	52,54%
KS-III	19.122	36,50%	19.231	36,57%	19.378	35,12%	18.876	35,41%	17.961	35,73%
KS-III Plus	5.021	9,58%	5151	9,80%	5.145	9,32%	7.532	14,13%	1.450	2,88%
JUMLAH	52.391	100,00%	52.586	100,00%	55.175	100,00%	53.310	100,00%	50.275	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.5 diatas, Persentase Pra KS dan KS-1 pada tahun 2020 sebesar 16,00% atau jumlahnya 8.830 keluarga, sedangkan tahun 2021 jumlahnya 6.734 keluarga mengalami penurunan 2.096 keluarga. Hal ini menunjukkan penurunan kesejahteraan dalam kategori Pra KS dan KS-1 sebanyak 23,74%. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah Pra KS di Kota Madiun mencapai 0 keluarga atau 0,00%. Sedangkan, persentase Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus mengalami fluktuatif tren naik pada tahun 2018 dari jumlahnya 45.465 menjadi 45.825 pada tahun 2022, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun.

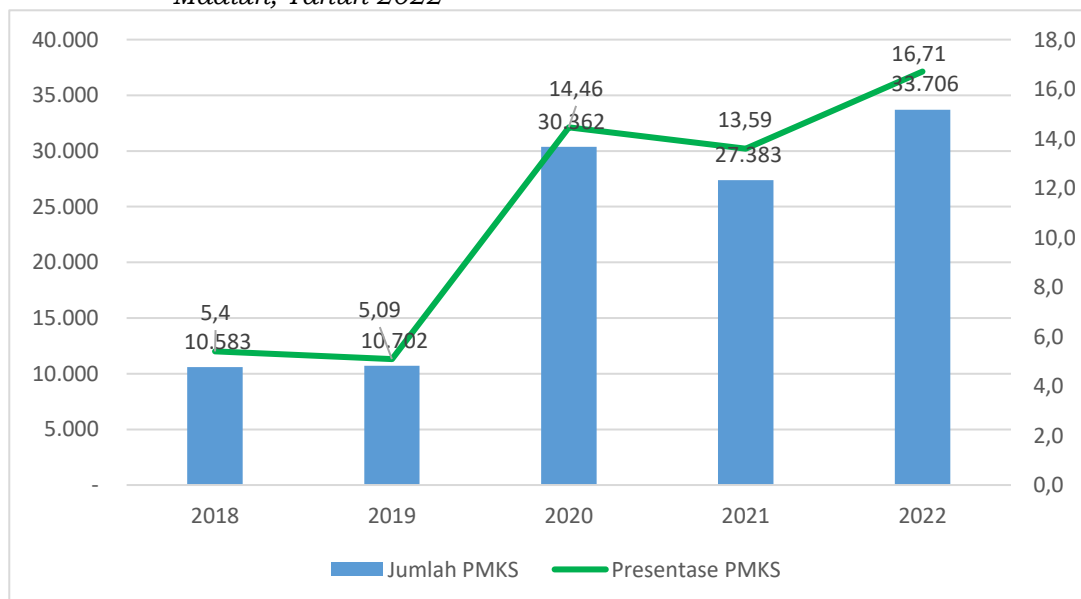


Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah dan Presentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

**Tabel 2. 15 Jumlah PMKS dan Presentase PMKS Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Jumlah PMKS	Presentase PMKS
2018	10.583	5,04
2019	10.702	5,09
2020	30.362	14,46
2021	27.383	13,59
2022	33.706	16,71

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2022



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 6 Presentase PMKS Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.6 diatas, saat ini jumlah PMKS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

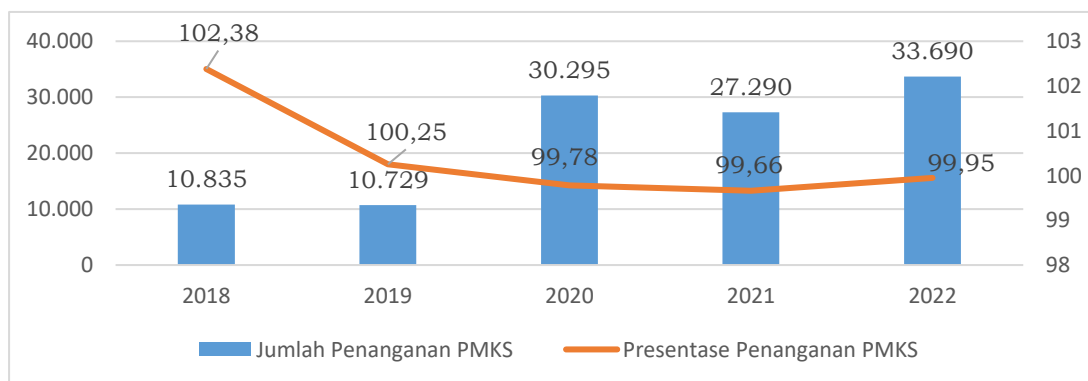
Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 23.123 orang atau sebesar 11,46% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 99,95% dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase PMKS dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 2. 16 Jumlah Penanganan PMKS dan Presentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Jumlah Penanganan PMKS	Presentase Penanganan PMKS
2018	10.835	102,38
2019	10.729	100,25
2020	30.295	99,78
2021	27.290	99,66
2022	33.690	99,95

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2022



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 7 Jumlah PMKS Kota Madiun Tahun 2018-2022**

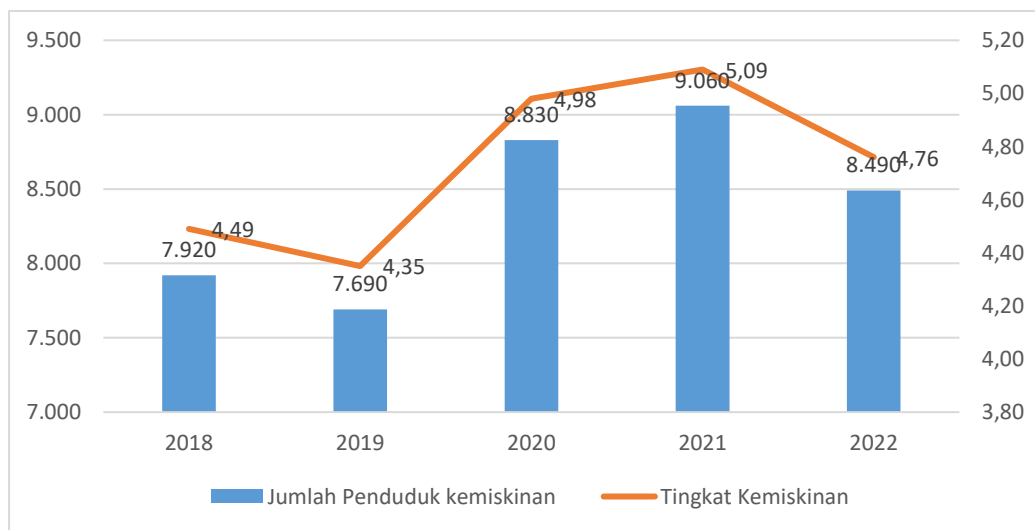
Sebagaimana termuat pada Tabel 2.7 dan Gambar 2.7 diatas, bahwa berdasarkan data dan grafik diatas, tahun 2018 dan tahun 2019 seluruh jumlah PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani, bahkan persentase penanganan PMKS mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan jumlah PMKS yang cukup signifikan dikarenakan banyak dari masyarakat yang mengajukan sendiri untuk dimasukkan sebagai PMKS dengan berbagai alasan dan latar belakang. Sehingga pada tahun 2022 jumlah PMKS menjadi sebanyak 33.706 orang dengan penanganan 99,95% .

Selanjutnya terdapat tabel dan grafik tingkat kemiskinan Kota Madiun tahun 2018-2022 sebagai berikut.

**Tabel 2. 17 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Jumlah Penduduk kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
2018	7.920	4,49
2019	7.690	4,35
2020	8.830	4,98
2021	9.060	5,09
2022	8.490	4,76

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022

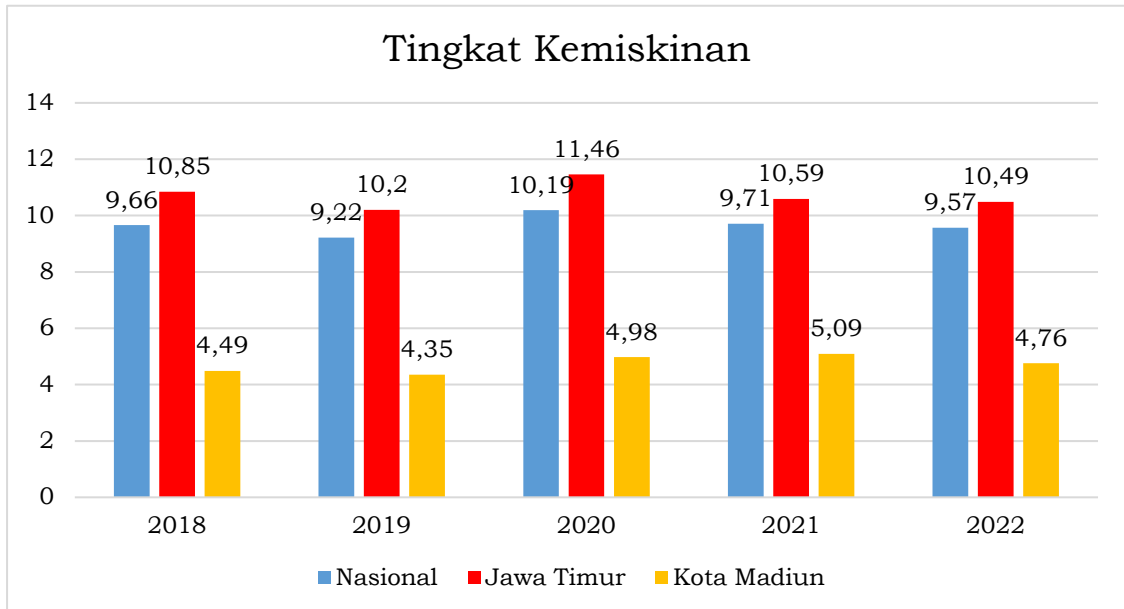


Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 8 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.8 diatas, tingkat Kemiskinan Kota Madiun pada tahun 2018-2022 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 4,89% menjadi 5,09%, dan menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,76%. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah baik melalui refocusing dan realokasi anggaran terkait terjadinya Covid-19.

Kebijakan tersebut setidaknya mencapai hasil jika dilihat dari kondisi perekonomian yang semakin meningkat. Namun disisi lain, penurunan kemiskinan masih memerlukan berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madiun setidaknya melalui program penanganan sosial seperti bantuan sembako, bantuan sosial air bersih, pemberian kesempatan kerja pada anak yatim akibat pandemi, pelatihan UMKM, santuann kematian, asuransi pekerja sektor informal, dan beasiswa mahasiswa.



**Gambar 2. 9 Data Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Tingkat Kemiskinan Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi hal ini dikarenakan daerah perkotaan cenderung mempunyai luas wilayah yang kecil dari pada daerah pedesaan, sehingga intervensi dalam penyaluran program penanganan sosial lebih tepat sasaran.

**c. Fokus Pendidikan**

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat pada Fokus Kesejahteraan Sosial, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 18 Indikator Kinerja Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 – 2022**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>					
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>					
1.1	Angka Melek Huruf	98,87	97,99	97,93	98,96	98,42
1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67
1.3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	144,9	143,28	100,85	101,27	131,02
1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	135,03	170,76	103,62	101,25	114,53
1.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	134,59	135,45	95,29	95,34	122,11
1.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	169,63	131,33	85,8	84,88	101,93
	Pendidikan yang ditamatkan:					
1.7	Angka Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,40	14,40	14,43

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.9 diatas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

### **1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah usia 15 tahun keatas (sampai dengan 59 tahun, sesuai dengan indikator dari -Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nasional) yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf diatas usia 15 tahun, tahun 2018 telah mencapai 98,87% namun pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 97,99%. Pada tahun 2020 angka melek huruf kembali turun menjadi 97,93%.

Meskipun demikian, pada tahun 2021 dan 2022 angka melek huruf naik mencapai 98,96% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 98,42%. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis.

### **2. Rata-rata Lama Sekolah**

Angka rata-ata lama sekolah adalah rata – rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas.

Pada perhitungan metode baru, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 11,11. Tahun 2019 sedikit meningkat menjadi sebesar 11,13, tahun 2020 sebesar 11,14, dan tahun 2021 sebesar 11,37. Dengan nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,11, 11,13, 11,14, dan 11,37 maka artinya bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun baru mampu menempuh atau menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Hal ini disebabkan makin sadar akan pentingnya pendidikan dan adanya suport dari Pemerintah Kota Madiun yaitu Program Pendidikan Dasar, Peningkatan sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP dan Program BOS dari Pemerinah Pusat. Dan untuk tahun 2022 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin dari tahun 2021 sehingga tahun 2022 menjadi 11,67.

### **3. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A**

Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A tahun 2018 hingga tahun 2021 nilainya mencapai lebih besar dari 100%. Sampai pada tahun 2022 angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A juga mencapai lebih dari 100% yaitu di angka 131,02%.

### **4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B**

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B periode tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren fluktuatif lebih dari 100%. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai persentase sebesar 135,03%, terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2019 menjadi 170,76%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga angka persentasenya sebesar 103,62%. Lalu kemudian turun kembali pada tahun 2021 menjadi 101,25%. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan persentase menjadi 114,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang sedang bersekolah di SMP/MTs berapapun usianya diluar usia 13-15 tahun sebesar 114,53%.

### **5. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A**

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A tahun 2019 yakni sebesar sebesar 135,45%. Untuk tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 40,16 poin sehingga persentasenya menjadi 95,29%. Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A meningkat sedikit menjadi 95,34% dan menjadi 122,11% pada tahun 2022. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI menjadi 95,29%, dan untuk tahun 2022 terjadi kenaikan dari tahun 2021 menjadi 122,11% mengindikasikan anak berusia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 122,11%.

## **6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B**

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B sebesar menunjukkan trend penurunan pada tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 sebesar 169,63% kemudian pada tahun 2019 menurun sebesar 38,3 poin sehingga persentasenya menjadi 131,33%, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 45,53 poin sehingga menjadi 85,80%. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,92 poin menjadi 84,88. Tahun 2022, Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B meningkat sebesar 17,05 poin dari tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 menjadi 101,93%.

## **7. Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2018 adalah 14,21, pada tahun 2019 adalah 14,39, pada tahun 2020 dan 2021 capaian angka harapan lama sekolah sebesar 14,40 dan 14,41.

Hal ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kota Madiun sudah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, sehingga angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 14,43.

Penyebab tidak tercapainya kinerja bidang pendidikan angka melek huruf disebabkan salah satunya disebabkan karena perpindahan penduduk, data tersebut terlihat dari kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2022 data dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

### **d. Fokus Kesehatan**

Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada Bidang Urusan Kesehatan selanjutnya dijabarkan pada materi dibawah ini.

#### **1. Angka Kematian Ibu (AKI)**

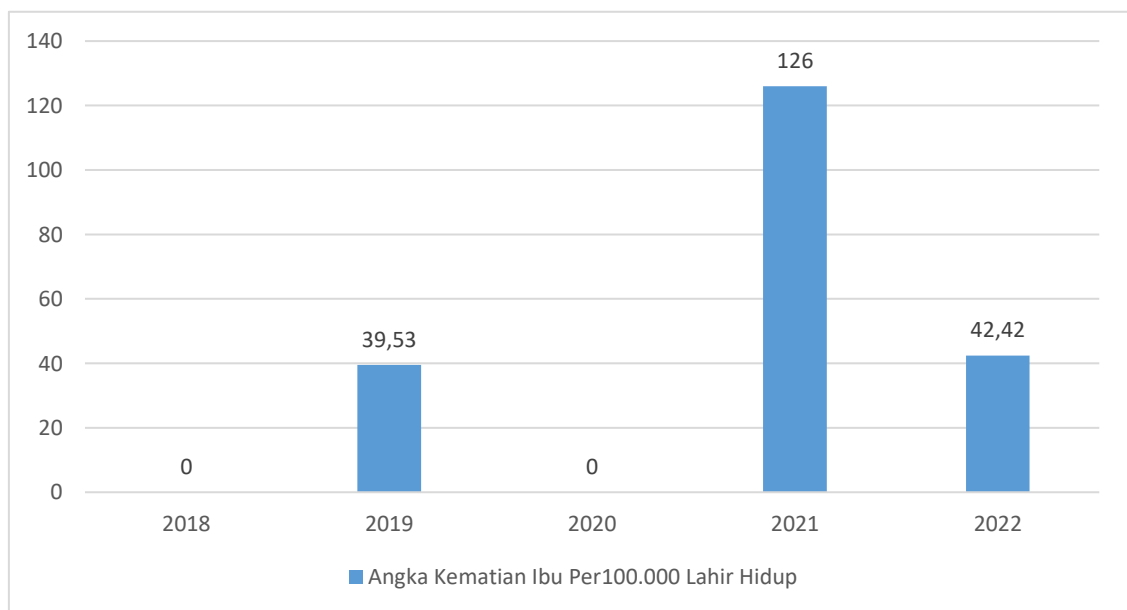
Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 19 Angka Kematian Ibu di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Lahir Hidup	2.561	2.530	1852	2.382	2.357
2	Jumlah Kematian Ibu	0	1	0	3	1
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	0	39,53	0	126	42,42
4	Target RPJMD Angka Kematian Ibu Per 100.000 Lahir Hidup	44,97	38,59	42,09	42,09	42,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.10 diatas, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 lahir hidup pada tahun 2018 dan 2020 di Kota Madiun tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 39,53 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan terdapat kematian ibu sebanyak 42,42 ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Secara absolut jumlah kematian ibu tersebut sebanyak 1 orang ibu. Terjadi penurunan angka kematian ibu pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dari jumlah secara absolut sebanyak 3 orang ibu pada tahun 2021 menjadi 1 orang ibu pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Kota Madiun untuk bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pelayanan langsung. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2022

**Gambar 2. 10**  
**Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Madiun Tahun 2018 –2022**



Sebagaimana termuat pada Gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa target RPJMD AKI di tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari 44,97 menjadi 42,09. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian ibu adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;
- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi;
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas;
- d. Memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC terpadu yaitu 10 T plus skrining Diabetes Militus (DM), Hipertensi, jantung, hepatitis dan HIV/AIDS di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.
- e. Menjalini kerjasama dengan SpOG terkait pelayanan rujukan pada ibu hamil; dan
- f. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan.

## 2. Angka Kematian Bayi (AKB)

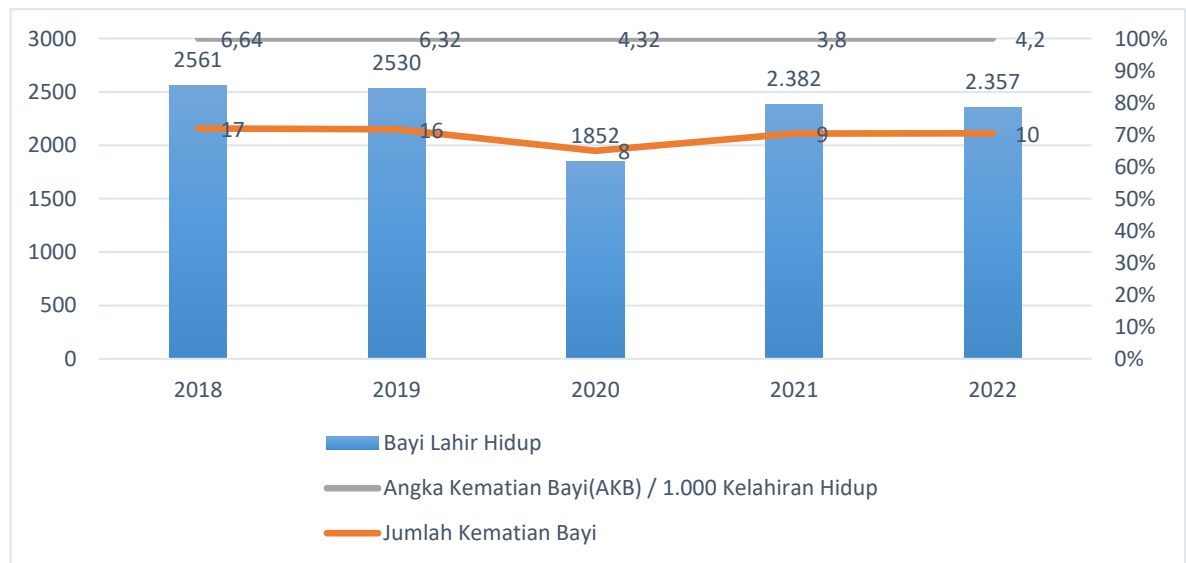
Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 20 Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bayi Lahir Hidup	2561	2530	1852	2.382	2.357
2	Jumlah Kematian Bayi	17	16	8	9	10
3	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup	6,64	6,32	4,32	3,8	4,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.11 di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 17 dan 16 bayi, presentase angka kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sebesar 6,64 dan pada tahun 2019 sebesar 6,32. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 secara absolut jumlah kematian bayi mengalami penurunan. Tahun 2018 presentase angka kematian bayi sebesar 6,64 dengan jumlah absolut sebanyak 17 kematian bayi dan pada tahun 2022 persentase angka kematian bayi sebesar 4,2 dengan jumlah absolut 10 kematian bayi. Adapun tren Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 11**  
**Angka Kematian Bayi di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.10 diatas, terlihat bahwa Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran hidup setelah tahun 2018 mengalami penurunan dan diikuti penurunan jumlah kematian bayi secara absolut. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. PMT bagi ibu hamil untuk mencegah bayi BBLR;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (edukasi kontrol sesuai jadwal); dan
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan bayi.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) diantaranya yaitu:

- a. Peningkatan pengetahuan tenaga kesehatan (dokter dan bidan) terkait dengan pelayanan kesehatan maternal neonatal;

- b. Peningkatan pengetahuan lintas sektor tentang kesehatan ibu dan bayi;
- c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil, mulai ditemukannya ibu hamil kurang energy kalori (KEK) hingga masa nifas;
- d. Berkoordinasi dengan Dokter Spesialis Anak terkait pelayanan rujukan bayi dengan kelainan;
- e. Edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan di awal masa kehamilan dan menjelang persalinan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran masing-masing.

### 3. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

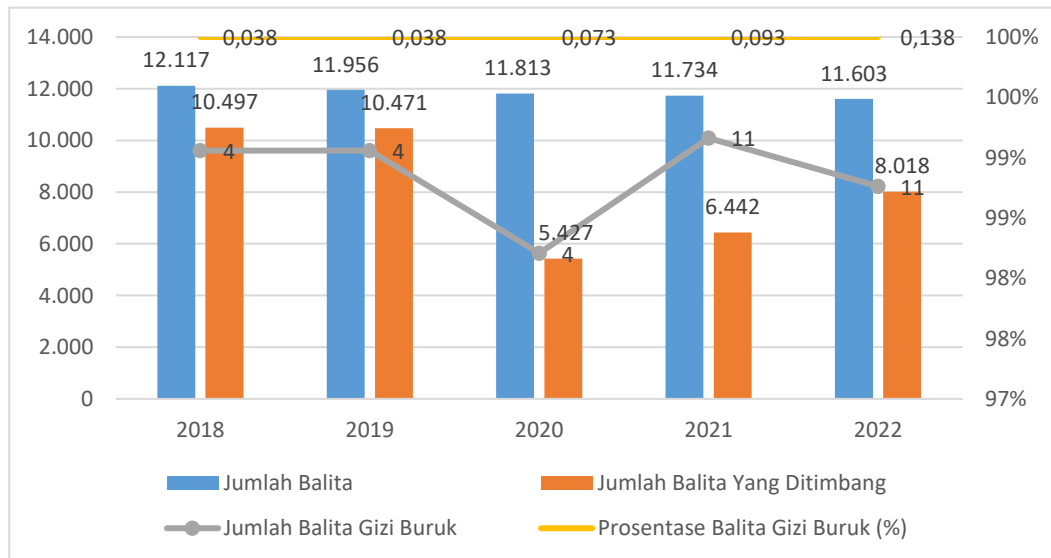
**Tabel 2. 21 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Balita	12.117	11.956	11.813	11.734	11.603
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.497	10.471	5427	6.442	8.018
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	11	11
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,038	0,038	0,073	0,093	0,138

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.12 diatas, terlihat bahwa selama tahun 2018-2022 jumlah balita yang menderita gizi buruk dan persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan.

Adapun tren Balita Gizi Buruk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022.

**Gambar 2. 12**  
**Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.11 diatas, terlihat bahwa persentase Balita Gizi Buruk di tahun 2018 sebesar 0,038 dengan jumlah absolut 4 balita gizi buruk, hal ini berlaku pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 persentase balita gizi buruk mengalami kenaikan sebesar 0,093 dan 0,138 sehingga jumlah absolut balita gizi buruk menjadi 11 balita. Penyebab terjadinya kenaikan persentase balita balita gizi buruk karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang kurang dari 2500 gram sehingga balita tersebut berpotensi tidak maksimal dalam penyerapan nutrisi makanan yang menyebabkan berat badan tidak naik signifikan. Selain itu masih adanya pola asuh dan pola makan yang kurang tepat pada keluarga. Sehingga langkah yang dilakukan untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk adalah:

1. Penimbangan balita di Posyandu setiap bulan sebagai deteksi dini terjadinya penyimpangan pertumbuhan sehingga lebih mudah dalam intervensi sebelum menjadi balita gizi buruk;
2. Pelaksanaan kelas ibu balita;
3. Edukasi kepada masyarakat tentang BBLR dan upaya perbaikan gizi keluarga;
4. Pelatihan cara Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) untuk petugas Puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat;

5. Pemberian Makanan Tambahan dan vitamin bagi balita BGM dan 2T sampai tuntas;
6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil mulai ditemukan KEK sampai dengan masa nifas untuk mencegah kelahiran bayi BBLR.

Data capaian prevelensi gizi kurang di Kota Madiun selalu di bawah target Nasional meupun Provinsi Jawa Timur, Penyebab terdapatnya prevelensi gizi kurang di Kota Madiun ialah faktor ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Selain itu Kemiskinan, ketiadaan pangan, permukiman yang berjejalan, dan ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan juga termasuk faktor yang mempengaruhi pervelensi gizi kurang selama ini pada tataran nasional. Di kota madiun data prevelensi gizi kurang tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. 22 Balita Gizi Buruk di Kota Madiun Tahun 2019-2022**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Prevelensi Gizi Kurang	7,1%	9%	8,4%	9%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

**e. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

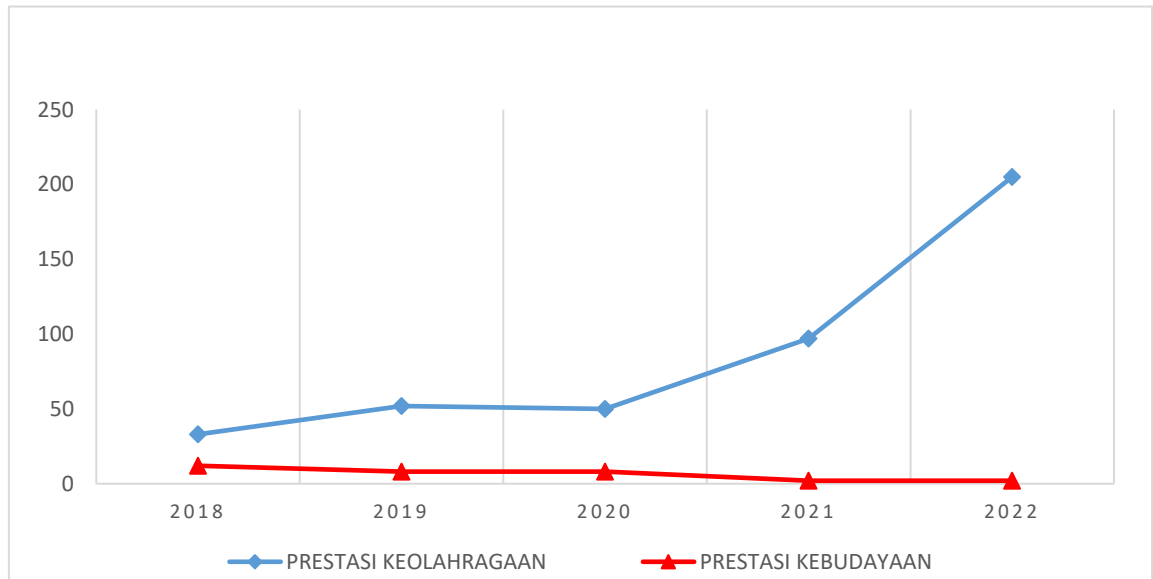
Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam even regional dan nasional, jumlah even/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam even Regional dan Nasional tahun 2022 di bidang olahraga tetap di angka 205 untuk prestasi keolahragaan dan 2 untuk prestasi kebudayaan. Berikut tabel Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2018-2022:

**Tabel 2. 23 Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

KETERANGAN	2018	2019	2020	2021	2022
PRESTASI KEOLAHRAGAAN	33	52	50	97	205
PRESTASI KEBUDAYAAN	12	8	8	2	2

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KotaMadiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.13 diatas, jumlah prestasi keolahragaan terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berbanding terbalik dengan Prestasi kebudayaan yang menurun dari tahun 2018 sampai tahun 2022 yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 13**  
**Prestasi Olahraga dan Kebudayaan Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Selama tahun 2022 prestasi keolahragaan mendapatkan sebanyak 205 medali, yang mana seluruh medali tersebut di dapat dari 13 even kejuaraan tingkat nasional dan internasional dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 medali pada even International (Thailand);
- b. 6 medali pada even Archery Championship;
- c. 10 medali pada even Kasal CUP Archery Open Sidoarjo;
- d. 7 medali pada even Kejurprof Karate Jatim;
- e. 129 medali pada even Kejurkot Taekwondo Kota Madiun 2022;
- f. 1 medali pada even Kejurnas Piala MPR;
- g. 1 medali pada even Kejurprof Master Jati 2022;
- h. 4 medali pada even Peparada Jatim I;
- i. 3 medali pada even Popda XIII Jatim;
- j. 1 medali pada even Piala Gubernur Jatim
- k. 35 medali pada even Porprov Jawa Timur VII;
- l. 3 medali pada even Pra Kualifikasi Popnas 2022; dan
- m. 4 medali pada even Titan Challenge Turnament.

Sehinga dari keseluruhan perolehan medali tingkat nasional dan international dengan total sebanyak 205 medali pada tahun 2022 serta rinciannya, yaitu:

1. Perolehan medali emas sebanyak 67 medali;
2. Perolehan medali perak sebanyak 78 medali; dan
3. Perolehan medali perunggu sebanyak 60 medali.

Prestasi kebudayaan pada tahun 2022 adalah mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Tak benda Indonesia untuk kegiatan Grebeg Maulud dan makan khas Pecel. Sertifikat tersebut diterbitkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan perizinan.

#### a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD yang diharapkan dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Harapan kedepannya dapat menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.14 dibawah ini.

**Tabel 2. 24 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, Tahun 2022**

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
<b>PAUD</b>				
1.	Bangunan PAUD (unit)	21	20	22
2.	Peserta PAUD	542	522	589
3.	Tenaga Pendidik	59	55	67
<b>TK</b>				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1013	972	1464
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	120	113	197

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.14 diatas, data menunjukkan pada tahun 2022 fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 21 unit dengan jumlah peserta didik 542 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 20 unit dengan jumlah peserta didik 522 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 22 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 589 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah kecamatan Kartoharjo terdapat 120 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.013 anak, untuk kecamatan Manguharjo terdapat 113 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 972 anak, dan untuk kecamatan Taman terdapat 197 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.464 anak.

**Tabel 2. 25 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2022**

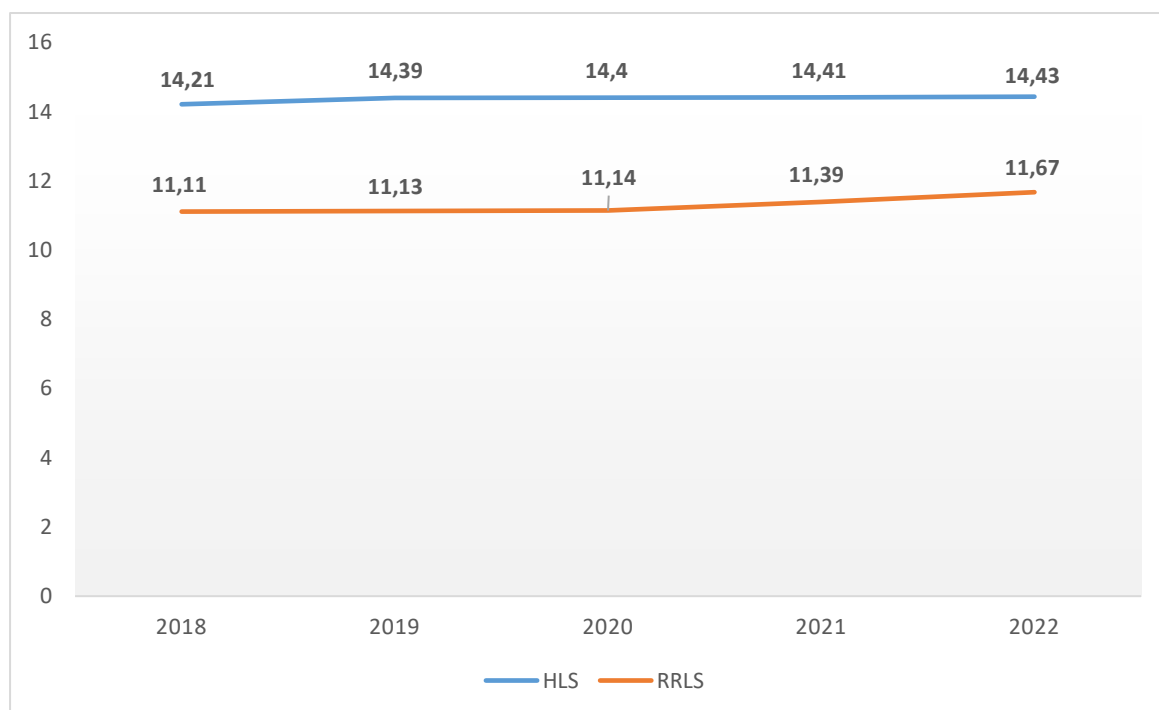
Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	22	27	24	73
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	16	12	41
Madrasah Aliyah (MA)	0	4	1	5

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun , 2022*

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.15 diatas, Jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun tahun 2022 sebanyak 73 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 41 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunann dibeberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata - rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.





Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 14**  
**Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.13 diatas, Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,0044 poin pertahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2022, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun tumbuh 0,112 poin per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun.

Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. RLS Kota Madiun tahun 2022 mencapai 11,67 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar, di antaranya adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 26 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2021**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>					
<b>1.1</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	135,75	113,75	119,83	119,83*
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:39	1:52	1:56	1:16	1:37
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1:16	1 : 15
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:22	1:28	1:24	1:15	1 : 25
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,59	135,45	174,89	130	114,99%
<b>1.2</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	95,24	98,48	97,20	89%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	98,68	92,63	99,5	95%
<b>1.3</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	109	95,61	90,04	198,27%
<b>1.4</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0	0,7	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0	0,7	0	0
<b>1.5</b>	<b>Angka Kelulusan</b>					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	111,35	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	96,1	96,83	97	99,6
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
<b>1.6</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.250	1.427	398	1.212	1.200

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2022.

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.16 diatas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

### **1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS pada tahun 2018 adalah sebesar 140,16%, pada tahun 2019 sebesar 135,75%. Pada tahun 2020 capaian APS menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75%.

Tahun 2021 capaian APS sebesar 119,83. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian sementara APS tahun 2022 119,83%\*.

## **2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah**

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk tahun 2018 capaiannya adalah 1:39, tahun 2019 capainnya adalah sebesar 1:52 dan tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tahun 2021 sebesar 1:16 dan pada tahun 2022 sebesar 1:37. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 37 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2022.

## **3. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar**

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah 1:16 dan untuk tahun 2022 adalah 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15 siswa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

#### **4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Capaian pada tahun 2019 adalah 1:28, tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 capainnya adalah 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Beersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas. Akan tetapi pada tahun 2022, rasio guru/murid per kelas rata-rata mengalami peningkatan menjadi 1:25, sehingga 1 orang guru menangani 25 anak.

#### **5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada tahun 2019 sebesar 135,45%. Selanjutnya untuk tahun 2020 ke tahun 2021 APM turun dari 174,89% menjadi 130% dan menurun 15,11 poin di tahun 2022 menjadi 114,99% dari tahun 2021.

Angka tersebut menunjukkan terdapat sekitar 114,99% anak berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Madiun.

## **6. Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik**

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada tahun 2018 sebesar 96,95%, sedangkan capaian tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik tahun 2018 sebesar 96,36% mengalami peningkatan sebesar 2,32% pada tahun 2019 menjadi 98,68%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada tahun 2022, kondisis sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti turun 4,50% dari tahun 2021.

## **7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.**

APK PAUD pada tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capaian APK PAUD pada tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada tahun 2020 capaian APK PAUD mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian APK PAUD adalah sebesar 90,04%. Akan tetapi pada tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27%.

## **8. Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus sekolah**

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada tahun 2018 dan 2019 adalah 0. Hal ini dapat diartikan bahwa Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

## **9. Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)**

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota.

Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2018 capaiannya sebesar 128,52 %, kemudian capaian menurun sebesar 17,17% pada tahun 2019 menjadi 111,35%. Pada tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

## **10. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (on going formation) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (learning agent). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada table berikut.

**Tabel 2. 27 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Kualifikasi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	SMA	11	11	0	0	0
2	D1	1	4	0	0	0
3	D2	15	17	0	0	0
4	D3	1	6	19	32	7
5	DIV/S1	1.277	1.818	1.804	1.956	1.849
6	S2	109	116	93	102	125

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada table 2.17 diatas, Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 adalah 90,31% dengan jumlah guru sebanyak 1.277 orang, sedangkan capaian pada tahun 2019 adalah 92,19 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan capaian tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang. Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar.

## **11. Pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK**

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru seerta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus.

Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

## **12. Sekolah semua jenjang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu :



- a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- b. Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
- c. Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah – sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

### **13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional**

Capaian pada tahun 2018 adalah 1.250 guru, meningkat pada tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional mencapai 1.212 orang guru dan 1.200 guru.

Dalam hal pelayanan Pendidikan dinas Pendidikan juga menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai standart pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib bidang Pendidikan, pada tahun 2022 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel 2. 28 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	capaian 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	30.270
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	273
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	3.030
4	Pendidikan dasar, Kesetaraan dan Anak Usia Dini	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	1,96%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

Informasi SPM Pendidikan berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agar ditambahkan indikator kinerja urusan bidang Pendidikan yang merujuk pada indeks standart pelayanan minimal bidang Pendidikan yaitu:

**Tabel 2. 29 Capaian Indeks SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021	2022
1	Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	63,82	63,83
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	43,81	46,91
		Iklm keamanan SD	81,60	87,57
		Iklm kebinekaan SD	65,22	96,52
		Iklm inklusivitas SD	76,75	82,72
2	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71,93	77,03
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	57,61	62,11
		Iklm keamanan SMP	85,44	85,60
		Iklm kebinekaan SMP	79,69	95,15
		Iklm inklusivitas SMP	69,98	82,19
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	90,85	91,03
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	93,38	94,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2022

**b. Pelayanan Kesehatan**

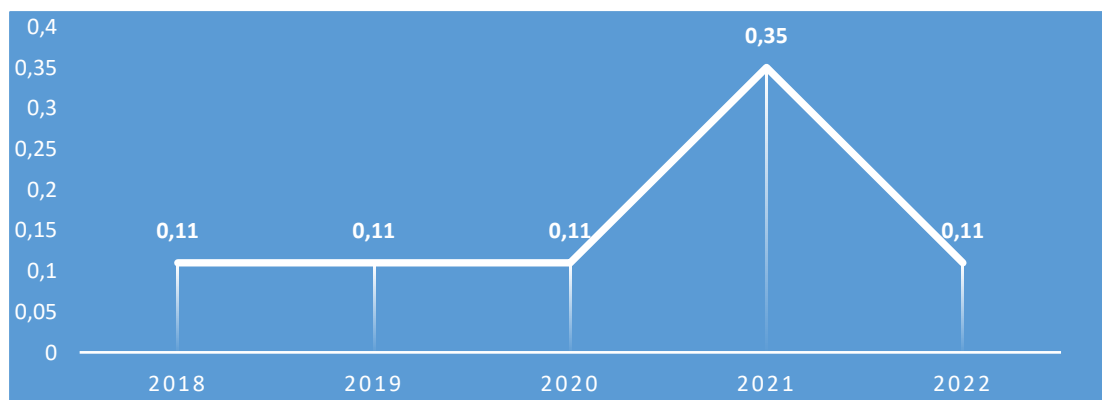
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 30 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk</b>
2018	0,11
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,35
2022	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.18 diatas, selama tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan putsu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan putsu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan di angka 0,11 kembali, Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk namun jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu tetap, sehingga rasio cenderung stabil. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun tahun 2018-2022, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

**Gambar 2.15**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

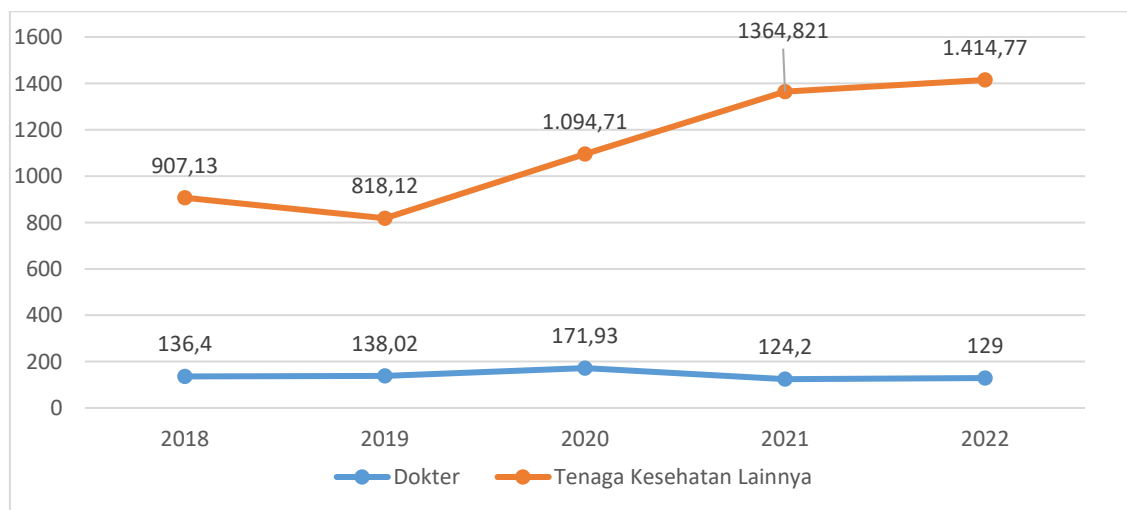
Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel 2. 31 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2018	136,40	906,59
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.19 diatas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,40 hingga 129. Rasio tenaga kesehatan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 berkisar antara 906,59 hingga 1.414,77. Namun, secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuatif dan menurun jika dibandingkan tahun 2018. Rasio tenaga kesehatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 16 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 2.15 diatas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel dibawah ini:

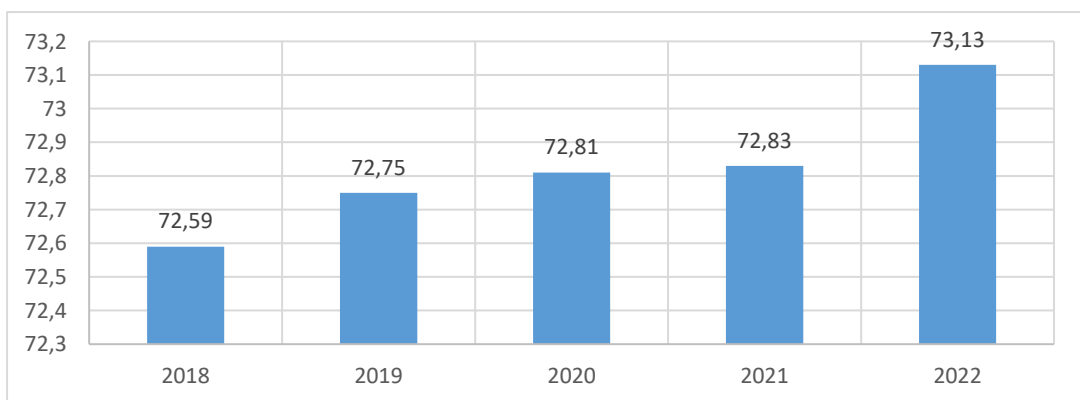
**Tabel 2. 32 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rumah Sakit</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk</b>
2018	8	209.797	0,0381
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun , 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.20 diatas, selama tahun 2018 hingga tahun 2022 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi. Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2018 menuju 2020 di Kota Madiun mengalami sedikit penurunan dari 0,0381 menjadi 0,0380. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk tetapi secara absolut jumlah rumah sakit tetap. Namun, dua tahun setelah 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0017 pada tahun 2021 dan 2022 rasio menjadi sebesar 0,0397.

Salah satau aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 17**  
**Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun Tahun 2018-2022 (tahun)**

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 sebanyak 1 kasus yang terjadi pada 27 kelurahan, dan 2 Kelurahan di Kota Madiun. Dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 33 Jumlah Kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2022**

No	Jenis Kasus KLB	Kelurahan Tempat Kejadian	Waktu Kejadian Diketahui
1	Covid-19	27 Kelurahan	1 Januari 2022 – 31 desember 2022
2	Demam Berdarah Dengue (DBD)	2 Kelurahan	14 Mei 20200 – 16 Mei 2022

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

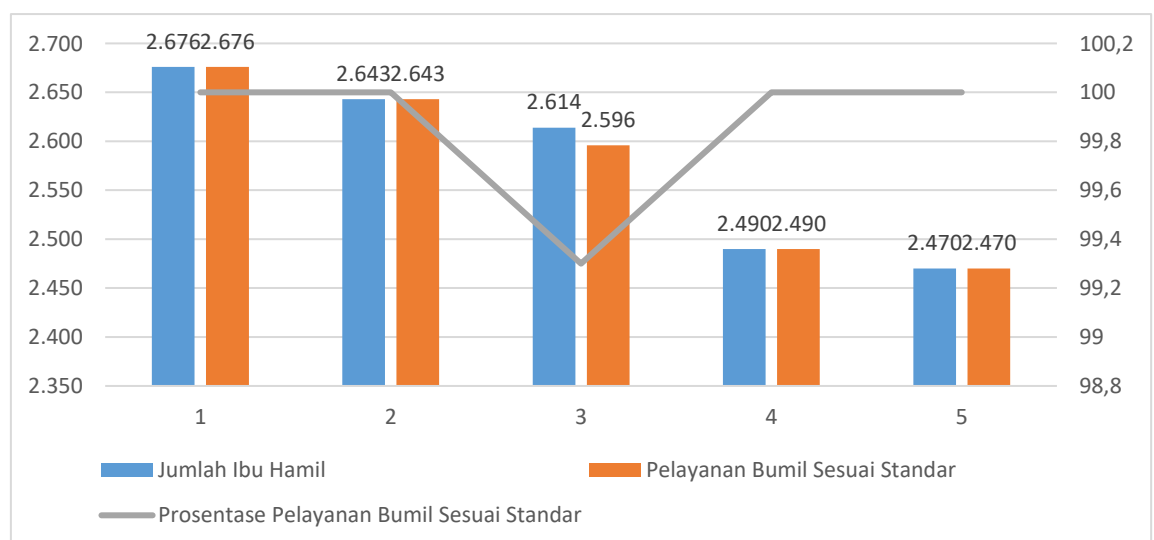
1. Meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. Meningkatkan KIE kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi; dan
3. Meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon.

Berikutnya yang harus diperhatikan adalah pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 2. 34 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Ibu Hamil	2.676	2.643	2.614	2.490	2.470
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.676	2.643	2.596	2.490	2.470
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	100	99,3	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 18**  
**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.22 dan Gambar 2.17 diatas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan bumil sesuai standar di tahun 2022 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas;
- c. terjalin kerjasama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman dan pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

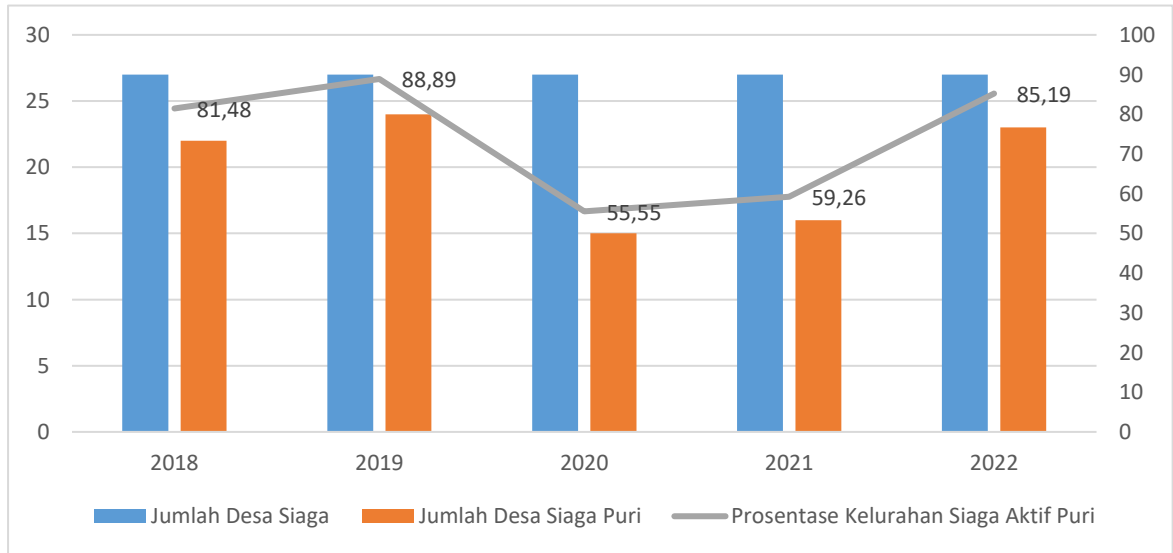
Penduduk Kota Madiun harus dapat mengaskes pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan, maka peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2022:

**Tabel 2. 35 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
1	Jumlah Desa Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Desa Siaga Puri	22	24	15	16	23
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	81,48	88,89	55,55	59,26	85,19

*Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun*

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.23 diatas, jumlah desa siaga puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian kelurahan siaga aktif puri:



Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 19**

**Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

Sebagaimana termuat pada Gambar 2.18 diatas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di tahun 2022 yaitu sebesar 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 8 kelurahan dibandingkan tahun 2021. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerjasama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2. 36 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Pustu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	209.797	210.115	209.950	201.452	201.760
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per 1.000 Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,35	0,119

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.24 diatas, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Pustu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,35 dan tahun 2022 menjadi 0,119. Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 8 (delapan) Rumah Sakit (RS) yaitu 2 (dua) RS Umum milik pemerintah, 1 (satu) RS Paru milik pemerintah, 1 (satu) RS Umum milik TNI AD, 1 (satu) RS Bersalin milik swasta serta 3 (tiga) RS Umum milik swasta, sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas Poned

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 8 (delapan) RS. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini :

**Tabel 2. 37 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	8
7	Jumlah Penduduk	209.797	210.115	209.950	201.452	201.760
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0381	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana termuat pada Tabel 2.25 diatas, terlihat bahwa tahun 2018 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk adalah 0,381. Tahun 2019 dan tahun 2020, nilai rasionya mengalami penurunan menjadi 0,380. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 38 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>	<b>Kesehatan</b>					
2.1	Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,35	0,11
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	138,02	171,93	116,9	129
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	818,12	1.094,71	132,83	1.414,77
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	444	457	478	0	195
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	65,19	68,21	69	69,43	64,88
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	62,96	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	48	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	39,53	0	126	42,42
2.14	Persentase rumah tangga sehat	65,19	68,21	69	99,92	88,41
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	100	100	95,17	113	98,73
2.16	Jumlah kasus KLB	14	9	162	2	2
2.17	Persentase penanganan penyakit	100	87,5	100	100	100
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	59,26	40,74	74,1	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	100	85

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81,84	74,94	84,917	86,02
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	100	50
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	84,01	85,12	86,63	100	90,72
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	100	100
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	94,84	104,67	90,25	118,4	110,81
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	81,48	88,89	55,55	59,26	85,19
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	408	502	550	252
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	84,12	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2	TTU : 81 TPM : 96,67
2.29	Angka kematian bayi	6,64	6,32	4,32	3,8	4,2
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,11	0,3	0,3	0,6	0,1
2.31	IKM rumah sakit	78,17	80,35	80,19	83,39	88,94
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	76,29	78,26	81,52	79,35	88,17
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.26 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

### 1. Rasio Puskesmas dan Pustu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022, rasio jumlah puskesmas dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di tahun 2021 menjadi 0,35 dan Kembali menjadi sebesar 0,11 pada tahun 2022.

### 2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

### **3. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk**

Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri dari 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397.

### **4. Rasio dokter per 100.000 penduduk**

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020. Secara keseluruhan dalam dua tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Adapun pada tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 129 naik 12,1 poin dibanding tahun 2021.

### **5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk**

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun adalah 1.414,77.

### **6. Puskesmas berstandar ISO**

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO adalah Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

## **7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0, sedangkan pada tahun 2022 skor mencapai 195.

## **8. Cakupan masyarakat miskin terlayani**

Tahun 2018 hingga tahun 2022, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

## **9. Cakupan kelurahan siaga aktif**

Kelurahan/Desa siaga aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Kota Madiun pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **10. Persentase rumah tangga ber-PHBS**

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada tahun 2018 persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya pada tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 64,88%. Penurunan capaian di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator Tidak Merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok didalam rumah" menjadi "tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok".

### **11. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun, pada tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100%. Pada tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada tahun 2021 dan 2022, cakupan kelurahan Universal Child Immunization di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

### **12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada tahun 2022 penanganan kasus DBD di kota Madiun juga mencapai 100%.

### **13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup**

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Tahun 2018 dan tahun 2020 tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi pada tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup sehingga persentase pada tahun 2021 adalah sebesar 126%.

### **14. Persentase rumah tangga sehat**

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat tahun 2018 yaitu sebesar 65,19%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,21 dan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Capaian pada tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada tahun 2022. Faktor melandainya pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun.

### **15. Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar**

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun tahun 2018 dan 2019 sebanyak 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada tahun 2022.

### **16. Jumlah Kasus KLB**

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun tahun 2018 sebanyak 14 kejadian, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 9 kejadian. Pada tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 dan 2022 dimana tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian.

### **17. Persentase Penanganan Penyakit**

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun tahun 2018 berhasil mencapai 100% tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 87,5%. Pada tahun 2020 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan presentase penanganan penyakit sebesar 100%.

### **18. Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)**

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada tahun 2018 presentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 44,4% terjadi peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2019 sehingga menjadi 59,26%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 .

### **19. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan**

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85%.

### **20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun**

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun tahun 2018 sebesar 81,32, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 sehingga menjadi 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun mencapai 84,917 dan 86,02.

### **21. Presentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun tahun 2018 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut adalah tidak tercapainya Bed Occupancy Rate (BOR), semakin banyak fasilitas kesehatan rawat inap yang berstatus covid yang tetap masih ada, meskipun trendnya menurun, sehingga ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih dipersiapkan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan : selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan TT (Tempat Tidur) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT.



## **22. Persentase produk makanan lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai**

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun tahun 2018 produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai sebesar 84,01%, pada tahun 2019 sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada tahun 2022. Meskipun capaian tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88.

## **23. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar**

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun tahun 2018 hingga 2022 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

## **24. Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM**

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM tahun 2018 sebesar 94,84%, pada tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 presentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81%.

## **25. Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI**

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI tahun 2018 sebesar 81,48% lalu meningkat menjadi 88,89% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan 2 (dua) kelurahan yang berstrata PURI pada tahun 2019. Pada tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan persentase 85,19%.

## **26. Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan**

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 369 hingga 550 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana.

## **27. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar**

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun tahun 2018 hingga tahun 2022 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

## **28. Persentase TTU dan TPM sehat**

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 84,12% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%.

## **29. Angka kematian bayi**

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,64. Pada tahun 2019 menurun menjadi 6,32, selanjutnya pada tahun 2020 kembali menurun sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada tahun 2022.

### **30. Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta**

Penghitungan angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevelensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode tahun 2018-2022 yaitu mencapai 0,1 saja.

### **31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah**

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari 76,29 pada tahun 2018 menjadi 83,39 pada tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat. Capaian IKM pada tahun 2022 meningkat menjadi 88,94.

### **32. Capaian SPM RSUD**

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM tahun 2018 sebesar 76,29 dan pada tahun 2022 telah mencapai 88,17.

### **33. Persentase desa ODF**

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase desa ODF di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

Dalam hal pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menerapkan pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai standart pelayanan minimal (SPM) pada urusan wajib bidang Kesehatan, pada tahun 2022 capaian indikator SPM tersebut sebagaimana tabel dibawah:

**Tabel 2. 39 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Capaian 2022</b>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.450 orang
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.338 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	2.227 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.081 orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	31.855 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	114.664 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	30.573 orang
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	68.973 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	8.143 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	339 orang
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	5.044 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.780 orang

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Informasi SPM Kesehatan, agar ditambahkan indikator kinerja urusan Kesehatan yang merujuk pada indeks standart pelayanan minimal bidang Kesehatan yaitu:

**Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Madiun Tahun 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2022
1	Pelayanan Rumah Sakit	Presentase Rumah Sakit Terakreditasi	100%
2	Pelayanan Puskesmas	Presentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	100%
		Presentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar	100%
3	Pelayanan Kesehatan Obesitas	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia >18 tahun	1,27%
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria	Jumlah Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	3 Kecamatan
5	Pelayanan Kesehatan Penderita HIV	Presentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	1%
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada balita	9%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2022

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah :

**Tabel 2. 41 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2022**

Kode Indikator (1)	Nama Indikator SDGs (2)	Sumber Data (3)	Satuan (4)	2022	
				Target Pencapaian (5)	Realisasi (6)
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	%	41,48	42,43
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100,13
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	9,12	4,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	4,56	2,1
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data karena membutuhkan survey, dinkes tdk pernah memberikan data		
	Jumlah kasus baru HIV		kasus	148	148
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	118,5

Kode Indikator (1)	Nama Indikator SDGs (2)	Sumber Data (3)	Satuan (4)	2022	
				Target Pencapaian (5)	Realisasi (6)
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	338,6	476
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%	< 1	0,8
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%		9,5
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		17
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	0,1
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	3	3
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	3	3
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47,7	47,7
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	56,1
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data, memerlukan survei untuk menentukan prevalensi		
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		117
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		117
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir.	—	Tidak ada data karena membutuhkan survey		

Kode Indikator (1)	Nama Indikator SDGs (2)	Sumber Data (3)	Satuan (4)	2022	
				Target Pencapaian (5)	Realisasi (6)
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang	26	28
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	62,54	73,32
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4,6	3,79
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinkes, PP dan KB	%	<2,1	1,94
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	8	6,74
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	98	98,73
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%	Tidak ada data	19,92
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	94,1	95,5
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100

Kode Indikator (1)	Nama Indikator SDGs (2)	Sumber Data (3)	Satuan (4)	2022	
				Target Pencapaian (5)	Realisasi (6)
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11,5	30,13
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

**c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 42 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>II</b>	ASPEK PELAYANAN UMUM					
<b>A</b>	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
<b>4</b>	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
<b>4.1</b>	Rasio rumah layak huni	99,65	99,95	99,95	99,66	99,58
<b>4.2</b>	Rasio permukiman layak huni	100	100	100	99,66	99,58
<b>4.3</b>	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	-	85,69	87,12	89,22	90,55
<b>4.4</b>	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	0	0	12,08	31,98	20,43

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.27 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**1. Rasio rumah layak huni**

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH.



Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan – usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni pada tahun 2022 sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{44.641}{44.831} \times 100\% = 99,58\%$$

## **2. Rasio pemukiman layak huni**

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio permukiman layak huni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100 = \frac{44.641}{44.641} \times 100\% = 99,58\%$$

## **3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman**

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini adalah Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman. Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Cakupan Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan.

**Tabel 2. 43 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman, 2019-2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55

#### 4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun nomor : 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, sebagaimana Keputusan tersebut telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat

**Tabel 2. 44 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2022

**d. Pelayanan Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
5. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Tabel 2. 45 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>6</b>	<b>Sosial</b>					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612	49.075	52.260	19.094
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10594	10.573	30.295	27.358	30.690
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,1	100,30%	99,80%	99,66%	99,95%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	10.612	49.075	52.260	19.094
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35	4,98	5,09	4,76
6.7	Indeks Gini	0,36	0,35	0,39	0,345	0,398

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.28 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi**

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2018 hingga 2022 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri dari 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

## **2. Jumlah penerima bantuan**

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada tahun 2018 sebanyak 12.936 orang. Tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan terjadi pada tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada tahun 2020 mencapai 49.075. Penyebab kenaikan tersebut adalah terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia non potensial. dan pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang.

## **3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial**

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebesar 10.594. Tahun 2019 sebesar 10.573, dan meingkat sebesar 30.295 pada tahun 2020. Tujuan dari penanganan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS. Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga, Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2022 sudah tertangani sebesar 30.690.

#### 4. PMKS yang tertangani

Pada tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 cakupan PMKS yang tertangani sebesar 99,66% dan 99,95%.

#### 5. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2022 ditampilkan pada tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel 2. 46 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2022**

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	<b>188</b>	Berupa bantuan uang @ Rp 8.212.500,-
2. Anak Terlantar	orang	<b>731</b>	Berupa bantuan permakanan sebesar 1.638.130.000 kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	<b>16.645</b>	
- Fakir Miskin KPM BPNT		9.676	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH		4.076	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD		2.893	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>17.564</b>	

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

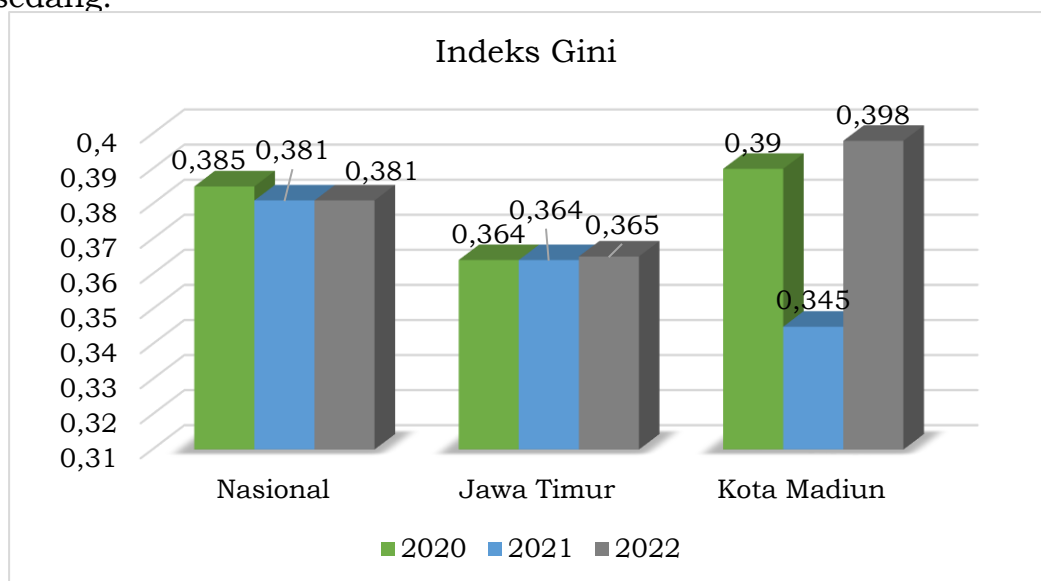
Sebagaimana termuat pada Tabel 2.29 diatas, pada tahun 2022 jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 17.564 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp. 8.212.500,- per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp. 1.638.130.000,-. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

## 6. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Sesuai data BPS angka kemiskinan Kota Madiun tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln. Tahun 2022 angka kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan di Kota Madiun.

## 7. Indeks Gini

Nilai Gini Ratio atau Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2018 - 2021 mengalami fluktuatif tercatat antara angka 0,36 hingga 0,345 dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar sebesar 0,398. Nilai tersebut masih dalam batas ketimpangan sedang.



**Gambar 2. 20 Perkembangan Indeks Gini Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2020-2022**

Perkembangan Indeks Gini di Kota Madiun untuk Tahun 2020 dan 2022 lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Timur, hanya pada Tahun 2021 dapat menduduki di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Sosial, yang diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 47 Bidang Sosial Kota Madiun, 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Capaian 2022</b>
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	737
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	213
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	72
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17

*Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022*

**e. Pelayanan Tenaga Kerja**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2022**

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>7</b>	<b>Tenaga Kerja</b>					
<b>7.1</b>	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	100	100	18	13
<b>7.2</b>	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.55%	66.86%	68,63%	66,87%	66,85%
<b>7.3</b>	Pencari kerja yang ditempatkan	99.1	85,52	73,04	79,15	91,76
<b>7.4</b>	Tingkat pengangguran terbuka	3.85 %	4.01%	8,32%	8,15%	6,39%
<b>7.5</b>	Keselamatan dan perlindungan	13.968	15.976	23.294	25.218	25.505
<b>7.6</b>	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.30 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun**

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100% Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.



Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara tahun 2018-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun berbeda, pada tahun 2021 dan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada tahun 2021 dan 13% pada tahun 2022. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

## **2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK tahun 2019 sebesar 66,86%, mengalami kenaikan sebesar 2,31 poin apabila dibandingkan dengan TPAK tahun 2018 yang sebesar 64,55%. Pada tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurung waktu tahun 2018-2022 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

### **3. Pencari Kerja yang Ditempatkan**

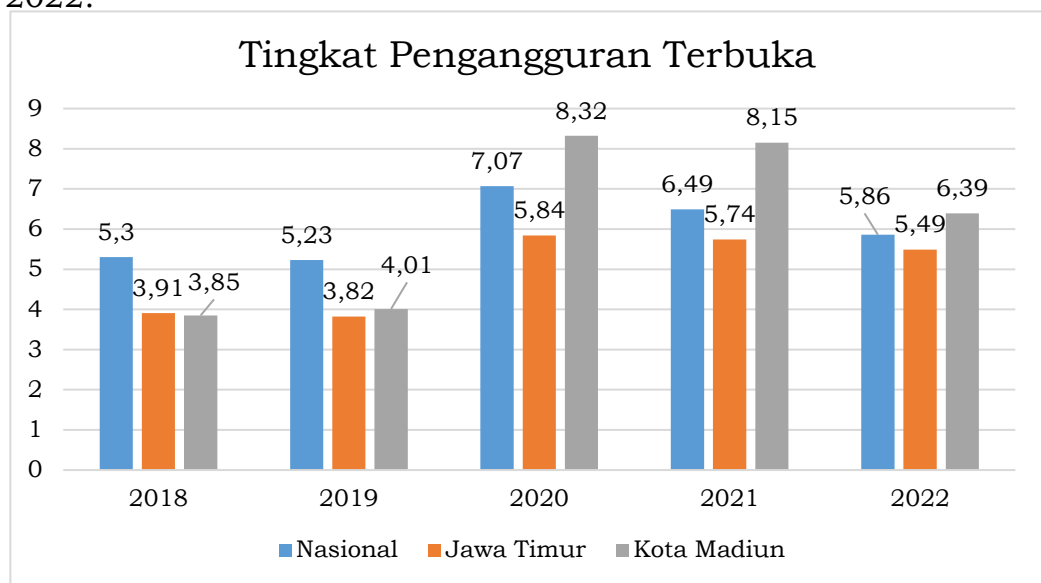
Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2018 sebesar 99,1% sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi yang masih berlangsung dan sebagian besar perusahaan atau pemberik kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada tahun 2022 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 91,76%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

### **4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT pada tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 %. pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan TPT tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) dan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja.

Pada tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 8,15% dan 6,39%.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi covid-19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemic covid-19 tingkat pengangguran terbuka terkerek naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022.



**Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2020-2022**

## 5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Kota Madiun selama tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami kenaikan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 13.968, tahun 2019 meningkat menjadi 15.976, tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, tahun 2021 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.218 pekerja. Tahun 2022 terdapat kenaikan 287 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 25.505 pekerja.

#### **6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah**

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha ditahun 2018-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada tahun 2021 dan 2022, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang terjadi pada tahun 2022.

**f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 49 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>8</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13,32	12,78	12,72	7,83	13,47
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,002	0,017	0,016	0,032	0,00023
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	82,28	77,07	77,18	76,75	78,03
8.5	Indeks pembangunan Gender	93,47	94,05	94,38	94,42	94,57

Sumber : BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.31 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**

Jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk realisasi tahun 2018 sebesar 13,32%, tahun 2019 sebesar 12,78%, tahun 2020 sebesar 12,72%, dan tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN.

**2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi tahun 2018 sebesar 0,002 kemudian meningkat sebesar 0,017 untuk tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan**

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018 hingga tahun 2022 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

**4. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun tahun pada tahun 2018 adalah 82,28 dan menurun pada Tahun 2019 menjadi 77,07. Fluktuatif capaian terjadi tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan nilai pada tahun 2022 sebesar 78,03.

**5. Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 nilai IPG sebesar 93,47, tahun 2019 sebesar 94,05. Nilai IPG tahun 2020 sebesar 94,38 dan tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwasannya IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada tahun 2022.

**g. Pelayanan Perhubungan**

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 50 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>14</b>	<b>Perhubungan</b>					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	95%	104%	94%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	91	100	90	93	98%
14.3	IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas	78,08	85,08	85,9	85,903	87,289
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	61%	64%	67%	84%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	31%	44%	35%	40%	70%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 2.32 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu**

Data menyatakan bahwasannya presentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada tahun 2018 sudah mencapai 95%. Setahun selanjutnya terdapat peningkatan persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2019 sebesar 104% kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi tahun 2021 dan 2022 mencapai 100%. Adapun realisasi 2022 diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2022}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= \frac{2499}{2499} \times 100\% \\ \text{Persentase} &= 100\% \end{aligned}$$

## 2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2021 adalah 93% dan Tahun 2022 adalah 98%, sedangkan target pada tahun 2022 adalah 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 51 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2021 – 2022**

No	NAMA	2021			2022		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	10	83%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	65	58	89%	65	65	100%
JUMLAH		132	123	93%	132	130	98%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun, Tahun 2022

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sarpas LLAJ tahun 2022 yang berfungsi baik}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\%$$
$$\text{Persentase} = \frac{130}{132} \times 100\%$$
$$\text{Persentase} = 98 \%$$

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.33 diatas diatas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 tercapai 90% dan meningkat pada tahun 2021 mencapai 93%. Berselang satu tahun selanjutnya pada tahun 2022, tercatat presentase sarana fasilitas LLAJ di Kota Madiun sudah mencapai 98%.

## 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas tahun 2018 mencapai 78,08. Tahun 2019 IKM terhdap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,08. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan IKM kembali mencapai realisasi 85,90. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,386 poin dengan realisasi 87,289.



#### **4. Persentase Perlengkapan Jalan**

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 61%, dan terdapat 39% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode tahun 2018. Adapun pada tahun 2022, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

#### **5. Kinerja Angkutan Umum**

Adapun kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2018 dan 2019 masih mencapai angka 31% dan 44%, saat masa pandemi, kinerja angkutan umum Kota Madiun tahun 2020 mencapai 35%. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid- 19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada tahun 2022 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

#### **h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga 2022, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 sebesar 93,81% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,17% pada Tahun 2022.

**Tabel 2. 52 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, Tahun 2018-2022**

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2018	93,81
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air dipermukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase draine baik yang ada di kota madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 53 Persentase drainase dalam kondisi baik, Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jaringan Sistem Drainase (Km)	79,09	80,03	60,72	72,78	72,78
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	7,67	7,23	20,24	14,53	13,80
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90,30	90,90	90,40	80,04	58,98

Sumber: Dashbord.madiunkota.go.id, 2022

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2. 54 Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,13%	98,17%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,02%	99,72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

**i. Pelayanan Pertanahan**

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun,

**Tabel 2. 55 Data Layanan Pertanahan, Tahun 2019- 2022**

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2019	2 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
2	2020	0 layanan	-
3	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2022

**j. Pelayanan kepemudaan dan olah raga**

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga Kota Madiun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sarannya berikut:

**Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun Tahun 2018- 2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>18</b>	<b>Pemuda dan Olahraga</b>					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	6	6	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	1	1	1
18.3	Gelandang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	7	3	4	6
18.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	52	79	97	205
18.8	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.266	2.015	2.895	7.835
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, Tahun 2022

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut adalah :

**1. Jumlah organisasi pemuda**

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun tahun 2022 sama dengan tahun 2021 antara lain :

- a. Anggota Koni;
- b. Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI);
- c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
- d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
- e. Anggota Dewan Kesenian.

**2. Jumlah kegiatan kepemudaan**

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

**3. Gelanggang/ balai remaja**

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada tahun 2022 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang dikelola pemerintah Kota Madiun, yaitu :

- a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun ;
- b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
- c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun.
- d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun

**4. Lapangan olah raga**

Jumlah lapangan olahraga yang tersebar di Kota Madiun tahun 2018 hingga tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini tahun 2022 masih berjumlah 83 lapangan.

**5. Jumlah organisasi olahraga**

Tahun 2022 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olah raga.

**Tabel 2. 57 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

## **6. Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada tahun 2022. Cabang olahraga yang diberangkatkan diantaranya cabang olahraga Kurasih, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Tinju, Gulat, Senam, Jujitsu, Balap sepeda, Taekondo, Sambo, Muaythai, Selam, Sepaktakraw, Tenis Lapangan dan masih banyak lagi cabang olahraga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi, nasional dan Internasional yaitu :

- a. 1 medali pada even International (Thailand);
- b. 6 medali pada even Archery Championship;
- c. 10 medali pada even Kasal CUP archery open sidoarjo;
- d. 7 medali pada even Kejurprof Karate Jatim;
- e. 129 medali pada even Kejurkot Taekwondo Kota Madiun Tahun 2022;
- f. 1 medali pada even Kejurnas Piala MPR;
- g. 1 medali pada even Kejurprof Master Jati 2022;
- h. 4 medali pada even Peparada Jatim I;
- i. 3 medali pada even Popda XIII Jatim;
- j. 1 medali pada even Piala Gubernur Jatim
- k. 35 medali pada even Porprov Jawa Timur VII;
- l. 3 medali pada even pra Kualifikasi Popnas 2022; dan
- m. 4 medali pada even Titan Challenge Turnament.

## **7. Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional**

Prestasi olahraga untuk tahun 2021 di tingkat nasional dan regional sebanyak 97 prestasi. Tahun 2022 jumlah prestasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 205 prestasi.

## 8. Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di tahun 2022 juga mencapai 100%.

### k. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2. 58 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No.	Uraian Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi (unit)	37	37	36	36	217
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	49.172	51.986	85.518	88.765	678.962
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	56.648	81.284	108.211	56.178	94.986

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2022

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada tahun 2022 ada sebanyak 217 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung Kembali landai di tahun 2022 menjadi 94.986, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan online berkurang.

## 1. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sasaran urusan tersebut adalah terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis meningkatnya kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Dengan demikian, penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatnya ketersediaan pangan”. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 2. 59 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2022**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>9</b>	<b>Pangan</b>					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	183,38	154,44	138,56	139	217
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,61	138,63	138,63	126,77	126,77*

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Regulasi ketahanan pangan**

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
- b. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.204/23/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 188-401.2014/27/2015 tentang Pembentukan Tim Bina Kegiatan Rumah Pangan Lestari;
- e. Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun menggantikan Surat Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor 060-401.204/001/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.



## **2. Ketersediaan pangan utama**

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2019 sekitar 28,94 poin, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan tahun 2018 ke tahun 2019. Adapun pada tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di tahun 2022 yang berada pada posisi 217.

## **3. Jumlah ketersediaan energi dan protein**

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2019 adalah 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari.

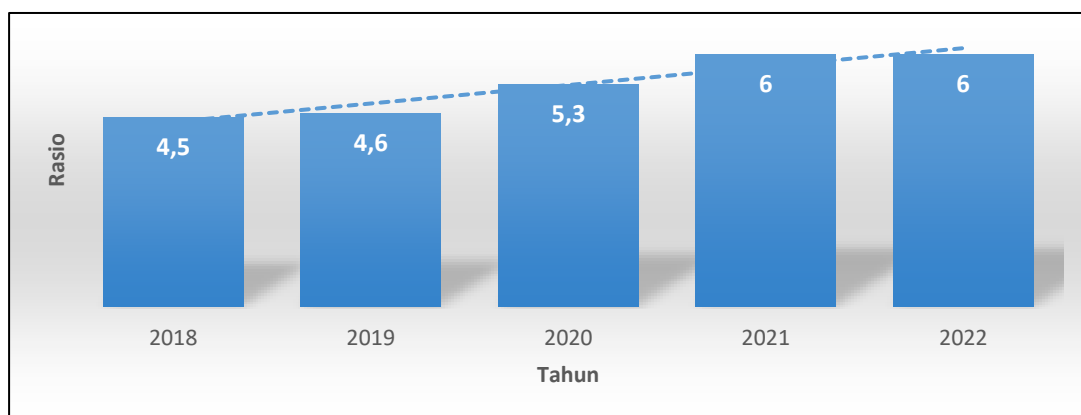
Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018. Pada tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari tahun 2019 yaitu 183,63. Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 126,77% dan 2022 masih berputar diperkirakan masih sama pada tahun 2021.

**m. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

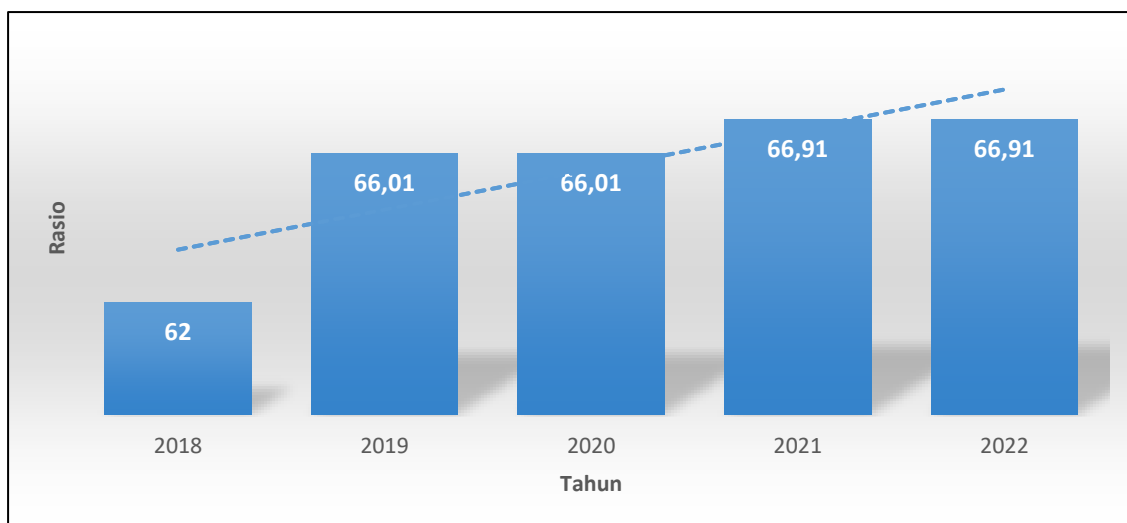
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, Cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun akan mamperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2022 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.19 dan 2.20 di bawah ini.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 22**  
**Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk**  
**di Kota Madiun Tahun 2018-2022**



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

**Gambar 2. 23**  
**Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk**  
**di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.19 dan Gambar 2.20 diatas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada tahun 2021 dan tahun 2022, angka rasio petugas Pol PP di Kota Madiun diangka 6 (enam).

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 60 Intensitas Bencana di Kota Madiun, 2018-2022**

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Banjir	4	11	5	5	9
2.	Angin Puting Beliung	15	66	33	0	0
3.	Kebakaran	48	36	29	13	21

Sumber: Dashbord.MadiunKota.go.id, 2022

Capaian standar pelaynan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 61 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan pencehan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi 2021	Realisasi 2022
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2022

#### n. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

**Tabel 2. 62 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2022**

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
<b>A</b>	<b>Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha</b>			
1	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
2	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)/Perluasan Izin Usaha Industri	3 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
3	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
4	Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
5	Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
7	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
8	Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan AMDAL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
10	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk UKL UPL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
11	Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3)	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
12	Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	5 (Lima)	18 (Delapan Belas)	Tidak Ada
13	Pemenuhan Komitmen Sarana Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
16	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30 (Tiga Puluh)	5 (Lima)	Tidak Ada
17	Izin Pengusahaan Rumah Kos/Pemondokan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
<b>B</b>	<b>Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Non Berusaha</b>			
1	Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
2	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
	-Fungsi Hunian	30 (Tiga puluh)	11 (sebelas)	$L \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Lingkup pembangunan} \times \text{Harga Satuan Retribusi}(20.000/m^2)$
	-Fungsi Usaha	30 (Tiga puluh)	14 (empat belas)	$L \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Lingkup pembangunan} \times \text{Harga Satuan Retribusi}(20.000/m^2)$
	-Fungsi Sosbud	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	$L \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Lingkup pembangunan} \times \text{Harga Satuan Retribusi}(20.000/m^2)$
	-Fungsi Keagamaan	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	$L \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Lingkup pembangunan} \times \text{Harga Satuan Retribusi}(20.000/m^2)$
	-Fungsi Campuran	30 (Tiga puluh)	16 (enam belas)	$L \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Lingkup pembangunan} \times \text{Harga Satuan Retribusi}(20.000/m^2)$
3	izin Reklame Dalam Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pengelolaan Parkir dan Kamar Mandi/WC	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
5	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
6	Izin Reklame			
	- Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	6 (Enam)	Perangkat Daerah Terkait
	- Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	5 (Lima)	
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	30 (Tiga puluh)	11 (Sebelas)	3.500/m <sup>3</sup> /bulan
8	Izin Tenaga Kesehatan (33 Jenis)	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
9	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	3 (Tiga)	1.000/m <sup>2</sup> /bulan
10	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	7.600.000/hari
11	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	2 (Dua)	6.500/m <sup>2</sup> /bulan
12	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	5 (Lima)	11 (Sebelas)	Tidak Ada
13	Pemakaian Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	2.000/m <sup>2</sup> /hari
14	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPTSPKUM, 2022

#### o. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2022, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman yaitu 11 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 238 orang. Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 9 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4782 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

**Tabel 2. 63 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2022**

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Manguharjo	5	5	5	6	9	2908	1874	1874	2818	4782
2	Taman	10	10	9	10	11	286	345	325	412	238
3	Kartoharjo	9	7	7	7	7	308	294	294	311	369
Jumlah		24	22	21	23	27	3502	2513	2493	3541	5389

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2022

**p. Pelayanan Perdagangan**

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2022 terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit dan pasar desa 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.320 pedagang.

**Tabel 2. 64** Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2018-2022

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pasar Umum	11	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	3	3	2	2	2
3.	Pasar Desa	5	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.478	3.485	3.555	3.143	3.320

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2022

**q. Pelayanan Kepariwisata**

Pelayanan kepariwisataan di kota madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2. 65** Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang dibina, 2022

No	Destinasi Pariwisata	Tahun
		2022
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	23 tempat
3	Cafe	31 tempat
4	Rumah Makan	45 tempat
5	Restoran	21 tempat
6	Hotel	36 tempat

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2022

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

**Tabel 2. 66** Pelaku Ekonomi Kreatif, 2022

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2022
1	Seni Pertunjukan	23 Seni (109 pelaku)
2	Fesyen	20 pelaku
3	Kriya (kerajinan tangan)	9 pelaku
4	Kuliner	62 pelaku
5	Fotografi	15 pelaku
6	Musik	5 prlaku
7	Periklanan	1 pelaku

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2022
8	Seni Rupa	1 pelaku
9	Film Animasi	1 pelaku

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun, 2022

**r. Pelayanan Kepegawaian**

Fungsi pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indek profesionalitas asn dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 67 Pelayanan Kepegawaian, 2019-2022**

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,03	46,49	49,72	79,88
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	17,25	34,38	71%	63,22%

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2022

**s. Pelayanan Komunikasi dan Informatika**

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:



**Tabel 2. 68 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2022**

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,10	87,25	97,33	99,25

*Sumber: Dinas KOMunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022*

**t. Pelayanan Statistik**

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan

**Tabel 2. 69 Capaian Pelayanan Statistik, 2019-2022**

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Buku Analisis ASPM	ada	ada	ada	ada
2	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada

*Sumber: Dinas KOMunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022*

**u. Pelayanan Persandian**

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

**Tabel 2. 70 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2022**

No	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	65%	83,57%	96,74%

*Sumber: Dinas KOMunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022*

#### **v. Pelayanan Perkoperasian**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu tahun 2018-2022 sebagaimana terdapat pada table berikut :

**Tabel 2. 71 persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	173	308	155	156	156
Jumlah Koperasi Aktif	172	302	153	154	156
persentase Koperasi Aktif	99,42	98,05	98,71	98,71%	100%

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2022*

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

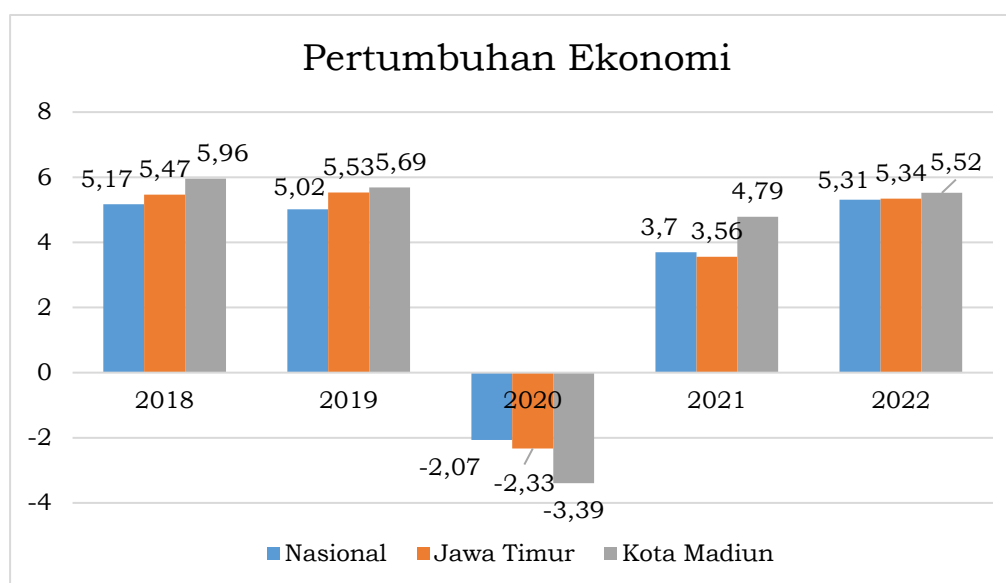
#### a. Fokus kemampuan ekonomi daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

**Tabel 2. 72 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)**

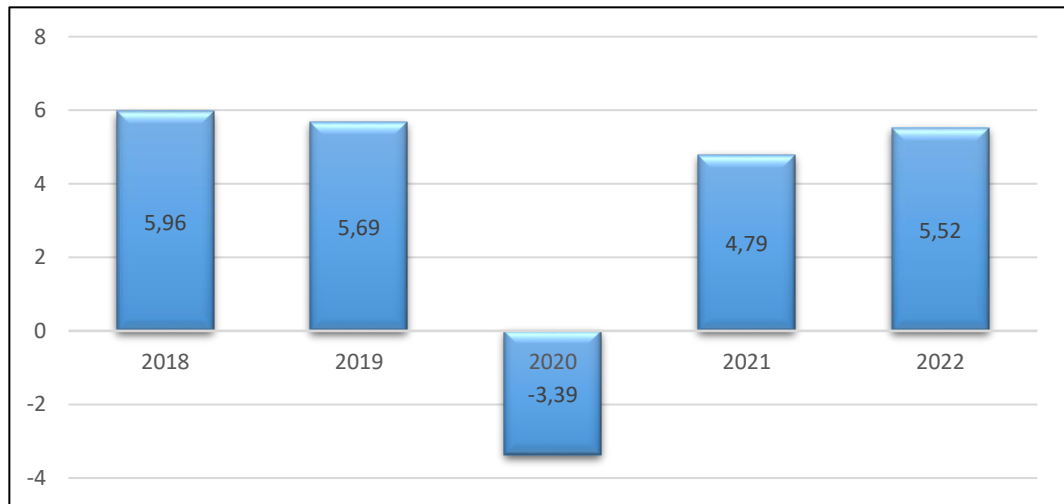
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2018	5,96
2019	5,69
2020	-3,39
2021	4,79
2022	5,52

Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022



**Gambar 2. 24 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2018-2022 (%)**

Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun, untuk kota madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada saat terjadi pandemic covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 perekonomian Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur.



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 25**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2018-2022 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2018 hingga 2020 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan dari 5,96% pada tahun 2018 hingga mencapai minus 3,39% pada tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung diseluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional.

Namun pada saat pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan *new normal* yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di tahun 2021 kembali bangkit berada pada presentase 4,79% dan meningkat lagi menjadi 5,52% di tahun 2022.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 73 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Tahun 2018 - 2022**

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	(0,94)	11,57	-7,26	-5,67	-0,104
Pertambangan dan Penggalian	1,07	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-2,956
Industri Pengolahan	7,01	4,64	-12,84	7,10	2,17	1,616
Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,69	1,98	2,95	7,95	5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	4,52	4,86	6,28	3,50	4,72
Konstruksi	2,03	4,90	-4,71	-0,90	8,24	1,912
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	7,54	6,20	-11,18	10,16	7,98	4,14
Transportasi dan Pergudangan	8,48	9,11	-4,38	7,17	16,90	7,456

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	9,23	8,86	-7,98	3,21	9,96	4,656
Informasi dan Komunikasi	5,34	4,58	16,12	4,75	5,94	7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,79	-0,66	0,47	0,32	1,8
Real Estate	3,57	5,96	0,33	1,19	5,09	3,228
Jasa Perusahaan	5,31	6,10	-3,18	0,77	5,26	2,852
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,48	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,936
Jasa Pendidikan	4,21	7,65	1,97	0,54	0,59	2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,38	7,52	9,98	5,46	3,29	6,726
Jasa Lainnya	5,74	6,92	-10,68	4,08	12,11	3,634
PDRB	5,96	5,69	-3,39	4,79	5,52	3,714

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.39 diatas, Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar (16,12). Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sektor lain seperti Pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa Pendidikan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan negatif Jika di bandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan negatif tertinggi ditempati oleh sektor industri pengolahan sebesar (-12,84%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar (-11,18%), dan sektor jasa lainnya sebesar (-10,68%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi tahun 2022 berada pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai (16,9%), jasa lainnya sebesar (12,11%) dan Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (9,96%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan.

PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 - 2022 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 74 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	105,68	106,81	120,59	108,70	110,35
2	Pertambangan dan Penggalian	2,91	3,05	2,95	2,91	2,72
3	Industri Pengolahan	2.143,80	2.290,02	2.030,28	1.985,25	2.099,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,35	11,22	11,48	11,72	12,89
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	28,51	29,04	30,4	32,65	34,76

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Konstruksi	805,27	834,71	798,95	805,73	935,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.371,83	3.658,65	3.311,32	3.712,41	4.216,70
8	Transportasi dan Pergudangan	449,97	498,89	477,53	516,72	643,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	636,99	705,63	661,55	716,40	811,41
10	Informasi dan Komuniasi	1.752,67	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.355,51	1.432,48	1.423,02	1.462,62	1.583,93
12	Real Estate	344,4	374,2	381,91	388,09	413,30
13	Jasa Perusahaan	90,3	98,17	97,71	100,68	108,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401,37	438,16	452,66	447,71	454,35
15	Jasa Pendidikan	978,13	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,62	189,69	212,57	227,26	240,59
17	Jasa Lainnya	479,56	518,48	474,94	506,98	586,23
<b>PDRB</b>		<b>13.129,87</b>	<b>14.108,33</b>	<b>13.769,29</b>	<b>14.435,43</b>	<b>15.825,61</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.40 diatas, sektor terbesar pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor yaitu sebesar 3.311,32 milyar. Sektor terbesar kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 2.172,16 milyar. Jika dilihat pada tahun 2022, PDRB ADHB tertinggi juga ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar 4.216,70, diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 2.435,44. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan kota industri yang mendorong munculnya bisnis baru yang dapat meningkatkan PDRB sektor lain.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2018 s/d 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 75 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	76,35	75,63	84,38	78,26	73,82
2	Pertambangan dan Penggalian	2,15	2,2	2,08	1,99	1,82
3	Industri Pengolahan	1.795,20	1.878,54	1.637,31	1.532,38	1.565,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,61	8,78	9,04	9,76
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	21,29	22,26	23,34	24,80	25,67
6	Konstruksi	616,99	647,2	616,69	611,17	661,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.368,25	2.515,13	2.233,21	2.460,08	2.656,42
8	Transportasi dan Pergudangan	305,21	330	318,4	341,24	398,92
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	513,72	559,24	514,6	531,10	583,98
10	Informasi dan Komuniasi	1.598,22	1.671,41	1.940,86	2.032,96	2.153,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	904,19	947,54	941,3	945,67	948,75

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Real Estate	248,22	263,02	263,89	267,05	280,64
13	Jasa Perusahaan	72,91	77,36	74,9	75,48	79,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	310,42	322,38	315,18	312,05	310,70
15	Jasa Pendidikan	714	768,65	783,82	788,06	792,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,79	139,55	153,48	161,86	167,19
17	Jasa Lainnya	366,73	392,1	350,22	364,51	408,67
<b>PDRB</b>		<b>10.051,71</b>	<b>10.623,82</b>	<b>10.262,44</b>	<b>10.537,70</b>	<b>11.119,55</b>

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.41 diatas, PDRB ADHK menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sektor yg tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar 2.233,21 milyar. Sektor terbesar kedua adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 1.940,86 milyar. Jika dilihat pada tahun 2018 hingga 2022, PDRB ADHK tertinggi ditempati oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, kemudian disusul oleh sektor informasi dan komunikasi serta di posisi ke-tiga industri pengolahan. Kondisi tersebut tidak jauh beda dengan PDRB ADHB, sektor dengan PDRB ADHK terendah yaitu sektor pertambangan da penggalian.

Tahun 2022 untuk PDRB ADHK ternyata untuk peringkat pertama masih diampu oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor sebesar 2.656,42 milyar. Sedangkan untuk peringkat kedua dalam PDRB ADHK diraih oleh sektor komunikasi dan informasi sebesar 2.153,80 milyar. Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 76 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 - 2022 (%)**

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8	0,76	0,88	0,74	0,70	0,78
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,25	16,23	14,74	15,3	13,27	15,16
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
Konstruksi	6,1	5,92	5,8	5,48	5,91	5,84
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	25,71	25,93	24,05	25,25	26,64	25,52
Transportasi dan Pergudangan	3,42	3,54	3,47	3,52	4,07	3,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,91	4,98	4,8	4,87	5,13	4,94
Informasi dan Komunikasi	13,44	13,12	15,78	15,62	15,39	14,67

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,28	10,32	10,33	9,55	10,01	10,10
Real Estate	2,61	2,62	2,77	2,64	2,61	2,65
Jasa Perusahaan	0,68	0,69	0,71	0,68	0,69	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,04	3,06	3,29	3,05	2,87	3,06
Jasa Pendidikan	7,49	7,45	8,06	7,58	7,18	7,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,31	1,54	1,55	1,52	1,45
Jasa Lainnya	3,64	3,65	3,45	3,45	3,70	3,58
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.42 diatas, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,52% per tahun. Dengan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 2018-2022, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai Kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,16% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 16,25%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di Kota Madiun selama periode 2018-2022 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi terhadap perekonomian.

Adapun dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2022, ternyata untuk sektor yang memberikan dampak paling besar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor dengan angka kontribusi sebesar 26,64%. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua sebesar 13,27% dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 15,39%. Selanjutnya, PDRB perkapita menurut lapangan usaha 2018 s/d 2022 yaitu, sebagai berikut:



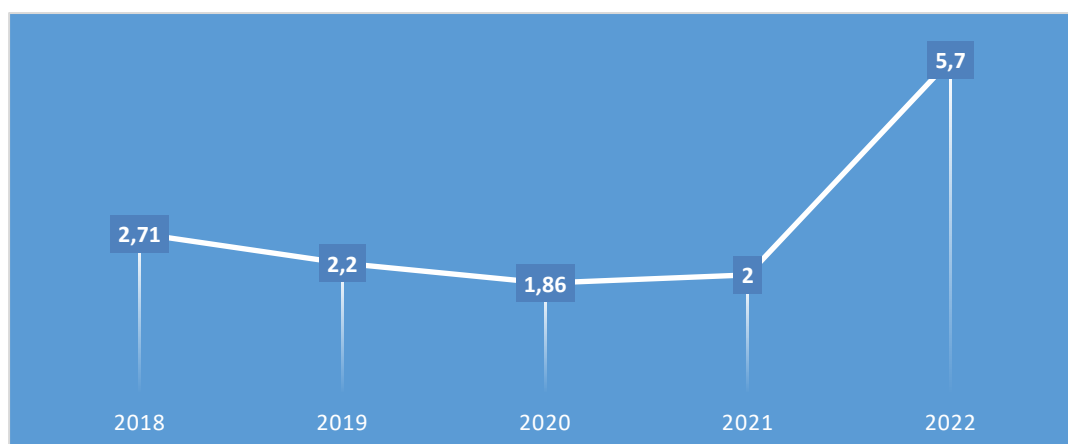
**Tabel 2. 77 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.) Tahun 2018 - 2022**

No	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,80	0,76	0,88	0,74	
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	
3	Industri Pengolahan	16,33	16,23	14,74	15,30	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,21	0,22	0,22	
6	Konstruksi	6,13	5,92	5,80	5,48	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	25,67	25,93	24,05	25,25	
8	Transportasi dan Pergudangan	3,43	3,54	3,47	3,52	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,85	5,00	4,80	4,87	
10	Informasi dan Komuniasi	13,35	13,13	15,78	15,62	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,32	10,15	10,33	9,95	
12	Real Estate	2,62	2,65	2,77	2,64	
13	Jasa Perusahaan	0,69	0,70	0,71	0,68	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	3,11	3,29	3,05	
15	Jasa Pendidikan	7,45	7,57	8,06	7,58	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,34	1,54	1,55	
17	Jasa Lainnya	3,65	3,68	3,45	3,45	
<b>PDRB Per Kapita</b>		<b>74,54</b>	<b>79,7</b>	<b>70,74</b>	<b>74,65</b>	

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2022

PDRB per kapita Kota Madiun menurut lapangan usaha selama tahun 2018-2022, peran sektor informasi dan komunikasi yang menduduki tingkat pertama dengan rata-rata per kapita sebesar 14,47 poin. Peringkat kedua diduduki oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar 12,90 poin dan posisi ketiga disusul sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,19 poin.

Tingkat Inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi di Kota Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 26**  
**Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2018 - 2022 (%)**

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.22 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar 2,71%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,51 poin pada tahun 2019 menjadi 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari tahun 2021 sehingga inflasi kota madiun pada tahun 2022 di angka 5,70%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.

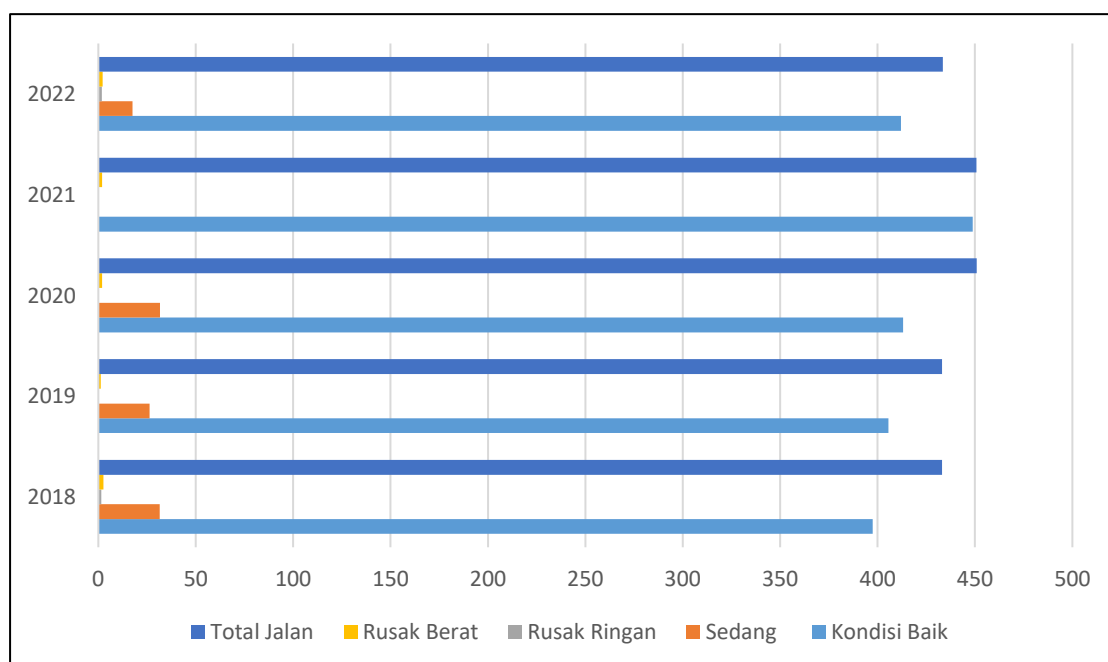
**b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun.

**Tabel 2. 78 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2018	397,48	31,52	1,47	2,625	433,095
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413.100	31,6	0	1.93	450,885
2021	448.820	0	0	1,925	450,745
2022	411.955	17,580	1,751	2,199	433,485

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2022



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2022

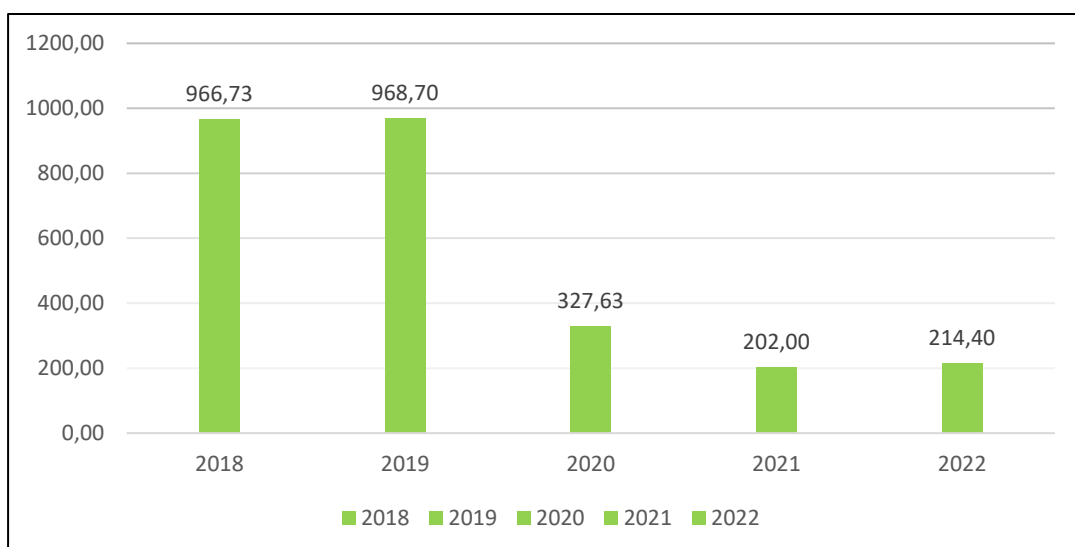
**Gambar 2. 27**  
**Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.44 dan Gambar 2.23 diatas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2018 hingga tahun 2022 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah sepanjang 397,48 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 405,54 km pada tahun 2019. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2022 terdapat penurunan kualitas dari kondisi baik dari 448,820 km pada tahun 2021 turun menjadi 411,955 km pada tahun 2022. Akibat penurunan jumlah jalan kondisi baik tersebut maka untuk jalan yang rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat mengalami kenaikan sebesar 17,580 km untuk jalan dengan rusak sedang, 1,751 km untuk jalan dengan rusak ringan dan 2,199 km untuk jalan dengan rusak berat.

### **c. Fokus Iklim Berinvestasi**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian. Peningkatan tersebut akan menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perkembangan jumlah realisasi investasi di kota Madiun tahun 2018-2022 sebagai berikut:



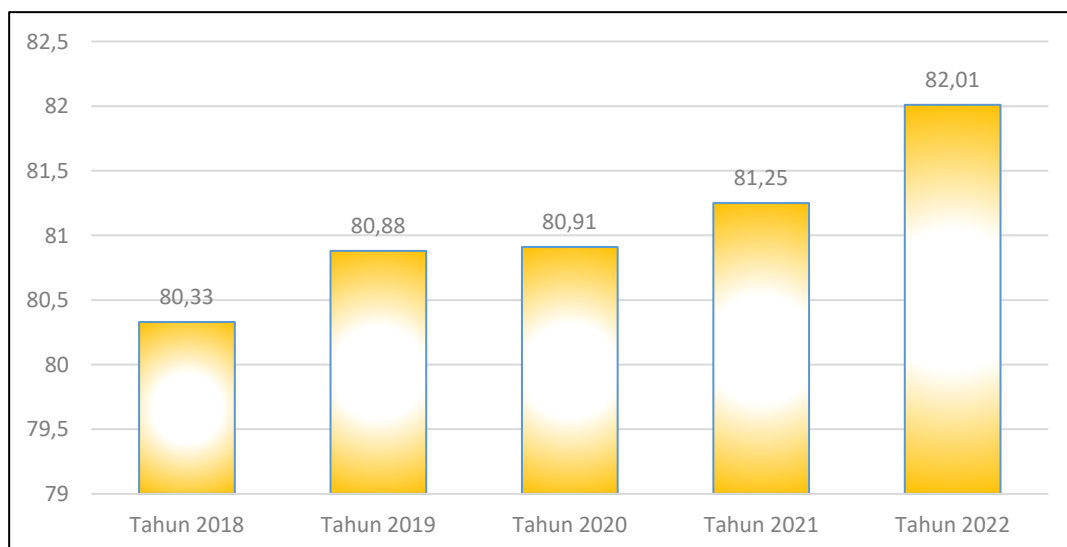
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2022

**Gambar 2. 28**  
**Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.24 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi investasi yang masuk di Kota Madiun pada Tahun 2022 tercatat sebesar 214 Milyar atau melampaui target yang telah ditetapkan senilai 193 Milyar. Sesuai data yang masuk bahwa mayoritas investasi disumbang dari sector perdagangan sekitar 60% dan selebihnya dari sector perhotelan, restoran serta usaha jasa lainnya.

**d. Fokus Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2022

**Gambar 2. 29**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun Tahun 2018 – 2022**

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 2.25 diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

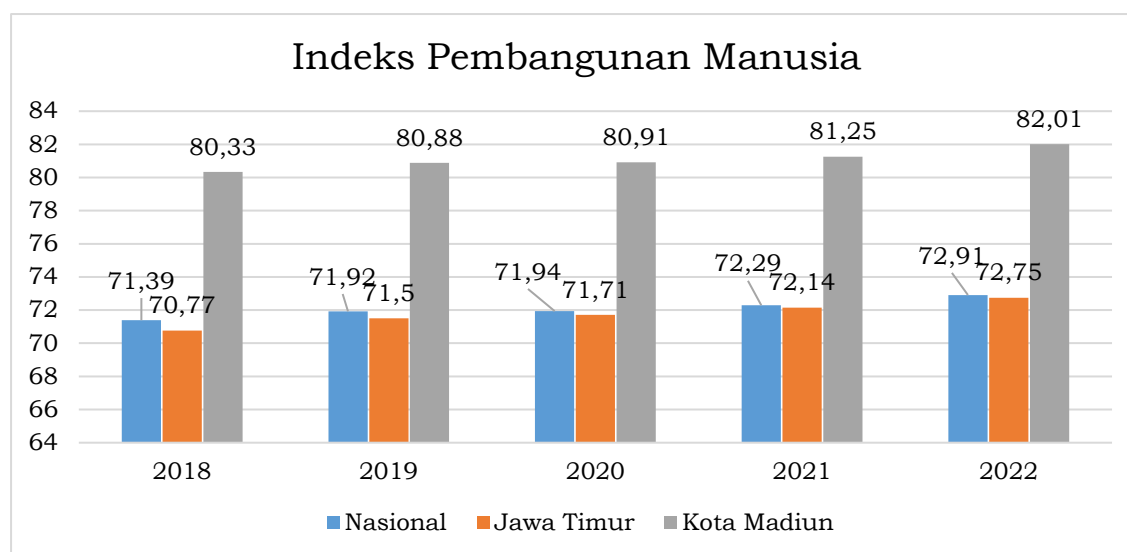
**Tabel 2. 79 Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2018 - 2022**

Indeks	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
IPM	80,33	80,88	80,91	81,25	82,01
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81*
Umur Harapan Hidup	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13
Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78*
Harapan Lama Sekolah	14,21	14,39	14,4	14,41	14,43
Rata-rata Lama Sekolah	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67
Indeks Pengeluaran	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85*
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	15.616	16.040	16.018	16.095	16.503

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2022

\*) angka sementara

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 2.45 diatas, Perkembangan IPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,33 dan pada tahun 2022 mencapai 82,01. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi diatas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ke-tiga setelah kota Surabaya dan Kota Malang di provinsi jawa timur.



**Gambar 2. 30 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2018-2022**

Sekedar menginformasikan, Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun menduduki urutan ke-3 se Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Malang, akan tetapi berada di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

## **2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD berfungsi untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui ketercapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dengan realisasi yang terjadi, dapat ditinjau dari urusan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam urusan wajib ataupun urusan pilihan yaitu, sebagaimana ditampilkan pada table sebagai berikut

**Tabel 2. 80 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kota Madiun**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																											
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																											
1	1	2																									
1	1	2																									
1	1	2																									
1	1	2	2.01																								
1	1	2	2.01	8																							
1	1	2	2.01	3																							
1	1	2	2.01	3																							
1	1	2	2.01	3																							

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
					Peserta Didik (SDN 01 Klegan)																									
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	814.302.638	1	187.929.418	1	167.915.638	0	28.158.372	0	25.783.821	0	34.353.269	1	68.126.188	1	156.421.650	100%	93%	1	344.351.068	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.492.648.000	1	345.785.394	1	322.973.000	0	56.915.116	0	40.297.462	0	73.772.094	1	135.035.607	1	306.020.279	100%	95%	1	651.805.673	100%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	604.104.965	1	157.033.103	1	128.625.965	0	26.187.811	0	21.987.675	0	31.675.771	1	48.219.438	1	128.070.695	100%	100%	1	285.103.798	100%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.420.023.320	1	332.405.839	1	297.487.320	0	57.372.542	0	47.366.647	0	61.621.899	1	94.498.060	1	260.859.148	100%	88%	1	593.264.987	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	555.464.400	1	115.182.546	1	117.946.400	0	19.610.141	0	18.245.244	0	16.383.376	1	31.669.144	1	85.907.905	100%	73%	1	201.090.451	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	654.999.250	1	150.285.792	1	130.511.522	0	33.986.457	0	32.737.948	0	16.098.838	1	52.635.892	1	135.459.135	100%	104%	1	285.744.927	100%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	881.297.450	1	154.993.665	1	212.441.450	0	30.667.250	0	20.359.473	0	29.532.858	1	76.165.077	1	156.724.658	100%	74%	1	311.718.323	100%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	904.402.885	1	179.750.320	1	204.491.885	0	30.957.599	0	27.082.763	0	17.211.411	1	106.242.211	1	181.493.984	100%	89%	1	361.244.304	100%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.257.517.533	1	195.936.847	1	280.000.533	0	39.534.156	0	29.453.801	0	47.230.399	1	82.623.340	1	198.841.696	100%	71%	1	394.778.543	100%	31%	Dinas Pendidikan



2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	573.640.200	1	146.571.710	1	118.396.200	0	19.813.539	0	29.591.605	0	22.739.596	1	42.235.671	1	114.380.411	100%	97%	1	260.952.121	100%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	845.740.200	1	200.283.407	1	361.728.250	0	57.771.879	0	58.331.285	0	72.996.307	1	160.616.560	1	349.716.031	100%	97%	1	549.999.438	100%	65%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.717.043.250	1	332.750.220	1	175.596.200	0	31.297.076	0	34.513.603	0	31.590.890	1	77.164.761	1	174.566.330	100%	99%	1	507.316.550	100%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	627.522.218	1	150.385.839	1	120.669.218	0	29.017.620	0	21.283.240	0	22.970.930	1	22.089.040	1	95.360.830	100%	79%	1	245.746.669	100%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	824.560.240	1	153.894.659	1	167.888.240	0	29.799.665	0	12.638.869	0	40.837.976	1	70.534.622	1	153.811.132	100%	92%	1	307.705.791	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.466.016.000	1	371.273.981	1	299.546.000	0	39.970.000	0	28.860.000	0	64.653.650	1	154.852.714	1	288.336.364	100%	96%	1	659.610.345	100%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.282.983.113	1	274.953.260	1	268.426.113	0	52.371.318	0	20.030.116	0	49.447.254	1	97.277.283	1	219.125.971	100%	82%	1	494.079.231	100%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	679.805.800	1	112.934.451	1	150.417.800	0	23.069.229	0	10.569.938	0	21.573.418	1	84.879.604	1	140.092.189	100%	93%	1	253.026.640	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	722.877.300	1	150.854.265	1	166.271.300	0	19.998.725	0	36.259.681	0	37.739.986	1	64.997.743	1	158.996.135	100%	96%	1	309.850.400	100%	43%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	581.275.495	1	132.816.42	1	108.928.4	0	17.224.7	0	16.893.62	0	20.963.98	1	47.541.78	1	102.624.098	100%	94%	1	235.440.527	100%	41%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	2	2.01	2.3	Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	2.690.392.875	1	422.737.959	1	579.661.875	0	83.186.348	0	68.578.534	0	78.469.729	1	261.863.586	1	492.098.197	100%	85%	1	914.836.156	100%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.381.230.200	1	294.104.830	1	296.886.200	0	44.874.180	0	52.944.524	0	70.505.992	1	113.751.353	1	282.076.049	100%	95%	1	576.180.879	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.757.643.500	1	320.767.061	1	407.673.500	0	54.165.760	0	49.557.511	0	71.031.018	1	184.342.769	1	359.097.058	100%	88%	1	679.864.119	100%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.069.337.553	1	140.965.917	1	267.111.553	0	37.977.510	0	17.993.971	0	37.438.191	1	149.756.801	1	243.166.473	100%	91%	1	384.132.390	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	636.543.225	1	124.437.514	1	107.727.225	0	32.211.790	0	16.946.011	0	31.184.917	1	56.951.620	1	137.294.338	100%	127%	1	261.731.852	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.325.577.395	1	246.008.201	1	296.431.395	0	64.324.820	0	49.193.050	0	52.183.781	1	77.280.000	1	242.981.651	100%	82%	1	488.989.852	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	590.204.715	1	92.977.668	1	125.281.715	0	14.317.856	0	23.693.545	0	30.567.426	1	47.400.234	1	115.979.061	100%	93%	1	208.956.729	100%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.188.359.986	1	227.407.435	1	247.103.986	0	34.957.823	0	26.642.634	0	38.974.120	1	109.451.331	1	210.025.908	100%	85%	1	437.433.343	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	591.994.750	1	108.241.42	1	132.349.7	0	32.749.4	0	18.919.91	0	29.695.65	1	31.049.61	1	112.414.659	100%	85%	1	220.656.086	100%	37%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
					Peserta Didik (SDN 02 Winongo)																									
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	520.047.600	1	121.166.327	1	114.975.600	0	18.424.402	0	33.249.889	0	17.510.909	1	51.949.916	1	121.135.116	100%	105%	1	242.301.443	100%	47%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.240.373.150	1	299.473.620	1	250.205.150	0	48.836.271	0	56.371.771	0	54.279.825	1	83.314.963	1	242.802.830	100%	97%	1	542.276.450	100%	44%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	636.210.350	1	120.169.991	1	154.622.219	0	13.490.534	0	21.203.127	0	23.833.441	1	27.880.431	1	86.407.533	100%	56%	1	206.577.524	100%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.319.842.468	1	178.334.217	1	183.779.577	0	75.898.476	0	41.297.101	0	69.879.651	1	125.814.058	1	312.889.286	100%	170%	1	491.223.503	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	734.403.705	1	158.112.997	1	136.464.705	0	39.946.226	0	17.346.572	0	38.454.059	1	21.417.067	1	117.163.924	100%	86%	1	275.276.921	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.703.057.863	1	338.480.947	1	364.180.863	0	71.588.600	0	29.963.150	0	85.246.800	1	153.029.770	1	339.828.320	100%	93%	1	678.309.267	100%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	591.181.585	1	116.325.285	1	135.707.585	0	24.059.570	0	28.140.661	0	30.219.303	1	40.747.507	1	123.167.041	100%	91%	1	239.492.326	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	926.315.350	1	180.924.012	1	224.678.350	0	25.194.812	0	29.881.114	0	34.818.330	1	105.035.050	1	194.929.306	100%	87%	1	375.853.318	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.271.157.983	1	267.260.793	1	274.315.983	0	54.809.933	0	44.083.838	0	57.900.251	1	107.236.764	1	264.030.786	100%	96%	1	531.291.579	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.628.458.95	1	298.748.06	1	392.289.9	0	74.622.7	0	39.491.98	0	67.227.03	1	111.181.6	1	292.523.383	100%	75%	1	591.271.444	100%	36%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
					Peserta Didik (SDN 02 Pandean)																									
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.821.835.770	1	394.458.246	1	394.878.770	0	80.260.896	0	38.526.168	0	74.447.084	1	155.976.578	1	349.210.726	100%	88%	1	743.668.972	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	909.208.700	1	201.946.017	1	202.044.700	0	37.433.786	0	18.972.753	0	26.789.208	1	63.485.056	1	146.680.803	100%	73%	1	348.626.820	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	2.020.594.865	1	424.409.960	1	422.377.865	0	98.153.627	0	58.421.473	0	96.078.190	1	145.029.138	1	397.682.428	100%	94%	1	822.092.388	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.491.199.660	1	351.159.404	1	297.710.660	0	51.310.385	0	37.977.736	0	54.613.330	1	125.614.955	1	269.516.406	100%	91%	1	620.675.810	100%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.193.113.263	1	213.823.989	1	256.967.263	0	43.286.670	0	20.911.604	0	61.120.721	1	100.760.451	1	226.079.446	100%	88%	1	439.903.435	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	924.425.620	1	207.948.852	1	178.462.101	0	38.398.755	0	22.067.688	0	36.526.341	1	51.981.185	1	148.973.969	100%	83%	1	356.922.821	100%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	1.329.776.983	1	302.501.921	1	261.444.983	0	42.187.432	0	33.042.674	0	52.147.940	1	69.850.744	1	197.228.790	100%	75%	1	499.730.711	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	681.716.075	1	139.693.291	1	149.302.075	0	22.948.401	0	22.654.659	0	25.985.181	1	66.859.961	1	138.448.202	100%	93%	1	278.141.493	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	2.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	695.837.800	1	145.001.062	1	143.761.800	0	13.039.846	0	18.003.137	0	33.746.697	1	58.807.694	1	123.597.374	100%	86%	1	268.598.436	100%	39%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lemba ga	1	917.353.700	1	142.500.531	1	219.139.700	0	22.041.755	0	12.994.407	0	34.244.947	1	77.437.728	1	146.718.837	100%	67%	1	289.219.368	100%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	743.765.750	1	149.982.372	1	162.900.750	0	39.375.479	0	14.434.558	0	23.060.998	1	74.244.826	1	151.115.861	100%	93%	1	301.098.233	100%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	570.522.200	1	120.678.260	1	116.238.200	0	20.745.040	0	21.319.550	0	23.593.166	1	30.099.730	1	95.757.486	100%	82%	1	216.435.746	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	666.400.850	1	151.157.731	1	156.213.850	0	21.462.769	0	27.928.648	0	34.191.371	1	67.243.987	1	150.826.775	100%	97%	1	301.984.506	100%	45%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	743.524.001	1	117.788.784	1	178.078.001	0	23.428.960	0	16.528.451	0	43.285.778	1	65.166.041	1	148.409.230	100%	83%	1	266.198.014	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	56	1.989.882.561	14	188.000.679	14	446.373.078	-	0	1.840.000	7	107.207.800	7	254.179.800	14	363.227.600	100%	81%	28	551.228.279	50%	28%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lemba ga	96	2.899.439.479	23	408.134.863	73	702.949.377	73	2.740.000	73	53.990.305	73	287.925.590	73	283.840.500	73	628.496.395	100%	89%	96	1.036.631.258	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>161.131.292.315</b>	<b>100</b>	<b>17.469.859.523</b>	<b>100</b>	<b>28.245.045.096</b>	<b>0</b>	<b>1.220.794.716</b>	<b>0</b>	<b>2.040.313.414</b>	<b>0</b>	<b>6.899.585.665</b>	<b>100</b>	<b>5.448.367.639</b>	<b>100</b>	<b>15.609.061.434</b>	<b>100%</b>	<b>55%</b>	<b>100</b>	<b>33.078.920.957</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	Lemba ga	188	56.979.002.100	6	5.335.337.391	2	5.942.736.800	0	-	2	536.525.703	2	2.581.318.933	2	2.090.115.660	2	5.207.960.296	100%	88%	8	10.543.297.687	4%	19%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Siswa	6247	13.537.484.000	5651	2.808.018.466	596	3.352.673.800	0	11.519.200	0	1.740.000	596	2.915.540.000	0	23.308.000	596	2.952.107.200	100%	88%	6247	5.760.125.666	100%	43%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.810.408.799	1	909.426.549	1	689.610.270	0	104.123.361	0	135.152.818	0	96.556.842	1	306.648.248	1	642.481.269	100%	93%	1	1.551.907.818	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	4.259.981.150	1	589.412.917	1	749.619.920	0	109.353.142	0	128.667.993	0	157.973.666	1	287.232.542	1	683.227.343	100%	91%	1	1.272.640.260	100%	30%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	2.563.605.100	1	570.146.372	1	466.418.940	0	91.495.970	0	93.847.500	0	111.749.700	1	166.513.685	1	463.606.855	100%	99%	1	1.033.753.227	100%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.365.787.950	1	599.481.467	1	592.594.470	0	92.561.017	0	109.115.244	0	122.258.816	1	164.242.875	1	488.177.952	100%	82%	1	1.087.659.419	100%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	2.825.050.505	1	548.571.905	1	548.282.345	0	131.535.089	0	81.336.764	0	81.090.647	1	191.454.529	1	485.417.029	100%	89%	1	1.033.988.934	100%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.130.943.545	1	625.820.368	1	599.281.345	0	79.010.730	0	114.307.512	0	91.259.035	1	217.597.619	1	502.174.896	100%	84%	1	1.127.995.264	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.154.598.650	1	558.307.846	1	587.589.410	0	79.579.230	0	80.675.730	0	64.955.299	1	220.103.439	1	445.313.698	100%	76%	1	1.003.621.544	100%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	2.251.651.760	1	513.613.448	1	330.371.560	0	49.531.930	0	77.878.191	0	75.773.920	1	96.032.924	1	299.216.965	100%	91%	1	812.830.413	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.291.187.255	1	757.125.470	1	605.483.350	0	43.462.722	0	79.383.282	0	70.967.197	1	208.077.763	1	401.890.964	100%	66%	1	1.159.016.434	100%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.872.945.545	1	712.024.839	1	761.626.905	0	98.919.420	0	124.142.738	0	127.621.143	1	337.263.469	1	687.946.770	100%	90%	1	1.399.971.609	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.059.069.867	1	664.168.594	1	565.397.727	0	126.248.220	0	118.503.431	0	120.854.911	1	134.400.411	1	500.006.973	100%	88%	1	1.164.175.567	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	3.151.822.350	1	594.441.295	1	616.160.250	0	73.235.726	0	98.272.995	0	75.314.017	1	188.761.993	1	435.584.731	100%	71%	1	1.030.026.026	100%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	2.706.472.233	1	539.721.694	1	526.906.113	0	87.803.929	0	106.778.382	0	85.904.508	1	212.256.363	1	492.743.182	100%	94%	1	1.032.464.876	100%	38%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	jumlah lembaga	Lemba ga	1	2.061.109.818	1	428.533.867	1	349.476.658	0	42.415.030	0	80.207.443	0	68.179.281	1	128.097.619	1	318.899.373	100%	91%	1	747.433.240	100%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lemba ga	25	1.149.551.220	23	251.088.984	25	194.077.940	0	-	25	58.877.968	25	5.666.750	0	117.420.500	25	181.965.218	100%	94%	25	433.054.202	100%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	105	2.432.946.145	14	273.096.445	14	522.180.891	0	-	0	-	14	46.601.000	14	305.052.000	14	351.653.000	100%	67%	28	624.749.445	27%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lemba ga	96	731.221.199	23	191.521.606	25	70.970.002	0	-	0	14.899.720	0	-	25	53.788.000	25	68.687.720	100%	97%	48	260.209.326	50%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Lemba ga PAUD yang Terakreditasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>53.056.892.119</b>	<b>100</b>	<b>6.650.159.879</b>	<b>100</b>	<b>4.010.969.105</b>	<b>100</b>	<b>18.962.480</b>	<b>0</b>	<b>44.899.250</b>	<b>0</b>	<b>1.848.724.780</b>	<b>0</b>	<b>1.835.996.900</b>	<b>100</b>	<b>3.748.583.410</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>	<b>100</b>	<b>10.398.743.289</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga	Lemba ga	4	16.958.282.080	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	0	-	1	-	0%	0%	1	-	25%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	Lemba ga	1	1.274.367.075	1	269.574.528	1	319.425.865	1	15.112.480	1	41.399.250	1	124.924.780	1	64.080.900	1	245.517.410	100%	77%	2	515.091.938	200%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD SMP	Orang	1000	13.995.000.000	990	2.963.815.050	1000	3.600.000.000	0	-	0	500	1.723.800.000	500	1.697.100.000	1000	3.420.900.000	100%	95%	1990	6.384.715.050	199%	46%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	%	163	20.829.242.964	30	3.416.770.301	30	88.036.000	0	3.850.000	0	3.500.000	0	-	30	74.816.000	30	82.166.000	100%	93%	60	3.498.936.301	37%	17%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD							153	3.507.240	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Prosentase Lembaga Non Formal yang Terakreditasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.956.485.980</b>	<b>65</b>	<b>1.292.171.438</b>	<b>100</b>	<b>477.609.750</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>39.229.500</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>	<b>100</b>	<b>33.314.000</b>	<b>100</b>	<b>75.443.500</b>	<b>100%</b>	<b>16%</b>	<b>100</b>	<b>1.367.614.938</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	Siswa	175	3.748.309.230		635.444.546	175	172.709.750	0	1.160.000	0	39.229.500	0	1.740.000	175	33.314.000	175	75.443.500	100%	44%	175	710.888.046	100%	19%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang bersertifikat	%	60	1.208.176.750		656.726.892	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	656.726.892	0%	54%	Dinas Pendidikan

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12										
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)						
	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							4	304.900.000			0				0						0				0%	0%	0		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pendidikan
1	1	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	100	14.695.824.830	100	393.120.371	100	3.119.336.300	0	13.432.000	0	940.616.850	0	1.048.160.000	100	871.450.778	100	2.873.659.628	80%	92%	100	3.266.779.999	100%	22%							
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 Standart Pendidikan pada Kualitas Standart Proses dan Penilaian Pendidikan	%	100	12.339.730.672	100	393.120.371	100	2.582.555.582	0	13.432.000	0	940.242.850	0	674.830.000	100	815.741.897	100	2.444.246.747	100%	95%	100	2.837.367.118	100%	23%							
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	4.914.744.274	0		100	1.120.991.000	0		0	607.688.850	0	76.440.000	100	375.698.150	100	1.059.827.000	100%	95%	100	1.059.827.000	100%	22%					Dinas Pendidikan		
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	3.900.453.830	0		100	830.580.450	0	13.432.000	0	314.032.000	0	278.996.100	100	171.133.147	100	777.593.247	100%	94%	100	777.593.247	100%	20%					Dinas Pendidikan		
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	3.524.532.568	100	393.120.371	100	630.984.132	0		0	18.522.000	0	319.393.900	100	268.910.600	100	606.826.500	100%	96%	100	999.946.871	100%	28%					Dinas Pendidikan		
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	%	100	2.356.094.158	0		100	536.780.718	0		0	374.000	0	373.330.000	100	55.708.881	100	429.412.881	100%	80%	100	429.412.881	100%	18%							
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	2.356.094.158	0		100	536.780.718	0		0	374.000	0	373.330.000	100	55.708.881	100	429.412.881	100%	80%	100	429.412.881	100%	18%					Dinas Pendidikan		
1	1	4			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	60	8.517.875.000	68	1.345.159.877	20	1.423.799.570	0	71.245.000	0	276.597.050	0	127.306.100	20	729.731.050	20	1.204.879.200	80%	85%	88	2.550.039.077	147%	30%							
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Guru Kasek dan Pengawas Berkompetensi	%	100	8.517.875.000	100	1.345.159.877	100	1.423.799.570	0	71.245.000	0	276.597.050	0	127.306.100	100	729.731.050	100	1.204.879.200	100%	85%	100	2.550.039.077	100%	30%							



2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	%	100	5.998.350.000	100	1.133.707.343	100	1.068.038.650	0	71.245.000	0	253.694.550	0	127.306.100	100	534.692.950	100	986.938.600	100%	92%	100	2.120.645.943	100%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	%	100	2.519.525.000	100	211.452.534	100	355.760.920	0	-	0	22.902.500	0	-	100	195.038.100	100	217.940.600	100%	61%	100	429.393.134	100%	17%	Dinas Pendidikan
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																												
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,5	320.195.453.700	0,4	77.819.878.651	0,41	98.651.560.124	0	771.480.700	0	19.914.560.155	0	18.623.118.122	0,41	25.287.269.141	0,41	64.596.428.118	100%	65%	1	142.416.306.769	162%	44%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	152.451.789.088	100	22.780.956.835	100	30.954.230.616	0	56.490.150	0	1.521.536.803	0	3.799.063.753	100	4.690.812.959	100	10.067.903.665	100%	33%	200	32.848.860.500	200%	22%	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Unit	5	7.985.985.425	1	2.389.500.985	3	3.708.059.005	0	-	0	134.404.792	0	-	0	-	0	134.404.792	0%	4%	1	2.523.905.777	20%	32%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	5	79.232.096.871	2	3.094.420.550	4	2.470.438.200	0	-	0	57.664.000	0	-	0	-	0	57.664.000	0%	2%	2	3.152.084.550	40%	4%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jenis	37	7.948.077.781	10	689.570.000	27	3.712.526.300	0	-	0	-	5	-	-	-	5	-	19%	0%	15	689.570.000	41%	9%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	8.614.795.149	2	1.420.268.815	2	1.815.342.668	0	5.242.400	1	46.044.750	1	1.175.311.633	0	416.103.425	2	1.642.702.208	100%	90%	4	3.062.971.023	50%	36%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jenis	33	23.849.613.724	20	4.789.029.316	43	10.239.761.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	20	4.789.029.316	61%	20%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	Jenis	74	327.919.763	28	96.288.000	24	106.092.000	0	0	0	0	22	95.227.966	2	8.404.000	24	103.631.966	100%	98%	52	199.919.966	70%	61%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Paket	4	10.564.863.586	1	4.039.968.311	1	2.685.523.349	0	51.247.750	0	383.064.665	1	630.880.085	0	1.178.349.036	1	2.243.541.536	100%	84%	2	6.283.509.847	50%	59%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat Vaksin (RSUD)	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Jenis	8	10.499.233.022	6	5.582.482.452	5	5.489.674.258	0	-	0	900.358.596	5	1.595.904.069	2.988.549.098	5	5.484.811.763	100%	100%	11	11.067.294.215	138%	105%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	3.360.646.767	2	679.428.406	2	658.256.836	0	0	1	0	2	268.800.000	0	63.795.300	2	332.595.300	100%	51%	4	1.012.023.706	50%	30%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medik Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medik Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1	68.557.000	0	-	1	68.557.000	0	0	0	0	1	32.940.000	0	35.612.100	1	68.552.100	100%	100%	1	68.552.100	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	167.743.664.612	100	55.038.921.816	100	67.697.329.508	0	714.990.550	0	18.393.023.352	0	14.824.054.369	100	20.596.456.182	100	54.528.524.453	100%	81%	200	109.567.446.269	200%	65%	

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	%	100	1.546.807.096	100	248.792.248	100	321.931.900	24,33	7.896.000	50,04	17.979.850	75	6.341.871.330	100	291.271.050	100	6.659.018.230	100%	2068%	100	6.907.810.478	100%	447%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manguharjo)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	18.608.700	100	2.682.000	100	15.926.700	0	-	100	2.983.400	100	5.966.800	100	6.175.650	100	15.125.850	100%	95%	100	17.807.850	100%	96%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngegong)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	88.301.600	100	50.935.350	100	37.366.250	0	-	53,6	13.669.800	77,41	12.493.950	100	11.202.500	100	37.366.250	100%	100%	100	88.301.600	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sukosari)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	28.983.750	100	4.970.000	100	24.013.750	0	-	41,8	1.117.500	75,06	1.117.500	100	21.778.750	100	24.013.750	100%	100%	100	28.983.750	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	19.355.500	100	7.764.000	100	11.591.500	0	-	50	5.795.750	75	0	100	5.795.750	100	11.591.500	100%	100%	100	19.355.500	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	64.662.580	100	24.695.800	100	39.966.780	0	-	43,92	12.103.500	78,14	12.403.500	100	27.436.400	100	51.943.400	100%	130%	100	76.639.200	100%	119%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Demangan)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	26.239.000	100	12.612.000	100	13.627.000	0	-	49,9	1.353.750	75,5	8.471.750	100	3.759.500	100	13.585.000	100%	100%	100	26.197.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	216.109.197	100	27.616.300	100	61.848.500	23	7.732.000	48,83	17.208.600	74,42	13.854.650	100	17.582.000	100	56.377.250	100%	91%	100	83.993.550	100%	39%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Manguharjo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	150.000	0	0	100	150.000	0	-	100	0	100	100.000	100	100.000	100	67%	100	100.000	100	67%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Ngegong)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	13.693.750	0	0	100	13.693.750	0	-	42,9	2.000.000	62,79	1.500.000	100	10.193.750	100	100	100	13.693.750	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sukosari)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	6.335.000	0	0	100	6.335.000	0	-	41,9	0	75,98	2.917.500	100	3.417.500	100	100	100	6.335.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	14.675.250	100	12.062.000	100	2.613.250	0	-	43	150.000	75	0	100	2.463.250	100	100	100	14.675.250	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	14.223.200	100	6.785.600	100	7.437.600	0	-	40,4	400.000	74,85	50.000	100	6.986.750	100	100	100	14.223.350	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Demangan)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	3.857.000	100	3.353.000	100	504.000	0	-	47,38	252.000	738	0	100	252.000	100	100	100	3.857.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	231.292.367	100	68.563.930	100	55.068.750	24,23	1.330.000	50,63	11.906.750	77,46	20.478.500	100	17.744.000	100	51.459.250	100	93%	100	120.023.180	100	52%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Manguharjo)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	8.163.950	0	0	100	8.163.950	0	-	100	0	100	0	100	0	100	-	100	0%	100	-	100	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi	Presentase bayi baru lahir mendapatkan	%	100	550.000	0	0	100	550.000	0	-	50,	100.000	74,	200.000	100	150.000	100	450.000	100	82%	100	450.000	100	82%	Dinas Kesehatan Pengendalian

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Baru Lahir (Puskesmas Ngegong)	elayanan kesehatan bayi baru lahir																							ian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Sukosari)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	15.551.400	0		100	15.551.400	0	-	41,9	875.250	76,47	0	100	14.676.150	100	15.551.400	100%	100%	100	15.551.400	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Tawangrejo)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	3.100.000	0		100	3.100.000	0	-	47	600.000	80	2.100.000	100	400.000	100	3.100.000	100%	100%	100	3.100.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Banjarejo)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	800.000	0		100	800.000	0	-	40,82	100.000	76,7	400.000	100	300.000	100	800.000	100%	100%	100	800.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Demangan)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	8.490.650	0		100	8.490.650	0	-	49,77	0	771	0	100	8.490.650	100	8.490.650	100%	100%	100	8.490.650	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	729.476.345	100	26.758.450	100	250.059.150	25,62	0	55,58	150.000	78,18	21.473.800	100	55.939.770	100	77.563.570	100%	31%	100	104.322.020	100%	14%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Manguharjo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	10.287.000	100	4.023.000	100	6.264.000	0	-	100	1.341.000	100	2.682.000	100	2.241.000	100	6.264.000	100%	100%	100	10.287.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Ngegong)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	20.365.000	100	10.307.500	100	10.057.500	0	-	51,1	5.028.750	93,1	5.028.750	100	0	100	10.057.500	100%	100%	100	20.365.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Sukosari)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	7.528.750	0		100	7.528.750	0	-	42,4	0	76,35	0	100	7.528.750	100	7.528.750	100%	100%	100	7.528.750	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
																													Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Tawangrejo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	27.214.000	100	700.000	100	26.514.000	0	-	55	0	75	14.107.000	100	12.407.000	100	26.514.000	100	27.214.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Banjarejo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	26.444.880	100	14.218.220	100	12.226.660	0	-	61,04	2.800.000	88,11	400.000	100	9.019.800	100	12.219.800	100	26.438.020	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Demangan)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	45.503.650	100	3.850.000	100	41.653.650	0	-	51,01	8.671.550	771,3	14.816.050	100	18.166.050	100	41.653.650	100	45.503.650	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	232.979.349	100	10.518.950	100	115.602.000	47,46	1.512.000	66,69	2.694.000	90,6	54.325.300	100	48.968.500	100	107.499.800	100	118.018.750	100	51%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Manguharjo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	21.437.100	100	6.108.700	100	15.328.400	0	-	100	0	112	5.154.750	100	9.766.950	100	14.921.700	100	21.030.400	100	98%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ngegong)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	14.071.570	100	7.071.600	100	6.999.970	0	-	74,1	3.549.600	97,58	3.450.350	100	0	100	6.999.950	100	14.071.550	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sukosari)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	9.643.100	0	100	9.643.100	0	-	978	0	100	0	100	9.630.200	100	9.630.200	100	9.630.200	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	21.699.350	100	5.246.250	100	16.453.100	0	-	77	0	100	6.928.600	100	9.523.300	100	16.451.900	100	21.698.150	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Banjarejo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	54.006.550	100	8.473.050	100	45.533.500	0	-	79,99	2.713.650	79,99	36.892.250	100	5.667.500	100	45.273.400	100%	99%	100	53.746.450	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Demangan)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	89.812.850	100	43.894.800	100	45.918.050	0	-	62,37	0	9659	2.331.750	100	43.583.250	100	45.915.000	100%	100%	100	89.809.800	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	977.855.817	100	127.272.250	100	222.209.500	66	14.704.900	49,21	83.219.450	84,52	35.101.000	100	70.354.900	100	203.380.250	100%	92%	100	330.652.500	100%	34%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sukosari)	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	15.952.250	0	0	100	15.952.250	0	-	21,1	0	75,36	0	100	15.952.250	100	15.952.250	100%	100%	100	15.952.250	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	27.974.350	0	0	100	27.974.350	0	-	43	19.052.500	81	15.489.250	100	24.411.100	100	27.974.350	100%	100%	100	27.974.350	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Banjarejo)	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	300.000	0	0	100	300.000	0	-	76,68	0	100,9	100.000	100	200.000	100	300.000	100%	100%	100	300.000	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Demangan)	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	2.234.000	0	0	100	2.234.000	0	-	52,51	2.011.500	0	0	100	0	100	2.011.500	100%	90%	100	2.011.500	100%	90%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	198.979.120	100	1.440.000	100	66.844.600	11,08	360.000	69,07	19.435.000	85,85	21.325.000	100	21.324.400	100	62.444.400	100%	93%	100	63.884.400	100%	32%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke	%	100	2.580.400	0	0	100	2.580.400	0	-	100	0	75	0	100	2.580.400	100	2.580.400	100%	100%	100	2.580.400	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	2	2	2.02	7	Pada Usia Lanjut (Puskesmas Manguharjo)	atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar																												
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	-	0	100	-	0	-	76	3.113.750	0	3.113.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Banjarejo)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	-	0	100	-	0	-	61,9	350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Demangan)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	0	-	0	0	-	0	-	100	4.259.450	0	4.259.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	%	100	37.098.149	100	3.967.400	100	9.477.000	9	0	14,72	0	31,05	7.862.500	100	-	31	7.862.500	31%	83%	31	11.829.900	31%	32%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	92.677.318	100	3.675.850	100	29.020.000	41	0	64,61	0	94,66	22.105.000	100	-	95	22.105.000	95%	76%	95	25.780.850	95%	28%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	458.160.742	100	38.158.200	100	109.066.200	19,17	0	88,78	11.929.000	98	21.242.200	100	72.761.990	100	105.933.190	100%	97%	100	144.091.390	100%	31%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Manguharjo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	11.675.500	0	0	100	11.675.500	0	-	90	0	97,14	2.452.750	100	5.687.750	100	8.140.500	100%	70%	100	8.140.500	100%	70%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	%	100	1.000.000	0	-	100	1.000.000	0	-	47,4	300.000	100	200.000	100	500.000	100	1.000.000	100%	100%	100	1.000.000	100%	100%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan		



2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K (%)	RP. (%)	K
					(Puskesmas Ngegong)	kesehatan jiwa sesuai standar																						Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sukosari)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	3.729.250	0		100	3.729.250	0	-	10,89	0	10,88	0	100	3.729.250	100	3.729.250	100	100	100	3.729.250	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	11.950.500	0		100	11.950.500	0	-	74	0	91	5.081.250	100	6.869.250	100	11.950.500	100	100	100	11.950.500	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	1.200.000	0	0	100	1.200.000	0	-	100	0	108,1	900.000	100	300.000	100	1.200.000	100	100	100	1.200.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Demangan)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	6.843.600	0	0	100	6.843.600	0	-	100	0	100	4.539.000	100	2.304.600	100	6.843.600	100	100	100	6.843.600	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	%	100	537.735.225	100	17.954.000	100	220.133.900	13	9.651.000	41,07	33.381.750	91,84	39.295.720	100	105.260.600	100	187.589.070	100	85	100	205.543.070	100	38	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	2.197.000	0	0	100	2.197.000	0	-	37,7	0	104	1.197.000	100	850.000	100	2.047.000	100	93	100	2.047.000	100	93	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	12.111.800	0	-	100	12.111.800	0	-	25,7	0	61,78	6.180.900	100	5.930.900	100	12.111.800	100	100	100	12.111.800	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	7.591.000	0		100	7.591.000	0	-	52,4	0	14,32	200.000	100	5.841.000	100	6.041.000	100	80	100	6.041.000	100	80	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	5.976.000	0	0	100	5.976.000	0	-	35	400.000	79	3.086.500	100	2.486.500	100	5.973.000	100	100	100	5.973.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	12.504.800	0	0	100	12.504.800	0	-	31,69	2.265.200	65,71	5.480.400	100	4.730.400	100	12.476.000	100	100	100	12.476.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	6.738.000	0	0	100	6.738.000	0	-	100	700.000	100	2.000.000	100	4.038.000	100	6.738.000	100	100	100	6.738.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV mencapai target	%	100	1.841.578.687	100	142.869.748	100	223.106.250	11,52	13.566.000	31,97	16.865.000	97,06	30.698.000	100	145.537.964	100	206.666.964	100	93%	100	349.536.712	100	19%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Manguharjo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	3.684.000	0	0	100	3.684.000	0	-	32,96	0	60,98	2.057.000	100	1.377.000	100	3.434.000	100	93%	100	3.434.000	100	93%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sukosari)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	2.800.000	0	0	100	2.800.000	0	-	45,76	0	80,04	0	100	1.100.000	100	1.100.000	100	39%	100	1.100.000	100	39%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	2.200.000	0	0	100	2.200.000	0	-	43	400.000	86	1.400.000	100	400.000	100	2.200.000	100	100	100	2.200.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Banjarejo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	8.658.000	0	0	100	8.658.000	0	-	45,95	0	73,55	7.658.000	100	1.000.000	100	8.658.000	100	100	100	8.658.000	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase orang dengan risiko terinfeksi	%	100	1.670.500	0	0	100	1.670.500	0	-	36,63	0	613,5	0	100	1.670.500	100	1.670.500	100	100	100	1.670.500	100	100	Dinas Kesehatan Pengendalian

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)	K (%)
					Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Demangan)	HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar																						ian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	241.376.000	100	200.995.172	100	397.827.630	100	52.698.000	100	84.623.500	100	28.090.000	100	51.400.000	100	216.811.500	100%	54%	100	417.806.672	100%	173%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	630.357.000	100	159.775.000	100	470.582.000	100	-	100	142.610.500	100	41.215.500	100	184.684.500	100	368.510.500	100%	78%	100	528.285.500	100%	84%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	548.276.000	100	109.145.000	100	439.131.000	100	-	100	168.856.500	100	107.019.500	100	89.850.000	100	365.726.000	100%	83%	100	474.871.000	100%	87%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	692.405.000	100	122.750.000	100	569.655.000	100	-	100	136.374.000	100	119.484.000	100	233.557.000	100	489.415.000	100%	86%	100	612.165.000	100%	88%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	576.500.820	100	134.200.000	100	442.300.820	100	-	100	72.493.400	100	11.100.000	100	295.116.400	100	378.709.800	100%	86%	200	512.909.800	200%	89%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	511.661.000	100	95.870.000	100	415.791.000	100	-	100	2.750.000	100	9.750.000	100	278.112.500	100	290.612.500	100%	70%	200	386.482.500	200%	76%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	545.045.000	100	144.315.000	100	400.730.000	100	-	100	0	100	61.686.000	100	238.536.000	100	300.222.000	100%	75%	100	444.537.000	100%	82%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	%	97,9	603.791.602	97	135.668.250	95	4.174.140.000	74	17.722.200	95	12.142.710	74	94.113.650	95	4.050.151.120	95	4.174.129.680	100%	100%	95	4.309.797.930	97%	714%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	10	536.426.700	10	170.363.000	10	366.063.700	4	45.465.000	423	65.115.000	2	99.138.250	10	156.135.000	10	365.853.250	100%	100%	10	536.216.250	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	12	521.135.070	12	142.040.850	12	379.094.220	11	68.010.000	11,24	33.430.000	95,5	149.959.350	12	124.817.750	12	376.217.100	100%	99%	12	518.257.950	100%	99%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	7,9	696.963.210	7	218.948.730	9,5	478.014.480	6,2	82.500.000	6,2	0	4,95	92.180.750	9,5	300.408.700	10	475.089.450	100%	99%	10	694.038.180	127%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	9,5	546.383.130	9	239.281.280	9,5	307.101.850	7,1	36.810.000	7,1	18.660.000	7	137.720.600	9,5	113.829.250	10	307.019.850	100%	100%	10	546.301.130	105%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	11,5	1.041.364.070	11,5	309.245.300	11,5	732.118.770	6,8	63.600.000	6,8	132.256.680	6,8	160.354.250	11,5	305.913.450	12	662.124.380	100%	90%	12	971.369.680	104%	93%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	11	735.674.980	11	247.808.930	11	487.866.050	438	32.220.000	43,8	131.985.000	438	167.067.050	11	156.327.000	11	487.599.050	100%	100%	22	735.407.980	200%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	%	41	651.887.986	40	390.432.770	41	427.411.700	17	9.267.300	23,96	42.502.800	44,7	0	41	159.327.450	45	211.097.550	109%	49%	45	601.530.320	110%	92%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	0	14.977.500	0	0	2	14.977.500	0	0	0	0	0	2	14.977.500	2	14.977.500	100%	100%	2	14.977.500	#DIV/0!	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian	

2						3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)
						Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sukosari)	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																								Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	27.966.000	0	0	2	27.966.000	0	0	1	4.530.000	2	23.436.000	2	27.966.000	100%	100%	2	27.966.000	100%	100%			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	%	61	2.046.882.964	60	382.936.537	61	624.438.950	93	3.309.150	90	46.445.590	96	255.885.130	96	159.535.100	96	465.174.970	157%	74%	96	848.111.507	157%	41%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manguharjo)	Persentase TTU Sehat	%	61	107.993.350	61	54.474.700	61	53.518.650	0	0	61	17.040.250	61	1.701.000	61	29.535.500	61	48.276.750	100%	90%	61	102.751.450	100%	95%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngegong)	Persentase TTU Sehat	%	61	118.021.770	61	74.010.270	61	44.011.500	0	0	30,8	19.687.250	56	3.274.350	61	34.629.650	61	57.591.250	100%	131%	61	131.601.520	100%	112%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukosari)	Persentase TTU Sehat	%	61	113.000.700	61	68.141.950	61	44.858.750	0	0	100	0	100	17.235.750	61	26.327.000	61	43.562.750	100%	97%	61	111.704.700	100%	99%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase TTU Sehat	%	0	79.171.600	61	37.213.850	61	41.957.750	0	0	54	12.315.500	100	11.775.750	61	19.180.500	61	43.271.750	100%	103%	122	80.485.600	#DIV/0!	102%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banjarejo)	Persentase TTU Sehat	%	61	100.262.750	61	56.312.750	61	43.950.000	0	0	61,3	14.470.750	78,6	6.195.200	61	35.327.650	61	43.603.200	100%	99%	61	99.915.950	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Demangan)	Persentase TTU Sehat	%	61	59.978.900	61	31.198.000	61	28.780.900	0	0	46,2	7.928.750	100	626.750	61	19.117.400	61	27.672.900	100%	96%	61	58.870.900	100%	98%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K
																														Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	10	423.867.370	10	155.102.900	14	268.764.470	0	0	3	23.387.500	8	115.187.200	14	114.414.550	14	252.989.250	100%	94%	14	408.092.150	140%	96%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	16	270.911.000	16	78.252.850	16	192.658.150	0	-	11	35.573.300	14	69.772.200	16	87.112.000	16	192.457.500	100%	100%	16	270.710.350	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	13	157.329.970	13	55.214.800	13	102.115.170	0	-	10	0	13	9.139.850	13	104.550.650	13	113.690.500	100%	111%	13	168.905.300	100%	107%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	16	267.979.250	16	113.648.050	16	154.331.200	0	-	6	4.752.500	8	49.886.700	16	98.287.750	16	152.926.950	100%	99%	16	266.575.000	100%	99%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	13	172.693.040	13	59.347.520	13	113.345.520	0	-	9	21.400.200	11	55.043.000	13	36.896.750	13	113.339.950	100%	100%	13	172.687.470	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	15	240.319.790	15	90.560.990	15	149.758.800	0	-	7	28.470.750	11	45.238.350	15	65.852.150	15	139.561.250	100%	93%	15	230.122.240	100%	96%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	561.908.852	100	2.281.381.825	100	114.780.000	100	90.000.000	100	17.356.000	100	543.000	100	1.400.000	100	109.299.000	100%	95%	100	2.390.680.825	100%	425%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	36.896.280	100	7.751.280	100	29.145.000	0	0	100	0	100	0	100	23.203.000	100	23.203.000	100%	80%	100	30.954.280	100%	84%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	15.188.500	100	4.559.000	100	10.629.500	0	-	100	3.539.350	100	1.325.250	100	4.514.600	100	9.379.200	100%	88%	100	13.938.200	100%	92%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	340.521.235	100	56.934.685	100	283.586.550	0	-	100	0	100	58.863.200	100	241.671.950	100	300.535.150	100%	106%	100	357.469.835	100%	105%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	205.961.300	100	113.648.050	100	92.313.250	0	-	100	10.742.750	100	37.748.600	100	39.810.260	100	88.301.610	100%	96%	100	201.949.660	100%	98%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	101.268.360	100	57.520.600	100	43.747.760	0	-	100	15.615.250	100	9.249.059	100	6.335.250	100	31.199.559	100%	71%	200	88.720.159	200%	88%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	77.007.000	100	52.050.550	100	24.956.450	0	-	100	0	100	0	100	11.669.802	100	11.669.802	100%	47%	15	63.720.352	15%	83%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	100	619.564.467	100	112.102.532	100	59.555.950	19,17	4.800.000	88,78	9.507.500	98,22	21.889.700	98,22	19.802.200	98	55.999.400	98%	94%	98	168.101.932	98%	27%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	%	100	780.919.926	0	613.772.338	100	256.104.000	28,57	32.342.000	0	61.524.600	28,57	64.850.000	29	38.818.000	29	197.534.600	29%	77%	29	811.306.938	29%	104%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100	112.635.410	100	28.496.000	100	84.139.410	0	0	53,01	7.408.650	79,63	20.011.400	100	44.062.450	100	71.482.500	100%	85%	100	99.978.500	100%	89%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Persentase Penanganan Penyakit	%	100	189.503.610	100	15.846.250	100	173.657.350	0	0	57,14	60.839.000	71,41	62.804.600	100	66.073.250	100	189.716.850	100%	109%	100	205.563.100	100%	108%	Dinas Kesehatan Pengendalian

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)
					Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Menular dan Tidak Menular Mencapai Target																								ian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100	113.180.500	100	99.569.250	100	13.611.250	0	0	28,5	0	42,86	13.611.250	100	0	100	13.611.250	100%	100%	100	113.180.500	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100	154.584.080	100	70.006.150	100	84.577.930	0	0	50	700.000	59	49.840.100	100	34.037.650	100	84.577.750	100%	100%	100	154.583.900	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100	316.946.310	100	67.402.050	100	249.544.260	0	0	72,83	13.007.300	80,67	98.777.050	100	135.374.400	100	247.158.750	100%	99%	100	314.560.800	100%	99%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100	247.221.920	100	42.624.650	100	204.597.270	0	0	50,4	30.198.000	834	55.053.750	100	108.978.950	100	194.230.700	100%	95%	100	236.855.350	100%	96%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	176.485	112.527.707.750	88970	35.073.942.069	87520	34.508.320.600	75779	9.776.000	70473	15.126.067.550	69764	5.318.681.530	70473	8.849.308.375	70473	29.303.833.455	81%	85%	### ###	64.377.775.524	90%	57%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	%	52	1.295.071.863	60	90.569.190	52	688.802.050	33,33	8.800.500	33,33	17.695.500	29,63	32.159.250	52	390.732.800	33	449.388.050	64%	65%	33	539.957.240	63%	42%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	%	89	3.221.299.132	89	1.171.367.812	89	2.049.931.320	67,74	0	81,69	14.738.500	77,61	11.689.250	89	65.265.459	89	91.693.209	100%	4%	89	1.263.061.021	100%	39%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	PKP Puskesmas	%	88	2.755.626.439	88	1.350.145.239	88	1.405.481.200	65,5	0	76,4	20.409.600	85,08	8.692.800	88	49.779.623	88	78.882.023	100%	6%	88	1.429.027.262	100%	52%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan



2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	PKP Puskesmas	%	89,4	3.162.640.296	87	1.189.931.496	88	1.972.708.800	90,4	0	0	95,8	4.032.000	88	62.446.919	88	66.478.919	100%	3%	88	1.256.410.415	98%	40%	Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	PKP Puskesmas	%	90	1.359.336.366	89	1.359.336.366	89		63		675	25.935.600	94	18.402.300	89	57.669.837	89	102.007.737	100%	#DIV/0!	89	1.461.344.103	99%	108%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	PKP Puskesmas	%	85	2.529.704.450	85	194.751.100	85	2.334.953.350	4734		77,27	7.068.000	91,5	0	85	50.782.134	85	57.850.134	100%	2%	85	252.601.234	100%	10%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	PKP Puskesmas	%	85	3.126.467.523	85	1.073.324.443	85	2.053.143.080	6223		76,27	20.118.600	844	11.324.300	85	53.592.154	85	85.035.054	100%	4%	85	1.158.359.497	100%	37%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhiya kebutuhan operasional faskes	%	100		100	0	0	0	0	0	0	0	100		100										Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Fasilitas kesehatan yang melaksanakan survei IKM (Perubahan)	Fasilitas Kesehatan	6	8.511.906.005	0	4.241.414.246	6	4.956.624.628	0	8.752.500	0	1.004.815.253	0	16.322.500	6	1.098.198.175	6	2.128.088.428	100%	43%	100	6.369.502.674	100%	75%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	%	100	1.339.514.898	0	-	100	468.396.950	0	0	20	108.205.119	50	15.019.000	100	44.660.300	50	167.884.419	50%	36%	50	167.884.419	50%	13%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	2.782.000.026	100	645.880.000	100	842.316.000	100	92.166.000	100	229.031.500	100	188.617.700	100	296.904.700	100	806.719.900	100%	96%	100	1.452.599.900	100%	52%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga	Keluarga	30562	8.503.100	0	-	30562	8.503.100	0	0	0	0	30490	4.201.200	0	4.201.200	30490	8.402.400	100%	99%	30490	8.402.400	100%	99%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
						Kesehatan Puskesmas																								
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	5767	5.550.000	0	-	5767	5.550.000	0	-	0	0	0	0	5767	5.550.000	5767	5.550.000	100%	100%	116	5.550.000	2%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1809	7.500.000	1809	0	1809	7.500.000	0	-	0	0	0	0	1809	7.500.000	1809	7.500.000	100%	100%	3618	7.500.000	200%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1809	1.600.000	0	0	4645	1.600.000	0	-	0	0	0	0	4645	1.600.000	4645	1.600.000	100%	100%	4645	1.600.000	257%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	6.750.000	0	0	3803	6.750.000	0	-	0	0	0	0	3803	12.450.000	3803	12.450.000	100%	184%	3803	12.450.000	#DIV/0!	184%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	5550	6.000.000	0	0	5550	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	5550	8.400.000	5550	14.400.000	100%	240%	5550	14.400.000	100%	240%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Demangan)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmasnull	Keluarga	8988	6.500.000	0	-	8988	6.500.000	0	-	0	0	3.000.000	8988	7.000.000	8988	10.000.000	100%	154%	8988	10.000.000	100%	154%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	%	93	975.711.057	89	197.567.000	91	265.299.800	84,5	34.807.800	95,55	49.587.250	0	0	43.257.900	64.438.300	96	192.091.250	105%	72%	185	389.658.250	198%	40%	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	Ketersediaan Tambahan Tenaga Medis di Puskesmas	Dokter	1	180.681.375	1	45.000.000	1	45.000.000	1	7.500.000	1	15.000.000	0	1	7.500.000	15.000.000	1	45.000.000	100%	100%	1	90.000.000	100%	50%	

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
					Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rawat Inap Standart																												
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	180.681.375	1	45.000.000	1	45.000.000	1	7.500.000	1	15.000.000	1	7.500.000		15.000.000	1	45.000.000	100%	100%	1	90.000.000	100%	50%				Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi	%	92	795.029.682	89	152.567.000	91	220.299.800	69	27.307.800	82	34.587.250	88	35.757.900		49.438.300	88	147.091.250	97%	67%	88	299.658.250	96%	38%					
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	%	92	795.029.682	89	152.567.000	91	220.299.800	69	27.307.800	82	34.587.250	88	35.757.900		49.438.300	88	147.091.250	97%	67%	88	299.658.250	96%	38%				Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	%	89	902.553.576	86	156.390.391	86	97.249.200	48,5	2.891.850	78	7.078.500	69,98	16.324.700		17.120.500	78	43.415.550	91%	45%	67	199.805.941	75%	22%					
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Kesehatan dan Optik Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi sesuai Standar	%	89	802.237.581	85	147.682.751	86	74.168.200	34	2.891.850	42	1.125.000	67	10.223.700		8.810.250	67	23.050.800	78%	31%	67	170.733.551	75%	21%					
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Kesehatan dan Optik Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	88	802.237.581	85	147.682.751	86	74.168.200	34	2.891.850	42	1.125.000	67	10.223.700		8.810.250	67	23.050.800	78%	31%	67	170.733.551	76%	21%				Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	%	80	100.315.995	70	8.707.640	86	23.081.000	63	89.777	72,	5.953.500	95	6.101.000		8.310.250	90	20.364.750	104%	88%	90	29.072.390	113%	29%				Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12							
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
					Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat NoP-IRT																											
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRT yang sehat	%	80	100.315.995	70	8.707.640	73	23.081.000	63	0	89,77	5.953.500	72,95	6.101.000		8.310.250	90	20.364.750	123%	88%	90	29.072.390	113%	29%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	%	63	7.279.579.588	61	866.570.700	62	2.262.643.040	60,3	14.461.950	60,3	128.151.550	60,3	442.351.000	62	1.435.313.200	61	2.020.277.700	98%	89%	122	2.886.848.400	194%	40%				
1	2	5	2.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	%	100	1.175.985.504	100	214.357.088	100	316.160.100	18,18	14.461.950	45,45	49.298.000	73	31.369.600	100	214.854.680	100	309.984.230	100%	98%	100	524.341.318	100%	45%				
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Jenis	24		6		6		3		5		6				6				12			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	Kegiatan	12	1.175.985.504	3	214.357.088	3	316.160.100	3	14.461.950	3	49.298.000	3	31.369.600		214.854.680	3	309.984.230	100%	98%	6	524.341.318	50%	45%				
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0		49.298.000					0	49.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	49.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!					
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%					0	0	0			49.298.000			0	0	0	0	0	0	49.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	0	49.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian

2				3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)
				Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																						ian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	77,78	6.103.594.084	0	652.213.612	77,78	1.946.482.940	59,26	0	59,26	29.555.550	59,26	410.981.400	1.220.458.520	59	1.660.995.470	76%	85%	59	3.607.478.410	76%	59%	
					Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	81,48		0		81,48		88,89		88,89		88,89			89		109%		89		109%		
					Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	85,93		0		85,93		90,74		91		90,74			91		106%		91		106%		
					Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	96,38		0		96,38		98,58		99		98,58			99		103%		99		103%		
					Persentase Poskestren berstrata puri	%	45,45		0		45,45		53,33		53		53,33			53		117%		53		117%		
					Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	40		0		40		35,29		35		35,29			35		88%		35		88%		
					Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	69,87		0		69,87		51,28		51		51,28			51		73%		51		73%		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kelurahan	21	6.103.594.084	0	652.213.612	21	1.946.482.940	16	0	16	29.555.550	16	410.981.400	1.220.458.520	16	1.660.995.470	85%	85%	16	2.313.209.082	76%	38%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Jumlah Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	Kelurahan	21		0		21		16		16		16			16		76%		16		76%		
					Jumlah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	Poskeskel	22		0		22		24		24		24			24		109%		24		109%		
					Jumlah Posyandu Balita berstrata puri	Posyandu	232		0		232		245		245		245			245		106%		245		106%		
					Jumlah Posyandu Lansia berstrata puri	Posyandu	133		0		133		139		139		139			139		105%		139		105%		
					Jumlah Poskestren berstrata puri	Jumlah Poskestren	5		0		5		8		8		8			8		160%		8		160%		
					Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	Pos UKK	6		0		6		6		6		6			6		100%		6		100%		
Jumlah Posbindu PTM berstrata puri	Posbindu PTM	109	0	109	80	80	80	80	73%	80	73%																	
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																										
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir	%	75.167.984.210	15	11.317.601.080	14	12.114.718.000	10	157.894.000	0	1.003.474.753	0	2.571.151.537	0	4.752.347.300	10	8.484.867.590	71%	70%	25	19.802.468.670	#DIV/0!	26%	
1	3	2	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan	Persentase luas daerah genangan	%	75.167.984.210	15	11.317.601.080	15	12.114.718.000	10	157.894.000	0	1.003.474.753	0	2.571.151.537	0	4.752.347.300	10	8.484.867.590	67%	70%	25	19.802.468.670	#DIV/0!	26%	

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)
					Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Pintu Air	2	12.901.033.900	2	2.146.309.789	2	3.326.904.000	0	0	0	0	1.282.477.935	1	1.441.783.100	1	2.724.261.035	50%	82%	3	4.870.570.824	150%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Stasiun	1	1.193.190.630	1	187.304.250	1	1.887.953.000	0	0	0	206.912.000	0	0	1	1.508.239.500	1	1.715.151.500	100%	91%	2	1.902.455.750	200%	159%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yg dinormalisasikan	Km	1,5	57.769.028.780	1,5	8.147.297.650	1,5	5.653.201.000	0	14.000.000	0	494.250.378	0	1.088.414.102	1,5	1.338.517.700	1,5	2.935.182.180	100%	52%	3	11.082.479.830	200%	19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				0	-	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	2	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	%	100	3.304.730.900	0	836.689.391	100	1.246.660.000	0	143.894.000	0	302.312.375	50	200.259.500	50	463.807.000	100	1.110.272.875	100%	89%	100	1.946.962.266	100%	59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelanggan yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	%	100	101.669.000	0	-	100	100.569.000	0	0	0	0	-	100	350.000	100	350.000	100%	0%	100	350.000	100%	0%		
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	101.669.000	0	-	100	100.569.000	0	0	0	-	100	350.000	100	350.000	100%	0%	100	350.000	100%	0%			
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	Dok	1	101.669.000	0	0	1	100.569.000	0	0	0	0	-	1	350.000	1	350.000	100%	0%	1	350.000	100%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Daerah Banjir	%	17,34	134.163.438.030	0	16.941.162.668	15	23.631.909.810	10	488.835.477		4.473.400.923		7.609.216.086		4.771.949.950	10	17.343.402.436	67%	73%	10	34.284.565.104	58%	26%	

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	Km	1943	134.163.438.030	10	16.941.162.668	1943	23.631.909.810	10	488.835.477	4.473.400.923	7.609.216.086	4.771.949.950	10	17.343.402.436	0%	73%	20	34.284.565.104	0%	26%				
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Doc	32	4.696.654.000	7	469.749.868	8	1.583.900.000	0	0	0	0	8	530.604.800	8	530.604.800	100%	33%	15	1.000.354.668	47%	21%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yg dibangun	Km	1,5	115.844.751.460	1,5	14.455.315.164	1,5	19.623.725.900	0	8	4.053.407.100	3	7.237.909.253	3	3.530.254.920	3	14.821.571.273	200%	76%	5	29.276.886.437	300%	25%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan						-	0	-						0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						-	0	-						0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	Kecamatan	3	13.622.032.570	0	2.016.097.636	3	2.424.283.910	3	488.835.477	3	419.993.823	3	371.306.833	1	711.090.230	3	1.991.226.363	100%	82%	3	4.007.323.999	100%	29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						-	0	-						0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	6	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan						-	0	-						0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	6	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan						-	0	-						0	0	-	0%	0%	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	%	100	40.224.620.052	100	17.259.631.252	100	22.964.988.800	10	187.677.440	1.085.228.880	20	8.436.402.699	20	8.377.783.840	80	18.087.092.859	80%	79%	180	35.346.724.111	180%	88%		
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Persentase bangunan gedung sesuai	%	100	40.224.620.052	100	17.259.631.252	100	22.964.988.800	10	187.677.440	1.085.228.880	0	8.436.402.699	0	8.377.783.840	10	18.087.092.859	100%	79%	110	35.346.724.111	110%	88%		

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
					Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	dengan ketentuan																								
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	Pemohon	140	321.200.000	90	101.200.000	50	220.000.000	5	0	15	8.400.000	50	0	20	190.400.000	50	198.800.000	100%	90%	140	300.000.000	100%	93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	Gedung	5	39.903.420.052	5	17.158.431.252	5	22.744.988.800	5	187.677.440	5	1.076.828.880	5	8.436.402.699	5	8.187.383.840	5	17.888.292.859	100%	79%	5	35.046.724.111	100%	88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	33.837.976.602	100	16.079.357.572	100	17.758.619.030	10	1.299.367.700	80	3.558.840.650	100	5.752.206.435	50	2.720.468.285	100	13.330.883.070	100%	75%	100	29.410.240.642	100%	87%	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100	33.837.976.602	100	16.079.357.572	100	17.758.619.030	10	1.299.367.700	0	3.558.840.650	100	5.752.206.435	50	2.720.468.285	100	13.330.883.070	100%	75%	100	29.410.240.642	100%	87%	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	Lokasi	30	33.837.976.602	28	16.079.357.572	30	17.758.619.030	10	1.299.367.700	10	3.558.840.650	10	5.752.206.435	10	2.720.468.285	40	13.330.883.070	133%	75%	40	29.410.240.642	133%	87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%	96	369.216.807.819	94,5	51.401.827.135	95	60.815.610.250	40	141.550.000	60	14.474.516.108	90	20.193.761.552	0	10.650.097.185	90	45.459.924.845	95%	75%	90	96.861.751.980	94%	26%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	96	369.216.807.819	0	51.401.827.135	95	60.815.610.250	40	141.550.000	60	14.474.516.108	90	20.193.761.552	95	10.650.097.185	90	45.459.924.845	95%	75%	90	96.861.751.980	94%	26%	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Doc	40	5.776.092.300	9	2.191.783.600	10	3.041.182.000	5	0		87.723.110	3	19.780.000	5	1.054.519.000	13	1.162.023.031	130%	38%	22	3.353.806.698	55%	58%	Dinas Pekerjaan Umum



2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
					Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																							dan Penataan Ruang		
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	Hektar	1,5	90.825.007.130	0	-	5	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen	Doc	4	1.720.268.700	2	400.819.391	2	398.947.400	0	0	0	1	2.750.202	1	350.000	2	3.100.202	100%	1%	4	403.919.593	100%	23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yg dibangun	Meter	200	109.884.119.582	180	24.348.027.110	100	18.956.523.600	5	0	500	4.986.809.793	900	8.154.635.600	100	0	100	17.305.836.196	100%	91%	100	41.653.863.306	500%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yang dilebarkan	Ruas	12	1.941.900.000	6	2.285.222.736	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajurnya	Ruas	1	50.650.594.800	1	3.670.833.665	1	9.170.298.000	0	0	0	1.452.641.056	1	2.318.661.600	1	1.256.975.328	1	5.028.277.984	100%	55%	2	8.699.111.649	200%	17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan			0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	12	79.976.239.815	6	14.025.553.199	6	19.458.524.250	0	0	3	5.849.875.165	3	7.010.929.500	3	1.289.262.071	9	14.150.066.736	150%	73%	15	28.175.619.935	125%	35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Ruas	28	16.457.503.992	28	2.977.126.341	28	6.652.665.200	10	141.550.000	8	1.990.090.672	10	1.381.006.700	10	1.424.714.820	38	4.937.362.192	136%	74%	66	7.914.488.533	236%	48%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	11.034.685.500	1	1.071.618.025	1	2.912.814.000	0	0	0	6.940.302	1	1.206.930.450	1	1.437.134.248	1	2.651.005.000	100%	91%	2	3.722.623.025	200%	34%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	13	Rehabilitasi Jembatan			0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan	

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	3	10	201	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jembatan	10	950.396.000	10	430.843.001	10	224.655.000	5	0	0	100.436.004	5	99.067.500	5	22.750.000	15	222.253.504	150%	99%	25	653.096.505	250%	69%	Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	96,5	2.193.400.000	47,68	181.546.500	95	820.000.000	5	12.964.800	20	30.242.500	25	46.449.780	25	217.395.315	75	307.052.395	79%	37%	123	488.598.895	127%	22%	
1	3	11	201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	Orang	700	1.096.700.000	100	113.701.200	200	550.000.000	5	12.964.800	20	7.842.500	25	36.306.500	25	51.996.000	25	109.109.800	13%	20%	125	222.811.000	18%	20%	
1	3	11	201	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	Orang	700	1.096.700.000	20	113.701.200	200	550.000.000	5	12.964.800	10	7.842.500	25	36.306.500	100	51.996.000	140	109.109.800	70%	20%	160	222.811.000	23%	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	Orang	200	1.096.700.000	45	67.845.300	200	270.000.000	0	0	20	22.400.000	0	10.143.280	100	165.399.315	120	197.942.595	60%	73%	165	265.787.895	83%	24%	
1	3	11	203	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	BUJK	200	1.096.700.000	50	67.845.300	50	270.000.000	0	0	20	22.400.000	25	10.143.280	30	165.399.315	25	197.942.595	50%	73%	75	265.787.895	38%	24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Ketaatan Terhadap RT/RW	%	100	6.355.100.000	100	1.051.864.988	100	1.743.210.320	10	56.122.032	50	71.541.586	0	194.387.457	50	386.888.932	110	708.940.007	110%	41%	210	1.760.804.995	210%	28%	
1	3	12	201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang di tetapkan	Doc	4	3.953.100.000	1	743.163.555	1	973.210.320	0	23.786.730	0	30.803.268	0	178.921.187	1	39.568.511	1	273.079.696	100%	28%	2	1.016.243.251	50%	26%	
1	3	12	201	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	4	1.497.800.000	1	743.163.555	1	179.500.000	0	0	0	13.179.649	0	7.442.724	1	15.959.599	1	36.581.972	100%	20%	2	779.745.527	50%	52%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	201	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan	Jumlah dokumen	Doc	4	2.078.500.000	0	0	1	713.710.320	0	23.786.730	0	17.623.619	0	171.478.463	1	23.608.912	1	236.497.724	100%	33%	1	236.497.724	25%	11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)		K	Rp. (000)	K
					RRTR Kabupaten/Kota																											
1	3	1	2	01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	Kali	3	376.800.000	0	0	3	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan ruang	Doc	1	829.600.000	1	141.333.299	1	330.000.000	0	16.697.970	0	22.688.370	0	7.729.790	0	112.303.749	0	159.419.879	0%	48%	1	300.753.178	100%	36%		
1	3	1	2	03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%	100	829.600.000	100	141.333.299	100	330.000.000	0	16.697.970	50	22.688.370	100	7.729.790	50	112.303.749	100	159.419.879	100%	48%	100	300.753.178	100%	36%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	Doc	1	1.572.400.000	1	167.368.134	1	440.000.000	0	15.637.332	0	18.049.948	0	7.736.480	0	235.016.672	0	276.440.432	0%	63%	1	443.808.566	100%	28%		
1	3	1	2	04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Peningkatan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	%	100	1.572.400.000	100	167.368.134	100	440.000.000	0	15.637.332	80	18.049.948	100	7.736.480	100	235.016.672	100	276.440.432	100%	63%	100	443.808.566	100%	28%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																
1	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	%	100	12.869.561.000	100	1.190.148.204	100	3.132.833.210	33	914.786.162	60	185.115.558	75	797.994.750	100	748.987.404	100	2.646.883.874	100%	84%	100	3.837.032.078	1	30%		
1	4	2		01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Doc	4	538.350.000	1	75.350.000	1	261.850.000	0	4.845.000	1	31.425.000	0	199.181.500	0	18.214.400	1	253.665.900	100%	97%	2	329.015.900	50%	61%		
1	4	2		01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Doc	4	538.350.000	1	75.350.000	1	261.850.000	0	4.845.000	1	31.425.000	0	199.181.500	0	18.214.400	1	253.665.900	100%	97%	2	329.015.900	50%	61%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	2		03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Lokasi	4	8.081.261.000	1	1.114.798.204	1	1.682.733.210	1	126.933.700	1	129.670.558	1	424.033.000	0	662.359.904	1	1.342.997.162	100%	80%	2	2.457.795.366	50%	30%		
Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN																																

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
					Kabupaten/Kota																										
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	Lokasi		2	8.081.261.000	1	1.114.798.204	1	1.682.733.210	1	126.933.700	1	129.670.558	1	424.033.000	0	662.359.904	1	1.342.997.162	100%	80%	2	2.457.795.366	100%	30%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	%	100	4.249.950.000	0	-	100	1.188.250.000	70	783.007.462	80	24.020.000	90	174.780.250	100	68.413.100	100	1.050.220.812	100%	88%	100	1.050.220.812	100%	25%		
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	%	100	4.249.950.000	0	-	100	1.188.250.000	70	783.007.462	80	24.020.000	90	174.780.250	100	68.413.100	100	1.050.220.812	100%	88%	100	1.050.220.812	100%	25%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	%	100	26.376.615.983	98,5	6.804.641.989	99	6.184.190.010	0	63.438.500	0	2.074.431.900	0	1.247.847.847	100	2.105.669.625	100	5.491.387.872	101%	89%	199	12.296.029.861	2	47%		
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	751.286.000	0,89	199.381.100	0,5	101.150.000	0	0	0,1	1.975.000	0,2	43.245.000	0,2	53.799.000	1	99.019.000	100%	98%	1	298.400.100	278%	40%		
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Doc	4	751.286.000	1	199.381.100	1	101.150.000	0	0	0	1.975.000	1	43.245.000	0	53.799.000	1	99.019.000	100%	98%	2	298.400.100	50%	40%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	25.625.329.983	0,89	6.605.260.89	0,5	6.083.040.010	0	63.438.500	0	2.072.456.900	0	1.204.602.847	0,5	2.051.870.625	1	5.392.368.872	100%	89%	1	11.997.629.761	278%	47%		
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Doc	12	1.239.264.343	5	396.263.600	3	220.194.000	1	6.965.000	1	84.183.000	0	85.469.000	1	40.260.000	3	216.877.000	100%	98%	8	613.140.600	67%	49%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan	%	100	8.603.895.000	100	2.681.657.500	100	1.458.500.000	5	15.034.500	70	1.232.430.000	0	37.929.600	100	207.342.500	100	1.492.737.500	100%	102%	100	4.174.395.050	100%	49%	Dinas Perumahan Rakyat	

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
						perbaikan yang sesuai kriteria																						dan Kawasan Perumahan		
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Lokasi	6	15.782.170.640	3	3.527.339.739	3	4.404.346.010	1	41.439.000	1	755.843.000	2	1.081.204.247	1	1.804.268.125	5	3.682.754.372	167%	84%	8	7.210.094.111	133%	46%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
1	4	5			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	%	100	96.514.035.970	100	17.947.079.067	100	27.365.560.250	25	2.634.238.020	25	3.872.432.950	25	6.704.236.083	25	9.595.506.433	100	22.806.413.486	100%	83%	100	40.753.492.553	100%	42%	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	%	100	96.514.035.970	100	17.947.079.067	100	27.365.560.250	25	2.634.238.020	25	3.872.432.950	25	6.704.236.083	25	9.595.506.433	100	22.806.413.486	100%	83%	100	40.753.492.553	100%	42%	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi prasarana sarana dan utilitas umum yang disediakan	Lokasi	3	96.514.035.970	3	17.947.079.067	3	27.365.560.250	3	2.634.238.020	3	3.872.432.950	0	6.704.236.083	0	9.595.506.433	3	22.806.413.486	100%	83%	3	40.753.492.553	100%	42%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																														
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kasus K3 (Ketertiban Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota</b>	%	97	27.308.110.859	97	4.253.866.859	97	5.019.188.060	23	839.758.250	42	996.290.500	67	863.470.700	67	1.887.719.569	67	4.587.239.019	69%	91%	164	8.841.105.878	169%	32%	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	%	97	22.730.841.288	97	3.217.963.288	97	4.183.711.100	23	730.788.700	40	864.358.900	68	847.177.450	68	1.325.614.300	68	3.767.939.350	70%	90%	100	6.985.902.638	103%	31%	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	%	100	4.406.494.917	100	776.182.917	100	1.642.740.000	100	301.078.900	100	297.101.900	100	348.835.250	100	545.827.500	100	1.492.843.550	100%	91%	100	2.269.026.467	100%	51%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)	K (%)
1	5	2	2.01	2	dan Pengawasan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	%	97	4.988.494.391	100	1.840.179.391	97	752.071.020	97	92.311.800	97	222.308.900	97	103.590.750	97	244.756.700	97	662.968.150	100%	88%	97	2.503.147.541	100%	50%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	%	90	381.875.826	90	76.331.826	90	177.119.000	90	17.150.000	90	18.784.500	90	3.000.000	90	60.058.000	90	98.992.500	100%	56%	80	175.324.326	89%	46%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	%	92	12.125.057.000	100	322.100.000	92	1.249.670.000	92	230.785.000	92	290.083.600	92	298.091.450	92	370.595.550	92	1.189.555.600	100%	95%	92	1.511.655.600	100%	12%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Perindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	%	80	828.919.154	100	203.169.154	80	362.111.080	80	89.463.000	80	36.080.000	80	93.660.000	80	104.376.550	80	323.579.550	100%	89%	80	526.748.704	100%	64%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	100	3.909.145.571	100	1.035.903.571	100	835.476.960	100	108.969.550	100	131.931.600	100	16.293.250	100	562.105.269	100	819.299.669	100%	98%	100	1.855.203.240	100%	47%	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	%	100	1.325.504.795	100	164.738.795	100	534.100.000	25	37.372.050	57	14.725.350	73	2.564.500	73	479.365.119	73	534.027.019	73%	100%	73	698.765.814	73%	53%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp. (000)
						Bupati/Wali Kota																									
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Tertangani	%	100	2.583.640.776	100	871.164.776	100	301.376.960	100	71.597.500	100	117.206.250	100	13.728.750	100	82.740.150	100	285.272.650	100%	95%	100	1.156.437.426	100%	45%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Berkompeten	%	80	668.124.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	125%	0%		
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS Yang Berkompeten	%	100	668.124.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	%	100	6.931.174.000	100	1.298.855.181	100	1.501.597.000	45,83	360.220.076	17,5	184.145.000	23,3	311.830.000	13,3	581.948.900	100	1.438.143.976	100%	96%	100	2.736.999.157	100%	39%		
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	784.445.000	100	64.629.673	100	155.867.000	0	0	15	15.945.000	70	-	15	136.258.400	100	152.203.400	100%	98%	100	216.833.073	100%	28%		
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	%	100	255.000.000	0	-	100	50.000.000	0	0	0	0	0	100	0	0	49.883.400	100	49.883.400	100%	100%	100	49.883.400	100%	20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	100	529.445.000	100	64.629.673	100	105.867.000	0	0	30	15.945.000	40	0	30	86.375.000	100	102.320.000	100%	97%	100	166.949.673	100%	32%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	5.815.429.000	100	1.139.291.248	100	1.252.364.000	62,5	329.417.500	37,5	168.200.000	0	311.830.000	0	384.285.000	100	1.193.732.500	100%	95%	100	2.333.023.748	100%	40%		
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	%	100	568.603.000	100	87.270.220	100	194.218.000	50	56.863.000	50	0	0	74.205.000	0	61.500.000	100	192.568.000	100%	99%	100	279.838.220	100%	49%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	%	100	388.686.000	100	73.866.707	100	60.021.000	100	59.764.500	0	0	0	0	0	100	59.764.500	100%	100%	100	133.631.207	100%	34%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	%	100	181.350.000	100	57.141.161	100	50.000.000	0	0	100	20.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	100	60.000.000	100%	120%	100	117.141.161	100%	65%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	%	100	4.676.790.000	100	921.013.160	100	948.125.000	100	212.790.000	0	148.200.000	0	227.625.000	0	292.785.000	100	881.400.000	100%	93%	100	1.802.413.160	100%	39%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	331.300.000	100	94.934.260	100	93.366.000	75	30.802.576	0	0	0	25	61.405.500	100	92.208.076	100%	99%	100	187.142.336	100%	56%		
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	%	100	331.300.000	100	94.934.260	100	93.366.000	75	30.802.576	0	0	0	25	61.405.500	100	92.208.076	100%	99%	100	187.142.336	100%	56%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	5.179.457.856	100	1.230.711.856	100	1.273.750.000	100	140.638.000	100	157.651.000	100	158.008.300	100	429.265.610	100	885.562.910	100%	70%	100	2.116.274.766	100%	41%	
1	5	4	2.01		Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	4.740.246.296	100	1.191.500.296	100	1.109.250.000	100	140.638.000	100	157.651.000	100	158.008.300	100	421.112.310	100	877.409.610	100%	79%	100	2.068.909.906	100%	44%	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	80	3.733.820.120	100	863.830.120	80	862.850.000	80	118.726.000	80	138.295.000	80	149.668.300	80	350.322.250	80	757.011.550	100%	88%	80	1.620.841.670	100%	43%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1.006.426.176	100	327.670.176	100	246.400.000	100	21.912.000	100	19.356.000	100	8.340.000	100	70.790.060	100	120.398.060	100%	49%	100	448.068.236	100%	45%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	%	90	439.211.560	100	39.211.560	90	164.500.000	0	0	0	0	0	0	90	8.153.300	90	8.153.300	100%	5%	100	47.364.860	111%	11%	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	%	90	439.211.560	100	39.211.560	100	164.500.000	0	0	0	0	0	0	100	8.153.300	100	8.153.300	100%	5%	100	47.364.860	111%	11%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																									
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	91	14.238.839.814	90	2.157.043.759	91	4.174.489.850	0	114.744.300	0	278.140.810	0	392.454.513	58	3.327.805.875	58	4.113.145.498	64%	99%	148	6.270.189.257	163%	44%	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang dibina	%	91	14.238.839.814	90	2.157.043.759	91	4.174.489.850	0	114.744.300	0	278.140.810	0	392.454.513	91	3.327.805.875	91	4.113.145.498	100%	99%	100	6.270.189.257	110%	44%	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Orang	270	1.369.827.687	135	94.654.700	135	519.878.200	35	29.717.500	135	140.043.710	0	50.189.163	0	241.484.050	170	461.434.423	126%	89%	305	556.089.123	113%	41%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	160	240.958.540	178	4.364.000	80	47.823.400	77	6.480.500	92	7.866.750	0	6.744.300	0	21.207.250	169	42.298.800	211%	88%	347	46.662.800	217%	19%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Lemaba	1	798.049.100	1	2.819.300	1	188.638.150	0	2.327.050	0	5.601.350	0	2.420.250	1	120.605.350	1	130.954.000	100%	69%	1	133.773.300	100%	17%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Lemaba	38	11.830.004.487	5	2.055.205.759	5	3.418.150.100	5	76.219.250	5	124.629.000	0	333.100.800	0	2.944.509.225	10	3.478.458.275	200%	102%	15	5.533.664.034	39%	47%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2				3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP. (%)		K	Rp. (000)	K	RP. (%)
				Kewenangan Kabupaten/Kota																										
1	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	%	19	7.806.388.439	0	1.367.546.139	19	2.673.729.247	0	88.851.350	0	135.636.750	0	201.687.240	19	1.908.234.900	19	2.334.410.240	100%	87%	19	3.701.956.379	100%	47%		
1	6	4	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani	%	100	6.213.207.508	0	1.179.258.397	100	2.288.452.130	0	38.159.000	0	67.394.000	0	106.032.200	100	1.753.565.500	100	1.965.150.700	100%	86%	100	3.144.409.097	100%	51%		
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	650	1.074.393.000	464	412.710.801	160	213.655.500	30	25.509.000	70	43.104.000	68	42.064.500	63	69.957.000	231	180.634.500	144%	85%	695	593.345.301	107%	55%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	183	119.620.001	64	14.996.900	50	31.734.271	0	-	24	2.880.000	6	17.865.500	83	4.227.000	113	24.972.500	226%	79%	177	39.969.400	97%	33%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	Orang	43	83.633.370	6	6.444.000	10	42.663.212	0	-	0	-	17	-	0	32.398.000	17	32.398.000	170%	76%	23	38.842.000	53%	46%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan	Orang	47	149.330.000	10	11.870.000	15	42.300.000	0	-	1	680.000	1	4.320.000	16	36.311.500	18	41.311.500	120%	98%	28	53.181.500	60%	36%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
						reunifikasi keluarga																								
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	Orang	127	155.410.000	300	49.840.000	60	26.700.000	0	-	1	700.000	15	5.100.000	72	18.000.000	88	23.800.000	147%	89%	388	73.640.000	306%	47%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Orang	1086	4.340.878.735	317	649.363.296	286	1.675.490.145	14	7.970.000	15	12.420.000	15	21.332.200	269	1.532.247.000	313	1.573.969.200	109%	94%	630	2.223.332.496	58%	51%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	Orang	68	289.942.402	28	34.033.400	40	255.909.002	5	4.680.000	6	7.610.000	14	15.350.000	16	60.425.000	41	88.065.000	103%	34%	69	122.098.400	101%	42%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani	%	100	1.593.180.931	100	188.287.742	100	385.277.117	0	50.692.350	0	68.242.750	0	95.655.040	100	154.669.400	100	369.259.540	100%	96%	100	557.547.282	100%	35%	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	Orang	90	748.593.361	35	135.995.742	15	157.824.605	7	13.980.000	11	21.600.000	8	37.229.000	18	71.030.000	18	143.839.000	120%	91%	53	279.834.742	59%	37%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	660	301.152.900	0	-	150	99.493.200	145	14.879.250	180	21.297.750	145	23.340.000	345	39.911.400	345	99.428.400	230%	100%	345	99.428.400	52%	33%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	315	104.654.626	100	19.750.000	105	20.646.890	20	3.961.600	20	3.290.000	45	4.916.040	35	8.200.000	120	20.367.640	114%	99%	220	40.117.640	70%	38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	Orang	53	37.548.488	7	3.942.000	7	10.400.830	0	-	0	-	7	10.200.000	0	-	7	10.200.000	100%	98%	14	14.142.000	26%	38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	Orang	230	62.844.516	0	-	20	7.971.592	10	3.413.500	0	4.005.000	0	-	0	480.000	10	7.898.500	50%	99%	10	7.898.500	4%	13%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	Orang	412	272.377.040	15	17.360.000	132	75.200.000	126	12.300.000	149	18.050.000	128	19.600.000	345	24.550.000	345	74.500.000	261%	99%	360	91.860.000	87%	34%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)		K	Rp. (000)	K	Rp. (%)
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	58	66.010.000	6	11.240.000	10	13.740.000	1	2.158.000	0	-	1	370.000	10	10.498.000	10	13.026.000	100%	95%	16	24.266.000	28%	37%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>%</b>	<b>91</b>	<b>45.230.340.000</b>	<b>90</b>	<b>6.248.032.650</b>	<b>90</b>	<b>11.931.241.350</b>	<b>0</b>	<b>834.230.000</b>	<b>0</b>	<b>4.188.467.200</b>	<b>0</b>	<b>1.969.104.197</b>	<b>93</b>	<b>8.637.606.250</b>	<b>93</b>	<b>15.629.407.647</b>	<b>103%</b>	<b>131%</b>	<b>91</b>	<b>21.877.440.297</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	98	33.922.800	90	1.650.000	90	6.840.000	0	200.000	0	100.000	0	706.647	12	-	12	1.006.647	13%	15%	100	2.656.647	102%	8%	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	Orang	78	15.516.000	8	1.650.000	24	3.000.000	3	150.000	3	100.000	1	200.000	5	-	12	450.000	50%	15%	20	2.100.000	26%	14%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Orang	64	17.544.800	0	-	24	3.640.000	2	50.000	2	-	0	506.647	2	-	6	556.647	25%	15%	6	556.647	9%	3%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Orang	64	862.000	0	-	24	200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>45.196.417.200</b>	<b>100</b>	<b>6.246.382.650</b>	<b>100</b>	<b>11.924.401.350</b>	<b>0</b>	<b>834.030.000</b>	<b>0</b>	<b>4.188.367.200</b>	<b>0</b>	<b>1.968.397.550</b>	<b>100</b>	<b>8.637.606.250</b>	<b>100</b>	<b>15.628.401.000</b>	<b>100%</b>	<b>131%</b>	<b>100</b>	<b>21.874.783.650</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang di data	Orang	73.412	4.478.620.250	10000	795.743.200	14042	1.674.171.300	24685	174.063.000	24685	82.611.400	27599	210.171.500	31460	320.333.700	27599	787.179.600	197%	47%	37599	1.582.922.800	51%	35%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verwal DTKS	Kelurahan	27	3.116.180.930	27	568.259.550	27	588.234.500	0	-	27	208.785.000	0	112.230.000	27	210.531.100	27	531.546.100	100%	90%	27	1.099.805.650	100%	35%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	KK	15.144	37.257.471.930	5294	4.864.957.400	3892	9.562.828.050	641	659.967.000	3707	3.880.970.800	3797	1.582.880.650	9715	8.106.741.450	17860	14.230.559.900	459%	149%	23154	19.095.517.300	153%	51%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	KUBE	20	344.144.090	10	17.422.500	10	99.167.500	0	-	0	16.000.000	10	63.115.400	0	-	10	79.115.400	100%	80%	20	96.537.900	100%	28%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana</b>	%	100	2.614.920.015	100	292.199.950	100	696.896.928	0	63.654.400	0	98.676.000	0	106.664.550	100	299.195.384	100	568.190.334	100%	82%	100	860.390.284	100%	33%	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan	%	100	354.500.337	100	10.387.500	100	49.353.500	0	15.264.400	0	1.320.000	0	5.000.000	100	10.178.000	100	31.762.400	100%	64%	100	42.149.900	100%	12%	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Orang	7.200	143.783.893	400	6.037.500	3300	22.708.300	125	14.764.400	5	1.320.000	1585	-	1585	-	3300	15.176.410	100%	67%	3700	21.213.910	51%	15%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Orang	2.600	61.205.244	0	-	1000	15.178.000	0	-	0	-	250	5.000.000	1000	10.178.000	1250	15.178.000	125%	100%	1250	15.178.000	48%	25%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	Orang	630	149.511.200	10	4.350.000	300	11.467.200	10	500.000	0	-	0	-	0	-	10	500.000	3%	4%	20	4.850.000	3%	3%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap	Prosentase kelurahan yang mendapatkan sosialisasi	%	100	2.260.419.678	100	281.812.450	100	647.543.428	0	48.390.000	0	97.356.000	0	101.664.550	100	289.017.384	100	536.427.934	100%	83%	100	818.240.384	100%	36%	

2					3	4			5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)
					Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	kampung siaga bencana																								
1	6	6	2.02	1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Orang	120	430.414.100	60	11.250.000	60	154.290.100	0	-	60	18.986.000	0	1.440.000	0	133.132.100	60	153.558.100	100%	100%	120	164.808.100	100%	38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	Orang	106	1.830.005.578	20	270.562.450	26	493.253.328	26	48.390.000	26	78.370.000	0	100.224.550	26	155.885.284	26	382.869.834	100%	78%	46	653.432.284	43%	36%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	%	100	691.694.750	100	91.183.150	100	214.966.380	0	23.498.420	0	18.433.800	0	73.493.550	100	37.991.230	100	153.417.000	100%	71%	100	244.600.150	100%	35%	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	691.694.750	100	91.183.150	100	214.966.380	0	23.498.420	0	18.433.800	0	73.493.550	100	37.991.230	100	153.417.000	100%	71%	100	244.600.150	100%	35%	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	Paket	2	691.694.750	1	91.183.150	1	214.966.380	1	23.498.420	1	18.433.800	0	73.493.550	0	37.991.230	1	153.417.000	100%	71%	2	244.600.150	100%	35%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				95%	75%									
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sedang									
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana. 2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																														
<b>Faktor Penghambat :</b> 1. Adanya gagal lelang pada Dinas Pendidikan untuk pengadaan laptop bagi siswa kelas 5 SD dan 2 SMP dikarenakan laptop yang dikirimkan berbeda dengan spesifikasi yang ada pada kontrak																														
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																														
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b> 1. Lebih berhati - hati dalam pelaksanaan pengadaan dengan nominal besar, melakukan komunikasi secara intes kepada pihak penyedia agar tidak terjadi miss komunikasi yang menyebabkan barang yang disediakan penyedia berbeda dengan kontrak yang sudah disusun																														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
							I	II	III	IV																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																															
2	7	3				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVI TAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih	%	23	4.175.201. 450	23	366.270.6 83	23	1.126.236.77 0	0	314.969.95 0	0	218.979.5 25	0	296.972.440	23	269.687.800	23	1.100.60 9.715	100 %	98 %	23	1.466.88 0.398	100 %	35%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2. 01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	tersedianya peserta pelatihan yang berkompeten	Orang	310	4.120.201. 450	90	328.928.8 48	220	1.095.031.65 0	0	307.602.55 0	0	211.212.1 25	0	291.405.040	220	262.720.400	220	1.072.94 0.115	100 %	98 %	310	1.401.86 8.963	100 %	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2. 01	1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Orang	310	4.120.201. 450	128	328.928.8 48	220	1.095.031.65 0	61	307.602.55 0	18	211.212.1 25	42	291.405.040	0	262.720.400	121	1.072.94 0.115	55 %	98 %	249	1.401.86 8.963	80%	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2. 02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang terakreditasi	%	20	55.000.000	20	37.341.83 5	20	31.205.120	0	7.367.400	0	7.767.400	0	5.567.400	41, 38	6.967.400	41	27.669.6 00	207 %	89 %	41	65.011.4 35	205 %	118 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2. 02	1		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	Pembinaan	8	55.000.000	4	37.341.83 5	4	31.205.120	1	7.367.400	1	7.767.400	1	5.567.400	1	6.967.400	4	27.669.6 00	100 %	89 %	8	65.011.4 35	100%	118 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4				PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	79	2.314.797. 090	79, 15	250.427.0 43	79	591.982.762	0	26.271.000	50, 63	193.771.3 05	0	62.118.565	63	127.316.030	63	409.476. 900	80 %	69 %	63	659.903. 943	80%	29%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2. 03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri	Orang	890	2.314.797. 090	391	250.427.0 43	225	591.982.762	229	26.271.000	12	193.771.3 05	361	62.118.565	0	127.316.030	361	409.476. 900	160 %	69 %	752	659.903. 943	84%	29%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	Aplikasi & Doc	2	745.829.416	1	118.613.217	1	171.997.912	0	15.804.000	0	54.850.955	0	33.181.565	1	44.049.130	1	147.885.650	100%	86%	2	266.498.867	100%	36%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	Orang	775	1.355.837.880	350	118.957.872	200	419.984.850	180	10.467.000	89	138.920.350	169	28.937.000	0	83.266.900	169	261.591.250	85%	62%	519	380.549.122	67%	28%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Orang	50	213.129.794	5	12.855.954	50	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0%	0%	5	12.855.954	10%	6%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Prosentase Penurunan Kasus - Kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>7.712.488.490</b>	<b>0</b>	<b>1.520.898.234</b>	<b>10</b>	<b>1.679.255.360</b>	<b>0</b>	<b>246.144.100</b>	<b>0</b>	<b>482.010.940</b>	<b>0</b>	<b>330.041.100</b>	<b>10</b>	<b>486.948.890</b>	<b>10</b>	<b>1.545.145.030</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>	<b>10</b>	<b>3.066.043.264</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB	%	25	1.878.698.170	31	473.365.916	25	250.212.800	0	8.918.500	0	155.489.000	0	30.665.800	31	28.507.500	31	223.580.800	124%	89%	62	696.946.716	248%	37%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	Doc	30	791.480.550	15	235.643.550	15	47.615.000	0	-	2	0	6	30.665.800	7	-	15	30.665.800	100%	64%	30	266.309.350	100%	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	Perusahaan	600	1.087.217.620	300	237.722.366	200	202.597.800	50	8.918.500	200	155.489.000	20	-	50	28.507.500	200	192.915.000	100%	95%	500	430.637.366	83%	40%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	75	5.833.790.320	100	1.047.532.318	75	1.429.042.560	0	237.225.600	0	326.521.940	0	299.375.300	100	458.441.390	100	1.321.564.230	133%	92%	100	2.369.096.548	133%	41%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																													Dan Menengah
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	Kasus Terselesaikan	60	423.042.880	15	86.418.567	15	90.829.000	6	4.000.000	4	12.316.500	0	26.239.480	5	39.032.870	15	81.588.850	100%	90%	30	168.007.417	50%	40%			Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Orang	18.500	5.410.747.440	4215	961.113.751	4000	1.338.213.560	4262	233.225.600	745	314.205.440	48	273.135.820	4851	419.408.520	4851	1.239.975.380	121%	93%	9066	2.201.089.131	49%	41%			Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																																		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSU TAMBAHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	15	2.937.323.580	7	287.281.549	15	781.965.670	11	60.345.850	0	197.978.650	0	151.528.450	0	308.255.250	11	718.108.200	73%	92%	11	1.005.389.749	73%	34%					
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase program yang di ARG	%	15	921.306.930	10	123.367.488	10	253.559.080	10	49.863.850	0	37.551.450	0	6.814.500	0	150.026.800	10	244.256.600	100%	96%	10	367.624.088	67%	40%					
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	Doc	98	419.871.330	0	90.239.488	34	135.718.050	0	36.675.300	34	8.169.000	0	6.814.500	0	81.350.500	34	133.009.300	100%	98%	34	223.248.788	35%	53%			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	Orang	725	214.783.100	475	13.531.100	375	57.775.550	45	4.501.000	125	21.170.900	80	-	125	29.260.750	375	54.932.650	100%	95%	850	68.463.750	117%	32%			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	Orang	138	133.924.120	68	5.251.500	70	50.348.700	0	-	70	8.211.550	0	-	0	39.415.550	70	47.627.100	100%	95%	138	52.878.600	100%	39%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	Orang	175	152.728.380	100	14.345.400	75	9.716.780	80	8.687.550	0	-	0	-	0	-	80	8.687.550	107%	89%	80	23.032.950	46%	15%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi</b>	%	32,5	383.588.380	0	131.271.093	12,5	176.867.070	0	10.482.000	13	57.361.500	0	54.439.750	0	41.529.550	13	163.812.800	100%	93%	13	295.083.893	40%	77%	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Orang	320	151.666.300	127	11.179.700	180	67.100.000	10	10.482.000	90	23.052.600	0	23.052.600	0	10.482.000	100	67.069.200	56%	100%	227	78.248.900	71%	52%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Orang	278	231.922.080	108	120.091.393	116	109.767.070	0	-	116	34.308.900	0	31.387.150	0	31.047.550	116	96.743.600	100%	88%	224	216.834.993	81%	93%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina</b>	%	60	1.632.428.270	0	32.642.968	50	351.539.520	0	-	50	103.065.700	0	90.274.200	75	116.698.900	75	310.038.800	150%	88%	75	342.681.768	125%	21%	
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan	Lembaga	15	65.216.000	0	-	15	65.466.000	0	-	15	48.776.300	0	-	0	10.478.300	15	59.254.600	100%	91%	15	59.254.600	100%	91%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan perempuan																										Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Orang	1.270	1.323.491.920	228	32.642.968	80	83.985.670	0	-	40	12.635.250	0	-	40	51.582.300	80	64.217.550	100%	76%	308	96.860.518	24%	7%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	Lembaga	32	243.720.350	0	-	32	202.087.850	0	-	32	41.654.150	0	90.274.200	0	54.638.300	32	186.566.650	100%	92%	32	186.566.650	100%	77%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak</b>	Nilai	0,002	1.320.328.050	0	222.887.236	0,003	373.259.905	0	55.621.775	0	53.349.790	0	40.008.750	0,004	123.549.210	0,004	272.529.525	133%	73%	0,004	495.416.761	200%	38%			
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	100	303.447.610	100	26.670.623	67,39	90.284.475	0	18.733.665	0	-	0	600.000	67	68.690.160	67	88.023.825	100%	97%	100	114.694.448	100%	38%			
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Orang	59	198.112.655	18	16.420.553	50	70.759.965	0	-	0	-	0	-	50	68.690.160	50	68.690.160	100%	97%	68	85.110.713	115%	43%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Orang	80	105.334.955	30	10.250.070	50	19.524.510	50	18.733.665	0	-	0	600.000	0	-	50	19.333.665	100%	99%	80	29.583.735	100%	28%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	%	95	764.034.270	0	156.276.201	56	265.495.930	0	26.667.000	0	51.899.790	0	37.200.000	53	51.500.300	53	167.267.090	94%	63%	53	323.543.291	56%	42%	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	80	764.034.270	60	156.276.201	40	265.495.930	0	26.667.000	40	51.899.790	0	37.200.000	40	51.500.300	40	167.267.090	100%	63%	100	323.543.291	125%	42%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	%	100	252.846.170	100	39.940.412	100	17.479.500	0	10.221.110	0	1.450.000	0	2.208.750	100	3.358.750	100	17.238.610	100%	99%	100	57.179.022	100%	23%	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Klien	49	185.416.280	24	24.887.612	20	7.567.500	2	550.000	10	1.450.000	3	2.208.750	5	3.358.750	20	7.567.500	100%	100%	44	32.455.112	90%	18%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	60	67.429.890	30	15.052.800	30	9.912.000	30	9.671.110	0	-	0	-	30	9.671.110	30	9.671.110	100%	98%	60	24.723.910	100%	37%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	%	30	2.084.179.590	5	189.385.756	10	780.466.550	0	180.874.700	0	117.987.250	0	180.609.900	16	216.649.630	16	696.121.480	157%	89%	16	885.507.236	53%	42%	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase peserta yang memahami	%	100	1.042.342.000	70	51.423.910	80	189.761.150	80	89.444.400	80	30.826.500	0	14.742.750	80	30.013.500	80	165.027.150	100%	87%	80	216.451.060	80%	21%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)	Rp. (%)
					dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kesetaraan gender dan hak anak																										
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	Orang	192	395.831.430	326	9.929.930	111	56.100.200	192	49.774.200	0	-	0	-	0	600.000	192	50.374.200	173%	90%	518	60.304.130	270%	15%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	RT	108	550.531.980	245	20.556.980	108	59.869.000	0	-	162	14.826.500	0	12.837.000	0	16.435.500	162	44.099.000	150%	74%	407	64.655.980	377%	12%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	Orang	301	95.978.950	220	20.937.000	81	73.791.950	0	39.670.200	192	16.000.000	0	1.905.750	0	12.978.000	192	70.553.950	237%	96%	412	91.490.950	137%	95%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang aktif dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak	%	100	751.237.050	11	40.243.770	100	475.187.650	100	88.924.550	100	75.359.250	100	118.570.650	100	166.623.630	100	449.478.080	100%	95%	100	489.721.850	100%	65%			
2	8	4	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan	Jumlah peserta rakor dan peningkatan kualitas keluarga	Orang	235	41.899.900	135	20.749.770	100	20.949.900	192	20.949.900	0	-	0	-	0	-	192	20.949.900	192%	100%	327	41.699.670	139%	100%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																											Perlindungan Anak
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Lembaga	14	350.329.300	0	-	14	73.941.900	0	-	0	447.000	14	42.750.000	0	30.063.330	14	73.260.330	100%	99%	14	73.260.330	100%	21%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	Orang	102	359.007.850	0	19.494.000	102	380.295.850	0	67.974.650	102	74.912.250	0	75.820.650	0	136.560.300	102	355.267.850	100%	93%	102	374.761.850	100%	104%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak	%	100	290.600.180	100	97.718.076	100	115.517.750	0	2.505.750	100	11.801.500	100	47.296.500	100	20.012.500	100	81.616.250	100%	71%	100	179.334.326	100%	62%			
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Orang	481	290.600.180	400	97.718.076	81	115.517.750	0	2.505.750	162	11.801.500	0	47.296.500	0	20.012.500	162	81.616.250	200%	71%	562	179.334.326	117%	62%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	Doc	3	822.299.192	0	110.839.683	1	211.302.480	0	25.623.450	0	30.837.400	0	75.564.970	1	53.280.500	1	185.306.320	100%	88%	1	296.146.003	33%	36%	
2	8	5	2.01		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengumpulan data gender dan anak	%	100	822.299.192	100	110.839.683	100	211.302.480	0	25.623.450	0	30.837.400	0	75.564.970	100	53.280.500	100	185.306.320	100%	88%	100	296.146.003	100%	36%	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	Orang	115	352.915.572	50	66.241.583	65	48.920.130	65	19.230.650	0	938.700	0	12.944.470	0	14.610.000	65	47.723.820	100%	98%	115	113.965.403	100%	32%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	Orang	115	469.383.620	50	44.598.100	65	162.382.350	0	6.392.800	65	29.898.700	0	62.620.500	0	38.670.500	65	137.582.500	100%	85%	115	182.180.600	100%	39%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,2	1.603.097.980	0	249.141.596	12,5	386.281.631	0	24.940.895	0	34.034.895	0	76.028.759	13	186.642.411	13	321.646.960	100%	83%	13	570.788.556	30%	36%	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	%	38	217.480.865	0	30.781.227	12,55	45.300.095	0	10.152.200	0	9.556.100	0	24.032.324	15	-	15	43.740.624	121%	97%	15	74.521.851	39%	34%	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	Orang	240	217.480.865	140	30781227	100	45.300.095	40	10.152.200	0	9.556.100	60	24.032.324	0	-	100	43.740.624	100%	97%	240	74.521.851	100%	34%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan	%	27	1.385.617.115	0	218.360.369	12,55	340.981.536	0	14.788.695	0	24.478.795	0	51.996.435	15	186.642.411	15	277.906.336	121%	82%	15	496.266.705	56%	36%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kualitas hidup anak																								
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Orang	335	297.568.695	30	68.828.110	105	35.029.686	0	-	0	-	0	2.400.000	105	32.079.686	105	34.479.686	100%	98%	135	103.307.796	40%	35%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Orang	119	512.228.000	65	70.689.480	67	177.257.805	67	11.588.695	67	19.678.795	0	44.122.335	0	40.497.780	67	115.887.605	100%	65%	132	186.577.085	111%	36%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	Doc	4	396.823.250	1	65.034.779	1	67.024.875	1	3.200.000	1	4.800.000	0	5.474.100	0	53.550.775	1	67.024.875	100%	100%	2	132.059.654	50%	33%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	Orang	120	178.997.170	30	13.808.000	90	61.669.170	0	-	0	-	0	-	90	60.514.170	90	60.514.170	100%	98%	120	74.322.170	100%	42%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	Nilai	3	750.162.179	0	74.290.210	1	311.141.118	0	700.000	0	24.538.484	0	36.840.102	1	100.547.374	1	162.625.960	100%	52%	1	236.916.170	33%	32%	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan	Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak	%	69,5	241.479.620	0	50.537.700	40,74	70.557.600	0	-	0	-	0	8.775.200	43	59.568.314	43	68.343.514	106%	97%	43	118.881.214	62%	49%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)
					para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																											
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	Sekolah	70	241.479.620	40	50.537.700	30	70.557.600	0	-	0	-	30	8.775.200	0	59.568.314	30	68.343.514	100%	97%	70	118.881.214	100%	49%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	%	100	355.237.341	0	17.340.570	100	219.410.439	0	700.000	0	24.538.484	0	27.030.902	100	21.560.080	100	73.829.466	100%	34%	100	91.170.036	100%	26%			
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	Orang	18	38.850.000	8	1.250.000	10	168.379.000	2	700.000	5	1.150.000	1	750.000	2	21.560.080	10	24.160.080	100%	14%	18	25.410.080	100%	65%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	Orang	65	316.387.341	25	16.090.570	40	51.031.439	0	-	0	23.388.484	40	26.280.902	0	-	40	49.669.386	100%	97%	65	65.759.956	100%	21%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak	%	100	153.445.218	100	6.411.940	100	21.173.079	0	-	0	-	0	1.034.000	100	19.418.980	100	20.452.980	100%	97%	100	26.864.920	100%	18%			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	Orang	80	153.445.218	20	6.411.940	60	21.173.079	0	-	0	-	0	1.034.000	60	19.418.980	60	20.452.980	100%	97%	80	26.864.920	100%	18%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																														
2	9	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Prosentase Angka Kecukupan Energi	%	100	3.140.888.000	100	1.183.464.105	100	1.040.105.000	0	21.996.000	50	277.774.445	0	235.109.272	97	482.724.760	97	1.017.604.477	97%	98%	97	2.201.068.582	97%	70%	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100	1.001.323.000	0	247.860.449	100	340.145.000	0	18.396.000	18	42.124.165	40	55.795.200	106	211.521.300	106	327.836.665	106%	96%	106	575.697.114	106%	57%	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (NBM Prognosa Kebutuhan Neraca Pangan Strategis)	Doc	11	161.763.500	2	31.165.250	3	22.704.000	1	12.746.000	0	3.470.900	2	0	3	5.571.500	6	21.788.400	200%	96%	8	52.953.650	73%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kelompok	27	620.068.000	0	142.064.850	27	276.089.000	27	5.650.000	27	31.303.265	27	48.445.200	27	179.348.500	27	264.746.965	100%	96%	27	406.811.815	100%	66%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir tingkat eceran tingkat produsen rekapitulasi)	Doc	16	219.491.500	4	74.630.349	4	41.352.000	0	0	0	7.350.000	0	7.350.000	4	26.601.300	4	41.301.300	100%	100%	8	115.931.649	50%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kkal/ka pita	2100	2.139.565.000	2123	935.603.656	2100	699.960.000	0	3.600.000	2100	235.650.280	2100	179.314.072	2036	271.203.460	2100	689.767.812	100%	99%	2100	1.625.371.468	100%	76%	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Doc	6	162.905.000	6	53.300.082	2	26.352.000	0	0	0	0	0	16.663.718	1	4.373.780	1	21.037.498	50%	80%	7	74.337.580	117%	46%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kali	11	1.803.234.000	4	816.316.538	2	660.904.000	0	3.600.000	0	235.650.280	2	160.573.354	2	258.633.400	2	658.457.034	100%	100%	6	1.474.773.572	55%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	Kali	3	173.426.000	1	65.987.036	1	12.704.000	0	0	0	0	1	2.077.000	1	8.196.280	1	10.273.280	100%	81%	2	76.260.316	67%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	%	80	603.804.500	80	195.537.006	80	124.124.000	0	61.502.560	0	8.100.000	40	47.004.488	98,3	3.132.000	98	119.739.048	123%	96%	178	315.276.054	223%	52%	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Kali	32	603.804.500	8	195.537.006	8	124.124.000	0	61.502.560	0	8.100.000	8	47.004.488	8	3.132.000	8	119.739.048	100%	96%	16	315.276.054	50%	52%	
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	Orang	830	323.172.500	450	123.503.566	200	68.572.000	27	10.452.630	0	8.100.000	301	47.004.488	226	1.900.000	301	67.457.118	151%	98%	751	190.960.684	90%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	Sampel	90	280.632.000	45	72033440	45	55.552.000	46	51.049.930	0	0	0	118	1.232.000	118	52.281.930	262%	94%	163	124.315.370	181%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)
					Daerah Kabupaten/Kota																													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																													
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100	464.901.600	100	66.403.800	100	347.501.600	25	7.642.600	25	4.393.000	25	5.603.750	25	328.361.325	100	346.000.675	100%	100%	100	412.404.475	100%	89%					
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	%	100	464.901.600	100	66.403.800	100	347.501.600	25	7.642.600	25	4.393.000	25	5.603.750	25	328.361.325	100	346.000.675	100%	100%	100	412.404.475	100%	89%					
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan	%	100	464.901.600	100	66.403.800	100	347.501.600	5	7.642.600	8	4.393.000	35	5.603.750	52	328.361.325	100	346.000.675	100%	100%	100	412.404.475	100%	89%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	100	97.400.000	0	-	100	36.200.000	20	5.135.750	30	4.430.750	0	7.400.750	50	15.991.500	100	32.958.750	100%	91%	100	32.958.750	100%	34%					
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	%	100	97.400.000	0	-	100	36.200.000	20	5.135.750	30	4.430.750	0	7.400.750	50	15.991.500	100	32.958.750	100%	91%	100	32.958.750	100%	34%					
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa konflik perkara pertanahan yang tertangani	%	100	97.400.000	0	-	100	36.200.000	20	5.135.750	30	4.430.750	0	7.400.750	50	15.991.500	100	32.958.750	100%	91%	100	32.958.750	100%	34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	%	100	360.000.000	100	109.759.113	100	15.849.480	15	9.701.500	50	0	10	2.100.000	25	1.400.000	100	13.201.500	100%	83%	100	122.960.613	100%	34%					
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	%	100	360.000.000	100	109.759.113	100	15.849.480	15	9.701.500	50	0	10	2.100.000	25	1.400.000	100	13.201.500	100%	83%	100	122.960.613	100%	34%					
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	%	100	360.000.000	100	109.759.113	100	15849480	15	9.701.500	50	0	10	2.100.000	25	1.400.000	100	13.201.500	100%	83%	100	122.960.613	100%	34%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
2	10	10	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai	Jumlah data yang dapat disajikan	Doc		Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN																									

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																									Kawasan Permukiman	
2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																										
2	1	1	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	79,5	1.680.124.000	66,67	355.779.231	71,79	404.087.000	69,23	41.256.700	0	9.010.000	0	117.026.800	71,79	253.244.785	72	420.538.285	100%	104%	138	776.317.516	174%	46%		
2	1	1	2	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	7	1.162.506.000	2	216.451.231	1	227.319.000	0	5.402.500	0	9.010.000	1	111.246.800	1	129.851.000	1	255.510.300	100%	112%	3	471.961.531	43%	41%		
2	1	1	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	7	1.162.506.000	2	216.451.231	1	227.319.000	0	5.402.500	0	9.010.000	1	111.246.800	1	129.851.000	1	255.510.300	100%	112%	3	471.961.531	43%	41%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	4	517.618.000	1	139.328.000	1	176.768.000	0	35.854.200	0	0	1	5.780.000	1	123.393.785	1	165.027.985	100%	93%	2	304.355.985	50%	59%		
2	1	1	2	2.02	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	3	517.618.000	1	139.328.000	3	176.768.000	0	35.854.200	0	0	0	5.780.000	1	123.393.785	1	165.027.985	33%	93%	2	304.355.985	67%	59%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	3		PROGRAM PENGENDALIAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	%	50,10	5.260.125.365	55,9	1.215.224.674	49	1.577.702.254	5	223.207.950	26	262.674.100	53,9	209.556.400	49,23	485.737.350	53	1.181.175.800	109%	75%	53	2.396.400.474	106%	46%		
2	1	1	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kali	35	3.783.012.365	0	917.113.343	20	1.179.731.780	5	151.958.800	3	141.823.400	8	85.857.400	20	440.040.850	20	819.680.450	100%	69%	20	1.736.793.793	57%	46%		
<p style="text-align: center;">Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</p>																															

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	1	3	2.01	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kali	35	2.276.442.000	22	547.105.662	15	524.750.000	5	96.967.800	1	78.658.400	6	63.971.300	15	203.276.350	15	442.873.850	100%	84%	37	989.979.512	106%	43%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	3	2.01	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	Kegiatan	3	1.506.570.365	0	370.007.681	3	654.981.780	1	54.991.000	1	63.165.000	0	21.886.100	3	236.764.500	3	376.806.600	100%	58%	3	746.814.281	100%	50%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	3	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran</b>	<b>Paket</b>	<b>18</b>	<b>1.477.113.000</b>	<b>0</b>	<b>298.111.331</b>	<b>15</b>	<b>397.970.474</b>	<b>0</b>	<b>71.249.150</b>	<b>0</b>	<b>120.850.700</b>	<b>15</b>	<b>123.699.000</b>	<b>15</b>	<b>45.696.500</b>	<b>15</b>	<b>361.495.350</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>	<b>15</b>	<b>659.606.681</b>	<b>83%</b>	<b>45%</b>	
2	1	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Kali	30	1.070.113.000	23	298.111.331	10	236.775.590	1	71.249.150	2	120.850.700	4	40.116.000	10	271.500	10	232.487.350	100%	98%	33	530.598.681	110%	50%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan	Kegiatan	2	407.000.000	0	-	2	161.194.884	0	0	0	0	1	83.583.000	2	45.425.000	2	129.008.000	100%	80%	2	129.008.000	100%	32%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>481.500.000</b>	<b>94,32</b>	<b>112.905.100</b>	<b>94,32</b>	<b>56.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,59</b>	<b>55.124.400</b>	<b>96,59</b>	<b>350.000</b>	<b>97</b>	<b>55.474.400</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>	<b>97</b>	<b>168.379.500</b>	<b>97%</b>	<b>35%</b>	
2	1	4	2.01		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah spesies KEHATI lokal daerah</b>	<b>Jenis</b>	<b>352</b>	<b>481.500.000</b>	<b>0</b>	<b>112.905.100</b>	<b>332</b>	<b>56.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>55.124.400</b>	<b>340</b>	<b>350.000</b>	<b>340</b>	<b>55.474.400</b>	<b>102%</b>	<b>99%</b>	<b>340</b>	<b>168.379.500</b>	<b>97%</b>	<b>35%</b>	
2	1	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	jumlah dokumen yang di susun	Doc	4	481.500.000	1	112.905.100	1	56.000.000	0	0	0	0	1	55.124.400	1	350.000	1	55.474.400	100%	99%	2	168.379.500	50%	35%	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	78	598.627.000	72,5	231.801.16	71,5	23.472.000	0	0	10	0	0	0	74	17.596.050	74	17.596.050	103%	75%	74	249.397.166	95%	42%		
2	1	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Kegiatan	5		0		5		0		0		0				0									
						Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Memenuhi Syarat	Lokasi	16	598.627.000		231.801.16	16	23.472.000		0		0		0	16	17.596.050	16	17.596.050	100%	75%	16	249.397.166	100%	42%		
2	1	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Kegiatan	5	598.627.000	0	231.801.16	5	23.472.000	1	0	1	0	0	0	7	17.596.050	7	17.596.050	140%	75%	7	249.397.166	140%	42%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	88,2	2.018.065.600	54,64	304.394.050	64,7	565.245.775	6	15.091.500	10	54.084.000	64	106.419.600	64,7	143.463.000	65	319.058.100	100%	56%	119	623.452.150	135%	31%		
2	1	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	Wajib Usaha	4	2.018.065.600	0	304.394.050	4	565.245.775	0	15.091.500	2	54.084.000	10	106.419.600		143.463.000	10	319.058.100	100%	56%	15	623.452.150	100%	31%		
						Jumlah Pembinaan dan	Perusahaan	15				15							15			15									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K (%)	Rp. (%)
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota																										
2	1	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dan/atau Izin PPLH	Perusahaan	3	1.407.303.100	4	178.997.400	3	438.797.775	1	9.485.000	1	37.221.000	1	32.164.000	3	119.939.500	3	198.809.500	100%	45%	3	377.806.900	100%	27%			Dinas Lingkungan Hidup
2	1	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	Wajib Usaha	30	610.762.500	15	125.396.650	30	126.448.000	4	5.606.500	3	16.863.000	5	74.255.600	15	23.523.500	15	120.248.600	50%	95%	30	245.645.250	100%	40%			Dinas Lingkungan Hidup
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	3.254.550.000	90	435.368.134	100	603.117.500	10	29.168.000	30	11.447.500	40	40.468.000	100	390.164.200	100	471.247.700	100%	78%	100	906.615.834	100%	28%			
2	1	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup	Kegiatan	15	3.254.550.000	16	435.368.134	15	603.117.500	3	29.168.000	3	11.447.500	6	40.468.000	15	390.164.200	15	471.247.700	100%	78%	15	906.615.834	100%	28%			
2	1	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli	Jumlah kegiatan yang peduli dan	Kegiatan	8	3.254.550.000	4	435.368.134	4	603.117.500	2	29.168.000	0	11.447.500	0	40.468.000	4	390.164.200	4	471.247.700	100%	78%	8	906.615.834	100%	28%			Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					Lingkungan Hidup	berwawasan lingkungan hidup																										
2	1	1	0		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	393.000.000	90	74.337.750	100	100.000.000	0	1.970.000	40	22.815.000	40	6.300.000	100	67.138.850	100	98.223.850	100	98.223.850	100	98	100	172.561.600	100	44%	
2	1	1	0	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kasus	20	393.000.000	6	74.337.750	5	100.000.000	0	1.970.000	2	22.815.000	4	6.300.000	8	67.138.850	8	98.223.850	160	98	14	172.561.600	70%	44%			
2	1	1	0	2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kasus	10	165.000.000	6	35.665.500	10	60.000.000	0	1.970.000	2	22.815.000	4	6.300.000	8	28.011.850	8	59.096.850	80	98	14	94.762.350	140%	57%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	1	0	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	Kader	108	228.000.000	50	38.672.250	50	40.000.000	0	0	0	0	0	0	60	39.127.000	60	39.127.000	120	98	110	77.799.250	102%	34%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	1	1		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	71	84.957.570.000	73,98	5.671.045.439	71	8.817.140.608	72,97	237.283.650	0,009	2.914.658.090	0,001	887.682.700	73	2.233.777.523	73	6.273.401.963	103	71	147	11.944.447.402	207	14%			
2	1	1	1	2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah sampah yang dikelola	Ton	###	84.511.570.000	42262	5.620.514.878	43777	8.353.084.100	10051	237.283.650	6759	2.914.658.090	20244,85	867.055.700	40521	1.658.483.173	40521	5.677.480.613	93	68	82783	11.297.995.491	51%	13%			
2	1	1	1	2.01	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Lokasi	4	1.212.900.000	2	203.078.981	2	234.400.000	1	2.205.000	0	3.416.950	1	5.536.200	2	8.501.750	2	19.659.900	100	8	4	222.738.881	100%	18%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	1	1	2.01	Penanganan Sampah dengan	jumlah volume	Ton	96.840	18.591.500.000	31267	4.690.488.80	32280	2.138.721.400	733481	235.078.650	493374	289.930.200	1477374	476.072.900	29573	1.598.795.450	29573	1.598.795.450	92	75	60840	6.289.284.057	63%	34%	Dinas Lingkungan Hidup		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	
					melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	sampah yang masuk TPA																								
2	1	1	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Jenis	14	64.707.170.000	10	726.947.290	3	5.979.962.700	1	0	0	2.621.310.940	1	385.446.600	4	1.052.267.723	4	4.059.025.263	133%	68%	14	4.785.972.553	100%	7%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Kecamatan	3	446.000.000	3	50.530.561	0	464.056.508	0	0	0	20.627.000	3	575.294.350	3	595.921.350	129%	128%	45	646.451.911	100%	145%			
					Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi		Kelompok	45			35							45		45										
2	1	1	2	03	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Kecamatan	3	446.000.000	3	50.530.561	3	464.056.508	0	0	0	20.627.000	3	575.294.350	3	595.921.350	100%	128%	6	646.451.911	200%	145%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
2	1	2	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	85	871.775.210	96,63	226.042.155	84	312.108.000	93,72	13.820.000	0	7.055.000	93,42	40.192.890	97,92	220.516.440	98	281.584.330	117%	90%	98	507.626.485	115%	58%	
2	1	2	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Orang	34000	871.775.210	0	226.042.155	17000	312.108.000	2172	13.820.000	15126	7.055.000	23265	40.192.890	26930	220.516.440	26930	281.584.330	158%	90%	26930	507.626.485	79%	58%	
2	1	2	2	01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekamana KTP EL	Data	5000	460.713.885	3130	127.220.688	2500	271.702.000	1028	7.020.000	1575	7.055.000	2451	7.105.500	3192	219.999.000	3192	241.179.500	128%	89%	6322	368.400.188	126%	80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	2	01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	Jumlah penerbitan KIA	Doc	2000	411.061.325	2280	98.821.467	1000	40.406.000	1144	6.800.000	2453	0	4384	33.087.390	5587	517.440	5587	40.404.830	559%	100%	7867	139.226.297	393%	34%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<p style="text-align: center;">Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</p>																														

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
				Peristiwa Kependudukan																										
2	1	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,75	1.446.942.392	98,11	544.985.705	94,25	325.423.000	0	0	0	47.890.000	101,4	99.300.480	100	162.880.400	101	310.070.880	108%	95%	100	855.056.585	106%	59%		
2	1	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Doc	3200	1.446.942.392	4987	544.985.705	1600	325.423.000	970	0	0	47.890.000	3002	99.300.480	4715	162.880.400	4715	310.070.880	295%	95%	9702	855.056.585	303%	59%		
2	1	3	2.01	1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Doc	3000	401.023.792	4876	98.697.000	1500	107.787.000	902	0	1658	23.100.000	2834	49.900.000	4499	24.600.000	4499	97.600.000	300%	91%	9375	196.297.000	313%	49%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Doc	200	1.045.918.600	100	446.288.705	100	217.636.000	68	0	92	24.790.000	168	49.400.480	216	138.280.400	216	212.470.880	216%	98%	316	658.759.585	158%	63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	%	99,2	1.004.495.993	99,4	333.772.056	99,1	235.475.000	100	26.700.000	0	72.801.500	97,55	57.800.000	100	84.877.000	100	242.178.500	101%	103%	100	575.950.556	101%	57%		
2	1	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	%	100	1.004.495.993	83,56	333.772.056	77	235.475.000	19,98	26.700.000	0	72.801.500	83,49	57.800.000	91,53	84.877.000	92	242.178.500	119%	103%	92	575.950.556	92%	57%	
2	1	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Laporan	26	771.551.980	13	286.713.769	13	224.370.000	3	24.500.000	6	65.050.750	11	57.800.000	13	83.737.000	13	231.087.750	100%	103%	26	517.801.519	100%	67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Doc	48	232.944.013	12	47.058.287	10	11.105.000	13	2.200.000	16	7.750.750	16	0	16	1.140.000	16	11.090.750	160%	100%	28	58.149.037	58%	25%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																									
2	1	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	%	≤ 4,7	2.043.917.684	4	268.602.775	≤ 4,7	787.223.300	0	100.746.250	0	275.994.587	0	138.598.850		331.835.967	0	847.175.654	100%	108%	4	1.115.778.429	#VAL UE!	55%		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN																														

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	1	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Sekolah SSK yang membuat PRP Kependudukan	%	100	261.021.631	100	12.354.800	100	243.182.100	0	3.501.000	0	31.954.600	0	6.251.500	275.017.754	0	316.724.854	0%	130%	100	329.079.654	100%	126%		
2	1	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	Sekolah	5	236.267.131	4	12.354.800	0	218.427.600	7	3.501.000	7	13.451.600	3	0	275.017.754	7	291.970.354	167%	134%	7	304.325.154	140%	129%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah SSK baru yang dibentuk (Perubahan)	SSK	5		4	3		3					3	2		5			5		100%					
2	1	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	9	24.754.500	0	-	9	24.754.500	0	0	9	18.503.000	9	6.251.500	0	9	24.754.500	100%	100%	9	24.754.500	100%	100%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Keluarga	%	100	1.782.896.053	100	256.247.975	100	544.041.200	100	97.245.250	100	244.039.987	100	132.347.350	56.818.213	100	530.450.800	100%	98%	200	786.698.775	200%	44%		
2	1	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah mendaftarkan semua keluarga dalam Pendataan Keluarga	Kelurahan	27	1.742.525.553	27	256.247.975	27	503.670.700	27	97.245.250	27	244.039.987	27	91.977.250	56.068.213	27	489.330.700	100%	97%	27	745.578.675	100%	43%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	24	40.370.500	0	0	3	40.370.500	0	0	3	0	3	40.370.100	750.000	3	41.120.100	100%	102%	3	41.120.100	13%	102%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)		
2	1	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmeet Need	% <	7	11.510.824.345	16,93	1.792.725.514	7,9	2.203.600.800	0	97.479.600	8,8	172.816.800	8,2	322.242.850		1.248.823.236	8	1.841.362.486	100%	84%	8	3.634.088.000	117%	32%	
2	1	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	3.320.863.495	100	305.201.290	100	408.302.450	100	29.681.600	100	44.892.800	100	116.207.650		205.312.900	100	396.094.950	100%	97%	100	701.296.240	100%	21%	
2	1	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Organisasi	99	16.901.890	0	0	45	5.455.000	0	-	0	0	45	2.725.450		2.725.450	45	5.450.900	100%	100%	45	5.450.900	45%	32%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	3	2.01	2	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dokumen	5	539.610.120	0	0	1	25.000.000	0	-	0	0	1	25.000.000		-	1	25.000.000	100%	100%	1	25.000.000	20%	5%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Jenis	8	274.449.020	4	97.358.090	4	20.640.000	4	0	4	20.640.000	4	0		-	4	20.640.000	100%	100%	8	117.998.090	100%	43%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	Dokumen	5	207.500.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0		50.000.000	0	50.000.000	0%	100%	0	50.000.000	0%	24%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
						serta Media Luar Ruang																								
2	1	3	2	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	30	283.987.450	0	0	6	185.707.450	0	0	6	0	3	51.792.200	124.821.300	3	176.613.500	50%	95%	3	176.613.500	10%	62%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB BKR PIKR UPPKS BKL IMP PKB PUS)	Kelompok	18	1.998.415.015	6	207.843.200	6	121.500.000	6	29.681.600	6	24.252.800	6	36.690.000	27.766.150	6	118.390.550	100%	97%	12	326.233.750	67%	16%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2	02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Kader yang Melakukan Updating Data	%	100	1.843.287.240	100	92.500.000	100	142.920.000	100	-	100	30.000.000	101	36.232.500	44.616.536	101	110.849.036	101%	78%	201	203.349.036	201%	11%		
2	1	3	2	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	9	1.569.773.400	0	0	3	14.400.000	0	0	0	0	3	832.500	4.016.536	3	4.849.036	100%	34%	3	4.849.036	33%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2	02	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	Kader	148	273.513.840	132	92.500.000	148	128.520.000	148	0	150	30.000.000	150	35.400.000	40.600.000	150	106.000.000	101%	82%	282	198.500.000	191%	73%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2	03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Menurunnya Angka Drop Out (Kurang Dari)	%	17,5	6.105.173.610	14	1.243.160.274	17,5	1.531.628.350	18,2	34.192.000	10,13	73.937.300	12	127.511.200	978.240.100	12	1.213.880.600	69%	79%	26	2.457.040.874	149%	40%		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																											
2	1	3	2.	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	Faskes	44	117.777.499	22	16.658.950	22	16.200.000	7	200.000	17	750.000	22	1.000.000		1.200.000	17	3.150.000	77%	19%	39	19.808.950	89%	17%		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2.	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Aseptor	1306	2.682.794.885	655	164.043.518	661	539.696.000	321	33.992.000	727	69.569.600	720	80.739.550		92.147.200	727	276.448.350	110%	51%	1382	440.491.868	106%	16%		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2.	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	Paket	7	3.261.821.226	2	1.062.457.806	5	961.932.350	0	0	0	0	0	38.995.000		872.798.350	0	911.793.350	0%	95%	2	1.974.251.156	29%	61%		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2.	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	42.780.000	0	0	4	13.800.000	0	0	2	3.617.700	4	6.776.650		12.094.550	6	22.488.900	150%	163%	6	22.488.900	150%	53%		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	3	2.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan IMP dan Pokja Kampung KB yang Menerima Pembinaan Kesertaan ber KB	%	100	241.500.000	100	151.863.950	100	120.750.000	66	33.606.000	100	23.986.700	100	42.291.500		20.653.700	100	120.537.900	100%	100%	200	272.401.850	200%	113%			
2	1	3	2.	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan	Kegiatan	6	241.500.000	3	151.863.950	3	120750000	2	33.606.000	3	23.986.700	3	42.291.500		20.653.700	3	120.537.900	100%	100%	6	272.401.850	100%	113%		Dinas Kesehatan Pengendalian	



1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K (%)
				KKBPK di Kampung KB	pengelolaan Program KKBPK di kampung KB																									Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB</b>	%	83	4.044.876.571	70	245.764.359	71	1.444.127.664	84,2	63.695.750	86,01	41.099.800	86	239.531.400		623.162.600	86	967.489.550	121%	67%	156	1.213.253.909	188%	30%		
2	1	4	2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Meningkatnya Angka Kepesertaan Sasaran dalam Kegiatan BKB</b>	%	61	4.044.876.571	60	245.764.359	61	1.444.127.664	0	63.695.750	24	41.099.800	24	239.531.400		623.162.600	24	967.489.550	39%	67%	84	1.213.253.909	138%	30%		
2	1	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	12	206.771.650	0	0	12	206.771.650	0	0	0	0	12	650.000		200.526.000	12		100%	0%	12		100%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	4	1.116.860.997	2	13.412.600	2	85.072.050	1	29.027.050	0	0	2	0		53.937.000	3	82.964.050	150%	98%	5	96.376.650	125%	9%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	504	885.654.000	0	0	54	818.760.000	0	0	54	25.200.000	54	147.290.000		303.290.000	54	475.780.000	100%	58%	54	475.780.000	11%	54%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																											
2	1	4	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	6	1.835.589.924	3	232.351.759	3	333.523.964	0	34.668.700	0	15.899.800	3	91.591.400		65.409.600	3	207.569.500	100%	62%	6	439.921.259	100%	24%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																										
2	1	5	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	%	96	31.629.081.535	0	3.292.065.657	88	8.346.184.604	0	558.434.424	40	1.140.408.358	75	2.969.869.860	88	1.956.756.310	88	6.625.468.952	100%	79%	88	9.917.534.609	92%	31%		
2	1	5	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kebijakan	%	100	50.000.000	0	0	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100	48.290.400	100	48.290.400	100%	97%	100	48.290.400	100%	97%		
2	1	5	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi	%	100	50.000.000	0	-	100	50.000.000	0	0	0	0	0	0	100	48.290.400	100	48.290.400	100%	97%	100	48.290.400	100%	97%	Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan yang berfungsi baik	%	90	13.477.829.200	75	1.352.540.200	75	4.355.196.928	7	150.363.301	40	277.820.428	90	2.276.377.740	100	412.402.424	100	3.116.963.893	133%	72%	100	4.469.504.093	111%	33%		
2	1	5	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah perengkapan jalan yang terpasang	%	100	7.089.651.100	0	1.352.540.200	100	2.038.471.150	0	39.400.000	70	0	100	1.378.271.215	100	49.507.332	100	1.467.178.547	100%	72%	100	2.819.718.747	100%	40%	Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	persentase perengkapan jalan yang dipelihara	%	100	6.388.178.100	0	-	100	2.316.725.778	1	110.963.301	70	277.820.428	80	898.106.525	100	362.895.092	100	1.649.785.346	100%	71%	100	1.649.785.346	100%	26%	Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentasi fasilitas parkir yang memiliki ijin	%	100	1.465.360.960	0	-	100	38.250.000	0	0	100	37.310.000	0	-	100	92.617.332	100	129.927.332	100%	340%	100	129.927.332	100%	9%		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase fasilitas terminal yang layak	%	100	1.465.360.960	0	-	100	330.800.000	0	0	100	37.310.000	0	0	100	92.617.332	100	129.927.332	100%	39%	100	129.927.332	100%	9%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase fasilitas parkir yang memiliki ijin</b>	%	100	2.484.057.000	0	-	100	868.469.000	0	94.377.468	50	100.671.930	70	95.543.345	100	237.786.220	100	528.378.963	100%	61%	100	528.378.963	100%	21%	
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pengurusan ijin	%	100	168.469.000	0	-	100	136.769.000	0	0	30	2.316.000	40	2.800.000	30	66.026.000	100	71.142.000	100%	52%	100	71.142.000	100%	42%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase monev penyelenggaraan parkir	%	100	2.315.588.000	0	-	100	460.943.616	0	94.377.468	50	98.355.930	70	92.743.345	100	171.760.220	100	457.236.963	100%	99%	100	457.236.963	100%	20%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan Lulus Uji</b>	%	100	2.261.718.540	100	102.900.000	100	438.866.480	0	49.974.860	50	204.194.535	90	98.271.320	100	80.468.285	100	432.909.000	100%	99%	100	535.809.000	100%	24%	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	100	1.231.958.540	0	0	100	154.350.000	0	0	0	151.510.000	0	0	100	350.000	100	151.860.000	100%	98%	100	151.860.000	100%	12%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemohon yang paham	%	100	48.395.000	0	0	100	48.395.000	0	0	0	0	100	31.981.000	100	15.790.750	100	47.771.750	100%	99%	100	47.771.750	100%	99%	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	%	100	545.780.000	0	102.900.000	100	104.750.000	25	23.320.000	50	23.250.000	80	34.280.000	100	23.660.000	100	104.510.000	100%	100%	100	207.410.000	100%	38%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase laporan	%	100	435.585.000	0	0	100	131.371.480	10	26.654.860	50	29.434.535	80	32.010.320	100	40.667.535	100	128.767.250	100%	98%	100	128.767.250	100%	30%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>	%	100	605.500.000	100	304.540.850	100	125.653.500	55	6.197.000	50	49.323.825	80	48.368.095	100	18.330.245	100	122.219.165	100%	97%	100	426.760.015	100%	70%	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRLL	Kegiatan	6	476.400.000	0	236.015.350	6	65.453.500	0	6.197.000	6	29.046.525	5	9.304.095	6	18.330.245	6	62.877.865	100%	96%	6	298.893.215	100%	63%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	%	100	129.100.000	0	68.525.500	100	60.200.000	0	0	35	20.277.300	100	39.064.000	0	0	100	59.341.300	100%	99%	100	127.866.800	100%	99%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengurusan rekomendasi Andalalin</b>	%	100	1.259.945.000	0	0	100	305.110.040	10	23.293.150	50	35.198.450	80	36.658.950	100	60.758.980	100	155.909.530	100%	51%	100	155.909.530	100%	12%	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	%	100	1.259.945.000	0	-	100	305.110.040	10	23.293.150	50	35.198.450	80	36.658.950	100	60.758.980	100	155.909.530	100%	51%	100	155.909.530	100%	12%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah kegiatan keselamatan</b>	%	100	3.206.326.200	100	231.423.367	100	938.886.720	3	121.361.266	60	271.150.565	80	235.395.600	100	328.324.245	100	956.231.676	100%	102%	100	1.187.655.043	100%	37%	
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peserta	%	100	164.360.000	0	0	100	60.000.000	0	0	0	0	100	31.893.580	0	0	100	31.893.580	100%	53%	100	31.893.580	100%	19%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan	persentase Jumlah kegiatan	%	100	2.825.784.200	0	189.800.800	100	834.686.720	10	121.361.266	60	244.831.400	80	189.202.020	100	328.324.245	100	883.718.996	100%	106%	100	1.073.519.863	100%	38%	Dinas Perhubungan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																										
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	persentase Jumlah kegiatan	%	100	216.182.000	0	41.622.500	100	44.200.000	0	0	50	26.319.100	100	14.300.000	0	0	100	40.619.100	100%	92%	100	82.241.600	100%	38%	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	100	6.818.344.635	100	1.300.661.240	100	1.225.751.936	30	112.867.379	60	164.738.625	80	179.254.810	100	677.778.179	80	1.134.638.993	80%	93%	80	2.435.300.233	80%	36%		
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan yang melayani	Kendaraan	164	5.995.444.635	41	1.300.661.240	28	439.451.936	5	8.165.000	28	10.443.000	41	9.050.500	41	361.218.174	41	388.876.674	146%	88%	82	1.689.537.914	50%	28%	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan barang	Kendaraan	2E+05	822.900.000	0	0	230000	786.300.000	567	104.702.379	11668	154.295.625	180000	170.204.310	2E+05	316.560.005	### ###	745.762.319	100%	95%	### ###	745.762.319	100%	91%	Dinas Perhubungan	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan	%	82	19.913.883.000	83	4.555.689.126	77	5.580.504.230	0	552.598.080	0	1.193.190.792	0	930.860.479	89	1.969.654.895	89	4.646.304.246	116%	83%	89	9.201.993.372	109%	46%		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
						Informasi Publik																										
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	19.913.883.000	100	4.555.689.126	100	5.580.504.230	100	552.598.080	100	1.193.190.792	100	930.860.479	100	1.969.654.895	100	4.646.304.246	100	83%	100	9.201.993.372	100	46%			
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Berita	2400	10.328.710.000	1427	2.572.903.418	1200	3.060.071.080	344	252.250.000	297	593.175.448	312	529.370.000	250	884.216.620	1203	2.259.012.068	100%	74%	2630	4.831.915.486	110%	47%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Media	10	6.155.192.000	5	1.395.707.276	5	1.591.212.490	5	184.522.080	5	351.781.124	5	302.946.224	0	650.531.683	5	1.489.781.111	100%	94%	10	2.885.488.387	100%	47%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	101.140.000	100	139.405.394	100	228.260.320	100	34.495.000	100	41.133.795	100	39.329.155	0	101.788.575	100	216.746.525	100%	95%	100	356.151.919	100%	352%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kelompok	27	1.161.303.000	0	-	27	340.463.320	27	31.420.000	27	48.766.125	27	18.611.000	0	231.377.317	27	330.174.442	100%	97%	27	330.174.442	100%	28%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	Paket	1	701.460.000	0	190.146.328	1	78.360.320	1	0	1	74.739.500	0	0	0	0	1	74.739.500	100%	95%	1	264.885.828	100%	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tema Informasi	13	1.466.078.000	8	257.526.710	6	282.136.700	2	49.911.000	2	83.594.800	2	40.604.100	3	101.740.700	9	275.850.600	150%	98%	17	533.377.310	131%	36%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	43.717.933.600	0	9.432.538.752	100	13.469.491.580	100	1.523.757.278	100	2.426.133.729	100	2.567.520.494	100	3.342.962.431	100	9.860.373.932	100%	73%	100	19.292.912.684	100%	44%			
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	21.818.547.600	100	5.592.828.535	100	4.970.829.940	100	796.112.672	100	1.185.154.242	100	1.216.215.483	100	917.934.166	100	4.115.416.563	100%	83%	100	9.708.245.098	100%	44%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																										
2	1	3	2	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Domain	238	326.800.000	238	21.437.900	238	90.259.830	238	19.714.000	238	0	0	0	238	56.746.350	238	76.460.350	100%	85%	238	97.898.250	100%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Titik	1750	21.491.747.600	1750	5.571.390.635	1750	4.880.570.110	1550	776.398.672	1550	1.185.154.242	1750	0	1750	1.216.215.483	1750	861.187.816	100%	83%	1750	9.610.346.848	100%	45%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	%	100	21.899.386.000	100	3.839.710.217	100	8.498.661.640	100	727.644.606	100	1.240.979.487	100	0	100	1.351.305.011	100	2.425.028.265	100%	68%	100	9.584.667.586	100%	44%		
2	1	3	2	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Paket	2	14.278.200.000	1	2.292.840.417	1	4.664.156.640	1	521.925.841	1	944.045.242	1	0	1	1.050.346.896	1	1.342.147.571	100%	83%	2	6.151.305.967	100%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	02	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Titik	180	1.855.000.000	180	393.203.216	180	1.100.350.000	180	121.477.490	180	79.082.590	180	0	180	102.887.085	180	294.803.240	100%	54%	180	991.453.621	100%	53%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	14	1.840.000.000	7	447.572.545	7	1.089.190.000	1	25.841.275	2	120.651.655	2	0	2	113.371.030	2	476.189.539	100%	68%	14	1.183.626.044	100%	64%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	02	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Paket	2	1.359.380.960	0	284.458.241	1	768.570.000	1	17.500.000	1	33.000.000	1	0	1	26.250.000	1	127.374.915	100%	27%	1	488.583.156	50%	36%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	02	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	%	100	1.404.605.000	0	339.216.400	100	154.095.000	100	11.400.000	100	18.200.000	100	0	100	12.450.000	100	80.283.000	100%	79%	100	461.549.400	100%	33%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
2	1	3	2	1	0			4	636.000.000	0		4	186.000.000	4	29.500.000	4	46.000.000	4	46.000.000	4	64.500.000	4	186.000.000	100%	100%	4	186.000.000	100%	29%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2	1	1			2	526.200.040	1	82.419.398	1	536.300.000	0	0	0	0	0	0	1	39.730.000	1	39.730.000	100%	7%	2	122.149.398	100%	23%		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																										
2	1	5							86,5	2.669.246.100	0	679.817.620	86,5	436.569.500	0	20.769.500	0	112.615.500	0	74.387.750	86	186.795.700	86	394.568.450	99%	90%	86	1.074.386.070	99%	40%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1	5	2	01				135	2.669.246.100	125	679.817.620	135	436.569.500	11	20.769.500	0	112.615.500	121	74.387.750	0	186.795.700	132	394.568.450	98%	90%	132	1.074.386.070	98%	40%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	5	2	01	1			156	2.669.246.100	108	679.817.620	156	436.569.500	82	20.769.500	25	112.615.500	32	74.387.750	17	186.795.700	156	394.568.450	100%	90%	156	1.074.386.070	100%	40%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	6						30	625.589.500	40	115.811.139	30	180.850.700	0	16.889.250	0	1.050.000	0	-		152.423.650	0	170.362.900	0%	94%	40	286.174.039	133%	46%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	6	2	01				110	625.589.500	60	115.811.139	50	180.850.700	47	16.889.250	47	1.050.000	0	-		152.423.650	47	170.362.900	94%	94%	107	286.174.039	97%	46%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	1	6	2.	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	308	625.589.500	150	115.811.139	156	180.850.700	82	16.889.250	25	1.050.000	0	-	49	152.423.650	156	170.362.900	100%	94%	306	286.174.039	99%	46%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromset Naik	%	43	2.378.413.520	0	801.647.600	20	269.381.760	0	108.514.000	0	22.172.300	0	21.729.300	20,18	207.006.100	20	359.421.700	101%	133%	20	1.161.069.300	47%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1	8	2.	01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Mikro terfasilitasi beromset naik	Orang	37	2.378.413.520	19	801.647.600	24	269.381.760	0	108.514.000	0	22.172.300	0	21.729.300	22	207.006.100	22	359.421.700	92%	133%	41	1.161.069.300	111%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1	8	2.	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Orang	210	2.378.413.520	145	801.647.600	150	269.381.760	46	108.514.000	31	22.172.300	23	21.729.300	109	207.006.100	109	359.421.700	73%	133%	254	1.161.069.300	121%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	%	100	116.587.500	0	0	100	183.865.600	0	-	0	612.000	100	145.607.000	100	19.259.636	100	165.478.636	100%	90%	100	165.478.636	100%	142%	
2	1	2	2.	02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	Paket	1	116.587.500	0	0	1	183.865.600	0	-	0	612.000	1	145.607.000	1	19.259.636	1	165.478.636	100%	90%	1	165.478.636	100%	142%	
2	1	2	2.	02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	Doc	3	52.275.000	0	0	1	99.150.000	0	0	0	0	1	86.000.000	0	0	1	86.000.000	100%	87%	1	86.000.000	33%	165%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K (%)
					Daerah Kabupaten/Kota																										Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	Paket	3	64.312.500	0	0	1	84.715.600	0	0	0	612.000	1	59.607.000	1	19.259.636	1	79.478.636	100%	94%	1	79.478.636	33%	124%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	%	39	306.663.900	19	355.152.478	26	158.125.650	11	57.861.000	33	-	0	2.448.000	33	60.016.000	33	120.325.000	127%	76%	52	475.477.478	133%	155%		
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	Investor	40	306.663.900	13	355.152.478	20	158.125.650	8	57.861.000	10	-	0	2.448.000	20	60.016.000	20	120.325.000	100%	76%	33	475.477.478	83%	155%		
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan	20	306.663.900	5	355.152.478	5	158.125.650	1	57.861.000	1	0	0	2.448.000	3	60.016.000	5	120.325.000	100%	76%	10	475.477.478	50%	155%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelayanan Perizinan Terselenggarakan	%	95	2.733.930.000	99,60	790.506.986	85	365.970.640	96,5	44.021.248	99,2	73.552.725	99,2	91.316.912	99,69	120.683.135	100	329.574.020	117%	90%	100	1.120.081.006	105%	41%		
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemohon izin	Izin	10500	2.733.930.000	2573	790.506.986	3000	365.970.640	1589	44.021.248	3012	73.552.725	0	91.316.912	6574	120.683.135	6574	329.574.020	219%	90%	9147	1.120.081.006	87%	41%		
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	Orang	595	1.096.843.000	75	494.094.193	100	116.408.000	0	10.979.280	60	37.272.090	0	18.115.000	130	47.580.000	130	113.946.370	130%	98%	205	608.040.563	34%	55%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan	persentase pemenuhan komitmen berusaha	%	10	1.018.287.000	15	277.612.783	10	191.624.000	2,1	23.370.158	6,96	35.327.635	0	43.178.412	8,01	62.444.535	17	164.320.740	171%	86%	17	441.933.533	170%	43%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
					Non Perizinan Penanaman Modal	yang dievaluasi																								Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Kali	170	618.800.000	50	18.800.000	55	57.938.640	8	9.671.810	17	953.000	0	30.023.500	55	10.658.600	55	51.306.910	100%	89%	105	70.106.910	62%	11%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Perusahaan	410	2.132.600.000	80	420.248.436	110	454.884.000	67	39.100.200	74	17.453.500	0	212.700.500	126	119.330.250	126	388.584.450	115%	85%	206	808.832.886	50%	38%	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	1000	2.132.600.000	181	420.248.436	100	454.884.000	85	39.100.200	161	17.453.500	0	212.700.500	126	119.330.250	126	388.584.450	126%	85%	307	808.832.886	31%	38%	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	Perusahaan	75	212.630.000	30	20.399.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	30	20.399.400	40%	10%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	950	1.829.970.000	20	387.173.536	100	416.791.500	81	36.362.000	161	15.409.500	0	201.707.500	520	102.238.600	520	355.717.600	520%	85%	540	742.891.136	57%	41%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	75	90.000.000	25	12.675.500	30	38.092.500	4	2.738.200	5	2.044.000	0	10.993.000	25	17.091.650	34	32.866.850	113%	86%	59	45.542.350	79%	51%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	%	100	615.661.400	100	81.323.000	100	80.900.040	58	8.212.800	58	2.593.750	0	37.741.200	100	30.959.000	100	79.506.750	100%	98%	100	160.829.750	100%	26%	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan	Jenis Izin	110	615.661.400	65	81.323.000	70	80.900.040	54	8.212.800	35	2.593.750	0	37.741.200	70	30.959.000	70	79.506.750	100%	98%	135	160.829.750	123%	26%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	sistem elektronik																									
2	18	6	2.01	1	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	Izin	53	615.661.400	30	81.323.000	35	80.900.040	29	8.212.800	35	2.593.750	0	37.741.200	35	30.959.000	35	79.506.750	100%	98%	65	160.829.750	123%	26%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																										
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	orang	12	2.666.700.000	0	676.796.458	12	546.890.000	0	23.915.000	2	69.033.000		243.455.300		206.989.004	2	543.392.304	17%	99%	2	1.220.188.762	17%	46%		
2	19	2	2.01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	event	2	2.666.700.000	1	676.796.458	6	546.890.000	0	23.915.000	6	69.033.000		243.455.300		206.989.004	6	543.392.304	100%	99%	7	1.220.188.762	350%	46%		
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	400	2.666.700.000	400	676.796.458	40	546.890.000	0	23.915.000	78	69.033.000		243.455.300		206.989.004	78	543.392.304	195%	99%	478	1.220.188.762	120%	46%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	medali	46	32.609.317.280	11	3.287.377.707	35	5.904.764.114	0	2.996.362.085	5	538.096.550		162.580.500		3.486.502.555	5	7.183.541.690	14%	122%	16	10.470.919.397	35%	32%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	1	3	2.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	sarpras olahraga	6	12.433.197.280	3	1.899.207.993	3	1.794.354.539	1	261.460.585	45	476.123.550		138.260.500		1.168.310.710	46	2.044.155.345	153%	114%	49	3.943.363.338	817%	32%	
2	1	3	2.	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga yang terfasilitasi	Sarpras Olahraga	12	12.433.197.280	3	1.899.207.993	3	1.794.354.539	1	261.460.585	1	476.123.550		138.260.500		1168310710	2	2.044.155.345	67%	114%	5	3.943.363.338	42%	32%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudaan dan Olah Raga
2	1	3	2.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	event	3	7.376.120.000	1	240.841.330	6	1.323.802.915	0	0	6	41.973.000		-		2.311.111.845	6	2.353.084.845	100%	178%	7	2.593.926.175	233%	35%	
2	1	3	2.	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	12	7.376.120.000	1	240.841.330	1	1.323.802.915	0	0	1	41.973.000		0		2.311.111.845	1	2.353.084.845	100%	178%	2	2.593.926.175	17%	35%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudaan dan Olah Raga
2	1	3	2.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	cabor	20	7.500.000.000	10	927.260.635	10	2.700.000.000	10	2.700.000.000	6	0		0		0	16	2.700.000.000	160%	100%	26	3.627.260.635	130%	48%	
2	1	3	2.	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang Olahraga	20	7.500.000.000	10	927.260.635	10	2.700.000.000	10	2.700.000.000		0		0		0	10	2.700.000.000	100%	100%	20	3.627.260.635	100%	48%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudaan dan Olah Raga
2	1	3	2.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	festival	3	5.300.000.000	2	220.067.749	1	86.606.660	0	34.901.500	6	20.000.000		24.320.000		7.080.000	6	86.301.500	600%	100%	8	306.369.249	267%	6%	
2	1	3	2.	1	Penyelenggaraan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	5.300.000.000	2	220.067.749	1	86.606.660	0	34.901.500	2	20.000.000		24.320.000		7.080.000	1	86.301.500	100%	100%	3	306.369.249	100%	6%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kemudaan dan Olah Raga
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																									
2	2	2			PROGRAM PENYELANGGARAAN	Persentase Organisasi Perangkat	%	100	2.012.528.000	100	309.909.339	100	290.000.000	25	36.862.000	25	24.601.000	100	9.161.250	100	114.367.430	100	184.991.680	100%	64%	100	494.901.019	100%	25%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16																			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)															
					STATISTIK SEKTORAL	Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah																																											
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Doc	4	2.012.528.000	0	309.909.339	1	290.000.000	1	36.862.000	1	24.601.000	1	9.161.250	1	114.367.430	1	184.991.680	100%	64%	1	494.901.019	25%	25%																				
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Doc	4	1.208.128.000	3	309.909.339	1	200.000.000	1	10.572.000	1	13.145.000	1	9.161.250	1	66.097.430	1	98.975.680	100%	49%	4	408.885.019	100%	34%		Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan	Paket	1	355.000.000	0	0	1	50.000.000	1	26.290.000	0	0	0	0	1	23.710.000	1	50.000.000	100%	100%	1	50.000.000	100%	14%		Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata	Doc	3	449.400.000	0	0	1	40.000.000	0	0	1	11.456.000	0	0	1	24.560.000	1	36.016.000	100%	90%	1	36.016.000	33%	8%		Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																																												
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan informasi	%	100	1.645.502.695	0	193.478.719	100	266.296.880	100	9.152.500	100	104.972.750	100	27.446.420	100	74.020.880	100	215.592.550	100%	81%	100	409.071.269	100%	25%																				
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengimplem entasikan tanda tangan elektronik (TTE)	OPD	7	1.645.502.695	0	193.478.719	7	266.296.880	2	9.152.500	2	104.972.750	2	27.446.420	1	74.020.880	7	215.592.550	100%	81%	7	409.071.269	100%	25%																				
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	OPD	34	550.000.000	0	0	7	108.250.000	0	0	0	17.998.000	0	6.703.500	7	33.230.000	7	57.931.500	100%	54%	7	57.931.500	21%	11%		Dinas Komunikasi dan Informatika																		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp. (000)
					Elektronik dan Non Elektronik																											
2	2	1	2	2.	01	4	Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah berita sandi yang diamankan	Berita	1600	1.095.502.695	980	193.478.719	900	158.046.880	199	9.152.500	188	86.974.750	201	20.742.920	310	40.790.880	898	157.661.050	100%	100%	1878	351.139.769	117%	32%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																									
2	2	2	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	30	8.600.000.000	41	1.892.800.623	6	2.221.158.634	0	75.127.500	88	234.980.725		607.855.090		1.637.831.400	88	2.555.794.715	1467%	115%	129	4.448.595.338	430%	52%	
2	2	2	2	2.	02		Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kebudayaan yang dikembangkan	budaya	37	8.600.000.000	15	1.892.800.623	8	2.221.158.634	0	75.127.500	44	234.980.725		607.855.090		1.637.831.400	44	2.555.794.715	550%	115%	59	4.448.595.338	159%	52%	
2	2	2	2	2.	02	1	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	Budaya	37	6.700.000.000	11	1.367.672.518	8	1.836.127.544	0	75.127.500	8	234.980.725		509.682.430		1364587900	8	2.184.378.555	100%	119%	19	3.552.051.073	51%	53%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
2	2	2	2	2.	02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Festival	9	1.900.000.000	8	525.128.105	1	385.031.090	0	0	0	0		98.172.660		273.243.500	0	371.416.160	0%	96%	8	896.544.265	89%	47%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
2	2	2	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM Lembaga dan Pranata yang Dibina	Orang	100	975.000.000	0	123.116.060	100	123.886.145	0	20.416.000	146	31.940.000		14.900.000		56.075.000	146	123.331.000	146%	100%	146	246.447.060	146%	25%	
2	2	2	3	2.	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	pelatihan	3	975.000.000	1	123.116.060	2	123.886.145	0	20.416.000	2	31.940.000		14.900.000		56.075.000	2	123.331.000	100%	100%	3	246.447.060	100%	25%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	2	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang	170	975.000.000	0	123.116.060	150	123.886.145	0	20.416.000	146	31.940.000	14.900.000	56.075.000	146	123.331.000	97%	100%	146	246.447.060	86%	25%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga		
2	2	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	21	808.200.000	21	195.290.195	21	91.547.225	0	2.000.000	2	46.225.000	2.831.000	36.104.375	2	87.160.375	10%	95%	23	282.450.570	110%	35%			
2	2	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	unit	20	808.200.000	0	195.290.195	20	91.547.225	0	2.000.000	10	46.225.000	2.831.000	36.104.375	10	87.160.375	50%	95%	10	282.450.570	50%	35%			
2	2	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Unit	20	808.200.000	0	195.290.195	20	91.547.225	0	2.000.000	10	46.225.000	2.831.000	36.104.375	10	87.160.375	50%	95%	10	282.450.570	50%	35%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga		
2	2	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																									
2	2	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	%	5,95	3.763.669.482	0	884.024.534	5,59	1.355.152.184	0	126.079.170	0	315.326.216	0	376.468.600	16,97	622.097.623	17	1.439.971.609	304%	106%	17	2.323.996.143	285%	62%	
2	2	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,9	1.438.684.482	0	552.289.692	4,3	776.221.900	0	50.019.000	0	221.483.716	0	262.682.600	4,3	344.460.123	4	878.645.439	100%	113%	4	1.430.935.131	88%	99%	
2	2	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	Perpustakaan	72	531.312.880	0	304.592.880	72	621.997.960	0	50.019.000	0	76.023.016	0	262.682.600	72	211.460.123	72	600.184.739	100%	96%	72	904.777.619	100%	170%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	Eksemplar	3605	257.181.602	1568	50.607.602	3500	154.223.940	0	0	0	145.460.700	0	0	3170	133.000.000	3170	278.460.700	91%	181%	4738	329.068.302	131%	128%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Eksemplar	8800	650.190.000	2583	197.089.210	4100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2583	197.089.210	29%	30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasarakan Gemar Membaca	Kali	80	2.324.985.000	0	331.734.842	20	578.930.284	2	76.060.170	1	93.842.500	1	113.786.000	20	277.637.500	20	561.326.170	100%	97%	20	893.061.012	25%	38%	
2	2	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	5000	2.324.985.000	0	331.734.842	2500	578.930.284	617	76.060.170	0	93.842.500	0	113.786.000	2696	277.637.500	2696	561.326.170	108%	97%	2696	893.061.012	54%	38%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)
					Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																											
2	2	3			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	38	330.000.000	0	0	36	100.000.000	0	10.267.500	0	21.985.500	0	13.620.000	51,19	51.622.500	51	97.495.500	142%	97%	51	97.495.500	135%	30%			
2	2	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Eksemplar	519	330.000.000	0	0	168	100.000.000	168	10.267.500	0	21.985.500	0	13.620.000	168	51.622.500	168	97.495.500	100%	97%	168	97.495.500	32%	30%			
2	2	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Kegiatan	4	330.000.000	0	0	4	100.000.000	1	10.267.500	0	21.985.500	0	13.620.000	5	51.622.500	5	97.495.500	125%	97%	5	97.495.500	125%	30%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																											
2	2	4	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	%	93	2.581.457.105	0	426.805.663	92	605.608.579	0	268.175.000	0	81.362.800	0	50.745.000	91,5	199.928.632	92	600.211.432	99%	99%	92	1.027.017.095	98%	40%			
2	2	4	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	1.320.740.815	0	213.551.306	28	359.961.208	107	146.825.000	0	49.797.800	0	20.400.000	178	140.200.232	178	357.223.032	636%	99%	178	570.774.338	178%	43%			
2	2	4	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Meter Linier	912	1.320.740.815	0	213.551.306	912	359.961.208	976	146.825.000	0	49.797.800	0	20.400.000	1620	140.200.232	1620	357.223.032	178%	99%	1620	570.774.338	178%	43%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	4	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	Nomor Arsip	250	1.260.716.290	250	213.254.357	250	245.647.371	1950	121.350.000	0	31.565.000	0	30.345.000	2186	59.728.400	2186	242.988.400	874%	99%	2436	456.242.757	974%	36%			
2	2	4	2.02	2	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi diolah dipreservasi	Berkas	500	1.260.716.290	250	213.254.357	250	245.647.371	132	121.350.000	0	31.565.000	0	30.345.000	546	59.728.400	645	242.988.400	258%	99%	895	456.242.757	179%	36%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
						dan layanan akses arsip																								
2	2	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara Pemerintah Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	8,8	499.291.000	0	0	8,4	116.488.592	8,4	0	0	2.555.000	0	46.163.250	8,8	65.941.665	9	114.659.915	105%	98%	9	114.659.915	100%	23%		
2	2	3	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	100	499.291.000	0	0	100	116.488.592	100	0	0	2.555.000	0	46.163.250	100	65.941.665	100	114.659.915	100%	98%	100	114.659.915	100%	23%		
2	2	3	2.01	1	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	Nomor Berkas	917	245.390.000	0	0	917	59.405.752	917	0	0	2.555.000	0	46.163.250	1697	9.350.000	1697	58.068.250	185%	98%	1697	58.068.250	185%	24%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	Kali	1	253.901.000	0	0	1	57.082.840	1	0	0	0	0	0	1	56.591.665	1	56.591.665	100%	99%	1	56.591.665	100%	22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						126%	90%							
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Tinggi	Tinggi							
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																														
1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana.																														
2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																														
<b>Faktor Penghambat :</b>																														
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																														
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																														
1. Dalam penentuan target diharapkan pada tahun depan lebih realistis lagi, tidak menggunakan target yang terlalu tinggi, dan target yang realistis yang dapat diwujudkan dengan baik.																														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
							I	II	III	IV																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)	RP. (%)			
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																											
3	2	5	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1132	843.400.000	286	52.913.200	280	344.650.000	0	24.123.450	175,6	58.353.405	0	182.066.351	280	71.992.660	280	336.535.866	100%	98%	566	389.449.066	50%	46%		
3	2	5	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	Orang	1000	843.400.000	378	52.913.200	245	344.650.000	30	24.123.450	115	58.353.405	215	182.066.351	245	71.992.660	245	336.535.866	100%	98%	623	389.449.066	62%	46%		
3	2	5	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	Unit/Tahun	5	253.000.000	2	52.913.200	2	148.550.000	0	0	20.946.000	2	126.583.491	2	0	2	147.529.491	100%	99%	4	200.442.691	80%	79%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	5	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana yang tersedia	Paket	11	70.000.000	0	-	4	20.000.000	1	8.393.500	1	0	1	135.000	5	9.679.040	5	18.207.540	125%	91%	5	18.207.540	45%	26%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	Dokumen	3	520.400.000	0	-	3	176.100.000	0	15.729.950	0	37.407.405	0	55.347.860	3	62.313.620	3	170.798.835	100%	97%	3	170.798.835	100%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	356	156.000.000	0	-	89	40.360.000	0	19.016.870	15,5	4.800.000	0	4.800.000	93	9.288.450	93	37.905.320	104%	94%	93	37.905.320	26%	24%		
3	2	5	5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan	Orang	1305	156.000.000	0	-	435	40.360.000	0	19.016.870	200	4.800.000	250	4.800.000	435	9.288.450	435	37.905.320	100%	94%	435	37.905.320	33%	24%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
				Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)																									
3	2	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyuluhan Monitoring Perikanan Tangkap	Dokumen	6	156.000.000	0	-	2	40360000	0	19.016.870	4.800.000	0	4.800.000	2	9.288.450	2	37.905.320	100%	94%	2	37.905.320	33%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	16,1	984.083.000	15,8	451.571.469	15,7	336.122.600	0	1.906.000	0	162.362.570	0	32.720.425	16,9	128.557.048	17	325.546.043	108%	97%	17	777.117.512	106%	79%	
3	2	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibina	Orang	200	694.083.000	61	451.571.469	50	71.441.600	0	1.906.000	36	66.715.570	50	339.000	72	1.160.800	72	70.121.370	144%	98%	133	521.692.839	67%	75%	
3	2	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pengolahan dan Pemasar Ikan	Dokumen	3	694.083.000	0	451.571.469	3	71.441.600	0	1.906.000	1	66.715.570	0	339.000	3	1.160.800	3	70.121.370	100%	98%	3	521.692.839	100%	75%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	Ton	76	290.000.000	0	-	24	264.681.000	0	0	18	95.647.000	21	32.381.425	30	127.396.248	30	255.424.673	125%	97%	30	255.424.673	39%	88%	
3	2	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	Umkm	14	290.000.000	0	-	10	264.681.000	0	0	18	95.647.000	23	32.381.425	22	127.396.248	23	255.424.673	230%	97%	23	255.424.673	164%	88%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																									

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
3	2	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Destinasi	28	7.064.048.300	2	248.199.923	18	518.601.820	0	7.925.000	18	214.672.250		120.252.000		160.324.310	18	503.173.560	100%	97%	20	751.373.483	71%	11%	
3	2	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	destinasi	77	7.064.048.300	13	248.199.923	15	518.601.820	0	7.925.000	15	214.672.250		120.252.000		160.324.310	15	503.173.560	100%	97%	28	751.373.483	36%	11%	
3	2	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	8	5.874.048.300	2	123.831.923	2	164.801.820	0	0	1	23.913.250		104.895.000		23.660.000	1	152.468.250	50%	93%	3	276.300.173	38%	5%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga
3	2	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	38	1.190.000.000	0	124.368.000	2	353.800.000	0	7.925.000	2	190.759.000		15.357.000		136.664.310	2	350.705.310	100%	99%	2	475.073.310	5%	40%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga
3	2	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	Event	4	4.850.000.000	2	445.826.630	4	682.057.870	0	3.000.000	8	25.794.825		275.667.509		411.105.190	8	715.567.524	200%	105%	10	1.161.394.154	250%	24%	
3	2	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Promosi	25	4.850.000.000	4	445.826.630	15	682.057.870	0	3.000.000	15	25.794.825		275.667.509		411.105.190	15	715.567.524	100%	105%	19	1.161.394.154	76%	24%	
3	2	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Promosi	16	4.850.000.000	3	445.826.630	2	682.057.870	0	3.000.000	3	25.794.825		275.667.509		411.105.190	3	715.567.524	150%	105%	6	1.161.394.154	38%	24%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga
3	2	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataan	%	20	2.524.600.000	0	298.033.259	19	322.452.120	0	500.000	19	19.089.200		20.116.740		71.483.600	19	111.189.540	100%	34%	19	409.222.799	95%	16%	
3	2	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	%	20	2.524.600.000	0	298.033.259	18	322.452.120	0	500.000	8	19.089.200		20.116.740		71.483.600	8	111.189.540	44%	34%	8	409.222.799	40%	16%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>																									
3	2	5	2.	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	40	2.524.600.000	6	298.033.259	10	322.452.120	0	500.000	10	19.089.200	20.116.740	71.483.600	10	111.189.540	100%	34%	16	409.222.799	40%	16%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga		
3	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																												
3	2	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Efektifitas Sarana Pertanian	%	65	8.262.133.200	50	1.493.301.378	55	2.002.746.000	0	117.975.405	15	181.919.619	0	127.749.400	55	1.158.127.900	55	1.585.772.324	100%	79%	105	3.079.073.702	162%	37%	
3	2	2	2.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	7.633.893.200	50	1.242.084.038	75	1.837.425.000	25	83.311.705	25	135.011.500	50	87.600.000	75	1.116.605.900	75	1.422.529.105	100%	77%	125	2.664.613.143	156%	35%	
3	2	2	2.	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	Lokasi	78	426.138.200	39	291.116.560	39	342.895.000	15	0	15	5.850.000	66	8.550.000	49	34.085.000	66	48.485.000	169%	14%	105	339.601.560	135%	80%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	2.	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Paket	5	7.207.755.000	1	950.967.478	2	1.494.530.000	0	83.311.705	1	129.161.500	1	79.050.000	2	1.082.520.900	2	1.374.044.105	100%	92%	3	2.325.011.583	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	2.		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	628.240.000	75	251.217.340	75	165.321.000	5	34.663.700	75	46.908.119	75	40.149.400	75	41.522.000	75	163.243.219	100%	99%	75	414.460.559	100%	66%	
3	2	2	2.	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	Lokasi	48	628.240.000	12	251217340	12	165.321.000	8	34.663.700	23	46.908.119	23	40.149.400	23	41.522.000	23	163.243.219	192%	99%	35	414.460.559	73%	66%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	%	100	3.882.133.000	50	19.000.394	50	541.200.000	0	0	0	12.070.000	0	100.249.000	50	152.503.500	50	264.822.500	100%	49%	100	283.822.894	100%	7%	
3	2	3	2.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	329.653.000	50	19.000.394	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	-	0%	0%	55	19.000.394	55%	6%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp. (%)
3	2	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan laporan/peta/peraturan daerah tentang LP2B KP2B dan LCP2B kota Madiun	Doc	2	329.653.000	1	19.000.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	%	25	3.552.480.000	0	-	25	541.200.000	0	0	12.070.000	20	100.249.000	25	152.503.500	45	264.822.500	180	49	45	264.822.500	180	7				
3	2	3	2.02	1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah JIUT dibangun/direhab/dipelihara	Unit	2	1.000.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	2.02	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	Unit	5	2.095.715.000	0	-	1	541.200.000	0	0	12.070.000	0	100.249.000	1	152.503.500	1	264.822.500	100	49	1	264.822.500	20	13				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	2.02	9	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	Unit	4	456.765.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	10	1.003.053.000	10	350.665.858	10	252.100.700	0	65.824.755	6	6.228.400	0	23.403.935	10	82.521.320	10	177.978.410	100	71	10	528.644.268	100	53			
3	2	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	621.297.000	80	198.698.679	80	193.374.900	34	51.570.755	34	0	0	0	80	68.010.520	80	119.581.275	100	62	80	318.279.954	100	51			
3	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	Ekor	2850	621.297.000	1168	198.698.679	2850	193.374.900	873	51.570.755	3827	0	0	0	7647	68.010.520	7647	119.581.275	268	62	8815	318.279.954	309	51		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	381.756.000	80	151.967.179	80	58.725.800	100	14.254.000	85	6.228.400	85	23.403.935	168	14.510.800	85	58.397.135	106	99	85	210.364.314	106	55			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
3	2	4	2.	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	Sampel	400	381.756.000	220	151.967.179	200	58.725.800	66	14.254.000	73	6.228.400	170	23.403.935	335	14.510.800	170	58.397.135	85%	99%	390	210.364.314	98%	55%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian	%	76	545.320.400	0	157.224.145	72	198.236.000	0	800.000	0	33.150.400	0	26.871.920	72	70.056.880	72	130.879.200	100%	66%	72	288.103.345	95%	53%	
3	2	5	2.	01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	2000	545.320.400	0	157.224.145	1750	198.236.000	108	800.000	0	33.150.400	##	26.871.920	1750	70.056.880	1750	130.879.200	100%	66%	1750	288.103.345	88%	53%	
3	2	5	2.	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	Ha	50	545.320.400	0	157.224.145	10	198.236.000	0	800.000	7	33.150.400	10	26.871.920	10	70.056.880	10	130.879.200	100%	66%	10	288.103.345	20%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	6			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Prosentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	%	15	153.600.000	0	-	10	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450	0	4.948.300	8	15.969.200	8	37.547.250	80%	75%	8	37.547.250	53%	24%	
3	2	6	2.	01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	Jenis	6	153.600.000	0	-	2	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450	0	4.948.300	1	15.969.200	1	37.547.250	50%	75%	1	37.547.250	17%	24%	
3	2	6	2.	01	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	Orang	24	153.600.000	0	-	4	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450	0	4.948.300	4	15.969.200	4	37.547.250	100%	75%	4	37.547.250	17%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	%	20	154.477.400	0	-	20	68.873.500	0	1.350.000	0	52.759.000	0	1.350.000	20	7.450.000	20	62.909.000	100%	91%	20	62.909.000	100%	41%	
3	2	7	2.	01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	Orang	613	154.477.400	0	-	78	68.873.500	0	1.350.000	0	52.759.000	78	1.350.000	78	7.450.000	78	62.909.000	100%	91%	78	62.909.000	13%	41%	
3	2	7	2.	01	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	Paket	5	289.405.000	0	-	1	16.500.000	0	0	1	14.602.500	0	0	1	0	1	14.602.500	100%	89%	1	14.602.500	20%	5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7	2.	01	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	Jenis	1	105.932.400	0	-	1	52.373.500	0	1.350.000	0	38.156.500	1	1.350.000	1	7.450.000	1	48.306.500	100%	92%	1	48.306.500	100%	46%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
				Tingkat Kabupaten/Kota																										
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																										
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	%	100	749.725.500	100	378.559.440	100	267.723.000	19	17.596.750	12	13.901.500	93	21.000.000	3	37.435.000	100	89.933.250	100	34	100	468.492.690	100	62%		
3	30	2	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase ijin yang diterbitkan	%	100	749.725.500	100	378.559.440	100	267.723.000	19	17.596.750	12	13.901.500	93	21.000.000	3	37.435.000	100	89.933.250	100	34	100	468.492.690	100	62%		
3	30	2	2.01	1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	Surat	150	749.725.500	86	378.559.440	75	267.723.000	14	17.596.750	9	13.901.500	70	21.000.000	2	37.435.000	95	89.933.250	127	34	181	468.492.690	121	62%	Dinas Perdagangan
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya	%	100	28.890.161.680	0	7.834.536.737	100	5.949.292.774	25	1.008.066.450	25	934.362.685	25	1.341.166.407	25	2.482.040.556	100	5.765.636.098	100	97	100	13.600.172.835	100	47%		
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola sarana distribusinya	Pasar	17	11.226.501.582	0	3.634.149.558	17	2.073.216.556	17	210.144.700	17	260.384.450	17	605.195.807	17	889.111.576	17	1.964.836.533	100	95	17	5.598.986.091	100	50%	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	12	6.813.999.725	3	2.582.812.347	1	1.177.783.000	1	81.147.000	1	60.503.600	1	528.176.707	0	461.721.374	1	1.131.548.681	100	96	4	3.714.361.028	33	55%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.01	2	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	68	4.412.501.857	34	1.051.337.211	17	895.433.556	17	128.997.700	17	199.880.850	17	77.019.100	17	427.390.202	17	833.287.852	100	93	51	1.884.625.063	75	43%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Peningkatan omset Pasar Rakyat	Rupiah	3.200.000.000	0		0		0		0		0		0		0									
						Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	17.663.660.098		4.200.387.179	100	3.876.076.218	25	797.921.750	25	673.978.235	25	735.970.600	25	1.592.928.980	100	3.800.799.565	100	98	100	8.001.186.744	100	45%	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	Kali	4	2.944.960.983	0	874.831.869	2	385.663.183	2	70.172.550	0	104.755.235	0	18.040.000	0	136.846.000	2	329.813.785	100	86	2	1.204.645.654	50	41%	Dinas Perdagangan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
3	3	0	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Orang	236	14.718.699.115	119	3.325.555.310	118	3.490.413.035	118	727.749.200	118	569.223.000	118	717.930.600	118	1.456.082.980	118	3.470.985.780	100%	99%	237	6.796.541.090	100%	46%	Dinas Perdagangan
3	3	0	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	%	100	340.760.480	100	74.466.126	100	6.836.561.200	0	4.477.500	41,5	8.414.000	25	7.291.000	33	6.759.739.045	100	99%	100	6.854.387.671	100%	201%			
3	3	0	4	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan barang penting	%	100	302.363.280	100	74.466.126	100	6.823.450.000	0	4.477.500	33	7.320.000	0	6.000.000	67	6.757.119.045	100	99%	100	6.849.382.671	100%	226%			
3	3	0	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Kali	12	302.363.280	3	74.466.126	3	6.823.450.000	0	4.477.500	1	7.320.000	0	6.000.000	2	6.757.119.045	100	99%	6	6.849.382.671	50%	226%	Dinas Perdagangan		
3	3	0	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersalurkannya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	%	100	38.397.200	0	0	100	13.111.200	0	0	50	1.094.000	50	1.291.000	0	2.620.000	100	38%	100	5.005.000	100%	13%			
3	3	0	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	Kali	6	38.397.200	0	0	2	13.111.200	0	0	1	1.094.000	1	1.291.000	0	2.620.000	100	38%	2	5.005.000	33%	13%	Dinas Perdagangan		
3	3	0	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTPP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	%	100	1.055.660.135	117	327.531.023	100	318.133.875	17,1	23.118.505	11	27.600.000	9,7	46.490.000	63,9	187.184.225	102	89%	102	611.923.753	102%	58%			
3	3	0	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasannya	Bulan	12	1.055.660.135	12	327.531.023	12	318.133.875	3	23.118.505	3	27.600.000	3	46.490.000	3	187.184.225	100	89%	12	611.923.753	100%	58%			
3	3	0	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTPP) yang sudah ditera/tera ulang	Uttp	28000	996.209.155	8186	315.340.133	7000	314.899.855	2873	23.118.505	1784	27.600.000	##	46.490.000	2275	186.359.225	122	90%	16706	598.907.863	60%	60%	Dinas Perdagangan		
3	3	0	6	2.01	2	Pengawasan/Pe nyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	Lokasi	18	59.450.980	9	12.190.890	8	3.234.020	0	0	0	0	0	0	9	825.000	113	26%	18	13.015.890	100%	22%	Dinas Perdagangan		
3	3	0	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN	Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan	Produk	15	1.813.521.100	15	370.563.026	0	383.988.800	0	0	0	2.676.000	0	143.601.500	0	43.644.000	62%	49%	62	560.484.526	62%	31%			

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		K
				PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	%	100				100					38		62			62									
3	30	7	2.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Kali	16	1.813.521.300	4	370.563.026	4	383.988.850	0	0	0	2.676.000	1	143.601.500	3	43.644.000	4	189.921.500	100%	49%	8	560.484.526	50%	31%		
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Kali	8	1.129.114.850	4	215.443.026	4	171.312.400	0	0	0	0	1	84.641.500	3	43.644.000	4	128.285.500	100%	75%	8	343.728.526	100%	30%	Dinas Perdagangan
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharaannya	Jenis	4	684.406.450	2	155.120.000	2	212.676.450	0	0	0	2.676.000	1	58.960.000	1	0	2	61.636.000	100%	29%	4	216.756.000	100%	32%	Dinas Perdagangan
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																										
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	%	100	1.595.264.490	100	240.006.541	100	855.404.236	100	4.000.000	100	119.973.500	0	45.410.500	100	244.798.223	100	414.182.223	100%	48%	100	654.188.764	100%	41%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Menengah	
3	31	2	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perindustrian	Doc	4	1.595.264.490	2	240.006.541	2	855.404.236	2	4.000.000	2	119.973.500	0	45.410.500	2	244.798.223	2	414.182.223	100%	48%	4	654.188.764	100%	41%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Menengah	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	IKM	40	359.752.240	20	55.941.979	20	366.680.600	0	-	29	17.050.350	0	23.156.500	0	118.815.559	29	159.022.409	145%	43%	49	214.964.388	123%	60%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Menengah
3	31	2	2.01	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	IKM	40	277.713.160	0	-	40	116.080.160	0	-	20	16.471.000	19	16.254.000	0	77.774.750	39	110.499.750	98%	95%	39	110.499.750	98%	40%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Menengah
3	31	2	2.01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	145	957.799.090	80	184.064.562	65	372.643.476	0	4.000.000	64	86.452.150	0	6.000.000	0	48.207.914	64	144.660.064	98%	39%	144	328.724.626	99%	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Menengah

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp. (%)
3	3	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk	%	12,8	2.062.682.870	12,8	352.829.538	15	862.250.000	4,4	126.530.430	4	54.100.000	0	108.825.825	15,4	572.723.389	15	862.179.644	103%	100%	15	1.215.009.182	117%	59%	Menengah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah		
3	3	1	4	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPU IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan informasi produk IKM	Kegiatan	7	2.062.682.870	3	352.829.538	4	862.250.000	1	126.530.430	1	54.100.000	0	108.825.825		572.723.389	2	862.179.644	50%	100%	5	1.215.009.182	71%	59%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah	
3	3	1	4	2.01	2	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Kali Publikasi	7	2.062.682.870	3	352.829.538	5	862.250.000	1	126.530.430	1	54.100.000	2	108.825.825	5	572.723.389	5	862.179.644	100%	100%	8	1.215.009.182	114%	59%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
3	3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																											
3	3	2	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	%	20	62.653.500	18	13.760.000	20	14.850.000	0	-	0	-	20	14.028.750	-	-	20	14.028.750	100%	94%	20	27.788.750	100%	44%			
3	3	2	3	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	Orang	160	62.653.500	40	13.760.000	40	14.850.000	0	-	0	-	42	14.028.750	-	-	42	14.028.750	105%	94%	82	27.788.750	51%	44%		
3	3	2	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Kegiatan	6	62.653.500	1	13.760.000	1	14.850.000	0	0	0	0	1	14.028.750	0	0	1	14.028.750	100%	94%	2	27.788.750	33%	44%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																						103%	78%								
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi								

**Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :**

1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana.

2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan

**Faktor Penghambat :**

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
							I	II	III	IV																				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP. (%)	K	Rp. (000)		K	RP. (%)		
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4	1			SEKRETARIAT DAERAH																										
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	A	39.301.570.724	BB	4.615.957.002	A	12.359.012.098	0	140.267.000	0	4.044.125.650	0	2.397.325.690	BB	2.340.593.236	BB	8.922.311.576	80%	72%	BB	13.538.268.578	80%	34%	Bagian Pemerintahan	
4	1	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	7.561.427.000	100	1.235.527.654	100	1.651.879.500	25	115.267.000	25	423.243.400	25	156.761.540	25	710.931.553	100	85%	100	2.641.731.147	100%	35%	Bagian Pemerintahan			
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Kali	20	6.162.377.000	10	957.635.387	10	1.288.851.500	3	87.117.000	5	257.965.400	0	156.761.540	2	548.149.053	10	1.049.992.993	100%	81%	20	2.007.628.380	100%	33%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen rupa bumi	Doc	3	139.050.000	1	47.717.000	2	103.028.000	0	0	1	87.150.000	0	0	1	12.500.000	2	99.650.000	100%	97%	3	147.367.000	100%	106%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Doc	24	1.260.000.000	5	230.175.267	5	260.000.000	3	28.150.000	1	78.128.000	0	0	1	150.282.500	5	256.560.500	100%	99%	10	486.735.767	42%	39%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			100	26.301.040.564	100	2.535.228.216	100	9.509.966.578	0	35.282.400	0	3.294.187.500	0	1.989.210.000	100	952.828.000	100	6271.507.900	100%	66%	100	8.806.736.116	100%	33%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Kegiatan	30	26.301.040.564	15	2.535.228.216	15	9.509.966.578	2	35.282.400	6	3.294.187.500	3	1.989.210.000	4	952.828.000	15	6.271.507.900	100%	66%	30	8.806.736.116	100%	33%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang tersusun	%	100	3.744.131.160	100	588.757.274	100	764.738.000	16	994.000	32	278.354.000	11	112.032.350	41	364.614.483	100	755.994.833	100%	99%	100	1.344.752.107	100%	36%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	Perda / Raperda	73	1.675.943.160	33	246.776.454	18	222.900.000	3	0	6	16.500.000	0	81.000.000	12	125.100.000	21	222.600.000	117%	100%	54	469.376.454	74%	28%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kegiatan	6	1.210.180.400	3	149.420.354	3	215.852.000	1	994.000	1	63.184.000	0	16.384.000	1	127.955.335	3	208.517.335	100%	97%	6	357.937.689	100%	30%	Bagian Hukum

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Jenis	6	858.007.600	6	192.560.466	3	325.986.000	0	0	1	198.670.000	1	14.648.350	1	111.559.148	3	324.877.498	100%	100%	9	517.437.964	150%	60%	Bagian Hukum
4	1	2	2.0 4		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	%	100	1.694.972.000	100	256.443.858	100	432.428.020	100	25.000.000	100	48.340.750	100	139.321.800	100	312.219.200	100	524.881.750	100%	121%	100	781.325.608	100%	46%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Kali	10	1.694.972.000	7	256.443.858	5	432.428.020	2	25.000.000	4	48.340.750	5	139.321.800	6	312.219.200	6	524.881.750	120%	121%	13	781.325.608	130%	46%	Bagian Pemerintahan
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A	6.146.850.892	BB	749.868.125	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.510.427	100%	89%	62	1.756.378.552	62%	29%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
						Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian	%	100				100		100	20	20	40	40	20	20	20	20	20	100						
4	1	3	2.0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			100	2.368.033.600		284.278.273	100	338.769.600	15	26.380.000	6	52.948.000	62	24.417.000	94	117.067.000	94	220.812.000	94%	65%	94	505.090.273	94%	21%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	6	1.525.650.000	3	184.626.166	3	247.984.960	0	26.380.000	1	40.840.500	1	21.617.000	1	71.267.000	3	160.104.500	100%	65%	6	344.730.666	100%	23%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kegiatan	4	842.383.600	2	99.652.107	2	90.784.640	0	0	1	12.107.500	0	2.800.000	1	45.800.000	2	60.707.500	100%	67%	4	160.359.607	100%	19%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	%	100	816.207.983	100	99.652.107	100	104.515.360	30	15.499.750	30	26.250.000	30	18.400.000	10	43.850.000	100	103.999.750	100%	100%	100	203.651.857	100%	25%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Doc	4	388.926.438	2	99.652.107	1	28.500.000	0	0	0	0	0	0	1	28.500.000	1	28.500.000	100%	100%	3	128.152.107	75%	33%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang	Doc	48	427.281.545	0	0	12	76.015.360	3	15.499.750	3	26.250.000	3	18.400.000	12	15.350.000	12	75.499.750	100%	99%	12	75.499.750	25%	18%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	K	Rp. (000)	
						teralisasi sesuai target																								
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	%	100	1.849.109.309	100	327.155.745	100	234.822.600	25	49.100.750	25	47.450.000	24	45.000.000	26	90.606.252	100	232.157.002	100%	99%	100	559.312.747	100%	30%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	%	100	752.279.129	0	113.267.564	100	148.664.800	34	28.600.000	32	34.700.000	30	5.500.000	4	77.771.252	100	146.571.252	100%	99%	100	259.838.816	100%	35%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	%	100	1.096.830.180	0	213.888.181	100	86.157.800	19	20.500.750	35	12.750.000	18	39.500.000	28	12.835.000	100	85.585.750	100%	99%	100	299.473.931	100%	27%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			100	1.113.500.000		38.782.000	100	454.469.675	0	14.094.000	30	221.875.675	0	213.572.000	70	0	100	449.541.675	100%	99%	100	488.323.675	100%	44%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.04	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	1.113.500.000	100	38.782.000	100	454.469.675	0	14.094.000	30	221.875.675	30	213.572.000	40	0	100	449.541.675	100%	99%	100	488.323.675	100%	44%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	2				SEKRETARIAT DPRD																									
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	Skor	80	62.896.085.602	79	11.013.369.365	80	13.523.065.504	5	1.382.375.350	39	2.994.555.725	32	2.986.805.111	23	6.325.011.171	99	13.688.747.357	124%	101%	99	24.702.116.722	124%	39%	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	%	100	23.388.670.051	100	5.273.494.639	100	5.969.361.370	8	490.569.000	29	1.665.604.905	25	477.466.500	38	4.285.770.950	100	6.919.411.355	100%	116%	100	12.192.905.994	100%	52%	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	raperda	34	17.016.503.391	10	4.492.436.639	24	3.949.322.770	4	490.569.000	6	1.179.554.905	4	166.240.000	10	1.696.265.150	24	3.532.629.055	100%	89%	34	8.025.065.694	100%	47%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggara an Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	dokumen	21	6.372.166.660	3	781.058.000	3	2.020.038.600	0	-	1	486.050.000	1	311.226.500	1	2.589.505.800	3	3.386.782.300	100%	168%	6	4.167.840.300	29%	65%	Sekretariat DPRD

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	
4	2	2	2.0	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	%	100	5.073.995.000	100	692.776.304	100	1.102.009.780	0	3.840.000	0	10.266.250	75	568.599.550	25	505.978.490	100	1.088.684.290	100%	99%	100	1.781.460.594	100%	35%	
4	2	2	2.0	3	Pembahasan APBD	Pembahasan KUA-PPAS KUPA-PPASP dan APBD PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	Dokumen	18	5.073.995.000	4	692.776.304	4	1.102.009.780	0	3.840.000	0	10.266.250	3	568.599.550	1	505.978.490	4	1.088.684.290	100%	99%	8	1.781.460.594	44%	35%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	%	100	4.254.995.025	100	316.799.750	100	664.545.639	0	266.062.250	100	314.662.170	0	38.849.880	0	16.811.000	100	636.385.300	100%	96%	100	953.185.050	100%	22%	
4	2	2	2.0	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rekomendasi DPRD atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	Dokumen	4	1.311.754.450	5	105.927.700	1	294.597.468	0	250.406.500	1	30.393.760	0	-7.330.000	0	10.220.000	1	283.690.260	100%	96%	6	389.617.960	150%	30%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	Dokumen	6	2.943.240.575	2	210.872.050	2	369.948.171	0	15.655.750	2	284.268.410	0	46.179.880	0	6.591.000	2	352.695.040	100%	95%	4	563.567.090	67%	19%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	%	100	25.743.717.166	100	3.928.707.472	100	4.615.786.780	19	621.904.100	34	681.914.600	29	1.565.942.601	18	1.192.504.081	100	4.062.265.382	100%	88%	100	7.990.972.854	100%	31%	
4	2	2	2.0	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Bimtek	12	14.688.902.751	0	2.086.372.887	6	2.271.194.500	1	414.904.100	2	412.493.100	1	618.602.600	2	372.811.176	6	1.818.810.976	100%	80%	6	3.905.183.863	50%	27%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	Kegiatan	100	6.876.738.115	50	1.425.898.085	50	1.306.056.800	20	176.639.000	10	251.888.000	10	339.925.001	10	699.687.905	50	1.468.139.906	100%	112%	100	2.894.037.991	100%	42%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	Dokumen	6	4.178.076.300	4	416.436.500	2	1.038.535.480	0	30.361.000	1	17.533.500	1	607.415.000	0	120.005.000	2	775.314.500	100%	75%	6	1.191.751.000	100%	29%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang masuk RKPD	%	100	4.434.708.360	100	801.591.200	100	1.171.361.935	0	-	32	322.107.800	33	335.946.580	33	323.946.650	98	982.001.030	98%	84%	98	1.783.592.230	98%	40%	
4	2	2	2.0	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap	Dokumen	360	4.434.708.360	0	801.591.200	90	1.171.361.935	0	-	29	322.107.800	30	335.946.580	30	323.946.650	89	982.001.030	99%	84%	89	1.783.592.230	25%	40%	Sekretariat DPRD
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						101%	87%							
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat	Sangat							



1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)
																				Tinggi	Tinggi						
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana. 2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																											
<b>Faktor Penghambat :</b>																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Renstra PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)					
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																										
5	1			PERENCANAAN																										
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100	4.720.016.655	100	1.457.591.240	100	1.117.110.925	25	367.872.376	25	247.044.551	25	126.666.120	25	122.139.999	100	925.111.246	100%	83%	100	2.382.702.486	100%	50%		
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Doc	9	3.793.016.655	0	1.251.047.715	3	962.009.425	352.614.776	1	209.291.801	1	103.906.620	1	122.139.999	3	787.953.196	100%	82%	3	2.039.000.911	33%	54%			
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	Kali	3	590.575.800	1	29.517.000	1	122.989.500	1	122.319.992	0	0	0	0	1	0	1	122.319.992	100%	99%	2	151.836.992	67%	26%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Kali	3	647.695.500	1	125.256.250	1	132.720.500	1	132.642.242	0	0	0	0	1	0	1	132.642.242	100%	100%	2	257.898.492	67%	40%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Kali	3	1.388.690.325	2	400.442.406	1	315.850.450	0	79.130.272	1	162.517.951	0	0	1	68.913.950	1	310.562.173	100%	98%	3	711.004.579	100%	51%	Badan Perencanaan Penelitian dan

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
																															Pengembangan Daerah
5	1	2	2.0	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Doc	3	1.166.055.030	0	695.832.059	1	390.448.975	0	18.522.270	0	46.773.850	1	103.906.620	1	53.226.049	1	222.428.789	100%	57%	1	918.260.848	33%	79%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.0	3	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Doc	6	927.000.000	0	206.543.525	2	155.101.500	0	15.257.600	1	37.752.750	0	22.759.500	0	0	1	137.158.050	50%	88%	1	343.701.575	17%	37%		
5	1	2	2.0	3	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Doc	6	297.000.000	2	69.862.500	2	81.445.000	0	14.501.000	1	23.042.500	0	18.675.000	2	24.900.000	3	81.118.500	150%	100%	5	150.981.000	83%	51%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	2	2.0	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Doc	12	630.000.000	4	136.681.025	4	73.656.500	1	756.600	1	14.710.250	0	4.084.500	4	36.488.200	6	56.039.550	150%	76%	10	192.720.575	83%	31%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100	7.129.450.000	0	1.420.688.887	92	1.541.536.426		49.631.750	25	78.853.550	0	112.631.420		984.622.045	25	1.225.738.765	27%	80%	25	2.646.427.652	25%	37%		
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Doc	3	1.884.000.000	0	479.807.274	1	361.693.120	0	23.198.000	0	34.993.050	0	45.310.100	0	249.862.025	0	353.363.175	0%	98%	0	833.170.449	0%	44%		
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPJMD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	%	100	345.000.000	100	65.208.139	100	72.864.000	25	6.409.000	25	13.004.950	25	20.663.700	100	122.856.075	100	162.933.725	100%	224%	175	228.141.864	175%	66%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.0	1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen	Doc	42	60.000.000	14	96.879.250	14	20.000.000	0	1.219.650	0	452.500	0	2.784.000	14	10.302.950	14	14.759.100	100%	74%	28	111.638.350	67%	186%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (%)	K	Rp. (000)	
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	%	100	1.459.744.500	0	185.745.135	100	262.410.620	25	12.456.250	25	21.535.600	25	20.377.800	100	114.894.150	100	169.263.800	100	65%	100	355.008.935	100	24%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen	Doc	3	19.255.500	1	131.974.750	1	6.418.500	0	3.113.100	0	0	1	1.484.600	1	1.808.850	1	6.406.550	100	100%	2	138.381.300	67%	719%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Doc</b>	<b>3</b>	<b>2.681.400.000</b>	<b>0</b>	<b>515.985.355</b>	<b>1</b>	<b>471.390.186</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7.090.000</b>	<b>0</b>	<b>29.204.220</b>	<b>3</b>	<b>349.054.170</b>	<b>3</b>	<b>385.348.390</b>	<b>300</b>	<b>82%</b>	<b>3</b>	<b>901.333.745</b>	<b>100</b>	<b>34%</b>	
5	1	3	2.0 2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	Doc	3	461.400.000	1	312.459.290	1	170.523.466	0	0	0	3227500	0	9.156.000	1	81.060.500	1	93.444.000	100	55%	2	405.903.290	67%	88%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Doc	3	2.220.000.000	1	203.526.065	1	300.866.720	0	0	0	3.862.500	0	20.048.220	1	267.993.670	1	291.904.390	100	97%	2	495.430.455	67%	22%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Doc</b>	<b>3</b>	<b>2.564.050.000</b>	<b>0</b>	<b>424.896.258</b>	<b>1</b>	<b>708.453.120</b>	<b>0</b>	<b>26.433.750</b>	<b>0</b>	<b>36.770.500</b>	<b>0</b>	<b>38.117.100</b>	<b>1</b>	<b>385.705.850</b>	<b>1</b>	<b>487.027.200</b>	<b>100</b>	<b>69%</b>	<b>1</b>	<b>911.923.458</b>	<b>33%</b>	<b>36%</b>	
5	1	3	2.0 3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPDP)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	Doc	3	546.000.000	1	147.593.968	1	276.150.000	0	3.209.250	0	10.502.500	0	2.740.450	1	57.780.650	1	74.232.850	100	27%	2	221.826.818	67%	41%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Doc	3	1.474.000.000	1	105.182.190	1	324.963.360	0	2.892.750	0	0	0	6.093.600	1	310.950.350	1	319.936.700	100	98%	2	425.118.890	67%	29%	Badan Perencanaan Penelitian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																											Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	Doc	3	295.650.000	1	149.192.050	1	82.321.000	0	15.173.250	0	20.258.750	0	20.012.000	1	14.173.750	1	69.617.750	100%	85%	2	218.809.800	67%	74%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Doc	3	248.400.000	1	22.928.050	1	25.018.760	0	5.158.500	0	6.009.250	0	9.271.050	1	2.801.100	1	23.239.900	100%	93%	2	46.167.950	67%	19%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	2				<b>KEUANGAN</b>																											
5	2	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	%	100	88.647.719.784	100	18.425.854.812	100	35.116.573.814	100	308.330.800	100	1.090.962.650	100	601.667.660	100	1.611.899.300	100	3.612.860.410	100%	10%	100	22.038.715.222	100%	25%			
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	5.547.219.060	100	664.757.859	100	1.005.199.090	100	112.678.800	100	116.050.000	100	101.563.260	100	630.387.900	100	960.679.960	100%	96%	100	1.625.437.819	100%	29%			
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doc	8	1.676.760.110	2	72.303.629	2	51.739.910	0	24.921.000	0	0	2	26.000.000	0	24.624.000	2	75.545.000	100%	146%	4	147.848.629	50%	9%		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doc	8	314.892.110	2	75.727.900	2	56.794.910	0	0	0	2	50.030.000	0	0	2	50.030.000	100%	88%	4	125.757.900	50%	40%		Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.01	5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Doc	70	147.393.060	34	31.561.395	34	16.877.340	0	12.016.800	34	0	0	4.033.260	0	0	34	16.050.060	100%	95%	68	47.611.455	97%	32%		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Doc	70	143.604.080	34	26.938.829	34	23.640.000	0	0	0	0	34	0	0	21.826.800	34	21.826.800	100%	92%	68	48.765.629	97%	34%		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Doc	8	1.041.872.920	2	187.139.014	2	193.633.320	2	66.741.000	0	0	0	0	0	125.596.500	2	192.337.500	100%	99%	4	379.476.514	50%	36%		Badan Keuangan dan Aset Daerah	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doc	8	823.731.210	2	102.438.976	2	114.401.610	0	0	0	0	2	0	0	0	113.965.200	2	113.965.200	100%	100%	4	216.404.176	50%	26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Doc	6	1.398.965.570	2	168.648.116	2	548.112.000	0	9.000.000	1	116.050.000	1	21.500.000	0	0	344.375.400	2	490.925.400	100%	90%	4	659.573.516	67%	47%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan</b>	%	100	1.095.243.000	100	198.329.999	100	47.050.000	0	0	100	13.610.000	100	9.385.000	100	13.255.000	100	36.250.000	100%	77%	100	234.579.999	100%	21%		
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Doc	220	575.243.000	35	116.095.892	55	41.950.000	0	0	25	12.270.000	11	9.385.000	19	11.245.000	55	32.900.000	100%	78%	90	148.995.892	41%	26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Doc	12	520.000.000	3	82.234.107	3	5.100.000	0	0	3	1.340.000	3	0	3	2.010.000	3	3.350.000	100%	66%	6	85.584.107	50%	16%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi</b>	%	100	5.335.766.000	100	1.229.079.055	100	1.073.620.740	0	195.652.000	100	276.415.250	100	269.508.500	100	314.855.500	100	1.056.431.250	100%	98%	200	2.285.510.305	200%	43%		
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Laporan	8	1.160.000.000	2	269.232.388	2	118.029.440	0	29.152.000	1	43.946.000	1	43.782.000	0	0	800.000	2	117.680.000	100%	100%	4	386.912.388	50%	33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Doc	8	170.000.000	2	31.437.074	2	57.500.000	0	0	1	22.380.000	1	9.795.000	0	0	20.650.000	2	52.825.000	100%	92%	4	84.262.074	50%	50%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Doc	14	500.000.000	3	74.766.223	3	65.176.480	0	0	0	0	2	29.064.000	2	30.187.500	4	59.251.500	133%	91%	7	134.017.723	50%	27%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2200	3.505.766.000	30	853.643.370	500	832.914.820	200	166.500.000	100	210.089.250	135	186.867.500	119	263.218.000	554	826.674.750	111%	99%	584	1.680.318.120	27%	48%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100	76.669.491.724	100	16.333.687.899	100	32.990.703.984	100	0	100	684.887.400	100	221.210.900	100	653.400.900	100	1.559.499.200	100%	5%	200	17.893.187.099	200%	23%	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	36	76.669.491.724	0	16.333.687.899	12	32.990.703.984	3	0	3	684.887.400	3	221.210.900	3	653.400.900	12	1.559.499.200	100%	5%	12	17.893.187.099	33%	23%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Dilindungi	%	100	10.047.997.420	100	3.039.020.352	100	2.076.475.980	100	31.470.000	100	31.812.779	100	26.420.000	100	144.816.221	100	234.519.000	100%	11%	200	3.273.539.352	200%	33%	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	66	10.047.997.420	0	3.039.020.352	22	2.076.475.980	5	31.470.000	6	31.812.779	5	26.420.000	6	144.816.221	22	234.519.000	100%	11%	22	3.273.539.352	33%	33%	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14	630.960.000	5	80.580.469	5	211.670.000	0	28.750.000	0	14.067.779	2	8.000.000	0	29.082.221	2	79.900.000	40%	38%	7	160.480.469	50%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	8	9.217.037.420	2	2.925.366.993	2	1.823.205.980	1	2.720.000	0	7.325.000	0	9.555.000	1	106.924.000	2	126.524.000	100%	7%	4	3.051.890.993	50%	33%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	72	200.000.000	18	33.072.890	18	41.600.000	4	-	0	10.420.000	5	8.865.000	9	8.810.000	18	28.095.000	100%	68%	36	61.167.890	50%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10	5.010.070.000	0	489.484.190	10	1.281.746.000	0	14.137.500	4	377.148.700	0	125.657.150	10	549.894.590	10	1.066.837.940	100%	83%	10	1.556.322.130	100%	31%	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	100	5.010.070.000	100	489.484.190	100	1.281.746.000	0	14.137.500	0	377.148.700	0	125.657.150	100	549.894.590	100	1.066.837.940	100%	83%	100	1.556.322.130	100%	31%	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	8	25.100.000	2	4.379.000	2	14.827.000	0	0	0	253.500	0	0	2	12.154.800	2	12.408.300	100%	84%	4	16.787.300	50%	67%	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
5	2	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	dokumen	4	2.452.161.000	1	182.550.250	1	379.984.000	0	7.254.000	0	326.648.000	0	24.406.300	1	11.354.600	1	369.662.900	100%	97%	2	552.213.150	50%	23%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah subyek pajak dan wajib pajak daerah	dokumen	4	69.750.000	1	12.169.000	1	16.250.000	0	0	0	0	0	0	1	12.837.000	1	12.837.000	100%	79%	2	25.006.000	50%	36%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	6	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen	4	1.300.000.000	1	150.000.000	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	1	110.000.000	1	110.000.000	100%	100%	2	260.000.000	50%	20%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	WP	12909	396.740.000	0	-	4303	264.442.000	0	0	0	0	0	0	4303	244.866.000	4303	244.866.000	100%	93%	4303	244.866.000	33%	62%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	4	207.300.000	1	28.780.500	1	50.000.000	0	0	0	0	0	34.283.900	1	4.995.000	1	39.278.900	100%	79%	2	68.059.400	50%	33%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Pajak	26769	139.350.000	0	9.273.040	8923	279.357.000	0	4.608.000	6452	29.415.500	0	0	8923	77.792.000	8923	111.815.500	100%	40%	8923	121.088.540	33%	87%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	%	100	298.977.000	0	63.330.000	100	85.540.000	0	0	0	18.788.700	0	62.426.850	100	-	100	81.215.550	100%	95%	100	144.545.550	100%	48%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100	69.670.000	0	8.402.400	100	71.076.000	0	0	0	0	0	1.667.500	100	72.859.400	100	74.526.900	100%	105%	100	82.929.300	100%	119%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	4	51.022.000	1	30.600.000	1	10.270.000	0	2.275.500	0	2.043.000	0	2.872.600	1	3.035.790	1	10.226.890	100%	100%	2	40.826.890	50%	80%	Badan Pendapatan Daerah
5	3				<b>KEPEGAWAIAN</b>																									
5	3	2			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	89	7.745.544.951	88	1.764.604.347	88	2.194.319.252	0	82.172.000	0	412.208.600	0	259.516.300	87,7	751.060.050	88	1.504.956.950	100%	69%	88	3.269.561.297	99%	42%	
5	3	2	2.0 1		<b>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Realisasi Pengadaan Pemberhentian dan Informasi</b>	<b>%</b>	100	3.795.920.632	0	1.204.156.328	100	999.866.952	10	44.941.000	58,27	90.000.100	44	36.093.000	100	242.415.900	100	413.450.000	100%	41%	100	1.617.606.328	100%	43%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
5	3	2	2.0 1	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Dokumen	6	3.482.620.632	0	632.559.200	2	836.816.072	0	30.561.000	0	42.458.100	0	11.168.000	2	181.006.500	2	265.193.600	100%	32%	2	897.752.800	33%	26%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 1	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	797	153.300.000	203	49.730.000	212	53.940.000	50	950.000	65	22.950.000	57	12.500.000	212	17.050.000	212	53.450.000	100%	99%	415	103.180.000	52%	67%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 1	1 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	12000	160.000.000	2057	521.867.128	3000	109.110.880	901	13.430.000	1424	24.592.000	282	12.425.000	3000	44.359.400	3000	94.806.400	100%	87%	5057	616.673.528	42%	385%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 2		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	Persen	100	1.512.759.907	100	440.062.907	100	234.855.000	18	16.040.000	89,95	42.765.000	11	28.340.000	100	139.042.200	100	226.187.200	100%	96%	100	666.250.107	100%	44%	
5	3	2	2.0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1613	1.190.399.907	0	391.002.907	702	139.175.000	140	4.540.000	48	11.922.000	24	2.840.000	702	113.988.200	702	133.290.200	100%	96%	702	524.293.107	44%	44%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2164	322.360.000	834	49.060.000	475	95.680.000	4	11.500.000	276	30.843.000	10	25.500.000	455	25.054.000	455	92.897.000	96%	97%	1289	141.957.000	60%	44%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 3		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	Persen	100	1.901.930.882	0	57.223.582	100	844.707.300	49	14.790.000	63,23	251.040.000	23	165.470.000	100	334.223.950	100	765.523.950	100%	91%	100	822.747.532	100%	43%	
5	3	2	2.0 3	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	Peserta	550	463.853.482	270	57.223.582	280	406.629.900	137	14.790.000	94	232.220.000	50	0	280	156.800.000	280	403.810.000	100%	99%	550	461.033.582	100%	99%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 3	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	410	1.438.077.400	0	0	150	438.077.400	0	0	96	18.820.000	14	165.470.000	150	177.423.950	150	361.713.950	100%	83%	150	361.713.950	37%	25%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	100	534.933.530	0	63.161.530	100	114.890.000	0	6.401.000	65	28.403.500	0	29.613.300	100	35.378.000	100	99.795.800	100%	87%	100	162.957.330	100%	30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	
5	3	2	2.0	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	116.422.000	0	-	1	37.640.000	0	0	18.820.000	0	18.820.000	1	-	1	37.640.000	100%	100%	1	37.640.000	25%	32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.0	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2799	128.760.000	0	-	0	0	0	0	0	0	1429	-	1429	-	0%	0%	1429	-	51%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5	3	2	2.0	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peserta	349	289.751.530	88	63.161.530	141	77.250.000	27	6.401.000	39	9.583.500	15	10793300	60	35.378.000	141	62.155.800	100%	80%	229	125.317.330	66%	43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																									
5	4	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	14	14.307.129.964	6	2.484.703.029	12	3.597.265.935	36	403.301.495	22,11	1.037.424.488	0	870.249.178	14	1.103.726.423	14	3.414.701.584	117%	95%	20	5.899.404.613	143%	41%	
5	4	2	2.0	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	5.886.274.020	38	882.110.235	85	1.051.093.785	47	156.563.307	84,11	72.082.500	84	369.419.584	85	431.101.680	85	1.029.167.071	100%	98%	123	1.911.277.306	145%	32%	
5	4	2	2.0	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Peserta	777	5.886.274.020	159	882.110.235	226	1.051.093.785	280	156.563.307	233	72.082.500	387	369.419.584	277	431.101.680	277	1.029.167.071	123%	98%	436	1.911.277.306	56%	32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.0	2	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti kompetensi jabatannya	%	80	8.420.855.944	0	1.602.592.794	85	2.546.172.150	20	246.738.188	76,83	965.341.988	53	500.829.594	80	672.624.743	80	2.385.534.513	94%	94%	80	3.988.127.307	100%	47%	
5	4	2	2.0	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional	Peserta	824	8.420.855.944	282	1.602.592.794	240	2.546.172.150	50	246.738.188	136	965.341.988	128	500.829.594	177	672.624.743	177	2.385.534.513	74%	94%	459	3.988.127.307	56%	47%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
				Kepemimpinan dan Prajabatan	nal Kepemimpinan dan Prajabatan																									
5	5			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																										
5	5	2		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	1.890.055.122	100	648.229.573	100	731.038.204	0	18.556.950	25	48.294.000	0	144.374.750	25	260.680.082	50	471.905.782	50%	65%	150	1.120.135.355	150%	59%		
5	5	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Doc	3	1.210.809.201	0	502.023.328	2	571.715.195	0	8.443.000	0	19.406.250	0	132.276.400	1	229.019.981	1	389.145.631	50%	68%	1	891.168.959	33%	74%		
5	5	2	2.01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	Doc	5	653.766.060	1	326.803.134	2	472.525.045	0	1.774.500	1	11.776.250	0	114.223.400	2	174.397.531	3	302.171.681	150%	64%	4	628.974.815	80%	96%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen data kelitbangan	Doc	3	557.043.141	1	175.220.194	1	99.190.150	0	6.668.500	0	7.630.000	0	18.053.000	1	54.622.450	1	86.973.950	100%	88%	2	262.194.144	67%	47%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	5	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Doc	3	679.245.921	0	146.206.245	1	159.323.009	0	10.113.950		28.887.750		12.098.350	1	31.660.101	1	82.760.151	100%	52%	1	228.966.396	33%	34%		
5	5	2	2.04	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Doc	10	679.245.921	1	146.206.245	4	159.323.009	1	10.113.950	1	28.887.750	1	12.098.350	4	31.660.101	7	82.760.151	175%	52%	8	228.966.396	80%	34%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						100%	32%							
<b>Predikat Kinerja</b>																						Tinggi	Sangat Rendah							
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																														
1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana.																														
2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																														
<b>Faktor Penghambat :</b>																														
1. Penggunaan Dana Darurat rendah dikarenakan kondisi pandemi yang sudah menurun sedangkan pagu yang disiapkan besar																														
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																														
<i>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</i>																														

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :

1. Perencanaan penganggaran bisa dilakukan dengan cermat agar tidak ada serapan anggaran yang tidak maksimal, sehingga bisa dimanfaatkan oleh OPD lain yang lebih membutuhkan.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)	

**6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**6 1 INSPEKTORAT DAERAH**

6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	%	45	3.025.284.930	25	785.424.859	35	455.597.821	0	68.748.650	14	54.812.950	8	94.938.900	15	202.114.000	37	420.614.500	106%	92%	37	1.206.039.359	82%	40%		
6	1	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan	Doc	88	2.381.777.600	1	473.085.553	29	425.544.521	0	67.780.650	14	48.399.600	9	90.635.950	5	187.946.000	28	394.762.200	97%	93%	29	867.847.753	33%	36%		
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	12	210.534.800	3	13.519.000	3	51.772.000	0	0	2	8.040.500	1	24.640.000	0	7.100.000	3	39.780.500	100%	77%	6	53.299.500	50%	25%	Inspektora t Daerah
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	74	1.203.958.270	29	347.652.703	15	197.661.961	0	19.216.050	10	31.978.300	3	22.670.400	2	107.037.750	15	180.902.500	100%	92%	44	528.555.203	59%	44%	Inspektora t Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	Doc	16	91.751.640	4	9.615.000	4	24.507.000	0	11.976.400	2	2.961.000	2	9.432.600	0	0	4	24.370.000	100%	99%	8	33.985.000	50%	37%	Inspektora t Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	jumlah dokumen hasil reviu	Doc	12	795.300.980	3	89.247.850	3	132.438.560	0	36.588.200	0	0	1	32.136.450	2	63.406.350	3	132.131.000	100%	100%	6	221.378.850	50%	28%	Inspektora t Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monev	Doc	16	80.231.910	4	13.051.000	4	19.165.000	0	0	0	5.419.800	2	1.756.500	2	10.401.900	4	17.578.200	100%	92%	8	30.629.200	50%	38%	Inspektora t Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	643.507.330	0	312.339.306	100	30.053.300	0	968.000	100	6.413.350	0	4.302.950	0	14.168.000	100	25.852.300	100%	86%	100	338.191.606	100%	53%	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	4	643.507.330	1	312.339.306	1	30.053.300	0	968.000	1	6.413.350	0	4.302.950	0	14.168.000	1	25.852.300	100%	86%	2	338.191.606	50%	53%	Inspektora t Daerah
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	%	100	2.526.132.380	100	946.426.570	100	912.598.000	0	170.431.550	25	165.940.900	45	247.382.614	35	327.556.950	105	911.312.014	105%	100%	205	1.857.738.584	205%	74%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							yang Terpenuhi				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)		
6	1	3	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun		Doc	12	24.227.300	6	3.130.000	2	6.623.000	0	6.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9.638.000	50%	40%	
6	1	3	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun		Doc	8	24.227.300	2	3.130.000	2	6.623.000	0	6.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.638.000	25%	40%	Inspektora t Daerah
6	1	3	2.0	2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi		Doc	24	2.501.905.080	6	943.296.570	6	905.975.000	1	163.923.550	2	165.940.900	1	247.382.614	2	327.556.950	6	904.804.014	100%	100%	12	1.848.100.584	50%	74%			
6	1	3	2.0	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi		Doc	8	1.304.190.980	4	411.417.470	4	240.140.000	0	5.875.500	2	9.378.900	1	82.521.114	1	141.299.200	4	239.074.714	100%	100%	8	650.492.184	100%	50%	Inspektora t Daerah		
6	1	3	2.0	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah dokumen money dan verifikasi		Doc	5	1.197.714.100	3	531.879.100	2	665.835.000	0	158.048.050	1	156.562.000	0	164.861.500	1	186.257.750	2	665.729.300	100%	100%	5	1.197.608.400	100%	100%	Inspektora t Daerah		
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																									87%	96%								
<b>Predikat Kinerja</b>																									Tinggi	Sangat Tinggi								
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana. 2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																																		
<b>Faktor Penghambat :</b>																																		
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																																		
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
							UNSUR KEWILAYAHAN				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1				KECAMATAN MANGUHARJO																												

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	93	25.013.117.061	94	7.727.141.672	92,05	5.511.237.038	0	1.489.697.289	0	1.174.670.119	0	1.326.004.831	92,1	1.375.119.335	92	5.365.491.574	100%	97%	92	13.092.633.246	99%	52%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	24.754.808.971	100	7.667.944.353	100	5.506.237.038	25	1.488.447.289	25	1.173.440.119	25	1.326.004.831	25	1.372.660.835	100	5.360.553.074	100%	97%	100	13.028.497.427	100%	53%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Manguharjo)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	%	100	2.875.032.246	100	882.282.997	100	788.549.877	25	290.446.878	25	155.882.944	25	168.604.288	25	161.704.450	100	776.638.560	100%	98%	100	1.658.921.557	100%	58%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Sogaten)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.586.502.235	100	753.866.438	100	585.752.113	25	130.426.677	25	115.533.201	25	102.312.605	25	199.115.154	100	547.387.637	100%	93%	100	1.301.254.075	100%	50%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Patihan)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.416.966.423	100	694.417.756	100	536.231.883	25	155.455.250	25	93.875.168	25	118.053.402	25	148.428.036	100	515.811.856	100%	96%	100	1.210.229.612	100%	50%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngegong)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.299.617.535	100	694.403.754	100	535.335.300	25	127.246.940	25	124.225.277	25	135.865.483	25	143.413.445	100	530.751.145	100%	99%	100	1.225.154.899	100%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Winongo)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.905.116.377	100	799.077.255	100	550.232.033	25	139.151.963	25	116.350.153	25	144.600.102	25	133.141.894	100	533.244.112	100%	97%	100	1.332.321.367	100%	46%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.790.671.914	100	810.467.253	100	634.453.310	25	162.291.121	25	138.835.645	25	140.381.276	25	180.628.477	100	622.136.519	100%	98%	100	1.432.603.772	100%	51%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mandiun Lor)																											
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pangongangan)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.387.695.609	100	760.270.470	100	537.463.619	25	135.930.141	25	126.026.610	25	123.540.710	25	129.328.437	100	514.825.898	100%	96%	100	1.275.096.368	100%	53%			Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Nambangan Lor)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.451.235.283	100	1.195.326.892	100	713.622.000	25	192.186.406	25	172.841.521	25	197.258.327	25	146.400.341	100	708.686.595	100%	99%	100	1.904.013.487	100%	55%			Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Nambangan Kidul)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.041.971.349	100	1.077.831.538	100	624.596.903	25	155.311.913	25	129.869.600	25	195.388.638	25	130.500.601	100	611.070.752	100%	98%	100	1.688.902.290	100%	56%			Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	258.308.090	100	59.197.319	100	5.000.000	25	1.250.000	25	1.230.000	25	-	25	2.458.500	100	4.938.500	100%	99%	100	64.135.819	100%	25%			
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/pertemuan	Kali	8	258.308.090	0	59.197.319	8	5.000.000	2	1.250.000	2	1.230.000	0	0	4	2.458.500	8	4.938.500	100%	99%	8	64.135.819	100%	25%			Kecamatan Manguharjo
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD</b>	Usulan	32	17.201.415.456	23	4.211.483.800	18	6.930.815.351	0	435.500.400	0	803.837.747	25	825.713.260	0	5.006.335.266	25	7.071.386.673	139%	102%	25	11.282.870.473	78%	66%			
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan</b>	%	100	17.201.415.456	100	4.211.483.800	100	6.930.815.351	25	435.500.400	25	803.837.747	25	825.713.260	25	5.006.335.266	100	7.071.386.673	100%	102%	100	11.282.870.473	100%	66%			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan	%	12	1.168.806.895	64	230.403.850	12	224.908.020	12	220.107.800	0	624.200	0	0	0	0	12	220.732.000	100%	98%	12	451.135.850	100%	39%			Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam musrenbang kota																								
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Manguharjo)	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	1.696.593.200	3	644.593.200	3	708.581.316	0	10.280.700	1	28.301.250	0	0	2	482.366.500	3	520.948.450	100%	74%	6	1.165.541.650	100%	69%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sogaten)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	1.324.746.900	3	398.846.900	3	494.250.800	0	-	2	180.490.000	0	18.000.000	1	556.698.041	3	755.188.041	100%	153%	6	1.154.034.941	100%	87%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Patihan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	972.500.000	3	414.937.000	3	276.590.400	1	19.320.000	1	83.974.400	0	0	1	221.474.000	3	324.768.400	100%	117%	6	739.705.400	100%	76%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Ngegong)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	1.590.433.140	3	366.505.000	3	817.433.140	0	-	2	30.372.455	0	14.900.000	1	907.936.000	3	953.208.455	100%	117%	6	1.319.713.455	100%	83%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Winongo)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	947.088.320	3	409.756.340	3	192.406.905	0	-	2	27.712.500	0	0	1	165.327.900	3	193.040.400	100%	100%	6	602.796.740	100%	64%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mandiun Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	1.451.996.486	3	459.396.486	3	786.952.888	2	103.786.100	0	0	0	0	1	576.914.360	3	680.700.460	100%	86%	6	1.140.096.946	100%	79%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pangongangan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	1.110.182.835	3	369.797.835	3	599.591.492	0	-	2	47.601.000	0	0	1	564.460.000	3	612.061.000	100%	102%	6	981.858.835	100%	88%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Nambangan Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	2.457.541.000	3	692.247.189	3	1.247.541.000	1	77.670.000	1	155.000.000	0	21.250.000	1	1.051.378.000	3	1.305.298.000	100%	105%	6	1.997.545.189	100%	81%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Nambangan Kidul)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	6	635.000.000	3	225.000.000	3	358.375.255	0	-	2	83.900.592	0	0	1	166.213.300	3	250.113.892	100%	70%	6	475.113.892	100%	75%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Manguharjo)	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	348.000.000	0	-	40	108.911.100	8	1.301.000	10	1.600.000	20	93.691.250	2	25.089.950	40	121.682.200	100%	112%	40	121.682.200	100%	35%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Sogaten)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	35	474.100.000	0	0	35	210.551.020	0	-	5	42.483.550	10	32.035.850	20	126.113.800	35	200.633.200	100%	95%	35	200.633.200	100%	42%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Patihan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	30	427.500.000	0	0	30	141.000.000	6	834.800	10	1.904.400	7	77.660.100	7	73.759.265	30	154.158.565	100%	109%	30	154.158.565	100%	36%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Ngegong)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	30	475.000.000	0	0	30	168.347.550	0	-	20	76.996.600	8	87.217.800	2	13.909.300	30	178.123.700	100%	106%	30	178.123.700	100%	37%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Winongo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	452.911.680	0	0	40	115.267.785	8	800.000	10	1.600.000	15	82.477.950	7	17.723.400	40	102.601.350	100%	89%	40	102.601.350	100%	23%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Mandiun Lor)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	424.400.000	0	0	40	129.100.000	0	-	5	30.662.950	30	93.057.940	5	13.776.000	40	137.496.890	100%	107%	40	137.496.890	100%	32%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Pangongangan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	35	429.615.000	0	0	35	125.085.680	0	-	5	9.013.850	25	113.896.850	5	10.999.500	35	133.910.200	100%	107%	35	133.910.200	100%	31%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Nambangan Lor)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	%	30	340.000.000	0	0	30	50.921.000	6	1.400.000	10	1.600.000	35	45.477.000	35	15.535.000	35	64.012.000	117%	126%	35	64.012.000	117%	19%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Nambangan Kidul)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	45	475.000.000	0	0	45	175.000.000	0	-	0	0	35	146.048.520	10	16.660.950	45	162.709.470	100%	93%	45	162.709.470	100%	34%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	3.036.549.115	100	385.270.930	100	611.658.110	25	133.120.250	25	133.551.700	50	130.569.950	0	161.380.500	100	558.622.400	100%	91%	100	943.893.330	100%	31%	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	2.158.825.25	100	103.764.308	100	177.672.450	25	41.120.750	25	80.911.000	25	27.257.500	25	25.057.500	100	174.346.750	100%	98%	100	278.111.058	100%	13%	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Kali	12	2.158.825.25	0	103.764.308	12	177.672.450	3	41.120.750	7	80.911.000	1	27.257.500	1	25.057.500	12	174.346.750	100%	98%	12	278.111.058	100%	13%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Yang ditindak lanjuti	%	100	877.723.590	100	281.506.622	100	433.985.660	25	91.999.500	25	52.640.700	25	103.312.450	25	136.323.000	100	384.275.650	100%	89%	100	665.782.272	100%	76%	
7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Kali	14	877.723.590	0	281.506.622	14	433.985.660	3	91.999.500	5	52.640.700	4	103.312.450	2	136.323.000	14	384.275.650	100%	89%	14	665.782.272	100%	76%	Kecamatan Manguharjo



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Kepolisian Negara Republik Indonesia																											
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	%	100	755.449.767	100	170.912.757	100	107.432.414	25	23.387.950	25	23.037.000	25	34.563.450	25	20.152.500	100	101.140.900	100%	94%	100	272.053.657	100%	36%			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah yang ditindak lanjuti	%	100	755.449.767	100	170.912.757	100	107.432.414	25	23.387.950	25	23.037.000	25	34.563.450	25	20.152.500	100	101.140.900	100%	94%	100	272.053.657	100%	36%			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kali	2	464.774.767	0	98.775.757	2	37.432.414	1	16.662.000	0	0	0,1	14.927.450	0,9	3.000.000	2	34.589.450	100%	92%	2	133.365.207	100%	29%		Kecamatan Manguharjo	
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	%	100	228.387.500	96	57.655.500	100	55.000.000	25	3.400.000	30	20.119.500	20	19.636.000	25	8.400.000	100	51.555.500	100%	94%	100	109.211.000	100%	48%		Kecamatan Manguharjo	
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Doc	4	62.287.500	2	14.481.500	2	15.000.000	0,5	3.325.950	0,5	2.917.500	0	0	1	8.752.500	2	14.995.950	100%	100%	4	29.477.450	100%	47%		Kecamatan Manguharjo	
7	1				<b>KECAMATAN KARTOHARJO</b>																											
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	87,9	211.373.350	86	50.744.668	87,75	7.426.560	0	1.572.500	0	2.500.000	0	0	87,8	2.950.000	88	7.022.500	100%	95%	88	57.767.168	100%	27%			

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					<b>N DAN PELAYANAN PUBLIK</b>																									
7	1	2	2.0	2	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	2.830.176.550	100	744.085.410	100	572.600.020	25	136.309.720	25	158.607.950	25	134.719.528	25	199.677.121	100	629.314.319	100%	110%	100	1.373.399.729	100%	49%	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.830.176.550	100	744.085.410	100	572.600.020	25	136.309.720	25	158.607.950	25	134.719.528	25	199.677.121	100	629.314.319	100%	110%	100	1.373.399.729	100%	49%	Kecamat an Kartoharj o
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Sukosari)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.496.137.690	100	633.508.928	100	488.956.120	25	124.613.358	25	155.560.107	25	103.430.911	25	127.781.603	100	511.385.979	100%	105%	100	1.144.894.907	100%	46%	Kecamat an Kartoharj o
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Klegen)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.149.632.421	100	847.140.926	100	645.224.181	25	140.589.411	25	178.930.381	25	172.046.374	25	204.854.156	100	696.420.322	100%	108%	100	1.543.561.248	100%	49%	Kecamat an Kartoharj o
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Rejomulyo)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.815.245.991	100	646.428.154	100	609.180.235	25	131.499.310	25	121.829.930	25	170.075.674	25	192.078.967	100	615.483.881	100%	101%	100	1.261.912.035	100%	45%	Kecamat an Kartoharj o
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pilangbango)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.604.190.966	100	640.656.164	100	576.868.879	25	126.692.756	25	134.990.234	25	119.712.553	25	206.842.538	100	588.238.081	100%	102%	100	1.228.894.245	100%	47%	Kecamat an Kartoharj o
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pilangbango)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.460.405.000	100	704.667.354	100	533.590.820	25	107.486.361	25	127.928.952	25	108.572.461	25	211.590.501	100	555.578.275	100%	104%	100	1.260.245.629	100%	51%	Kecamat an Kartoharj o

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Kecamatan (Kel. Tawangrejo)																											
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kanigoro)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	2.890.693.570	100	747669487	100	590.609.515	25	131.801.985	25	185.664.813	25	118.191.973	25	287.356.868	100	723.015.639	100%	122%	100	1.470.685.126	100%	51%		Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kartoharjo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	2.729.342.780	100	739.833.001	100	551.052.361	25	109.355.529	25	175.718.314	25	107.249.747	25	193.461.431	100	585.785.021	100%	106%	100	1.325.618.022	100%	49%		Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kelun)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	2.582.106.038	100	683.781.517	100	517.632.605	25	109.983.453	25	167.592.507	25	117.569.831	25	146.162.480	100	541.308.271	100%	105%	100	1.225.089.788	100%	47%		Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	%	100	211.373.350	100	50.744.668	100	7.426.560	0	1.572.500	60	2.500.000	0	0	40	2.950.000	100	7.022.500	100%	95%	100	57.767.168	100%	27%			
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	9	211.373.350	3	50.744.668	3	7.426.560	1	1.572.500	1	2.500.000	0	0	1	2.950.000	3	7.022.500	100%	95%	6	57.767.168	67%	27%		Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	Usulan	18	1.077.868.734	17	246.815.450	18	201.795.330	0	192.186.800	18	0	0	2.552.000	0	16.635.000	18	211.373.800	100%	105%	18	458.189.250	100%	43%			
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.077.868.734	100	246.815.450	100	201.795.330	0	192.186.800	80	0	5	2.552.000	15	16.635.000	100	211.373.800	100%	105%	100	458.189.250	100%	43%			
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	1.077.868.734	100	246.815.450	100	201.795.330	80	192.186.800	0	0	5	2.552.000	15	16.635.000	100	211.373.800	100%	105%	100	458.189.250	100%	43%		Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
					Pembangunan di Kelurahan																										
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.371.704.780	2	338.284.925	2	1.314.564.766	0	0	1	297.500.000	0	550.000	1	551.903.406	2	849.953.406	100%	65%	4	1.188.238.331	100%	87%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sukosari)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.288.993.271	0	249.332.464	2	762.901.204	0	0	1	292.660.683	0	0	1	488.284.654	2	780.945.337	100%	102%	2	1.030.277.801	50%	80%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Klegan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.359.741.400	0	227.509.434	2	988.354.803	0	100.002.703	2	177.414.950	0	0	0	559.777.524	2	837.195.177	100%	85%	2	1.064.704.611	50%	78%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Rejomulyo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.320.192.250	0	261.120.142	2	502.720.000	0	62.218.300	1	92.840.850	0	33.449.850	1	456.652.578	2	645.161.578	100%	128%	2	906.281.720	50%	69%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pilangbango)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.077.172.443	0	332.252.085	2	333.397.029	0	1.000.000	1	48.112.250	0	0	1	346.063.600	2	395.175.850	100%	119%	2	727.427.935	50%	68%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Tawangrejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.053.044.800	0	204.837.367	2	224.050.000	0	-	1	204.869.164	0	0	1	202.537.000	2	407.406.164	100%	182%	2	612.243.531	50%	58%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kanigoro)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.655.636.375	0	397.000.000	2	1.054.088.185	1	200.000.000	0	36.494.375	0	0	1	462.408.140	2	698.902.515	100%	66%	2	1.095.902.515	50%	66%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kartoharjo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.331.270.780	0	280.432.500	2	782.838.646	0	-	0	200.000.000	1	96.642.000	1	485.929.000	2	782.571.000	100%	100%	2	1.063.003.500	50%	80%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kelun)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	4	1.554.877.355	0	297.199.830	2	648.207.291	0	-	1	286.708.555	0	0	1	395.907.622	2	682.616.177	100%	105%	2	979.816.007	50%	63%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	226.414.150	0	0	100	32.213.150	0	0	80	31.791.650	0	0	20	21.210.200	100	53.001.850	100%	165%	100	53.001.850	100%	23%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Sukosari)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	206.622.000	0	0	100	33.110.000	0	0	80	32.669.800	0	0	20	22.795.500	100	55.465.300	100%	168%	100	55.465.300	100%	27%		Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Klegan)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	229.146.600	0	-	100	32.088.600	0	0	0	0	31.668.200	100	19.853.750	100	51.521.950	100%	161%	100	51.521.950	100%	22%		Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Rejomulyo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	341.367.500	0	0	100	148.450.000	0	0	80	96.509.150	0	0	20	20.168.850	100	116.678.000	100%	79%	100	116.678.000	100%	34%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Pilangbango)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	221.430.180	0	0	100	37.533.180	0	0	0	0	50	36.405.900	50	20.334.100	100	56.740.000	100%	151%	100	56.740.000	100%	26%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Tawangrejo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	243.253.895	0	-	100	50.228.895	0	-	0	50	46.147.750	50	19.434.550	100	65.582.300	100%	131%	100	65.582.300	100%	27%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kanigoro)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	256.700.500	0	0	100	48.782.500	0	0	0	50	48.152.500	50	22.259.250	100	70.411.750	100%	144%	100	70.411.750	100%	27%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kartoharjo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	224.416.160	0	0	100	33.181.860	0	-	0	50	31.675.000	50	23.003.650	100	54.678.650	100%	165%	100	54.678.650	100%	24%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kelun)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	231.480.850	0	0	100	42.704.850	0	-	50	42.158.850	0	0	50	19.348.100	100	61.506.950	100%	144%	100	61.506.950	100%	27%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	%	100	1.822.423.455	100	99.167.290	100	585.145.155	40	118.875.300	25	157.772.500	10	133.659.500	25	167.916.000	100	578.223.300	100%	99%	100	677.390.590	100%	37%	
7	1	4	2.0	1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	986.862.980	100	56.829.846	100	351.470.200	25	68.942.600	15	83.876.000	35	105.526.000	35	90.391.000	110	348.735.600	110%	99%	110	405.565.446	110%	41%	
7	1	4	2.0	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Pertemuan	28	986.862.980	6	56.829.846	24	351.470.200	6	68.942.600	3	83.876.000	7	105.526.000	8	90.391.000	100	348.735.600	100%	99%	30	405.565.446	107%	41%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.0	2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	835.560.475	100	42.337.444	100	233.674.955	35	49.932.700	35	73.896.500	15	28.133.500	15	77.525.000	100	229.487.700	100%	98%	100	271.825.144	100%	33%	
7	1	4	2.0	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	14	835.560.475	7	42.337.444	8	233.674.955	3	49.932.700	3	73.896.500	1	28.133.500	1	77.525.000	100	229.487.700	100%	98%	15	271.825.144	107%	33%	Kecamatan Kartoharjo

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
				Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																										
7	1	5		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	%	100	729.543.230	100	100.714.347	100	96.154.150	0	14.278.250	25	11.771.500	25	48.262.100	50	20.828.000	100	95.139.850	100%	99%	100	195.854.197	100%	27%		
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	%	100	729.543.230	100	100.714.347	100	96.154.150	10	14.278.250	30	11.771.500	80	48.262.100	100	20.828.000	100	95.139.850	100%	99%	100	195.854.197	100%	27%		
7	1	5	2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kegiatan	1	256.799.410	1	6.174.576	1	31.968.050	0	0	0	11.771.500	1	18.772.100	0	842.000	1	31.385.600	100%	98%	2	37.560.176	200%	15%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.01	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	%	100	292730460	0	55.537.649	100	56.249.100	25	12.356.250	25	0	50	26.983.000	0	16.490.000	100	55.829.250	100%	99%	100	111.366.899	100%	38%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.01	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Doc	8	180013360	3	39.002.122	2	7.937.000	1	1.922.000	0	0	2	2.507.000	0	3.496.000	2	7.925.000	100%	100%	5	46.927.122	63%	26%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1			KECAMATAN TAMAN																										
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN																														

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	88	26.430.508.946	86	7.050.162.842	88,4	5.813.115.826	0	1.063.680.697	0	1.190.276.026	0	1.377.057.839	88,3	2.021.904.629	88	5.652.919.191	100%	97%	174	12.703.082.033	198%	48%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	26.226.742.236	100	6.991.940.207	100	5.786.912.439	0	1.057.385.697	25	1.183.854.776	25	1.370.636.589	50	2.015.478.379	100	5.627.355.441	100%	97%	100	12.619.295.648	100%	48%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mojorejo)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.045.398.257	100	782.082.969	100	702.356.533	0	108.950.804	50	170.398.704	25	135.298.241	25	271.628.982	100	686.276.731	100%	98%	100	1.468.359.700	100%	48%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pandean)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.037.887.882	100	843.401.798	100	573.232.065	0	112.755.097	39,6	115.286.596	25	185.275.401	35	142.892.577	100	556.209.671	100%	97%	100	1.399.611.469	100%	46%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Banjarejo)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.817.121.283	100	684.540.568	100	551.817.520	0	122.139.840	45	121.499.339	25	141.940.539	30	130.026.252	100	515.605.970	100%	93%	100	1.200.146.538	100%	43%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kuncen)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	1.775.702.108	100	473.199.932	100	518.810.070	0	54.661.277	35,4	59.707.750	25	115.111.897	40	257.961.285	100	487.442.209	100%	94%	100	960.642.141	100%	54%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Manisrejo)	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	3.637.248.214	100	999.605.432	100	748.876.594	0	152.242.562	46	161.553.802	25	221.014.822	29	264.341.809	100	799.152.995	100%	107%	100	1.798.758.427	100%	49%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	2.930.464.825	100	729.470.197	100	725.800.521	0	162.094.824	49,8	124.711.318	25	149.104.508	25	256.297.729	100	692.208.379	100%	95%	100	1.421.678.576	100%	49%	Kecamatan Taman

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kejuron)																											
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Josenan)	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	10 0	2.793.187.5 67	10 0	801.018.29 1	100	538.780.42 6	0	99.139.868	49, 9	148.291.85 4	25	133.870.79 7	25	161.499.23 3	10 0	542.801.75 2	100 %	101 %	10 0	1.343.820.0 43	100 %	48%		Kecamat an Taman	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Demangan)	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	10 0	3.010.891.2 00	10 0	910.317.75 4	100	722.303.77 0	0	136.003.02 6	49, 2	130.577.57 3	25	142.139.17 7	26	303.448.48 3	10 0	712.168.25 9	100 %	99%	10 0	1.622.486.0 13	100 %	54%		Kecamat an Taman	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Taman)	Persentase Terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	10 0	3.178.840.9 00	10 0	768.303.26 6	100	704.934.94 0	0	109.398.39 9	40	151.827.84 0	25	146.881.20 7	35	227.382.02 9	10 0	635.489.47 5	100 %	90%	10 0	1.403.792.7 41	100 %	44%		Kecamat an Taman	
7	1	2	2.0 3		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	10 0	203.766.710	10 0	58.222.635	100	26.203.387	25	6.295.000	25	6.421.250	25	6.421.250	25	6.426.250	10 0	25.563.750	100 %	98%	10 0	83.786.385	100 %	41%			
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	3	203.766.710	0	58.222.635	3	26.203.387	1	6.295.000	1	6.421.250	1	6.421.250	1	6.426.250	4	25.563.750	133 %	98%	4	83.786.385	133 %	41%		Kecamat an Taman	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD</b>	Usulan	18	17.272.575. 118	17	2.573.773. 343	18	9.354.814. 694	0	225.380.35 0	0	1.834.255. 398	0	281.878.15 0	0	6.367.969. 568	0	8.709.483. 466	0%	93%	17	11.283.256. 809	94%	65%			
7	1	3	2.0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	%	10 0	1.231.203.8 48	10 0	224.783.56 1	100	248.343.80 9	10 0	225.380.35 0	0	0	0	0	0	12.469.350	10 0	237.849.70 0	100 %	96%	10 0	462.633.261	100 %	38%			



1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	10 0	1.231.203.848	10 0	224.783.561	100	248.343.809	10 0	225.380.350	0	0	0	0	0	0	12.469.350	10 0	237.849.700	100 %	96%	10 0	462.633.261	100 %	38%	Kecamat an Taman
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10 0	16.041.371.270	10 0	2.348.989.782	100	9.106.470.885	0	518.158.240	25	1.834.255.398	25	281.878.150	50	6.355.500.218	10 0	8.989.792.006	100 %	99%	10 0	11.338.781.788	100 %	71%		
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mojorejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	1.230.000.000	0	0	3	863.812.500	1	62.125.000	1	137.350.348	0	0	1	680.830.701	3	880.306.049	100 %	102 %	3	880.306.049	100 %	72%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pandean)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	879.709.890	0	27.048.100	3	861.117.000	1	314.336.240	1	199.285.000	0	0	1	351.824.446	3	865.445.686	100 %	101 %	3	892.493.786	100 %	101 %	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Banjarejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	847.354.000	3	128.350.000	3	783.090.970	0	0	1	172.035.600	0	35.800	2	621.214.761	3	793.286.161	100 %	101 %	6	921.636.161	100 %	109 %	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kuncen)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	1.020.125.000	0	0	3	810.500.900	0	4.345.350	1	193.270.900	0	400.000	2	502.657.938	3	700.674.188	100 %	86%	3	700.674.188	100 %	69%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Manisrejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	2.037.610.955	3	394.551.000	3	1.080.860.955	1	80.586.000	1	118.214.000	0	0	1	826.040.800	3	1.024.840.800	100 %	95%	6	1.419.391.800	100 %	70%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kejuron)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	893.112.808	3	218.398.250	3	674.714.558	0	0	1	198.992.200	0	0	2	445.217.050	3	644.209.250	100 %	95%	6	862.607.500	100 %	97%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Josenan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	1.664.978.877	3	196.648.272	3	976.892.907	0	49.915.750	1	148.877.250	0	0	2	515.402.990	3	714.195.990	100 %	73%	6	910.844.262	100 %	55%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Demangan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	2.036.303.860	3	207.973.000	3	1.280.775.860	0	0	1	220.300.000	0	0	2	1.274.633.092	3	1.494.933.092	100 %	117 %	6	1.702.906.092	100 %	84%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Taman)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	6	2.385.130.000	3	287.238.000	3	1.076.350.000	0	0	1	353.779.000	0	0	2	757.171.000	3	1.110.950.000	100 %	103 %	6	1.398.188.000	100 %	59%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Mojorejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	10 0	476.687.535	10 0	202.695.925	100	81.658.335	0	0	0	0	25	70.332.000	75	19.114.690	10 0	89.446.690	100 %	110 %	10 0	292.142.615	100 %	61%	Kecamat an Taman	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di	Persentase masyarakat yang berpartisipasi	%	10 0	2.097.611.500	10 0	208.192.650	100	774.031.900	0	0	0	0	55	46.476.500	45	31.980.700	10 0	78.457.200	100 %	109 %	10 0	286.649.850	100 %	73%	Kecamat an Taman	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Kelurahan (Kel. Pandean)	dalam kegiatan pemberdayaan																										
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Banjarejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	228.750.000	0	0	100	74.250.000	0	0	0	0	0	0	100	0	9.378.800	100	82.385.700	100	111	100	82.385.700	100	36%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kuncen)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	118.606.875	0	0	100	38.887.500	0	0	47,5	18.451.100	0	53	29.595.100	100	48.046.200	100	124	100	48.046.200	100	41%	Kecamatan Taman			
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Manisrejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	488.875.750	100	217.288.650	100	140.875.000	0	0	100	73.700.000	0	0	76.674.950	100	150.374.950	100	107	100	367.663.600	100	75%	Kecamatan Taman			
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kejuron)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	407.511.070	100	156.564.600	100	67.081.400	0	0	0	0	4.000.000	100	72.619.250	100	76.619.250	100	114	100	233.183.850	100	57%	Kecamatan Taman			
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Josenan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	478.850.000	100	104.041.335	100	74.250.000	0	0	0	40	29.410.000	60	53.066.400	100	82.476.400	100	111	100	186.517.735	100	39%	Kecamatan Taman			
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Demangan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	228.750.000	0	0	100	74.250.000	0	0	0	100	11.522.950	0	72.107.350	100	83.630.300	100	113	100	83.630.300	100	37%	Kecamatan Taman			
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Taman)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	228.750.000	0	0	100	75.000.000	0	6.849.900	0	60	46.694.000	40	15.970.200	100	69.514.100	100	93%	100	69.514.100	100	30%	Kecamatan Taman			
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	2.280.307.923	100	95.853.575	100	565.609.600	25	12.102.000	25	217.833.265	25	223.068.250	25	96.385.250	100	549.388.765	100	97%	100	645.242.340	100	28%			
7	1	4	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	1.147.934.268	0	0	100	272.419.100	0	0	25	131.983.450	25	97.887.250	25	40.586.750	75	270.457.450	75%	99%	75	270.457.450	75%	24%			
7	1	4	2.0	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	24	1.147.934.268	0	0	24	272.419.100	0	0	5	131.983.450	6	97.887.250	3	40.586.750	14	270.457.450	58%	99%	14	270.457.450	58%	24%	Kecamatan Taman		
7	1	4	2.0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	1.132.373.655	100	95.853.575	100	293.190.500	25	12.102.000	25	85.849.815	25	125.181.000	25	55.798.500	100	278.931.315	100	95%	100	374.784.890	100	33%			
7	1	4	2.0	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	8	1.132.373.655	0	95.853.575	8	293.190.500	0	12.102.000	3	85.849.815	4	125.181.000	3	55.798.500	10	278.931.315	125	95%	10	374.784.890	125	33%	Kecamatan Taman		

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
					Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																											
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	%	100	481.170.346	100	71.479.245	100	89.300.660	25	15.995.200	25	6.640.000	25	32.714.750	25	36.277.700	100	91.627.650	100	103	100	163.106.895	100	34%			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	481.170.346	100	71.479.245	100	89.300.660	25	15.995.200	25	6.640.000	25	32.714.750	25	36.277.700	100	91.627.650	100	103	100	163.106.895	100	34%			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kali	2	280.870.105	1	20.735.406	1	51.989.500	0	7.990.000	0	0	1	24.992.750	1	17.315.750	200	50.298.500	200	97%	3	71.033.906	150	25%	Kecamatan Taman		
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik yang terselesaikan	%	100	142.192.750	100	25.638.913	100	35.348.950	25	6.718.000	25	6.640.000	25	7.068.000	25	13.977.450	100	34.403.450	100	97%	100	60.042.363	100	42%	Kecamatan Taman		
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	Doc	10	58.107.491	2	25.104.926	2	1.962.210	0	1.287.200	0	0	0	654.000	2	4.984.500	100	6.925.700	100	353	4	32.030.626	40%	55%	Kecamatan Taman		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp.		K (%)
	oleh Instansi Vertikal																										
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100 %	98%						
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b>																											
1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana. 2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 3. Jalinan Kerjasama antara Pemerintah (Kec & Kelurahan) dengan masyarakat yang baik menjadikan pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan dengan baik																											
<b>Faktor Penghambat :</b>																											
1. Pekerjaan Fisik baru dilaksanakan setelah TW III hal ini dikarenakan anggaran baru ada setelah pelaksanaan Perubahan Anggaran menjadikan pelaksanaan belum bisa maksimal																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b>																											
1. Perencanaan harus dilakukan dengan baik agar tidak lagi melaksanakan pekerjaan fisik setelah TW III dikarenakan baru ada anggaran pada saat perubahan anggaran.																											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)	K (%)	RP. (%)			
8				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																								
8	1			<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																								
8	1	2		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	1.261.549.441	100	223.335.774	100	429.630.250	0	91.960.000	25	34.397.000	0	24.414.000	75	278.859.250	100	429.630.250	100%	100%	100	652.966.024	100 %	52%
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Orang	600	1.261.549.441	150	223.335.774	150	429.630.250	43	91.960.000	12	34.397.000	15	24.414.000	80	278.859.250	150	429.630.250	100%	100%	300	652.966.024	50%	52%
8	1	2	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi	Jumlah peserta	Orang	600	1.261.549.441	150	223.335.774	150	429.630.250	90	91.960.000	0	34.397.000	0	24.414.000	60	278.859.250	150	429.630.250	100%	109%	300	652.966.024	50%	52%

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)
				Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	sosialisasi dan pelatihan																									Bangsa dan Politik
8	1	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	%	100	4.040.002.410	0	851.145.127	100	1.009.259.170	0	0	50	952.052.350	25	51.196.500	25	5.988.050	100	1.009.236.900	100%	100%	100	1.860.382.027	100%	46%		
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	80	4.040.002.410	0	851.145.127	80	1.009.259.170	0	0	30	952.052.350	25	51.196.500	25	5.988.050	80	1.009.236.900	100%	100%	80	1.860.382.027	100%	46%		
8	1	3	2.013	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	Parpol	11	3.679.304.210	0	720.413.935	11	978.656.030	0	0	11	952.052.350	17	20.613.300	17	5.988.050	17	978.653.700	155%	100%	17	1.699.067.635	155%	46%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	3	2.014	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang	Orang	525	360.698.200	150	130.731.192	125	30.603.140	0	0	0	0	100	30.583.200	0	0	100	30.583.200	80%	100%	250	161.314.392	48%	45%	Badan Kesatuan Bangsa	

1				2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)
				Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	pendidikan politik																									dan Politik
8	1	4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	%	68	866.644.000	50	231.629.040	71	254.712.640	0	0	23	26.120.000	41	141.410.500	7	87.085.500	71	254.616.000	100%	100%	121	486.245.040	178%	56%		
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	%	75	866.644.000	0	231.629.040	75	254.712.640	0	0	25	26.120.000	25	141.410.500	25	87.085.500	75	254.616.000	100%	100%	75	486.245.040	100%	56%		
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	Orang	359	866.644.000	100	231.629.040	109	254.712.640	0	0	25	26.120.000	50	141.410.500	25	87.085.500	100	254.616.000	92%	100%	200	486.245.040	56%	56%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	1.974.495.026	100	508.255.006	100	588.592.232	0	51.197.780	25	88.003.830	25	172.430.000	50	276.775.872	100	588.407.482	100%	100%	200	1.096.662.488	200%	56%	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	Kali	12	1.974.495.026	3	508.255.006	3	588.592.232	0	51.197.780	1	88.003.830	1	172.430.000	1	276.775.872	3	588.407.482	100%	100%	6	1.096.662.488	50%	56%	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	270	103.818.916	170	82.680.556	100	21.138.360	30	10.276.780	30	10.676.830	0	0	0	0	60	20.953.610	60%	99%	230	103.634.166	85%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)
					Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																										
8	1	5	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Orang	160 0	1.870.676.1 10	60 0	425.574.450	200	567.453.872	0	40.921.000	10 0	77.327.00 0	0	172.430.0 00	10 0	276.775.8 72	200	567.453.872	100%	100%	800	993.028.322	50%	53%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Konflik horisontal di dalam masyarakat	Konflik	0	6.047.481.1 00	0	1.400.302.7 25	0	1.697.980.9 90	0	1.231.666.1 00	0	58.800.00 0	0	155.445.0 00	0	191.261.7 50	0	1.637.172.8 50	100%	96%	0	3.037.475.5 75	100 %	50%		
8	1	6	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	Konflik	0	6.047.481.1 00	0	1.400.302.7 25	0	1.697.980.9 90	0	1.231.666.1 00	0	58.800.00 0	0	155.445.0 00	0	191.261.7 50	0	1.637.172.8 50	100%	96%	0	3.037.475.5 75	100 %	50%		
8	1	6	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta rakor	Orang	186 8	6.047.481.1 00	81 3	1.400.302.7 25	105 5	1.697.980.9 90	25 0	1.231.666.1 00	25 0	58.800.00 0	25 0	155.445.0 00	25 0	191.261.7 50	100 0	1.637.172.8 50	95%	96%	181 3	3.037.475.5 75	97%	50%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
<b>Rata - Rata Capaian Kinerja (%)</b>																							99%	99%							
<b>Predikat Kinerja</b>																							Sangat	Sangat							

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x 100%		14=6+12		15=14/5 x 100%		16	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K	Rp. (000)		K (%)
																				Tinggi	Tinggi						
<b>Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :</b> 1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana. 2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan																											
<b>Faktor Penghambat :</b>																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya :</b>																											
<b>Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya :</b> 1. Tahun depan merupakan tahun persiapan pelaksanaan Pemilu serentak, urusan Kesatuan bangsa dan politik yang akan membantu pelaksanaan pemilu diharapkan sudah memiliki gambaran kegiatan dan penganggaran tahun depan serta melakukan koordinasi bersama dengan pihak - pihak yang terkait seperti Polisi, TNI dan KPU sebagai pelaksana pemilu.																											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) PAK	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) PAK	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra PD s/d Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					

2	3	4	5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12											
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	K (%)	RP. (%)												
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Skor	A	2.625.724.955.816	B	462.771.500.566	A	722.438.657.430	0	85.295.289.851	0	171.936.050.475	0	134.859.665.217	BB	154.120.133.002	BB	546.211.138.545	80%	76%	BB	1.008.982.639.111	80%	38%							
1	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB	Skor	181	38.182.386.342	0	5.033.269.455	10	10.341.823.603	0	339.750.480	0	320.431.495	0	3.061.120.770	10	1	831.820.968	10	1	4.553.123.713	100%	44%	10	1	9.586.393.168	56%	25%			
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	178.066.240	1	0	0	36.146.334	10	0	14.138.640	20	0	60	3.371.500	80	1.174.500	30	1.702.910	80	6.248.910	80%	44%	18	0	42.395.244	180%	24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Doc	24	619.533.822	6	55.800.340	6	72.483.016	2	3.444.700	1	14.036.800	1	4.561.900	2	26.954.828	6	48.998.228	100%	68%	12	104.798.568	50%	17%	17		Sekretariat DPRD		
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	Doc	21	2.097.690	7	3.871.492	7	3.519.200	2	3.087.500	2	4.973.750	2	2.784.500	7	796.200	7	11.641.950	100%	92%	14	75.266.442	67%	37%	37		Badan Perencanaan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					Perangkat Daerah	pengendalian dan evaluasi perangkat daerah																							Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doc	52	109.931.658	6	19.049.731	6	3.992.800	2	0	2	199.500	1	1.710.000	1	2.056.550	6	3.966.050	100%	99%	12	23.015.781	23%	21%	Kecamatan Kartoharjo
2	1	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	%	100	31.572.000	100	35.093.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10	35.093.900	100%	111%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	24	29.705.441.571	6	2.968.656.932	6	8.806.764.500	1	23.630.000	1	25.400.000	2	2.885.270.000	2	232.850.400	6	3.167.150.400	100%	36%	12	6.135.807.332	50%	21%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Doc	44	1.169.066.658	11	191.152.657	11	227.308.120	6	25.442.600	10	65.744.540	10	19.340.000	11	95.081.270,00	11	205.608.410	100%	90%	22	396.761.067	50%	34%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	40	185.000.000	20	43.696.159	20	16.673.400	5	4.820.000	11	2.220.000	15	6.520.000	20	3.089.400	20	16.649.400	100%	100%	40	60.345.559	100%	33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doc	48	412.593.560	12	84.645.560	12	101.790.280	4	0	3	51.245.000	0	0	5	49.500.000	12	100.745.000	100%	99%	24	185.390.560	50%	45%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	36	80.000.000	12	9.104.365	12	480.000	3	150.000	3	0	3	0	3	329.500	12	479.500	100%	100%	24	9.583.865	67%	12%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Doc	70	267.633.684	12	122.019.064	12	90.031.480	4	47.330.450	3	9.588.000	3	15.146.100	2	17.851.320	12	89.915.870	100%	100%	32	211.934.934	46%	79%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	24	253.840.000	6	36.645.350	6	123.740.000	3	23.412.150	1	14.184.525	2	11.487.720	2	11.295.700	8	60.380.095	133%	49%	14	97.025.445	58%	38%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
					Realisasi Kinerja SKPD																													Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	36	410.000.000	0	0	20	169.545.500	6	41.069.250	0	12.107.150	6	18.635.000	20	63.743.250	32	135.554.650	160%	80%	32	135.554.650	89%	33%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Doc	24	378.556.000	6	124.099.625	6	75.350.000	2	49.175.200	2	5.099.000	1	14.058.950	1	6.919.600	6	75.252.750	100%	100%	12	199.352.375	50%	53%			Dinas Lingkungan Hidup		
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	%	100	184.613.120	100	58.318.715	100	15.313.000	25	0	0	0	75	0	10	14.796.300	10	14.796.300	100%	97%	10	73.115.015	100%	40%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	12	272.217.376	6	127.974.633	6	75.455.040	3	28.448.560	3	12.838.160	5	14.338.900	6	17.148.230	6	72.773.850	100%	96%	12	200.748.483	100%	74%			Dinas Perhubungan		
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	40	460.000.000	20	113.356.001	20	3.670.640	2	0	2	136.500	2	0	3	3.492.900	9	3.629.400	45%	99%	29	116.985.401	73%	25%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	24	216.370.000	6	43.508.600	6	16.486.320	1	10.496.320	2	2.040.650	1	1.690.650	6	1.258.700	6	15.486.320	100%	94%	12	58.994.920	50%	27%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	44	197.700.000	10	29.694.500	10	53.700.000	4	0	2	0	2	26.418.000	2	27.156.500	10	53.574.500	100%	100%	20	83.269.000	45%	42%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Doc	24	184.377.580	20	75.171.566	6	875.250	3	0	1	0	0	0	2	860.000	6	860.000	100%	98%	26	76.031.566	108%	41%			Dinas Perdagangan		
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	24	170.000.000	6	28.422.100	6	30.000.000	2	9.840.750	2	9.600.000	0	10.060.000	0	350.000	4	29.850.750	67%	100%	10	58.272.850	42%	34%			Dinas Kebudayaan Pariwisata		

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perangkat daerah																								a Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	Doc	24	37.417.000	6	7.176.310	6	998.400	0	0	6	998.400	0	0	0	0	6	998.400	100%	100%	12	8.174.710	50%	22%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Doc	24	85.000.000	0	0	6	15.000.000	1	3.021.300	3	1.885.000	1	4.019.750	1	6.006.250	6	14.932.300	100%	100%	6	14.932.300	25%	18%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	155.692.800	100	34.714.724	100	1.000.000	33	0	0	0	0	0	67	763.400	100	76%	100	35.478.124	100%	23%	Bagian Hukum		
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	48	151.761.000	21	23.252.000	21	11.553.300	5	0	6	0	5	8.684.500	3	2.825.500	19	11.510.000	90%	100%	40	34.762.000	83%	23%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	48	86.000.000	21	16.915.637	21	20.000.000	2	4.230.000	4	0	2	2.533.000	19	0	19	6.763.000	90%	34%	40	23.678.637	83%	28%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	300.016.000	100	92.419.158	100	705.600	0	0	0	0	0	0	100	705.600	100	100%	100	93.124.758	100%	31%	Bagian Umum		
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	36	33.151.800	12	10.318.000	12	10.665.600	3	1.946.250	3	2.625.750	3	2.657.000	12	2.426.000	12	9.655.000	100%	91%	24	19.973.000	67%	60%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	32	48.064.000	8	14.918.400	8	2.000.000	4	0	1	599.400	2	420.900	1	288.900	8	1.309.200	100%	65%	16	16.227.600	50%	34%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	80	43.242.000	14	3.255.900	20	5.000.000	0	0	2	1.134.900	0	1.413.500	4	931.400	4	3.479.800	20%	70%	18	6.735.700	23%	16%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	20	89.821.556	5	60.691.156	6	6.000.000	2	0	3	0	1	0	5	5.037.000	5	5.037.000	83%	84%	10	65.728.156	50%	73%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Doc	40	169357030	10	105.811.085	10	1.527.030	1	1.000.000	0	0	0	0	10	526.200	11	1.526.200	110%	100%	21	107.337.285	53%	63%	Inspektoral Daerah
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Doc	20	147.400.000	6	30.700.000	12	30.600.000	0	0	3	0	0	0	9	30.598.860	12	30.598.860	100%	100%	18	61.298.860	90%	42%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Doc	40	128.568.000	20	56.199.319	20	15.000.000	1	782.250	10	1.404.000	7	1.435.200	2	7.634.000	20	11.255.450	100%	75%	40	67.454.769	100%	52%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Doc	24	26.955.000	12	19.704.439	12	7.027.000	3	0	3	1.560.000	3	1.811.000	3	3.544.000	12	6.915.000	100%	98%	24	26.619.439	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo

2					3	4	5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
					Realisasi Kinerja SKPD																									
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Doc	24	137.755.067	20	55.444.217	12	5.183.387	0	0	4	2.466.050	4	1.999.700	4	0	12	4.465.750	100%	86%	32	59.909.967	133%	43%	Kecamatan Taman
2	1	2	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	%	100	801.324.620	100	207.164.650	100	293.611.000	25	58.165.000	50	74.972.920	75	1.100.000	100	189.886.300	100	324.124.220	100%	110%	100	531.288.870	100%	66%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Doc	6	30.556.800	2	9.827.206	2	1.425.600		0	1	0	0	0	2	1.424.000	2	1.424.000	100%	100%	4	11.251.206	67%	37%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Doc	4	22.852.800	2	18.576.630	2	4.109.500	2	258.200	0	0	0	1.850.000	0	1.990.000	2	4.098.200	100%	100%	4	22.674.830	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks RB	Skor	181	1.723.418.138.249	0	345.865.978.346	101,0	470.457.929.977	0	49.334.737.286	0	118.222.094.954	0	103.631.649.767	101	92.729.567.627	101	363.918.049.634	100%	77%	101	709.784.027.980	56%	41%	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	748.097.286.306	100	163.805.860.371	100	182.168.664.500	25	19.956.053.364	25	44.292.322.156	25	41.948.172.051	25	33.883.310.040	100	140.079.857.611	100%	77%	100	303.885.717.982	100%	41%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	124.790.708.471	100	31.200.061.180	100	43.253.539.098	25	4.639.656.615	45	11.882.829.910	75	10.805.886.806	100	8.453.636.842	100	35.782.010.173	100%	83%	100	66.982.071.353	100%	54%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	98.090.815.219	100	8.540.790.683	100	26.695.251.250	25	2.757.325.425	25	4.655.855.381	25	4.755.845.608		3.268.033.536	75	15.437.059.950	75%	58%	175	23.977.850.633	175%	24%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	27.388.701.620	100	5.128.050.000	100	8.466.667.900	100	776.547.468	100	2.224.476.368	100	1.752.471.769	25	2.091.232.170	100	6.844.727.775	100%	81%	200	11.972.777.775	200%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2					3			4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	23.177.194.000	100	3.890.951.585	100	7.634.440.320	25	562.692.622	50	1.543.903.809	75	1.226.414.306	100	1.451.319.955	100	4.784.330.692	100	63%	100	8.675.282.277	100	37%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	12.744.543.989	100	5.025.895.989	100	8.249.600.000	100	833.529.681	100	2.292.727.147	100	1.793.285.578	100	1.962.559.773	100	6.882.102.179	100	83%	100	11.907.998.168	100	93%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	5.192.675.000	100	1.040.368.819	100	1.610.800.000	25	173.842.122	25	494.223.323	25	425.796.948	25	339.565.174	100	1.433.427.567	100	89%	200	2.473.796.386	200	48%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	21.330.107.895	100	3.825.211.409	100	5.498.553.305	14	618.676.395	38,59	1.681.622.173	23	1.290.489.483	24	1.249.111.372	100	4.839.899.423	100	88%	100	8.665.110.832	100	41%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	%	100	17.319.271.280	100	3.397.422.906	100	5.034.610.640	25	500.532.821	29	1.498.844.251	25	1.212.829.920	21	1.305.987.476	100	4.518.194.468	100	90%	100	7.915.617.374	100	46%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	17.477.248.000	100	3.299.420.765	100	4.435.212.000	29	480.892.076	51	1.341.368.728	62	1.039.578.219	100	1.209.616.616	100	4.071.455.639	100	92%	100	7.370.876.404	100	42%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	36.487.447.671	100	8.739.548.813	100	10.312.341.430	100	1.351.854.985	0	3.297.595.938	0	2.620.760.214	0	2.734.733.618	100	10.004.944.755	100	97%	100	18.744.493.568	100	51%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	15.339.320.678	100	2.844.970.134	100	3.842.533.540	25	420.120.941	50	1.184.597.989	78,6	958.358.220	100	1.080.217.663	100	3.643.294.813	100	95%	100	6.488.264.947	100	42%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	20.553.616.723	100	5.065.045.631	100	7.237.598.928	9	795.543.890	50	2.078.384.871	80	1.628.793.012	100	1.792.228.513	100	6.294.950.286	100	87%	100	11.359.995.917	100	55%	Dinas Perhubungan	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	15.743.141.000	100	3.656.365.054	100	5.446.382.124	25	560.586.343	25	1.564.020.105	25	1.354.103.514	25	1.316.883.800	100	4.795.593.762	100	88%	100	8.451.958.816	100	54%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	16.604.773.600	100	2.472.671.448	100	4.714.847.900	10	439.581.224	34	1.195.079.383	25	923.421.068	31	1.007.772.879	100	3.565.854.554	100	76%	100	6.038.526.002	100	36%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
																														Terpadu Satu Pintu	
2	2	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	13.203.685.623	100	2.502.062.633	100	3.746.911.069	13	386.280.821	40	1.107.228.331	17	1.226.414.306	30	957417097	100	3.677.340.555	100	98%	100	6.179.403.188	100	47%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	3	0	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	32.451.577.308	100	6.675.708.156	100	9.429.904.240	25	1.077.769.834	25	2.701.200.055	25	2.168.422.468	25	2.297.243.901	100	8.244.636.258	100	87%	100	14.920.344.414	100	46%	Dinas Perdagangan
2	2	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	14.478.302.783	100	2.866.786.967	100	4.189.865.460	25	454.703.835	30	1.352.067.697		1.053.676.872		910.515.052	55	3.770.963.456	55	90%	155	6.637.750.423	155	46%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	2.252.067.127	100	428.974.047	100	824.778.080	25	28.982.595	50	244.683.703	0	166.771.381	25	276.058.146	100	716.495.825	100	87%	100	1.145.469.872	100	51%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.805.092.000	100	373.628.008	100	792.010.500	100	27.838.045	100	251.981.437	100	162.432.511	100	256.184.124	100	698.436.117	100	88%	100	1.072.064.125	100	59%	Bagian Organisasi
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.789.320.000	100	742.718.993	100	1.225.988.000	100	28.758.106	100	275.860.361	100	335.110.569	100	410.049.724	100	1.049.778.760	100	86%	100	1.792.497.753	100	37%	Bagian Hukum
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.644.434.500	100	847.847.078	100	1.578.038.054	2	34.110.434	30	628.825.060	30	346.165.652	38	447.871.002	100	1.456.972.148	100	92%	100	2.304.819.226	100	50%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	2.352.924.150	100	492.627.334	100	1.025.442.780	25	37.578.131	20	349.887.690	25	213.798.172	88	305.918.377	88	907.182.370	88	88%	88	1.399.809.704	88	59%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	43.224.418.767	100	8.552.680.585	100	12.528.735.102	25	1.508.920.461	25	3.055.548.371	25	2.646.051.397	25	2023868724	100	9.234.388.953	100	74%	100	17.787.069.538	100	41%	Bagian Umum
4	2	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	%	100	10.212.589.623	100	2.205.785.435	100	3.286.915.686	25	334.321.837	25	993.620.425	25	751.020.341	25	743.991.970	100	2.822.954.573	100	86%	100	5.028.740.008	100	49%	Sekretariat DPRD
5	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah	%	100	16.652.850.000	100	4.729.537.278	100	6.659.580.685	25	514.079.218	25	1.493.565.567	25	1.348.431.600	100	1.046.591.867	175	4.402.668.252	175	66%	175	9.132.205.530	175	55%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12000	144.305.437.092	0	18.590.596.888	3000	36.907.540.046	3000	2.719.615.886	3000	6.456.806.528	3000	5.037.616.613	2875	4.964.942.788	3000	19.178.981.815	100%	52%	3000	37.769.578.703	25%	26%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	126	39.157.530.000	0	6.613.222.481	31	9.554.783.000	31	1.426.084.271	31	1.908.427.540	0	1.583.650.589	31	2.789.525.000	31	7.707.687.400	100%	81%	31	14.320.909.881	25%	37%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	168	21.454.626.896	41	4.005.701.501	45	5.801.079.975	42	671.353.034	42	1.770.688.460	42	1.372.185.295	43	1.292.077.455	43	5.106.304.244	96%	88%	84	9.112.005.745	50%	42%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	32.064.281.990	100	6.498.868.136	100	8.447.400.524	25	780.285.739	28,5	2.217.147.710	26	2.189.708.113	20	1.979.962.950	100	7.167.104.512	100%	85%	100	13.665.972.648	100%	43%	Inspektoral Daerah
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	15.062.299.047	100	2.674.761.791	100	3.888.556.234	25	423.917.892	25	1.153.198.398	25	857.344.094	25	739.351.614	100	3.173.811.998	100%	82%	100	5.848.573.789	100%	39%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	39.728.234.320	100	8.940.378.493	100	12.325.792.383	25	1.352.674.497	25	3.721.922.919	20	2.776.553.778	30	2.487.526.716	100	10.338.677.910	100%	84%	100	19.279.056.403	100%	49%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	39.659.832.822	100	7.979.189.527	100	11.065.196.370	25	1.270.959.549	25	3.565.775.554	25	2.796.294.646	25	3.079.884.147	100	10.712.913.896	100%	97%	100	18.692.103.423	100%	47%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	%	100	44.634.629.742	100	8.030.246.192	100	12.406.038.104	25	1.348.079.129	25	3.710.997.766	25	2.845.695.954	25	2.502.407.546	100	10.407.180.395	100%	84%	100	18.437.426.587	100%	41%	Kecamatan Taman
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	52	244.000.000	13	60.687.600	13	61.000.000	3	23.921.900	6	15.144.000	9	9.215.000	13	12.420.800	13	60.701.700	100%	100%	26	121.389.300	50%	50%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	39	297.073.007	0	-	13	94.575.750	3	13.397.000	6	18.678.350	0	7.635.900	4	49.776.000	13	89.487.250	100%	95%	13	89.487.250	33%	30%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	39	389.775.000	13	117.422.736	13	12.755.000	3	2.677.600	0	0	2	1.247.800	13	7.785.600	18	11.711.000	138%	92%	31	129.133.736	79%	33%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah



2					3		4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	26	8.305.000	13	1.911.700	13	2.000.000	3	491.700	4	491.700	0	0	6	983.400	13	1.966.800	100%	98%	26	3.878.500	100%	47%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	52	8.000.000	13	2.000.000	13	2.000.000	3	499.800	3	495.800	3	0	4	1.004.200	13	1.999.800	100%	100%	26	3.999.800	50%	50%	Kecamatan Kartoharjo
1	4	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>38.215.724.160</b>	<b>100</b>	<b>2.451.915.883</b>	<b>100</b>	<b>8.693.997.348</b>	<b>15</b>	<b>359.394.150</b>	<b>50</b>	<b>1.405.246.197</b>	<b>75</b>	<b>1.171.136.495</b>	<b>100</b>	<b>5.443.983.317</b>	<b>100</b>	<b>8.379.760.159</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>100</b>	<b>10.831.676.042</b>	<b>100%</b>	<b>28%</b>	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	480.160.000	100	104.089.600	100	127.860.000	0	0	100	115.520.475	0	0	0	9.600.000	100	125.120.475	100%	98%	100	229.210.075	100%	48%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	100	1.742.636.800	100	355.361.800	100	579.916.000	0	0	95	468.971.800	0	500.000	100	57.480.000	100	526.951.800	100%	91%	100	882.313.600	100%	51%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (perhitungan = realisasi/target kebutuhan)	%	100	649.284.290	100	207.494.750	100	134.820.000	50	67.807.000	50	55.268.400	0	327.500	0	11.169.950	100	134.572.850	100%	100%	100	342.067.600	100%	53%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%	100	744.750.000	100	218.924.100	100	123.515.000	25	33.538.500	100	88.728.750	0	0	0	0	100	122.267.250	100%	99%	100	341.191.350	100%	46%	Dinas Perhubungan
3	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	551.214.450	0	0	100	173.699.000	0	0	0	0	100	169.392.660	100	466.000	100	169.858.660	100%	98%	100	169.858.660	100%	31%	Dinas Perdagangan
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	26.658.933.090	100	314.316.008	100	4.887.255.049	0	7.447.250	0	50.994.500	50	151.085.210	50	4506191915	100	4.715.718.875	100%	96%	100	5.030.034.883	100%	19%	Bagian Umum
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut	%	100	119.999.880	100	27.162.500	100	29.700.000	0	-	50	28.530.000	0	0	50	15.200.000	100	43.730.000	100%	147%	100	70.892.500	100%	59%	Sekretariat DPRD

2					3		4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K
							Kelengkapannya																							
2	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase peningkatan kapasitas pegawai	%	100	331.000.000	0	0	100	76.350.000	60	40.518.100	0	33.781.300	0	336.000	40	1.550.000	100	100	100	100	100	100	100	23%	Dinas Lingkungan Hidup
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	%	100	530.804.871	100	0	100	158.851.900	25	84.810.000	25	74.636.500	25	1.913.000	100	222.307.350	175	99%	175	99%	175	102%	102%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang memahami	%	100	549.120.000	100	0	100	2.686.500	10	12.600.000	0	0	10	6.000.000	100	86.893.152	120	67%	220	67%	220	20%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	40.000.000	100	0	100	9.673.300	25	2.960.000	30	0	55	3.237.500	100	3.211.400	100	94%	100	94%	100	48%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	114.858.802	100	0	100	20.753.500	10	3.500.000	11	4.000.000	0	3.960.000	79	24.310.750	100	100	100	100	100	49%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	Orang	300	400.000.000	0	0	100	49.964.100	0	-	25	49.765.000	20	-	55	39.300.000	100	178	100	178	33%	22%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	100	685.899.540	100	0	100	130.100.000	25	11.800.000	50	133.803.622	75	25.554.000	100	147.879.500	100	99%	100	99%	100	65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	%	100	397.461.000	100	0	100	99.591.000	80	81.519.000	100	12.040.000	100	470.500	100	67.513.000	100	98%	100	98%	100	66%	Dinas Perhubungan		
2	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Paket	1	4.076.226.000	0	0	100	783.120.000	1	1.390.537.900	1	282.948.500	1	799.440.125	1	240.055.750	100	95%	1	95%	1	52%	Dinas Komunikasi dan Informatika		
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	8.025.592	100	0	100	1.377.400	25	58.000	25	0	0	0	1.596.600	100	1.654.600	100	83%	100	83%	38%	Sekretariat DPRD		

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase peserta yang paham	%	100	29.898.000	100	7.136.850	100	7.200.000	23	1.633.800	30	2.161.350	0	0	47	3.325.950	100	99%	100	14.257.950	100	48%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	%	100	42.676.155	100	3.864.500	100	12.936.720	63	3.000.000	37	4.096.000	0	0	0	5.785.000	100	100%	100	16.745.500	100	39%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	%	100	62.775.690	100	7.412.175	100	18.151.972	40	8.202.500	0	0	60	8.920.000	0	147.000	100	95%	100	24.681.675	100	39%	Kecamatan Taman
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks RB	Skor	181	85.254.772.068	0	17.806.676.611	101,0	21.797.388.692	0	3.457.720.981	0	4.197.468.501	0	4.584.115.397	101	9.041.580.897	101	98%	101	39.087.562.387	56%	46%	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100	725.000.000	100	249.451.880	100	277.769.980	0	6.729.000	0	12.962.500	50	195.966.000	50	35.390.500	100	90%	100	500.499.880	100	69%	Bagian Umum
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	25.476.529.892	100	3.103.290.663	100	3.775.782.000	0	632.693.270	50	801.050.121	75	806.163.360	100	1.380.814.862	100	96%	100	6.724.012.276	100	26%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	8.439.181.992	100	2.801.976.464	100	1.740.949.830	100	211.671.407	100	322.575.911	100	398.770.774	100	689.062.411	100	93%	100	4.424.056.967	100	52%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	2.982.673.000	100	809.638.837	100	393.435.520	25	70.437.137	25	100.126.062	25	96.277.408	25	153.056.958	100	107%	100	1.229.536.402	100	41%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	3.005.468.348	100	986.697.526	100	1.016.260.000	25	222.862.395	50	172.980.411	75	151.949.010	100	415.342.270	100	95%	100	1.949.831.612	100	65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perengkapan kantor	%	100	1.867.132.320	100	954.744.524	100	683.044.000	15	93.166.984	48	200.298.995	68	167.305.090	100	174.567.438	100	93%	100	1.590.083.031	100	85%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan	%	100	1.741.872.760	0	667.701.503	100	347.095.136	0	57.863.400	25	50.356.050	60	107.464.050	15	129.544.850	100	99%	100	1.012.929.853	100	58%	Inspektur at Daerah

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
						kantor yang representatif																								
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	%	100	2.660.906.502	100	621.522.123	100	453.207.193	10	81.023.000	25	92.830.500	25	96.261.750	40	163.564.075	100	433.679.325	100%	96%	100	1.055.201.448	100%	40%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	4.581.399.632	100	1.374.197.980	100	881.074.042	15	155.476.938	25	227.410.225	35	231.145.079	25	201.417.177	100	815.449.419	100%	93%	100	2.189.647.399	100%	48%	Kecamatan Taman
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	1.119.555.300	100	259.638.777	100	480.550.000	25	65.483.300	50	68.292.700	75	74.695.954	100	190.236.122	100	398.708.076	100%	83%	100	658.346.853	100%	59%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>							<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>							
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	1.967.107.824	100	403.462.703	100	653.440.000	100	34.973.500	100	71.548.225	100	246.222.635	100	384.958.312	100	737.702.672	100%	113%	100	1.141.165.375	100%	58%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	120	1.002.444.000	60	202.606.550	60	240.000.000	15	48.053.700	65	66.082.562	85	65.593.809	25	95.474.564	85	275.204.635	142%	115%	145	477.811.185	121%	48%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	735.520.000	100	183.779.237	100	382.362.950	20	34.598.930	48	55.099.117	70	83.476.178	100	89.413.785	100	262.588.010	100%	69%	100	446.367.247	100%	61%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	%	100	674.355.100	100	149.355.100	100	200.585.000	25	72.224.800	22	21.996.400	25	5.403.000	28	99.737.800	100	199.362.000	100%	99%	100	348.717.100	100%	52%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	260.000.000	100	64.987.895	100	120.000.000	25	38.809.105	25	3.755.000	25	13.727.045	25	103.702.300	100	159.993.450	100%	133%	200	224.981.345	200%	87%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	1.001.942.000	100	219.585.883	100	194.901.000	24	29.307.000	23,74	46.266.800	24	98.538.264	29	19.691.860	100	193.803.924	100%	99%	100	413.389.807	100%	41%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	927.190.000	100	152.349.400	100	256.578.000	25	35.606.188	25	78.369.500	25	86.688.030	25	103.882.349	100	304.546.067	100%	119%	100	456.895.467	100%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	904.742.000	100	133.993.500	100	200.029.000	26	27.321.000	36	43.944.500	76	80.046.434	100	48.672.300	100%	100%	100	333.977.734	100%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	766.483.000	100	144.284.800	100	359.863.000	16	34.304.400	24	34.090.100	75	34.058.300	100	260.323.300	100%	101%	100	507.060.900	100%	66%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	539.263.000	100	157.467.930	100	184.321.000	25	24.707.900	50	32.441.575	75	33.767.540	100	93.101.250	100%	100%	100	341.486.195	100%	63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	984.666.000	100	199.890.000	100	246.558.000	8	93.475.000	50	17.221.000	80	39.725.600	100	95.991.977	100%	100%	100	446.303.577	100%	45%	Dinas Perhubungan		
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	816.447.000	100	90.720.825	100	300.000.000	25	0	25	47.657.330	25	82.391.199	25	206.658.573	100	336.707.102	100%	112%	100	427.427.927	100%	52%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	850.000.000	100	128.013.954	100	250.776.000	31	62.346.000	50	37.196.609	75	52.281.362	100	97.525.361	100%	99%	100	377.363.286	100%	44%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	321.000.000	0	65.186.830	100	133.800.000	18,9	15.088.000	47	34.180.500	19	21.994.350	15	61.068.500	100	132.331.350	100%	99%	100	197.518.180	100%	62%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	764.118.400	100	333.819.865	100	405.330.800	43	150.140.050	17	14.394.270	27	50.127.476	13	177.756.960	100	392.418.756	100%	97%	100	726.238.621	100%	95%	Dinas Perdagangan

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
2	2	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	1.198.800.00 0	1 0 0	149.079.400	10 0	299.700.000	0	29.806.000	30	88.066.00 0	100.830.460	130.879.700	30	349.582.1 60	30%	117 %	13 0	498.661.56 0	130 %	42%	Dinas Kebudaya an Pariwisat a Kepemud aan dan Olah Raga		
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	%	100	696.971.896	1 0 0	96.971.896	10 0	200.000.000	25	12.491.500	50	48.354.10 0	0	37.364.200	26	101.790.200	10 1	200.000.0 00	101 %	100 %	10 0	296.971.89 6	100 %	43%	Bagian Pemerint ahan
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitun gan = realisasi/targe t perjalanan dinas)	%	100	831.680.280	1 0 0	73.103.388	10 0	167.326.280	25	25.874.500	25	20.622.50 0	25	47.748.540	25	87.950.823	10 0	182.196.3 63	100 %	109 %	10 0	255.299.75 1	100 %	31%	Bagian Organisas i
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	520.000.000	1 0 0	69.180.802	10 0	130.000.000	16	20.387.683	21	27.649.93 8	29	37.837.146	34	84.125.230	10 0	169.999.9 97	100 %	131 %	10 0	239.180.79 9	100 %	46%	Bagian Hukum
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	406.221.950	1 0 0	95.792.498	10 0	183.194.000	5	14.384.500	30	58.611.56 4	30	24.610.000	35	83.494.463	10 0	181.100.5 27	100 %	99%	10 0	276.893.02 5	100 %	68%	Bagian Pengadaa n Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	774.000.000	1 0 0	174979900	10 0	240.000.000	20	44.060.000	40	26.422.50 0	10	48.466.800	30	85.746.900	10 0	204.696.2 00	100 %	85%	10 0	379.676.10 0	100 %	49%	Bagian Perekono mian dan Kesejaht eraan Rakyat
4	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitun gan = realisasi/targe t perjalanan dinas)	%	100	6.822.725.80 0	1 0 0	745.086.868	10 0	2.552.562.4 00	20	267.912.016	90	545.652.0 67	0	150.946.629	10	1.287.780.1 98	90	2.252.290 .910	90%	88%	90	2.997.377. 778	90%	44%	Bagian Umum
4	2	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	%	100	2.955.288.86 2	1 0 0	715.108.466	10 0	978.816.000	24	257.322.677	35	294.629.5 40	6	277.037.576	35	467.970.116	10 0	1.296.959 .909	100 %	133 %	10 0	2.012.068. 375	100 %	68%	Sekretari at DPRD
5	1	1	2.	9	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	1.367.802.00 0	1 0 0	403.976.600	10 0	862.874.000	25	121.812.300	25	93.521.00 0	25	193.970.739	10 0	254.826.342	17 5	664.130.3 81	175 %	77%	17 5	1.068.106. 981	175 %	78%	Badan Perencan aan Penelitian dan Pengemb angan Daerah

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	120.000.000	0	196.065.511	77	450.000.000	22	187.126.276	4	11.690.471	0	0	77	245.188.475	77	444.005.222	100%	99%	77	640.070.733	37%	533%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	45	207.050.000	0	40.812.677	15	75.000.000	4	6.094.000	4	16.538.792	0	7.115.170	15	70.169.360	15	99.917.322	100%	133%	15	140.729.999	33%	68%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.187.913.119		146	221.763.119	80	340.470.000	10	25.911.000	37	136.824.200	58	107.115.080	80	69.632.206	80	339.482.486	100%	100%	226	561.245.605	#DIV/0!	47%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	913.024.490	0	97.672.389	100	567.988.561	30	61.178.290	10	124.052.875	25	92.277.730	35	290.466.775	100	567.975.670	100%	100%	100	665.648.059	100%	73%	Inspektoraat Daerah
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	689.000.000	100	38.945.438	100	200.000.000	20	9.967.000	25	18.477.350	25	21.520.880	30	100.030.073	100	149.995.303	100%	75%	100	188.940.741	100%	27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	571.968.000	100	77.544.965	100	168.915.000	25	33.941.950	20	14.522.000	45	71.880.560	10	50.914.500	100	171.259.010	100%	101%	100	248.803.975	100%	43%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	558.661.000	100	134.334.345	100	124.596.000	20	30.342.750	30	11.465.100	20	27.332.890	30	118.245.000	100	187.385.740	100%	150%	100	321.720.085	100%	58%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	318.666.601	100	17.893.600	100	78.234.000	20	10.746.135	15	7.241.541	25	18.021.300	40	41.414.682	100	77.423.658	100%	99%	100	95.317.258	100%	30%	Kecamatan Taman
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	%	100	67.670.531.491	100	8.105.551.608	100	33.387.249.806	0	1.356.852.500	50	9.524.097.879	0	370.603.590	50	18.544.182.947	100	29.795.736.916	100%	89%	200	37.901.288.524	200%	56%	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	%	100	8.037.487.500	0	-	100	1.968.346.060	13	184.898.400	100	1.166.257.000	0	0	100	2.397.178.600	100	3.748.334.000	100%	190%	100	3.748.334.000	100%	47%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	%	100	2.673.000	0	-	100	31.244.835	0	-	0	0	-	100	31.000.000	100	99%	100	31.000.000	100	1160%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	%	100	40.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Bagian Perumahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	%	100	10.364.550.000	0	0	100	19.943.102.000	0	16	7.131.300.000	59	1.250.000	25	12.246.400.000	100	97%	100	19.378.950.000	100	187%	Bagian Umum	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	%	100	18.077.000	0	-	100	187.177.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	%	100	215.369.000	0	0	100	184.602.000	50	91.470.000	0	0	0	50	91.490.000	100	99%	100	182.960.000	100	85%	Inspektoral Daerah	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	Unit	12	715.200	0	0	11	357.600	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Taman	
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	6	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100	731.927.910	0	-	100	424.281.000	0	0	0	0	100	182.803.500	100	43%	100	182.803.500	100	25%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100	656.632.000	0	0	100	16.632.000	78	13.070.000	22	0	0	0	100	13.070.000	100	79%	100	13.070.000	100	2%	Kecamatan Manguharjo
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	914.561.620	10	557.568.055	100	812.349.100	0	0	0	0	100	256.462.000	100	32%	100	814.030.055	100	89%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi		



2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
																															Usaha Kecil Dan Menengah
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	%	100	114.005.250	100	112.842.000	100	1.163.250	100	975.000	0	0	0	0	0	0	100	975.000	100	84%	100	113.817.000	100	100	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	%	100	227.622.000	100	140.271.000	100	6.500.000	0	0	100	6.451.875	0	0	0	0	100	6.451.875	100	99%	100	146.722.875	100	64%	Bagian Hukum	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	%	100	50.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%	0	0	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	%	100	709.665.790	100	375.802.690	100	217.877.700	75	83.534.000	0	0	0	25	288.756.800	100	372.290.800	100	171%	100	748.093.490	100	105	Bagian Umum		
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi	Jenis	9	1.198.521.000	0	0	2	1.186.775.138	2	445.818.000	0	0	0	0	282.240.000	2	728.058.000	100	61%	2	728.058.000	22%	61%	Inspektoral Daerah		
2	2	3	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan gedung kantor	%	100	4.000.000.000	0	0	100	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif	%	100	425.000.000	0	0	100	122.999.800	0	-	5	117.338.000	0	50	4.400.000	55	121.738.000	55%	99%	55	121.738.000	55%	29%	Kecamatan Manguharjo		
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	%	100	935.650.000	100	328.173.636	100	198.600.000	0	0	0	5	6.715.000	95	15.344.500	100	22.059.500	100	11%	100	350.233.136	100	37%	Kecamatan Kartoharjo		
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	Jenis	7	482.139.785	2	99.888.381	5	445.041.866	0	0	5	88.300.000	0	2	3.050.000	7	91.350.000							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%							0	-					0	-								Dinas Pendidikan		
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	358.834.050	0	-	100	329.339.477	86	157.738.500	100	21.684.000	0	0	100	138.225.000	100	317.647.500	100	96%	100	317.647.500	100	89%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jenis	4	768.839.000	1	11.779.980	1	419.990.000	0	0	0	4.965.000	0	1	0	1	198.625.229	100	47%	2	613.464.229	50%	80%	Satuan Polisi Pamong		

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
							Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																										Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	210.000.000	100	51.780.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	6	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	944.277.823	100	385.457.911	100	496.876.408	0	-	8	23.365.000	2	23.660.000	90	338.904.800	100	385.929.800	100	78%	100	771.387.711	100	82%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	9	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	408.501.000	100	96.220.000	100	118.905.000	0	0	0	5.241.000	0	0	100	101.172.250	100	106.413.250	100	89%	100	202.633.250	100	50%		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
2	12	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	1.310.835.523	100	1.080.072.020	100	818.010.000	50	9.295.000	83,3	416.817.750	83,3	18.648.000	100	289.315.900	100	734.076.650	100	90%	100	1.814.148.670	100	138%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	15	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	1.171.722.000	100	417.345.500	100	417.169.050	100	296.525.500	100	500.000	0	0	100	34.854.000	100	331.879.500	100	80%	100	749.225.000	100	64%		Dinas Perhubungan		
2	18	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	495.600.000	100	197.084.400	100	533.578.000	0	0	0	0	0	0	100	21.072.000	100	21.072.000	100	4%	100	218.156.400	100	44%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	23	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	877.385.400	100	0	1.000.309.783	11,3	59.532.000	85	444.997.920	0	0	0	100	273.096.000	100	777.625.920	100	78%	100	777.625.920	100	89%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	22	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	220.790.000	100	194.604.400	100	155.790.000	0	0	100	19.716.375	0	0	100	19.716.375	100	19.716.375	100	13%	200	214.320.775	200	97%		Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga		
4	1	1	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	546.549.710	100	355.601.500	100	119.647.368	0	0	0	3.500.000	0	0	100	116.146.600	100	119.646.600	100	100%	100	475.248.100	100	87%		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang		

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%	100	3.223.775.000	100	59.775.000	100	164.000.000	0	0	0	0	0	100	97.963.800	100	60%	100	157.738.800	100	5%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	%	100	497.311.790	0	0	100	260.963.850	0	0	0	100	139.821.090	100	167.565.600	100	118%	100	307.386.690	100	62%	Bagian Umum		
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	%	100	1.519.815.225	100	1.119.735.500	100	318.943.532	0	22	71.524.959	0	78	220588078	100	292.113.037	100	92%	100	1.411.848.537	100	93%	Sekretariat DPRD	
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	22.628.071.820	100	339.530.530	100	634.967.925	0	0	0	0	100	6.725.000	100	6.725.000	100	1%	100	346.255.530	100	2%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	2	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	50%	0%	Badan Pendapatan Daerah	
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	510.379.950	0	310.379.950	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	310.379.950	0%	61%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	597.397.500	0	0	100	645.247.734	87	6.500.000	13	0	0	100	10.596.200	100	3%	100	17.096.200	100	3%	Kecamatan Manguharjo		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	100	860.992.255	100	291.005.765	100	469.612.563	0	15	2.139.000	15	180.509.500	70	16.550.000	100	42%	100	490.204.265	100	57%	Kecamatan Kartoharjo		
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Paket	4	657.432.640	2	649.156.220	2	561.860.789	2	1.800.000	0	0	0	7	653.350.090	9	655.150.090	450%	117%	11	1.304.306.310	275%	198%	Kecamatan Taman

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
1	3	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	0	0	0	0	0					0	-									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	1	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	370.759.250	100	343.468.150	100	175.978.978	100	5.696.100	0	0	0	65.272.000	100	70.968.100	100	40%	100	414.436.250	100	112%	Dinas Lingkungan Hidup	
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	276.664.500	0	184.950.000	0	-	0	0	8	0	0	0	0	8	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	184.950.000	89%	67%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>225.668.564.159</b>	<b>100</b>	<b>46.972.407.955</b>	<b>100</b>	<b>48.263.896.241</b>	<b>25</b>	<b>9.528.220.871</b>	<b>25</b>	<b>10.824.798.802</b>	<b>25</b>	<b>11.774.618.428</b>	<b>13.590.887.591</b>	<b>75</b>	<b>45.718.525.692</b>	<b>75%</b>	<b>95%</b>	<b>175</b>	<b>92.690.933.647</b>	<b>175%</b>	<b>41%</b>	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	Jenis	10	14.477.651.751	100	2.919.548.316	100	3.244.531.772	0	452.401.577	2	676.947.171	4	686.775.401	4	970.546.395	100	86%	20	5.706.218.860	200	39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	8.236.116.075	100	1.754.355.442	100	1.837.459.220	16	318.652.786	45	326.087.007	65	364.933.339	100	500.848.114	100	82%	100	3.264.876.688	100	40%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	%	100	8.960.264.371	100	2.825.923.371	100	2.812.331.000	21	480.253.865	46	751.821.840	64	715.546.010	100	758.962.095	100	96%	100	5.532.507.181	100	62%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	2.146.092.000	100	472.714.536	100	339.728.000	30	143.243.150	20	28.101.100	25	41.758.550	25	134.728.620	100	102%	200	820.545.956	200	38%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	4.563.639.467	100	1.165.406.819	100	594.782.655	13	139.142.612	6	66.001.117	10	193.025.177	72	171.918.355	100	96%	100	1.735.494.080	100	38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan	%	100	1.936.411.000	100	929.911.854	100	612.243.000	25	109.400.730	43	150.319.895	70	161.077.413	100	169.366.685	100	96%	100	1.520.076.577	100	78%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

2					3	4		5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
						kantor yang representatif																									
2	1	1	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	5.750.771.055	100	1.850.230.679	100	712.967.670	100	152.284.600	0	186.853.950	100	156.775.750	0	204.753.550	100	700.667.850	100	98%	100	2.550.898.529	100	44%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	5	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	9.753.973.456	100	2.595.584.671	100	2.033.227.975	9	469.273.608	50	516.278.475	80	533.018.264	100	497.122.845	100	2.015.693.192	100	99%	100	4.611.277.863	100	47%	Dinas Perhubungan
2	1	6	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	6.806.630.000	100	2.261.484.572	100	1.049.271.454	25	212.770.878	25	261.022.255	25	252.540.817	25	308.021.474	100	1.034.355.424	100	99%	100	3.295.839.996	100	48%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	3	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	2.587.346.380	0	437.780.190	100	456.411.041	15	118.206.050	35	99.454.900	12	101.285.900	38	120.732.800	100	439.679.650	100	96%	100	877.459.840	100	34%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	3	0	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	3.941.096.882	100	929.271.530	100	728.512.562	25	166.284.615	25	152.275.050	25	175.757.100	25	229.275.750	100	723.592.515	100	99%	100	1.652.864.045	100	42%	Dinas Perdagangan
2	2	2	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	9.860.500.650	100	1.759.350.353	100	1.958.636.700	0	366.296.196	21	498.327.235		534.289.970		483.262.100	21	1.882.175.501	21%	96%	121	3.641.525.854	121	37%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.010.831.851	100	183.949.251	100	226.882.600	25	56.641.900	50	52.172.200	0	39.620.190	25	54.351.870	100	202.786.160	100	89%	100	386.735.411	100	38%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	904.194.216	100	189.230.696	100	113.069.468	25	19.275.075	25	22.715.765	25	31.175.800	25	37.898.233	100	111.064.873	100	98%	100	300.295.569	100	33%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.236.102.800	100	292.620.755	100	241.844.000	14	43.962.000	26	64.552.540	18	45.521.780	42	90.262.460	100	244.298.780	100	101%	100	536.919.535	100	43%	Bagian Hukum
4	1	1	2.	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.387.948.620	100	285.012.226	100	224.363.060	8	39.014.390	30	54.466.638	30	58.048.625	32	72.478.400	100	224.008.053	100	100%	100	509.020.279	100	37%	Bagian Pengadaan Barang

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
																															/ Jasa dan Adbang
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	1.549.110.000	100	185.455.854	100	259.215.360	15	45.387.400	30	35.666.800	10	42.648.400,00	45	58.145.200	100	181.847.800	100	70%	100	367.303.654	100	24%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	21.159.285.535	100	4.399.345.233	100	4.711.849.825	25	734.692.818	25	1.114.653.525	25	1.068.050.447	25	875510638	100	3.792.907.428	100	80%	100	8.192.252.661	100	39%	Bagian Umum	
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	10.383.255.700	100	2.664.711.978	100	2.239.676.920	24	421.622.453	36	499.283.968	15	501.238.450	25	781.446.397	100	2.203.591.268	100	98%	100	4.868.303.246	100	47%	Sekretariat DPRD	
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	2.105.698.135	100	741.974.959	100	399.691.005	25	81.065.850	25	82.882.280	25	101.023.995	100	128.562.350	175	393.534.475	175	98%	275	1.135.509.434	275	54%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	66.434.804.845	0	13.006.455.364	3	14.451.982.000	3	3.079.871.975	3	3.287.091.900	3	3.972.543.236	3	4.371.589.300	12	14.711.096.411	400	102%	12	27.717.551.775	400	42%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	2.327.264.000	100	383.492.960	100	347.181.000		64.258.000	100	7.915.000	0	76.114.200		129.625.222			0%	0%	100	383.492.960	100	16%		
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	56	3.381.997.771	0	837.882.771	18	619.115.000	16	146.107.600	17	133.675.500	17	125.131.400	18	185.440.025	18	590.354.525	100	95%	18	1.428.237.296	32%	42%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	5.869.326.405	100	1.011.011.736	100	900.512.406	10	173.185.740	35	219.351.272	25	190.891.080	30	261.253.144	100	844.681.236	100	94%	100	1.855.692.972	100	32%	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	5.054.410.418	100	1.454.807.839	100	926.124.158	20	189.605.903	25	206.692.909	25	170.822.959	30	322.881.394	100	890.003.165	100	96%	100	2.344.811.004	100	46%	Kecamatan Kartoharjo	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji	%	100	5.182.835.350	100	209.400.000	100	1.239.700.000	25	256.850.000	25	322.200.000	25	317.400.000		238.050.000	75	1.134.500.000	75	92%	175	2.343.900.000	175	45%	Dinas Kesehatan	

2				3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
				Umum Kantor (RSUD)	non ASN Perangkat Daerah																							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	%	100	1.104.580.000	0	-	100	330.740.000	18	57.845.000	24	80.710.000	26	86.970.000	32	105.205.000	100	100	100	330.730.000	100	30%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	%	100	16.225.696.000	0	-	100	4.190.660.000	100	915.248.500	0	843.676.000	100	933.814.000	0	1.177.012.800	100	92%	100	3.869.751.300	100	24%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	2	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	%	100	1.033.443.030	100	225.494.000	100	163.900.000	25	18.309.500	50	52.024.960	75	37.438.400	100	58.809.200	100	102%	100	392.076.060	100	38%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	%	100	297.286.390	0	0	100	297.286.390	25	57.066.100	25	31.577.550	25	59.381.775	100	92.827.175	175	81%	175	240.852.600	175	81%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Pendapatan Daerah
1	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>181</b>	<b>66.719.423.356</b>	<b>0</b>	<b>14.918.898.428</b>	<b>101,0</b>	<b>19.894.627.360</b>	<b>0</b>	<b>2.145.844.638</b>	<b>0</b>	<b>3.362.477.548</b>	<b>0</b>	<b>3.395.409.084</b>	<b>101</b>	<b>6.855.108.197</b>	<b>101</b>	<b>79%</b>	<b>101</b>	<b>30.677.737.895</b>	<b>56%</b>	<b>46%</b>	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	627.828.400	100	85.463.648	100	139.403.600	0	15.551.500	50	14.584.800	75	28.768.700	100	49.839.010	100	78%	100	194.207.658	100	31%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	1.249.562.189	100	199.382.427	100	411319200	100	32.249.900	100	44.329.127	100	40.391.163	100	129.666.700	100	60%	100	446.019.317	100	36%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
																												Berencana		
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Buah	59	1.816.808.200	59	291.611.180	59	322.108.120	20	32.156.432	65	50.089.626	80	69.737.340	29	148.847.292	80	300.830.690	136%	93%	139	592.441.870	236%	33%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	6.531.321.432	100	1.076.112.885	100	1.420.652.032	25	177.590.850	50	262.189.727	75	390.013.206	100	573.986.910	100	1.403.780.693	100%	99%	100	2.479.893.578	100%	38%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	%	100	1.338.250.868	100	338.250.868	100	707.647.000	23	34.618.155	31	110.918.461	25	139.040.102	21	207.939.899	100	492.516.617	100%	70%	100	830.767.485	100%	62%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	%	100	733.980.600	100	121.747.223	100	212.831.150	46	17.959.450	18	31.070.950	18	31.289.832	12	77.880.000	94	158.200.232	94%	74%	100	279.947.455	100%	38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	196.318.000	100	38.287.305	100	48.550.000	25	6.208.270	25	6.759.500	25	14.150.230	25	30.816.735	100	57.934.735	100%	119%	100	96.222.040	100%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	305.897.000	100	47.837.040	100	62.462.000	15	10.046.000	0	14.581.520	50	9.589.782	100	29.550.500	100	63.767.802	100%	102%	100	111.604.842	100%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



2					3	4	5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
2	1	1	2.	1	Kendaraan Dinas Jabatan																									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	4.875.379.700	100	1.051.907.700	100	1.785.404.000	100	238.903.650	0	268.109.700	0	300.367.900	0	368.771.500	100	1.176.152.750	100%	66%	100	2.228.060.450	100%	46%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	106.500.000	100	17.021.250	100	27.500.000	25	7.484.700	50	2.696.000	75	9.073.400	100	7.312.150	100	26.566.250	100%	97%	100	43.587.500	100%	41%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	2.608.000.000	100	529.236.038	100	904.406.400	30	113.228.206	50	162.819.014	80	116.420.562	100	399.135.661	100	791.603.443	100%	88%	100	1.320.839.481	100%	51%	Dinas Perhubungan
2	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	640.500.000	100	143.705.697	100	188.176.650	25	25.765.200	25	34.802.660	25	41.379.451	25	96.973.180	100	198.920.491	100%	106%	100	342.626.188	100%	53%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	195.000.000	100	32.685.650	100	49.415.600	27	11.960.100	44	4.150.000	23	10.416.000	100	14.814.000	100	41.340.100	100%	84%	100	74.025.750	100%	38%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2	1	2.	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	234.452.000	100	47.356.100	100	106.200.000	24,5	15.876.500	33	15.305.450	15	7.986.500	28	48.676.200	100	87.844.650	100%	83%	100	135.200.750	100%	58%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
					Kendaraan Dinas Jabatan																									
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	1.133.596.930	100	215.371.475	100	233.991.660	25	47.344.700	25	47.808.050	25	58.615.800	25	73.042.257	100	226.810.807	100%	97%	100	442.182.282	100%	39%	Dinas Perdagangan
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	232.050.000	100	49.548.204	100	75.275.000	10	10.009.000	36	19.808.800		14.349.862		26.997.000	46	71.164.662	46%	95%	146	120.712.866	146%	52%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaa n dan Olah Raga
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	%	100	82.005.265	100	18.584.015	100	23.421.250	25	4.110.000	50	5.000.000	0	7.600.000	25	6.657.700	100	23.367.700	100%	100%	100	41.951.715	100%	51%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	%	100	94.020.000	100	17.514.800	100	29.666.000	2	4.551.700	0	7.350.380	50	4.074.500	48	13.391.600	100	29.368.180	100%	99%	100	46.882.980	100%	50%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	82.190.400	100	17.553.441	100	24.500.000	9	1.747.538	12	2.540.498	38	7.715.138	41	12.326.320	100	24.329.494	100%	99%	100	41.882.935	100%	51%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	65.658.958	100	14.909.414	100	23.452.180	17	5.010.364	65	4.822.500	8	1.652.000	10	11.228.500	100	22.713.364	100%	97%	100	37.622.778	100%	57%	Bagian Pengadaa n Barang / Jasa dan Adbang

2					3	4	5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.						
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																																
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	88.000.000	100	17.415.600	100	22.000.000	0	3.525.000	45	5.948.000	0	2.400.000	55	7.876.000	100	19.749.000	100	90%	100	37.164.600	100	42%						Bagian Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	%	100	5.051.254.595	100	881.974.090	100	1.679.405.050	10	226.465.348	29	183.705.725	25	204.273.870	36	546.745.243	100	1.161.190.186	100	69%	100	2.043.164.276	100	40%						Bagian Umum		
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	%	100	1.221.363.581	100	246.638.130	100	286.603.810	28	73.769.245	27	56.410.990	5	48.013.733	40	96.127.773	100	274.321.741	100	96%	100	520.959.871	100	43%						Sekretariat DPRD		
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas jabatan yang layak digunakan	%	100	150.000.000	100	29.167.300	100	50.000.000	25	1.980.000	25	2.295.000	25	9.712.550	10	15.195.180	175	29.182.730	175	58%	275	58.350.030	275	39%						Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	108	301.120.000	0	47.222.100	36	101.200.000	0	18.966.300	14	16.372.900	4	19.620.100	18	22.860.500	100	77.819.800	100	77%	36	125.041.900	33%	42%						Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	unit	105	197.574.000	0	28.918.189	35	42.054.000	5	6.830.130	9	7.915.000	0	8.233.622	35	14.436.300	100	37.415.052	100	89%	35	66.333.241	33%	34%						Badan Pendapatan Daerah		

2					3		4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
5	3	1	2.09	1	Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya																								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	87	30.000.000	30	11.325.550	19	27.360.000	4	1.735.800	2	2.196.700	2	3.406.500	18	12.294.510	18	19.633.510	95%	72%	48	30.959.060	55%	103%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Unit	4	95.312.550	1	30.917.124	1	41.424.000	0	4.086.100	1	11.686.040	0	3.350.000	0	20.407.097	1	39.529.237	100%	95%	2	70.446.361	50%	74%	Inspektoral Daerah
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	126.892.000	100	30.239.625	100	37.000.000	25	4.750.000	25	3.000.000	25	6.395.000	25	21.774.300	100	35.919.300	100%	97%	100	66.158.925	100%	52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	%	100	248.118.400	100	28.808.029	100	59.559.200	30	4.379.770	30	11.316.000	20	16.722.088	20	17.291.500	100	49.709.358	100%	83%	100	78.517.387	100%	32%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang layak digunakan	%	100	101.004.000	100	24.000.133	100	27.253.800	25	5.978.000	25	2.770.000	10	6.169.500	40	11.867.000	100	26.784.500	100%	98%	100	50.784.633	100%	50%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	211.388.150	100	38.738.124	100	48.448.000	15	4.408.917	25	9.568.807	25	12.690.520	35	19.641.373	100	46.309.617	100%	96%	100	85.047.741	100%	40%	Kecamatan Taman

2					3	4	5		6		7		8						9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
					Kendaraan Dinas Jabatan																									
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	%	100	742.500.000	100	138.549.995	100	177.920.000	15	20.384.193	30	41.940.871	30	43.879.820	25	87.154.640	100	193.359.524	100%	109%	200	331.909.519	200%	45%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	%	100	70.380.000	100	15.800.000	100	12.949.600	25	600.000	25	3.435.000	10	1.482.800	40	7.102.000	100	12.619.800	100%	97%	100	28.419.800	100%	40%	Kecamatan Kartoharjo
2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	%	100	385.675.000	100	96.781.550	100	152.055.000	100	27.385.500	0	25.215.000	0	19.295.500	0	67.323.900	100	139.219.900	100%	92%	100	236.001.450	100%	61%	Dinas Lingkungan Hidup
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	%	100	1.082.650.826	100	200.070.944	100	272.105.496	18	16.421.950	22	58.311.118	5	47.534.300	55	116.203.912	100	238.471.280	100%	88%	100	438.542.224	100%	41%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	%	100	1.742.254.488	100	719.711.128	100	300.995.920	9	16.278.375	17	33.185.215	40	229.696.060	34	135.161.960	100	414.321.610	100%	138%	100	1.134.032.738	100%	65%	Sekretariat DPRD
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	1.475.834.000	100	240.931.593	100	436.476.100	0	12.118.000	50	94.718.400	75	56.248.300	100	81.280.528	100	244.365.228	100%	56%	100	485.296.821	100%	33%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	63.639.127	100	58.650.304	100	123835350	100	45.000	100	4.989.000	100	6.092.500	100	15.698.000	100	26.824.500	100%	22%	100	85.474.804	100%	134%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	203.000.000	100	27.926.000	100	40.000.000	0	0	30	9.880.000	0	0	100	29.998.000	100	39.878.000	100%	100%	100	67.804.000	100%	33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	530.387.000	100	130.387.000	100	99.000.000	0	0	5	2.500.000	80	46.971.500	15	28.865.550	100	78.337.050	100%	79%	100	208.724.050	100%	39%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

2					3			4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	145.000.000	100	24.500.000	100	75.000.000	100	24.742.400	0	0	0	0	49.700.000	100	74.442.400	100%	99%	200	98.942.400	200%	68%	Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	712.602.375	100	242.359.270	100	139.631.450	23	31.698.900	0	-	19	32.576.373	58	73.046.877	100	137.322.150	100%	98%	100	379.681.420	100%	53%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	172.008.000	100	35.589.500	100	38.350.000	0	-	0	0	75	36.940.000	25	56.069.425	100	93.009.425	100%	243%	100	128.598.925	100%	75%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	1.237.102.000	100	216.608.100	100	54.150.000	0	0	0	0	90	43.621.000	100	9.198.700	100	52.819.700	100%	98%	100	269.427.800	100%	22%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	463.418.900	100	184.961.800	100	99.918.900	0	0	0	0	0	11.000.000	100	88.234.700	100	99.234.700	100%	99%	100	284.196.500	100%	61%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	652.824.015	100	75.624.500	100	234.469.000	25	4.000.000	50	13.000.000	75	147.671.000	100	132738400	100	297.409.400	100%	127%	100	373.033.900	100%	57%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	2.184.350.000	100	662.117.200	100	707.216.600	15	27.593.000	100	254.788.000	0	100	147.610.800	100	429.991.800	100%	61%	100	1.092.109.000	100%	50%	Dinas Perhubungan		
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	615.000.000	100	129.978.490	100	130.500.000	25	70.109.828	25	9.754.287	25	385.000	25	49.683.655	100	129.932.770	100%	100%	100	259.911.260	100%	42%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	443.018.000	100	192.727.280	100	387.068.500	16	320.000	7	12.000.000	25	30.386.700	100	4.000.000	100	46.706.700	100%	12%	100	239.433.980	100%	54%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	344.757.000	0	79.050.800	100	123.254.000	3,87	5.863.000	23	21.420.000	45	64.200.000	28	33.954.000	100	125.437.000	100%	102%	100	204.487.800	100%	59%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	1.468.014.75	100	781.460.913	100	182.574.670	0	0	33	18.791.500	0	1.749.500	67	159.812.739	100	180.353.739	100%	99%	100	961.814.652	100%	66%	Dinas Perdagangan	

2					3	4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
					dan Bangunan Lainnya																									
2	2	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	689.675.000	100	227.952.338	10	68.800.000	25	19.998.000	70	48.802.000		0	0	95	68.800.000	95%	100%	195	296.752.338	195%	43%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olah Raga	
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	45.000.000	100	7.500.000	10	7.500.000	10	7.376.950	0	0	0	0	0	100	7.376.950	100%	98%	100	14.876.950	100%	33%	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	8.200.000	100	1.650.000	10	216.280.000	10	1.638.000	0	0	0	0	0	100	1.638.000	100%	1%	100	3.288.000	100%	40%	Bagian Organisasi	
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	28.047.600	100	2.500.000	10	197.500.000	0	0	10	250.000	0	0	90	16.995.000	100	17.245.000	100%	9%	100	19.745.000	100%	70%	Bagian Hukum
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	1.606.250.000	100	1.999.100	10	822.176.259	9	71.622.320	26	150.000.000	0	0	65	588.834.938	100	810.457.258	100%	99%	100	812.456.358	100%	51%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	179.745.000	100	80.270.000	10	28.750.000	0	0	0	8.185.000	0	9.000.000	100	6.565.000	100	23.750.000	100%	83%	100	104.020.000	100%	58%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	2.140.282.750	100	513.310.478	10	714.600.000	0	72.049.400	0	236.034.886	75	111.119.490	25	62.775.600	100	481.979.376	100%	67%	100	995.289.854	100%	47%	Bagian Umum
5	1	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	598.500.000	100	312.744.270	10	149.842.000	25	62.489.000	25	1.167.250	25	917.025	100	0	175	64.573.275	175%	43%	275	377.317.545	275%	63%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	3	270.000.000	0	119.570.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	50.000.000	100	50.000.000	100%	100%	1	169.570.000	33%	63%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	Unit	3	240.000.000	0	18.689.333	1	157.095.000	0	0	0	0	3.322.750	1	86.501.650	100	89.824.400	100%	57%	1	108.513.733	33%	45%	Badan Pendapatan Daerah	
5	3	1	2.	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	9	700.000.000	3	980.164.621	2	386.710.000	1	20.189.500	1	40.416.400	1	200.648.500	2	100.800.296	100	362.054.696	100%	94%	5	1.342.219.317	56%	192%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

2					3		4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
							Dipelihara/Dir	ehabilitasi																				Sumber Daya Manusia		
6	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Unit	4	271.947.670	1	4.814.470	1	233.750.000	0	0	1	196.962.1 00	0	32.221.000	0	44.998.240	1	274.181.3 40	100 %	117 %	2	278.995.81 0	50%	103 %	Inspekt or at Daerah
8	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	42.500.000	1 0 0	7.035.000	10 0	30.000.000	25	1.350.000	25	1.200.000	25	7.182.572	25	20.113.000	10 0	29.845.57 2	100 %	99%	10 0	36.880.572	100 %	87%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	382.656.879	1 0 0	82.780.675	10 0	192.613.743	10	6.740.175	25	15.759.75 0	40	31.564.500	25	62.316.625	10 0	116.381.0 50	100 %	60%	10 0	199.161.72 5	100 %	52%	Kecamata n Manguha rjo
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	359.127.000	1 0 0	161.691.700	10 0	75.150.000	0	0	15	13.866.54 5	10	5.596.850	75	55.642.525	10 0	75.105.92 0	100 %	100 %	10 0	236.797.62 0	100 %	66%	Kecamata n Kartoharj o
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	507.500.000	1 0 0	99.985.500	10 0	130.000.000	0	0	80	100.000.0 00	0	0	20	30.000.000	10 0	130.000.0 00	100 %	100 %	10 0	229.985.50 0	100 %	45%	Kecamata n Taman
7	1	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	150.058.000	1 0 0	36.756.500	10 0	41.615.000	15	8.120.000	15	6.104.000	10	6.528.900	60	14.178.000	10 0	34.930.90 0	100 %	84%	10 0	71.687.400	100 %	48%	Kecamata n Kartoharj o
1	1	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	679.912.900	1 0 0	136.603.299	10 0	159.155.800	0	23.021.500	50	18.090.00 0	75	34.050.500	10 0	49.584.500	10 0	124.746.5 00	100 %	78%	10 0	261.349.79 9	100 %	38%	Dinas Pendidika n
1	2	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	653.958.774	1 0 0	241.327.550	10 0	412370450	10 0	17.649.200	10 0	42.396.22 5	10 0	40.284.500	10 0	99.759.100	10 0	200.089.0 25	100 %	49%	10 0	441.416.57 5	100 %	67%	Dinas Kesehata n Pengenda lian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Buah	1	1.668.650.00 0	1	150.382.860	1	471.855.000	1	32.847.272	1	34.869.77 0	1	56.091.728	1	133.757.533	1	257.566.3 03							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2. 09	1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	1.883.371.30 0	1 0 0	296.841.092	10 0	367.168.000	25	44.554.100	50	89.749.70 0	60	58.623.400	10 0	106.865.600	10 0	299.792.8 00	100 %	82%	10 0	596.633.89 2	100 %	32%	Dinas Perumah an Rakyat dan Kawasan Permuki man



2					3			4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	226.874.900	100	37.434.900	100	96.195.000	25	4.497.500	26	8.395.500	25	2.959.000	24	48.330.680	100	64.182.680	100%	67%	100	101.617.580	100%	45%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	81.500.000	100	24.564.000	100	24.175.000	10	1.913.500	40	3.648.000	30	2.000.000	20	16.612.000	100	24.173.500	100%	100%	200	48.737.500	200%	60%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	%	100	376.834.720	100	72.843.950	100	85.000.000	35	7.100.000	16	13.888.500	17	18.660.600	32	32.752.300	100	72.401.400	100%	85%	100	145.245.350	100%	39%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	121.625.000	100	27.748.000	100	27.500.000	25	4.805.000	25	7.104.600	25	4.559.000	25	10.463.800	100	26.932.400	100%	98%	100	54.680.400	100%	45%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	204.170.500	100	49.660.400	100	87.896.500	36	4.680.000	0	17.162.690	70	8.695.000	100	15.408.000	100	45.945.690	100%	52%	100	95.606.090	100%	47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	489.377.319	100	181.173.258	100	66.652.000	25	23.606.250	50	3.370.500	75	9.467.000	100	62.203.360	100	98.647.110	100%	148%	100	279.820.368	100%	57%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	%	100	1.224.360.000	100	135.240.800	100	332.950.000	25	54.712.000	25	11.765.825	25	22.170.200	25	280.153.280	100	368.801.305	100%	111%	100	504.042.105	100%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	835.000.000	100	55.000.000	100	51.553.900	5	2.715.000	21	9.368.600	25	17.204.800	100	21.746.250	100	51.034.650	100%	99%	100	106.034.650	100%	13%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	247.650.000	0	44.385.000	100	95.833.800	16,6	10.445.000	36	20.951.500	16	11.700.000	31	52.576.500	100	95.673.000	100%	100%	100	140.058.000	100%	57%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

2					3		4			5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	3	1	2.	1	atau Bangunan Lainnya																									
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang layak digunakan	%	100	544.712.800	100	124.908.045	100	95.929.520	25	25.081.000	25	22.072.000	25	22.317.350	25	25.873.450	100	99%	100	220.251.845	100	40%	Dinas Perdagangan		
2	2	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	233.630.650	100	28.888.000	100	40.115.000	20	5.692.000	2	430.000		16.025.000		17.950.700	22	40.097.700	22%	100	122	68.985.700	122	30%	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda dan Olah Raga
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	%	100	45.924.000	100	9.924.000	100	12.000.000	25	1.918.000	50	2.666.000	0	2.015.000	25	0	100	55%	100	16.523.000	100	36%	Bagian Pemerintahan		
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	%	100	66.005.000	100	14.388.700	100	13.230.000	10	2.235.000	10	2.391.000	20	2.993.500	60	5.606.900	100	100	100	27.615.100	100	42%	Bagian Organisasi		
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	75.786.240	100	18.750.250	100	18.893.120	0	0	13	2.490.000	22	4.222.100	65	11.981.000	100	99%	100	37.443.350	100	49%	Bagian Hukum		
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	54.250.000	100	12.345.500	100	12.659.000	9	1.325.000	25	1.850.000	21	7.700.000	45	7.779.500	100	147	100	31.000.000	100	57%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang		
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	36.800.000	100	4.299.000	100	9.200.000	0	935.000	30	1.525.000	0	1.927.000	70	2.630.000	100	76%	100	11.316.000	100	31%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
4	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	1.044.101.500	100	112.990.848	100	290.000.000	0	34.225.400	72	77.312.741	0	43.565.425	28	17.249.000	100	59%	100	285.343.414	100	27%	Bagian Umum		
5	1	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	225.964.695	100	48.793.000	100	75.321.565	25	20.465.500	25	15.230.650	25	21.798.600	100	17.819.330	175	100	275	124.107.080	275	55%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)		K	Rp.
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	32	411.000.000	0	83.480.000	12	87.000.000	5	39.344.200	1	20.318.400	2	8.865.500	4	13.244.395	12	81.772.495	100%	94%	12	165.252.495	38%	40%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dir ehabilitasi	%	100	404.100.000	100	38.819.610	100	45.058.000	35	8.281.000	25	9.384.000	0	8.595.000	100	15.880.000	100	42.140.000	100%	94%	100	80.959.610	100%	20%	Badan Pendapat an Daerah
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	24	104.000.000	0	30.925.500	8	50.000.000	2	19.146.900	4	4.400.000	2	11.816.000	8	7.215.400	8	42.578.300	100%	85%	8	73.503.800	33%	71%	Badan Kepegaw aian dan Pengemb an Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	Jenis	20	107.801.800	5	33.683.000	5	31.731.400	2	5.500.000	1	1.500.000	3	15.781.000	0	8.950.000	6	31.731.000	120%	100%	11	65.414.000	55%	61%	Inspekt or at Daerah
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	%	100	135.000.000	100	24.631.000	100	55.000.000	25	10.450.000	25	7.870.000	25	9.700.000	25	24.791.000	100	52.811.000	100%	96%	100	77.442.000	100%	57%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	181.200.000	100	36.468.300	100	85.142.015	20	9.419.000	30	9.371.600	25	13.360.000	25	49.866.749	100	82.017.349	100%	96%	100	118.485.649	100%	65%	Kecamata n Manguha rjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	%	100	147.825.000	100	26.964.200	100	36.500.000	0	0	40	17.517.900	30	10.320.200	30	8.643.000	100	36.481.100	100%	100%	100	63.445.300	100%	43%	Kecamata n Taman
2	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	282.783.660	100	132.783.660	100	150.000.000	30	30.900.000	100	39.788.600	100	36.490.790	100	42.486.320	100	149.665.710	100%	100%	100	282.449.370	100%	100%	Dinas Perhubun gan
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	270.865.042.848	0	-	100	84.031.040.673	0	13.697.784.421	100	17.788.001.603	0	-	100	-	100	31.485.786.024	100%	37%	100	31.485.786.024	100%	12%	

2					3	4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	1	2.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	%	100	270.865.042.848	0	0	100	84.031.040.673	70	13.697.784.421	71,4	17.788.001.603	87,3	0	0	87	31.485.786.024	87%	37%	87	31.485.786.024	87%	12%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	1	1	2.	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	3.853.575.520	100	728.994.618	100	1.000.000.000	25	176.316.936	25	187.745.853	25	187.745.853	25	176.316.936	100	73%	100	1.457.120.196	100	38%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	1.453.575.520	100	199.254.618	100	400.000.000	25	43.881.936	20	55.310.853	25	55.310.853	30	43.881.936	100	50%	100	397.640.196	100	27%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	11	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	2.400.000.000	100	529.740.000	100	600.000.000	25	132.435.000	3	132.435.000	25	132.435.000	47	132.435.000	100	88%	100	1.059.480.000	100	44%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%	100	7.515.902.100	100	1.431.090.162	100	1.995.556.750	10	315.003.958	40	506.492.824	20	333.811.455	30	339.034.317	100	75%	100	2.925.432.716	100	39%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	%	100	3.954.060.600	100	779.023.886	100	1.020.192.550	25	165.485.663	28	303.055.380	25	197.154.125	22	139.831.292	100	79%	100	1.584.550.346	100	40%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	%	100	2.263.269.700	100	537.117.000	100	663.153.100	25	126.916.505	25	177.504.558	25	107.963.241	25	148.442.016	100	85%	100	1.097.943.320	100	49%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	%	100	1.298.571.800	100	114.949.276	100	312.211.100	26	22.601.790	3	25.932.886	25	28.694.089	46	50.761.009	100	41%	100	242.939.050	100	19%	Bagian Umum	
4	1	1	2.	13	Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	Indeks	28,5	7.669.219.830	1.408.714.495	28,2	1.478.664.750	0	212.496.625	0	121.629.540	0	155.230.750	42,3	964.894.038	42	1.454.250.953	150	98%	42	2.862.965.448	148	37%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.	13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan	%	100	1.798.096.000	100	342.435.303	100	367.073.280	25	69.907.389	20	19.464.600	20	28.725.000	35	230.784.599	100	95%	100	691.316.891	100	38%	Bagian Organisasi	

2					3		4		5		6		7		8								9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
							ketentuan yang berlaku																							
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks	5	2.264.346.000	3	650.442.051	2,85	663.164.350	0	37.092.336	0	29.414.890	0	35.923.900	2	559.919.950	2	662.351.076	70%	100%	5	1.312.793.127	100%	58%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kecukupan dokumen kinerja yang disusun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	3.606.777.830	100	415.837.141	80	448.427.120	1	105.496.900	0	72.750.050	0	90.581.850	1	174.189.489	2	443.018.289	3%	99%	100	858.855.430	100%	24%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitas keprotokolkan pimpinan	%	100	7.429.603.260	100	505.915.243	100	1.922.341.180	10	207.779.200	4	96.711.000	40	957.943.850	46	355.278.150	100	84%	100	2.123.627.443	100%	29%	Bagian Umum		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah fasilitas keprotokolkan pimpinan Pemerintah Daerah	Kali	2000	7.429.603.260	514	505.915.243	500	1.922.341.180	25	207.779.200	4	96.711.000	3	957.943.850	10	355.278.150	42	1.617.712.200	8%	84%	556	2.123.627.443	28%	29%	Bagian Umum
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	%	100	64.995.240.461	100	13.516.395.220	100	15.988.960.562	9	3.576.576.405	28	4.179.535.755	8	4.015.498.655	55	4.027.807.405	100	99%	100	29.315.813.440	100%	45%			
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Bulan	24	63.437.659.953	12	13.255.349.320	12	15.554.923.870	3	3.576.546.405	3	4.002.912.555	3	4.013.412.555	3	3.892.748.305	12	15.485.619.820	100%	100%	24	28.740.969.140	100%	45%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	Jenis	10	1.139.530.508	5	221.182.000	5	329.036.692	0	30.000	3	176.623.200	0	0	2	91.001.100	5	267.654.300	100%	81%	10	488.836.300	100%	43%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	kali/orang	62	418.050.000	1	39.863.900	1	105.000.000	0	0	0	0	0	2.086.100	1	44.058.000	1	46.144.100	100%	44%	2	86.008.000	3%	21%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	%	100	18.266.831.972	100	4.025.692.542	100	3.185.180.488	14	586.811.400	30	1.199.318.524	19	1.220.781.123	37	1.219.670.612	100	133%	100	8.252.274.201	100%	45%			
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	Dokumen	28	151.988.049	4	34.490.800	4	20.118.488	0	684.000	1	100.000	1	1.658.500	2	9.444.500	4	11.887.000	100%	59%	14	46.377.800	50%	31%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	%	100	18.114.843.923	100	3.991.201.742	100	3.165.062.000	27	586.127.400	47	1.199.218.524	13	1.219.122.623	25	1.210.226.112	112	4.214.694.659	112%	133%	112	8.205.896.401	112%	45%	Sekretariat DPRD

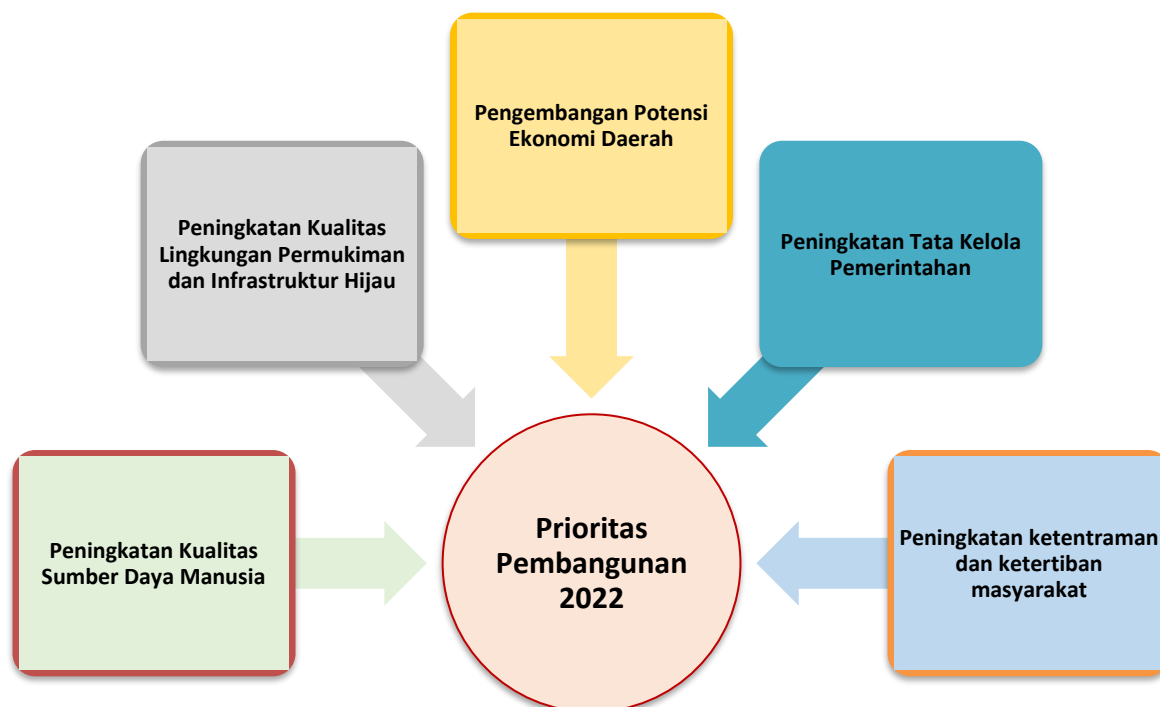
Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Madiun Semester II Tahun 2022

No	Nama Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja RKPD Kab/Kota	Predikat Capaian	Rata-rata Realiasi Anggaran Per Urusan	Predikat Capaian Realisasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Ket.
1	Kota Madiun	99%	Sangat Tinggi	81%	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya gagal lelang pada Dinas Pendidikan untuk pengadaan laptop bagi siswa kelas 5 SD dan 2 SMP dikarenakan laptop yang dikirimkan berbeda dengan spesifikasi yang ada pada kontrak</li><li>2. Penggunaan Dana Darurat rendah dikarenakan kondisi pandemi yang sudah menurun sedangkan pagu yang disiapkan besar</li><li>3. Beberapa Pekerjaan Fisik baru dilaksanakan setelah TW III hal ini dikarenakan anggaran baru ada setelah pelaksanaan Perubahan Anggaran menjadikan pelaksanaan belum bisa maksimal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penurunan tingkat penyebaran Covid - 19 menjadikan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan atau mendatangkan orang banyak bisa terlaksana.</li><li>2. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan</li><li>3. Kerjasama antara Pemerintah, Stakeholder dan masyarakat menjadikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bisa berkerja dengan maksimal</li></ol>	

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2022, ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi permasalahan mengacu pada prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022. Prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2. 31**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022**

Sesuai dengan lima prioritas pembangunan pada gambar 2.26 diatas, identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 81 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas mutu pendidikan</li> <li>Indeks pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan</li> <li>kualifikasi tenaga pendidik perlu ditingkatkan</li> <li>distribusi tenaga pengajar dan mutu pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu</li> <li>Kualitas layanan kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapatnya angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu</li> <li>Cakupan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu rendah</li> <li>Cakupan kesehatan rujukan perlu ditingkatkan</li> <li>Perlu ditingkatkannya Pertolongan tenaga kesehatan</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ekonomi</li> <li>• Kualitas SDM Tenaga Kerja</li> <li>• Rasio Ketergantungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kemiskinan mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19</li> <li>• Penanganan PMKS perlu dioptimalkan</li> <li>• Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan</li> <li>• Penyediaan lapangan pekerjaan perlu peningkatan jaringan ketenagakerjaan</li> </ul>
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas untuk masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik perlu ditingkatkan dan dipelihara</li> <li>• Drainase perkotaan perlu ditingkatkan</li> <li>• Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat perlu pemeliharaan kualitas</li> <li>• Sarana sanitasi masyarakat perlu ditingkatkan</li> <li>• Sarana dan prasarana persampahan perlu di tingkatkan</li> </ul>
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas Bencana alam</li> <li>• Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya alam yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan RTH perlu ditingkatkan</li> <li>• Pemanfaatan pengelolaan air tanah perlu ditingkatkan</li> <li>• Mitigasi bencana perlu ditingkatkan</li> </ul>
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produk unggulan</li> <li>• Iklim investasi</li> <li>• Kinerja BUMD</li> <li>• Daya Saing UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing</li> <li>• Belum optimalnya kinerja BUMD</li> <li>• Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM</li> <li>• Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM</li> </ul>
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Birokrasi</li> <li>• Pelayanan Publik yang Murah, Tepat, Cepat dan Akurat.</li> <li>• Kualitas SDM (aparatur) dalam pelayanan public</li> <li>• Partisipasi public dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi Birokrasi belum optimal sehingga kinerja pemerintah belum dapat terukur dengan jelas</li> <li>• Perijinan satu pintu belum optimal</li> <li>• Kualitas SDM Aparatur masih perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.</li> <li>• Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</li> </ul>
5.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerukunan dan toleransi antar umat beragama</li> <li>• Pembinaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban</li> <li>• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat</li> <li>- Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan</li> <li>- Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat</li> </ul>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, (2022)



Capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya baik dari sisi target terhadap realisasinya tahun 2022 maupun perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 82 Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2022**

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	2022		
			Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	81,70	82,01	100,38%
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	88,19	90,33	102,43%
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87*	107,34%
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	68 (B)	69,26 (B)	101,85%
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	77,05	81,25	105,45*

Sumber Data: PD dan BPS

\*) angka sementara

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 2.48 diatas, realisasi capaian target indikator kinerja prioritas pembangunan pada Pemerintah Kota Madiun memiliki nilai diatas 100%. Capaian tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Madiun dari tahun ke tahun berkinerja baik, hal itu terlihat dari capaian prioritas pembangunan pada tahun 2021 yang belum mencapai target dapat terealisasi sesuai target pada tahun 2022 kemarin. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 nanti realiasi capaian target indikator kinerja dapat terealisasi sesuai target, karena pada tahun 2024 juga merupakan tahun terakhir periode RPJMD yang akan menentukan kinerja periode tahun 2019-2024

Data capaian 4 (empat) tahun terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun :

**Tabel 2. 83 Capaian 4 Tahun Terakhir Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Kota Madiun Tahun 2022**

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	80,88	80,91	81,25	82,01
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	85,32	86,67	89,40	90,33
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,78	6,69	6,87	6,86*

No.	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	67,34	65,55	66,26	69,26
5.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat demi Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Ketentraman	-	76,87	78,74	81,25

Dari data capaian di atas untuk capaian tahun 2022 rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai hasil evaluasi 69,26 dengan kategori “**B**” berdasarkan rincian hasil evaluasi pada komponen Penilaian sebagai berikut:

A. Komponen Pengungkit

- I. Pemenuhan bobot 20 nilai 13,61
- II. Hasil Antara Area Perubahan bobot 10 nilai 6,79
- III. Reform bobot 30 nilai 16,19

B. Komponen Hasil

- I. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan bobot 10 nilai 8,40
- II. Kualitas Pelayanan Publik bobot 10 nilai 9,13
- III. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN bobot 10 nilai 8,54
- IV. Kinerja Organisasi bobot 10 nilai 6,60

Sebagaimana terlihat pada komponen hasil di atas, didalamnya terdapat penilaian SAKIP yang merupakan indikator sasaran pemerintah kota madiun untuk meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka diperoleh nilai hasil evaluasi 77,15 dengan kategori “BB” dengan rincian komponen yang dinilai sebagai berikut:

- 1. Perencanaan bobot 30 nilai 25,67
- 2. Pengukuran Kinerja bobot 30 nilai 23,16
- 3. Pelaporan Kinerja bobot 15 nilai 11,49
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25 nilai 16,83

Indeks ketentraman merupakan indikator dari tujuan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran indikator indeks kerukunan yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perhitungan dari 5 (lima) dimensi persepsi yaitu Menghormati, Menerima, Jujur, Teladan, dan Kesetaraan serta indeks rasa aman yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja dengan perhitungan dari 4 (empat) dimensi persepsi yaitu Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan Atas Kebhinekaan, dan Keamanan dari Kekerasan. Sebagaimana perhitungan diatas dapat dijadikan kesesuaian dan keselarasan terkait Indeks Kesalehan yang di gunakan sebagai Indikator Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam variabel dimensi Kepedulian Sosial dan Kepedulian Lingkungan.

### 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Madiun tidak terlepas dari kondisi nasional, provinsi dan lingkungan eksternal lainnya. Hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 84 Permasalahan Pembangunan Daerah**

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
1	Adanya varian baru Wabah Corona Virus	Adanya varian baru Wabah Corona Virus	Adanya varian baru Wabah Corona Virus
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk permasalahan gizi buruk	Peningkatan Kualitas Pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana	Regionalisasi dari ekonomi global dengan peningkatan keterkaitan antara perdagangan antar regional dan keuangan
3	Mengantisipasi Perekonomian yang bergerak dengan sangat dinamis terkait dengan kebijakan moneter AS maupun fluktuasi harga	Peningkatan Kualitas Kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih	Meningkatnya ekonomi regional akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja
4	Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stake holder khususnya dunia usaha	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Ketenagakerjaan serta "Link and Match" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja	Negara ASEAN diharapkan akan semakin meluas dan mendalam
5	Penciptaan nilai tambah sektor pertanian, manufaktur dan jasa	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	Isu-isu HAM dan lingkungan hidup akan meningkat dan akan semakin menarik

No.	Isu Penting dan Masalah Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal Lainnya
6	Peningkatan sektor pariwisata untuk meningkatkan kontribusi penyumbang devisa	Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan ekonomi potensial	
7	Perbaiki tenaga kerja yang tidak hanya dengan pendidikan vokasi tapi juga standar kerja dan kompetensi tenaga kerja	Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika	
8	Peningkatan ketahanan pangan dan energi khususnya energi baru dan terbarukan	Peningkatan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
9	Kelastarian lingkungan daya sumber daya air	Peningkatan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UMKM	
10		Optimalisasi Kepariwisata	
11		Peningkatan Produktifitas Tenaga	
12		Industrialisasi berbasis ekonomi digital	
13		Peningkatan ketahanan pangan	
14		Peningkatan ketahanan energi	
15		Peningkatan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba	
16		Kesuksesan Pemiou serentak	

Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 pandemi Covid-19 masih terjadi. Pandemi tersebut sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali sektor ekonomi. Dengan adanya kontraksi di sektor ekonomi, maka sangat mempengaruhi di sisi pendapatan pemerintahan daerah, yang akhirnya berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat membuat kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Sebesar 35 % dari kemampuan APBD direalokasi dan difokuskan untuk program dan kegiatan dalam penanganan Covid-19. Hasil realokasi tersebut di tempatkan di Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan alasan fleksibilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Adanya refocusing dan realokasi tentunya banyak kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran yang optimal sehingga proses pencapaian target kinerja pasti akan sangat terganggu. Tahun 2021 perkiraan secara global maupun nasional dampak dari pandemi Covid-19 masih akan dirasakan, sehingga proyeksi pendapatan dari pendapatan transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-Lain tidak bisa diharapkan melampaui atau bahkan sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga rencana belanja di tahun 2022 juga tidak akan melampaui atau sama dengan tahun sebelumnya. Akhirnya akan berdampak pada belanja program dan kegiatan yang tidak akan bisa maksimal dan akan bermuara pada pencapaian target kinerja yang tidak maksimal juga.

**Tabel 2. 85 Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan	<p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>a. Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) untuk tahapan onlinejadwal belum ada kepastian pelaksanaan, sehingga berpengaruh pada persiapan siswa dan daerah untuk melakukan pembinaan</p> <p>b. Penetapan sasaran Program Sekolah Penggerak yang berencana tidak meneruskan Program Sekolah Penggerak diantaranya: TK ada 3, SD ada 1, SMP ada 2</p> <p>c. Penggunaan BOP belum sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis)</p> <p>d. Banyaknya peserta didik kesetaraan yang tidak mengikuti ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer)</p> <p>e. Keterlambatan pengumpulan data persyaratan pencairan BBM, informasi admin BBM sering diabaikan, (S1, D4, D3) minim laporan kelulusannya, ganti nomor WA, tidak lapor pindah jurusan</p> <p>f. Terdapat kekurangan pembayaran Bantuan Sosial kepada guru dan tenaga kependidikan sekolah swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahap 1 Tahun 2022 sebanyak 2 orang</p>	<p><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p>a. Dinas Pendidikan membuat pola tersendiri dengan melakukan proses seleksi dan pembinaan yang akan menjadi wakil Wali Kota Madiun, walaupun pada Panduan KSN setiap sekolah berhak mengikuti secara serentak KSN online</p> <p>b. Program Sekolah Penggerak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan BBPMP Propinsi Jawa Timur dan Direktorat PAUD dan Pendidikan Dasar</li> <li>2. Mengusulkan sasaran Program Sekolah Penggerak pengganti ke Kemdikbudristek (bulan Januari)</li> </ol> <p>c. Melakukan sosialisasi pada lembaga tentang Juknis BOP PAUD</p> <p>d. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya ANBK pada penilaian rapor Pendidikan</p> <p>e. Memberikan sosialisasi yang intens kepada mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa (BBM)</p> <p>f. Telah diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.101/249/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400.401.101/161/2022 tentang Penerimaan Bantuan Sosial kepada Guru dan Tenaga Kependidikan sekolah swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahap 1 di Kota Madiun</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			Tahun 2022, dari dasar perubahan Keputusan Wali Kota tersebut telah bisa dicairkan kekurangan pembayaran bantuan sosial kepada 2 orang guru sekolah swasta pada Bulan Desember 2022
2.	Kesehatan	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>a. Pengumpulan Data: Cut off pelaporan SPM Bangda berbeda dengan SPM Kementerian Kesehatan, sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan angka yang terinput pada kedua aplikasi tersebut.</p> <p>b. Perencanaan dan Penganggaran: Penyerapan anggaran belum dapat maksimal, terkendala terlambatnya Surat Mapping Nomenklatur DAK dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga berdampak pada penyesuaian beberapa sub kegiatan SPM mengikuti nomenklatur sesuai SE.</p> <p>c. Perencanaan dan Penganggaran: Adanya perubahan Juknis DAK Non Fisik pada pertengahan tahun yaitu Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2022 pada 28 Juli 2022, dengan adanya menu tambahan Insentif UKM. Sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran dan terlambatnya proses penyerapan anggaran.</p> <p>d. Pelaksanaan: Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, kesulitan mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan oleh pusat terlalu tinggi (Target diperoleh dari Riskedas Tahun 2018 yang menggambarkan prevalensi Hipertensi di Kota Madiun cukup tinggi), tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> <p>e. Masih adanya prevelensi stunting</p> <p><b>RSUD</b></p> <p>a. Survey kepuasan masyarakat dan survey kepuasan karyawan tidak dilaksanakan</p> <p>b. Keterlambatan pembayaran klaim pelayanan dari BPJS dan Kemenkes</p> <p>c. Kebutuhan belanja melebihi anggaran / belanja yang belum direncanakan</p> <p>d. Pengiriman barang dari luar kota di tanggal akhir kontrak/keterlambatan</p>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b></p> <p>a. Menyertakan penjelasan dalam catatan apabila terdapat perbedaan angka yang terinput pada kedua aplikasi tersebut, melakukan perbaikan pelaporan SPM sesuai dengan hasil capaian SPM Tahun 2022.</p> <p>b. Melakukan penyerapan secara maksimal, melakukan follow up pada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terkait Mapping Nomenklatur DAK Fisik dan Non Fisik untuk Tahun Anggaran 2023.</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) TA 2023.</p> <p>d. Berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, terkait pengkajian penggunaan Data PIS PK sebagai Data Dasar Sasaran untuk Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2023 dan dituangkan ke dalam SK Wali Kota tentang Penetapan Jumlah Sasaran SPM Tahun 2023.</p> <p><b>RSUD</b></p> <p>a. Menggunakan hasil survey kepuasan masyarakat dari bagian organisasi</p> <p>b. Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan BPJS dan Kemenkes</p> <p>c. Disesuaikan dengan ketentuan BLUD dan melakukan Monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan Inspektorat dan BKAD dan Diklat in house training di RSUD dan secara daring/online</p> <p>d. Komunikasi lebih intensif dengan penyedia barang dan Pemberian denda keterlambatan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b></p> <p>a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tupoksi menjalankan kegiatan untuk mengurangi potensi banjir/genangan wilayah kota. Wilayah Kota Madiun dilintasi oleh sungai-sungai yang mana menjadi kewenangannya merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo. Pemeliharaan dan pembangunan saluran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo dikarenakan keterbatasan anggaran dan luasan wilayah maka pemeliharaan dan pembangunan saluran dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.</p> <p>b. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan Gedung apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Cipta Karya belum memiliki data total jumlah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Madiun;</li> <li>2. Bidang Cipta Karya tidak hanya mengerjakan pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun saja, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan/rehab bangunan milik instansi vertikal yang nantinya akan diserahterimakan melalui mekanisme hibah. Apakah ketika ini dilakukan, maka tidak dianggap sebagai suatu capaian kinerja,</li> </ol>	<p><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b></p> <p>a. Pemeliharaan dan pembangunan saluran ordo 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari BBWS Bengawan Solo dan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.</p> <p>b. Bidang cipta karya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target jumlah bangunan gedung tahun ini bersumber dari data realisasi tahun yang kemarin</li> <li>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap melaksanakan pembangunan/rehab bangunan walaupun bukan aset Kota Madiun</li> </ol> <p>c. Bidang cipta karya pengembangan jasa konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah tenaga kerja di Bidang Jasa Konstruksi juga menjadi perhatian khusus karena paling tidak harus sebanding dengan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi di Wilayah Kota Madiun dalam rangka terwujudnya hasil- hasil pembangunan di Kota Madiun secara lebih maksimal.</li> <li>2. Perubahan regulasi menyebabkan DPUPR tidak dapat melaksanakan pelatihan namun tetap koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP Jawa Timur terkait kebijakan untuk daerah kota. Sub klasifikasi jasa kontruksi baru fix di LSP akhir tahun 2022 sehingga pelatihan baru dapat dilaksanakan di tahun 2023</li> </ol> <p>d. Bidang cipta karya untuk penataan bangunan dan lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar penentuan lokasi pembangunan saluran mengakomodir dari usulan masyarakat dan pikir dewan</li> <li>2. Awalnya penyediaan kebutuhan air minum diampu oleh PDA dan limbah domestik oleh Dinas Perkim untuk Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang hanya melaksanakan monitoring kegiatan dan menyusun kebijakan air minum saja</li> <li>3. Pada Tahap pemenuhan dan permintaan pelaporan SPM ada beberapa data</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>mengingat aset yang dibangun/direhab bukan aset milik Pemerintah Kota Madiun.</p> <p>3. Pembangunan/rehab bangunan milik Pemerintah Kota Madiun bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR saja, akan tetapi juga kewenangan masing-masing OPD yang memiliki aset bangunan gedung. Sehingga untuk bangunan gedung yang bukan merupakan kewenangan Dinas PUPR akan kesulitan melakukan pemantauan/pendataan peningkatan kondisi bangunan gedungnya mengingat tenaga teknis yang terbatas.</p> <p>c. Bidang Cipta Karya untuk Sie Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>1. Perkembangan Jasa Konstruksi yang ada di Kota Madiun mengalami kondisi yang dinamis sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan agar keberadaannya tetap memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Madiun.</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun sudah maksimal namun perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penyampaian regulasi terbaru terkait perkembangan Jasa Konstruksi pada skala nasional.</p> <p>3. Adanya perubahan regulasi yang signifikan membuat daerah</p>	<p>yang mengakomodir data dari Dinas Kesehatan.</p> <p>e. Penetapan penyesuaian retribusi untuk persetujuan bangunan gedung (PBG) tetap menggunakan Perda IMB yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No:B.84/Seskab/Ekon/2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah masih boleh menggunakan Perda retribusi IMB sampai dengan Perda restribusi PBG yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini untuk layanan permohonan PBG/SLF masih menggunakan perhitungan berdasarkan Perda IMB.</p> <p>f. Proses persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN telah diproses dan masih menunggu surat persetujuan substansi dikeluarkan, untuk harmonisasi dengan Kanwil/Kemenkumham telah dijadwalkan rapat dengan Kanwil. Setelah surat persubs dan berita acara harmonisasi Kemenkumham didapatkan selanjutnya mengajukan surat rekomendasi Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>g. Pekerjaan pengadaan tanah masih menunggu ketersediaan dokumen KKPR</p>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>kesulitan beradaptasi dengan regulasi yang baru. Dengan demikian pada tahun ini tidak bisa melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi</p> <p>d. Bidang Cipta Karya untuk Sie Penataan Bangunan dan Lingkungan apabila tolok ukur kinerja berdasarkan jumlah Saluran Lingkungan di wilayah Kota Madiun, maka permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya database saluran lingkungan di wilayah Kota Madiun sehingga parameter pelaksanaan kegiatan belum ada;</li> <li>2. Pelaksanaan manajemen pengolahan limbah domestic yang masih tumpang tindih dengan OPD lain sehingga penentuan sasaran menjadi kendala;</li> <li>3. Penyediaan kebutuhan air minum sudah mencakup seluruh wilayah Kota Madiun dan kegiatan fisik sudah diserahkan pada PDAM sehingga tidak banyak kegiatan.</li> <li>4. Kegiatan penataan lingkungan bangunan masih menunggu ketetapan regulasi yang masih berproses</li> <li>5. Untuk penyusunan pelaporan SPM masih simpang siur dalam penggunaan data karena pelaksana SPM adalah dari PDAM dan Dinas Perkim sedangkan Dinkes juga mengeluarkan data terkait pelayanan dasar tersebut</li> </ol> <p>e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membidangin proses pelayanan untuk pengurusan PBG dan SLF, saat ini sedang dalam proses</p>	

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>penyusunan PERDA tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dimana adanya penyesuaian dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 114 (1a) bahwa “Retribusi perizinan tertentu terkait retribusi izin mendirikan bangunan diubah menjadi retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung”. Saat ini, raperda yang telah disusun sudah terverifikasi bagian hukum Provinsi Jawa timur, dan telah terverifikasi juga di Kemenkumham Wilayah Jawa Timur serta saat ini masih dalam proses verifikasi dalam Kementerian Keuangan.</p> <p>f. Belum ditetapkannya Perda tentang revisi rencana tata ruang wilayah Kota Madiun tahun 2023-2043 karena memerlukan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, harmonisasi dengan Kanwil, Kemenkumham, rekomendasi dari kementerian dalam negeri dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>g. Bidang Bina Marga pada tahun 2022 untuk Sub Kegiatan Pembangunan Jalan terdapat pekerjaan pengadaan tanah. Pekerjaan ini belum bisa dilaksanakan karena dokumen pengadaan tanah yang disusun pada tahun 2020 harus direvisi dan disesuaikan dengan permen atr yang terbaru dan saat ini masih dalam proses kkpr dengan badan pertanahan</p>	
4.	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Dalam sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni masih memerlukan data DTKS yang valid sehingga apabila diverifikasi lapang/validasi kondisi rumah</p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>yang diusulkan tidak masuk kriteria</p> <p>b. Kurangnya kompetensi SDM masyarakat dalam pelaksanaan penataan kampung tematik yang bersifat teknis dan swakelola sehingga menghambat progres pelaksanaan kegiatan</p> <p>c. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Madiun</p> <p>d. Masih terdapat permukiman kumuh di Kota Madiun (kumuh ringan)</p> <p>e. Terdapat rumah tinggal yang belum bersanitasi</p> <p>f. Belum optimalnya penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>g. Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>h. Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun</p> <p>i. Kecenderungan pertumbuhan investasi di Kota Madiun berdampak pada permintaan ijin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi</p> <p>j. Belum optimalnya sarana dan prasarana makam aset Pemerintah Kota Madiun</p>	<p>kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana</p> <p>b. Kompetensi SDM masyarakat harus benar-benar menguasai terutama dalam bidang teknis sehingga dari sisi administrasi maupun progress pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana</p> <p>c. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas</p> <p>d. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas</p> <p>e. Penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas</p> <p>f. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda &amp; Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>g. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda &amp; Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>h. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda &amp; Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>i. Mengoptimalkan legislasi daerah melalui Perda &amp; Perwal tentang tataran operasional urusan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>j. Mengoptimalkan sarana &amp; prasarana makam melalui peningkatan fasilitas</p>
5.	<p><b>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b></p>	<p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b></p> <p>a. Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kota Madiun</p> <p>b. Adanya lintasan kereta api yang melintasi jalan raya di kota Madiun, sehingga menimbulkan waktu response time rate kebakaran tidak tercapai apabila terjadi kebakaran di area utara wilayah Kota Madiun</p> <p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <p>a. Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>b. Perlu ditingkatkannya kemampuan/pengetahuan penanganan bencana untuk Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Madiun khususnya</p>	<p><b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b></p> <p>a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan patroli gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Madiun dan melaksanakan penertiban sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penertiban.</p> <p>b. Adanya Redkar Damkar ditiap-tiap kelurahan yang ikut membantu pemadaman ketika kebakaran.</p> <p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p> <p>a. Pengajuan penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>b. Dilaksanakannya Pelatihan/Mitigasi Penanggulangan Bencana</p>
6.	<p><b>Sosial</b></p>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>a. Penurunan indeks RB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,</p>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>a. Memenuhi data dukung di tahun berikutnya saat pengisian dengan Lembar Kerja Evaluasi</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>disebabkan karena ada beberapa indikator yang belum dapat terpenuhinya sebagian indikator dan data dukungannya</p> <p>b. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal</p>	<p>b. Perlunya pelatihan teknis terhadap Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan Sumber Daya Manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.</p>
7.	<b>Ketenagakerjaan</b>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b> Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 6,39 %, menurun dari tahun 2021 sebesar 8,15%. Namun angka TPT tahun 2022 walaupun menurun, namun masih cukup tinggi.</p>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b> Perlunya ditingkatkan kegiatan yang akan menurunkan angka TPT :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan Informasi Pasar Kerja, utamanya melalui aplikasi SICAHER, Bursa Kerja Khusus, dan Sosialisasi Informasi Pasar Kerja dll;</li> <li>2. Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi pencari kerja, sehingga lebih mudah untuk diterima di pasar kerja;</li> </ol>
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak</b>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG)</p>	<p><b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> Pengusulkan Peraturan Daerah dan Atau Peraturan Wali Kota tentang Pangarusutamaan Gender (PUG) serta menyusun Profil gender kerjasama dengan pihak ketiga</p>
9.	<b>Pangan</b>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>a. Indikator PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Prosentase Angka Kecukupan Energi) Realisasi hanya 97% karena Berdasarkan Susenas 2022, AKE bernilai 2036 kkal/kapita. Walaupun AKE Kota Madiun kurang dari standar, namun tingkat kecukupan energinya masih termasuk kategori normal. Menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012 kategori tingkat kecukupan gizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika AKE aktual &lt;70% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit berat</li> <li>2. jika AKE aktual 70-79% dari AKE standar, maka termasuk kategori deficit sedang</li> <li>3. jika AKE aktual 80-89% dari AKE standar, maka termasuk kategori defisit ringan</li> <li>4. jika AKE aktual 90-119% dari AKE standar, maka</li> </ol>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pola makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan promosi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam rangka membiasakan pola makan B2SA.</li> <li>b. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pola makan yang B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan promosi kepada masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan lainnya, serta kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam rangka membiasakan pola makan B2SA.</li> <li>c. Realisasi output sub kegiatan hanya 1 dokumen karena yg</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>termasuk kategori normal</p> <p>5. jika AKE aktual &gt;120% dari AKE standar, maka termasuk kategori melebihi kebutuhan</p> <p>b. Indikator Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Angka Kecukupan Energi)realisasinya hanya 2036 Kkal/per kapita</p> <p>c. Indikator Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Realisasi hanya 1 dokumen</p>	<p>dokumen SKPG, mulai 2022 dibuat oleh pusat</p>
10.	Pertanahan	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Kegiatan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Subkegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pemebrian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha Masalah : tidak terserapnya uang bantuan transportasi dalam rangka konsultasi publik kegiatan perubahan Perda Nompr 18 tahun 2019 tentang izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)</p> <p>b. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ Kota Subkegiatan : inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota Masalah : Jumlah narasumber yang dianggarkan dengan yang diundang rapat dalam kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa/ konflik pertanahan tidak sesuai sehingga menyebabkan anggaran belanja honorarium narasumber atau pebahas, moderator, pembawa acara dan panitia tidak terserap dengan sempurna</p> <p>c. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/ kota Subkegiatan : koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah Masalah : tidak terserapnya belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dalam sub kegiatan</p>	<p><b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b></p> <p>a. Kegiatan pemberian izin lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih detil lagi</li> <li>2. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan atasan langsung</li> </ol> <p>b. Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih detil</li> <li>2. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan atasan langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud</li> </ol> <p>c. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya, Perlu adanya perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang lebih detil</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah karena kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan tidak secara bersamaan	
11.	Lingkungan Hidup	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a. Kadar beban pencemar di badan air sungai yang sudah tinggi sebelum masuk ke badan air sungai wilayah Kota Madiun, sehingga saat dilakukan uji laboratorium pada sampel air badan air menunjukkan hasil yang melebihi baku mutu</p> <p>b. Kondisi TPA yang sudah hampir penuh</p>	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>a. Kader beban pencemaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monev pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo (utamanya di musim kemarau)</li> <li>2. Mendorong pembangunan pengolahan limbah komunal bagi masyarakat dan industri (kecil) yang berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya</li> <li>3. Sosialisasi bagi industri-industri agar memasang alat monitoring air limbah secara otomatis yang dibuang ke badan air</li> <li>4. Mensosialisasikan bagi industri-industri yang belum memiliki izin pembuangan air limbah yang dibuang ke badan sungai</li> <li>5. Berkoordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Timur terhadap permodelan tersebut sebagaimana Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo Nomor: 18/TKPSDAWSBS/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo</li> </ol> <p>b. Kondisi TPA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan TPST yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak swasta sehingga diharapkan pengurangannya bisa lebih dari 50%</li> <li>2. Membangun TPS 3R yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan mendorong masyarakat untuk membentuk KSM pengelola sampah di TPS 3R</li> <li>3. Menambah jumlah TPS 3R dan menambah jumlah tenaga pengolah sampah di TPS 3R</li> </ol>
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p> <p>a. Server database administrasi kependudukan dipusatkan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga lancar atau tidaknya jaringan database</p>	<p><b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b></p> <p>a. Selalu mengupdate informasi perihal kendala jaringan sehingga kendala bisa segera ditindaklanjuti apabila menemui kendala.</p> <p>b. Selalu mengupdate informasi terkait perubahan regulasi untuk segera melakukan tindak lanjut</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>di daerah juga bergantung pada server yang ada di pusat</p> <p>b. Regulasi tentang Administrasi Kependudukan yang selalu berubah-ubah</p> <p>c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya update data penduduk segera setelah terjadinya peristiwa kependudukan</p> <p>d. Kurangnya jumlah petugas pelayanan dengan status ASN sehingga alokasi anggaran banyak terserap untuk belanja jasa administrasi bagi petugas pelayanan dengan status non ASN</p> <p>e. Masih ada keluhan ataupun pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>f. Data penduduk hanya bisa disajikan sesuai dengan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dikirim dari pusat per semester</p> <p>g. Penyajian data penduduk dari pusat berdasarkan DKB hanya dalam beberapa jenis data penduduk, dan belum mencakup semua kebutuhan pelaporan kinerja OPD</p> <p>h. Capaian target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Perjanjian Kerjasama tidak bisa maksimal, karena dari 32 OPD yang ada di Kota Madiun, tidak semua memanfaatkan data kependudukan, ditambah lagi syarat pengguna data kependudukan harus sudah berstandar ISO 27001:2013 (Security Information Management System/ Sistem Manajemen Keamanan Informasi) yang membutuhkan alokasi anggaran</p> <p>i. Berdasarkan surat edaran LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E Purchasing katalog laptop produk dalam negeri hasil konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri secara nasional tahun anggaran 2022, Bahwa pengadaan perangkat computer dan laptop harus sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam surat edaran tersebut, padahal kebutuhan penyimpanan</p>	<p>c. Mengalokasikan anggaran dan menyusun kegiatan yang tepat sasaran untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya update data penduduk</p> <p>d. Mengusulkan kebutuhan ASN bidang pelayanan Administrasi Kependudukan kepada BKPSDM melalui peta jabatan</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan</p> <p>f. Bagi pengguna data kependudukan dianjurkan untuk menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan agar bisa mengakses data penduduk sesuai kebutuhan mereka</p> <p>g. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kinerja OPD harus melakukan hitung secara manual sehingga tidak ada jaminan validasi data</p> <p>h. Memaksimalkan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan dan syarat-syarat untuk bisa melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna</p> <p>i. Mengajukan permohonan khusus kepada bagian pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan rekomendasi/ ijin penggunaan produk impor untuk perangkat pengolahan dan penyimpanan database administrasi kependudukan.</p> <p>j. Lebih aktif memberikan sosialisasi dan pengarahan melalui Kelurahan dan media sosial agar penduduk yang memiliki identitas yang tidak sesuai dengan domisilinya (penduduk non permanen) untuk mendaftarkan identitas kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>k. Memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat dengan keterbatasan tersebut melalui pelayanan Gadjah Mada yaitu layanan perekaman KTP EL ke rumah-rumah bagi penduduk rentan yang belum rekam KTP EL dan mempunyai kendala/ halangan tetap</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>dan pengolahan database administrasi kependudukan membutuhkan spesifikasi khusus yang tidak terpenuhi oleh spesifikasi laptop dan computer sesuai surat edaran tersebut. Hal ini tentu saja akan berimbas pada waktu pemrosesan data menjadi lebih lambat.</p> <p>j. Ketidaksesuaian data Kependudukan dan eksistensi penduduk secara fisik</p> <p>k. Keterbatasan masyarakat dalam mengurus Dokumen Adminduk baik secara fisik, mental maupun berstatus orang terlantar</p>	
13.	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b> Terdapat 2 dari 12 Sasaran Penilaian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB yang tidak tercapai yaitu, Presentase Rumah Tangga Sehat dari target 70% tercapai 64,88% serta Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun belum memenuhi target dari 86,2 tercapai 86,02.</p>	<p><b>DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b> Pada indikator Tidak merokok terjadi peningkatan disebabkan adanya perubahan Definisi Operasional (DO) penilaian. Ini berarti ada penambahan anggota Rumah Tangga yang merokok. Sehingga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Bahaya Rokok. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se-Kota Madiun yaitu membuat usulan perluasan lahan parkir puskesmas, bagi puskesmas yang tidak memiliki kantin dapat bekerja sama dengan kantin terdekat di puskesmas, menata ulang pembagian tugas pada pegawai puskesmas.</p>
14.	<b>Perhubungan</b>	<p><b>DINAS PERHUBUNGAN</b> sektor pelayanan parkir tepi jalan umum. Pihak ketiga mengalami gagal prestasi untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan sebanyak 3 kali sehingga dilakukan pemutusan kontrak.</p>	<p><b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Solusi yang dilakukan sementara yaitu dengan dilakukan pengelolaan langsung dari Dinas Perhubungan sambil menunggu proses dilakukan lelang ulang untuk menentukan penyedia penggantinya.</p>
15.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> Penerapan SPBE yang belum optimal</p>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengelolaan data/dokumen proses tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Daerah</li> <li>Meningkatkan layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</li> <li>Memberikan akses jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Kota Madiun</li> <li>Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE</li> </ol>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Kurangnya Sosialisasi tentang Fasilitasi Permodalan bagi UMKM</p> <p>b. Masih kurangnya bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah.</p> <p>c. Masih rendahnya peluang yang diberikan bagi koperasi untuk berkompetisi dalam penyediaan barang dan jasa.</p> <p>d. Masih kurangnya fasilitas kerjasama KUMKM dengan pelaku usaha besar.</p> <p>e. Belum banyak tersedianya ruang Pamer Produk UMKM.</p> <p>f. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM</p>	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Madiun terkait dengan fasilitasi permodalan dengan bunga lunak, diantaranya yaitu kredit UMKM dari PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank Pemerintah dan Perguliran Dana Pinjaman PKBL (Program Kerja Bina Lingkungan) dari PT. INKA.</p> <p>b. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menyelenggarakan berbagai macam bimbingan manajemen kepada para pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD maupun bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui berbagai macam pelatihan diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan pembuatan makanan olahan</li> <li>2. Pelatihan pembuatan <i>handycraft</i></li> <li>3. Pelatihan batik tingkat lanjutan</li> <li>4. Pelatihan internet marketing</li> <li>5. Pelatihan manajerial</li> <li>6. Pelatihan kewirausahaan</li> </ol> <p>c. Beberapa koperasi sudah bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa perusahaan -perusahaan induknya antara lain, KOPINKA, Kopkar Siyvia Cendikia, Primkopad Yon 501, KPRI RSU Sudono, Kopkar RSI, Kopegtel, Koperasi Cahaya PLN, Koperasi Sejahtera PLN. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus melakukan upaya pembinaan dan pengarahan pada waktu pelatihan, sosialisasi maupun Rapat Anggota Koperasi untuk memperluas kegiatan usahanya diluar unit simpan pinjam seperti penyediaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan pendapatan dan SHU yang diterima oleh anggota sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan anggota.</p> <p>d. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah berupaya untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKM dengan pelaku usaha yang</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>berskala besar, yaitu menjalin kerjasama dengan Toko Modern dan Perhotelan diantaranya Carrefour, PT. INKA, Hotel Aston dan Hotel Merdeka. Disamping itu Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, yang juga mengatur masalah kemitraan antar KUMKM dengan pelaku usaha besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha.</p> <p>e. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengajukan permohonan bantuan CSR ke PT. INKA untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menjadi gedung pameran produk unggulan UMKM.</p> <p>f. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis</p>
17.	Penanaman modal	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Pelaksanaan kegiatan banyak ditentukan oleh variabel partisipasi kehadiran dari lintas program/lintas sektor, yaitu antar Bidang, perangkat daerah teknis, pelaku usaha serta himpunan pelaku usaha</p> <p>b. Beberapa pelaku usaha dengan KBLI tertentu tidak segera dapat memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ perundangan</p> <p>c. Pemenuhan kewajiban berusaha belum dievaluasi</p> <p>d. Perlu adanya pendekatan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat</p> <p>e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Baik itu Tenaga ASN dan Non ASN) di DPMPSTP sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal</p> <p>f. Belum adanya Mobil Keliling Perizinan untuk mendukung kegiatan SIAP KAKA (Pendampingan Sistem Pelayanan Perizinan ke Kelurahan) sehingga petugas masih harus perlu membawa dan menata peralatan yang dibawa saat kegiatan SIAP</p>	<p><b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b></p> <p>a. Dilakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi rutin dengan lintas program/lintas sector</p> <p>b. Dilaksanakan pendampingan pelayanan perizinan bekerja sama dengan perangkat dinas teknis</p> <p>c. Dilaksanakan penjadwalan evaluasi pemenuhan kewajiban berusaha bersama perangkat dinas teknis</p> <p>d. Dilaksanakan inovasi pelayanan berbantuan langsung pada masyarakat, yaitu SIAPKAKA</p> <p>e. Pengajuan Tenaga ASN dan non ASN sesuai Analisa Jabatan yang telah disusun.</p> <p>f. Pengajuan Mobil Keliling Perizinan</p> <p>g. Pengajuan untuk penyediaan tempat khusus menerima konsultasi dan pengelolaan pengaduan.</p> <p>h. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Transmigrasi</p> <p>i. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi:</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>KAKA (terutama Printer, Laptop, dan ATK).</p> <p>g. Belum adanya tempat khusus untuk menerima konsultasi dan pengelolaan pengaduan</p> <p>h. Kurangnya peminat Masyarakat Kota Madiun untuk menjadi Calon Transmigran</p> <p>i. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi Implementasi Perizinan/ Pengawasan Berusaha masih banyak peserta Pelaku Usaha/ Perusahaan yang diundang tidak datang (20%), sehingga kurang tersampaikan materi pokok pada pelaku usaha/ perusahaan dan pelaku usaha tidak memahami dan mengetahui hal yang penting untuk disampaikan dari BKPM, sehingga seringkali terjadi kesalahan/ permasalahan dalam input OSS atau pemilihan KBLI dan standarnya.</p> <p>j. Masih banyak Pelaku Usaha kurang memahami Sistem OSS RBA, dan pengurusan perizinannya, sehingga ada ketidaksesuaian/ permasalahan, dan juga kurang/ tidak memenuhi persyaratan dalam proses perizinannya serta kepatuhan laporan LKPMnya.</p> <p>k. Dengan adanya kemudahan berusaha, beberapa Pelaku Usaha cenderung melaksanakan operasional usahanya terlebih dahulu, meski belum memenuhi persyaratan dalam perizinan berusaha, bahkan ada yang belum berizin.</p> <p>1. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Madiun sebagai dokumen perencanaan penanaman modal memerlukan pembaharuan data dan <i>roadmap</i>.</p> <p>m. Peta investasi sebagai bentuk informasi penanaman modal telah disediakan oleh DPMPSTSP Kota Madiun pada tahun 2021, saat ini Peta Investasi memerlukan penambahan fitur dan informasi yang lebih lengkap.</p> <p>n. Promosi investasi masih dirasa kurang mengena kepada masyarakat</p>	<p>1. Intens melaksanakan sosialisasi ke Pelaku Usaha/ Perusahaan dengan publikasi melalui medsos, website, media televisi, banner dan baliho.</p> <p>2. Pendaftaran peserta untuk mengikuti sosialisasi/ pembinaan dengan flyer melalui medsos, wa group, website dan surat manual yang ditujukan ke Pelaku Usaha yang diundang.</p> <p>3. Fasilitasi forum penyelesaian permasalahan pada perusahaan yang bermasalah dengan Dinas Pengampu/ kewenangan Provinsi Jawa Timur sesuai sector usaha.</p> <p>j. pelaku usaha kurang memahami OSS</p> <p>1. Melaksanakan pengawasan dengan inspeksi/ visitasi/ kunjungan lapangan ke perusahaan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha mengenai Sistem OSS RBA, pemenuhan persyaratan usaha dan pelaporannya (LKPM).</p> <p>2. Menyediakan pelayanan perizinan dengan by WA Helpdesk, medsos, website dan meja manual (FO) di DPMPSTSP Kota Madiun.</p> <p>k. Pelaksanaan pengawasan dengan pembinaan kepada pelaku usaha dengan inspeksi lapangan/ visitasi lapangan sesuai sektor usaha oleh OPD Teknis/ DPMPSTSP Kota Madiun.</p> <p>1. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 44 tahun 2019 telah <i>update</i> sesuai dengan kondisi Kota Madiun saat ini dalam bentuk draft Perwal.</p> <p>m. Penambahan fitur dan informasi pada Peta Investasi</p> <p>n. Melaksanakan Promosi Investasi secara rutin melalui media elektronik dan non elektronik</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
18.	Kepemudaan dan Olah Raga	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b></p> <p>a. Kota Madiun memiliki banyak atlet yang potensial untuk dikembangkan bakat dan minat olahraganya untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi dikarenakan untuk pembinaan dan pelatihan kepada para atlet belum terlalu optimal, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan agar lebih mengasah keahliannya agar lebih bisa berprestasi baik tingkat provinsi, regional maupun nasional;</p> <p>b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan</p> <p>c. Belum optimalnya pelatihan dan pembinaan atlet</p>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b></p> <p>a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun memfasilitasi para atlet dengan melengkapi sarana prasarana olahraga secara bertahap pada setiap cabang olahraga serta memberikan sarana prasarana akomodasi bagi para atlet yang akan bertanding tingkat provinsi, regional maupun nasional;</p> <p>b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan</p>
19.	Statistik	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;</p> <p>2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;</p> <p>4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah</p>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan BPS dalam penyediaan data statistik daerah;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang terstruktur dengan seluruh Perangkat Daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data statistik daerah, sehingga tercipta data terbuka pemerintah;</p> <p>3. Melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kewenangan urusan statistik.</p>
20.	Persandian	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;</p> <p>2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;</p> <p>3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;</p> <p>4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah</p>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p>1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Persandian;</p> <p>2. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam bidang persandian.</p>
21.	Kebudayaan	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b></p> <p>a. Kota Madiun memiliki kurang lebih ada 146 benda/bangunan yang diduga cagar budaya, namun benda/bangunan tersebut ada kendala dalam pelestarian dan penjagaannya dikarenakan masih menunggu proses ketetapan Kepala Daerah untuk benda/bangunan tersebut menjadi cagar budaya yang dipelihara dan dirawat oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga belum optimal dalam pemeliharaan cagar budaya yang</p>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b></p> <p>a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya terutama Masjid dan Makam Kuncen serta Masjid dan Makam Taman agar lebih terawat dan menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya serta berusaha untuk melakukan penelitian keabsahan benda/bangunan yang diduga cagar budaya yang masih tersisa untuk ditetapkan sebagai</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>ada di Kota Madiun yang bisa lebih menarik wisatawan</p> <p>b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan</p>	<p>benda/bangunan cagar budaya yang bisa dilestarikan.</p> <p>b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan</p>
22.	Perpustakaan	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>Pada Bidang Perpustakaan: ruang layanan perpustakaan pada Perpustakaan Umum Daerah belum cukup menampung kapasitas jumlah pengunjung perpustakaan.</p>	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>Direncanakan pada tahun 2024 akan dilaksanakan perluasan gedung layanan perpustakaan melalui dana DAK yang saat ini dalam proses pengajuan Perpustakaan Nasional.</p>
23.	Kearsipan	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>Pada Bidang Kearsipan: Depo Arsip di Lembaga Kearsipan belum sesuai standart kearsipan dan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagian besar belum memiliki Record Center/tempat penyimpanan Arsip In Aktif</p>	<p><b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b></p> <p>Memanfaatkan ruang kelas eks SMP 2 Kota Madiun untuk Depo Arsip</p>
24.	Kelautan dan Perikanan	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>Meningkatnya akses layanan permodalan peternakan dan perikanan</p>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p>Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Pembinaan serta pengembangan perikanan budidaya</p>
25.	Pariwisata	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA</b></p> <p>a. Kota Madiun telah memiliki banyak obyek wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Kota Madiun, sehingga diperlukan promosi kepariwisataan terutama di dalam Kota Madiun yang mampu menarik minat wisatawan luar kota untuk berkunjung ke Kota Madiun. Sehingga yang harus dilakukan adalah meningkat dan menimbulkan ketertarikan yang besar baik bagi masyarakat Kota Madiun sendiri maupun di luar Kota Madiun dengan menghadirkan destinasi wisata yang baru dan menarik.</p> <p>b. Perencanaan penyusunan Rencana Anggaran Kas belum sesuai pelaksanaan</p> <p>c. Kurangnya SDM dalam mengkoordinir data usaha industri pariwisata</p>	<p><b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHA RAGA</b></p> <p>a. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun menyelenggarakan even promosi di dalam Kota Madiun</p> <p>b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas akan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan</p> <p>c. Mengaktifkan tenaga yang ada semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kepariwisataan</p>
26.	Pertanian	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p><b>Bidang Pertanian</b></p> <p>a. Sasaran OPD (Meningkatnya Kesejahteraan Petani) dengan indikator 1.) Peningkatan produktivitas pertanian (ton/ha), Realisasinya hanya 6,35 ton/ha</p> <p>b. Sasaran OPD (Meningkatnya Kesejahteraan Petani) dengan indikator 2.) Rasio</p>	<p><b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b></p> <p><b>Bidang Pertanian</b></p> <p>a. Produktivitas padi tidak mencapai target (6,35 ton/ha) dikarenakan adanya serangan hama pada musim tanam kedua dan telah dilakukan upaya klaim AUTP seluas 103,99 hektar</p> <p>b. Rasio pendapatan petani tidak mencapai target (1,12%) dikarenakan biaya produksi yang membengkak</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>pendapatan petani dengan biaya produksi, Realisasinya 1,10%</p> <p>c. Indikator Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten) Realisasinya hanya 1 jenis</p> <p><b>Bidang Peternakan</b></p> <p>a. Meningkatkan produksi, pengawasan produk peternakan</p> <p>b. Meningkatkan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan</p> <p>c. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular</p> <p>d. Meningkatkan pengawasan pemotongan ternak sapi betina produktif dan pengeluaran ternak betina produktif keluar daerah</p> <p>e. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna</p>	<p>dengan keluarnya biaya tambahan untuk penanggulangan hama wereng dan kerdil rumput, sehingga menyebabkan gagal panen</p> <p>c. Karena 1 jenis ijin sertifikasi beras prima baru dikeluarkan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) di bulan Nopember 2022, sedangkan 1 jenis ijin edar baru bisa diproses setelah sertifikasi keluar dan tidak cukup waktu, sehingga berpengaruh terhadap output realisasi sub kegiatan</p> <p><b>Bidang Peternakan</b></p> <p>a. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna</p> <p>b. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna</p> <p>c. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular hewan peliharaan</p> <p>d. Kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>e. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dan Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Penyuluhan kualitas gizi pakan ternak</p>
27.	<b>Perdagangan</b>	<p><b>DINAS PERDAGANGAN</b></p> <p>a. Belum optimalnya sarana prasarana pasar rakyat</p> <p>b. Sistem pengelolaan masih bersifat manual</p>	<p><b>DINAS PERDAGANGAN</b></p> <p>a. Melakukan revitalisasi pasar rakyat dan pemeliharaan sarana prasarana pasar rakyat</p> <p>b. Melakukan digitalisasi pengelolaan perdagangan contohnya portal parkir pasar, SIM Pasar, E-Retribusi</p>
28.	<b>Perindustrian</b>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b></p> <p>a. Permasalahan yang sampai saat ini dihadapi adalah merubah sebagian mindset pengusaha untuk melakukan inovasi usaha sesuai perkembangan.</p> <p>b. Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, KUKM</p>	<p><b>DINAS TENAGA KERJA</b></p> <p>a. Adapun solusi saat ini memberikan pemberdayaan, pembinaan serta melakukan promosi guna mengembangkan mindset pengusaha.</p> <p>b. Pengusulan personil kepada BKPSDM dan pengusulan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat teknis</p>
30.	<b>Unsur Staf</b>	<p><b>BAGIAN HUKUM</b></p> <p>a. Kurangnya tenaga penyusun pembentukan produk hukum</p> <p>b. OPD pemrakarsa kurang menguasai substansi/materi raperda yang diusulkan</p> <p>c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan</p>	<p><b>BAGIAN HUKUM</b></p> <p>a. Ada Mengajukan usulan penambahan pegawai kepada BKPSDM serta memaksimalkan potensi SDM Legal Drafter yang sudah</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait</p> <p>c. Menyusun RKA sesuai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan</p> <p>d. Mengajukan usulan</p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>pembinaan/penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat</p> <p>d. Kurangnya tenaga publikasi produk hukum</p> <p><b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b></p> <p>a. Kurang akuratnya data dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan</p> <p>b. Kurang tertibnya administrasi kecamatan dan kelurahan</p> <p><b>BAGIAN ORGANISASI</b></p> <p>a. Terdapat dinamisasi regulasi sehingga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran</p> <p>b. Terdapat kesalahan kode rekening dalam penganggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan</p> <p>c. Dinamisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan dan standarisasi jabatan sehingga perlu adanya penyesuaian</p> <p>d. Terbatasnya SDM tentang ISO</p> <p>e. Dinamisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Zona Integritas sehingga perlu adanya penyesuaian dan upaya tindak lanjut di daerah</p> <p><b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b></p> <p>Jumlah personil Fungsional PBJ yang belum memenuhi kriteria kebutuhan LKPP dan MCP KPK.</p> <p><b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b></p> <p>a. Penanganan yang berpengaruh terhadap dokumen saku dan kesulitan penerapan saku</p> <p>b. Belum tersedia data penerima bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat</p> <p>c. Belum tersedianya aturan (SOP) yang mengatur dalam hal pembinaan BUMD</p> <p>d. Aturan Pemerintah Pusat yang Sangat Dinamis sehingga membutuhkan Penyesuaian</p> <p><b>BAGIAN UMUM</b></p>	<p>penambahan pegawai kepada BKPSDM serta memaksimalkan potensi SDM yang sudah ada</p> <p><b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b></p> <p>a. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait, dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan melalui Bimtek Administrasi Kecamatan dan Kelurahan</p> <p><b>BAGIAN ORGANISASI</b></p> <p>a. Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Telah dilakukan pergeseran anggaran untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN menjadi kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan upaya tindak lanjut terhadap perubahan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Melakukan Bimbingan Teknis Auditor Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan</p> <p>e. Melakukan koordinasi dan upaya tindak lanjut terhadap perubahan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b></p> <p>Mengoptimalkan pegawai untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan UKPBJ dan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk pemenuhan kebutuhan pegawai.</p> <p><b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b></p> <p>a. Penganggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan</p> <p>b. Optimalisasi data penerimaan bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat</p> <p>c. Optimalisasi dalam pembuatan Peraturan Wali Kota dan SOP yang mengatur Pembinaan BUMD</p> <p>d. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</p> <p><b>BAGIAN UMUM</b></p>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya koordinasi dalam menginformasikan rencana kegiatan di masing-masing sub bagian</li> <li>b. Perubahan status ASN Setda yang tidak diinformasikan ke bagian Umum sehingga mempengaruhi updating data kepegawaian</li> <li>c. Kurang tepatnya penganggaran untuk perjalanan dinas</li> <li>d. Ketidakhahaman pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarpras, bangunan gedung dan kendaraan dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan Sharing dengan OPD yang lebih kompeten</li> <li>b. Koordinasi dengan bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun agar segera melaporkan dinamika kepegawaian masing-masing bagian</li> <li>c. Perencanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan aturan terbaru dan menyesuaikan dengan kegiatan pimpinan</li> <li>d. Pembinaan rutin pegawai terkait dengan tugas dan tanggung jawab pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan</li> </ul>
31.	<p><b>Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD</b></p>	<p><b>PELAYANAN LEGISLATIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal, dalam memenuhi kebutuhan dalam Peta Jabatan, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja;</li> <li>b. Sarana dan prasarana belum terpelihara dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal;</li> <li>c. Tingginya tuntutan pelayanan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dimana tuntutan pelayanan tersebut kadang kala di luar ketentuan;</li> <li>d. Padatnya kegiatan kedewanan sehingga agenda yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana secara optimal;</li> </ul>	<p><b>PELAYANAN LEGISLATIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM aparatur sekretariat DPRD belum optimal <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusulan penambahan SDM ASN terampil melalui pengajuan permohonan ke BKPSDM untuk pengadaan Staf ASN, terutama pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi untuk memudahkan aktivitas yang menunjang kinerja Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun (aplikasi e-kinerja, M-SKP, SIPKD) maupun Instansi Pemerintah lainnya (SIPD, SIK, SIMDA BMD, e-LHKPN, e-LHK ASN, e-SAKIP, e-Monev); Adapun aplikasi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD antara lain e-pengaduan, e- aspirasi Rakyat, e-notulen, dan e-inisiatif;</li> <li>3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD, melalui pelatihan formal dan informal yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD maupun Instansi Lainnya. Contoh pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD yaitu pelatihan notulis, pelatihan MC, pembinaan SDM, pelatihan pembuatan Laporan dan pertanggungjawaban. Contoh lainnya adalah pelatihan yang</li> </ul> </li> </ul>



No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>diselenggarakan oleh selain Sekretariat DPRD yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM maupun yang dilaksanakan di luar Pemerintah Kota Madiun</p> <p>b. Sarana Prasarana belum terpelihara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana secara optimal.</li> <li>2. Dilaksanakan pelatihan bagi seluruh operator peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD agar seluruh staf bisa mengoperasikan sarpras dengan baik dan benar;</li> </ol> <p>c. Tingginya tuntutan pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, kemudian menerapkannya.</li> <li>2. Memberikan pemahaman kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentang Standart Pelayanan yang sesuai aturan melalui Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;</li> </ol> <p>d. Padatnya kegiatan kedewanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antara Pimpinan dan anggota DPRD serta Eksekutif terkait penjadwalan kegiatan DPRD;</li> <li>2. Penjadwalan kegiatan DPRD dilakukan lebih cermat dan tepat supaya dapat dilaksanakan secara optimal;</li> </ol>
32.	<b>Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	<p><b>INSPEKTORAT</b></p> <p>Inspektorat tahun 2022 pindah kantor menempati ex Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Madiun di Jln. Dr. Soetomo 82 Madiun. Dari ruangan yang semula untuk kamar tidur dan ruang rapat, maka ketika kemudian dijadikan Ruang Kerja perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian.</p>	<p><b>INSPEKTORAT</b></p> <p>Agar dapat berdayaguna maka kami lakukan penyesuaian dengan pengadaan meja kursi baru yang kompatibel dan praktis sehingga dapat menampung karyawan-karyawati Inspektorat.</p>
33.	<b>Perencanaan</b>	<p><b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kolaborasi antar OPD belum tercipta dengan baik</li> <li>b. Belum semua Perangkat Daerah berperan serta secara optimal</li> </ol>	<p><b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan sistem aplikasi monev smart city</li> <li>b. Meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap OPD akan arti pentingnya Satu Data</li> </ol>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pencarian data RPJMD kurang cepat dan akurat</li> <li>d. Belum seluruh Perangkat Daerah dapat mengoperasikan ESAKIP dengan baik</li> <li>e. Kurang optimalnya penyusunan data yang cepat dan akurat</li> <li>f. masih perlu peningkatan koordinasi dengan tim penyusun, supaya data lebih didapat dengan cepat dan akurat</li> <li>g. SDM perencana masih belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan teknis sebagai perencana yang terstandar</li> <li>h. Faktor eksternal yang mempengaruhi/menghambat Pelaksanaan program/kegiatan</li> <li>i. terdapat masalah ketika memberikan bukti data dukung (teknis pemberian bukti data dukung kurang optimal)</li> <li>j. perlunya sosialisasi kepada perangkat daerah, agar SDM Operator dapat menjalankan dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengembangan aplikasi pencarian data perencanaan pembangunan</li> <li>d. peningkatan kualitas bintek E-SAKIP kepada perangkat daerah dan mengembangkan interface aplikasi ESAKIP agar lebih mudah digunakan</li> <li>e. peningkatan kualitas sosialisasi dan bintek perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan ESAKIP terintegrasi</li> <li>f. peningkatan kualitas koordinasi dan pengembangan sistem manajemen kinerja</li> <li>g. peningkatan kualitas bimbingan teknis terhadap perencana</li> <li>h. peningkatan kualitas kolaborasi antar pelaksanaan program/kegiatan dan Mempertahankan capaian kinerja yang ada</li> <li>i. Membangun aplikasi Reformasi Birokrasi dalam penilaian LKE implementasi RB</li> <li>j. Melakukan peningkatan kualitas bimbingan teknis pengisian aplikasi</li> </ul>
34.	Keuangan	<p><b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minimnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu</li> <li>b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial</li> <li>c. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah</li> </ul> <p><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sumber daya manusia/personil PNS serta kuantitas petugas pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>b. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang Perpajakan Daerah</li> <li>c. Belum optimalnya penggalan potensi terhadap pajak daerah</li> <li>d. Kurangnya akurasi data pajak daerah</li> </ul>	<p><b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pengendalian internal yang lebih baik, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Perangkat Daerah terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian</li> <li>b. Melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait dengan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial terhadap pihak terkait sehingga menghasilkan suatu kesepakatan dan pemahaman yang sama</li> <li>c. Sering melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah sehingga menghasilkan pengelolaan barang milik daerah yang optimal dan tepat sasaran</li> </ul> <p><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penambahan sumber daya manusia/personil PNS serta pengembangan kuantitas petugas pengelolaan Pajak Daerah</li> <li>b. Melaksanakan Sosialisasi secara masif keseluruh lapisan elemen masyarakat terkait pemahaman wajib pajak tentang Perpajakan Daerah</li> </ul>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
			<p>c. Pengoptimalan dalam penggalan/pendataan potensi-potensi Wajib Pajak Daerah baru</p> <p>d. Melakukan Updating data wajib pajak daerah minimal setiap semester dan maksimal setiap 1 tahun</p>
35.	Kepegawaian	<p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA</b></p> <p>a. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan, distribusi ASN belum sesuai peta jabatan</p> <p>b. Belum terwujudnya data pegawai yang komprehensif</p>	<p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA</b></p> <p>a. Penerapan sistem remunerasi secara online, Adanya SKJ untuk semua jenis jabatan, dan Pengadaan CPNS dan PPPK</p> <p>b. Integrasi Aplikasi SKP, Absensi, Capaian Kinerja dan Administrasi Kepegawaian</p>
36.	Pendidikan dan Pelatihan	<p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA</b></p> <p>Pengembangan kompetensi ASN belum optimal</p>	<p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA</b></p> <p>Diadakan Diklat atau Bimtek peningkatan kompetensi untuk semua jenis jabatan</p>
37.	Penelitian dan Pengembangan	<p><b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b></p> <p>a. Impelementasi kajian belum diupayakan secara optimal</p> <p>b. Kurangnya dukungan Organisasi terhadap pelaksanaan inovasi</p>	<p><b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b></p> <p>a. Peningkatan Upaya / mendorong dalam pengimplementasian hasil kajian</p> <p>b. Meningkatkan kualitas sosialisasi terhadap pentingnya inovasi</p>
37.	Kesatuan Bangsa & Politik	<p><b>Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b></p> <p>a. Menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air di masyarakat khususnya pelajar dan generasi muda.</p> <p>b. Dengan adanya 14 Perguruan Pencak Silat dan 24 suku di Kota Madiun yang rentan menimbulkan konflik sosial di masyarakat</p> <p>c. Mendukung peran Partai Politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilih Kepala Daerah Tahun 2024</p> <p>d. Mendorong organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan</p> <p>e. Meningkatkan koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi</p> <p>f. Meningkatkan koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama</p> <p>g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dan komunikasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba</p>	<p><b>Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</b></p> <p>a. Diadakannya Sosialisasi Ideologi Wasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap 14 perguruan Pencak Silat</p> <p>c. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol dan pendidikan politik kepada Masyarakat</p> <p>d. Pembinaan Pengurus dan anggota Orkemas</p> <p>e. Koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>f. FKUB</p> <p>g. Pembinaan dan sosialisasi Narkoba</p>
38.	Kecamatan	<b>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</b>	<b>PENYELENGGARAAN KECAMATAN</b>

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>a. SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang masih belum memadai</p> <p>b. Kurang memadainya sarana dan prasarana kelurahan</p> <p>c. Salah satu sasaran strategis tidak tercapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dimana target pada tahun 2022 yaitu 3,30 skor, sedangkan realisasi yaitu 3,27 skor.</p> <p>d. Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan prima kepada Pemerintah</p> <p>e. Sarana dan prasarana kelurahan kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat</p> <p>f. Terbatasnya kualitas SDM di kecamatan dan kelurahan.</p> <p>g. Kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang optimal</p> <p>h. Menurunnya semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan sebagai akibat berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan</p> <p>i. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan jadwal kegiatan dengan instansi terkait yang berpengaruh terhadap serapan anggaran</p> <p>j. Adanya aturan baru terkait kebutuhan belanja barang yang berpengaruh terhadap serapan anggaran</p>	<p>a. Diperlukan diklat dan sosialisasi guna meningkatkan kualitas SDM kelurahan</p> <p>b. Mengusulkan dilaksanakannya pengadaan BMD</p> <p>c. Diadakan pembenahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media online dan perbaikan sarana prasarana yang menunjang pelayanan</p> <p>d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public</p> <p>e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas pegawai untuk mengikuti diklat dan pelatihan</p> <p>g. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan serta mengadakan kegiatan pelatihan / bimtek pelayanan publik.</p> <p>h. Meningkatkan Rapat Koordinasi Lintas Sektorial bersama Tiga Pilar dengan mengundang Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Pencak silat, Masyarakat Kurang beruntung dan lain-lain</p> <p>i. Penetapan jadwal ulang pada saat perubahan anggaran</p> <p>j. Pengadaan barang disesuaikan spek yang telah diatur oleh pemerintah</p>
39.	BUMD	<p><b>PENGELOLAAN BUMD PDAM</b></p> <p>a. Semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan karena tingkat pelayanan pada akhir tahun 2022 telah mencapai lebih dari 96,10 %, hampir mencapai titik jenuh karena telah mendekati 100 %. Kondisi Kota Madiun yang sangat mudah mengambil air tanah membuat sebagian besar masyarakat menggunakan sumur dangkal sebagai alternative dalam mendapatkan air bersih. Sehingga semakin berat untuk mendapatkan pelanggan baru.</p> <p>b. Tingginya koefisien jam puncak (c=2,5). Koefisien jam puncak menunjukkan meningkatnya</p>	<p><b>PENGELOLAAN BUMD PDAM</b></p> <p>a. Solusi untuk mengatasi semakin sulitnya menambah jumlah pelanggan yaitu:</p> <p>b. Bekerjasama dengan pengembang perumahan (developer) untuk pemasangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah baru.</p> <p>c. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya air bersih bagi kesehatan kepada masyarakat kota Madiun.</p> <p>d. Mengadakan program pasang baru gratis.</p> <p>e. Disamping dengan membangun sumur baru yang diharapkan bisa menambah kapasitas produksi, PDAM Melaksanakan rehabilitasi</p>

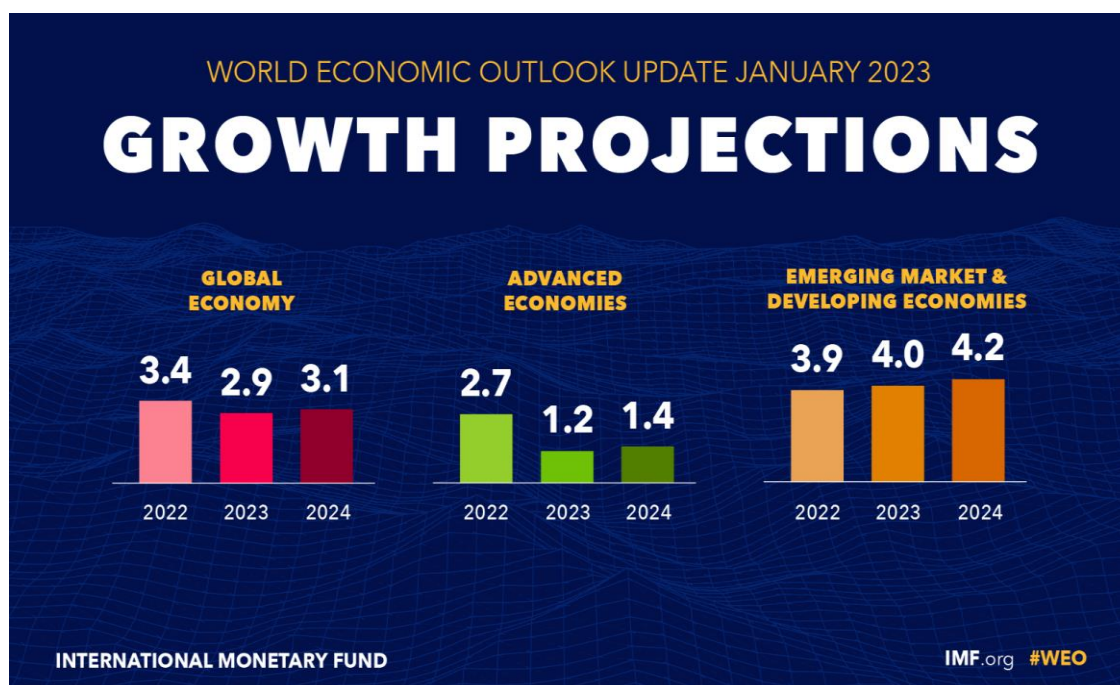
No	Bidang Urusan	Permasalahan	Solusi
		<p>pemakaian air pada saat jam puncak hingga mencapai 2,5 kali rata-rata pemakaian air. Hal ini mengakibatkan berkurangnya tekanan air pada saat jam puncak walaupun kedua reservoir sudah dioptimalkan, sehingga pada saat jam puncak akan mengalami sedikit penurunan tekanan air terutama di daerah kritis.</p> <p><b>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</b></p> <p>a. Jaringan kantor seperti Kantor Cabang sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan kepada pelayanan, dan memperluas daerah operasional BPR, selama ini kantor Operasional yang dimiliki adalah 1 (Satu) Kantor Pusat, dan 8 (Delapan) Kantor Kas semua di Kota Madiun belum memiliki Kantor Cabang.</p> <p>b. SDM adalah merupakan pilar utama dalam menjaga eksistensi suatu BPR untuk bisa terus tumbuh dan eksis dalam industri perbankan, peran SDM sangat besar dalam rangka pencapaian perusahaan.</p> <p>c. Banyaknya kompetitor sebagai pesaing seperti Bank Umum yang membiayai untuk pangsa pasar BPR, sama-sama BPR, Lembaga Keuangan NonBank seperti Koperasi, Danamon KSP, Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Keuangan, begitu pula lembaga tidak resmi seperti ijon, rentenir.</p> <p><b>PD. ANEKA USAHA</b></p> <p>a. Bidang SDM Perilaku pegawai dalam pelayanan kepada konsumen belum maksimal, kedisiplinan dan ketrampilan pegawai masih rendah</p> <p>b. Bidang Manajemen Sistem pelaporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku</p> <p>c. Bidang Sarana dan Prasarana/Peralatan Bangunan bekas cucian mobil belum dimanfaatkan.</p>	<p>jaringan pipa distribusi untuk meningkatkan debit air sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi setiap saat.</p> <p><b>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Daerah Kota Madiun</b></p> <p>a. Meningkatkan kepuasan kepada customer dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan nasabah dengan sistem tangkap bola.</p> <p>b. Meningkatkan pemasaran / promosi BPR baik dengan penyebaran dan pengenalan langsung oleh petugas kepada sasaran masyarakat yang potensial, guna meningkatkan Image/ Citra BPR lebih baik lagi, juga memiliki Edukasi / Literasi Keuangan.</p> <p>c. Memberikan imbalan suku bunga yang memadai sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam produk Tabungan dan Deposito.</p> <p>d. Mengupayakan untuk Ekspansi jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang baru.</p> <p>e. Inovasi dan pengembangan produk baru.</p> <p>f. Mengupayakan penurunan NPL (NonPerforming Loan) dengan berbagai cara seperti melakukan pengeplangan agunan, pelelangan agunan melalui KPKNL dan melakukan gugatan ke pengadilan</p> <p><b>PD. ANEKA USAHA</b></p> <p>a. Telah dilakukan pelatihan kedisiplinan pegawai melalui pembinaan, pelatihan akuntansi guna penyempurnaan sistem pelaporan, pelatihan perpajakan dan pelatihan-pelatihan lain yang dapat mendukung peningkatan kedisiplinan pegawai;</p> <p>b. Memotivasi kepada pegawai SPBU untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada konsumen;</p> <p>c. Telah dilakukan penggantian mesin dispenser untuk menjamin kualitas dan ketepatan takaran BBM;</p> <p>d. Segera diupayakan pemanfaatan lokasi bekas cucian mobil dengan menggandeng pihak ketiga agar dapat memberi manfaat dan menambah pendapatan Perumda Aneka Usaha</p>

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun dari perkiraan 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 3,1% pada tahun 2024. Proyeksi tahun 2023 adalah 0,2% lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam World Economic Outlook (WEO) Oktober 2022, tetapi di bawah rata-rata historis (tahun 2000-2019) sebesar 3,8%. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga bank sentral untuk memerangi inflasi dan perang Rusia di Ukraina yang terus membebani aktivitas ekonomi serta penyebaran Covid-19 yang cepat di Tiongkok telah mengurangi pertumbuhan pada tahun 2022, namun di sisi pencabutan kebijakan pembatasan sosial baru-baru ini telah mendorong pemulihan yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dua faktor utama akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pemulihan bertahap dari dampak perang di Ukraina dan meredanya inflasi.

Berdasarkan tren permintaan global, pertumbuhan perdagangan dunia diperkirakan akan menurun pada tahun 2023 menjadi 2,4% dan naik menjadi 3,4% pada tahun 2024. Perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, termasuk harga bahan bakar dan komoditas non-bahan bakar, yang secara umum telah direvisi turun sejak bulan Oktober, serta suku bunga yang telah direvisi naik. Pada tahun 2023, harga minyak diproyeksikan turun sekitar 16%, sementara harga komoditas non-bahan bakar diperkirakan turun rata-rata 6,3%. Asumsi suku bunga global direvisi naik, mencerminkan pengetatan kebijakan yang semakin intensif sejak bulan Oktober. Sedangkan inflasi global diperkirakan akan turun dari 8,8% pada tahun 2022 menjadi 6,6% pada tahun 2023 dan 4,3% pada tahun 2024, masih di atas tingkat sebelum pandemi (tahun 2017-2019) yaitu sekitar 3,5%.



Sumber: IMF, 2023

**Gambar 3.1**  
**Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2022 – 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.1 diatas, ada negara maju, pertumbuhan diproyeksikan menurun tajam dari 2,7% pada tahun 2022 menjadi 1,2% pada tahun 2023 sebelum naik menjadi 1,4% pada tahun 2024, dengan revisi ke bawah sebesar 0,2 poin%tase untuk tahun 2024. Sekitar 90% negara maju diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2023. Sedangkan untuk negara berkembang dan, pertumbuhan diproyeksikan meningkat secara moderat, dari 3,9% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2023 dan 4,2% pada tahun 2024, dengan revisi ke atas sebesar 0,3 poin untuk tahun 2023 dan revisi ke bawah sebesar 0,1 poin untuk tahun 2024. Sekitar setengah dari pasar negara berkembang dan negara berkembang memiliki pertumbuhan yang lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

**Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2024**

	IMF	WB	OECD
World Output	3.1	2.7	2.7
Advanced Economies	1.4	1.6	-
United States	1	1.6	1
Euro Area	1.6	1.6	1.4
Japan	0.9	0.7	0.9
Emerging Market and Developing Economies	4.2	4.1	-
China	4.5	5	4.1
Indonesia	5.1	4.9	5.1
Russia	2.1	1.6	-0.2
Brazil	1.5	2	1.4
Saudi Arabia	3.4	2.3	3.5
South Africa	1.3	1.8	1.6

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2023, OECD Economic Outlook November 2022, Global Economic Prospects January 2023

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.1 diatas, Ekonomi Indonesia masih diperkirakan dapat tumbuh tinggi di tahun 2024. Proyeksi ekonomi tahun 2024 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Negara-negara berkembang menghadapi periode pertumbuhan yang lambat selama beberapa tahun yang disebabkan oleh beban utang yang besar dan investasi yang lemah karena modal global diserap oleh negara-negara maju.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Namun di samping itu, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan global seperti gangguan rantai pasok, krisis energi, normalisasi suku bunga, perkembangan varian baru Covid-19, dan *China switching policy*.

Berbagai tantangan diatas menyebabkan kondisi perekonomian penuh dengan ketidakpastian namun dengan kecenderungan yang diproyeksikan meningkat. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka proyeksi asumsi makro tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2023-2024**

Indikator	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i> )	5,0 - 5,3	5,3 - 5,7
Inflasi (% <i>, yoy</i> )	2,0 - 4,0	1,5 - 3,5
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	7,34 - 9,16	6,5 - 7,4
Nilai Tukar (Rp/ US\$)	14.300 - 14.800	14.800 - 15.400
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	80 - 100	75 - 85
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	619 - 680	592 - 651
Lifting Gas (BOE/hari)	1.020 - 1.116	1.007 - 1.058

Sumber: Kemenkeu, 2023

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.2 diatas, secara umum indikator makro ekonomi pada *outlook* tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada saat Covid-19 tahun 2020. Laju inflasi relatif menurun pada tahun 2024 sekitar 1,5 - 3,5. Kemudian, nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.800 hingga Rp15.400 per USD pada tahun 2024. Sedangkan harga



minyak mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 80 – 100 USD per barel menjadi 75 – 85 USD per barel.

Outlook pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa secara umum indikator makro ekonomi mulai menunjukkan perbaikan setelah Covid-19. Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya menggiatkan kinerja perekonomian Indonesia agar dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama multilateral yang kuat untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk membantu negara-negara yang mengalami kendala finansial/pendanaan, dan penyaluran bantuan ke negara-negara dengan kondisi kesehatan yang lemah. Selain kerjasama multilateral, stimulus dalam mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat, tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian. Efek scars krisis Covid-19 ini sebagian besar mengena sisi produksi seperti penurunan produktivitas perekonomian, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan produktivitas modal/capital. Produktivitas Indonesia menurun selama periode tahun 2010-2019 Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%.



Sumber: Bappenas RI, 2023

**Gambar 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.2 di atas, pada level Nasional, terdapat enam arah kebijakan ekonomi yang mengarah pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas yang pada tahun 2024 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Keenam startegi tersebut adalah SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik (*economic powerhouse*), dan pemindahan IKN.



Sumber: Bappeda Jawa Timur, 2023

**Gambar 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.3 diatas, Provinsi Jawa Timur, arah kebijakan ekonomi terdapat pada prioritas pertama dari tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2024. Prioritas pertama Pembangunan Jawa Timur adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Secara lebih detail, arah kebijakan ekonomi Jawa Timur diarahkan pada pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM), standarisasi dan desain produk industri (Sertifikat Halal, SNI), Stabilisasi dan Ketersediaan Bahan Pokok (Siskaperbapo), sertifikasi mutu barang, perdagangan antar pulau, promosi investasi (*Business Forum and One on one meeting*), pendampingan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) bagi PMDN dan UKM, Pekan Pelayanan Perizinan di sentra nelayan dan UKM, *Milenial Job Center* (MJC), revitalisasi koperasi, *Communal Branding*, pengembangan koperasi, *One Pesantren One Product*, *Halal Tourism*, integrasi Perpustakaan–Galeri Seni, inventarisasi data kesenian dan adat budaya lokal dan *Eco Tourism* (pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat).



Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

**Gambar 3.4 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.4 diatas, arah kebijakan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat dari misi keempat dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dengan tujuan utamanya adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi

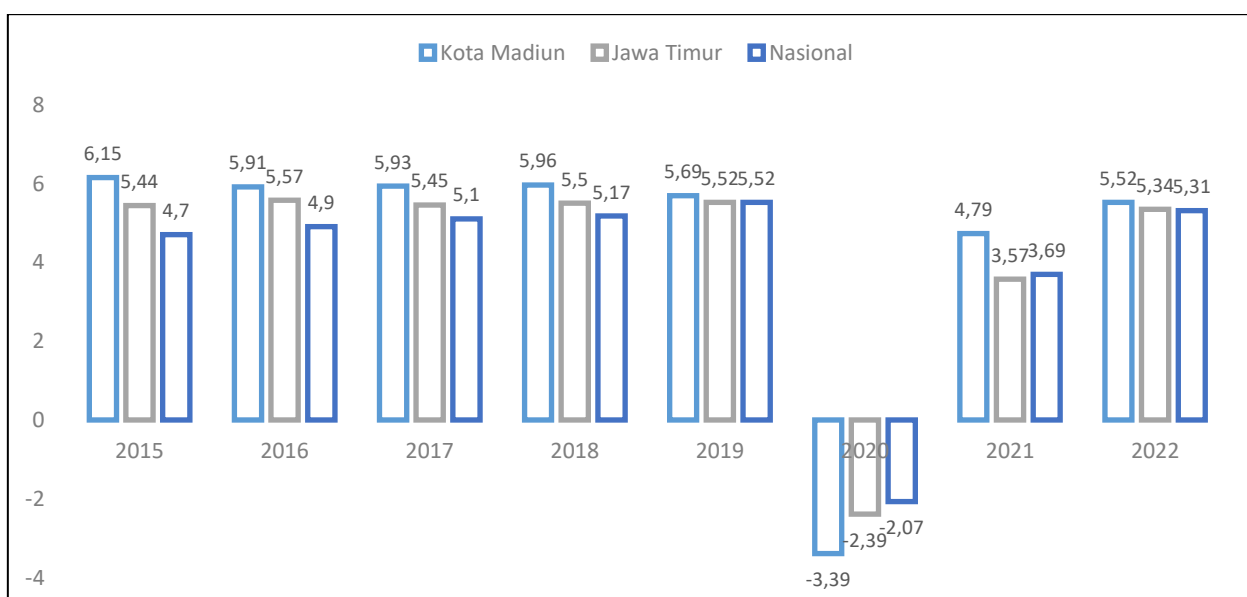
1. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat;
2. Peningkatan jaringan tenaga kerja;
3. Penyediaan kebijakan ramah investasi;
4. Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi;
5. Peningkatan kontribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB;
6. Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan;
7. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata;
8. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif;
9. Pengembangan ekonomi kreatif;
10. Pengembangan ekonomi digital masyarakat;
11. Peningkatan Produktivitas IKM dan usaha mikro;
12. Pengembangan sistem pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro;
13. Peningkatan kelembagaan koperasi;
14. Peningkatan ketersediaan pangan;
15. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

16. Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
17. Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW;
18. Peningkatan jejaring sosial;
19. Penguatan program pengentasan kemiskinan.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 - 2022

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam dalam beberapa periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Untuk Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB (ADHK) Tanpa Migas.

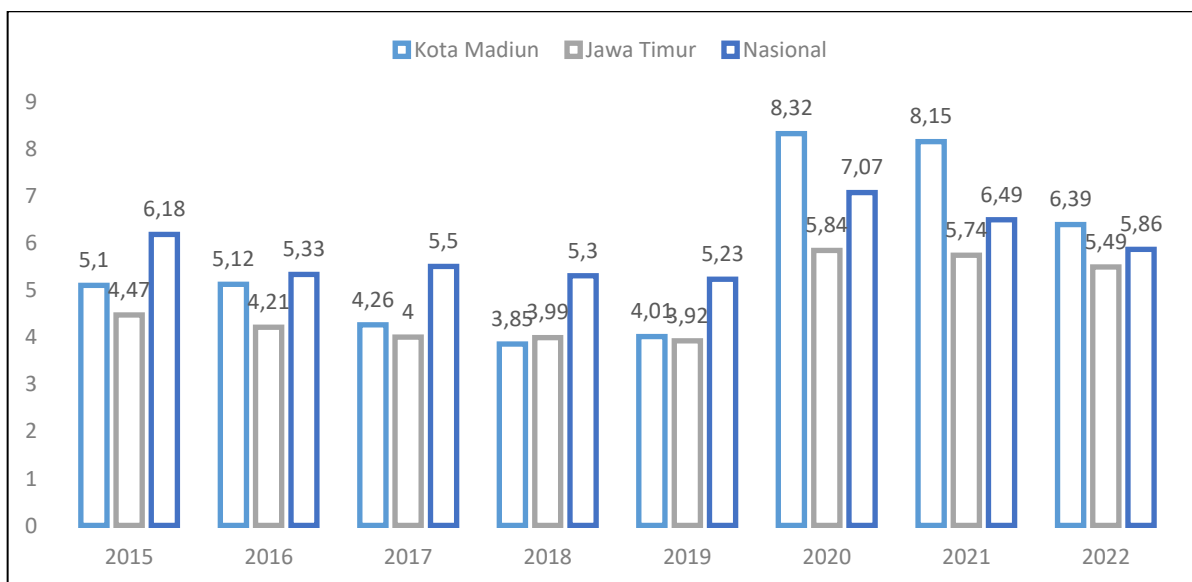
Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami tren yang relatif stabil diangka 5,86%. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,93% mengalami sedikit peningkatan hingga 5,96% tahun 2018. Pada tahun 2020, sebagai dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi sebesar -3,39%. Setelah tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang positif dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini merupakan sinyal positif dari adanya pemulihan ekonomi pasca Covid-19.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2023

**Gambar 3. 5**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2015-2022**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.5 diatas, sebelum terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 sebesar 6,15% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 5,44% dan 4,7%. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69% namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Sebagai dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39% di dibandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73% dan 5,52%. Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur dan melebihi provinsi Jawa Timur dan Nasional.



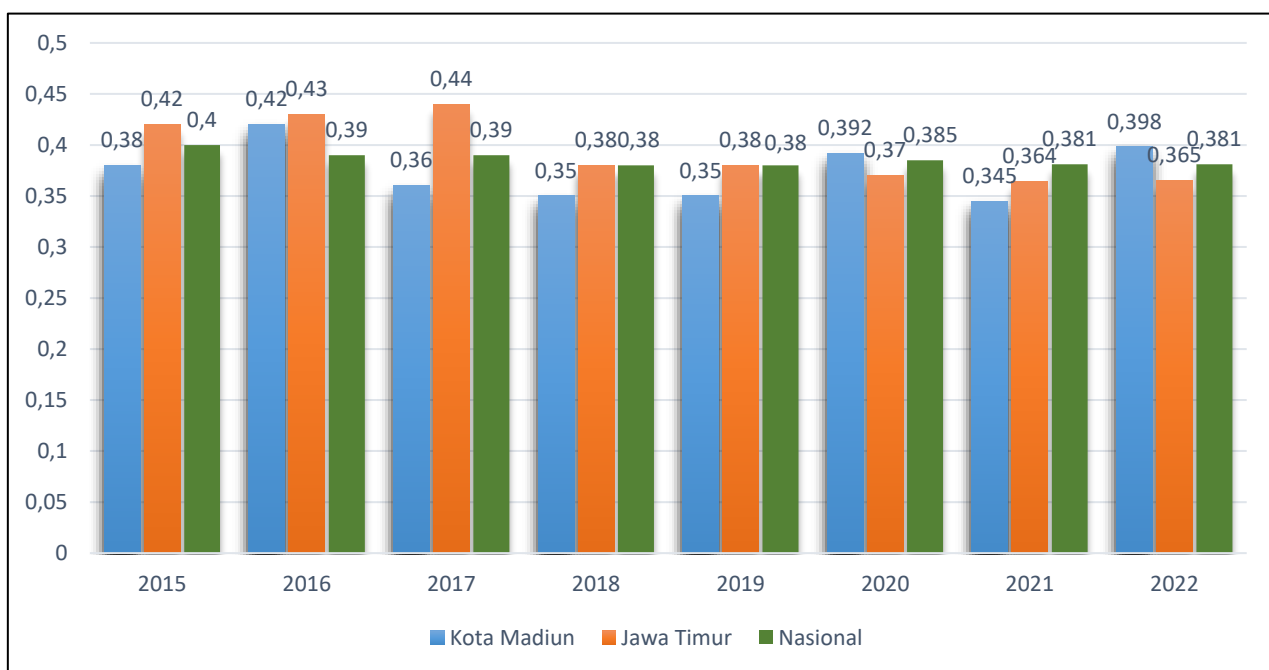
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

**Gambar 3. 6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2015-2022**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.6 diatas, dalam lima tahun terakhir sebelum terjadinya pandemi Covid-19, TPT Kota Madiun selalu berada di bawah TPT nasional. Pada tahun 2015 TPT Kota Madiun sebesar 5,10% berada di atas TPT Jawa Timur (4,47%) namun masih di bawah TPT Nasional (6,18%). Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sedikit diatas Jawa Timur tapi jauh di bawah Nasional.

Namun, pandemic covid-19 tahun 2020 menyebabkan TPT Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 8,32%. Nilai tersebut diatas TPT Jawa Timur dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,84% dan 7,07%.

Pada tahun 2021, TPT kota Madiun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,15%. Nilai TPT tersebut lebih tinggi dibandingkan pada level provinsi Jawa Timur dan nasional. Sedangkan pada tahun 2022 TPT mengalami penurunan sebanyak 1,76 poin, dari 8,15 di tahun 2021 menjadi 6,39% di tahun 2022. Namun, angka ini masih tergolong tinggi dibanding TPT di tingkat Jawa Timur dan Nasional.



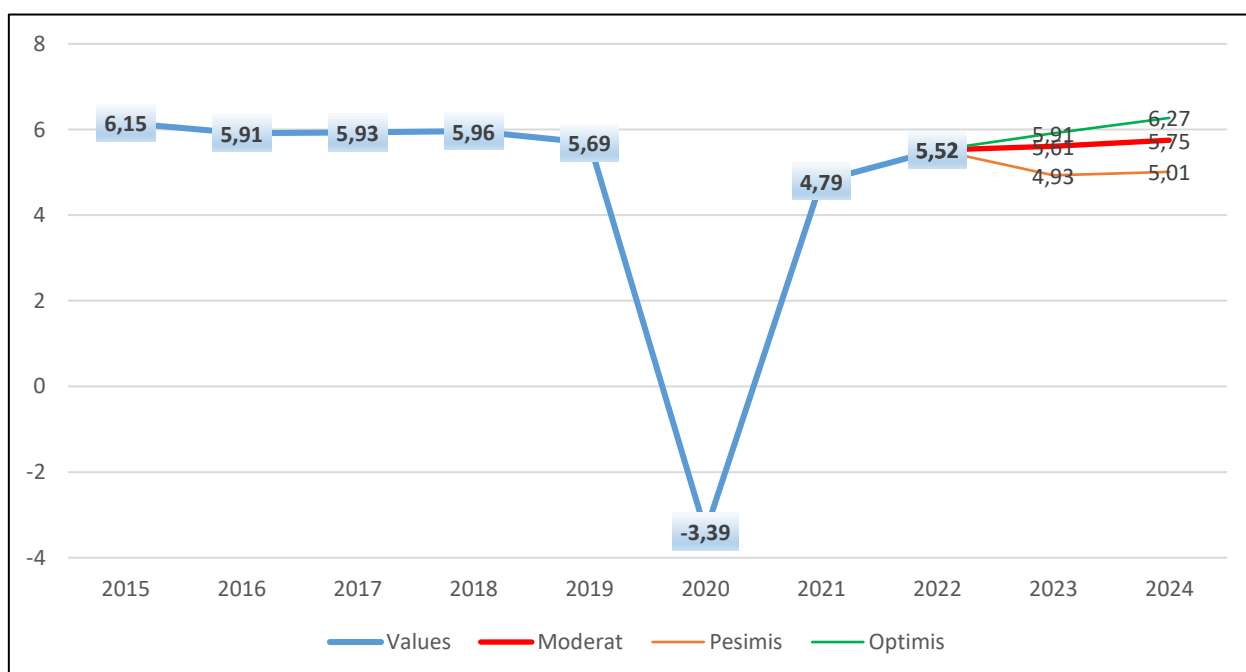
Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

**Gambar 3. 7 Gini Rasio Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2022**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.7 diatas, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi saja namun juga dilihat dari aspek pemertaan pembangunan yang salah satunya di tunjukan oleh gini ratio. Gini ratio Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2017, gini rasio Kota Madiun Sebesar 0,36 lebih rendah dari pada Jawa Timur (0,44) dan Nasional (0,39). Ketika terjadi Pandemi Covid-19, ketimpangan pendapatan Kota Madiun justru mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,392 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 0,345. Nilai gini tersebut lebih baik dibandingkan di level provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sementara pada tahun 2022, ketimpangan naik menjadi 0,398. Lebih tinggi dari pada ketimpangan Jawa Timur dan nasional. Meningkatnya ketimpangan di Kota Madiun, salah satunya disebabkan oleh peningkatan upah antar kelompok pendapatan yang tidak seimbang.

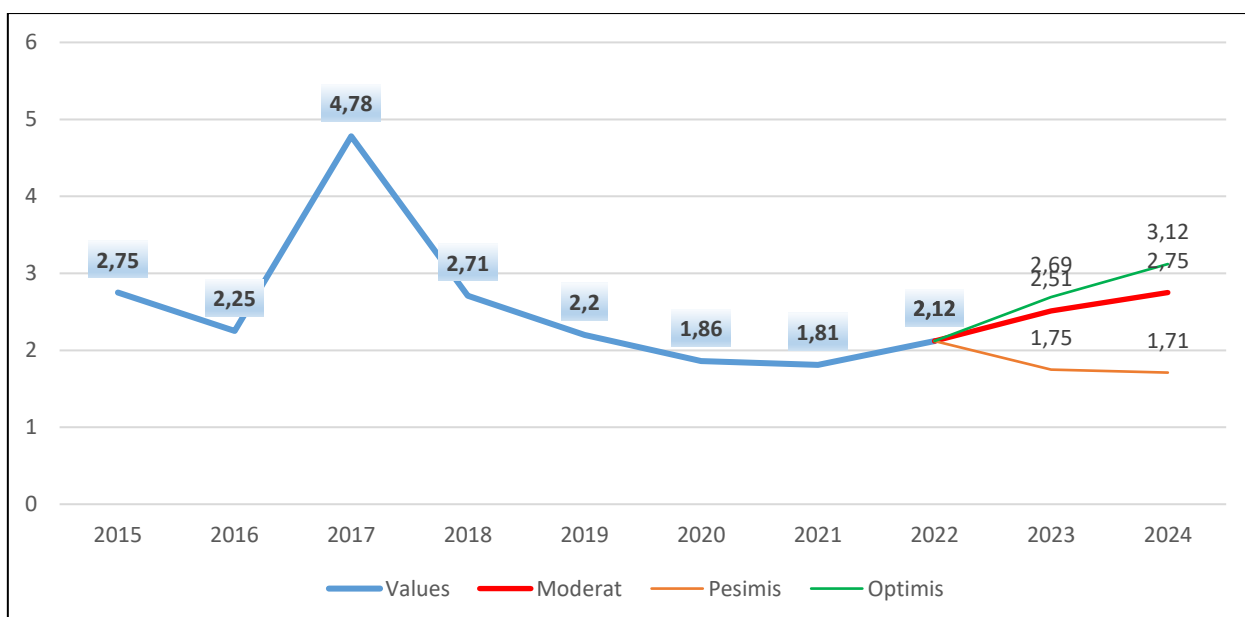
### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Madiun Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pada tahun 2020 dan 2021, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut serta proyeksi resesi global tahun 2023. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun menunjukkan kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.



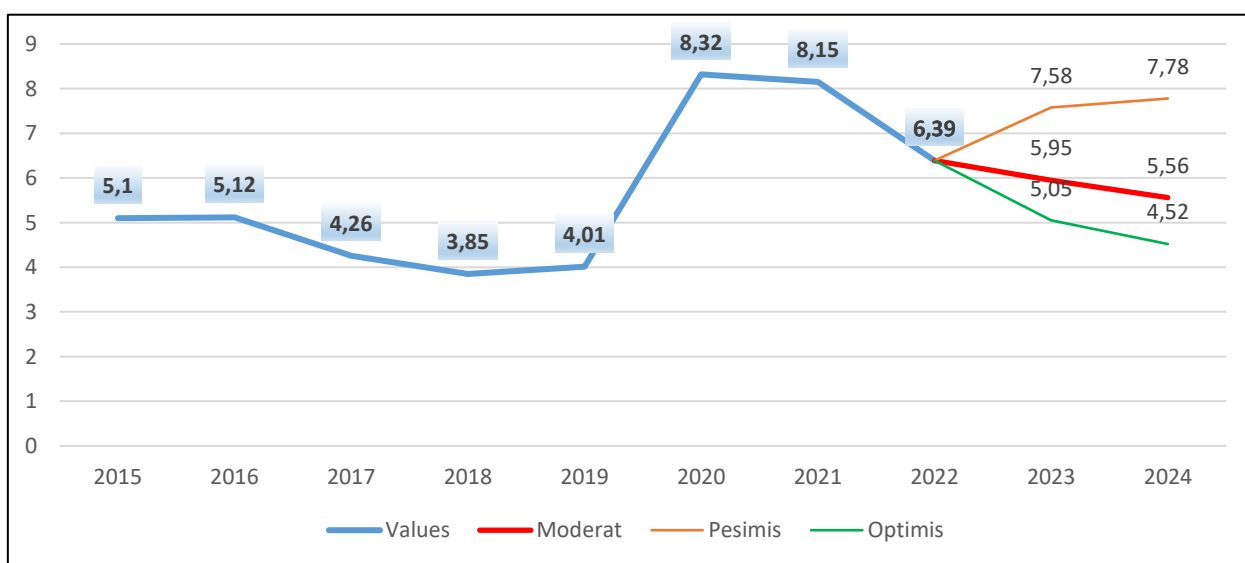
**Gambar 3. 8**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2023 – 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.8 diatas, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami perlambatan dari 5,96 ke 5,69. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga minus 3,39%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,52% tahun 2022. Pada tahun 2023, dengan asumsi stabilitas ekonomi nasional dan regional terjaga, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,61% dengan skema moderat. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,75%.



**Gambar 3. 9 Proyeksi Inflasi Kota Madiun Tahun 2020 - 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.9 diatas, Inflasi Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami nilai yang cenderung menurun. Pada tahun 2018, inflasi sebesar 2,71% dan mengalami penurunan hingga sebesar 2,12% tahun 2022. Dampak Covid-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86%. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas Covid-19. Pada tahun 2023 dan 2024, nilai inflasi di proyeksikan sebesar 2,51% dan 2,75% dengan skema moderat. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada rentang 2 – 4%.

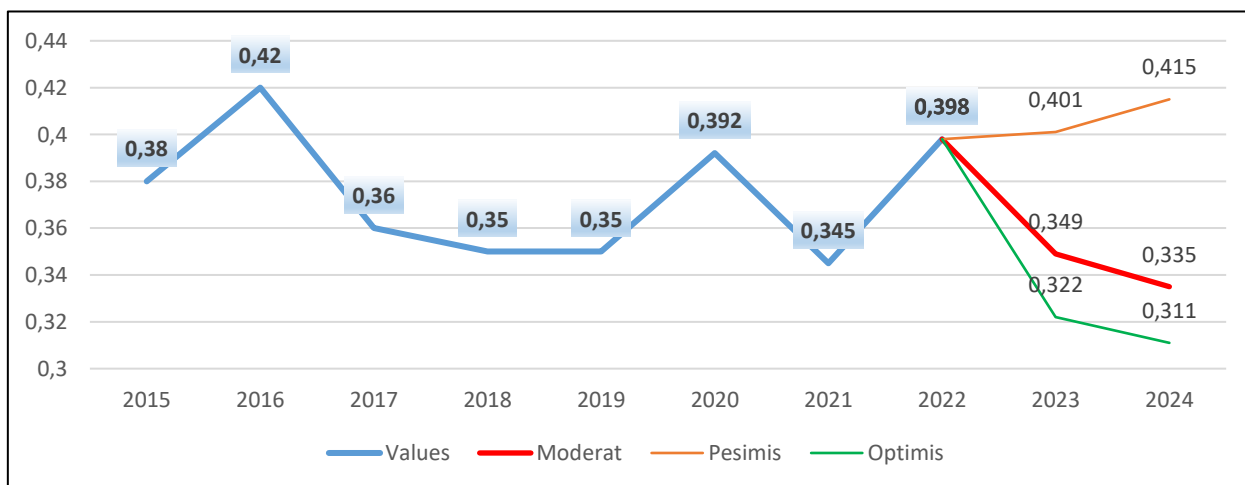


**Gambar 3. 10 Proyeksi TPT Kota Madiun Tahun 2020 - 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.10 diatas, Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01%. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32%.

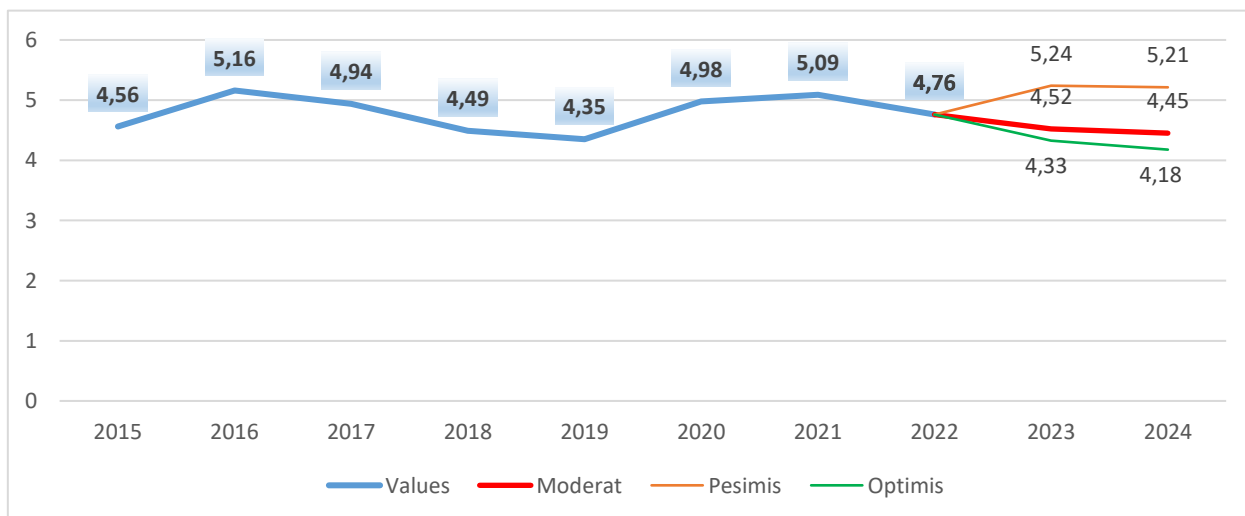


Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Pada tahun 2022, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga 6,39%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan masing – masing sebesar 5,95% tahun 2023 dan 5,56% tahun 2024 dengan skema moderat.



**Gambar 3. 11**  
**Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Kota Madiun Tahun 2020 - 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.11 diatas, Pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak Covid-19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 juga mengalami peningkatan hingga 0,392. Kemudian di tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan hingga 0,345 namun kembali naik menjadi 0,398 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, indek gini di proyeksikan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,349 dan 0,335 dengan skema moderat. Nilai indek diatas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.

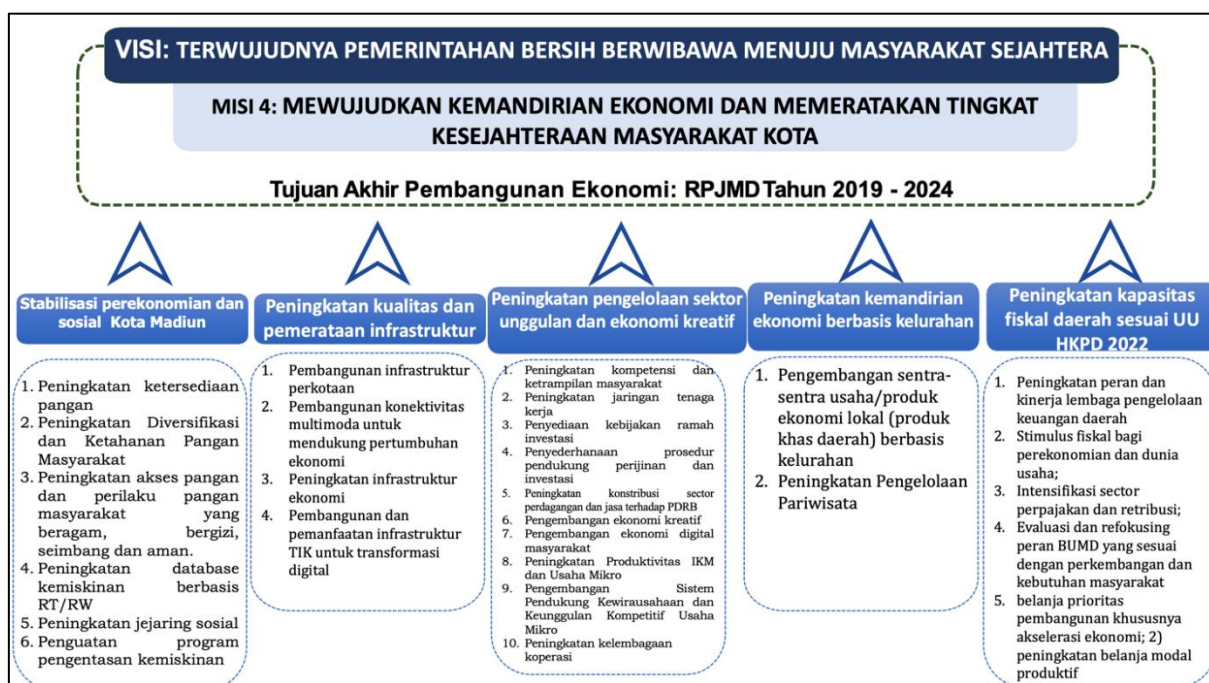


**Gambar 3. 12 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2020 - 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.12 diatas, Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic Covid-19 yaitu sebesar 4,98%. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,09%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada tahun 2022, kemiskinan mengalami penurunan hingga 4,76%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dan 2024 di proyeksikan mengalami penurunan dengan nilai masing – masing sebesar 4,52% dan 4,45%.

### 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2024

**Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2024 mengikuti kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Jawa Timur dan RPJMD Kota Madiun.** Tahun 2024, kebijakan ekonomi diarahkan pada stabilisasi kondisi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 meliputi tata kelola pemerintahan, penanganan kesehatan, penanganan sosial dan peningkatan infrastruktur untuk stabilisasi kondisi ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian Kota Madun diharapkan mengalami peningkatan minimal seperti sebelum pandemi Covid.



**Gambar 3. 13 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19 Kota Madiun**

Sebagaimana data yang termuat pada Gambar 3.13 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

**Arah kebijakan ekonomi di fokuskan pada penguatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digitalekonomi Kota Madiun sebagai dampak Covid-19.** Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah Covid-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:

### **1. Stabilisasi perekonomian dan sosial Kota Madiun**

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak Covid-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,52%. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5%, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

### **2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur**

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

### **3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif**

Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak Covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif secara terencana dan berkelanjutan.

### **4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan**

Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta

mengoptimalkan penggunaan program pengemabngan keluarahn untuk menstimulus perekonomian

## **5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah sesuai UU HKPD**

Pemberlakuan UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pusat dan daerah memberikan berbagai peluang bagi kota Madiun untuk mengakselerasi fiskal daerah. Disisi lain, adanya UU tersebut memberikan tantangan bagi kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan belanja daerah secara efisien dan efektif.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

**Arah kebijakan keuangan daerah Kota Madiun mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan.** Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Madiun dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

#### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

**Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan.** Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Selanjutnya pendapatan yang sah terdiri dari Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

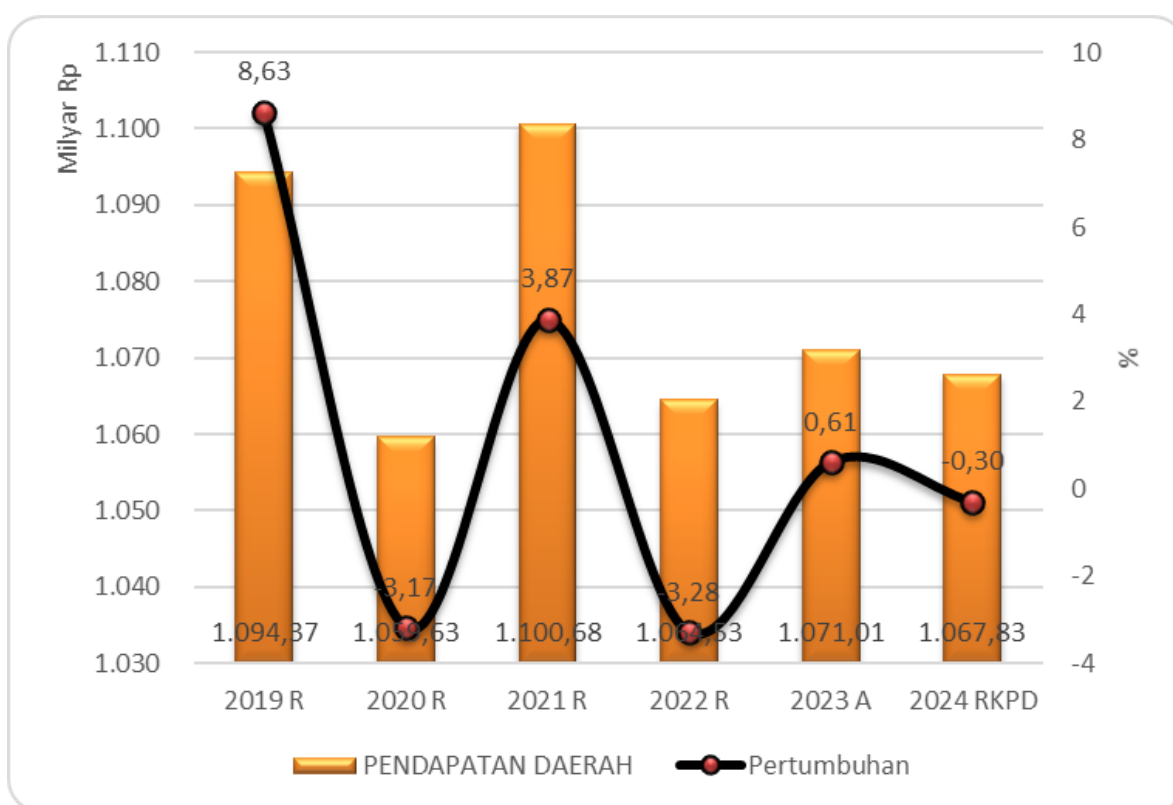
Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat

kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota. Proyeksi keuangan daerah Kota Madiun Tahun 2024 memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Asumsi Makro RKPD Kota Madiun 2024**

No	Indikator Makro	Satuan	Target RKP 2024	Target RKPD Kota Madiun 2024
1	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,7	5,75
	Inflasi	%	1,5 – 3,5	2 – 4
2	Tingkat kemiskinan	%	8,50 – 8,90	4,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75 – 4,46	5
4	Indek Pembangunan Manusia	-	73,67 – 74,15	82,35
5	Indeks Gini	-	0,363 – 0,364	0,35

Sebagaimana yang termuat pada tabel 3.3 diatas, asumsi didasarkan pada rentang skenario pesimis ke optimis seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab 3.1.2. Selain asumsi makro diatas, beberapa asumsi lainnya adalah tingkat inflasi kisaran 2 – 3%; Pendapatan Transfer diproyeksikan naik sebesar 2,41%; dan target anggaran tahun 2024 diproyeksikan memiliki SiLPA Rp 0.

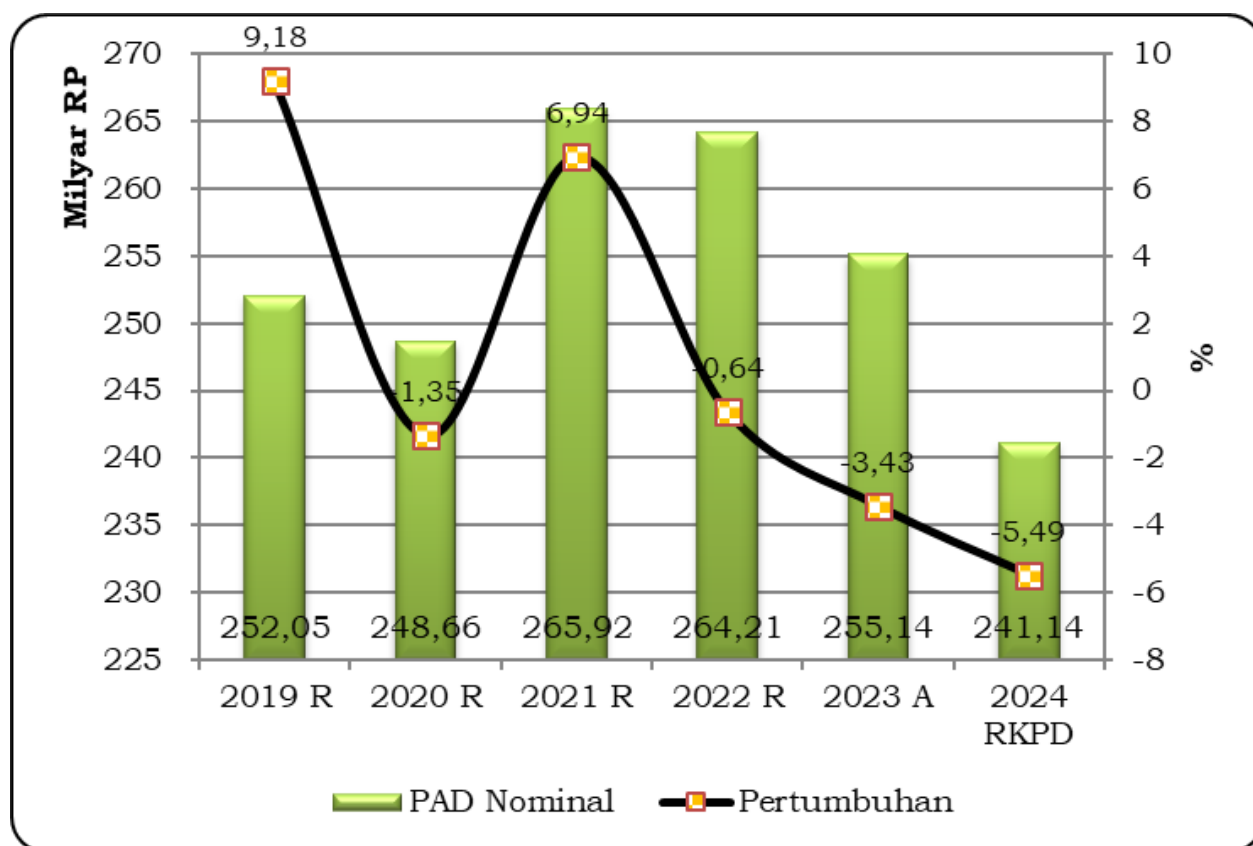


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 14 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada gambar 3.14 diatas, **Pertumbuhan pendapatan nominal Kota Madiun sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang semakin meningkat.** Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2021 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,63%. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah pertumbuhannya menunjukkan penurunan sebesar 3,17% dan meningkat kembali menjadi 3,87% tahun 2021 dan mengalami penurunan hingga minus 3,28% pada tahun 2022. Selanjutnya, pada Tahun 2023 anggaran pendapatan daerah di proyeksikan mengalami peningkatan hingga 0,61%.

Pada tahun 2024, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi minus 0,30% dikarenakan informasi dana transfer mengalami penurunan pagu dari tahun 2023. Namun apabila berdasarkan tren data pertumbuhan pendapatan daerah selama 4 (empat) tahun terakhir, maka pertumbuhan pendapatan diproyeksi secara lebih optimistik di tingkat 6,81%.

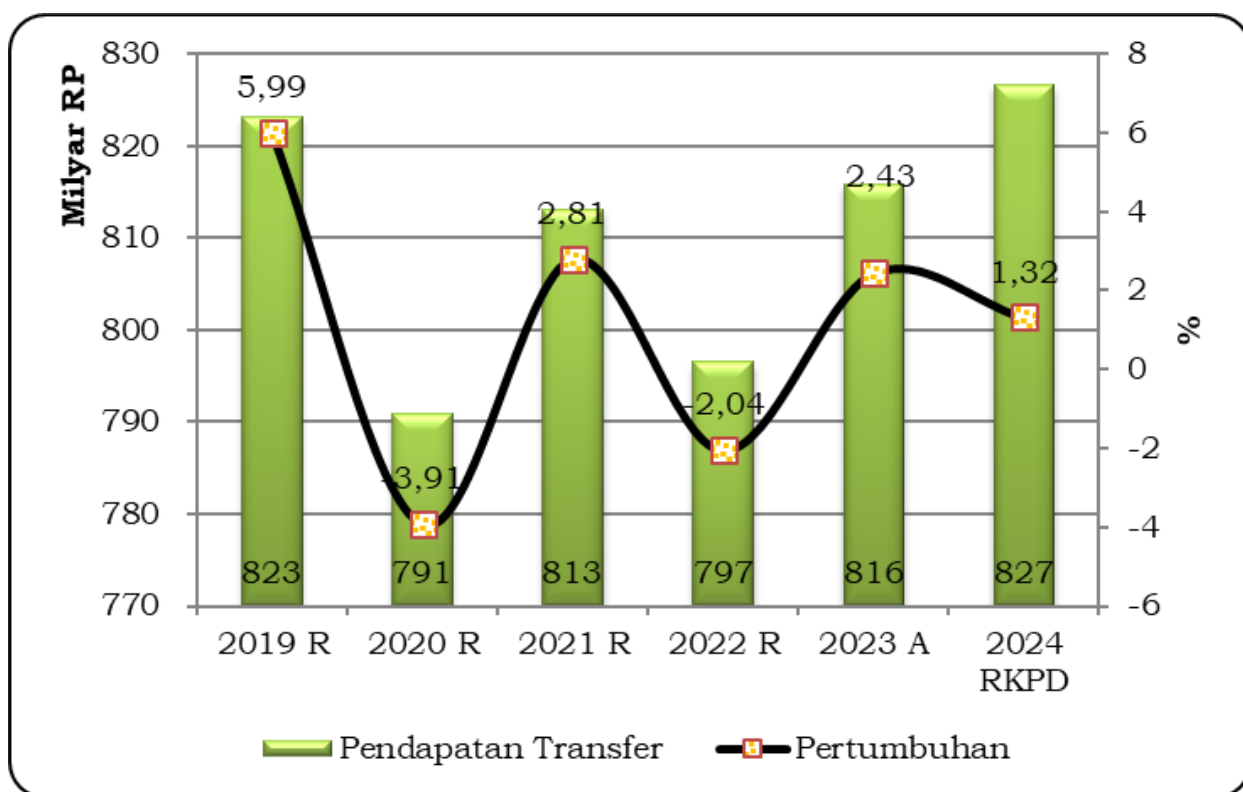


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 15 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.15 diatas, **PAD tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan nominal tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.** Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD di mengalami penurunan hingga minus 0,64%. Sedangkan pada tahun 2023,

PAD dalam APBD di proyeksikan mengalami penurunan baik dari sisi pertumbuhan maupun nominal dibandingkan tahun 2022 dengan nilai masing – masing minus 3,43% dan 255,14 milyar. Pada tahun 2024, PAD di proyeksikan mengalami penurunan hingga minus 5,49%. Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 belum dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena Kota Madiun masih berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi akibat pandemi dan inflasi barang kebutuhan. Namun demikian, pada tahun 2024 PAD dapat di proyeksikan secara optimistik mengalami peningkatan hingga 9,08%, dikarenakan adanya proyeksi komponen PAD khususnya Pajak yang meningkat lebih dari 15%. Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam gambar berikut:

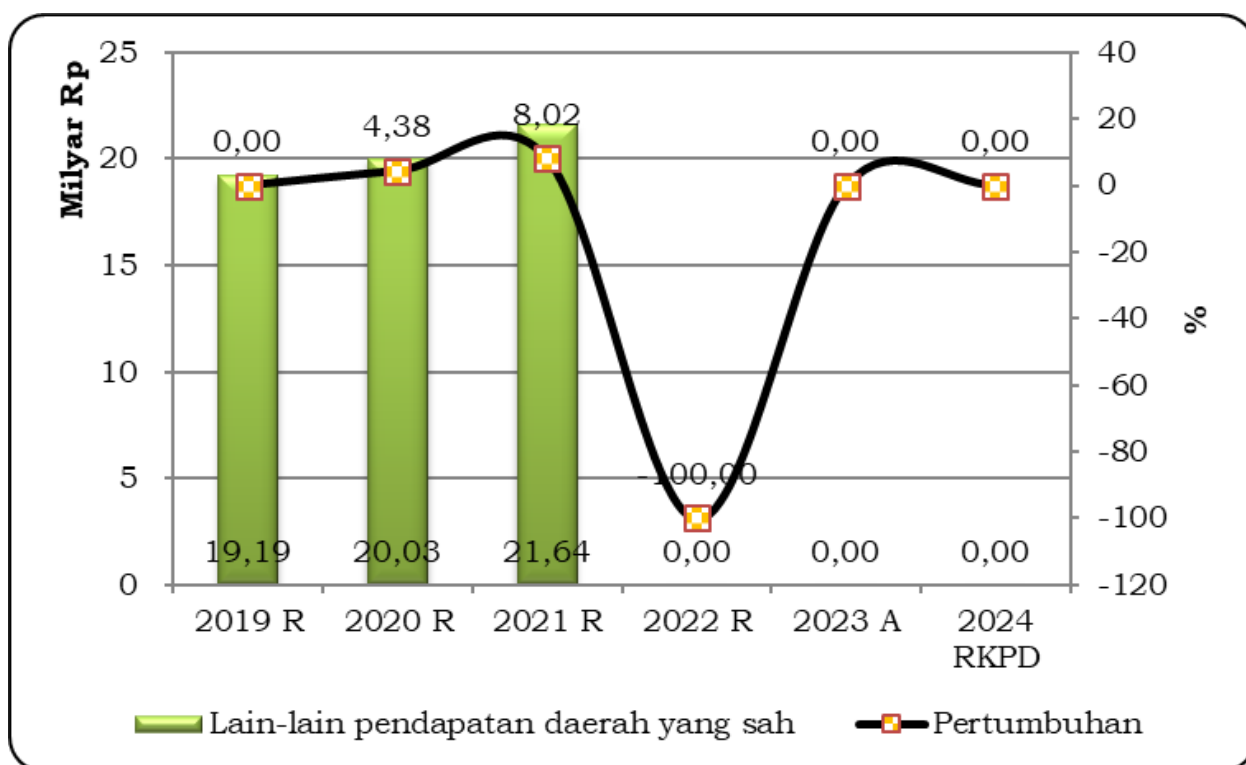


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 16 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.16 diatas, Secara nominal, realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan transfer mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,99% dan mengalami penurunan hingga minus 3,91% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan pendapatan transfer mengalami peningkatan hingga 2,81%, akan tetapi kembali menurun sebesar minus 2,04% pada tahun 2022. Tahun 2023 pertumbuhan pendapatan transfer dalam APBD diproyeksikan

kembali meningkat menjadi 2,43% dan diproyeksikan turun kembali pada tahun 2024 menjadi 1,32%. Namun apabila berdasarkan tren data pertumbuhan pendapatan transfer, maka secara lebih optimistik pertumbuhan pendapatan transfer dapat diproyeksi di tingkat 6,10%. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

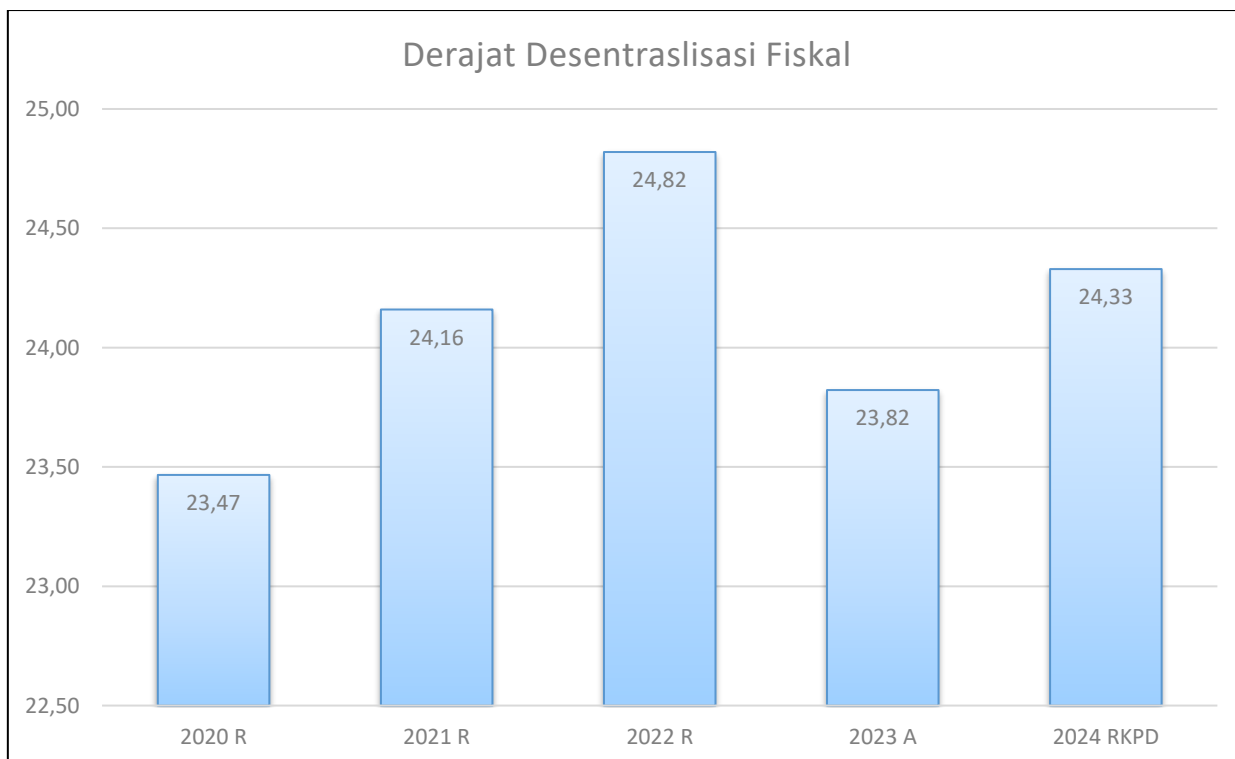


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 17 Perkembangan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2019-2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.17 diatas, selama periode tahun 2019 dan 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 milyar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 Milyar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 8,02%. Sedangkan pada realisasi 2022 dan APBD 2023 serta RPKD 2024, nilai pendapatan ini di proyeksikan nol atau tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah. Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilihat dalam gambar berikut:





Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

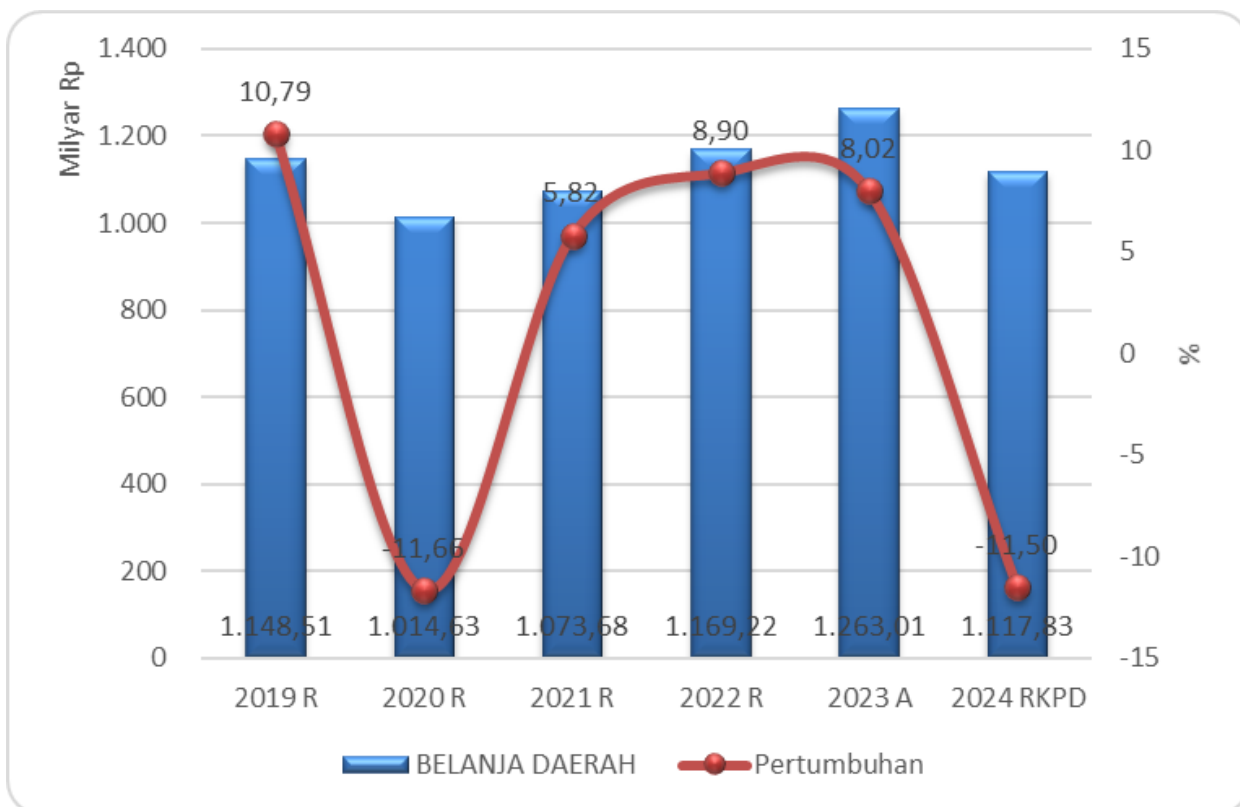
**Gambar 3. 18 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam%) Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.18 diatas, Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan dan merupakan nilai tertinggi dalam dua tahun terakhir. Namun dalam APBD 2023, derajat desentralisasi fiskal di prediksi mengalami penurunan menjadi 23,82. Pada tahun 2024, derajat desentralisasi fiskal di proyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2023 yaitu menjadi sebesar 24,33. Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2019 sampai dengan 2022, APBD 2023 dan proyeksi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2021 s.d Tahun 2025**

Kode	Uraian	JUMLAH					
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 A	2024 (Alternatif 1)	2024 (Alternatif 2)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.059.625.581.411,32</b>	<b>1.100.682.829.130,86</b>	<b>1.060.711.475.084,55</b>	<b>1.071.012.267.174,95</b>	<b>1.143.904.028.657,41</b>	<b>1.067.825.981.000,00</b>
<b>01.01</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>248.656.192.759,32</b>	<b>265.920.295.216,86</b>	<b>264,207,393,517.55</b>	<b>255,138,115,764.95</b>	<b>278.300.456.109,01</b>	<b>241,141,714,400.00</b>
01.01.01	Pajak daerah	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	106,165,312,122.76	92,000,000,000.00	110.004.400.000	102,506,770,000.00
01.01.02	Retribusi daerah	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	21,380,512,837.00	18,411,856,225.00	20.068.923.285	18,127,430,600.00
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15,595,752,355.97	15,158,702,323.95	16.068.224.463	16,029,310,600.00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	121,065,816,201.82	129,567,557,216.00	132.158.908.360	104,478,203,200.00
<b>01.02</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>790.939.408.652,00</b>	<b>813.126.832.914,00</b>	<b>796,504,081,567.00</b>	<b>815,874,151,410.00</b>	<b>865.603.572.548,40</b>	<b>826,684,266,600.00</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>705.872.676.797,00</b>	<b>709.162.104.477,00</b>	<b>697,480,692,487.00</b>	<b>730,401,876,000.00</b>	<b>759.617.951.040,00</b>	<b>730,401,876,000.00</b>
<b>01.02.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>85.066.731.855,00</b>	<b>103.964.728.437,00</b>	<b>99.023.389.080,00</b>	<b>85.472.275.410,00</b>	<b>105.985.621.508,40</b>	<b>96.282.390.600,00</b>
<b>01.03</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>20.029.980.000,00</b>	<b>21.635.701.000,00</b>	-	-	-	-

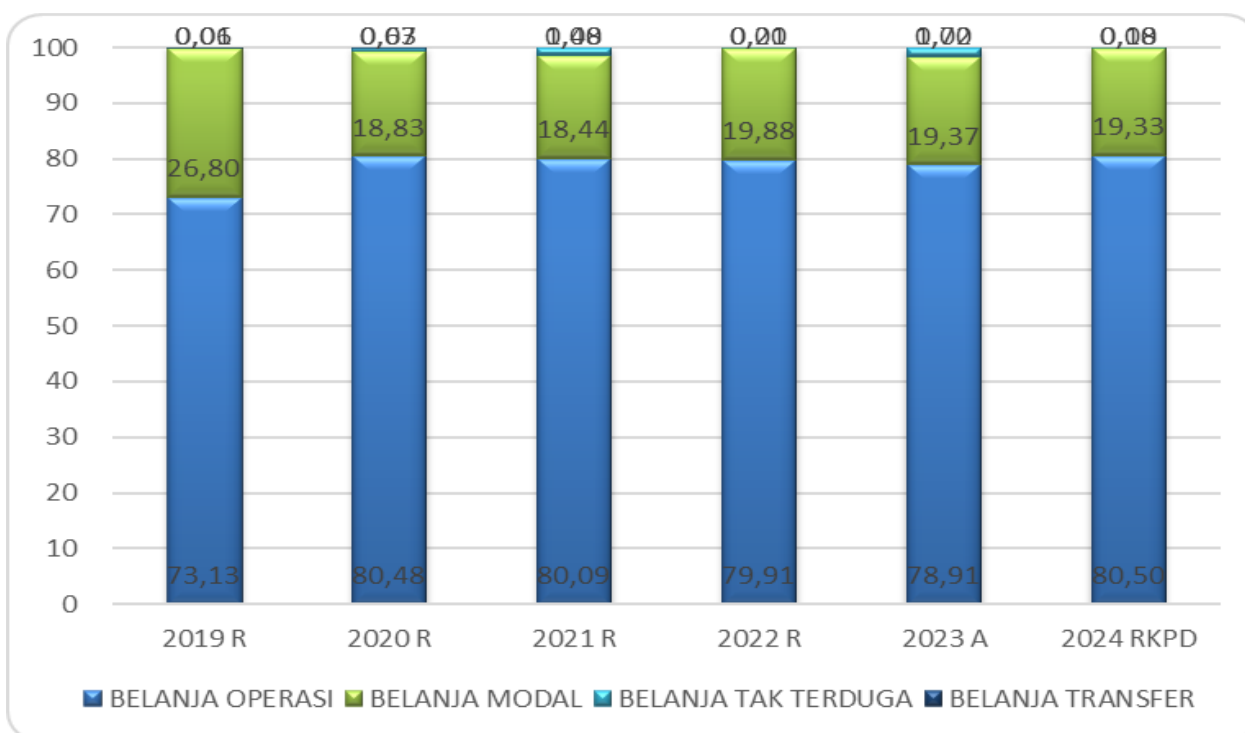
Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 19 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019–2024**

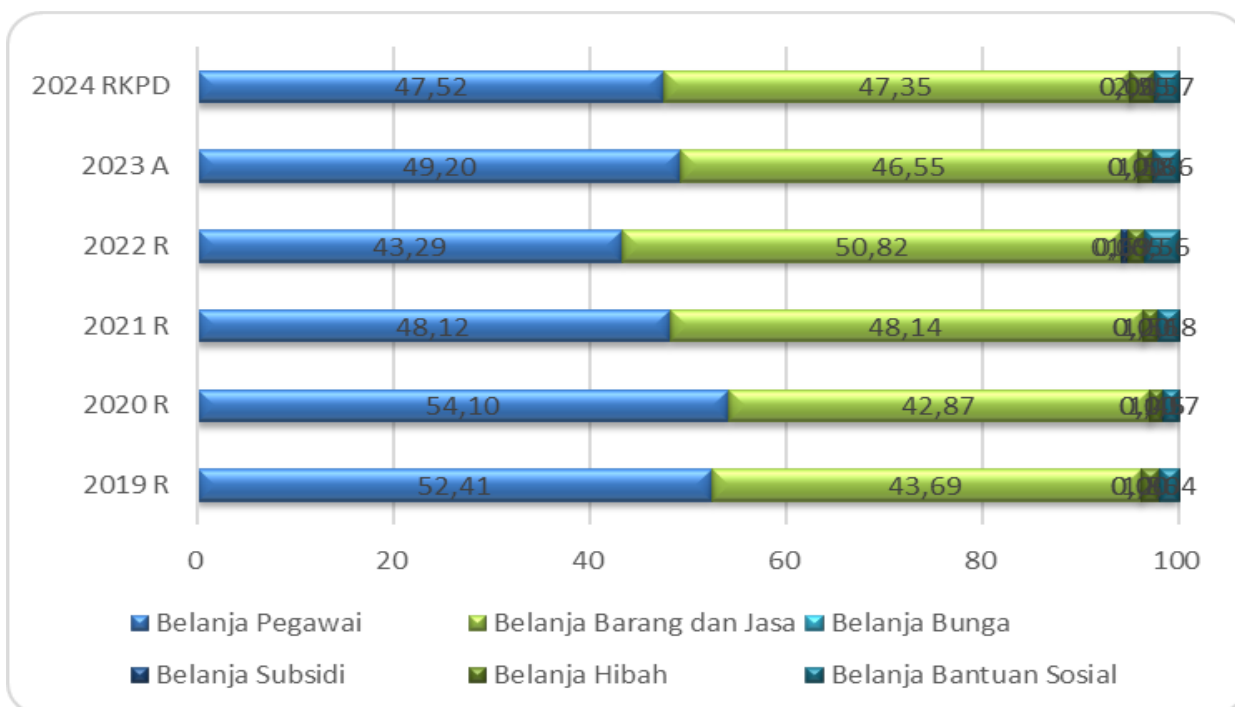
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.19 diatas, Pertumbuhan belanja daerah sejak pandemi covid19 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja daerah sebesar 5,82%. Pertumbuhan tersebut meningkat sampai 8,02% pada APBD tahun 2023. Pada Tahun 2024 pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan mengalami penurunan hingga minus 11,50%. Pada tahun 2024, belanja daerah di proyeksikan sebesar Rp 1,117 triliun mengalami penurunan sebesar 146 milyar di bandingkan APBD 2023. Namun menindaklanjuti adanya proyeksi optimis dari sisi pendapatan pada tahun 2024 serta untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah, maka belanja daerah pada tahun 2024 diproyeksikan mampu mencapai Rp 1,34 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp 77 milyar di bandingkan APBD 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,14%. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, dan belanja tidak terduga akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 20 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam%) Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.20 diatas, Proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2024, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 80,50%. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan peningkatan 1,59%. Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam%) Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.21 diatas, Komposisi Belanja operasi dari tahun ke tahun memiliki komposisi yang relatif sama. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai. Persentase belanja pegawai pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 47,52%. Angka tersebut mengalami penurunan di bandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 49,20%. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun Tahun 2024.

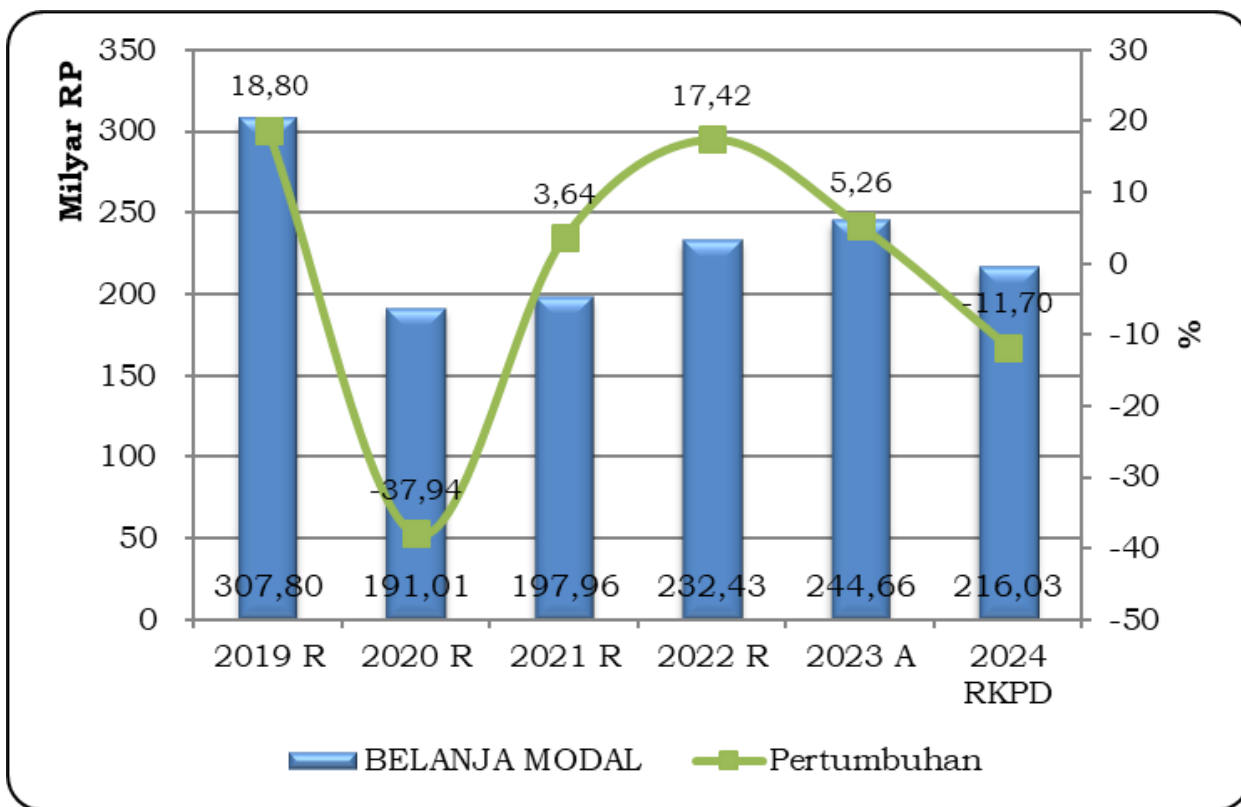


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 22 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.22 diatas, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 8,65% dengan nominal Rp 934,28 Milyar. Pada anggaran tahun 2023 belanja operasi ditargetkan sebesar Rp 996,66 milyar. Sedangkan target tahun 2024, belanja operasi dialokasikan sebesar 899,80 milyar.

Pada tahun 2024, sejalan dengan adanya proyeksi pendapatan optimistik yang dialokasikan untuk meningkatkan belanja daerah, maka belanja operasi diproyeksikan dapat meningkat sebesar Rp 1.072 milyar dengan pertumbuhan sebesar 7,63%. Peningkatan itu salah satunya peruntukan untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Selanjutnya adalah gambar perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2019 hingga 2024:

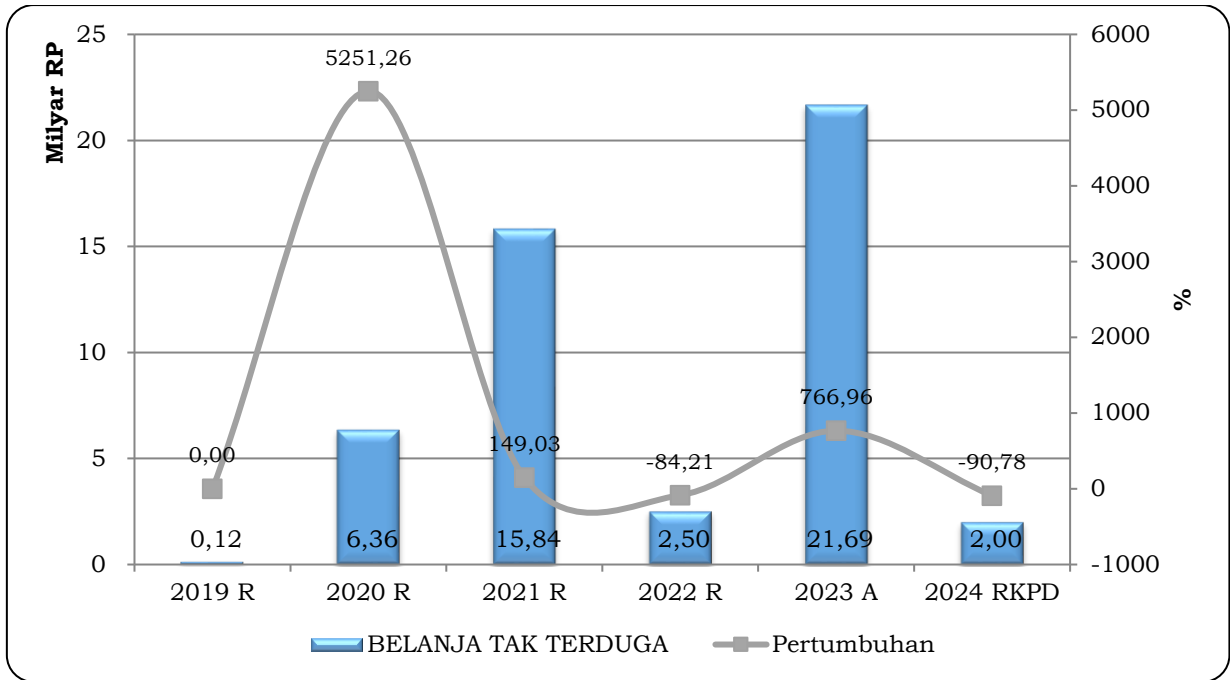


Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.23 diatas, dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir belanja modal mengalami tren fluktuatif. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94% sebagai dampak refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak Covid19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64% atau sebesar Rp 197,96 Milyar. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,42% dengan nilai sebesar Rp 232,43 Milyar tahun 2022. Pada tahun 2023, belanja modal di proyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,26% atau Rp 244,66 Milyar.

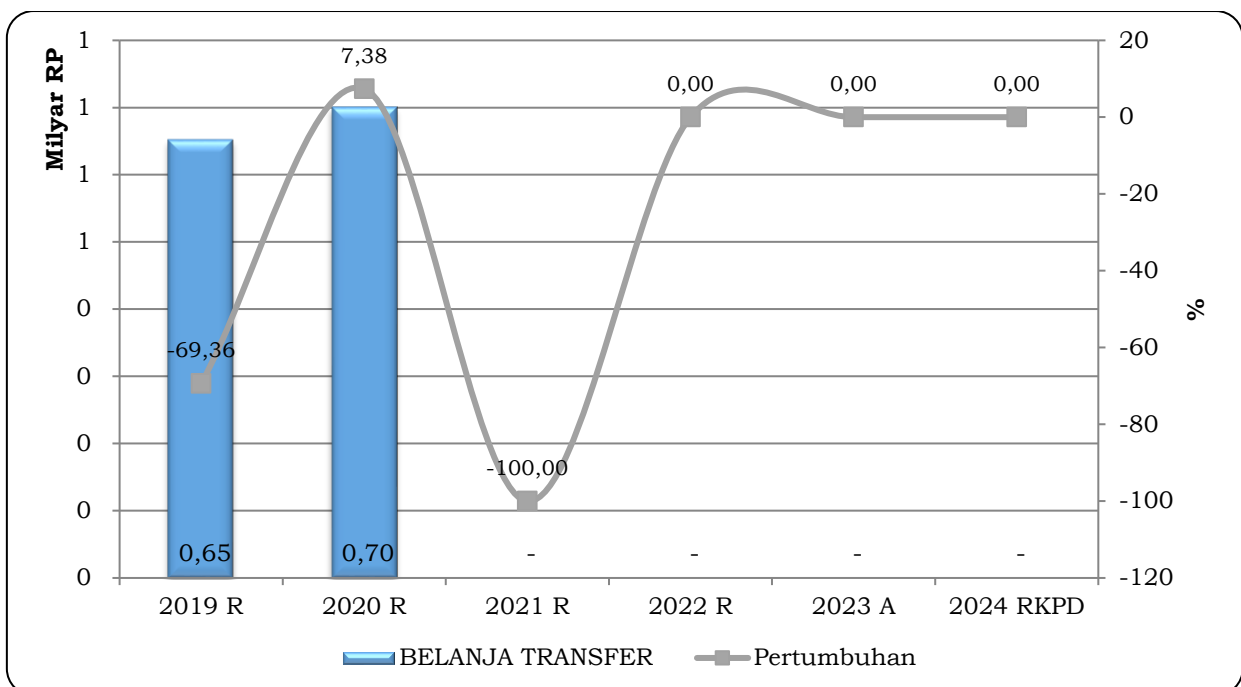
Sedangkan pada tahun 2024, belanja modal di proyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 11,70 % atau sebesar Rp 216,63 milyar. Namun demikian, dengan adanya proyeksi optimis dari sisi pendapatan, maka belanja modal diproyeksikan meningkat sebesar Rp 256,79 milyar dengan pertumbuhan sebesar 8,64%. Selanjutnya untuk perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2019–2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.24 diatas, peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan terjadinya pandemic Covid19. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 Milyar meningkat menjadi 6,36 Milyar pada tahun 2020 dan 15,84 milyar pada tahun 2021. Pada realisasi 2022, belanja tidak terduga mengalami peningkatan seiring dengan kondisi pandemic yang relatif menurun. Pada APBD tahun 2023 belanja tak terduga mengalami peningkatan yang relative tinggi yaitu sebesar 21,69 milyar. Sedangkan target 2024 di proyeksikan mengalami penurunan menjadi sebesar 2 milyar. Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun Tahun 2019–2024**

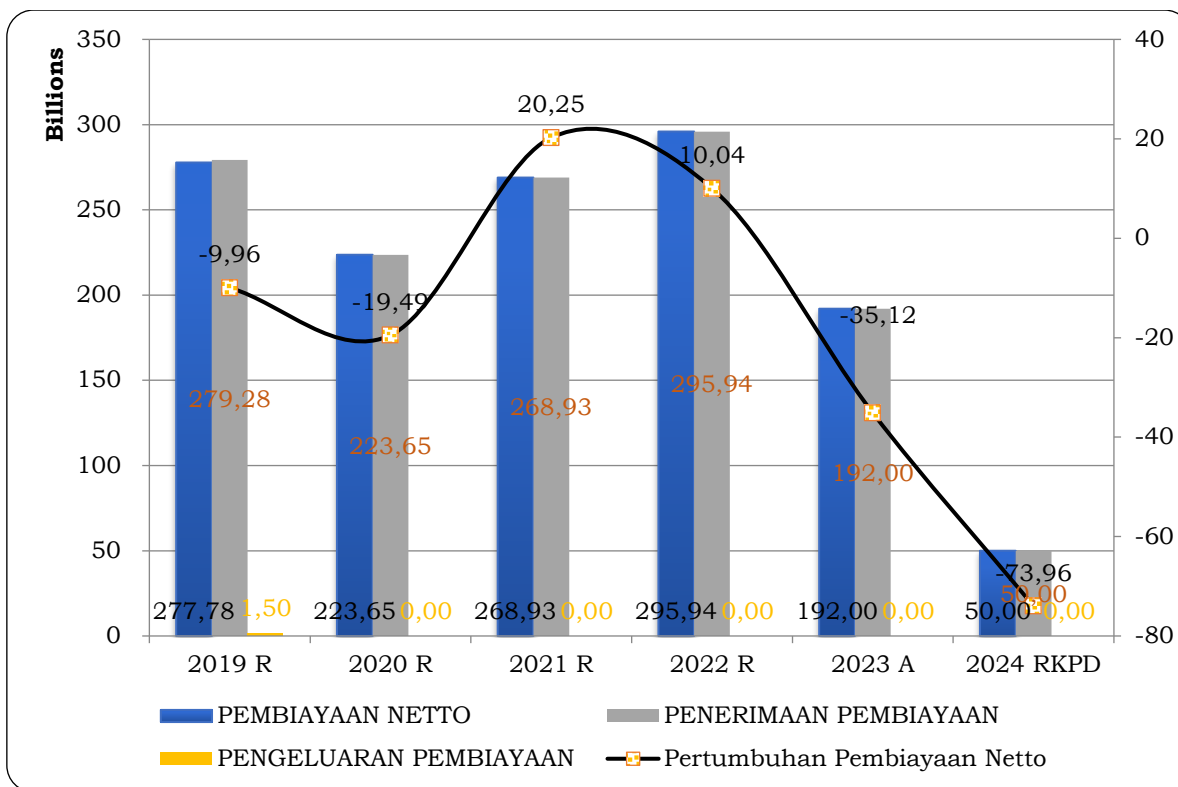
Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.25 diatas, **Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.** Perkembangan Belanja Transfer tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, belanja transfer sebesar 0,65 milyar dan tahun 2020 sebesar 0,70 milyar. Sedangkan pada anggaran tahun 2021 sampai 2024, belanja transfer tidak dianggarkan. Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2019-2022 dan proyeksi anggaran tahun 2023-2024 adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut:



**Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019 s.d Tahun 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 A	2024 (Alternatif 1)	2024 (Alternatif 2)
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.014.631.224.152,20</b>	<b>1.073.679.343.613,92</b>	<b>1.169.216.666.455,26</b>	<b>1.263.012.267.175,00</b>	<b>1.340.527.679.546,00</b>	<b>1.117.825.981.000,00</b>
<b>05.01</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>816.557.831.371,63</b>	<b>859.879.322.395,91</b>	<b>934.280.133.791,29</b>	<b>996.658.345.460,00</b>	<b>1.076.877.082.552,60</b>	<b>899.798.588.332,00</b>
05.01.01	Belanja Pegawai	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404.406.660.608,25	490.371.338.423	509.986.191.960	427.611.171.872
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474.775.658.285,04	463.979.666.642	482.538.853.308	426.053.490.784
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	6.480.445.500,00	99.146.000	100.137.460	86.452.922
05.01.05	Belanja Hibah	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15.369.183.718,00	15.725.267.295	47.175.801.885	22.954.998.602
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00	26.482.927.100	37.076.097.940	23.092.474.152
<b>05.02</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>191.011.897.074,57</b>	<b>197.958.260.924,01</b>	<b>232.434.449.701,97</b>	<b>244.661.755.442,00</b>	<b>261.650.596.993,40</b>	<b>216.027.392.668,00</b>
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.972.500.000,00	0	-	3.482.130.000	8.695.200.000	3.010.174.158
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53.011.211.346	75.164.228.212	63.957.245.812	65.928.727.209
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72.843.838.758	97.884.543.580	109.718.784.899	85.837.835.330
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103.137.296.907	63.458.770.080	74.373.678.534	57.173.304.718
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3.442.102.691	4.672.083.570	4.905.687.749	4.077.351.253
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	2.807.996.500,00	0	0	0	0	0
<b>05.03</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>6.361.433.706,00</b>	<b>15.841.760.294,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>21.692.166.273,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	21.692.166.273	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>05.04</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>700.062.000,00</b>	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	700.062.000,00	0,00	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.014.631.224.152,20</b>	<b>1.073.679.343.613,92</b>	<b>1.169.216.666.455,26</b>	<b>1.263.012.267.175,00</b>	<b>1.340.527.679.546,00</b>	<b>1.117.825.981.000,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>44.994.357.259,12</b>	<b>27.003.485.516,94</b>	<b>-104.701.001.398,47</b>	<b>-192.000.000.000,00</b>	<b>-196.623.650.888,59</b>	<b>-50.000.000.000,00</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi,2023



Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

**Gambar 3. 26 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Netto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2019–2024 (Milyar Rupiah)**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 3.26 diatas, pada tahun 2024, pembiayaan netto diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 73,96%. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 sebesar 192 milyar. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, tidak dianggarkan dari tahun 2020 hingga 2024. Namun pada tahun 2024, sejalan dengan adanya proyeksi optimistik dan peningkatan belanja daerah untuk optimalisasi pembangunan, maka pembiayaan netto diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan APBD 2023. Penerimaan pembiayaan dianggarkan dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp 196,63 Milyar. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, tidak dianggarkan. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s.d Tahun 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		2020 R	2021 R	2022 R	2023 A	2024 (Alternatif 1)	2024 (Alternatif 2)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>03.01</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>223.650.613.313,81</b>	<b>268.933.182.301,20</b>	<b>295.937.467.818,14</b>	<b>192.000.000.000,00</b>	<b>196.623.650.888,59</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
03.01.01	Penggunaan SiLPA	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	192.000.000.000	196.623.650.888,59	50.000.000.000,00
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	800.000,00	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>223.650.613.313,81</b>	<b>268.933.182.301,20</b>	<b>295.937.467.818,14</b>	<b>192.000.000.000,00</b>	<b>196.623.650.888,59</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
<b>03.03</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>268.933.182.301,20</b>	<b>295.936.667.818,14</b>	<b>191.236.466.419,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil proyeksi, 2023

### **3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2024, terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Penentuan target pendapatan daerah menyesuaikan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan regulasi lainnya yang sesuai;
2. Stabilisasi kondisi perekonomian daerah dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global dan kondisi politik nasional dan daerah;
3. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
4. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan

11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
  1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran;
  2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil; dan
  3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.
- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD; dan
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi
- e. usi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

### **2. Pendapatan transfer**

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

### **3. Lain-lain pendapatan yang sah**

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan. Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya tncapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
  - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta; dan
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun; dan
  - b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

#### **3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah daerah telah menjelaskan beberapa hal penting terkait belanja daerah yaitu sebagai berikut

1. Pengalokasian belanja pegawai agar di perhatikan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30%, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang- Undang ini diundangkan;
2. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah;
4. Dalam rangka Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel;
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian Indikator kinerja utama Kota Madiun pada tahun 2024;

4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di- *earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

### **1. Belanja Operasi**

- a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 47,52% dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan public;
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2024, belanja subsidi tidak dianggarkan;
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



## **2. Belanja Modal**

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Naumn dalam RKPD 2022, kebutuhan belanja ini tidak dianggarka;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## **3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **4. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua, yaitu :

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
2. Belanja Hibah adalah Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2024 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2024, tidak dialokasikan untuk penyertaan modal; dan
4. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

### **3.2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui

*Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas antara peranan swasta dan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Rincian realisasi dan rencana pembiayaan melalui (CSR) tahun 2020 dan 2022 adalah pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Pembiayaan Pembangunan melalui CSR Kota Madiun 2020-2022**

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Hotel Merdeka	Penerangan Jl. Lodayan	1.200.000		
		Bantuan kepada penyandang Disabilitas	100.000		
		Santunan keluarga pinggir sungai Bantaran	2.500.000		
		Takjil buka Puasa di Masjid Agung Baitul Hakim	1.500.000		
		Bantuan untuk Kampung Tangguh	500.000		
		Partisipasi kegiatan warga gang Lodayan (Kel. Pangongangan)	1.000.000		
2	PT. Nitama Madiun	Pocari Sweat untuk tenaga medis	3.600.000		
		Masker berlogo Nitama	3.800.000		
		Tanaman buah			
		Pohon Jambu Citra 5 buah	1.125.000		
		Pohon Jambu Camplong 5 buah	1.125.000		
		Pohon Jeruk 5 buah	2.250.000		
		Pohon Leci 2 buah	750.000		
		Pohon Sawo Mentega 3 buah	1.350.000		
		Metan plus ongkos tanaman 20 buah	1.500.000		
		Planter Bag PT. Nitama dan Madiun Kota Pendekar 20 buah	1.800.000		
		Pembersihan sungai sekitar Planter bag	480.000		
		Takjil Ramadhan 1.000 pcs			
		Donasi Persatuan Tuna Netra Indonesia	6.000.000		
		Beras CSR untuk warga sekitar	2.064.000		
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000		
		Proses pelapisan hot dip galvanize gratting makam	700.000		
		Hut Satpam	750.000		
		Mural dan pengecatan gapura dengan logo Perusahaan dan tulisan (logo) RW.06	6.000.000		
3	PT. INKA	Bantuan Bedak Kaca	750.000		
		Bantuan Program kemitraan 5 mitra	250.000.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		Rehab Ruang Kelas	2.000.000		
		Bantuan Pembangunan Perpustakaan	1.000.000		
		Paket Hand sanitizer 60.000 ml	7.300.000		
		Vitamin	1.000.000		
		Suplemen dan Vitamin	8.255.400		
		Bantuan Masker dan Faceshield 500 bh	5.250.000		
		Masker 1000 bh	6.500.000		
		Sosialisasi Bahaya Narkoba	51.900.700		
		Penyuluhan Pencegahan Covid	53.589.400		
		Bantuan Sarpras Posko Covid	9.170.000		
		Bantuan Bilik Desinfektan	2.200.000		
		Bantuan Bilik Desinfektan	10.000.000		
		Tempat Cuci Tangan , Masker dan Hand sanitizer	2.887.500		
		Rapid tenaga medis	46.500.000		
		Pule dan bungur	184.750.000		
		Pohon Tabebuaya	3.000.000		
		Pot, Media dan Bunga	2.500.000		
		Bibit Tanaman Bunga dan Buah	2.000.000		
		Tempat sampah 3 unit	2.397.000		
		Sarpras Poskamling Kel. Patihan	2.246.000		
		Pembelian Pot Bunga	1.000.000		
		Pembelian Pot Bunga	1.200.000		
		Pemeliharaan mural	20.090.000		
		Bantuan Kebersihan makam	3.000.000		
		Bantuan Paket sembako 200 paket	37.300.000		
		Bantuan Sembako	1.000.000		
		Baksos Sembako	5.000.000		
		Bantuan Sembako 50 paket	10.500.000		
		Bantuan untuk disabilitas 50 paket	8.749.587		
		Bantuan Baju Koko dan Mukena	35.407.990		
		Kegiatan Baksos	1.000.000		
		Santunan Yayasan Panti Asuhan	272.000.000		
		Renovasi Masjid	5.000.000		
		Bantuan Terpal Tenda	5.000.000		
		Bantuan Cover tenda	4.200.000		
		Renovasi masjid	2.000.000		
		Pembangunan Masjid	5.000.000		
		Pembelian Tanah Wakaf	2.000.000		
		Pembuatan Tempat Parkir PHBI	4.000.000		
		RTLH Bp. Firman	86.125.000		
		Ruang Pelayanan Masyarakat	68.186.060		
		Pembelian material pipa besi dan cat	2.000.000		
		Pembelian material Kelas lapangan	29.785.000		
		Bantuan Laptop	35.200.000		
		bantuan Kodim	24.744.000		
		Pembuatan 200 Kaos	10.130.000		
		Bantuan AC Standing 5 PK 2 unit	28.730.000		
		Pengadaan portal	3.950.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		Bantuan Sarpras Posko Kampung Tangguh	2.775.200		
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Sukosari, Manguharjo dan Nambangan Kidul	11.009.000		
		Bantuan Kampung Tangguh di Kel. Banjarejo, Mojorejo dan Nambangan Lor	13.250.000		
		Masker		7.500.000	
		Ranjang Pasien		121.850.000	
4	PT. KAI DAOP 7	Alat Peraga Edukasi	25.000.000		
			5.000.000		
		Pule dan Bungur	92.500.000		
5	Hotel Amaris	Sumbangan Anak Yatim	3.000.000		
		Pembelian Hewan Qurban yang diserahkan pada Masjid Nurul Abror Jalan Kalimantan (1 ekor kambing)	2.800.000		
		CSR kepada masyarakat Jalan Kalimantan	2.000.000		
6	ALFAMART	biaya pangkas pule barito	15.000.000		
		tanaman hias sumber wangi ( bugenvil varigata, kamboja besar, kelapa gading)	27.875.000		
		sulaman pohon sogo	2.400.000		
		Lampu Plenton	29.750.000		
		Lampu Penjor	150.000.000		
7	PT. BRI	Pohon berbunga			
		Masker Non Medis 1250 pcs	12.500.000		
		Paket sembako 100 paket	15.000.000		
		Masker Kain (5000 buah)		5.000.000	
		Biskuit (30 dos)		1.440.000	
8	PT. TELKOM	Bantuan Pinjaman Bergulir	820.000.000		
		Booth untuk UMKM	100.000.000		
		300 buah Hazmat untuk Satgas Covid	14.250.000		
		300 psng Sepatu Boots	22.500.000		
		300 bh faceshield	5.850.000		
		320 box Masker medis	48.800.000		
		80 box sarung tangan karet	8.200.000		
		2000 bh masker non medis	13.300.000		
		Bantuan Sembako untuk warga Kota Madiun	15.000.000		
9	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM, Tbk	Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, <b>sambel pecel 500gr</b> )	66.896.000		
		Sembako (Beras 4kg, Gula 2 kg, Minyak 1lt, kecap 1, sambel pecel 500gr)	134.329.000		
		Paket Sembako (1500 paket)		210.000.000	
		Peket Sembako (1500 paket)		270.000.000	
		Both Container (2 buah)		545.800.000	
		Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC)			541.178.000
		Lanjutan Entrance gate Pahlawan Street Center (PSC) dan patung pendekar			564.541.000
10	PT. REFINDO INTISELARAS INDONESIA	Lapak Joglo Paleraman		2.100.000	
		Lapak Kembulsari		18.500.000	
		Lapak Sido Dadi		24.500.000	
		Lapak Lintang Tawang		16.000.000	
		Bantuan Meja, Kursi dan Lemari Kaca			3.600.000

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
11	BPR TUNAS ARTHA	Inklusi Keuangan	1.500.000		
		Sedekah Jumat	4.800.000		
		Sumbangan Kematian	1.000.000		
		Sumbangan Bencana Alam	1.500.000		
		Takjil Ramadhan	1.000.000		
		Parsel Lebaran	1.000.000		
		Sumbangan HUT RI	500.000		
		HUT BPR Tunas Artha	1.000.000		
		Sumbangan lain-lain	1.000.000		
12	PT. INDRACO SUN CITY	Sewa Bazar UMKM dari Dinkop	2.000.000		
		Penerimaan Peserta Didik magang	15.000.000		
		Penanaman Pohon	20.000.000		
		Bukber anak yatim Piat	12.000.000		
		Parsel Lebaran	5.000.000		
		Sumbangan HUT RI	2.000.000		
		Hewan Qurban	20.000.000		
		Takjil Ramadhan	5.000.000		
13	Hotel Aston	Donor Darah Umum	500.000		
		Takjil Ramadhan	1.500.000		
		Berbagi Sahur	1.500.000		
		Bakti Sosial	300.000		
		Natal Bersama Panti Asuhan	2.000.000		
		Hewan Qurban	3.500.000		
14	PD. BPR	Penyaluran tenda pedagang kaki lima	60.000.000		
		Penanaman dan Penghijauan lingkungan serta PD BPR Bank Daerah Kota Madiun	50.000.000		
		Program Bisafari Dhuafa	5.000.000		
15	PT. PNM	Penanaman Pohon	10.000.000		
16	BANK WOORI BERSAUDARA	Penanaman Pohon	5.000.000		
17	PT. BCA	Penghijauan lingkungan kantor	3.000.000		
		Buka bersama anak yatim	3.000.000		
		Takjil Ramadhan	2.000.000		
		Bingkisan lebaran	7.000.000		
		Sumbangan HUT RI	1.000.000		
		Container (2 buah)			26.061.636
18	BRI KANCAB MAGETAN	Pule	42.000.000		
		Tiang lampu penjor klasik Badungan	50.000.000		
19	PG. REDJOAGUNG	Bantuan untuk pendidikan	1.400.000		
		Penanganan Covid	231.716.237		
		Penanaman Pohon Flamboyan	45.500.000		
		bantuan Sarana Ibadah	3.950.000		
		Khitan massal	25.000.000		
		Bantuan Sosial	25.334.587		
		Bantuan sarana umum	2.550.000		
		Program Kemitraan	1.055.000.000		
		Gula Pasir (2.500 kg)		30.000.000	
		Gula Pasir (2,5 ton)			32.500.000
20	PT. PERTAMINA	Pule dan Bungur	150.040.000		
		Pelatihan		28.394.000	
		Alat dan Bahan Pelatihan Sarpras Lingkungan		33.000.000	
				17.000.000	
21	BANK BUKOPIN	Buka bersama anak yatim	20.000.000		
22	CV. SOHANTO ADI PERKASA, PT. SARI MELATI KECANA, PT. INUL VIZTA MADIUN.	Gate Videotrone	330.000.000		
		Videotron			278.000.000
23	PT. REZKY ANUGRAH SEJAHTERA	Mobil Golf Yamaha 4 Seat	170.000.000		

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
24	PDAM Tirta Taman Sari	TRAFFIC LIGHT Tempo doeloe dan Lampu Hijr Ismail	85.000.000		
		Balon Gate (2 unit)		20.000.000	
		BPJS Ketenagakerjaan 1.144 orang			230.630.400
		Bantuan Bersa dan Air Minum			31.412.000
		Kaos 92 buah			6.127.200
		Kaos 147 buah			9.790.200
		Kaos 177 buah			11.788.200
		Kaos 407 buah			27.106.200
		Kaos 177 buah			11.788.200
		Air minum kemasan 1.646 karton			44.442.000
25	PT. TASPEN	Bantuan kemitraan	280.000.000		
26	INDOSAT	Lampu Penjor	162.793.000		
27	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	Lampu heritange di madiun	15.000.000		
28	PT. PLN (persero) UP3 MADIUN	RUMAH PINTAR	202.555.000		
		Pohon pule 2 buah, treatment dan pemeliharaan pohon, dan branding PLN peduli			75.000.000
29	PT. PENERBIT ERLANGGA CABANG MADIUN	Pompa Elektrik 4 unit	3.000.000		
		Chlorin 7 jerigen @ 20 liter	4.200.000		
		Chlorin 2 jerigen @ 10 liter	700.000		
		Karbol/wipol 2 jerigen @10 liter	700.000		
		Harpic/pembersih lantai 1 jerigen @ 10 liter	700.000		
		Harpic/pembersih lantai 2 jerigen @ 5 liter	700.000		
30	PT. BRI (Persero) CABANG MADIUN	Masker kain 1300 buah	6.500.000		
		Alat Pelindung Diri 75 buah	6.375.000		
		Sarung tangan 10 box/500 psng	1.150.000		
		Hand Sanitizer 20 liter	3.600.000		
		Wastafel aluminium 4 buah	2.800.000		
		Thermogun 4 buah	6.000.000		
31	PT. CIPTA GAGAS LESTARI	Handsanitazer Merk Novo 80 ml (20 dos)		2.880.000	
		Masker Protector (20 dos)		7.680.000	
		Minuman Serbuk Merk Segar (20 dos)		2.592.000	
		Susu Milku (1500 botol)		3.562.500	
		Kopi Siap Saji (1000 cup)		2.000.000	
32	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)	Healthy Kit Non Medis (2.000 buah)		56.000.000	
		Susu (360 buah)		780.000	
		Gula Pasir 3 ton			45.000.000
33	PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	Masker Kain (1000 buah)		6.000.000	
		Paket Sembako (130 buah)		16.250.000	
		Susu (1145 buah)		2.750.000	
		Minyak goreng 1.056 liter			25.000.000
34	PERUM BULOG	Bantuan Sembako		54.000.000	
35	PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Gerobak/ Booth Kontainer (6 unit)		87.000.000	
36	PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk	Susu Milku (5.000 botol)		12.250.000	
		Masker (2000 buah)		14.000.000	
37	PT. INTI DAYA GUNA ANEKAWARNA (INDANA)	Cat Outdoor (100 galon)		20.700.000	
38	LARISSA AETHETIC CENTER MADIUN	Tempat Cuci Tangan Injak (6 unit)		9.900.000	
		Masker Medis (40 box)		2.640.000	

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
39	PT. CALVARY ABADI	Paket Sembako (2000 paket)		202.000.000	
		Masker Medis (100.000 lembar)		40.000.000	
		Beras 10 ton dan Minyak Goreng 5.185 liter			159.997.500
40	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PG. PAGOTAN)	Gula Pasir (10 Sack)		5.250.000	
41	PT. BAKTI NETRA UTAMA	Mesin Potong Rumput (11 unit)		18.700.000	
		Peralatan Gergaji Mesin (6 unit)		21.300.000	
42	POLITEKNI PERKERETAAPIAN INDONESIA	Paket Sembako (300 paket)		60.000.000	
43	PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk	Booth Container (10 unit)		75.000.000	
44	PT. ULER RAYA INDONESIA	Paket Sembako (100 paket)		10.000.000	
45	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk	Bantuan Sarpras Lingkungan		120.000.000	
46	PT. PESTA PORA ABADI	Masker Medis (20 box)		5.000.000	
47	PT. PEGADAIAN PERSERO	Vitamin (100 pack)		5.000.000	
48	PT. ACE HARDWARE INDONESIA LAWU PLAZA MADIUN	Earloop Face Mask (1440 pack)		47.376.000	
49	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	Soud System Mushola dan Soud Outdoor Sumber Umis, AC 2 unit, CCTV 4 titik dan Vocher belanja Rp.100.000,00 (60 vocher)			200.100.000
50	PT. REJEKI TAMBAH BAROKAH	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, susu) sejumlah 195 paket			11.640.000
51	PT. ADHI KARTIKA JAYA	Beras 10 ton dan minyak goreng 2.962 liter			149.987.000
52	PT. MADIUN RITELINDO (PLAZA MADIUN)	Sewa Area Café Pelayanan Publik dan Shervice Charge			26.748.660
53	TOKO MODERN LARAIA	Paket sembako (beras, minyak goreng, gula, mie instan, roti roma) sejumlah 200 paket			32.000.000
54	PT. MERAK JAYA PRACETAK	Minyak goreng 2.000 liter			26.000.000
55	YAYASAN PELATIHAN FITRI AL-BAASITU	Beras 1.000 kg dan minyak goreng 1.000 liter			23.600.000
<b>JUMLAH</b>			<b>6.251.135.661</b>	<b>2.421.662.500</b>	<b>2.594.038.196</b>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2022 | Keterangan: \*belum termasuk CSR yang nilainya tidak tersedia



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan di berbagai level dapat dilakukan jika prioritas pembangunan dapat bersinergi dengan baik di level pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus bersinergi dengan berbagai tujuan dan sasaran di berbagai level khususnya pemerintah provinsi dan Pusat. Prioritas pembangunan daerah di Kota Madiun sejalan dengan prioritas pembangunan di level Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari visi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah. Keterkaitan visi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



**Gambar 4.1 Keterkaitan Visi antar Level Pemerintahan**

Visi Kepala Daerah Kota Madiun tahun 2019 – 2024 memiliki keterkaitan erat dengan visi Gubernur Jawa Timur dan Presiden. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Terdapat 2 (dua) pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024.

Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun bersih dan berwibawa. Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Pilar kedua adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.2 dibawah ini, Terdapat 4 (empat) misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Misi kesatu dan kedua dirumuskan untuk mewujudkan pilar pertama yakni Pemerintahan Bersih Berwibawa. Sedangkan Misi ketiga dan keempat dirumuskan untuk mewujudkan pilar kedua yakni Masyarakat Sejahtera.



**Gambar 4.2**  
**Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024**

Dalam rangka pencapaian misi diatas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024**

<b>Tujuan dan Sasaran</b>		
<b>1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>		
<b>T1</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	<b>IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi</b>
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
<b>2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>		
<b>T2</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	<b>IT2.1. livable city</b>
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<b>3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T3</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	<b>IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia</b> <b>IT3.2. Indeks Pembangunan Gender</b>
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
<b>4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
<b>T5</b>	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	<b>IT5.1. Indeks Ketentraman</b> <b>IT5.2. Indek Gini</b>
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan IS11.2. Indeks rasa aman

## **4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Madiun tahun 2024 akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis pembangunan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang tahunan, pokok pikiran DPRD, dan arah kebijakan pembangunan tahunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD. Penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada isu strategis Kota Madiun pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

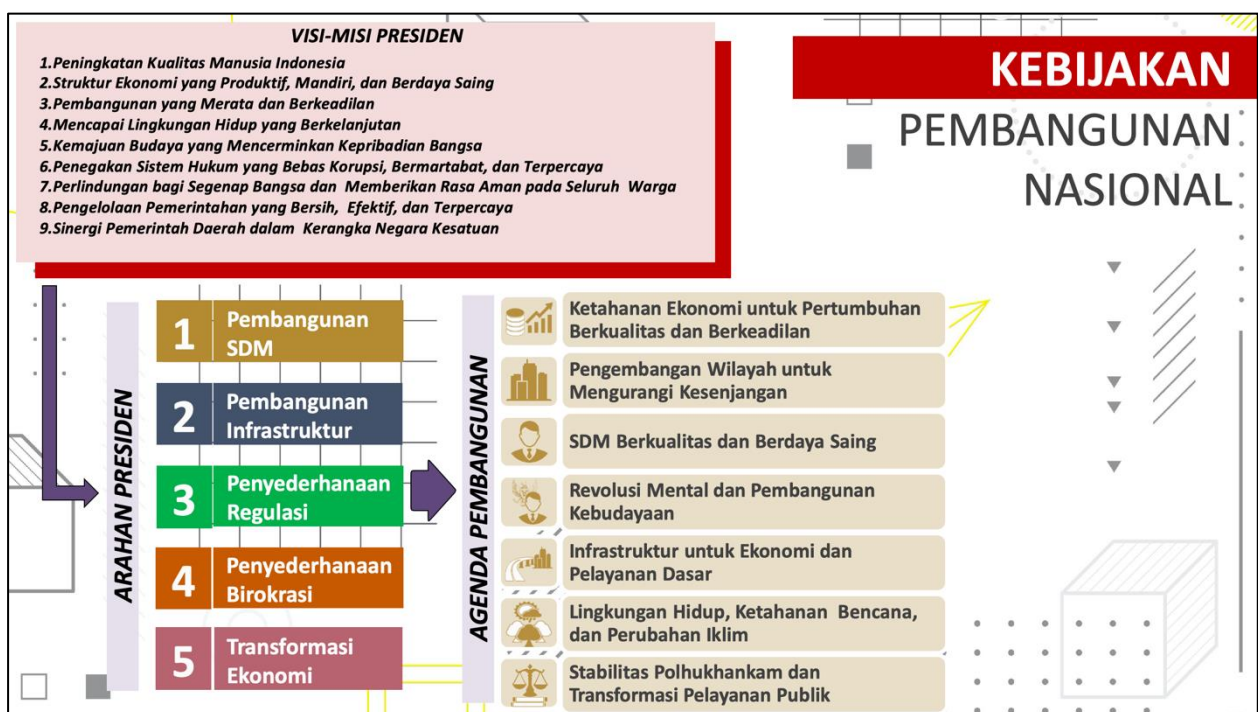
Penentuan prioritas pembangunan Kota Madiun mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berfungsi untuk menciptakan sinergitas pembangunan di pusat dan daerah. Prioritas pembangunan Kota Madiun diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Madiun tahun 2024 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun 2019–2024. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sinkronisasi antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

### **4.2.1 Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pembangunan nasional menekankan pada penyelesaian dan penuntasan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan.

Pada Gambar 4.3 digambarkan hubungan antara Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024. Terdapat 9 (Sembilan) misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Presiden tersebut adalah: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkedaulatan; 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian

Bangsa; 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Kelima arahan tersebut mencakup: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.



**Gambar 4.3 Hubungan antara Visi, Misi, Arahan Presiden dan 7 agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.3 diatas, 5 (Lima) arahan presiden diatas di transformasikan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan beserta sarannya. Dalam upaya mencapai 7 (tujuh) agenda pembangunan pemerintah menetapkan proyek dengan daya ungkit tinggi. Proyek tersebut diantaranya 41 proyek prioritas strategis. Tujuh agenda pembangunan utama pemerintah pusat diantaranya adalah sebagai berikut:

**1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1). Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2). Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

**2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1). Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2). Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3). Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4). Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5). Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

**3. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1). Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2). Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3). Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4). Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5). Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6). Pengentasan kemiskinan; dan 7). Peningkatan produktivitas dan daya saing.

**4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1). Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2). Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3). Moderasi beragama; dan 4). Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Ide dasar dari digaungkannya gerakan revolusi mental karena merupakan hal yang penting dalam pembangunan negara tidak hanya sekadar pembangunan fisik. Modal utama membangun suatu negara, adalah membangun jiwa bangsa yang merdeka dan bebas untuk meraih kemajuan.

**5. Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1). Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2). Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3). Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4). Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5). Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

**6. Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3). Pembangunan Rendah Karbon.

**7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1). Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2). Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3). Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4). Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5). Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6). Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sejalan dengan kondisi perkembangan ekonomi global dan nasional, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2024 yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.**

Selanjutnya, prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2024 terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan sasaran yaitu: 1). Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi; dan 2). Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi seluruh pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1). Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2). Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3). Terpenuhinya layanan dasar; 4). Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5). Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu: 1). menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2). Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4). Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5). Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan 6). Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.



5. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu: 1). Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2). Meningkatnya konektivitas wilayah; 3). Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4). Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; dan 5). Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup yaitu: 1). Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2). Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3). Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu 1). Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 2). Menguatnya stabilitas Polhukhankam; dan 3). Terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024, arah kebijakan nasional yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Pembahasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan RKP tahun 2024 yang telah dijabarkan dalam uraian di atas, dapat digambarkan dalam Gambar 4.4.



**Gambar 4.4 Tema, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Selain menetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional, pemerintah pusat juga memberikan informasi beberapa major project yang akan menjadi fokus pendanaan di Tahun 2024, sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.5 dibawah ini.



**Gambar 4.5 Major Project dalam RKP Tahun 2024**

Beberapa major project tersebut linier dengan fokus-fokus pembangunan 2024, yaitu: Pertama, untuk fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, beberapa major project yang memperoleh penekanan adalah: 1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; 2) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; 3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas (termasuk kimia dan farmasi); 4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan 5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

Kedua, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada major project baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, akan ada major project yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Keempat, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

#### 4.2.2 Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Visi pembangunan Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 adalah **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah; 2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan; 3. Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan 4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.



Gambar 4.6 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.6 diatas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa timur, pemerintah provinsi menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi prioritas dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional seperti terlihat dalam gambar berikut

7 Agenda Pembangunan Nasional	7 Agenda Pembangunan Jatim
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</li><li>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li><li>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</li><li>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li><li>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li><li>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</li><li>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata</li><li>2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</li><li>3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,</li><li>4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</li><li>5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</li><li>6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,</li><li>7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</li></ol>

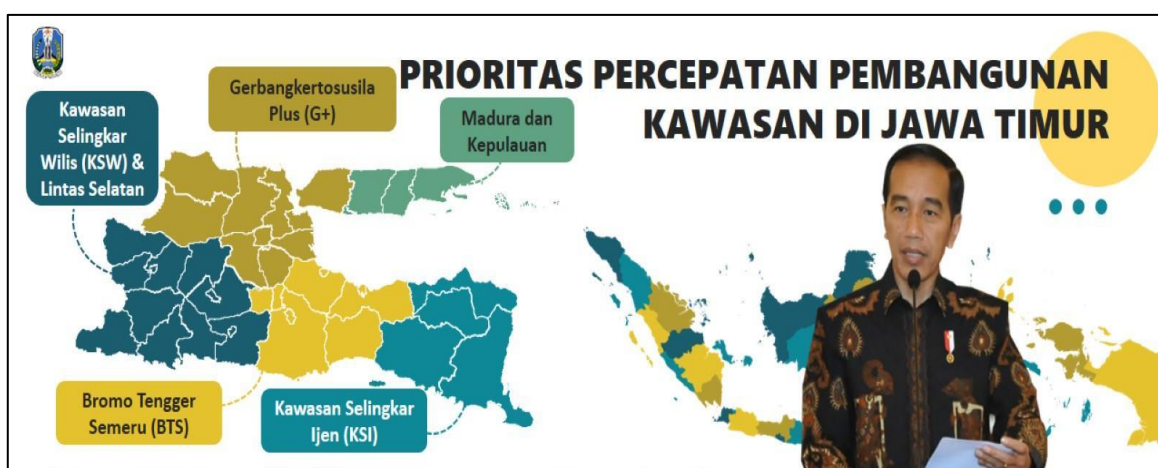
**Gambar 4.7 Keselarasan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.7 diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2024. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah sector Sekunder dan Pariwisata; 2). Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 3). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan; 4). Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal; 5). Peningkatan dan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi; 6). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan 7). Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Tema RKP Tahun 2024 adalah **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, arah kebijakannya adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan RKP dan RPJMD tersebut, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur 2024 adalah Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak.

Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah, hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.8 dibawah ini, percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.



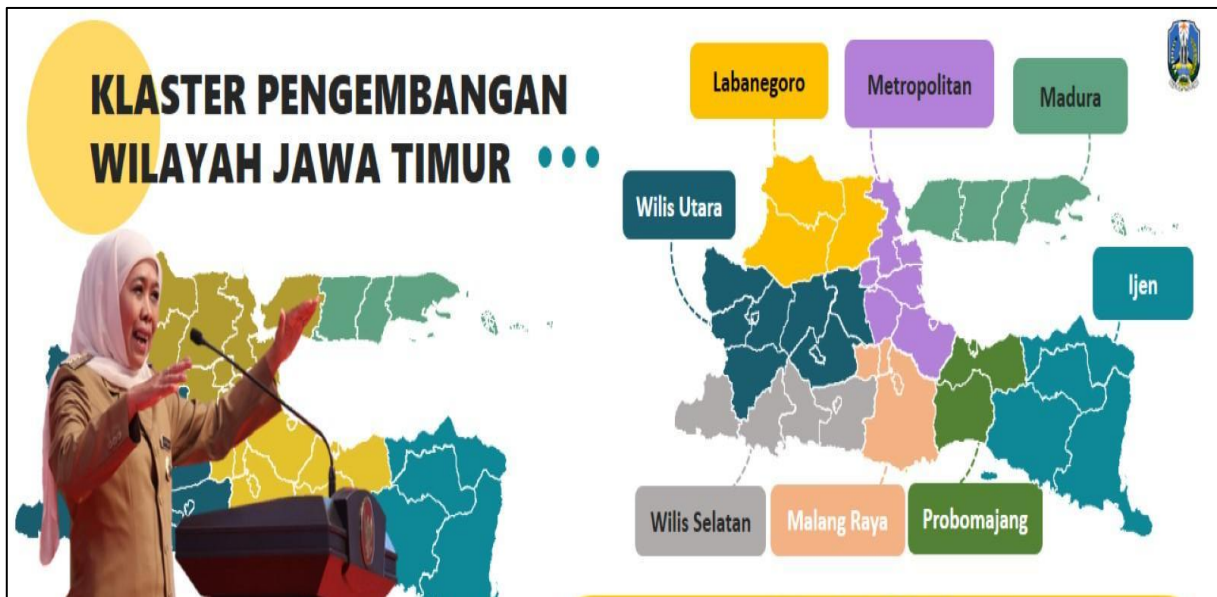
**Gambar 4.8 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur**

Selain mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan, pembangunan kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbang Kertasusila. Kawasan prioritas kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan prodktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri, dan pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Nilai tambah Agroindustri pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka. Pengembangan pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya. Didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

Pembagian Wilayah Pembangunan pada Provinsi Jawa Timur, dibagi menjadi 8 (delapan) kluster yaitu: Wilis Utara, Wilis Selatan, Malang Raya, Probomajang, Ijen, Madura, Metropolitan dan Labanegoro.



**Gambar 4.9 Pembagian Kluster Wilayah Pembangunan Jawa Timur**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.9 diatas, di Jawa Timur, penetapan kluster di Jawa Timur dirumuskan atas dasar RPJMD tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Kluster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Kluster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan kluster adalah kluster 2 (2) yaitu Wilis Utara. Kluster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Kluster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

**a. Aspek Sosial**

Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta.

Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat pluralistik atau majemuk.

Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap sumber daya manusia ataupun pengelolaan potensi sumber daya alamnya.

Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Kesehatan, peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil, dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

**b. Aspek Ekonomi**

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas, perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

**c. Aspek Infrastruktur**

Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dan peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

**4.2.3 Prioritas dan Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana rah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024**

<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kepegawaian Daerah</li><li>• Pendidikan Dan Pelatihan</li><li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</li><li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li><li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>• Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengumuman Informasi</li><li>• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li></ul>



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>● Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>● Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</li> <li>● Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>● Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>● Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>● Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</li> <li>● Program Pendaftaran Penduduk</li> <li>● Program Pencatatan Sipil</li> <li>● Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>● Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>● Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> <li>● Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</li> <li>● Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>● Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>● Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</li> <li>● Program Pengelolaan Arsip</li> <li>● Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</li> </ul>
<p>Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah</p>	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li> <li>● Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</li> <li>● Program Pengembangan Umkm</li> <li>● Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>● Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>● Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting</li> <li>● Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>● Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>● Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>● Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>● Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>● Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>● Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>● Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>● Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</li> <li>● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>● Program Hubungan Industrial</li> <li>● Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>● Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> <li>● Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> <li>● Program Pembangunan Iklim Penanaman Modal</li> <li>● Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>● Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>● Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>● Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>● Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>● Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>● Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>● Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>● Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
<p>Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>● Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>● Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> <li>● Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>● Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
	dan pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Pembinaan Perpustakaan</li> <li>• Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</li> <li>• Program Pengendalian Penduduk</li> <li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sekahtera (KS)</li> <li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Program Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>• Program Perlindungan Khusus Anak</li> <li>• Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> <li>• Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Peningkatan Konflik Sosial</li> <li>• Program Penanganan Bencana</li> <li>• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ul>
Optimalisasi pengelolaan	Pembangunan/ pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Pengembangan Perumahan</li> <li>● Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>● Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>● Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>● Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</li> <li>● Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>● Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>● Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>● Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> <li>● Program Penanggulangan Bencana</li> <li>● Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>● Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>● Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>● Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>● Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>● Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>● Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>● Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>● Program Pengelolaan Izin Lokasi</li> <li>● Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</li> <li>● Program Penatagunaan Tanah</li> </ul>

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.2 diatas, telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme reses masa sidang maupun kunjungan kerja. Hasil dari

rees dan kunjungan kerja tersebut dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan. Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat Per Daerah Pemilihan (Dapil)**

No	JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN				Jumlah Jenis Usulan
		Dapil I Kartoharjo	Dapil II Taman 1	Dapil III Taman 2	Dapil VI Manguharjo	
1	Bansos Individu	1	1	1	1	4
2	asuransi kecelakaan kerja sektor informal		1			1
3	pengajuan beasiswa pendidikan	1				1
4	pelatihan ketrampilan pencaker			1	1	2
5	jambanisasi				4	4
6	perbaikan rumah tidak layak huni				4	4
7	pavingisasi	7	5		4	16
8	penyediaan/ perbaikan lampu jalan	2	1	2	9	14
9	bantuan sarpras keagamaan	2	1	2	4	9
10	penambahan titik wifi gratis	1	3			4
11	bantuan Bibit ikan	2		1		3
12	bantuan bibit sayuran			3		3
13	bantuan bibit tanaman hias	1		1	1	3
14	bantuan hewan ternak	1				1
15	bantuan peralatan pertanian			1	2	3
16	sarana dan prasarana posyandu				1	1
17	pelatihan pengembangan UMKM	1		1	3	5
18	pelatihan pengembangan usaha perikanan				1	1
19	pengadaan sarpras olahraga			3		3
20	pengajuan alat kesenian	1				1
21	perbaikan saluran air/ gorong-gorong	8	12	4	6	30
22	pembangunan saluran air/ gorong-gorong	2	4	6	4	16
23	normalisasi sungai/ saluran	5		1	3	9
24	pembangunan/ perbaikan pagar makam				1	1
25	penambahan peralatan persampahan				2	2
26	pelatihan kesenian tradisional		1	1	1	3
27	pelatihan Penanggulangan dan Pencegahan Bencana		1			1
28	pembangunan/ perbaikan trotoar	1	1			2

No	JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN				Jumlah Jenis Usulan
		Dapil I Kartoharjo	Dapil II Taman 1	Dapil III Taman 2	Dapil VI Manguharjo	
29	perbaikan jalan	3	3	8	6	20
30	pembangunan jalan	1	2		3	6
31	perbaikan jembatan	1				1
32	pembangunan jembatan				1	1
33	pembangunan RTH	1		2		3
34	pemeliharaan RTH/ taman	1			2	3
35	pembangunan/ rehabilitasi gedung			1		1
36	pembangunan/ perbaikan JUT	1				1
<b>Jumlah Usulan Tiap Daerah Pemilihan</b>		<b>44</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>183</b>

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.2 diatas, penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahaan permasalahan pembangunan dan perumusan isu strategis. Isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif pasca pandemik;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
3. Kualitas sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi.

Berikut adalah keterkaitan isu strategis nasional, provinsi dan Kota Madiun Tahun 2024 yang digambarkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel 4.2 diatas, secara detail berikut dijabarkan lebih lanjut isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2024, yaitu:

**Tabel 4.4 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
<b>Isu Strategis 1: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi</b>	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
	Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan
	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
	Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
	Pelaksanaan pemilu 2024 harus bias dinatisipasi secara baik
<b>Isu Strategis 2: Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif</b>	Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi di Jawa Timur tahun 2021, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan</p> <p>Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry</p> <p>Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi</p> <p>Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS</p> <p>Masih rendahnya kontribusi BUMD</p> <p>Masih terbatasnya kontribusi PAD</p> <p>Infrastruktur pendukung investasi belum memadai</p> <p>Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun</p> <p>Masih terbtasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun</p> <p>Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun</p> <p>Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun</p> <p>Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai</p> <p>Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal</p> <p>Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal</p> <p>Pengangguran yang meningkat.</p>
<p><b>Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing</b></p>	<p>Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah</p> <p>Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khususnya gedung dan bangunan)</p> <p>Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)</p> <p>Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi</p> <p>Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)</p>



ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Akses Internet yang kurang memadai
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki kompetensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisisionis, Dietisien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19</p> <p>Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Masih terdapatnya perkawinan anak</p> <p>Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</p> <p>Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan</p> <p>SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran</p> <p>Belum adanya manajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran</p>
<p><b>Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan</b></p>	<p>Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kota</p> <p>Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang</p> <p>Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang</p> <p>Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</p> <p>Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang</p> <p>banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan</p> <p>Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar di beberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai
	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kepenghunian dan backlog kepemilikan.
	Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
	Mash terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.4 diatas, sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
<b>Isu Strategis 1: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<b>Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</b>

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
	teknologi (e-government) secara terpadu		
<b>Isu Strategis 2: Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif</b>	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<b>Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>
<b>Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing</b>	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	<b>Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial</b>
<b>Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan</b>	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<b>Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan</b>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

Kebijakan Pembiayaan pendukung Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2024

Tabel 4. 6 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Bertasipasi Dalam Pendidikan (APS)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	100	%	Kota Madiun	375.065.000	Dinas Pendidikan
2	Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100	%	Kota Madiun	16.960.981.883	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia				985.000.000	
		Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitas Sedang/Berat				2.936.577.374	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitas Sedang/Berat				3.044.205.503	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10.943.299.820	
3	Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	100	%	Kota Madiun	728.430.000	
4	Iklim Keamanan SMP	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	85,60	Nilai	Kota Madiun	100.767.000	
5	Iklim Kebhinekaan SD	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	96,52	Nilai	Kota Madiun	708.000.000	
6	Iklim Kebhinekaan SMP	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	95,15	Nilai	Kota Madiun	100.767.000	
7	Iklim Inklusivitas SD	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	82,72	Nilai	Kota Madiun	708.000.000	
8	Iklim Inklusivitas SMP	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan	82,19	Nilai	Kota Madiun	100.767.000	
9	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	63,83	Nilai	Kota Madiun	1.370.000.000	
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Nonformal/Kesetaraan				10.943.299.820	
10	Rata-Rata Kemampuan Numeral SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46,91	Nilai	Kota Madiun	1.370.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Nonformal/Kesetaraan				10.943.299.820	
11	Rata-Rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	77,03	Nilai	Kota Madiun	1.370.000.000	
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Nonformal/Kesetaraan				10.943.299.820	
12	Rata-Rata Kompetensi Numeransi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62,11	Nilai	Kota Madiun	1.370.000.000	
		Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Nonformal/Kesetaraan				10.943.299.820	
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan manajemen	91,03	%	Kota Madiun	1.053.796.000	
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi	94,07	%	Kota Madiun	5.940.000.000	
15	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100	%	Kota Madiun	21.269.000	DPUPR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			di wilayah kabupaten/kota					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	100	%	Kota Madiun	21.269.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100	%	Kota Madiun	21.269.000	
16	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase Jambanisasi yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	100	Rumah	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Bansos Jambanisasi)						
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peemajaan permukiman kumuh	60	cpb	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	450.000.000	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh (Pembangunan MCK)						
17	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2490	Orang	Kota Madiun	1.056.058.600	DinkesPPKB
18	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2377	Orang	Kota Madiun	54.803.200	
19	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2264	Orang	Kota Madiun	85.032.800	
20	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9218	Orang	Kota Madiun	272.791.000	
21	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31972	Orang	Kota Madiun	134.830.000	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115490	Orang	Kota Madiun	128.020.408	
23	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	28597	Orang	Kota Madiun	96.064.100	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
24	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68973	Orang	Kota Madiun	13.567.000	
25	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8143	Orang	Kota Madiun	202.676.000	
26	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	338	Orang	Kota Madiun	72.735.000	
27	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5076	Orang	Kota Madiun	63.544.750	
28	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5780	Orang	Kota Madiun	239.810.100	
29	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		100	%	Kota Madiun		Satpol PP dan DAMkar
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					4.183.711.100	
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					1.237.377.860	
30	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	%	Kota Madiun		
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.063.750.000	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>					163.530.000	
31	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						BPBD
		<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>						
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	50.000.000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komukikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabuaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka keada Penduduk yang tinggal di daerah bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan temat tinggalnya	300	orang	Kota Madiun	62.354.000	
32	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>					50.000.000	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	87.155.000	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200	orang		19.040.000	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas	5	unit		50.650.000	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6	kawasan		888.600.000	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan managerialnya	37	orang		48.945.000	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300	orang			
		33	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	<b>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>				
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana			12	orang		80.475.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12	orang		25.640.000	
34	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100	%	Kota Madiun		Dinas Sosial PP PA
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti							
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti							
35	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20	%	Kota Madiun		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	165	orang	Kota Madiun	204.084.000	
		Penyediaan Sandang		60	orang	Kota Madiun	25.768.681	
		Penyediaan Alat Bantu		13	orang	Kota Madiun	35.457.200	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		12	orang	Kota Madiun	42.300.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		62	orang	Kota Madiun	10.100.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		270	orang	Kota Madiun	666,392,900	
		Pemberian Layanan Kedaruratan		60	orang	Kota Madiun	103.969.400	
36	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		bencana bagi korban bencana					
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sos					
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	orang		39.282.600	
		Penyediaan Sandang		300	orang		15.177.300	
		Pelayanan Dukungan Psikososial		15	orang		23.750.000	

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

Sebagaimana Tabel 4.5 diatas, terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 4.11 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.11 diatas, empat prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2024 didasari oleh beberapa faktor sebagai berikut:

**1. Penguatan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City**

Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan perkotaan. Konsep Smart City yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Pembangunan berbasis Smart City akan bermuara pada pencapaian pelayanan publik yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berbasis Smart City harus didukung oleh reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan. Dalam memperkuat penerapan reformasi birokrasi, beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan publik berbasis digital/IT;
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN; dan
3. Akselerasi pembentukan Zona Integritas pada pelayanan publik.

**2. Peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat**

Pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja namun harus mampu memberikan dampak pada pemerataan dan akses yang luas bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan harus bisa mencapai kesejahteraan bersama dan inklusif. Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir termasuk kedalam daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi inklusif tertinggi di Jawa Timur.

Oleh karena itu, peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dapat terus didorong melalui pengembangan sektor unggulan di Kota Madiun, ekonomi kreatif dan pariwisata kota, serta pengembangan ekonomi berbasis digital. Pemerintah kota Madiun berupaya meningkatkan kemandirian ekonomi inklusif melalui, yaitu:

1. Penguatan Pengelolaan lapak;
2. Digitalisasi transaksi UMKM;
3. Pelatihan pemasaran dan transaksi digital UMKM;
4. Percepatan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
5. Penyiapan Pasar hasil produksi UMKM melalui Lapak Kelurahan;
6. Kebijakan penggunaan produksi lokal hasil UMKM;
7. Subsidi komponen upah tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi (Asuransi ketenagakerjaan dan jaminan Hari Tua); dan
8. Pemberdayaan Masyarakat melalui proyek padat karya dan swakelola dengan pokmas.

**3. Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial**

Kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Madiun termasuk kedalam salah satu daerah dengan peringkat tertinggi di Jawa Timur yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemajuan kondisi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia menjadi modal penting dalam mencapai kesejahteraan sebuah daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan a pada aspek kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial Kota Madiun di arahkan pada:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan IPM Kota Madiun yang terdiri dari:
  - Akselerasi pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting;
  - Peningkatan Angka Harapan Hidup (penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, penurunan kematian akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular);
  - Peningkatan Harapan Lama Sekolah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
2. Percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui Bantuan pelatihan dan peralatan produksi bagi UMKM;
3. Percepatan penurunan kemiskinan melalui perbaikan database kemiskinan dan bantuan sosial terintegrasi.

**4. Penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mengadopsi kondisi lingkungan dan budaya lokal, memperhatikan daya dukung lingkungan dan preservasi sumber daya, optimalisasi SDM dan SDA untuk menjaga bio-diversity, dan optimalisasi partisipasi masyarakat dan mendorong inovasi teknologi.

Penguatan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan diarahkan pada

1. Penyelesaian infrastruktur prioritas; dan
2. Peningkatan pembangunan daerah berwawasan Kesehatan lingkungan.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2024**

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pemulihan Ekonomi	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan dan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City

Sumber: Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2023

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 4.6 diatas, berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan dan isu strategis daerah, serta sinkronisasi dengan prioritas Provinsi dan Nasional, maka Tema RKPD Kota Madiun Tahun 2024 adalah “ **Pemantapan Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan** ”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini adalah ketahanan ekonomi dan sosial diharapkan meningkat setelah terjadinya penurunan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak Covid-19 yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama pembangunan

yaitu masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, Perkembangan tema pembangunan dalam RKPD Kota Madiun tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2024

**Gambar 4.12 Perkembangan Tema Pembangunan dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2019-2024**

#### **4.2.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2024 yang berkorelasi dengan pencapaian pembangunan secara umum. Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 digambarkan dalam Gambar 4.13.



## Tema

“Pemantapan Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan”

## TEMA & PRIORITAS

### PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

## PRIORITAS

### 1

Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City

### 2

Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat



### 3

Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial

### 4

Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Gambar 4.13 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.13 diatas, untuk rincian dari Sasaran Pembangunan Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024**

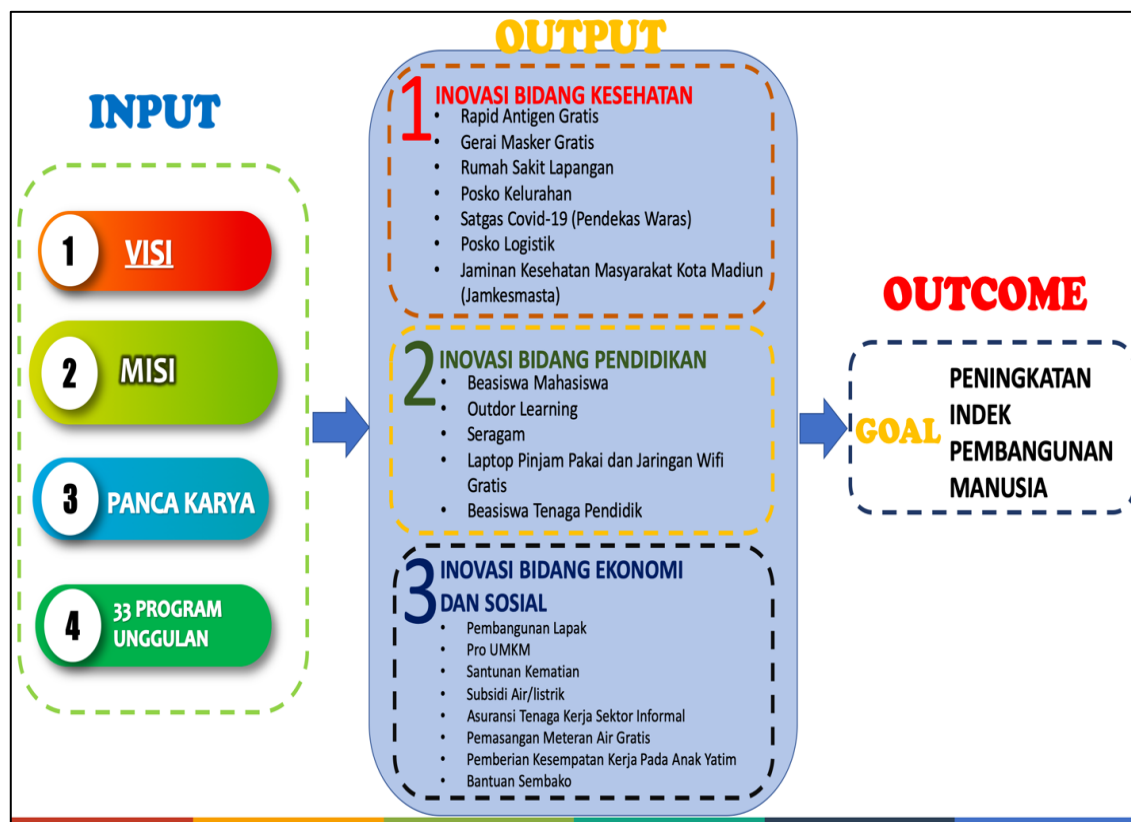
Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD di Tahun 2024	Target RKPD 2024
<b>PRIORITAS 1</b>	<b>PENGUATAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MADIUN BERBASIS SMART CITY</b>			
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	A (80,01)	A (80,01)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	3,41 (Tinggi)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90	2,90
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	86	86,964
Indeks Inovasi Daerah		1950	53,96	
<b>PRIORITAS 2</b>	<b>PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	5
	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3,16	7,98
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	1,02	21,57
<b>PRIORITAS 3</b>	<b>PERCEPATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI INKLUSIFITAS SOSIAL</b>			
	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,55	4,45

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD di Tahun 2024	Target RKPD 2024
	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	73,13
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43	14,43
		Rata-rata Lama Sekolah	11,16	11,67
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22	77,22
	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 75,00 (Harmonis)	75,68
		Indeks rasa aman	76,35	82,18
<b>PRIORITAS 4</b>	<b>PENGUATAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>			
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,59	98,59
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93	57,93

#### 4.2.5 Inovasi Daerah dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemabangunan.

Gambar 4.14 menjelaskan kerangka inovasi daerah Kota Madiun tahun 2024, dengan input adalah visi, misi, Paca Karya dan 33 Program Unggulan yang menghasilkan output yakni: inovasi bidang kesehatan, inovasi bidang kesehatan serta inovasi bidang ekonomi dan sosial. Dengan input dan output yang dirumuskan akan dihasilkan outcome berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.



**Gambar 4.14 Kerangka Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2024**

Sebagaimana yang termuat pada Gambar 4.14 diatas, selanjutnya beberapa program prioritas dan inovasi yang digagas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dan dikembangkan pada Tahun 2024 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu, antara lain:

**Tabel 4.9 Inovasi Daerah dalam rangka Mempercepat Pencapaian Target Kinerja**

PROGRAM DAN INOVASI	KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH	
<b>Prioritas 1: Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</b>				
1	SI-CAKEP (Sistem Informasi Kegiatan Pak Wali)	Inovasi Pelayanan Publik terkait Penerapan SI-CAKEP (Sistem Informasi Kegiatan Pak Wali) terkait Informasi Kegiatan Pimpinan dengan Perangkat Daerah dalam suatu sistem informasi berbasis website terkait pengaturan jadwal pimpinan. Sistem Informasi dapat diakses oleh Perangkat Daerah melalui web untuk kemudahan, percepatan dan simplifikasi layanan pencatatan kegiatan Perangkat Daerah yang disinkronasikan dengan kegiatan Wali Kota Madiun, sehingga Perangkat Daerah menjadi lebih mudah dalam menentukan jadwal	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Bagian Umum Sekretariat Daerah

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		kegiatan sehingga memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kinerja Organisasi.		
2	E-AR (Elektronik Aspirasi Rakyat)	E-AR adalah Penyampaian Aspirasi Masyarakat secara online untuk mendukung fungsi pengawasan DPRD. Bidang kategori yang disampaikan merupakan tugas pokok fungsi dan bidang tugas DPRD Kota Madiun	Masyarakat	Sekretariat DPRD
3	e-NAWASDA (electronic Sistem Pembinaan dan Pengawasan Daerah)	e-NAWASDA merupakan aplikasi berbasis web yang sedang dibangun oleh Inspektorat Kota Madiun, sebagai sarana untuk digitalisasi proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Madiun. Dashboard e-NAWASDA akan menampilkan hasil-hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Madiun, sebagai data dan informasi untuk semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sedangkan menu pengawasan pada aplikasi e-Nawasda akan menampilkan dokumentasi proses pengawasan yang dilakukan APIP secara online untuk kebutuhan peningkatan mutu pengawasan di internal Inspektorat Kota Madiun. Aplikasi ini, masih dalam tahap pembangunan, direncanakan pada bulan Maret 2023 akan dilakukan running test untuk pelaksanaan pengawasan.	Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Inspektorat
4	Layanan 3 in 1	Pelayanan kepengurusan dokumen akta kelahiran sekaligus mendapatkan 3 dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, Salinan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak	Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	GADJAH MADA (Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	Petugas Adminduk Berkunjung ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia merupakan layanan perekaman KTP-El ke rumah bagi penduduk rentan yang belum pernah melakukan rekam KTP-El dan mempunyai halangan tetap, misalnya penduduk usia lanjut (LANSIA) atau sakit sehingga tidak bisa berpergian keluar rumah.	Masyarakat	
6	TAKSIAH (Antar Akta Kematian Seraya Memuliakan Jenazah)	Antar Akta Kematian Seraya Memuliakan Jenazah merupakan layanan antar dokumen kependudukan sampai ke tempat tinggal penduduk khususnya untuk kepengurusan akta kematian	Masyarakat	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
7	BHAKTIKU EYANGKU (Bawakan Akta Kelahiran Untukmu Eyangku)	Bawakan Akta Kelahiran Untukmu Eyangku merupakan pelayanan khusus dokumen Akta Kelahiran yang sudah terlambat melalui pertemuan lansia di Kelurahan yang dikoordinir oleh pengurus Lansia dan dokumen diserahkan ke Kantor Dinas Dukcapil untuk menerbitkan akta kelahiran.	Masyarakat	
8	WATER MELON (WA Center Melayani Slalu ON)	Merupakan layanan secara terpadu melalui WA pelayanan Pemerintah Kota Madiun dengan nomor 08113577800	Masyarakat	
9	PECEL ANDOK BU TUMI (Pelayanan cepat keliling administrasi kependudukan buka sabtu minggu)	Pelayanan cepat keliling administrasi kependudukan buka sabtu minggu. Merupakan layanan semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang pelaksanaannya difasilitasi umum/kelurahan/lapak di hari Sabtu dan Minggu	Masyarakat	
10	ANTI PREI (Antar dan Datangi Pemohon Adminduk secara Gratis setiap hari awan bengi)	Antar dan Datangi Pemohon Adminduk secara Gratis setiap hari awan bengi	Masyarakat	
11	BROKOHAN (Bayi Lahir Otomatis entuk Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan)	Bayi Lahir Otomatis entuk dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bekerjasama dengan bidan-bidan, Puskesmas dan Rumah Sakit untuk segera melaporkan peristiwa bayi yang baru lahir melalui BROKOHAN untuk mendapatkan NIK di Kartu Keluarga, Salinan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.	Masyarakat	
12	Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi)	Merupakan program kebijakan pembangunan layanan wifi gratis bagi masyarakat. Titik target pemasangan adalah semua RT (poskamling) dan fasilitas umum di kota Madiun dan telah dikembangkan dengan IoT dan layanan online. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital.	Masyarakat dan OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Awak Sigap (Anda WA, Kami Siap)	Merupakan layanan pengaduan dari masyarakat yang menggabungkan layanan kegawatdaruratan (layanan 112) dengan layanan klik whatsapp	Masyarakat dan OPD	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
	Segera Tanggap)	(klik wa). Layanan tersebut berfungsi untuk menampung keluhan dan pengaduan, baik dari internal Pemkot Madiun maupun masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan kegawatdaruratan, informasi, keluhan dan pengaduan tentang pelayanan publik, khususnya di wilayah Kota Madiun.		
14	Manekin Kota Madiun (Manajemen Kinerja Kota Madiun)	Aplikasi terintegrasi dengan aplikasi lainnya, yaitu aplikasi simpeg (kepegawaian), e-sakip, skp, e-kak. Aplikasi ini sudah menggunakan SSO (Single Sign On).	PNS Pemerintah Kota Madiun	
15	Mbangun Swarga (Madiun Membangun Sejahtera Bersama Warga)	Aplikasi terintegrasi yang berguna untuk menghimpun data penduduk yang berkolaborasi dengan data dan aplikasi antar layanan perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun di antaranya, Puskesmas melalui aplikasi Pendekar Kesos oleh Dinsos PPPA, bantuan penanggulangan Stunting dari Dinkes PPKB, Siaga Kita, dan Sicaker oleh Disnaker KUKM. Juga, bantuan beasiswa dari Dinas Pendidikan. Serta, layanan Pecel Tumpang di seluruh kelurahan.	PNS Pemerintah Kota Madiun	
16	Madiuntoday Ngegas Ekonomi	Merupakan inovasi pelayanan publik yang lahir di masa Pandemi Covid-19. Madiuntoday sebagai platform digital berupaya memanfaatkan pengaruh dunia maya yang semakin meluas untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam hal pemasaran produk. Tujuan dari inovasi ini adalah sebagai sarana promosi produk UMKM yang lebih luas. Terutama, produk UMKM khas Kota Madiun agar dikenal masyarakat. Tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga luar kota. Bahkan, luar negeri.	· Pelaku UMKM  · Masyarakat umum	
17	JEBOL KIPER (Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik serta Evaluasi LAPOR)	merupakan inovasi pelayanan informasi publik yang dilakukan Diskominfo Kota Madiun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dinas Kominfo telah memiliki banyak kanal pengaduan publik dan permohonan informasi diantaranya, call center 112, SP4N LAPOR, Klik WA, LPPL Suara Madiun, Help Desk PPID Kota Madiun, AWAK SIGAP dan akun resmi Facebook Pemerintah Kota	· masyarakat · KIM · PKK · Media	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		Madiun. Melalui JEBOL KIPER, masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan informasi kanal-kanal pengaduan dan permohonan informasi tersebut dan atau langsung mendapatkan informasi/pengaduan terkait layanan- layanan lainnya di Pemerintah Kota Madiun		
18	Rasa Warga	Merupakan inovasi pelayanan publik yang berinteraksi/ berdialog langsung dengan masyarakat Kota Madiun yang memberikan fasilitas kepada masyarakat sebagai sarana pengembangan potensi, mengulas beragam bisnis, UMKM, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan prestasi dan kegiatan, serta sebagai media untuk menyerap aspirasi dari seluruh warga masyarakat Kota Madiun dengan mekanisme Tim Reporter yang langsung terjun ke lapangan untuk mendatangi masyarakat dan mengekspose potensi serta aspirasi mereka.	Masyarakat Umum	
19	Kelas Sahabat	Inovasi pelayanan informasi yang edukatif dengan menyajikan beragam pembelajaran melalui media siaran yang bekerja sama dengan akademisi, pegiat teknologi informasi dan komunikasi serta kelompok informasi masyarakat (KIM). Tujuan program ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan kompetitif. Program ini disiarkan secara live dan dapat dikatakan program acara yang memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat sesuai alur pelayanan informasi kepada Pemerintah Kota Madiun.	Masyarakat/Mahasiswa/Pelajar	
20	D'ARTIS" (Digitalisasi Arsip Statis)	Merupakan inovasi yang bertujuan hemat biaya, meningkatkan waktu respons pelayanan, efektif dan efisien, lebih aman dan terjaga serta memudahkan akses arsip, ketersediaan arsip dan keterbukaan akses dan Arsip digital dapat digunakan untuk menyelamatkan arsip dari bahaya kerusakan, karena arsip kertas (konvensional) yang diakses oleh pengguna mulai	OPD dan Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		mengalami kerapuhan kertas meskipun telah dilakukan preservasi arsip secara manual, Fungsi digitalisasi tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana, untuk meningkatkan resolusi, gambar dan file lebih stabil. Diharapkan dengan adanya sistem digitalisasi ini organisasi perangkat daerah dan masyarakat akan memanfaatkan layanan arsip lebih optimal.		
<b>Prioritas 2 : Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>				
1	E-Ruang GOR Wilis, Asrama Haji dan Stadion	Inovasi ini dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik terkait fasilitasi penyedia layanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dengan adanya inovasi ini penjadwalan sarana yang akan disewa bisa dipersiapkan secara maksimal oleh pengelola. Bagi penyewa juga akan langsung melihat biaya/ tarif sehingga tidak ada pungli.	Masyarakat/Umum/ Lembaga/Kantor/Swasta	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	MASS (Madiunkota Single Submission)	MASS dikembangkan karena kebutuhan percepatan pengurusan perizinan di Kota Madiun pada tahun 2018 pada kelompok pelaku usaha dan tenaga kesehatan yang membutuhkan izin kerja, izin praktek dan izin usaha di wilayah Kota Madiun. Melalui aplikasi ini pemohon cukup mengisi formulir, mengunggah dokumen dalam bentuk scan dan menunggu notifikasi untuk melakukan cetak dokumen perizinan.	Masyarakat/ Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	HALPER/ HALO PERIZINAN (OSS RBA) di LPPL SUARA MADIUN 93 FM	Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, dalam hal perizinan berusaha melalui OSS RBA, menjamin pemohon akan kemudahan dalam proses perizinan, meningkatkan pertumbuhan UMKM baru penanaman modal, meningkatkan monitoring para pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha, meningkatkan kerja sama		



PROGRAM DAN INOVASI	KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
	antar satuan unit kerja di Pemerintah Kota Madiun. Kegiatan ini dilaksanakan di LPPL Radio Suara Madiun pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan mulai pukul 08.00-09.00 WIB.		
4	Helpdesk SAPA (Siap Pandu Permasalahan) LKPM	Masyarakat/Pelaku Usaha	
5	PETI KEMAS (Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kota Madiun)	Masyarakat/Pelaku Usaha/Calon Investor	
6	SIAP KAKA (Sistem Pendampingan Pelayanan Perizinan Keliling Kelurahan Kota Madiun)	Masyarakat/Pelaku Usaha	
7	SIM PASAR (Sistem Informasi Pasar)	Masyarakat Penyewa Pasar	Dinas Perdagangan

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
8	WARTEK Inflasi Kota Madiun (Warung Tekan Inflasi)	Inovasi pelayanan publik terkait dengan pengendalian inflasi Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan dengan menyelenggarakan Program Penyaluran Belanja Subsidi. Tujuan dari inovasi ini adalah menstabilkan harga sehingga dapat membantu masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dengan mudah dan murah. Pelaksanaan program ini di WARTEK yang tersedia se-Wilayah Kota Madiun. Inovasi ini dikolaborasikan dengan website yang didesain oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, dengan nama Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SI OPA OMA) yang tujuannya untuk merekam transaksi penjualan komoditas yang disubsidi untuk membatasi pembelian dalam jangka waktu tertentu	Masyarakat	
9	Si Caker (Sistem Cari Kerja)	Inovasi pelayanan publik, yaitu Aplikasi SICAKER (Sistem Pencari Kerja) adalah memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat serta memfasilitasi perusahaan dalam pemasangan iklan lowongan kerja dan mencari kandidat calon pencari kerja. Masyarakat dapat langsung mendaftar dan memasukkan lamaran kerja sehingga proses pencairan kerja dapat lebih mudah, efektif dan efisien. Serta memfasilitasi masyarakat Kota Madiun yang ingin mengajukan permohonan Surat AK1 (Kartu Kuning/Kartu Tanda Pencari Kerja) untuk mencari pekerjaan dan sebagai persyaratan untuk melengkapi berkas lamaran pekerjaan.	Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
10	E-Kami (Elektronik Katalog Industri Kecil Menengah Kota Madiun)	Inovasi ini berupa sebuah Aplikasi yang dapat di Akses pada Smartphone berbasis android yang ditujukan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan masyarakat umum Kota Madiun. Aplikasi ini berfungsi untuk memasarkan Produk- Produk IKM Kota Madiun.	Masyarakat pelaku IKM	
11	Edukasi Outdoor Learning untuk Pelajar	Inovasi Pelayanan Publik kepada Pelajar di Kota Madiun yang mengajukan permohonan kegiatan edukasi melalui surat ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tujuan memberikan	Pelajar di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PROGRAM DAN INOVASI	KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH	
	informasi dan edukasi sejak dini tentang cara bercocok tanam, memelihara hewan/ternak, dan pengenalan Lingkungan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.			
<b>Prioritas 3 : Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial</b>				
1	Wisuda Siti Dimanja (Wisata Edukasi Berbasis Teknologi Informasi Lejitkan Kemampuan Discovery, Kemandirian dan Kerja sama)	Inovasi pelayanan publik terkait pembelajaran Outdoor Learning yang memberikan alternative cara pembelajaran membangun makna dan memberikan pengalaman lebih berkesan dengan optimalisasi pemanfaatan pembangunan destinasi wisata Kota Madiun dan pemanfaatan bantuan laptop dari Pemerintah Kota Madiun. Inovasi ini memberikan jaminan kualitas pendidikan yang inklusif, merata dan adaptif. Tiga hal utama program ini yaitu wisata edukasi, outdoor learning, dan teknologi informasi. Inovasi ini sangat unik karena memadukan pengetahuan virtual dan pengalaman nyata. Tujuan inovasi ini adalah menumbuhkan kemampuan discovery (menemukan konsep/hal baru dengan memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan sekitar yang tidak tersedia dalam kelas. Menumbuhkan Sikap Kemandirian (dapat meregulasi diri sendiri) serta meningkatkan sikap kerja sama (mampu berkolaborasi efektif mencapai tujuan)	Siswa SDN, SMPN di Kota Madiun	Dinas Pendidikan
2	JUMAGI (Jum'at Religi)	Kegiatan yang menekankan pembahasan kegiatan ibadah di pagi hari bagi siswa-siswi jenjang SMP dan SD dengan membaca Surat Yasin dan dilanjutkan doa pagi hari yang dipimpin oleh Imam guru PAI menggunakan media zoom meeting secara online setiap Jum'at pagi. Sedangkan untuk agama lain juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. JUMAGI ini dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu: a. Persiapan : Siswa Siswi menyiapkan diri di tempat pelaksanaan doa di sekolah masing-masing; b. Pembacaan Doa : Imam (Guru PAI) memimpin pembacaan Surat Yasin dilanjutkan doa pagi hari;		

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		c. Penutupan : Siswa Siswi memanjatkan doa di sekolah masing-masing dan membubarkan diri.		
3	Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun)	Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) merupakan bantuan Beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang memang terkendala biaya kuliahnya terutama bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yatim piatu. Be Smart Madiun adalah inovasi pendaftaran Beasiswa secara Online dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses aplikasi pendaftaran. Dengan Be Smart akan mencetak masyarakat Kota Madiun yang cerdas dan berkualitas.		
4	Warung Stop Stunting Dinas Kesehatan, PP dan KB	Warung Stop Stunting (WSS) adalah inovasi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya penurunan stunting di Kota Madiun melalui peningkatan status gizi ibu hamil dan balita kurang gizi dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Warung stop stunting dilaksanakan setiap minggu di Lapak UMKM setiap Kelurahan dengan kegiatan : a. Makan bersama b. Pemberian bahan mentah c. Pemberian voucher belanja d. Penyuluhan kesehatan Ibu dan Anak oleh PKK Kelurahan dengan materi yang berbeda di setiap minggu	Ibu Hamil, Balita	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Kawan Diska Dinas Kesehatan, PP dan KB	Kegiatan promosi kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara digital melalui platform instagram, youtube, dan tik tok yang menyiarkan informasi kesehatan setiap hari.	Masyarakat	
6	SABER KELANA (Sarana BERtemu Keluarga Agar Bahagia Selamanya)	Inovasi Pelayanan Publik terkait mempertemukan kembali khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ataupun PPKS yang terlantar di Kota Madiun dan tidak dapat kembali ke Daerah asalnya. Petugas dapat bekerja sama dengan para relawan sosial di wilayah Kota Madiun bahkan di wilayah seluruh Indonesia dalam mencari asal usul	Masyarakat Keluarga ODGJ	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM DAN INOVASI	KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
	<p>dan menemukan keberadaan keluarga mereka yang hilang melalui jejaring media sosial. Tujuan inovasi ini adalah reunifikasi/ mempertemukan klien kepada pihak keluarga dengan didasari oleh adanya assesment sosial. Dengan adanya Saber Kelana maka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa terbantu mempercepat proses penyembuhan karena selama ini masih sering terabaikan dikarenakan kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat dalam menangani mereka serta kendala yang dihadapi oleh keluarga salah satunya ketidaktahuan mereka bahwa penanganan yang paling tepat bagi ODGJ adalah berada ditengah-tengah keluarga karena dengan kasih sayang dan perhatian dari keluarga akan membantu mempercepat proses penyembuhan klien ODGJ tersebut</p>		
<p>7 <b>SIMATA JELI</b> (Sistem Informasi bagi Masyarakat koTa melalui Jendela Literasi)</p>	<p>Merupakan inovasi pelayanan publik terkait akses date pelayanan perpustakaan. Sistem ini memungkinkan masyarakat meminjam, mengembalikan dan membaca koleksi perpustakaan dengan menggunakan teknologi informasi. Untuk mengakses bisa melalui browser <b>inlis.madiunkota.go.id</b> untuk layanan peminjaman dan pengembalian koleksi. Masyarakat juga bisa membaca darimana saja dengan mendownload aplikasi di googlestore atau web melalui iMadiun. Masyarakat juga bisa menggunakan layanan KARIMU ( Jemputan Ambil antaR buku dari rumahMu ) untuk mengantar ataupun megambil koleksi karena keterbatasan waktu tidak bisa datang ke perpustakaan. Tujuan dari inovasi ini adalah memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya sistem ini masyarakat akan memanfaatkan layanan perpustakaan lebih optimal dan masyarakat bisa mengakses koleksi darimana saja dan kapan saja.</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p>

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
8	LIK PAKAR (Layanan Informasi, Edukasi, Pencegahan dan Penanganan Kebakaran)	Inovasi dengan tujuan pencegahan, penanganan dan pelaporan kebakaran dengan peralatan pemadam kebakaran berbasis aplikasi Android, masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian kebakaran dengan hanya menggunakan sentuhan jari pada layar ponsel dan terdeteksi pada sistem sehingga petugas segera menuju ke lokasi kejadian dengan google maps, tujuan inovasi ini adalah mempercepat waktu pelaporan dan respon time pelayanan penanganan kebakaran guna menekan dampak kebakaran	Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	SARAN (Sigap Rawan Kebakaran)	Inovasi kesiapan dalam menghadapi kebakaran yang terdapat di wilayah Kota Madiun kapanpun dan dimanapun tempatnya. Tujuan inovasi ini adalah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran menggunakan plamflet/stiker/sosial media dan sosialisasi langsung.	Masyarakat	
10	BU LEK (Buku Elektronik)	Inovasi kearsipan yang digunakan sebagai bank data/database Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota terkait Tugas Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tujuan inovasi ini adalah mempermudah pencarian Dasar Hukum untuk menentukan keputusan dalam penindakan pelanggaran.	Anggota Satpol PP dan Damkar	
11	SI BESAR (Sistem Berkas Pelanggar)	Inovasi dalam pembuatan berkas pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota yang diangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pembuatan berkas dilakukan secara aplikasi dan dapat langsung diakses pelanggar secara otomatis.	Masyarakat, Anggota Satpol PP dan Damkar	
12	Aplikasi Sewa Gedung Diklat	Inovasi yang digunakan untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola serta peningkatan mutu dan layanan Sewa Gedung Diklat menggunakan layanan online pada tautan <a href="https://bkpsdm.madiunkota.go.id">https://bkpsdm.madiunkota.go.id</a> atau <a href="https://gedungdiklat.madiunkota.go.id">https://gedungdiklat.madiunkota.go.id</a>	Pemohon (Masyarakat/Instansi)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM DAN INOVASI	KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH	
13	SI PENDEKAR TTE (Sistem Penandatanganan dengan Kesiapan Aplikasi Redi TTE)	Inovasi perubahan sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah melalui penerapan sistem Penandatanganan dengan Kesiapan Aplikasi Redi TTE (SI PENDEKAR TTE) untuk menandatangani SP2D secara digital yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan pihak ketiga sehingga dapat mengikuti proses penerbitan SP2D dan mendapatkan informasi di setiap tahapan proses mulai dari pengajuan SPP sampai dengan penerbitan SP2D melalui SMS gateway atau WA gateway dengan demikian bendahara pengeluaran atau pihak ketiga tidak perlu menanyakan kapan SP2D akan diterbitkan karena notifikasi dikirim melalui SMS gateway/WA gateway.	Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
14	SIMPADAMA (Sistem Informasi dan Manajemen Pajak Daerah Kota Madiun)	Inovasi pelayanan Pajak Daerah Kota Madiun yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pajak yang sebelumnya manual menjadi online yang mampu meningkatkan transformasi, control dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah. Selain itu diharapkan mampu mengurangi biaya operasional pemungutan pajak daerah dan mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.	Masyarakat, Pelaku Usaha/ Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
15	E-KAK	E-KAK adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam analisis terkait perencanaan, penganggaran serta pelaporan. Dalam aplikasi ini dapat mengintegrasikan komponen Analisis Responsif Gender, Manajemen Risiko, Usulan Musrenbang, Mandatory, Pokok Pikiran dan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah. Aplikasi ini memudahkan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun laporan dan mempermudah tim anggaran dalam menganalisa kebutuhan anggaran Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
16	Mbangun Swarga	Inovasi ini tercipta untuk membangun Sejahtera Warga yang kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan data P3KE, data kependudukan, data DTKS, Data Dapodik, Data Ketenagakerjaan, Data Balita dan Ibu Hamil, Data Pertanian dan sektoral lainnya. Program ini juga terintegrasi dengan MCM (Madiun Citizen Master) sehingga dapat membangun database informasi kependudukan dan kondisi sosial penduduk serta analisis kelayakan dalam penentuan program/kegiatan. Program ini akan mempermudah Perangkat Daerah dalam menetapkan sasaran intervensi kemiskinan maupun intervensi program pembangunan manusia lainnya.	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	
17	Musrenbang “Pecel Tumpang”	Penambahan fitur usulan Musrenbang pada Aplikasi PECEL TUMPANG Kecamatan Taman sehingga masyarakat dengan mudah menyampaikan aspirasi/gagasan melalui aplikasi online tersebut	Masyarakat, Perangkat Daerah terkait Musrenbang	
18	SI PERMATA (Sistem Informasi Permintaan Rekomendasi Mahasiswa)	Inovasi pelayanan publik yang digunakan untuk Pelayanan Pengajuan Surat Rekomendasi Penelitian Skripsi, Survei dari Mahasiswa/Masyarakat Umum kepada Perangkat Daerah yang dituju. Sistem ini menggunakan Aplikasi SI- PERMATA	Mahasiswa/ Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19	TASGANA (Komunitas Tangguh Bencana)	Program TASGANA merupakan inovasi pengembangan dari Program BPBD Provinsi Jawa Timur, yaitu DESTANA (Desa/Kelurahan Tangguh Bencana). Melalui komunitas yang berkembang di masyarakat, BPBD memberdayakan dan mengembangkan kegiatan program dari berbagai komunitas masyarakat pada bidang Penanganan Bencana. Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas komunitas yang berada di daerah rawan bencana agar siap tanggap pencegahan dan mitigasi bencana Kota Madiun. Selain itu tujuan lain inovasi ini juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar dapat lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi bencana.		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
20	E-SURPRAIS (Elektronik Surat Pernyataan Ahli Waris)	Inovasi pelayanan publik untuk mempermudah proses pengurusan pernyataan ahli waris.	Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo
21	E-SKM Kartoharjo (Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat)	Elektronik Survei Kepuasan yang bisa diakses oleh pengunjung melalui komputer yang ada di ruang layanan Kecamatan Kartoharjo setelah mendapatkan berkas permohonan/legalisasi oleh Camat Kartoharjo	Masyarakat	
22	Loket Antrian	Loket antrian dimana panggilan antrian pemohon pelayanan publik di Kecamatan Kartoharjo	Masyarakat	
23	Konsultasi dan Pengaduan Online melalui Whatsapp	Konsultasi dan Pengaduan online melalui whatsapp bisnis milik Kecamatan Kartoharjo untuk mempermudah masyarakat apabila membutuhkan informasi terkait Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan, selain itu sebagai media pengaduan secara online.	Masyarakat	
24	Pelayanan Online via WhatsApp	Inovasi pelayanan cepat pemberian layanan masyarakat berupa kepengurusan semua surat yang memanfaatkan internet (WA) dengan nomor dan petugas operator. Warga bisa mengajukan persyaratan melalui foto dan dikirim ke whatsapp kelurahan, kemudian apabila berkas jadi maka warga cukup menukar berkas persyaratan dan surat yang dibutuhkan. Pelayanan ini berlangsung pada hari dan jam kerja. Warga bisa memanfaatkan wifi gratis di masing-masing pos kampling.	Masyarakat	Kelurahan Oro-Oro Ombo
25	SINERMAS (Sinergi Bersama Masyarakat)	Inovasi pelayanan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif, dan Kolaboratif) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Layanan dengan melibatkan empat pilar Kelurahan (Kelurahan, Dinas terkait, Bhabinkantibmas dan Babinsa) serta tokoh masyarakat yang bergotong royong untuk mendeteksi dini permasalahan masyarakat dan mencari solusi bersama. Evaluasi dilaksanakan melalui google formulir dengan masyarakat yang memberikan usulan/saran kepada Kelurahan.	Masyarakat	Kelurahan Sukosari

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
26	SI PELIK OMA (Evaluasi Pelayanan Publik Oleh Masyarakat)	Merupakan inovasi dalam mewujudkan pegawai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif dan Kolaboratif) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran penerima layanan sebagai evaluatornya. Tujuan utama inovasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, deteksi memenuhi kebutuhan dari kepuasan masyarakat dan solusinya. Evaluasi diberikan melalui laman Google Dokumen yang diisi saran dan masukan dari masyarakat.		Kelurahan Pilangbango
27	Pelayanan Online Via Wa	Merupakan inovasi pelayanan publik terkait kepengurusan surat menyurat yang memanfaatkan fasilitas internet / (WA) sebagai alat bantu masyarakat, terutama dalam mengurus surat dan pada saat wabah covid-19 diharapkan agar masyarakat bisa menggunakan media sosial di lapangan sehingga tidak langsung bertatap muka.	Masyarakat	Kelurahan Tawangrejo
28	Dukamu Tanggungjawab ku	Inovasi ini adalah inisiatif dari rasa kepedulian, empati dan solidaritas masyarakat dengan Kelurahan Kanigoro dalam menghadapi musibah kematian, diawali dengan adanya laporan tetangga kemudian Ketua RT di Grup WA Kelurahan dan dilanjutkan gotong royong dalam proses pemulasaran jenazah. Aparat Kelurahan Kanigoro kemudian membantu dalam hal pengurusan perizinan dengan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dan membantu mengurus bantuan santunan kematian kepada pihak ahli waris.	Masyarakat	Kelurahan Kanigoro
29	Laci Digital	Laci Digital adalah upaya menghimpun data/dokumen Kartu Keluarg dan KTP-El milik warga agar memudahkan pengadministrasian dokumen kependudukan. Dokumen tersebut tersimpan dalam file Kelurahan Kanigoro	Masyarakat	
30	Podcast Warta Kampir	Inovasi ini merupakan teknologi virtual/online dengan fungsi penyebarluasan informasi dari Pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat Kelurahan Kanigoro melalui laman Youtube Kelurahan Kanigoro.	Masyarakat	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
31	SIMBOK	Inovasi Pelayanan publik untuk masyarakat berbasis online tentang pengaduan masyarakat maupun kepengurusan surat-surat keterangan dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengurus semua keperluan surat keterangan yang diinginkan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kelurahan. Persyaratan dikirim melalui online dengan Whatsapp. Setelah surat yang diajukan jadi, masyarakat tinggal menukar berkas di Kantor Kelurahan	Masyarakat	Kelurahan Kelun
32	SI KOKOM (Sistem Informasi Komunikasi dan Koordinasi Mudah)	Inovasi pelayanan publik online dengan memanfaatkan internet untuk pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Surat Keterangan/Surat Perizinan dengan mengunggah dokumen kependudukan melalui laman google formulir kemudian admin Kelurahan akan memproses dan memberikan notifikasi kepada pemohon.	Masyarakat	Kelurahan Sogaten
33	SI CANTIK (Sistem Cepat Calon Penerima Layanan)	Pelayanan melalui Whatsapp dimana penerima layanan hanya mengirimkan dokumen dalam bentuk foto kepada Petugas Kelurahan, kemudian petugas memproses data dan membuat Dokumen pengantar sesuai permintaan, setelah dokumen jadi maka perwakilan keluarga/ ketua RT datang ke Kelurahan dengan membawa berkas asli untuk ditukar dengan dokumen yang diperlukan. Inovasi ini efektif dalam pelayanan sehingga tidak menumpuk nomor antrian pelayanan.	Masyarakat	Kelurahan Madiun Lor
34	Pelayanan Offline dan Online	Inovasi pelayanan secara online melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 08122461630, kontak WA ini bisa digunakan warga untuk berkoordinasi dengan Operator Kelurahan sesuai kebutuhan dan dapat diakses pada jam kerja layanan.	Masyarakat	Kelurahan Nambangan Lor
35	Publikasi Leaflet di tempat umum	Inovasi ini merupakan inovasi untuk mempublikasikan pelayanan yang ada pada Kelurahan Nambangan Lor kepada warga. Setiap Ketua RT dan RW diberikan brosur/leaflet sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat membaca persyaratan dan	Masyarakat	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		menghubungi Kelurahan melalui nomor Whatsapp.		
36	Layanan Kartu Antrian	Inovasi Pelayanan Publik menggunakan Kartu Antrian dikarenakan Pelayanan yang ada di kelurahan Nambangan Kidul banyak dan diharapkan Pelayanan Publik teratur dan lancar	Masyarakat	Kelurahan Nambangan Kidul
37	Layanan secara Online	Pelayanan secara online dengan menggunakan Whatsapp bagi masyarakat sehingga tidak perlu menunggu di Kantor Kelurahan.	Masyarakat	
38	SINOMAN (Aplikasi Online Kecamatan Taman)	Inovasi pelayanan berbasis google formulir untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Kecamatan Taman. Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan tanpa datang ke Kantor Kecamatan Taman. Masyarakat dapat mengisi aplikasi mengenai layanan apa yang diinginkan, kemudian petugas pelayanan akan memberikan layanan yang diperlukan.	Masyarakat	Kecamatan Taman
<b>Prioritas 4: Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan</b>				
1	PBG fast klinik	Inovasi pelayanan dalam hal persetujuan Bangunan Gedung Fast Klinik dimana cara pengelolaan proses pengajuan perizinan untuk PBG memotong jalur waktu kepada pemohon sehingga waktu pelayanan lebih cepat.	Masyarakat/Pemohon	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pahlawan Street Center (PSC)	Inovasi pelayanan publik terkait Pahlawan Street Center (PSC) yang bisa dinikmati oleh wisatawan dan masyarakat dengan miniature icon berbagai negara	Masyarakat	
3	Data Base Perencanaan Saluran Drainase Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)	Inovasi pelayanan terkait drainase dengan SIG memberikan peta jaringan drainase dengan pengelompokan tertentu untuk kelancaran penanganan drainase cepat dan tepat apabila terjadi masalah.	Masyarakat	
4	Mempertahankan Kondisi Jalan dengan Perencanaan dan Pembangunan	Inovasi perbaikan kondisi jalan dengan bak control dan resapan air sehingga air tidak menggenang di jalan	Masyarakat	

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
	Bak Kontrol Multi Fungsi			
5	Perencanaan Sistem Drainase dan Penataan Utilitas Perkotaan sebagai Upaya Penanganan Banjir (Ducting)	Inovasi perencanaan drainase untuk mengurangi genangan air dan memasukan utilitas ke dalam gorong- gorong atau box culvert agar terlihat rapi dan indah.	Masyarakat	
6	Smart PJU (Pengendalian Penerangan Jalan Umum menggunakan wifi)	Inovasi pelayanan publik yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memanfaatkan internet sebagai alat untuk mengendalikan saklar PJU dari jarak jauh. Petugas dapat mengaktifkan dan mengontrol PJU dari manapun apabila mengalami kerusakan. Tujuan inovasi ini adalah untuk meminimalisir pengaduan masyarakat terkait gangguan PJU, selain itu petugas juga akan lebih dahulu mengetahui PJU mana yang mengalami kerusakan/mati dan akan segera dilakukan perbaikan. Pengembangan sistem kontrol jaringan Penerangan Jalan Umum melalui IOT via wifi, IOT via GSM dan IOT via Radio. Realisasi inovasi pemakaian IOT via wifi tersedia 254 titik yang tersebar di berbagai tempat. Inovasi berbasis Internet of Things yaitu pemanfaatan internet untuk mengendalikan peralatan tertentu yang diperlukan untuk menunjang jaringan internet dan saklar pintar yang dapat terhubung ke internet. Saklar pintar ini telah dipasang software dasar tertentu oleh pabrikan sehingga ketika terhubung ke internet dengan aplikasi tertentu dapat dikendalikan dari jarak jauh. Berbagai menu dapat kita pilih dalam rangka pengendalian saklar pintar ini. Apakah manual, pewaktu berkala atau kondisi tertentu yang dapat diambil dari beberapa jenis perangkat lain di internet yang terhubung. Saklar pintar ini memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas arusnya, oleh karena itu sebelum inovasi ini diterapkan maka diperlukan panel penguat arus/relay. Penguat daya sambung untuk saklar pintar ini telah dipersiapkan berupa Magnetic Contactor berupa solenoid yang dapat	Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PROGRAM DAN INOVASI		KETERANGAN	MANFAAT	PERANGKAT DAERAH
		dipacu dengan arus kecil untuk menjadikan kontak tertutup terhadap arus listrik yang lebih besar.		
7	PENYETAN LARIS (Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis)	Inovasi angkutan gratis dengan menyediakan jasa mengantar siswa sekolah secara gratis tanpa biaya apapun di Kota Madiun.	Pelajar SD dan SMP	Dinas Perhubungan
8	KUTA LARIS (Angkutan Wisata Gratis)	Inovasi angkutan wisata gratis bagi masyarakat maupun pengunjung/wisatawan yang disediakan untuk berkeliling Kota Madiun	Masyarakat/Wisatawan	
9	SIPANTAS (Sistem Pendaftaran Online dan Tracking Bus Sekolah)	Inovasi bertujuan untuk mendaftar, melacak dan memantau keberadaan Bus Sekolah Gratis kepada Wali Murid atau Siswa dengan Aplikasi online	Wali Murid, Pelajar SD dan SMP	
10	Daftar KIR Online (KIR AE)	Inovasi pendaftaran online saat uji berkala kendaraan bermotor dengan mengunjungi tautan <a href="https://ujikir.madiunkota.go.id">https://ujikir.madiunkota.go.id</a>	Masyarakat	
11	Sistem Nomor Antrian Pendaftaran	Inovasi dalam hal pendaftaran nomor antrian pada saat Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Balai Uji Kendaraan Bermotor berbasis Aplikasi	Masyarakat	
12	Digitalisasi Alat Uji KIR	Inovasi ini berupa Hasil Uji Kendaraan Bermotor yang telah disimpan ke Sistem Database sehingga dapat diakses oleh pemohon secara realtime	Masyarakat	
13	Aplikasi SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan)	Inovasi ini diciptakan untuk pelaporan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan secara daring. Pembuatan Aplikasi ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan adanya inovasi ini mampu memudahkan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah)	Aplikasi ini merupakan laporan data sampah, maksudnya untuk memantau pengelolaan bank sampah di lingkungan Kota Madiun. Laporan dari masing-masing bank sampah langsung terkirim kepada petugas di Dinas Lingkungan Hidup tanpa perlu menyampaikan berkas/kertas dari koordinator bank sampah.	Masyarakat/Bank Sampah	

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Program Prioritas Daerah**

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Program prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Madiun. Penyusunan rencana program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas RKPD Tahun 2024 dirumuskan untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Prioritas belanja daerah Kota Madiun mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Madiun. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa: 1). RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024; 2). Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024; 3). Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; 4). Evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun Tahun 2022; dan 5). Tema Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024. Adapun komposisi belanja prioritas pembangunan daerah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**

NO	PRIORITAS	PAGU ALTERNATIF 1 (Rp)	PAGU ALTERNATIF 2 (Rp)
1	<b>Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City</b>	837.505.217.666	760.104.618.475
2	<b>Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat</b>	44.784.521.378	31.239.807.984
3	<b>Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial</b>	252.881.726.985	162.381.297.907
4	<b>Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>	205.356.213.517	164.100.256.634
	Pagu Prioritas Pembangunan	1.340.527.679.546	1.117.825.981.000

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

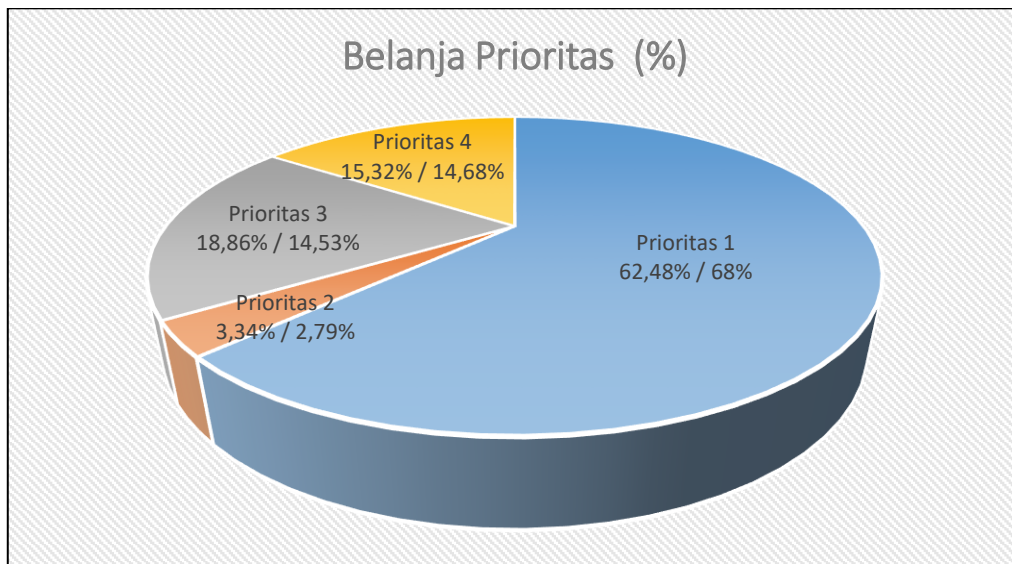
Sebagaimana yang termuat pada Tabel 5.1 diatas, total belanja prioritas Kota Madiun pada tahun 2024 adalah alternatif 1 sebesar Rp. 1.340.527.679.546 atau alternatif 2 sebesar Rp. 1.117.825.981.000. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024, alokasi anggaran terbesar hingga terkecil yang dialokasikan pada tiap prioritas yakni anggaran terbesar **pertama** yang juga sebagai **Prioritas ke-1 (satu)** Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis *Smart City* dengan anggaran alternatif 1 sebesar Rp. 837.505.217.666 atau alternatif 2 sebesar Rp. 760.104.618.475. Setelahnya anggaran terbesar **kedua** yang diurutkan sebagai **prioritas ke-3 (tiga)** akselerasi Kualitas pembangunan sumber daya manusia dengan anggaran alternatif 1 sebesar Rp. 252.881.726.985 atau alternatif 2 sebesar Rp. 162.381.297.907. Selanjutnya anggaran terbesar **ketiga** sebagai **prioritas ke-4** (empat) pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan



berkelanjutan dengan anggaran alternatif 1 sebesar Rp. 205.356.213.517 atau alternatif 2 sebesar Rp. 164.100.256.634 , dan yang terakhir anggaran besar **keempat** yang di prioritaskan sebagai **prioritas ke-2** (dua) peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital dengan anggaran alternatif 1 sebesar Rp. 44.784.521.378 atau alternatif 2 sebesar Rp. 31.239.807.984.

Sebagaimana urutan prioritas yang tidak selaras dengan urutan dalam penentuan anggaran, hal ini didasarkan dengan fokus pembangunan Pemerintah Kota Madiun sehingga apabila terjadi suatu hal yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan anggaran maka urutan prioritas sebagai penentu penundaan pelaksanaan.

Gambaran lebih lengkap mengenai proporsi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 5. 1**  
**Belanja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024**

Mengacu pada belanja prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 yang ditampilkan pada tabel 5.1, jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka prosentase belanja prioritas dapat disajikan dengan gambar 5.1. Pada gambar 5.1 menjelaskan seberapa besar prosentase pagu belanja prioritas pembangunan untuk mendanai belanja prioritas 1, 2 , 3 dan 4. Dapat dilihat bahwa prioritas 1 alternatif 1 mencapai 62,48% atau prioritas 1 alternatif 2 mencapai 68% dari keseluruhan anggaran belanja prioritas, disusul dengan prioritas 3 alternatif 1 sebesar 18,86% atau prioritas 3 alternatif 2 sebesar 14,53%, prioritas 4 alternatif 1 sebesar 15,32% atau prioritas 4 alternatif 2 sebesar 14,68% dan yang terakhir adalah prioritas 2 alternatif 1 sebesar 3,34% atau prioritas 2 alternatif 2 sebesar 2,79 %.

## **5.2 Rencana Pendanaan Daerah**

**Rencana pendanaan daerah dapat dilihat berdasarkan urusan, dan perangkat daerah.** Berdasarkan urusan pemerintahan, terdapat 3 (tiga) urusan pemerintahan yang memiliki proporsi pendanaan terbesar. Urusan tersebut adalah yaitu Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan urusan Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun proporsi pagu indikatif belanja berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 dan rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.3:

**Tabel 5. 2**  
**Pagu Indikatif Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah tahun 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANWAL RENJA OPD 2024	RANCANGAN RENJA OPD 2024	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 1)	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 2)
1	Dinas Pendidikan	4	12	162	343.276.311.249	346.091.642.064	266.751.467.995,00	222.630.478.999
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	19	93	285.816.169.732	287.750.475.132	285.750.533.832,00	238.487.078.251
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	17	39	257.142.988.748	250.289.616.526	160.000.416.000,00	133.536.169.536
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	16	23	49.027.383.900	49.027.383.900	45.279.383.900,00	37.790.123.527
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12	22	28.955.843.600	30.205.343.600	28.813.920.600,00	24.048.066.100
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	10	19	4.960.996.000	4.960.996.000	4.960.996.000,00	4.140.441.000
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	29	75	38.512.529.406	39.012.529.406	34.862.529.406,00	29.096.228.332
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	17	27	13.541.488.182	14.253.039.478	19.273.901.838,00	16.085.977.073
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	24	43	19.585.548.506	19.755.548.506	18.936.565.756,00	15.804.436.000

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANWAL RENJA OPD 2024	RANCANGAN RENJA OPD 2024	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 1)	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 2)
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	18	30	31.670.763.296	32.670.763.296	29.891.442.963,00	24.947.365.107
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	13	26	9.926.185.285	9.926.185.285	9.558.045.285,00	7.977.133.982
12	Dinas Perhubungan	2	13	21	21.560.210.960	21.560.210.971	20.160.210.971,00	16.825.689.691
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	27	36.452.957.137	36.452.957.137	32.542.519.460,00	27.159.950.608
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	11	16	8.463.285.500	8.463.285.500	7.844.990.500,00	6.547.420.361
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	9	18	23	32.148.235.000	32.548.235.000	18.758.235.000,00	15.655.602.103
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	12	19	7.853.693.181	7.853.693.181	7.753.665.181,00	6.471.200.351
17	Dinas Perdagangan	6	14	22	21.187.434.845	21.286.537.695	20.236.537.695,00	16.889.391.890
18	Sekretariat Daerah	11	49	79	68.284.445.199	68.372.885.799	62.052.456.683,00	50.918.120.010
19	Sekretariat DPRD	2	14	24	44.640.156.804	44.640.156.804	43.790.156.804,00	36.547.216.246
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	14	33	12.512.735.022	12.512.735.022	14.315.314.648,00	11.947.545.710

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	RANWAL RENJA OPD 2024	RANCANGAN RENJA OPD 2024	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 1)	RANCANGAN AKHIR RENJA OPD 2024 (ALTERNATIF 2)
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	11	25	78.706.797.604	77.973.038.000	68.953.038.000,00	57.548.130.497
22	Badan Pendapatan Daerah	2	8	21	12.895.935.739	12.945.935.739	11.642.597.339,00	9.716.898.812
23	Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia	3	12	19	12.301.409.200	12.194.066.999	12.194.066.999,00	10.177.154.778
24	Inspektorat	3	9	18	12.875.000.000	12.875.000.000	12.875.000.000,00	10.745.460.704
25	Kecamatan Kartoharjo	5	14	47	23.245.734.800	23.245.734.800	23.426.934.800,00	24.637.978.594
26	Kecamatan Manguharjo	5	14	48	27.318.904.361	27.318.904.361	25.180.398.169,00	20.927.096.613
27	Kecamatan Taman	5	14	45	24.587.211.603	24.587.211.603	25.201.611.603,00	19.552.093.772
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	20	62.108.391.469	53.561.687.289	29.520.742.119,00	21.015.532.353
	<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	<b>436</b>	<b>1066</b>	<b>1.589.558.746.328</b>	<b>1.583.138.378.719</b>	<b>1.340.527.679.546</b>	<b>1.117.825.981.000</b>

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023

**Tabel 5. 3**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2024**

**PRIORITAS 1 : Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024	Pagu Alternatif I (Rp)	Pagu Alternatif II (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Nasional	Daerah		
1	1 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	186.638.035.800	181.987.207.500						
	1 0 0 1 1 . 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	6 Dokumen	8.461.200.000	7.698.850.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dokumen	
	1 0 0 1 1 . 0 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.461.200.000	7.698.850.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dokumen	DINAS PENDIDIKAN
	1 0 0 1 1 . 0 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	172.677.135.800	170.198.228.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan	
	1 0 0 1 1 . 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang /bulan	172.677.135.800	170.198.228.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1 0 0 1 1 . 0 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	100 %	4.396.850.000	3.458.415.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Kantor Dinas Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	3.915.900.000	3.158.415.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kantor Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	480.950.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kantor Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	421.850.000	71.714.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Unit	421.850.000	71.714.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	681.000.000	560.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	237 Unit	150.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	382.000.000	270.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220 Unit	149.000.000	140.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	0	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	88,7 indeks	62.486.290.876	57.816.407.296						
	1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %	381.431.000	60.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas, RSUD		
	1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	185.864.600	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas, RSUD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	131.618.400	60.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas, RSUD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	63.948.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas, RSUD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	57.143.207.296	57.143.207.296			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan	57.143.207.296	57.143.207.296	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB, pegawai puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.983.807.300	613.200.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.037.547.300	613.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	946.260.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.319.052.680	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	130.469.150	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	143 Unit	1.188.583.530	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	658.792.600	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	402.488.650	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.165.850	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	280 Unit	240.138.100	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kesehatan PP dan KB, Pegawai Dinas Kesehatan PP dan KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	1	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	88,7 Skor	112.699.577.726	<b>109.221.713.318</b>						
	1	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	40.257.177.726	<b>36.779.313.318</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	ASN di RSUD Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	424 Orang/bulan	40.257.177.726	36.779.313.318	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	ASN di RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	100 %	442.400.000	<b>442.400.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Tenaga Kontrak Pemkot di RSUD Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	442.400.000	442.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Tenaga Kontrak Pemkot di RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0	0	2	.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	72.000.000.000	<b>72.000.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pelanggan RSUD Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	72.000.000.000	72.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pelanggan RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	24.31 SKOR	13.128.150.000	<b>13.128.150.000</b>						
	1	0	0	2	.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	<b>100.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal dan Eksternal	
	1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7.000.000.000	<b>7.000.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7.000.000.000	7.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	300.000.000	<b>300.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	664.550.000	664.550.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	552.050.000	552.050.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	112.500.000	112.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100 %	4.210.800.000	4.210.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.210.800.000	4.210.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	852.800.000	852.800.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	380.900.000	380.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	471.900.000	471.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Dipelihara/Direhabilitasi				Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		PENATAAN RUANG
1	1	0	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.30 skor	10.923.061.750	10.923.061.750						
	1	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	105.700.000	105.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	105.700.000	105.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.706.000.000	5.706.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.645.000.000	5.645.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	61.000.000	61.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	152.000.000	152.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	142.000.000	142.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	10.000.000	10.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	233.880.000	<b>233.880.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	233.880.000	233.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	340.500.000	<b>340.500.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	142.500.000	142.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	198.000.000	198.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.205.500.000	<b>2.205.500.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	2.205.500.000	2.205.500.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0		Perengkapan Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	2.179.481.750	2.179.481.750		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	1.690.986.550	1.690.986.550	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106 Unit	388.495.200	388.495.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perkim	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	16.427.406.300	14.300.502.800						
	1	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	196.067.000	196.067.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	196.067.000	196.067.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.635.025.000	<b>7.472.847.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7.635.025.000	7.472.847.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	770.525.000	<b>709.701.500</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	770.525.000	709.701.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	341.400.000	<b>250.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	341.400.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100% %	3.011.319.000	<b>1.681.831.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.445.130.000	1.266.130.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	300.000.000	185.600.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pegawai Satpol PP	SATUAN POLISI PAMONG



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 7	0 9	Lainnya yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	dan Damkar	PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	266.189.000	230.101.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% %	3.282.000.000	<b>2.848.986.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.282.000.000	2.848.986.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.191.070.300	<b>1.141.070.300</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	851.000.000	851.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	240.070.300	190.070.300	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Satpol PP dan Damkar	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	3.114.898.000	<b>2.736.427.000</b>						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	3.525.000	1.381.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.525.000	1.381.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.856.427.000	1.693.100.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.856.427.000	1.693.100.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200.000.000	200.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	17.600.000	16.500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	17.600.000	16.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	485.599.000	411.078.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485.599.000	411.078.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	551.747.000	414.368.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	321.347.000	249.868.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	30.400.000	14.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	8.625.032.816	7.982.762.006						
	1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	266.283.950	171.518.300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	129.757.550	133.390.900	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.684.200	24.106.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	111.842.200	14.021.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 %	5.979.126.761	<b>5.936.197.961</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.833.748.161	5.833.748.161	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	13 Laporan	145.378.600	102.449.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	98.278.000	51.980.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	
	1	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	54.376.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	43.902.000	51.980.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	475.630.000	316.843.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	475.630.000	316.843.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 %	100.095.070	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	
	1	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	100.095.070	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.198.648.740	999.252.050		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883.348.740	592.552.050	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.300.000	406.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	506.970.295	506.970.295		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	233.514.500	233.514.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	182.421.075	182.421.075	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	91.034.720	91.034.720	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/i Dinas Sosial PPPA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																PERLINDUNG AN ANAK
1	2	0	0	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,04 skor	7.987.563.636	6.517.662.936						
	2	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	71.280.000	71.280.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	
	2	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	71.280.000	71.280.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.448.963.296	5.449.239.170			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.448.963.296	5.449.239.170	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	100 %	200.000.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	
	2	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	200.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.074.045.340	803.868.766			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	2	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	708.302.480	534.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	365.742.860	269.468.766	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	630.000.000	40.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	
	2	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	395.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	563.275.000	153.275.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	70.000.000	70.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	460.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	33.275.000	33.275.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan Karyawati Disnaker, KUKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.756.434.000	<b>7.839.503.000</b>						
	2	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	129.747.100	<b>129.747.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	129.747.100	129.747.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.160.362.271	<b>5.205.805.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.160.362.271	5.205.805.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	DKPP	DINAS KETAHANAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 2	0 1						Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	42.785.860	77.785.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2 0 5	0 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	42.785.860	77.785.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.081.953.000	1.084.579.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2 0 6	0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	726.000.000	728.626.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2 0 6	0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.953.000	55.953.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2 0 6	0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	680.976.503	680.976.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2 0 7	0 0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	347.451.000	347.451.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.150.000	117.150.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	216.375.503	216.375.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	660.609.266	<b>660.609.200</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	110.548.000	110.548.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	36.022.500	36.022.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	475.267.766	475.267.700	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	38.771.000	38.771.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DKPP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1	2	1	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	18.464.499.567	<b>17.462.484.477</b>						
	2	1	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,	100 %	100.000.000	<b>100.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pengendalian dan evaluasi perangkat daerah					Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	2	1 1	0 1	2 0 0 1 6	0 0 0 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.921.941.242	<b>8.755.188.477</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1 1	0 1	2 0 0 2 1	0 0 0 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	8.921.941.242	8.755.188.477	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	300.000.000	<b>180.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1 1	0 1	2 0 0 5 2	0 0 0 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	150.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2 0 0 5 9	0 0 0 5 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	150.000.000	55.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	325.000.000	<b>300.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	325.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	247.070.000	<b>133.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	178.750.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	68.320.000	33.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %	6.881.317.825	<b>6.376.096.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	721.441.825	725.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.159.876.000	5.651.096.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	1.689.170.500	<b>1.618.200.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	16 Unit	1.369.726.500	1.318.200.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 9	0 1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	2	1 1	0 1	2 .	0 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	169.444.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 .	2 0 9	0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81.60 Nilai	8.724.836.960	<b>7.525.883.054</b>						
	2	1 2	0 .	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	233.638.000	<b>99.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1 2	0 .	2 0 1	0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3.996.000	4.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 .	2 0 1	0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	229.642.000	95.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 .	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.030.281.080	<b>4.516.912.054</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4.951.601.080	4.438.032.054	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	78.680.000	78.880.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	221.312.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	148 Orang	200.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	21.312.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	916.134.800	878.781.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	484.334.800	576.781.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	76.800.000	48.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	65.000.000	24.000.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0		Pengadaan yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	290.000.000	230.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	1.084.000.000	778.039.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.084.000.000	778.039.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	674.584.000	724.175.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674.584.000	724.175.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	564.887.080	528.975.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	76.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3 Unit	45.000.000	57.550.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	28.000.000	34.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	312.887.080	231.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	149 Unit	103.000.000	181.425.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.5 nilai	11.280.000.000	10.276.000.000						
	2	1	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	55.000.000	55.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	55.000.000	55.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	6.750.000.000	6.730.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	6.750.000.000	6.730.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yng Tercapai	100 %	200.000.000	100.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	200.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	400.000.000	250.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	400.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan Kantor	100 %	225.000.000	175.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perhubungan Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kantor	100 %	2.300.000.000	1.900.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	23 Laporan	2.300.000.000	1.900.000.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	DINAS PERHUBUNGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Baramg Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100 %	1.350.000.000	1.066.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	900.000.000	630.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	150.000.000	136.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Nilai	8.180.709.137	7.700.300.337						
	2	1	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	200.000.000	100.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	
	2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	200.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.380.709.137	<b>5.380.709.137</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	
	2	1	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.380.709.137	5.380.709.137	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	400.000.000	<b>200.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	
	2	1	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	400.000.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100.000.000	<b>2.500.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	
	2	1	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	2.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	1.100.000.000	<b>1.076.641.200</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	1.076.641.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Tercukupinya Barang	100 %	1.000.000.000	<b>940.450.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Kominfo	

1	2				3		4	5	6	7	8	9	10		11		12	13
				0	9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah yang layak digunakan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City				
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	200.000.000	157.650.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000.000	600.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200.000.000	182.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Dinas Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.04 skor	5.905.883.300	<b>5.118.313.161</b>								
	2	1	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	45.646.300	<b>30.491.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Pegawai DPMPSTSP		
	2	1	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45.646.300	30.491.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Pegawai DPMPSTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	1	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	4.009.723.000	<b>3.909.723.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Pegawai DPMPSTSP		
	2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.009.723.000	3.909.723.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		Pegawai DPMPSTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	274.234.000	204.234.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	
	2	1	0	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	274.234.000	204.234.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 persen	200.000.000	20.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	
	2	1	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	200.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	845.526.000	773.111.161			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 laporan Laporan	845.526.000	773.111.161	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	530.754.000	180.754.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	
	2	1	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	97.558.500	97.558.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPPTSP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	379.280.000	29.280.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPSTP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53.915.500	53.915.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai DPMPSTP	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi saking perangkat daerah	A scor	7.120.980.000	<b>6.760.552.103</b>						
	2	1	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	30.000.000	<b>30.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	
	2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000	30.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4.400.235.000	<b>4.400.235.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.400.235.000	4.400.235.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	60.000.000	<b>0,00</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Pegawai Dinas Budparpora	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	250.000.000	200.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100.000.000	20.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	
	2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.025.745.000	1.965.317.103			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.025.745.000	1.965.317.103	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Tercukupinya Barang	100 %	255.000.000	145.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Budparpora	



1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah yang layak digunakan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	75.000.000	55.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000	40.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Budparpora	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
1	2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	5.171.985.181	<b>4.718.600.351</b>						
	2	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	<b>30.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	30.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3.838.593.181	<b>3.838.600.351</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.838.593.181	3.838.600.351	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	238.292.000	50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	238.292.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	20.100.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	20.100.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	705.000.000	600.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	705.000.000	600.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	270.000.000	200.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	22 Unit	80.000.000	80.000.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Dinas Perpustakaan dan	DINAS PERPUSTAKA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 9	0 1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kearsipan Kota Madiun	AN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	51.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	78 Unit	70.000.000	69.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	3	3	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	A Skor	11.940.358.400	<b>10.586.356.544</b>					
	3	3	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	190.036.000	<b>152.416.500</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	190.036.000	152.416.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.941.595.764	<b>8.941.595.764</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	8.941.595.764	8.941.595.764	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	3	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	159.382.400	124.614.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	159.382.400	124.614.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	398.929.600	249.696.266			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	398.929.600	249.696.266	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	885.880.930	58.461.550			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	807.838.600	40.661.550	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	78.042.330	17.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	812.889.300	759.940.958			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	812.889.300	759.940.958	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	551.644.406	299.631.306			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	
	3	3	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	261.208.606	227.780.606	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	205.916.500	11.616.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	154 Unit	84.519.300	60.234.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Dinas Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN
1	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Setda	83 Skor	1.793.860.000	1.366.410.000						
	4	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.000.000	8.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10.000.000	8.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	946.860.000	<b>898.410.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	946.860.000	898.410.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	200.000.000	<b>150.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	75.000.000	<b>15.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	15.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300.000.000	<b>250.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	300.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Perengkapan Kantor yang Disediakan					Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik			
	4	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	262.000.000	45.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000	15.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	12.000.000	10.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
3	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	3.186.980.500	2.659.850.387						
	4	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	15.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	15.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen	100 %	815.535.000	835.922.668			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	2		Administrasi Keuangan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	815.535.000	835.922.668	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.20 indeks	185.000.000	<b>167.326.280</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185.000.000	167.326.280	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	14.868.000	<b>100.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.868.000	100.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	185.000.000	<b>162.577.108</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	162.577.108	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	51.372.000	<b>38.873.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	27.315.000	23.963.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	2.500.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	19.057.000	12.410.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.5 sedang	1.920.205.500	<b>1.340.151.331</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	500.000.000	339.871.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	855.367.500	662.366.630	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
	4	0	0	2	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	564.838.000	337.913.701	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
4	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 Skor	2.009.005.470	1.657.291.418						
	4	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,	100 %	1.000.000	<b>1.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	4	0 1	0 1	2 0 0 1 6	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	1.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0 1	0 1	2 0 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	945.125.000	945.125.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0 1	0 1	2 0 0 2 1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bu lan	945.125.000	945.125.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0 1	0 1	2 0 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83,20 Skor	347.330.470	231.923.941			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0 1	0 1	2 0 0 6 9	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	347.330.470	231.923.941	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0 1	0 1	2 0 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	141.500.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0 1	0 1	2 0 0 7 6	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	125.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	16.500.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	492.300.000	395.851.677			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Prangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	492.300.000	395.851.677	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Prangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	81.750.000	83.390.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	43.000.000	44.640.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	36.250.000	36.250.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
6	4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	2.702.000.000	2.479.789.909						
	4	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan,	100 %	15.000.000	15.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	4	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.750.000.000	1.750.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1.750.000.000	1.750.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	200.000.000	150.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000	100.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3 Unit	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jabatan yang Disediakan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.000.000	0,00	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	350.000.000	300.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	187.000.000	164.789.909			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	30.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	137.000.000	119.789.909	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	40 Unit	20.000.000	20.000.000	- Kota Madiun,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG /

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 9	1 0	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Kartoharjo, Kartoharjo	Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
8	4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Setda	83 skor	2.428.318.046	<b>2.428.318.046</b>						
	4	0 1	0 1	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 dokumen	22.000.000	<b>22.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	4	0 1	0 1	2 0 1	0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	22.000.000	22.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT
	4	0 1	0 1	2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.081.294.810	<b>1.081.294.810</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	4	0 1	0 1	2 0 2	0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.081.294.810	1.081.294.810	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT
	4	0 1	0 1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	250.000.000	<b>250.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	220.000.000	220.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	120.000.000	120.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	613.219.636	613.219.636			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	613.219.636	613.219.636	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	241.803.600	241.803.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	4	0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jabatan	9 Unit	25.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
	4	0	0	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
	4	0	0	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	16.803.600	16.803.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMI AN DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT
1	4	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83 skor	34.262.750.000	28.595.653.106						
	4	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	5.000.000	5.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	5.000.000	5.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BAGIAN UMUM



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	4	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen adminstrasi keuangan	100 %	13.273.500.000	13.162.796.582			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	13.273.500.000	13.162.796.582	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	6.210.000.000	2.638.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	6.210.000.000	2.638.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.750.000.000	1.260.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	60.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan	1.700.000.000	1.200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	789.250.000	785.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	39.250.000	35.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	500.000.000	500.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	4.935.000.000	<b>4.711.856.524</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.935.000.000	4.711.856.524	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1.875.000.000	<b>1.450.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 Unit	1.100.000.000	1.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	300.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	275.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	1.000.000.000	<b>1.000.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	600.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 %	2.075.000.000	<b>1.633.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.125.000.000	883.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	425.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	325.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
	4	0	0	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	2.350.000.000	<b>1.950.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Sekretariat Daerah	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				1 4								Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	4	0	0	2	0	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	500 Laporan	2.350.000.000	1.950.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN UMUM
2	4	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,50 (A) Skor	29.609.047.298	<b>27.743.749.076</b>						
	4	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	75.329.977	<b>75.329.977</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	75.329.977	75.329.977	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3.366.682.326	<b>3.366.682.326</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.366.682.326	3.366.682.326	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	291.087.294	<b>189.818.894</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	64.818.894	64.818.894	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	226.268.400	125.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	1.037.733.258	<b>1.504.685.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	1.037.733.258	1.504.685.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	6.105.000	<b>8.241.750</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.105.000	8.241.750	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	2.602.797.882	<b>2.655.656.282</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.602.797.882	2.655.656.282	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	1.021.153.590	<b>1.021.078.460</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	26 Unit	308.841.290	308.841.290	- Semua Kota/Kab, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 9	0 1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	4	0 2	0 1	2 .	0 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	238.673.550	238.673.550	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0 2	0 1	2 .	0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	473.638.750	473.563.620	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0 2	0 1	2 .	1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	15.980.942.237	16.262.552.237			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0 2	0 1	2 .	0 1 5	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15.621.963.217	15.903.573.217	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0 2	0 1	2 .	0 1 5	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	253.979.020	253.979.020	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0 2	0 1	2 .	0 1 5	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105.000.000	105.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	5.227.215.734	2.659.704.150			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	37.957.150	37.957.150	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	5.189.258.584	2.621.747.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	SEKRETARIAT DPRD
1	5	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	7.888.742.167	7.577.031.547						
	5	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	193.215.400	193.215.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	161.979.200	161.979.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12 Laporan	11.050.600	11.050.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Pengembangan Daerah	PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.185.600	20.185.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	5.659.950.000	5.659.950.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.550.950.000	5.550.950.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	109.000.000	109.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 persen	337.138.312	245.427.692			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	154.098.312	154.098.312	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	183.040.000	91.329.380	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	455.934.000	<b>455.934.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	455.934.000	455.934.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 persen	225.000.000	<b>5.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	225.000.000	5.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	791.861.325	<b>791.861.325</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	791.861.325	791.861.325	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	225.643.130	<b>225.643.130</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	75.000.000	75.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.321.565	75.321.565	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.321.565	75.321.565	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	62.642.467.000	<b>51.237.559.497</b>						
	5	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.000.000	<b>2.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	47.914.908.000	<b>36.510.000.497</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2875 Orang/bulan	47.914.908.000	36.510.000.497	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	450.000.000	<b>450.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	450.000.000	450.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	214.000.000	<b>214.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	214.000.000	214.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa	100 %	13.768.559.000	<b>13.768.559.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BKAD Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Urusan Pemerintahan Daerah							Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.768.559.000	13.768.559.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	293.000.000	293.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	110.000.000	110.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	75.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	108.000.000	108.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BKAD Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	5	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	9.654.959.835	9.116.959.835						
	5	0	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bapenda	100 %	5.000.000	2.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	8 Laporan	5.000.000	2.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	5	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	8.294.415.000	<b>8.394.415.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	8.294.415.000	8.394.415.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	150.000.000	<b>100.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Air Conditioner (AC) Kantor TV Touchsecrin dan Laptop yang disediakan	100 %	250.000.000	<b>1.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	150.000.000	500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	655.544.835	<b>469.544.835</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	655.544.835	469.544.835	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 %	300.000.000	150.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	75.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	5	0	0	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.339.400.000	6.836.400.000						
	5	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	19.400.000	9.400.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6 Laporan	19.400.000	9.400.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1 6	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2 . 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.950.000.000	5.950.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	5	0	0	2 . 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	5.950.000.000	5.950.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2 . 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	400.000.000	250.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	5	0	0	2 . 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	400.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2 . 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	100 %	150.000.000	32.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	5	0	0	2 . 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	150.000.000	32.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2 . 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	495.000.000	440.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	495.000.000	440.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah	100 %	325.000.000	155.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	25.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50.000.000	35.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	6	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.00 Nilai	10.398.000.000	9.167.060.704						
	6	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal kategori baik	100 %	3.000.000	3.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	6	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.000.000	3.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	7.500.000.000	<b>7.451.060.704</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun		
	6	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.500.000.000	7.451.060.704	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90 Indeks	1.600.000.000	<b>1.229.000.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun		
	6	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	650.000.000	529.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	950.000.000	700.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	355.000.000	<b>204.000.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun		
	6	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	355.000.000	204.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	6	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	940.000.000	<b>280.000.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun		
	6	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	40.000.000	35.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	875.000.000	225.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
1	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,10 Nilai	14.190.112.556	<b>13.483.579.103</b>						
	7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	23.882.926	<b>23.882.926</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.882.926	23.882.926	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.854.586.130	<b>11.854.586.130</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.852.586.130	11.852.586.130	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	2.000.000	2.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	56.828.000	51.214.714			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	19.876.000	19.876.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	36.952.000	31.338.714	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	127.835.000	117.091.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.835.000	117.091.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	624.851.629	307.854.800			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	101.250.000	94.905.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	122.999.800	122.999.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	400.601.829	89.950.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	949.240.178	919.727.209			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	949.240.178	919.727.209	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	552.888.693	209.222.324			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	69.573.208	69.573.208	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	422.482.257	78.815.888	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60.833.228	60.833.228	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
1	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	80.15 Nilai	13.429.000.000	<b>13.204.000.000</b>						
	7	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	4.000.000	<b>4.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4.000.000	4.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.502.000.000	<b>11.502.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.500.000.000	11.500.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	2.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	150.000.000	<b>25.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Se-Kartoharjo	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	150.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Se-Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	87.8 indeks	230.000.000	<b>230.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230.000.000	230.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	343.000.000	<b>243.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	143.000.000	143.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.030.000.000	<b>1.030.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.030.000.000	1.030.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Tercukupinya Barang	100 %	170.000.000	<b>170.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Karyawan/karyawati	

1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah yang layak digunakan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	60.000.000	60.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000	55.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	35.000.000	35.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/karyawati Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
1	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80,90 Nilai	14.236.609.154	<b>13.744.035.136</b>						
	7	0	0	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.530.000	<b>1.530.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah	
	7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.530.000	1.530.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah	KECAMATAN TAMAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	12.359.960.603	<b>12.359.960.603</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Kecamatan Taman	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	12.359.960.603	12.359.960.603	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	100 %	141.306.000	<b>141.306.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Kecamatan Taman	
	7	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	141.306.000	141.306.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	108.000.000	<b>98.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	108.000.000	98.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	333.812.551	<b>109.358.533</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Internal Perangkat Daerah, Pegawai	



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kecamatan Taman		
	7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	90.000.000	10.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	243.812.551	109.348.533	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	901.000.000	792.880.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	901.000.000	792.880.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	391.000.000	241.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	
	7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	53.000.000	53.000.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	38.000.000	38.000.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Pegawai Kecamatan Taman	KECAMATAN TAMAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	8	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,50 nilai	5.816.175.149	4.940.407.149							
	8	0	0	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	59.904.000	55.136.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB		
	8	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.304.000	9.536.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.600.000	45.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.366.271.149	4.366.271.149			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	
	8	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	4.366.271.149	4.366.271.149	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	95.000.000	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	
	8	0	0	2	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	95.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi umum Perangkat Daerah	100 %	983.500.000	450.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	
	8	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	683.500.000	350.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	300.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	191.500.000	1.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	
	8	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	91.500.000	500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000	500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	120.000.000	68.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	
	8	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 mbl, 13 spd motor Unit	55.000.000	45.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	3.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Indeks RB	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.412.141.300	8.360.972.300						
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.412.141.300	8.360.972.300					#REF!	
2	1	0	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	10.412.141.300	8.360.972.300						
	1	0	5	2	0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	7.078.310.000	5.379.671.600			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Warga Negara wilayah Kota Madiun	
	1	0	5	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	152.772.000	152.772.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	5	2	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	6 Dokumen	4.200.000.000	3.725.784.500	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup,	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Warga Negara wilayah	SATUAN POLISI PAMONG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1	0 4	rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kota Madiun	PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	0 5	0 2	2 0 0 1	0 0 5	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang	712.875.000	375.989.100	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	0 5	0 2	2 0 0 1	0 1 5	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	912.663.000	480.019.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	0 5	0 2	2 0 0 1	0 1 6	0	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.100.000.000	645.107.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	0 5	0 2	2 0 0 2	0	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	3.010.519.300	<b>2.816.196.700</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Warga Negara wilayah Kota Madiun	
1	0 5	0 2	2 0 0 2	0 1 0	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	2.288.638.100	1.967.199.900	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	0 5	0 2	2 0 0 2	0 1 2	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	12 Laporan	721.881.200	848.996.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		PEMADAM KEBAKARAN	
	1	0	0	2		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	80 %	323.312.000	165.104.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	PPNS se Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	323.312.000	165.104.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	PPNS se Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26.191.698.648	20.674.001.199						
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			833.208.325	451.250.928						
1	2	1	0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	85 %	218.712.325	113.524.800						
	2	1	0	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	100 %	183.900.000	113.524.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun		
	2	1	0	2	0	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	106.900.000	98.988.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	77.000.000	14.536.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan	12 Laporan	34.812.325	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Masyarakat Kota Madiun	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 3		pendaftaran penduduk						Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	2	1 2	0 2	2 0 0 3	0 0 3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	34.812.325	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	94.75 %	310.296.000	<b>163.854.128</b>						
	2	1 2	0 3	2 0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100 %	184.296.000	<b>163.854.128</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	OPD dan Pemerintah Kota Madiun	
	2	1 2	0 3	2 0 1	0 0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	110.126.000	109.054.128	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	OPD dan Pemerintah Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2 0 1	0 0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	74.170.000	54.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	OPD dan Pemerintah Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2 0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	12 laporan	126.000.000	<b>0,00</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	OPD dan Pemerintah Kota Madiun	
	2	1 2	0 3	2 0 2	0 0 3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	126.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	OPD dan Pemerintah Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	1 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99.20 %	304.200.000	<b>173.872.000</b>						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	1	0	2		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	100 %	175.820.000	<b>173.872.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pemerintah Kota Madiun, Pengguna Data Kependudukan, Masyarakat Kota Madiun		
	2	1	0	2	0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	102.200.000	154.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pemerintah Kota Madiun, Pengguna Data Kependudukan, Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2	0	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	17 Dokumen	73.620.000	19.072.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pemerintah Kota Madiun, Pengguna Data Kependudukan, Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	128.380.000	<b>0,00</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pemerintah Kota Madiun, Pengguna Data Kependudukan, Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	128.380.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pemerintah Kota Madiun, Pengguna Data Kependudukan, Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			23.530.562.323	19.117.898.271						
2	2	1	0		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	82 %	3.830.562.323	<b>2.718.502.997</b>						
	2	1	0	2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	3.830.562.323	<b>2.718.502.997</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	1.555.562.323	1.255.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.200.000.000	973.923.328	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	275.000.000	232.964.450	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	250.000.000	135.415.219	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	75 Orang	250.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	12 Dokumen	300.000.000	121.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Informasi Program atau Kebijakan				Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
3	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	19.700.000.000	16.399.395.274						
	2	1	0	2		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	15.050.000.000	13.190.716.714			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	190.716.714	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3200 Unit	14.900.000.000	13.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Madiun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	4.650.000.000	3.208.678.560			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	2	1	0	2	0	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000.000	2.050.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	500.000.000	273.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	750.000.000	350.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	250.000.000	180.778.560	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	65.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	335.000.000	269.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	2	0	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	750.000.000	35.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			500.000.000	100.000.000						
4	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	500.000.000	<b>100.000.000</b>						
	2	2	0	2	0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	500.000.000	<b>100.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	2	2	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	3 Dokumen	500.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							dan Diseminasi Data Statistik Sektoral									
	2	2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			331.248.000	241.752.000						
5	2	2	1	0	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	331.248.000	241.752.000						
	2	2	1	0	2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	331.248.000	241.752.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	2	2	1	0	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	149.668.000	41.752.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	1	0	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	181.580.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			996.680.000	763.100.000						
4	2	2	4	0	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 %	826.680.000	609.100.000						
	2	2	4	0	2	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	475.000.000	388.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2	0	2	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60000 Berkas	475.000.000	388.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	351.680.000	221.100.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	270 Arsip	351.680.000	221.100.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2	2	0	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.8 Nilai	170.000.000	154.000.000						
	2	2	0	2	0	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	170.000.000	154.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1100 Arsip	85.000.000	85.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas	85.000.000	69.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			29.850.652.173	20.534.274.314						
	4	0			SEKRETARIAT DAERAH			15.669.542.667	11.730.807.144						
2	4	0	0		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.118.000.000	<b>1.898.424.012</b>						
	4	0	0	2	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	1.650.000.000	<b>1.553.424.012</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	
	4	0	0	2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	1.200.000.000	1.143.424.012	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	450.000.000	410.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Sekretariat Daerah	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	0	0	2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Difasilitasi	100 %	468.000.000	<b>345.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	
	4	0	0	2	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	468.000.000	345.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	-	BAGIAN PEMERINTAHAN
5	4	0	0		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.278.141.000	<b>1.049.964.828</b>						
	4	0	0	2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang tersusun	100 %	2.278.141.000	<b>1.049.964.828</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	1.101.378.000	479.741.180	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	647.431.000	228.632.778	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
	4	0	0	2	0	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen	529.332.000	341.590.870	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN HUKUM
7	4	0	0			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	648.365.000	<b>316.421.000</b>						
	4	0	0	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target	100 %	151.421.000	<b>111.421.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	4	0	0	2	0	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	31.421.000	31.421.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	120.000.000	80.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target	100 %	496.944.000	<b>205.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	200.899.000	95.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	2	0	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	296.045.000	110.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9	4	0	0			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	9.607.846.707	<b>7.448.807.344</b>						
	4	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	80,08 persen	9.607.846.707	<b>7.448.807.344</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	
	4	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	9.607.846.707	7.448.807.344	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
10	4	0	0			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	1.017.189.960	<b>1.017.189.960</b>						
	4	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kepuasan masyarakat di bidang Perekonomian dan Pembangunan	80,98 %	617.189.960	<b>617.189.960</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4	0	0	2	0	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	335.984.960	335.984.960	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT
	4	0	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	281.205.000	281.205.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2022)Penguatan Ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi Sektor unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT
	4	0	0	2	0	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	400.000.000	<b>400.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	4	0	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT
	4	0	0	2	0	SEKRETARIAT DPRD			14.181.109.506	8.803.467.170						
1	4	0	0	2	0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	86 Indeks	14.181.109.506	<b>8.803.467.170</b>						
	4	0	0	2	0	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	6.133.494.696	<b>3.000.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	0	0	2	0	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21 Dokumen	3.697.366.740	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	2.436.127.956	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	1.637.690.360	<b>1.451.500.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	
	4	0	0	2	0	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.637.690.360	1.451.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-program Pemerintah Daerah	100 %	640.644.170	<b>640.644.170</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	
	4	0	0	2	0	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	338.765.050	338.765.050	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	4	0	0	2	0	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	301.879.120	301.879.120	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	4.956.857.280	<b>2.898.900.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	
	4	0	0	2	0	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.704.590.000	1.200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	892.910.480	750.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	120 Dokumen	1.359.356.800	948.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	2	0	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100 %	812.423.000	<b>812.423.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	
	4	0	0	2	0	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen	812.423.000	812.423.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pimpinan dan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		19.579.447.984	14.621.778.918							
	5	0	1			PERENCANAAN		5.001.124.481	2.945.066.163							
2	5	0	0	0		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	2.618.124.481	<b>1.382.066.163</b>						
	5	0	0	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	100 persen	2.369.124.481	<b>1.183.066.163</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	252.104.370	152.104.370	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	155.206.485	155.206.485	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	671.102.586	300.102.586	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.290.711.040	575.652.722	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan	100 persen	249.000.000	<b>199.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							evaluasi sesuai ketentuan							Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	5	0	0	2	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	99.000.000	99.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	150.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5	0	0			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 persen	2.383.000.000	<b>1.563.000.000</b>						
	5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	728.000.000	<b>528.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	115.000.000	81.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.000.000	110.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	486.581.500	330.581.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							(RPJPD. RPJMD dan RKPD)									
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	6.418.500	6.418.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	590.000.000	420.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	405.000.000	235.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	185.000.000	185.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah Kota Madiun	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	1.065.000.000	615.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	840.000.000	390.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	95.000.000	95.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	30.000.000	30.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0				KEUANGAN			8.298.208.504	6.910.509.977						
2	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	4.344.623.000	<b>4.344.623.000</b>						
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	100 %	1.126.814.000	<b>1.126.814.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83.421.000	83.421.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.819.000	56.819.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16.876.000	16.876.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.640.000	23.640.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	154.679.000	154.679.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	154.679.000	154.679.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	636.700.000	636.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100 %	55.050.000	<b>55.050.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	
	5	0	0	2	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	47 Dokumen	49.950.000	49.950.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	3 Dokumen	5.100.000	5.100.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						SP2D dengan Instansi Terkait										
	5	0	0	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Permintaan Laporan Keuangan yang Terfasilitasi	100 %	1.162.759.000	<b>1.162.759.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD		
	5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	140.000.000	140.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66.000.000	66.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	90.000.000	90.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	866.759.000	866.759.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan BTT yang tersusun	100 %	2.000.000.000	<b>2.000.000.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun		
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kota Madiun	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	1.965.948.000	<b>1.965.948.000</b>						
	5	0	0	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	22 Laporan	1.965.948.000	<b>1.965.948.000</b>		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Seluruh OPD		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	1								Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
	5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	123.142.000	123.142.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.803.206.000	1.803.206.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	39.600.000	39.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Seluruh OPD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	1.987.637.504	599.938.977						
	5	0	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	1.987.637.504	599.938.977			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	
	5	0	0	2	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	75.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	560.941.600	268.326.100	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	5	0	0	2	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4651 Obyek Pajak	7.500.000	7.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	58615 Dokumen	40.000.000	40.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18923 Layanan	15.000.000	15.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	646.550.000	86.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	465.645.904	36.112.877	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	15.000.000	10.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Lingkungan BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0				KEPEGAWAIAN			2.220.402.999	1.549.308.400						
1	5	0	0			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87.7 Skor	2.220.402.999	<b>1.549.308.400</b>						
	5	0	0	2		Pengadaan, Pemberhentian dan	Persentase Realisasi Pengadaan,	100 %	1.202.560.000	<b>1.113.590.200</b>			Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Meningkat nya	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1	Informasi Kepegawaian ASN	Pemberhentian dan Informasi						Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Kualitas Pelayanan Publik	
5	0	0	2	0	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	1.003.200.000	919.230.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	89.360.000	89.360.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	2	0	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen	110.000.000	105.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	2	0	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 %	470.064.200	245.746.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	375.626.200	175.116.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	2	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	94.438.000	70.630.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	0	0	2	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	100 %	390.000.000	70.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	110 Dokumen	390.000.000	70.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100 %	157.778.799	<b>119.972.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	
	5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	28.806.799	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang	51.850.000	22.850.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	0	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	77.122.000	77.122.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.634.264.000	1.791.446.378						
2	5	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	13 %	2.634.264.000	<b>1.791.446.378</b>						
	5	0	0	2	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	85 %	1.620.000.000	<b>941.446.378</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 Orang	1.620.000.000	941.446.378	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Meningkatnya Kualitas	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Pelayanan Public	GAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	2	.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Syarat Kompetensi Jabatannya	80 %	1.014.264.000	<b>850.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	
	5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	177 Laporan	1.014.264.000	850.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.425.448.000	1.425.448.000						
4	5	0	0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 persen	1.425.448.000	<b>1.425.448.000</b>						
	5	0	0	2	.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	100 persen	1.148.463.000	<b>1.148.463.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	5	0	0	2	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	981.883.000	981.883.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	2	0	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	166.580.000	166.580.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	0	0	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	100 persen	276.985.000	<b>276.985.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	
	5	0	0	2	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	276.985.000	276.985.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			2.477.000.000	1.578.400.000						
	6	0				INSPEKTORAT DAERAH			2.477.000.000	1.578.400.000						
2	6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	45 %	1.159.000.000	<b>651.400.000</b>						
	6	0	0	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	29 Dokumen	1.100.000.000	<b>612.400.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	
	6	0	0	2	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	65.000.000	57.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	840.000.000	390.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	25.000.000	25.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	150.000.000	120.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa			Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City			
	6	0	0	2	0	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	59.000.000	39.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	
	6	0	0	2	0	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	4.000.000	4.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	55.000.000	35.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100 %	1.318.000.000	927.000.000						
	6	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen	8.000.000	7.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	
	6	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	8.000.000	7.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Inspektorat Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen	1.310.000.000	920.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	6	0	0	2	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 perangkat daerah	450.000.000	250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	860.000.000	670.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	6	0	0	2	0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 perangkat daerah	0,00	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Semua OPD Kota Madiun	INSPEKTORAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			20.831.146.937	15.495.209.198						
	7	0				KECAMATAN MANGUHARJO			8.123.033.163	5.487.050.800						
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	37.010.800	<b>37.010.800</b>						
	7	0	0	2	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi Sarpras pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100 %	37.010.800	<b>37.010.800</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	37.010.800	37.010.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
4	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	774.931.500	<b>215.215.000</b>						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	651.977.500	<b>106.859.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	651.977.500	106.859.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	122.954.000	<b>108.356.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	122.954.000	108.356.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	107.070.000	<b>70.050.000</b>						
	7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	107.070.000	<b>70.050.000</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	350 Orang	38.660.000	18.080.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
						Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
	7	0	0	2	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	52.260.000	38.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO	
	7	0	0	2	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	16.150.000	13.170.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO	
						Kelurahan Manguharjo			877.936.811								
6	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	877.936.811	565.000.000							
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	877.936.811	565.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	877.936.811	565.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN MANGUHARJO	
						Kelurahan Sogaten			750.194.333	544.300.000							
8	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	750.194.333	544.300.000							
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai	100 %	750.194.333	544.300.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	750.194.333	544.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN SOGATEN
						Kelurahan Patihan			651.714.774	528.000.000						
10	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	651.714.774	528.000.000						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	651.714.774	528.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	651.714.774	528.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PATIHAN
						Kelurahan Ngegong			615.204.280	505.000.000						
12	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	615.204.280	505.000.000						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	615.204.280	505.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	615.204.280	505.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NGEONG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Kelurahan Winongo			770.309.443	550.000.000						
1 4	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	770.309.443	<b>550.000.000</b>						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai	100 %	770.309.443	<b>550.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharj o	
	7 1	0 2	0 2	2 0 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	770.309.443	550.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharj o	KELURAHAN WINONGO
					Kelurahan Madiun Lor			839.684.776	576.000.000						
1 6	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	839.684.776	<b>576.000.000</b>						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	839.684.776	<b>576.000.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharj o	
	7 1	0 2	0 2	2 0 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	839.684.776	576.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharj o	KELURAHAN MADIUN LOR
					Kelurahan Pangongangan			655.918.826	511.900.000						
1 8	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	655.918.826	<b>511.900.000</b>						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	655.918.826	<b>511.900.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah yang Ada di Kecamatan							Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	655.918.826	511.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PANGONGAN
						Kelurahan Nambangan Lor			1.227.147.957	809.413.000						
20	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	1.227.147.957	809.413.000						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	1.227.147.957	809.413.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.227.147.957	809.413.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
						Kelurahan Nambangan Kidul			815.909.663	575.162.000						
22	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 Nilai	815.909.663	575.162.000						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	815.909.663	575.162.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	815.909.663	575.162.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0			KECAMATAN KARTOHARJO			6.190.552.600	4.830.988.196						
2	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.85 indeks	40.000.000	95.500.000						
	7	0	0	2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	40.000.000	95.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	40.000.000	95.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
4	7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	902.806.200	335.866.400						
	7	0	0	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	619.200.000	80.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	619.200.000	80.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	283.606.200	255.866.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	
	7	0	0	2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	11 Laporan	283.606.200	255.866.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
						Kepolisian Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
5	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain )	100 %	155.548.000	155.548.000							
	7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	155.548.000	155.548.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		
	7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 Orang	66.120.000	66.120.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO	
	7	0	0	2	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	76.400.000	76.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO	
	7	0	0	2	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	13.028.000	13.028.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO	
						Kelurahan Oro-Oro Ombo			619.721.600	516.701.200							
6	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	619.721.600	516.701.200							



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	619.721.600	516.701.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	619.721.600	516.701.200	- Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
					Kelurahan Sukosari			521.022.800	435.553.940							
8	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	521.022.800	435.553.940							
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	521.022.800	435.553.940			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Sukosari		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	521.022.800	435.553.940	- Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Sukosari	KELURAHAN SUKOSARI
					Kelurahan Klegen			641.579.200	516.843.443							
10	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	641.579.200	516.843.443							
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	641.579.200	516.843.443			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Klegen		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	641.579.200	516.843.443	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Klegen	KELURAHAN KLEGEN
						Kelurahan Rejomulyo			590.762.800	501.236.100						
1 2	7 1	0 2	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.85 indeks	590.762.800	501.236.100						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	590.762.800	501.236.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	
	7 1	0 2	0 2	2 0 3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	590.762.800	501.236.100	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	KELURAHAN REJOMULYO
						Kelurahan Pilangbango			546.951.600	473.266.400						
1 4	7 1	0 2	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	546.951.600	473.266.400						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	546.951.600	473.266.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Pilangbang o	
	7 1	0 2	0 2	2 0 3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	546.951.600	473.266.400	- Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbang o	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Pilangbang o	KELURAHAN PILANGBANG O
						Kelurahan Tawangrejo			484.880.400	410.182.200						
1 6	7 1	0 2	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	484.880.400	410.182.200						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	484.880.400	410.182.200			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	484.880.400	410.182.200	- Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	KELURAHAN TAWANGREJO
						Kelurahan Kanigoro		613.636.800	519.983.400							
18	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	613.636.800	519.983.400							
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	613.636.800	519.983.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kanigoro		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	613.636.800	519.983.400	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	KELURAHAN KANIGORO
						Kelurahan Kartoharjo		548.143.600	449.508.413							
20	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	548.143.600	449.508.413							
	7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	548.143.600	449.508.413			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo		

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	548.143.600	449.508.413	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	KELURAHAN KARTOHARJO
						Kelurahan Kelun			525.499.600	420.798.700						
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,85 indeks	525.499.600	<b>420.798.700</b>						
	7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	525.499.600	<b>420.798.700</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kelun	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	525.499.600	420.798.700	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan/k aryawati dan Masyarakat Kelurahan Kelun	KELURAHAN KELUN
	7	0				KECAMATAN TAMAN			6.517.561.174	5.177.170.202						
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	18.766.000	<b>18.766.000</b>						
	7	0	0	2		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	18.766.000	<b>18.766.000</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	18.766.000	18.766.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat	KECAMATAN TAMAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	7	0	0		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	100 %	791.784.400	143.662.600							
	7	0	0	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	687.916.400	39.794.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	687.916.400	39.794.600	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	103.868.000	103.868.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	103.868.000	103.868.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
5	7	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan ( tidak dilaksanakan PD lain )	100 %	119.067.700	119.067.700							
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	119.067.700	119.067.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	120 Orang	36.448.000	36.448.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KECAMATAN TAMAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	7	0	0	2	0	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	61.652.000	61.652.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	20.967.700	20.967.700	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
						Kelurahan Mojorejo			595.231.200	522.431.200						
6	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	595.231.200	<b>522.431.200</b>						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	595.231.200	<b>522.431.200</b>			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	595.231.200	522.431.200	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN MOJOREJO
						Kelurahan Pandean			566.471.600	497.376.600						
8	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 %	566.471.600	<b>497.376.600</b>						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	566.471.600	<b>497.376.600</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	566.471.600	497.376.600	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN PANDEAN
						Kelurahan Banjarejo			683.416.200	597.970.970						
10	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	683.416.200	<b>597.970.970</b>						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	683.416.200	<b>597.970.970</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	683.416.200	597.970.970	- Kota Madiun, Taman, Banjarejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN BANJAREJO
						Kelurahan Kuncen			360.528.170	315.955.204						
12	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	360.528.170	<b>315.955.204</b>						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesainya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	360.528.170	<b>315.955.204</b>		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	360.528.170	315.955.204	- Kota Madiun, Taman, Kuncen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN KUNCEN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City		
					Kelurahan Manisrejo			753.523.600	659.923.600						
1 4	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	753.523.600	659.923.600						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	753.523.600	659.923.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	
	7 1	0 2	0 2	2 0 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	753.523.600	659.923.600	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN MANISREJO
					Kelurahan Kejuron			647.522.704	567.438.088						
1 6	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	647.522.704	567.438.088						
	7 1	0 2	0 2	2 0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	647.522.704	567.438.088			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	
	7 1	0 2	0 2	2 0 2 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	647.522.704	567.438.088	- Kota Madiun, Taman, Kejuron	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN KEJURON
					Kelurahan Josenan			759.178.800	663.749.440						
1 8	7 1	0 2	0 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	759.178.800	663.749.440						
	7 1	0 2	0 2	2 0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang	100 %	759.178.800	663.749.440			Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan	Internal Perangkat	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 2	yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan						Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	759.178.800	663.749.440	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN JOSEMAN
						Kelurahan Demangan			630.324.000	551.882.000						
2 0	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	630.324.000	551.882.000						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	630.324.000	551.882.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	630.324.000	551.882.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN DEMANGAN
						Kelurahan Taman			591.746.800	518.946.800						
2 2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 Indeks	591.746.800	518.946.800						
	7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	591.746.800	518.946.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	591.746.800	518.946.800	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Internal Perangkat Daerah, Masyarakat	KELURAHAN TAMAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
Pagu Anggaran PRIORITAS 1 : Penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah kota Madiun berbasis smart city							837.505.217.666	760.104.618.475							

**PRIORITAS 2 : Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024	Pagu Alternatif I (Rp)	Pagu Alternatif II (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Nasional	Daerah		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		10.012.437.838	8.211.702.477												
	2	0	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		6.864.064.679	6.001.815.218												
2	2	0	0	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	50 %	2.381.874.990	<b>2.325.738.860</b>										
	2	0	0	7	3	0	1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	112 Orang	2.329.738.860	<b>2.301.638.860</b>		Masyarakat Kota Madiun					
	2	0	0	7	3	0	0	1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	2.329.738.860	2.301.638.860	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	7	3	0	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	50 %	22.700.000	<b>10.480.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	2	0	0	7	3	0	0	2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 Lembaga	22.700.000	10.480.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Semua Kel/Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 Perusahaan	29.436.130	13.620.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	
	2	0	0	2	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	29.436.130	13.620.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	568.926.682	253.256.682						
	2	0	0	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	235 Orang	568.926.682	253.256.682			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	2	0	0	2	0	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2 Dokumen	107.530.900	116.306.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	250 Orang	95.725.782	79.664.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	365.670.000	57.286.082	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	3.913.263.007	3.422.819.676						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 Perusahaan	338.178.707	154.223.800		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan		
	2	0	0	2	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	112.744.100	123.973.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	225.434.607	30.250.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	3.575.084.300	3.268.595.876		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan		
	2	0	0	2	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	75.931.500	75.931.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	0	0	2	0	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10000 Orang	3.499.152.800	3.192.664.376	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	1.209.265.959	780.780.059						
5	2	1	0		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			551.862.500	444.174.500						
	2	1	0	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	40 koperasi	551.862.500	444.174.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	
	2	1	0	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	551.862.500	444.174.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2	1	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2,5 %	135.918.800	135.918.800						
	2	1	0	2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	umlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	135.918.800	135.918.800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	
	2	1	0	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	135.918.800	135.918.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7	2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	8 %	521.484.659	200.686.759						
	2	1	0	2	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	12 Orang	521.484.659	200.686.759			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	521.484.659	200.686.759	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	1	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			1.939.107.200	1.429.107.200						
2	2	1	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	109.550.000	<b>109.550.000</b>						
	2	1	0	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	109.550.000	<b>109.550.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.550.000	109.550.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	1	0	2		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	40 persen	541.905.800	<b>341.905.800</b>						
	2	1	0	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	46 investor	541.905.800	<b>341.905.800</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	499.328.700	304.105.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	42.577.100	37.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	95 persen	599.495.000	409.495.000						
	2	1	0	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	3000 izin	599.495.000	409.495.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	218.534.000	152.455.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	177.000.000	137.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	203.961.000	120.040.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	115 perusahaan	454.884.000	404.884.000						
	2	1	0	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	370 perusahaan	454.884.000	404.884.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha.	16.123.500	16.623.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	370 Pelaku Usaha	396.359.000	345.859.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	2	0	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	42.401.500	42.401.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Investor di Kota Madiun	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	233.272.400	<b>163.272.400</b>						
	2	1	0	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	52 jenis izin	233.272.400	<b>163.272.400</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	
	2	1	0	2	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	233.272.400	163.272.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat pemohon izin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.650.007.615	17.460.206.206						
	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			778.755.000	828.755.000						
5	3	2	0		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	290 Ton	415.805.000	<b>430.805.000</b>						
	3	2	0	2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	260 RTP	415.805.000	<b>430.805.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	209.955.000	224.955.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	150.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	120 Orang	55.850.000	55.850.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	2	0		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	71.250.000	<b>71.250.000</b>						
	3	2	0	2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh	435 Orang	71.250.000	<b>71.250.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat Kota Madiun	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 1	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)						Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
	3	2	0	2	0	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71.250.000	71.250.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
7	3	2	0			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan	16,5 Kg/Kapita /Tahun	291.700.000	326.700.000						
	3	2	0	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	75.000.000	75.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	75.000.000	75.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 Ton	216.700.000	251.700.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	2	0	2	0	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	216.700.000	251.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.495.670.000	941.500.000						
7	3	2	0			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	30 %	317.670.000	<b>248.000.000</b>						
	3	2	0	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 lokasi	317.670.000	<b>248.000.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	12 Lokasi	50.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	2	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	267.670.000	198.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
8	3	2	0			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	20 %	900.000.000	<b>415.500.000</b>						
	3	2	0	2		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 Lokasi	900.000.000	<b>415.500.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	900.000.000	415.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Kel/Desa - Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		DAN OLAH RAGA
9	3	2	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	<b>278.000.000</b>						
	3	2	0	2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	<b>278.000.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	24 Orang	278.000.000	278.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			9.866.395.756	6.601.197.000						
8	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	65 %	2.059.575.000	<b>1.676.700.000</b>						
	3	2	0	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	80 %	1.988.175.000	<b>1.605.300.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	21.000.000	66.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.967.175.000	1.539.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3	2	0	2		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	71.400.000	71.400.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	71.400.000	71.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
9	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100 %	4.788.828.420	1.906.501.000						
	3	2	0	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	204.833.120	116.373.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	9.613.280	9.613.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	195.219.840	106.760.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitas/dipelihara	25 %	4.583.995.300	1.790.128.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2.461.188.000	57.088.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	2 Unit	1.161.940.000	961.940.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara				Semua Kel/Desa		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	3	2	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	211.867.300	22.100.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	749.000.000	749.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	3	2	0	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	367.000.000	367.000.000						
	3	2	0	2	0	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	259.000.000	259.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	259.000.000	259.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan jasa medik veteriner	1 Jenis	23.000.000	23.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	23.000.000	23.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	85.000.000	85.000.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kesehatan Masyarakat Veteriner						Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
	3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan	85.000.000	85.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian	76 %	121.200.000	<b>121.200.000</b>						
	3	2	0	2	0	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	2000 Ha / Tahun	121.200.000	<b>121.200.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	121.200.000	121.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1	3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	15 %	33.600.000	<b>33.600.000</b>						
	3	2	0	2	0	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 Jenis	33.600.000	<b>33.600.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	2	0	2	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	33.600.000	33.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	40 %	2.496.192.336	<b>2.496.196.000</b>						
	3	2	0	2	0	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM petani terlatih	400 Orang	2.496.192.336	<b>2.496.196.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3	7	7	2	0	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	2.496.192.336	2.496.196.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			8.296.179.295	6.303.035.346						
2	3	0	2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	138.312.400	<b>87.270.400</b>						
	3	0	2	2	0	0	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	138.312.400	<b>87.270.400</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	0	2	2	0	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	138.312.400	87.270.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
3	3	0	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	6.953.329.800	<b>5.435.462.478</b>						
	3	0	3	2	0	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 pasar	1.847.532.600	<b>974.133.278</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	0	3	2	0	0	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.012.146.000	161.846.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	0	3	2	0	0	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana	17 Unit	835.386.600	812.287.278	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1	0 2		Distribusi Perdagangan				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	3	3	0	2	0	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100 %	5.105.797.200	4.461.329.200			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	3	0	2	0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	605.000.000	243.722.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	4.500.797.200	4.217.607.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
4	3	3	0			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	413.111.000	311.130.600						
	3	3	0	2	0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	393.118.000	291.137.600			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	3	0	2	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	162.307.000	124.170.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	230.811.000	166.967.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat	Prosentase tersalurnya pupuk dan	100 %	19.993.000	19.993.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 3		Daerah Kabupaten/Kota	pestisida kepada petani berhak						Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	3	3	0	2	0	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	19.993.000	19.993.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
5	3	3	0			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yang telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	241.426.095	224.674.843						
	3	3	0	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	241.426.095	224.674.843			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	3	0	2	0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8186 Unit	234.094.095	217.342.843	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	3	0	2	0	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	7.332.000	7.332.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
6	3	3	0			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	550.000.000	244.497.025						
	3	3	0	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kali	550.000.000	244.497.025			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	
	3	3	0	2	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8 UMKM	550.000.000	244.497.025	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERDAGANGAN
	3	3				URUSAN PEMERINTAHAN			3.213.007.564	2.785.718.860						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					BIDANG PERINDUSTRIAN											
8	3	3	0		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	2.680.533.860	<b>2.620.118.860</b>							
	3	3	0	2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	15 IKM	2.680.533.860	<b>2.620.118.860</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM		
	3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	284.880.000	284.880.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.345.653.860	2.285.238.860	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	3	3	0		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	532.473.704	<b>165.600.000</b>							
	3	3	0	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	20 IKM	532.473.704	<b>165.600.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	
	3	3	0	2	0	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 Dokumen	532.473.704	165.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			11.122.075.925	5.567.899.301						
	7	0			KECAMATAN MANGUHARJO			2.867.252.450	2.044.902.450						
3	7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	127.352.450	<b>127.352.450</b>						
	7	0	0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	65.715.050	<b>65.715.050</b>			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	65.715.050	65.715.050	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Forum	61.637.400	<b>61.637.400</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	61.637.400	61.637.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KECAMATAN MANGUHARJO
					Kelurahan Manguharjo			303.750.000	210.350.000						
7	7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	303.750.000	<b>210.350.000</b>						
	7	0	0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	303.750.000	<b>210.350.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	233.750.000	156.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN MANGUHARJO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	54.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN MANGUHARJO
						Kelurahan Sogaten			260.700.000	175.150.000						
9	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	260.700.000	175.150.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	260.700.000	175.150.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	190.700.000	128.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN SOGATEN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	46.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN SOGATEN
						Kelurahan Patihan			217.650.000	135.150.000						
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	217.650.000	135.150.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	217.650.000	135.150.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	147.650.000	100.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PATIHAN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	34.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PATIHAN
						Kelurahan Ngegong			186.900.000	107.950.000						
13	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	186.900.000	<b>107.950.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	186.900.000	<b>107.950.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	116.900.000	80.350.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NGEONG
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	27.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NGEONG
						Kelurahan Winongo			309.900.000	219.150.000						
15	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	309.900.000	<b>219.150.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam	100 %	309.900.000	<b>219.150.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 2		kegiatan pemberdayaan masyarakat						Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	239.900.000	160.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN WINONGO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	58.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN WINONGO
						Kelurahan Nambangan Lor			334.500.000	237.550.000						
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	334.500.000	237.550.000						
	7	0	0	2	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	334.500.000	237.550.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	264.500.000	176.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN MADIUN LOR
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	61.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN MADIUN LOR
						Kelurahan Pangongangan			242.250.000	159.550.000						
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	242.250.000	159.550.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	242.250.000	<b>159.550.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	172.250.000	116.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PANGONGAN
	7	0	0	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	43.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN PANGONGAN
					Kelurahan Nambangan Lor			519.000.000	401.950.000						
2	7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	519.000.000	<b>401.950.000</b>						
	7	0	0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	519.000.000	<b>401.950.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	
	7	0	0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	449.000.000	296.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
	7	0	0	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	105.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
					Kelurahan Mnambangan Kidul			365.250.000	270.750.000						
2	7	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan	100 %	365.250.000	<b>270.750.000</b>						



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
						masyarakat diwilayah kecamatan											
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	365.250.000	<b>270.750.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo		
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	295.250.000	196.350.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL	
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	74.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Manguharjo	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL	
	7	0				KECAMATAN KARTOHARJO			3.807.382.200	1.517.105.576							
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	153.382.200	<b>101.042.600</b>							
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	69.647.400	<b>69.647.400</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	69.647.400	69.647.400	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO	
	7	0	0	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 lembaga/ forum	83.734.800	<b>31.395.200</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo		
	7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	83.734.800	31.395.200	- Kota Madiun, Kartoharjo,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	KECAMATAN KARTOHARJO	

1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 3	0 4		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				Semua Kel/Desa		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
						Kelurahan Oro-Oro Ombo		458.000.000	157.345.000							
7	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	458.000.000	157.345.000						
	7	0 1	0 3	2 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	458.000.000	157.345.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	
	7	0 1	0 3	2 0 0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	383.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
	7	0 1	0 3	2 0 0 2		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
						Kelurahan Sukosari		308.000.000	157.302.976							
9	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	308.000.000	157.302.976						
	7	0 1	0 3	2 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	308.000.000	157.302.976			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Sukosari	
	7	0 1	0 3	2 0 0 2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	233.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Sukosari	KELURAHAN SUKOSARI

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.302.976	- Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat Kelurahan Sukosari	KELURAHAN SUKOSARI
						Kelurahan Klegen			488.000.000	157.345.000						
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	488.000.000	157.345.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	488.000.000	157.345.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	413.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen	KELURAHAN KLEGEN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Klegen	KELURAHAN KLEGEN
						Kelurahan Rejomulyo			428.000.000	157.345.000						
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	428.000.000	157.345.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	428.000.000	157.345.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	353.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	KELURAHAN REJOMULYO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	KELURAHAN REJOMULYO
						Kelurahan Pilangbango			332.000.000	157.345.000						
15	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	332.000.000	<b>157.345.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	332.000.000	<b>157.345.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	257.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	KELURAHAN PILANGBANG O
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	KELURAHAN PILANGBANG O
						Kelurahan Tangrejo			344.000.000	157.345.000						
17	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	344.000.000	<b>157.345.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	344.000.000	<b>157.345.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	269.000.000	125.000.000	- Kota Madiun,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	KELURAHAN TAWANGREJO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 2	0 2						Kartoharjo, Tawangrejo		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	KELURAHAN TAWANGREJO
						Kelurahan Kanigoro			512.000.000	157.345.000						
1 9	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	512.000.000	157.345.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	512.000.000	157.345.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	437.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	KELURAHAN KANIGORO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	KELURAHAN KANIGORO
						Kelurahan Kartoharjo			428.000.000	157.345.000						
2 1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	428.000.000	157.345.000						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	428.000.000	157.345.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	353.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	KELURAHAN KARTOHARJO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	KELURAHAN KARTOHARJO
						Kelurahan Kelun			356.000.000	157.345.000						
2	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	356.000.000	<b>157.345.000</b>						
3	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	356.000.000	<b>157.345.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	281.000.000	125.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun	KELURAHAN KELUN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	75.000.000	32.345.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Kelun	KELURAHAN KELUN
	7	0				KECAMATAN TAMAN			4.447.441.275	2.005.891.275						
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	205.891.275	<b>205.891.275</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	79.843.925	<b>79.843.925</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Masyarakat	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							pemberdayaan masyarakat						Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan	79.843.925	79.843.925	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Lembaga	126.047.350	<b>126.047.350</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	126.047.350	126.047.350	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
7	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	599.750.000	<b>262.000.000</b>						
	7	0	0	2	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	599.750.000	<b>262.000.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	529.750.000	130.000.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN MOJOREJO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	70.000.000	132.000.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN MOJOREJO
9	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	569.000.000	<b>250.800.000</b>						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	569.000.000	<b>250.800.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	493.000.000	120.000.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN PANDEAN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	76.000.000	130.800.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN PANDEAN
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	415.250.000	<b>160.000.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	415.250.000	<b>160.000.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	365.250.000	70.000.000	- Kota Madiun, Taman, Banjarejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN BANJAREJO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	90.000.000	- Kota Madiun, Taman, Banjarejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN BANJAREJO
1	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	255.350.000	<b>137.000.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam	100 %	255.350.000	<b>137.000.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat	



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	2		kegiatan pemberdayaan masyarakat						Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	205.350.000	83.200.000	- Kota Madiun, Taman, Kuncen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN KUNCEN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	53.800.000	- Kota Madiun, Taman, Kuncen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN KUNCEN
15	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	569.000.000	<b>243.600.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	569.000.000	<b>243.600.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	496.000.000	120.000.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN MANISREJO
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	73.000.000	123.600.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN MANISREJO
17	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	507.500.000	<b>215.200.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	507.500.000	<b>215.200.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	454.500.000	100.000.000	- Kota Madiun, Taman, Kejuron	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN KEJURON
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	53.000.000	115.200.000	- Kota Madiun, Taman, Kejuron	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN KEJURON
19	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	390.650.000	<b>147.400.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	390.650.000	<b>147.400.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	340.650.000	62.000.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN JOSENAN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	85.400.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN JOSENAN
21	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	421.400.000	<b>165.600.000</b>						
	7	0	0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	421.400.000	<b>165.600.000</b>			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	346.400.000	72.000.000	- Kota Madiun,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	Masyarakat	KELURAHAN DEMANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 2	0 2						Taman, Demangan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	93.600.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN DEMANGAN
2 3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	513.650.000	218.400.000						
	7	0	0	2	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	513.650.000	218.400.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	7	0	0	2	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	463.650.000	102.000.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN TAMAN
	7	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	116.400.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	KELURAHAN TAMAN
Pagu Anggaran PRIORITAS 2 : Peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat									44.784.521.378	31.239.807.984						

**PRIORITAS 3 : Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024	Pagu Alternatif I (Rp)	Pagu Alternatif II (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Nasional			Daerah
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		206.793.886.114	127.169.614.183							

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		80.113.432.195	40.643.271.499								
2	1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib belajar 9 tahun	100 %	23.381.626.992	<b>11.014.797.093</b>							
	1	0	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	5.803.034.624	<b>3.937.687.733</b>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga		
	1	0	0	1	2	0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	985.000.000	3.255.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	1	2	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	1.173.457.250	199.487.733	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	1	2	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	69 Satuan Pendidikan	708.000.000	283.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	1	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	2.936.577.374	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	9.041.641.368	<b>2.316.584.990</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	
	1	0	0	1	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3.044.205.503	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	1	2	0	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan	5488 Siswa Paket	4.397.111.150	1.844.529.788	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 2	2 7		Sekolah yang Tersedia				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
1	0 1	0 2	2 0	2 0	0 3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	1.286.924.715	218.777.202	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 4	0 2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	313.400.000	53.278.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 0	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi	100 %	7.468.521.000	<b>3.974.294.370</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	
1	0 1	0 2	2 0	2 0	3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Lembaga Peserta Didik	375.065.000	131.489.050	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 0	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	987 Orang	5.940.000.000	3.564.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 0	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	1.053.796.000	179.145.320	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 0	3	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	154 Satuan Pendidikan	99.660.000	99.660.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
1	0 1	0 2	2 0	2 0		Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Lembaga Non	100 %	1.068.430.000	<b>786.230.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Lembaga	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 4	Nonformal/Kesetaraan	Formal Yang Terakreditasi						Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
	1	0 1	0 2	2 0 0 1 4 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	340.000.000	57.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2 0 0 1 4 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	728.430.000	728.430.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
3	1	0 1	0 3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100 %	5.225.228.500	888.288.845						
	1	0 1	0 3	2 0 0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 standar pendidikan pada kualitas standard proses dan penilaian pendidikan	100 %	3.823.812.500	650.048.125			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	
	1	0 1	0 3	2 0 0 1 2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	100% Dokumen	1.222.636.500	207.848.205	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 3	2 0 0 1 4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	959.820.500	163.169.485	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 3	2 0 0 1 7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1.641.355.500	279.030.435	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 3	2 0 0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1.401.416.000	238.240.720			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1.401.416.000	238.240.720	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Lembaga	DINAS PENDIDIKAN
4	1	0	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	67 %	3.113.475.000	<b>561.705.561</b>						
	1	0	0	2	0	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	67 %	3.113.475.000	<b>561.705.561</b>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
	1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.370.000.000	232.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN
	1	0	0	2	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1.743.475.000	328.805.561	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN
						SDN 01 Kartoharjo			654.864.545	428.190.000						
5	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	654.864.545	<b>428.190.000</b>						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	654.864.545	428.190.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	317.790.000	317.790.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KARTOHARJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	337.074.545	110.400.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KARTOHARJO
						SDN 02 Kartoharjo			410.563.072	174.150.000						
6	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	410.563.072	174.150.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	410.563.072	174.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	94.050.000	44.550.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KARTOHARJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	316.513.072	129.600.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KARTOHARJO
						SDN 01 Klegen			765.540.648	430.320.000						
7	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	765.540.648	430.320.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	765.540.648	430.320.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	324.720.000	324.720.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KLEGEN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	440.820.648	105.600.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KLEGEN
						SDN 02 Klegen			390.050.587	220.740.000						
8	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	390.050.587	220.740.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	390.050.587	220.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.740.000	124.740.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KLEGEN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	265.310.587	96.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KLEGEN
						SDN 03 Klegen			696.704.824	441.900.000						
9	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	696.704.824	441.900.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	696.704.824	441.900.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	326.700.000	326.700.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketengakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	SDN 03 KLEGEN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	370.004.824	115.200.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 KLEGEN
						SDN 04 Klegen			229.808.326	151.200.000						
1	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	229.808.326	151.200.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	229.808.326	151.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	79.200.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 KLEGEN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	150.608.326	72.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 KLEGEN
						SDN Oro Oro Ombo			687.144.270	295.470.000						
1	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	687.144.270	295.470.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	687.144.270	295.470.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	230.670.000	230.670.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN ORO ORO OMBO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang	1 Satuan Pendidikan	456.474.270	64.800.000	- Kota Madiun, Kartoharjo,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Satuan Pendidikan	SDN ORO ORO OMBO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1	5 0		Menyelenggarakan Proses Belajar					Oro-oro Ombo	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
						SDN 01 Rejomulyo			645.957.740	219.690.000						
1 2	1 1	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	645.957.740	219.690.000						
	1 1	0 2	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	645.957.740	219.690.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 2	0 2	2 0 2 1 9	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	130.680.000	90.090.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 REJOMULYO
	1 1	0 2	0 2	2 0 5 1 0	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	515.277.740	129.600.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 REJOMULYO
						SDN 01 Kanigoro			313.060.835	122.100.000						
1 3	1 1	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	313.060.835	122.100.000						
	1 1	0 2	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	313.060.835	122.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 2	0 2	2 0 2 1 9	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.300.000	69.300.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KANIGORO
	1 1	0 2	0 2	2 0 5 1 0	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	243.760.835	52.800.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 KANIGORO
						SDN 02 Kanigoro			451.538.504	233.220.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 4	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	451.538.504	233.220.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	451.538.504	233.220.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	156.420.000	156.420.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KANIGORO
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	295.118.504	76.800.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 KANIGORO
					SDN 03 Kanigoro			449.720.576	251.430.000						
1 5	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	449.720.576	251.430.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	449.720.576	251.430.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.430.000	155.430.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 KANIGORO
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	294.290.576	96.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 KANIGORO
					SDN Sukosari			274.521.897	99.720.000						
1 6	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	274.521.897	99.720.000						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	274.521.897	99.720.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	27.720.000	27.720.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN SUKOSARI
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	246.801.897	72.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN SUKOSARI
						SDN Pilangbango			727.952.492	357.990.000						
17	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	727.952.492	357.990.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	727.952.492	357.990.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	218.790.000	218.790.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbang o	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN PILANGBANG O
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	509.162.492	139.200.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbang o	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN PILANGBANG O
						SDN 01 Tawangrejo			359.823.917	212.190.000						
18	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	359.823.917	212.190.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	359.823.917	212.190.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	159.390.000	159.390.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 TAWANGREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.433.917	52.800.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 TAWANGREJO
						SDN 02 Tawangrejo			319.959.792	119.730.000						
19	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319.959.792	119.730.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	319.959.792	119.730.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.130.000	86.130.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 TAWANGREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	233.829.792	33.600.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 TAWANGREJO
						SDN Kelun			463.736.367	269.100.000						
20	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	463.736.367	269.100.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	463.736.367	269.100.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan Pendidikan	168.300.000	168.300.000	- Kota Madiun,	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Satuan Pendidikan	SDN KELUN

1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 1	2 9		Mengelola Dana BOS				Kartoharjo, Kelun		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
	1	0	0	2 0 1	0 5 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	295.436.367	100.800.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN KELUN
						SDN 01 Manguharjo			678.883.209	385.860.000						
2 1	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	678.883.209	385.860.000						
	1	0	0	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	678.883.209	385.860.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2 0 1	0 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	251.460.000	251.460.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MANGUHARJO
	1	0	0	2 0 1	0 5 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	427.423.209	134.400.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MANGUHARJO
						SDN 01 Nambangan Lor			763.637.332	448.620.000						
2 2	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	763.637.332	448.620.000						
	1	0	0	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	763.637.332	448.620.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2 0 1	0 2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	295.020.000	295.020.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 NAMBANGAN LOR

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	468.617.332	153.600.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 NAMBANGAN LOR
						SDN 02 Nambangan Lor			411.324.952	231.480.000						
23	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	411.324.952	231.480.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	411.324.952	231.480.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	130.680.000	130.680.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 NAMBANGAN LOR
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	280.644.952	100.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 NAMBANGAN LOR
						SDN 01 Madiun Lor			319.112.966	163.080.000						
24	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319.112.966	163.080.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	319.112.966	163.080.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.080.000	91.080.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MADIUN LOR
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	228.032.966	72.000.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	SDN 01 MADIUN LOR



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
						SDN 02 Madiun Lor			285.277.700	144.870.000						
25	1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	285.277.700	144.870.000						
	1	0	0	1	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	285.277.700	144.870.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	1	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.070.000	92.070.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MADIUN LOR
	1	0	0	1	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	193.207.700	52.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MADIUN LOR
						SDN 03 Madiun Lor			1.115.378.038	752.520.000						
26	1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.115.378.038	752.520.000						
	1	0	0	1	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.115.378.038	752.520.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	1	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	502.920.000	502.920.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 MADIUN LOR
	1	0	0	1	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	612.458.038	249.600.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 MADIUN LOR
						SDN 04 Madiun Lor			557.991.987	374.940.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	557.991.987	374.940.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	557.991.987	374.940.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	302.940.000	302.940.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 MADIUN LOR
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	255.051.987	72.000.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 MADIUN LOR
					SDN 05 Madiun Lor			808.429.735	690.630.000						
28	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	808.429.735	690.630.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	808.429.735	690.630.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	472.230.000	472.230.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 05 MADIUN LOR
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	336.199.735	218.400.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 05 MADIUN LOR
					SDN 01 Nambangan Kidul			570.567.384	194.010.000						
29	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	570.567.384	194.010.000						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	570.567.384	194.010.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.370.000	98.010.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	409.197.384	96.000.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
						SDN 02 Nambangan Kidul			313.892.763	166.650.000						
30	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	313.892.763	166.650.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	313.892.763	166.650.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	113.850.000	113.850.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.042.763	52.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
						SDN 03 Nambangan Kidul			667.373.524	452.580.000						
31	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	667.373.524	452.580.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	667.373.524	452.580.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	298.980.000	298.980.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	368.393.524	153.600.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
						SDN 01 Winongo			642.138.010	459.510.000						
3	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	642.138.010	459.510.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	642.138.010	459.510.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.910.000	305.910.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 WINONGO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	336.228.010	153.600.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 WINONGO
						SDN 02 Winongo			232.886.335	108.240.000						
3	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	232.886.335	108.240.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	232.886.335	108.240.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan Pendidikan	55.440.000	55.440.000	- Kota Madiun,	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Satuan Pendidikan	SDN 02 WINONGO

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			0 1	2 9		Mengelola Dana BOS			Manguharjo, Winongo		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial				
	1	0 1	0 2	2 0 5 1	0 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	177.446.335	52.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 WINONGO
						SDN Ngegong										
3 4	1 1	0 0	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	646.859.821	219.120.000						
	1	0 1	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	646.859.821	219.120.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0 1	0 2	2 0 2 1	0 0 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	166.320.000	166.320.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN NGEONG
	1	0 1	0 2	2 0 5 1	0 0 0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	480.539.821	52.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN NGEONG
						SDN Patihan										
3 5	1 1	0 0	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	561.475.292	355.920.000						
	1	0 1	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	561.475.292	355.920.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0 1	0 2	2 0 2 1	0 0 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245.520.000	245.520.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN PATIHAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	315.955.292	110.400.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN PATIHAN
						SDN 01 Pangongangan			792.386.487	492.630.000						
36	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	792.386.487	492.630.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	792.386.487	492.630.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	324.720.000	274.230.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 PANGONGANGAN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	467.666.487	218.400.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 PANGONGANGAN
						SDN Sogaten			401.047.037	222.090.000						
37	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	401.047.037	222.090.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	401.047.037	222.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.290.000	169.290.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN SOGATEN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	231.757.037	52.800.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	SDN SOGATEN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
						SDN 01 Taman			991.866.420	655.290.000						
3 8	1 1	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	991.866.420	655.290.000						
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	991.866.420	655.290.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	446.490.000	446.490.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 TAMAN
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	545.376.420	208.800.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 TAMAN
						SDN 02 Taman			595.406.639	147.240.000						
3 9	1 1	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	595.406.639	147.240.000						
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	595.406.639	147.240.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75.240.000	75.240.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 TAMAN
	1 1	0 2	0 2	2 .	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	520.166.639	72.000.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 TAMAN
						SDN 03 Taman			318.859.611	186.090.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 0	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	318.859.611	186.090.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	318.859.611	186.090.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	90.090.000	90.090.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 TAMAN
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	228.769.611	96.000.000	- Kota Madiun, Taman, Taman	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 TAMAN
					SDN 01 Pandean			647.048.303	394.740.000						
4 1	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	647.048.303	394.740.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	647.048.303	394.740.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	322.740.000	322.740.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 PANDEAN
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	324.308.303	72.000.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 PANDEAN
					SDN 02 Pandean			656.469.154	421.410.000						
4 2	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	656.469.154	421.410.000						



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	656.469.154	421.410.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	315.810.000	315.810.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 PANDEAN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	340.659.154	105.600.000	- Kota Madiun, Taman, Pandean	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 PANDEAN
						SDN Banjarejo			749.216.821	533.250.000						
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	749.216.821	533.250.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	749.216.821	533.250.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	410.850.000	410.850.000	- Kota Madiun, Taman, Banjarejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN BANJAREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	338.366.821	122.400.000	- Kota Madiun, Taman, Banjarejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN BANJAREJO
						SDN 01 Mojorejo			339.026.343	206.430.000						
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	339.026.343	206.430.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	339.026.343	206.430.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	96.030.000	96.030.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MOJOREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	242.996.343	110.400.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MOJOREJO
						SDN 02 Mojorejo			892.067.393	628.110.000						
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	892.067.393	628.110.000						
5	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	892.067.393	628.110.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	484.110.000	484.110.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MOJOREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	407.957.393	144.000.000	- Kota Madiun, Taman, Mojorejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MOJOREJO
						SDN 01 Manisrejo			690.376.900	414.930.000						
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	690.376.900	414.930.000						
6	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	690.376.900	414.930.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	1 Satuan Pendidikan	323.730.000	323.730.000	- Kota Madiun,	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Satuan Pendidikan	SDN 01 MANISREJO

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			0 1	2 9	Mengelola Dana BOS				Taman, Manisrejo		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial				
	1	0 1	0 2	2 0 5 1	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	366.646.900	91.200.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 MANISREJO
					SDN 02 Manisrejo			590.553.291	391.320.000							
4 7	1 1	0 2	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	590.553.291	391.320.000							
	1	0 1	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	590.553.291	391.320.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan		
	1	0 1	0 2	2 0 2 1	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	304.920.000	304.920.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MANISREJO
	1	0 1	0 2	2 0 5 1	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	285.633.291	86.400.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 MANISREJO
					SDN 03 Manisrejo			430.336.007	211.200.000							
4 8	1 1	0 2	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	430.336.007	211.200.000							
	1	0 1	0 2	2 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	430.336.007	211.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan		
	1	0 1	0 2	2 0 2 1	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	158.400.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 MANISREJO

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	271.936.007	52.800.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 MANISREJO
						SDN 04 Manisrejo			527.949.571	280.560.000						
49	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	527.949.571	280.560.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	527.949.571	280.560.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	182.160.000	182.160.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 MANISREJO
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	345.789.571	98.400.000	- Kota Madiun, Taman, Manisrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 04 MANISREJO
						SDN 01 Demangan			309.428.772	221.730.000						
50	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	309.428.772	221.730.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	309.428.772	221.730.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	125.730.000	125.730.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 DEMANGAN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	183.698.772	96.000.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	SDN 01 DEMANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
														(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
						SDN 02 Demangan			400.251.965	202.290.000						
5 1	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	400.251.965	202.290.000						
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	400.251.965	202.290.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	149.490.000	149.490.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 DEMANGAN
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	250.761.965	52.800.000	- Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 DEMANGAN
						SDN 01 Josenan			457.198.219	264.150.000						
5 2	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	457.198.219	264.150.000						
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	457.198.219	264.150.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.350.000	163.350.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 JOSEMAN
	1	0 1	0 2	2 .	0 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	293.848.219	100.800.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 01 JOSEMAN
						SDN 02 Josenan			506.120.784	206.850.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 3	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	506.120.784	206.850.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	506.120.784	206.850.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	173.250.000	173.250.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 JOSENAN
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	332.870.784	33.600.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 02 JOSENAN
					SDN 03 Josenan			430.710.728	143.280.000						
5 4	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	430.710.728	143.280.000						
	1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	430.710.728	143.280.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	71.280.000	71.280.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 JOSENAN
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	359.430.728	72.000.000	- Kota Madiun, Taman, Josenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN 03 JOSENAN
					SDN Kejuron			203.147.306	129.240.000						
5 5	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	203.147.306	129.240.000						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	203.147.306	129.240.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	35.640.000	35.640.000	- Kota Madiun, Taman, Kejuron	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN KEJURON
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	167.507.306	93.600.000	- Kota Madiun, Taman, Kejuron	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN KEJURON
						SDN Kuncen			271.696.692	178.020.000						
5	6	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	271.696.692	178.020.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	271.696.692	178.020.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.220.000	77.220.000	- Kota Madiun, Taman, Kuncen	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN KUNCEN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	194.476.692	100.800.000	- Kota Madiun, Taman, Kuncen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SDN KUNCEN
						SMPN 1			2.171.835.519	1.127.210.000						
5	7	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	2.171.835.519	1.127.210.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	2.171.835.519	1.127.210.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	920.810.000	920.810.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 1
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.251.025.519	206.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 1
						SMPN 2			1.558.708.997	1.229.060.000						
5	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.558.708.997	1.229.060.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.558.708.997	1.229.060.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	902.660.000	902.660.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 2
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	656.048.997	326.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 2
						SMPN 3			1.488.606.943	849.200.000						
5	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.488.606.943	849.200.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.488.606.943	849.200.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama	1 Satuan Pendidikan	677.600.000	677.600.000	- Kota Madiun, Semua	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Satuan Pendidikan	SMPN 3



1	2				3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 2	4 2		yang Mengelola Dana BOS				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	811.006.943	171.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 3
						SMPN 4			1.734.121.614	1.174.170.000						
60	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.734.121.614	1.174.170.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.734.121.614	1.174.170.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.012.770.000	1.012.770.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 4
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	721.351.614	161.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 4
						SMPN 5			1.337.158.016	658.730.000						
61	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.337.158.016	658.730.000						
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.337.158.016	658.730.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	499.730.000	499.730.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 5

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	837.428.016	159.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 5
						SMPN 6			1.517.550.531	922.220.000						
6	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.517.550.531	922.220.000						
2		1	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.517.550.531	922.220.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	728.420.000	728.420.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 6
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	789.130.531	193.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 6
						SMPN 7			1.670.655.890	1.156.660.000						
6	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.670.655.890	1.156.660.000						
3		1	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.670.655.890	1.156.660.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	854.260.000	854.260.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 7
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	816.395.890	302.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	SMPN 7

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Semua Kel/Desa			(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
						SMPN 8			1.195.976.910	668.570.000						
64	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.195.976.910	668.570.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.195.976.910	668.570.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	601.370.000	601.370.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 8
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	594.606.910	67.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 8
						SMPN 9			1.340.446.710	668.370.000						
65	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.340.446.710	668.370.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.340.446.710	668.370.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	504.570.000	504.570.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 9
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	835.876.710	163.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 9
						SMPN 10			1.783.915.969	841.780.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 6	1 1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.783.915.969	841.780.000						
	1 1	0 1	0 2	2 .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.783.915.969	841.780.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 1	0 2	2 .	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	578.380.000	578.380.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 10
	1 1	0 1	0 2	2 .	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.205.535.969	263.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 10
					SMPN 11			1.572.365.908	987.360.000						
6 7	1 1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.572.365.908	987.360.000						
	1 1	0 1	0 2	2 .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.572.365.908	987.360.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1 1	0 1	0 2	2 .	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	769.560.000	769.560.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 11
	1 1	0 1	0 2	2 .	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	802.805.908	217.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 11
					SMPN 12			1.212.805.580	816.610.000						
6 8	1 1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.212.805.580	816.610.000						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.212.805.580	816.610.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan		
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	654.610.000	654.610.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 12
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	558.195.580	162.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 12
						SMPN 13			1.415.044.045	976.960.000						
69	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.415.044.045	976.960.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.415.044.045	976.960.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	817.960.000	817.960.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 13
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	597.084.045	159.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 13
						SMPN 14			776.567.188	395.560.000						
70	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	776.567.188	395.560.000						
	1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	776.567.188	395.560.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Satuan Pendidikan	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	309.760.000	309.760.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 14
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	466.807.188	85.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Satuan Pendidikan	SMPN 14
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			103.556.398.132	67.440.094.753						
2	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33 %	49.655.530.087	39.283.132.340						
	1	0	0	2	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan mencapai Target	90,22 %	8.159.893.777	3.734.304.140			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas, Rumah sakit	
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	668.847.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas, Rumah sakit	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	180 Unit	2.451.544.450	609.074.064	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas, Rumah sakit	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan	420 Unit	132.697.200	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Puskesmas, Rumah sakit	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center					Semua Kel/Desa			(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	162 Unit	219.940.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas, Rumah sakit	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket	4.686.865.127	3.125.230.076	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas, Rumah sakit	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar mencapai Target	83,33 %	41.495.636.310	35.548.828.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2450 Orang	338.602.000	581.198.200	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338 Orang	105.463.300	13.936.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227 Orang	99.706.200	72.198.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9081 Orang	511.395.700	80.491.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31855 Orang	175.581.300	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114664 Orang	167.311.500	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30573 Orang	22.522.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68973 Orang	22.640.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8143 Orang	12.370.000	246.288.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	339 Orang	144.155.900	36.348.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Masyarakat Kota	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 2	1 0	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			Kecamatan, Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Madiun, Puskesmas	AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5044 Orang	313.403.800	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5780 Orang	307.413.000	25.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	5.348.943.400	1.416.196.900	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	343.884.000	48.158.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	168.989.100	24.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2 0 0 2	0 0 2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	53.468.400	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	78.681.900	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	416.911.100	237.070.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	28.862.596.000	32.414.942.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	1.132.434.800	26.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	2.031.618.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	145.602.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	574.210.710	326.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	658 Orang	43.266.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	31.896.200	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	42.570.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun, Puskesmas	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	1	0	0	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	92 %	240.694.600	<b>722.985.000</b>						
	1	0	0	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	92 %	240.694.600	<b>722.985.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	
	1	0	0	2	3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang	240.694.600	722.985.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Daerah Kabupaten/Kota	yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				Semua Kel/Desa			(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		DAN KELUARGA BERENCANA	
4	1	0	0	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	91 %	135.964.000	0,00						
	1	0	0	2	0	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	89 %	32.464.000	0,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
	1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	32.464.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	89 %	103.500.000	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat	3 Dokumen	103.500.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	KELUARGA BERENCANA
5	1	0	0	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	80,67 %	4.758.151.173	251.137.800						
	1	0	0	2	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 %	706.415.350	26.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat , lintas sektor, stake holder	
	1	0	0	2	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	706.415.350	26.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat , lintas sektor, stake holder	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0	0	2	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri	77,78 % 71,15 % 81,48 % 54,55 % 40 % 86,67 % 97,1 %	4.051.735.823	224.737.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	UKBM	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri										
	1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.051.735.823	224.737.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	UKBM	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun			30.887.271.500	10.615.711.613						
1	0	1	0	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33 %	30.887.271.500	10.615.711.613						
	1	0	0	2	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	90,22 %	30.887.271.500	10.615.711.613			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pelanggan RSUD Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	362.532.000	623.188.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pelanggan RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0	0	2	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14 Unit	10.263.483.000	202.550.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pelanggan RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0	0	2	0	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah	1 Unit	13.135.456.500	2.664.173.613	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pelanggan RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit										
	1	0	0	2	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	7.125.800.000	7.125.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pelanggan RSUD Kota Madiun	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
						Puskesmas Manguharjo			3.025.786.500	2.849.411.500						
1	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.025.786.500	2.849.411.500						
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	<b>3.025.786.500</b>	<b>2.849.411.500</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	413.168.000	236.793.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	783.268.500	783.268.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.829.350.000	1.829.350.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Manguharjo	PUSKESMAS MANGUHARJO
						Puskesmas Ngegong			2.625.295.500	2.493.469.500						
1	2	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal)	83,33 %	2.625.295.500	2.493.469.500						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan mencapai target										
	1	0	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.625.295.500	2.493.469.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong		
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	391.692.000	259.866.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	778.386.500	778.386.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.455.217.000	1.455.217.000	- Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngegong	PUSKESMAS NGEGONG
						Puskesmas Sukosari			2.931.912.622	2.611.018.500						
1	3	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.931.912.622	2.611.018.500						
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.931.912.622	2.611.018.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	559.736.000	238.842.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	832.176.622	832.176.500	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari	PUSKESMAS SUKOSARI



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.540.000.000	1.540.000.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sukosari	PUSKESMAS SUKOSARI
						Puskesmas Tawangrejo			2.762.152.150	2.483.818.500						
1	4	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.762.152.150	2.483.818.500						
	1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.762.152.150	2.483.818.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	431.520.000	158.004.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	866.392.150	861.574.500	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.464.240.000	1.464.240.000	- Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo	PUSKESMAS TAWANGREJO
						Puskesmas Banjarejo			3.287.477.000	3.065.861.000						
1	5	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.287.477.000	3.065.861.000						
	1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Persentase Indikator SPM Kesehatan	83,33 %	3.287.477.000	3.065.861.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Masyarakat di wilayah kerja	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dasar Mencapai Target					Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas Banjarejo		
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	672.959.000	451.343.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	886.518.000	886.518.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.728.000.000	1.728.000.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Banjarejo	PUSKESMAS BANJAREJO
						Puskesmas Demangan			3.246.163.000	3.063.549.000						
1	6	1	0	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.246.163.000	3.063.549.000						
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	3.246.163.000	3.063.549.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	579.328.000	396.714.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	816.835.000	816.835.000	- Kota Madiun, Taman, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Demangan	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.850.000.000	1.850.000.000	- Kota Madiun, Taman,	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat di wilayah kerja	PUSKESMAS DEMANGAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Semua Kel/Desa	Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Puskesmas Demangan		
	1	0	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			23.124.055.787	19.086.247.931						
2	1	0	6	0	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	66 %	4.351.382.713	<b>3.330.583.527</b>						
	1	0	6	0	2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	66 %	4.351.382.713	<b>3.330.583.527</b>		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PSKS		
	1	0	6	0	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	682.439.273	431.170.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PSKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	6	0	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	53.291.776	52.904.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PSKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	6	0	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	370.112.196	130.801.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PSKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	6	0	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	3.245.539.468	2.715.706.827	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PSKS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 %	4.534.633.481	3.198.025.820						
	1	0	0	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	3.944.103.151	2.523.207.490		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis		
	1	0	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang	170.896.000	170.896.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	15.332.431	15.332.431	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	26.308.000	26.308.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	8 Orang	22.560.000	22.560.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Penyandang Disabilitas Terlantar,	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0 1	0 4	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Kecamatan, Semua Kel/Desa		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	0 6	0 4	2 0 0 1 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.500.000	9.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 4	2 0 0 1 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	3.627.186.820	2.160.391.159	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 4	2 0 0 1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	72.319.900	118.219.900	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 4	2 0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	590.530.330	<b>674.818.330</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	209.180.500	278.780.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	86.366.000	92.554.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	42.790.000	45.790.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.242.000	20.242.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	25.311.830	25.311.830	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	73.800.000	79.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	121.560.000	121.560.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	11.280.000	11.280.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91 %	13.234.529.873	<b>11.935.462.558</b>						
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 %	7.714.520	<b>5.721.558</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Anak Terlantar	
	1	0	0	2	0	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	3.524.400	3.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Anak Terlantar	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	3.994.320	2.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Anak Terlantar	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	195.800	221.558	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Anak Terlantar	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	0	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			13.226.815.353	<b>11.929.741.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fakir Miskin	
	1	0	0	2	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	1.052.819.092	1.147.254.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	574.054.895	326.729.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	11.294.425.192	10.127.635.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	305.516.174	328.123.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fakir Miskin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 %	841.306.615	<b>451.972.965</b>						
	1	0	0	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 %	71.085.159	<b>52.120.965</b>			Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	34.971.362	27.943.665	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	13.507.797	15.177.300	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	22.606.000	9.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 %	770.221.456	<b>399.852.000</b>			Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat at di Kelurahan	
	1	0	0	2	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	160.900.608	18.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat at di Kelurahan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0	0	2	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	609.320.848	381.652.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat at di Kelurahan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan AC dalam kondisi baik	100 %	162.203.105	170.203.061						
	1	0	0	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 %	162.203.105	170.203.061			Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Taman Makam Pahlawan	
	1	0	0	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	162.203.105	170.203.061	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.383.273.901	15.514.112.279						
	2	0	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.113.440.803	2.027.218.395						
7	2	0	0		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 %	1.636.275.500	1.058.020.200						
	2	0	0	2	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100 %	121.013.500	102.687.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Perangkat Daerah	
	2	0	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	55.940.500	32.137.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	46.525.000	34.651.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	9.635.000	25.199.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	8.913.000	10.700.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32,5 %	91.476.000	22.311.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perempuan pada Lembaga Masyarakat	
	2	0	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	1 Dokumen	34.946.000	10.432.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Perempuan pada Lembaga Masyarakat	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		PERLINDUNGAN ANAK	
	2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	56.530.000	11.879.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perempuan pada Lembaga Masyarakat	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	60 %	1.423.786.000	933.021.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	
	2	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	1.266.944.900	911.658.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	156.841.100	21.362.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	402.159.225	251.587.945						
	2	0	0	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap	Persentase lembaga yang mendapatkan	100 %	205.868.335	56.576.400			Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing	Lembaga	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 1	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan						Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
	2	0 8	0 3	2 0 1	0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.777.490	21.815.600	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 0 1	0 0 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	149.090.845	34.760.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	95 %	174.426.250	<b>174.123.250</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Penyedia Layanan	
	2	0 8	0 3	2 0 2	0 0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	174.426.250	174.123.250	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Penyedia Layanan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2 0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 %	21.864.640	<b>20.888.295</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	12.421.995	13.921.995	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.442.645	6.966.300	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
9	2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	30 %	370.890.700	<b>223.208.000</b>						
	2	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100 %	242.621.200	<b>160.533.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	
	2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	101.415.200	69.501.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	141.206.000	91.032.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan	100 %	128.269.500	<b>62.675.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Rukun Tetangga atau Kepala Keluarga	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Keluarga dan Hak anak						Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	2	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	128.269.500	62.675.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rukun Tetangga atau Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	0	2	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 Dokumen	172.929.700	83.388.100						
	2	0	0	2		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 %	172.929.700	83.388.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	96.059.000	32.297.100	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	2	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76.870.700	51.091.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Perangkat Daerah dan Instansi Terkait	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	1	2	0	0		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	42,20 %	438.450.000	336.136.050						
	2	0	0	2		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	38 %	64.200.000	61.346.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	64.200.000	61.346.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27 %	374.250.000	274.789.550			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	
	2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24.250.000	17.356.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.000.000	140.570.550	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.000.000	75.763.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
	2	0	0	2	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	1 Dokumen	45.000.000	41.100.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Lembaga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		PERLINDUNGAN ANAK
1 2	2 2	0 8	0 7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 %	92.735.678	<b>74.878.100</b>						
	2	0 8	0 7	2 0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	69,50 %	28.235.700	<b>21.868.800</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Sekolah	
	2	0 8	0 7	2 0 1 3	0 0 1	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	28.235.700	21.868.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Sekolah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 0 2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 %	41.749.118	<b>24.762.500</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Penyedia Layanan Perlindungan an Anak	
	2	0 8	0 7	2 0 2 5	0 0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	10.350.000	10.450.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Penyedia Layanan Perlindungan an Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 0 2 6	0 0	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	31.399.118	14.312.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Penyedia Layanan Perlindungan an Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2 0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 %	22.750.860	<b>28.246.800</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan an Anak	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat			
	2	0	0	2	0	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	22.750.860	28.246.800	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			534.981.000	534.981.000						
2	2	0	0	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	389.125.000	<b>389.125.000</b>						
	2	0	0	9	3	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	100 %	224.125.000	<b>224.125.000</b>			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	0	0	9	3	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	173.500.000	173.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	9	3	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	17.200.000	17.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	9	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	33.425.000	33.425.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	9	3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Angka kecukupan Energi	2000 kkal / kapita	165.000.000	<b>165.000.000</b>			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Masyarakat Kota Madiun	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 4	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
	2	0 9	0 3	2 0 0 4	0 0 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.700.000	43.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0 9	0 3	2 0 0 4	0 0 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	121.300.000	121.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2	0 9	0 4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	22 %	58.200.000	58.200.000						
	2	0 9	0 4	2 0 0 1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	58.200.000	58.200.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	0 9	0 4	2 0 0 1	0 0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	58.200.000	58.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	2	0 9	0 5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	87.656.000	87.656.000						
	2	0 9	0 5	2 0 0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 Lokasi	87.656.000	87.656.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	0 9	0 5	2 0 0 1	0 0 7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	60.656.000	60.656.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	2	0	0	2	0	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	27.000.000	27.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.008.267.098	4.008.862.884											
6	2	1	0	4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatkan Kampung KB yang berstandar paripurna	11 SSK 7 Kampung KB	363.357.000	247.890.000											
	2	1	0	4	2	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	7 Sekolah	41.429.000	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Sekolah						
	2	1	0	4	2	0	0	0	1	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 Dokumen	41.429.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Sekolah	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	4	2	0	0	2			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdate	100 %	321.928.000	247.890.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	4	2	0	0	1	2	2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	246.238.000	172.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
																KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen	75.690.000	75.690.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	6,74 %	4.586.488.098	<b>2.370.772.884</b>						
	2	1	0	2		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	990.945.000	<b>541.710.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	
	2	1	0	2	0	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	85.952.000	80.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Unit	49.688.000	49.688.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	152.724.000	152.724.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	105.900.000	39.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.298.000	100.298.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	20.248.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	27 Organisasi	476.135.000	120.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Pasangan Usia Subur (PUS), Balai Penyuluhan KKBPK, Stake Holder dan mitra kerja KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Stakeholders dan Mitra Kerja									
	2	1	0	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100 %	167.749.000	67.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	2	1	0	2	0	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	90.882.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	76.867.000	67.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2.920.202.098	1.468.580.884			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fasilitas Kesehatan, Pasangan Usia Subur (PUS)	
	2	1	0	2	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Laporan	55.200.000	13.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fasilitas Kesehatan, Pasangan Usia Subur (PUS)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	661 Orang	510.058.300	284.898.884	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fasilitas Kesehatan, Pasangan Usia Subur (PUS)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2.343.003.798	1.158.982.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fasilitas Kesehatan, Pasangan Usia Subur (PUS)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	11.940.000	11.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Fasilitas Kesehatan, Pasangan Usia Subur (PUS)	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	507.592.000	<b>293.282.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB	
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kampung	507.592.000	293.282.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber- KB	86,16 %	2.058.422.000	<b>1.390.200.000</b>						
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	32 %	2.058.422.000	<b>1.390.200.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	0	2	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	517.777.000	56.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	230 Orang	204.657.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2	0	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	225 Orang	1.335.988.000	1.333.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.885.585.000	5.616.085.000						
	2	2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan	15 %	200.000.000	100.000.000						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	kapasitas daya saing kepemudaan									
	2	1	0	2	0	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	200.000.000	<b>100.000.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang	200.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	30 %	7.685.585.000	<b>5.516.085.000</b>						
	2	1	0	2	0	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	100 %	4.900.585.000	<b>3.706.085.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	4.900.585.000	3.706.085.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	1.460.000.000	<b>450.000.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan	3 Dokumen	1.460.000.000	450.000.000	- Kota Madiun, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN ,

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 2	0 2	Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					Berkualitas dan Berdaya Saing	Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial		PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA	
2	1 9	0 3	2 0 4			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	1.000.000.000	1.000.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun		
2	1 9	0 3	2 0 4 2	0 0 2		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1.000.000.000	1.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
2	1 9	0 3	2 0 5			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	325.000.000	360.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun		
2	1 9	0 3	2 0 5 1	0 0 1		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	325.000.000	360.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
2	2 2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.256.000.000	2.337.465.000						
4	2 2	2 2	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	1.856.000.000	2.007.700.000						
2	2 2	0 2	2 0 2			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	44 Orang	1.856.000.000	2.007.700.000		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun		
2	2 2	0 2	2 0 2 1	0 0 1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.586.000.000	1.737.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2	0	2	0	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	270.000.000	270.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
5	2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	100.000.000	50.000.000						
	2	2	0	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	3 Jenis	100.000.000	50.000.000			Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	44 Orang	100.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
6	2	2	0	2		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	300.000.000	279.765.000						
	2	2	0	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 Obyek	300.000.000	279.765.000			Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Obyek cagar budaya	
	2	2	0	2	0	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	300.000.000	279.765.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Obyek cagar budaya	DINAS KEBUDAYAAN , PARIWISATA, KEPEMUDAA N DAN OLAH RAGA
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.585.000.000	989.500.000						
2	2	2	0	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.95 %	1.355.000.000	909.500.000						

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	2	0	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.9 %	370.000.000	<b>365.000.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	74 Layanan	300.000.000	295.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	650 Eksemplar	70.000.000	70.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemyarakatan gemar membaca	20 kali	985.000.000	<b>544.500.000</b>			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	
	2	2	0	2	0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	218 Lokus	650.000.000	455.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	225.000.000	89.500.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	5 Perpustakaan	110.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				Semua Kel/Desa			(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial			
3	2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	37 %	230.000.000	80.000.000						
	2	2	0	2		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	230.000.000	80.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun		
	2	2	0	2	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	120.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2	0	2	0	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	110.000.000	30.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			23.704.566.970	19.697.571.445						
	8	0				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			23.704.566.970	19.697.571.445						
2	8	0	0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.014.049.297	150.000.000						
	8	0	0	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	7 jenis	1.014.049.297	150.000.000		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani		
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	125 Orang	290.049.297	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
	8	0	0	2	0	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	724.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada partai politik pemenang pemilu	100 %	18.800.062.030	<b>18.375.563.500</b>						
	8	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80 %	18.800.062.030	<b>18.375.563.500</b>			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi	
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	33 Orang	980.581.030	955.563.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125 Orang	34.353.000	10.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	17.785.128.000	17.410.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase partai politik pemenang pemilu yang lolos verifikasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkemas	68 %	585.337.000	20.000.000						
	8	0	0	2	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan orkemas	75 %	585.337.000	20.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Jumlah peningkatan Orkemas yang berbadan hukum	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	585.337.000	20.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Jumlah peningkatan Orkemas yang berbadan hukum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	1.121.581.250	82.007.945						
	8	0	0	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	4 kali	1.121.581.250	82.007.945			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	60.000.000	10.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	1.061.581.250	72.007.945	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Jumlah konflik keagamaan, kehidupan sosial dan budaya	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	2.183.537.393	1.070.000.000						
	8	0	0	2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	2.183.537.393	1.070.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani	
	8	0	0	2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	1.683.537.393	970.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000.000	100.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	Persentase konflik yang tertangani	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pagu Anggaran PRIORITAS 3 : Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial								252.881.726.985	162.381.297.907						

**PRIORITAS 4 : Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024	Pagu Alternatif I (Rp)	Pagu Alternatif II (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
									Nasional			Daerah

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			184.843.266.900	149.259.894.063						
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			146.872.266.000	120.408.019.536						
2	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rawan banjir/genangan	17,34 %	13.464.112.400	<b>10.933.230.000</b>						
	1	0	0	2		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rawan Banjir/Genangan	17.34 %	13.464.112.400	<b>10.933.230.000</b>			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	235.100.000	235.100.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.080.880.000	1.080.880.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 KM	9.022.332.400	6.491.450.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	2 Unit	3.125.800.000	3.125.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	123.019.490	123.019.490						
	1	0	0	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	123.019.490	123.019.490		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal		
	1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	123.019.490	123.019.490	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	80,12 %	19.399.879.400	15.874.779.400						
	1	0	0	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12 %	19.399.879.400	15.874.779.400		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal		
	1	0	0	2	0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	16.210.400.000	12.685.300.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen	934.750.000	934.750.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	2.254.729.400	2.254.729.400	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	1	0	0		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung sesuai Ketentuan	100 %	20.055.958.000	19.119.099.314							
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	20.055.958.000	19.119.099.314			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal		
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 Bangunan Gedung	200.000.000	200.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19.613.058.000	18.614.058.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	242.900.000	305.041.314	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	0	0		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	21.846.810.878	13.812.405.500							
	1	0	0	2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34 %	21.846.810.878	13.812.405.500			Memperkuat Infrastruktur Untuk	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Internal dan Eksternal		

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 1	Daerah Kabupaten/Kota							Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
	1	0 3	0 9	2 0 0 1	0 0 8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27 Kawasan	21.846.810.878	13.812.405.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	0 3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	96 %	69.379.016.832	<b>58.942.016.832</b>						
	1	0 3	1 0	2 0 0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	96 %	69.379.016.832	<b>58.942.016.832</b>		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal		
	1	0 3	1 0	2 0 2 1	0 0 9	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	270.566.832	270.566.832	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2 0 3 1	0 0 2	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	13.489.550.000	3.674.750.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2 0 3 1	0 0 4	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	17 KM	18.511.100.000	18.915.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2 0 3 1	0 0 8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	120 Jembatan	226.750.000	219.750.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
	1	0	1	2	0	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	31.784.750.000	30.770.050.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	1	2	0	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 KM	872.000.000	867.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	1	2	0	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	15 KM	408.600.000	408.600.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	1	2	0	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	3.815.700.000	3.815.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	0	1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	94,95 %	453.469.000	<b>453.469.000</b>						
	1	0	1	2		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	94,95 %	207.669.000	<b>207.669.000</b>			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
	1	0	1	2	0	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	80 Orang	207.669.000	207.669.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	1	2		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang	94.95 %	245.800.000	<b>245.800.000</b>			Memperkuat Infrastruktur Untuk	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Internal dan Eksternal	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0 4	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	memenuhi standar kompetensi						Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
	1	0 3	1 1	2 0 0 4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	245.800.000	245.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	0 3	1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100 %	2.150.000.000	1.150.000.000						
	1	0 3	1 2	2 0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1.350.000.000	350.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
	1	0 3	1 2	2 0 0 1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	350.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2 0 0 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2 0 1 1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	300 Orang	150.000.000	0,00	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2 0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	



1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	0	1	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	400.000.000	<b>400.000.000</b>			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	
	1	0	1	2	0	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	400.000.000	400.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Internal dan Eksternal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			34.150.529.900	26.061.269.527						
2	1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	2.422.750.000	<b>1.922.750.000</b>						
	1	0	0	2	0	Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dihasilkan	1 dokumen	118.950.000	<b>118.950.000</b>			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	
	1	0	0	2	0	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	118.950.000	118.950.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi	2.157.900.000	<b>1.657.900.000</b>			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit Rumah	2.157.900.000	1.657.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	145.900.000	<b>145.900.000</b>			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	
	1	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	145.900.000	145.900.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	1	0	0			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	100 %	6.441.590.000	<b>6.261.590.000</b>						
	1	0	0	2	0	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.50 %	220.000.000	<b>220.000.000</b>			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	
	1	0	0	2	0	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	220.000.000	220.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.50 %	6.221.590.000	<b>6.041.590.000</b>			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	190 Unit Rumah	2.686.200.000	2.686.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	0	2	0	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	16,41 Ha	3.535.390.000	3.355.390.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										, Semua Kel/Desa		Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
4	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	25.286.189.900	17.876.929.527						
	1	0	0	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	25.286.189.900	17.876.929.527			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	25.286.189.900	17.876.929.527	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.820.471.000	2.790.605.000						
2	1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	1.846.098.000	1.404.014.000						
	1	0	0	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	73.985.000	29.216.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di	300 Orang	73.985.000	29.216.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
							kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun										
	1	0	0	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.494.715.000	1.211.858.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Kawasan	54.441.000	29.217.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang	1.066.200.000	977.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2	0	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	58.854.000	26.551.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	54.045.000	9.542.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	200 Kawasan	161.175.000	119.148.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				, Semua Kel/Desa		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
	1	0	0	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	155.075.000	<b>92.600.000</b>		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	116.550.000	82.650.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	38.525.000	9.950.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2	0	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	122.323.000	<b>70.340.000</b>			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	122.323.000	70.340.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1.974.373.000	<b>1.386.591.000</b>						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	0	0	2	0	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.774.373.000	1.385.223.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Warga Negara wilayah Kota Madiun		
	1	0	0	2	0	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	1.434.995.000	1.084.995.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	339.378.000	300.228.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0	0	2	0	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	200.000.000	1.368.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Warga Negara wilayah Kota Madiun	
	1	0	0	2	0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	200.000.000	1.368.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Warga Negara wilayah Kota Madiun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.512.946.617	14.840.362.571						
	2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			205.792.250	805.792.250						
5	2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	32.413.750	32.413.750						

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	1	0	2	0	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100 %	32.413.750	32.413.750		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat		
	2	0	4	0	0	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.413.750	32.413.750	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	2	1	1	0	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penatagunaan tanah	100 %	173.378.500	773.378.500						
	2	1	1	2	0	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	173.378.500	773.378.500		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat		
	2	1	1	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	173.378.500	773.378.500	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	OPD dan Masyarakat	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.426.943.396	7.484.880.630						
2	2	1	0	1	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	79,50 %	337.000.000	290.115.000						
	2	1	0	2	0	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	10	148.000.000	126.310.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-		
	2	1	0	2	0	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH	1 Dokuman	148.000.000	126.310.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				, Semua Kel/Desa		Bencana Dan Perubahan Iklim			
	2	1	0	2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	1 Dokumen	189.000.000	<b>163.805.000</b>			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1	0	2	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	189.000.000	163.805.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50,10 %	1.721.003.971	<b>898.230.630</b>						
	2	1	0	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	79 kegiatan / usaha	1.168.183.375	<b>559.230.630</b>			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	399.863.375	299.230.630	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	768.320.000	260.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah melakukan	18 Usaha / Kegiatan	552.820.596	<b>339.000.000</b>			Membangun Lingkungan Hidup,	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	-	



1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0 2	Hidup Kabupaten/Kota	pengolahan limbah cair						Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
	2	1 1	0 3	2 0 0 2	0 0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	283.587.796	245.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 3	2 0 0 2	0 0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	269.232.800	94.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 %	50.000.000	25.776.000						
	2	1 1	0 4	2 0 1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	352 Spesies	50.000.000	25.776.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1 1	0 4	2 0 0 1	0 0 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	25.776.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78 %	59.000.000	50.000.000						
	2	1 1	0 5	2 0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	59.000.000	50.000.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Bencana Dan Perubahan Iklim				
	2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	59.000.000	50.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	88,20 %	350.150.000	285.150.000						
	2	1	0	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	18 perusahaan	350.150.000	285.150.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1	0	2	0	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	220.150.000	180.150.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	2	0	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	130.000.000	105.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	2	1	0		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	756.416.000	<b>695.209.000</b>						
	2	1	0	2	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	15 Kegiatan	756.416.000	<b>695.209.000</b>			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1	0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	756.416.000	695.209.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2	1	1		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup	100 %	309.000.000	<b>249.000.000</b>						
	2	1	1	2	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/Kota yang di selesaikan	5 kasus	309.000.000	<b>249.000.000</b>			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	
	2	1	1	2	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditang ani	5 Pengadu an	159.000.000	129.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	150.000.000	120.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71 %	7.844.373.425	4.991.400.000						
	2	1	1	2		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Dikelola	43.790 ton	7.639.373.425	4.886.600.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-		
	2	1	1	2	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41 Kelompo k	199.000.000	99.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	2.423.973.425	1.381.200.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	2	0	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	5 Ton	750.000.000	560.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	2	0	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32.280 Ton	4.266.400.000	2.846.400.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang di bina dan diawasi	50 Kelompo k	205.000.000	104.800.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	1	1	2	0	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 Unit	205.000.000	104.800.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8.880.210.971	6.549.689.691						
1	2	1	0	5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	100 %	8.880.210.971	6.549.689.691						
	2	1	0	5	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan	100 %	3.785.000.000	2.400.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	5	2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	350.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	5	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	1.500.000.000	1.000.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	5	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1.935.000.000	1.250.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	5	2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	200.000.000	150.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
	2	1	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	2 Unit	200.000.000	150.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Terselenggaranya Pelayanan Parkir	100 %	1.200.000.000	1.026.700.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2023) Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.200.000.000	1.026.700.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2023) Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus ijin	100 %	540.000.000	610.150.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	200.000.000	106.510.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	340.000.000	503.640.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah MRLL	160 MRLL	568.210.971	374.839.691			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Masyarakat Kota Madiun	

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan			
	2	1	0	2	0	Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	6 Laporan	568.210.971	374.839.691	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	100 %	987.000.000	890.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	987.000.000	890.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	2	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja angkutan	70 %	1.600.000.000	1.098.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	1.600.000.000	1.098.000.000	- Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	DINAS PERHUBUNGAN
Pagu Anggaran PRIORITAS 4 : Penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan									205.356.213.517	164.100.256.634						

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **6.1 Indikator Kinerja Utama**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Penetapan target indikator kinerja daerah dapat mengindikasikan aspek keberhasilan pembangunan daerah yang ingin di capai. Indikator kinerja tersebut meliputi aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. IKU pemerintah Kota Madiun memuat indikator kinerja tujuan dan atau sasaran. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebutlah secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Madiun. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan atau sasaran pembangunan. Penetapan IKU Kota Madiun dalam RKPD 2024 mengacu pada penetapan IKU RPJMD tahun kelima dengan memperhatikan kondisi capaian tahun, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 6.1**  
**Prioritas Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Kota Madiun**

No	Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Realisasi	Target (RPJMD)	
			2022	2023	2024
1	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 69,26	(B) 69	(BB) 70,01
2	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87*	6,42	6,44
		Indeks Gini	0,398	0,36	0,35
3	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,01	82,15	82,35
		Indeks Pembangunan Gender	94,57	94,49	94,51
		Indeks Ketentraman	81,25	77,15	77,20
4	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Livable City	90,33	88,60	89,01

\* Data sementara

Sumber: Bappeda, 2022 dan BPS Kota Madiun, 2023

Sebagaimana yang termuat pada Tabel 6.1 diatas, RKPD Kota Madiun tahun 2024 memuat empat prioritas pembangunan dengan tujuh indikator kinerja utama. Prioritas pertama yaitu Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis *Smart City*. Terdapat satu indikator kinerja dalam mengukur keberhasilan prioritas ini yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Capaian IRB pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2023 dan 2024 target IRB masing – masing B (69) dan B(70,01).

Prioritas pembangunan daerah kedua yaitu Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari dua IKU yaitu Indeks pembangunan ekonomi inklusif, dan Indeks Gini. Capaian Indeks pembangunan ekonomi inklusif tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,87%, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 6,42 persen dan 6,44 persen. Tingkat ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh Indeks Gini, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,398 tahun 2022. Target ketimpangan pendapatan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 0,36 dan 0,35.

Prioritas pembangunan daerah ketiga menekankan pada Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial. Indikator kinerja utama

pada prioritas pembangunan tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan indeks ketentraman. Capaian kedua IKU terkait pembangunan manusia dan gender tahun 2022 adalah sebesar 82,01 dan 94,57. Target indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 82,15 dan 82,35 untuk IPM dan 94,49 dan 94,51 untuk IPG

Prioritas pembangunan keempat adalah Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Prioritas tersebut memiliki satu indikator kinerja utama yaitu *Livable City*. Realisasi IKU tersebut pada tahun 2022 sebesar 90,33 dan pada tahun 2023 dan 2024 ditargetkan masing-masing sebesar 88,60 dan 89,01.

## **6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan di lihat dari sisi urusan baik wajib maupun pilihan. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan lain sebagainya. Aspek pelayanan umum meliputi empat fokus yaitu urusan wajib layanan dasar, urusan wajib bukan layanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Aspek daya saing daerah meliputi empat fokus yaitu kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, fasilitas wilayah/infrastruktur, dan sumber daya manusia.

Terdapat beberapa perubahan target dari indikator makro di tahun 2024 terhadap target dari RPJMD. Perubahan tersebut didasarkan kinerja capaian indikator tersebut pada tahun 2022 dan target di tahun 2023. Adapun indikator tersebut Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Gini, PDRB per kapita dan Angka Kemiskinan. Target indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di dalam RPJMD sebesar 6,44 berubah meningkat menjadi 6,89. Target indikator Indeks Gini dalam RPJMD sebesar 0,35 berubah meningkat menjadi 0,335. Target Indikator PDRB per kapita di dalam RPJMD sebesar 70,15 berubah meningkat menjadi 80,43. Angka Kemiskinan di dalam RPJMD ditargetkan sebesar 4,55 berubah menjadi 4,45. Rincian mengenai indikator dan target capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Target RPJMD Capaian Setiap Tahun	Target RKPD	Target RPJMD	Target RKPD	Keterangan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,79	5,52	3,08-5,75	5,41	3,11-5,95	5,75	Indikator makro
2	2	PDRB Per Kapita	juta	74,65	74,65*	65,34	80,43	70,15	80,43	Indikator makro
3	3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87	6,87*	6,42	6,89	6,44	6,89	Indikator Tujuan Kota
4	4	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,398	0,36	0,332	0,35	0,35	Indikator Tujuan Kota
5	5	Angka Kemiskinan	%	5,09	4,76	4,65	4,77	4,55	4,45	Indikator sasaran kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,25	82,01	82,15	82,15	82,35	82,35	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>									
1	1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	91,07%	94,33%	93%	93%	94%	94%	Indikator Tujuan PD
2	2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	94,33%	94%	99,66%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
3	3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	-	91%	91%	91%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
4	4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	21,31%	20%	20%	21%	21%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	58%	58%	58%	66%	66%	Indikator Program PD
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	94,33%	91%	99,66%	91%	91%	Indikator Program PD
9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 layanan	3	3	3	3	3	Lppd
16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1512 orang	1564	830	1512	840	840	Lppd
17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 tim	4 (PPT PPPA, SLRT, PKSAI dan LK3)	2 (PPT, SLRT)	2	1 (PPT, SLRT)	1 (PPT, SLRT)	Lppd
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1512 orang	1564	830	1512	840	840	Lppd
19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4 unit	5	4	4	4	4	Lppd
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1512 orang	1564	165	830	170	170	Lppd
21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2 unit	2	2	2	2	2	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	245 orang	278	55	245	60	60	Lppd
	23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	1 orang	10	12	12	20	20	Lppd
	24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18 peralatan	18	9	18	11	11	Lppd
	25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1 paket	1	1	1	1	1	Lppd
	26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	51 orang	278	170	170	175	175	Lppd
	27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1 orang	1	1	1	1	1	Lppd
	28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	177 orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang	120 orang	367	65	122	70	70	Lppd
	30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	2 kegiatan	3	2	2	2	2	Lppd
	31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	6 orang	3	5	5	5	5	Lppd
	32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	107 orang	278	109	109	111	111	Lppd
	33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	245 orang	278	224	224	226	226	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	245 orang	278	17	224	20	20	Lppd
	35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	10 orang	20	64	64	66	66	Lppd
	36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	5734 orang	17	3.300	3300	3.300	3.300	Lppd
	37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	0	17	1.000	3.300	1.000	1.000	Lppd
	38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	-	0	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		5734 paket	17	0	3300	0	0	Lppd
	40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		4 orang	17	300	300	300	300	Lppd
	41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		177 orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
	42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		107,53%	100	97	97	100	100	Spm
	43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		137,42%	737	465	465	470	470	Spm
	44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		204,44%	213	139	139	140	140	Spm
	45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100%	72	94	94	96	96	Spm
	46	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		173,76%	17	36	36	36	36	Spm
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,38	94,57	94,49	94,49	94,51	94,51	Indikator tujuan kota

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,18		77,20	77,2	77,22	77,22	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	7,83%	13%	13%	13%	13,5%	13,5%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase keluarga yang berkualitas	%	3%	8%	12%	12%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	-	0,0002	0,002 nilai	0,002	0,002 nilai	0,002 nilai	Indikator Sasaran PD
	10	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	14,25%	11,15%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	5%	15,7%	20%	20%	30%	30%	Indikator Program PD
	12	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
	13	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		-	0,0002	0,003	0,003	0,002	0,002	Indikator Program PD
	15	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	-	12,50%	22,43%	22,43%	42,20%	42,20%	Indikator Program PD
	16	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	-	0,0002	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
	17	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,25%	11%	20%	20%	30%	30%	Lppd
	18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,00%	0,0216%	0,00%	0.03	0,00%	0,00%	Lppd
	19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		8,74%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			36 lembaga	36	65	65	70	70	Lppd
	21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			34 program	34	123	123	129	129	Lppd
	22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			2 media massa	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
	23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			15 lembaga	15	15	15	15	15	Lppd
	24	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			15 lembaga		15	15	15	15	Lppd
	26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			14 lembaga	15 lembaga	15	15	15	15	Lppd
	27	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			1 organisasi	14 lembaga	25	25	30	30	Lppd
	28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			45 orang	45	45	45	45	45	Lppd
	29	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			1 lembaga	1	15	15	20	20	Lppd
	30	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			20 lembaga	20	20	20	20	20	Lppd
	31	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			3 kebijakan	3	2	2	2	2	Lppd
	32	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi			1 lembaga	1	1	1	1	1	Lppd
	33	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga									



1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>								
		2	Jumlah prestasi pemuda	Prestasi	171 prestasi	205	17 prestasi	171	18 prestasi	18 prestasi	Indikator Tujuan PD
		4	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Pemuda/ group	-	80	31 pemuda/ group	31 pemuda/ group	32 pemuda/ group	32 pemuda/ group	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Kualitas Sarpras	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	-	111%	25%	25%	30%	30%	Indikator Program PD
		8	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	-	63%	15%	15%	20%	20%	Indikator Program PD
		9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	43,10%	44,47%	40,81%	43,10%	40,81%	40,81%	Lppd
		10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,19%	47,43%	45,49%	47,19%	45,49%	45,49%	Lppd
		11	Peningkatan prestasi olahraga	medali	97	108	35	70	36	36	Lppd
		12	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	135 orang	156	100	135	100	100	Lppd
		13	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	135 orang	156	0	135	100	100	Lppd
		14	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	100 orang	156	100	100	100	100	Lppd
		15	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5 orang	5	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
		16	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158 orang	158	158	158	158	158	Lppd
		17	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	2 event	6	3	3	4	4	Lppd
		18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	orang	6 orang	80	7	7	7	7	Indikator Lama
	<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>								
		2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlestarikan	-	32 objek	65	65	65	67	67	Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang/ group	27 group/ 510 orang	231 orang / group	44 orang/group	44 orang/group	46 orang/group	46 orang/group	Indikator Sasaran PD
5	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		5 objek	6	6	6	7	7	Indikator Sasaran PD
6	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	6,80%	200%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
9	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	20	20	Lppd
11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	366	Lppd
12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	366	Lppd
13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32 obyek	366	366	366	366	366	Lppd
14	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	65 orang	231	100	100	100	100	Lppd
15	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148 cagar budaya	148	148	148	148	148	Lppd
16	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	20	20	Lppd
17	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data		0 cagar budaya	0	0	0	0	0	Lppd
18	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2 cagar budaya	2	2	2	2	2	Lppd
19	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial,	obyek	20 cagar budaya	20	20	20	20	20	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)								
		20	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	0	0	Lppd
		21	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	0	0	Lppd
		22	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	Lppd
		23	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	0	5	6	6	6	6	Lppd
		24	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota		11 tim	11	0	11	11	11	Lppd
		25	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0	0	0	0	0	Lppd
		26	Pemetaan sdm cagar budayawan permuseuman		0	0	0	0	0	0	Lppd
		27	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	Lppd
		28	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	0	0	Lppd
		29	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	0	0	Lppd
<b>II</b>			<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
a			Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib								
	<b>1</b>		<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>								
	<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>								
		1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,67	11,16	11,39	11,16	11,67	Indikator sasaran kota
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,43	14,42	14,42	14,43	14,43	Indikator sasaran kota
		3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	65%	68%	66%	66%	67%	67%	Indikator Tujuan PD
		4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	APM Paud, SD, dan SMP	%	130%	105,48%	100%	98,00% (akan dikonfirmasi lebih lanjut)	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	%	65%	68%	66%	66%	67%	67%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	65%	68%	25%	65	25%	25%	Indikator Program PD
	12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		2.483	3.030	4.000	4.000	3.750	3.750	Lppd
	13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		13.908	17.041	16.500	16.500	16.000	16.000	Lppd
	14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		5.977	9.282	7.500	7.500	7.250	7.250	Lppd
	15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		176	273	180	180	170	170	Lppd
	16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	100	92	16	99	16	16	Lppd
	17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	130	130	50	130	50	50	Lppd
	18	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	130	130	90	130	90	90	Lppd
	19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:15	01:10	01.13	1,15	01.13	01.13	Lppd
	20	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	543	511	465	550	460	460	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	482	482	460	482	455	455	Lppd
	22	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	30	30	10	30	12	12	Lppd
	23	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	70	70	70	70	70	70	Lppd
	24	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.767	2646	2.658	2980	2.658	2.658	Lppd
	25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.886	2.787	3.284	3.284	3.284	3.284	Lppd
	26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	13.336	13.531	11.000	13.336	11.000	11.000	Lppd
	27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	9.648	8.896	10.000	10.000	10.000	10.000	Lppd
	28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01:19	01.22	01.22	01.20	01.20	Lppd
	29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01:16	01.27	01.27	01.27	01.27	Lppd
	30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1208	1225	715	1208	674	674	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	813	733	538	813	513	513	Lppd
	32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	0,0840277 78	01:74	01.04	01:04	01.04	01.04	Lppd
	33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:39	01:57	01.05	01:39	01.05	01.05	Lppd
	34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	332	298	165	332	161	161	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	119	183	72	119	68	68	Lppd
	36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1233	1152	658	1233	668	668	Lppd
	37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	723	701	681	723	696	696	Lppd
	38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	67	73	73	73	73	73	Lppd
	39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	22	23	23	23	23	23	Lppd
	40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	148	148	170	170	165	165	Lppd
	41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	128	123	75	128	70	70	Lppd
	42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	3	1	3	1	1	Lppd
	43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	Lppd
	44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	0	0	0	Lppd
	45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:04	01:12	01.29	01.29	01.30	01.30	Lppd
	46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	43	44	35	43	30	30	Lppd
	47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	43	39	35	43	30	30	Lppd
	48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat	Orang	67	73	73	73	73	73	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah								
49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	7	6	7	6	6	Lppd
50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	94,04%	30.270	26.311	26.311	26.301	26.301	spm
51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	12,74%	273	225	26.311	230	230	spm
52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	96,17%	3.030	4.000	26.311	3.750	3.750	spm
53	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	%	-	1,96	1	1	1	1	spm
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>								
1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,83	73,13	72,83	72,83	72,83	73,13	Indikator sasaran kota
2	Persentase Keluarga Sehat	%	52%	55%	54%	54%	56%	57%	Indikator tujuan PD
5	Persentase rumah tangga sehat	%	69,43%	64,88%	71,00%	71,00%	72,00%	65,50%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase rumah sehat	%	94,41%	88,33%	89,00%	89,00%	90,00%	90,00%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	59,67%	80,67%	62,50%	62,50%	63,00%	80,67%	Indikator Sasaran PD
8	Indeks Keluarga Sehat	%	0,51 indek	0,55	0,54	0,54	0,56	0,57	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	85,00%	90,00%	91,00%	91,00%	92,00%	92,00%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	84,32%	85,76%	84,80%	84,80%	85,00%	85,78%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	85,00%	75,00%	76,00%	87,00%	78,00%	78,00%	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	93,63%	98,73%	99,00%	99,00%	100,00%	99,00%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se-Kota Madiun	%	84,92%	86,02%	86,40%	86,40%	86,60%	86,6	Indikator Sasaran PD
	14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	86,63%	97,71%	87,53%	87,53%	88,11%	97,72%	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	58,33%	91,67%	75,00%	75,00%	75,00%	73,32%	Indikator Program PD
	16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	85%	95%	91%	91%	92%	92%	Indikator Program PD
	17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	87,88%	91%	88%	88%	89%	91,00%	Indikator Program PD
	18	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	59,67%	80,67%	62,50%	62,50%	63,00%	80,67%	Indikator Program PD
	19	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	skor	0,48%	4,92	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	Lppd
	20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.450 Orang	
	22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.338 Orang	
	23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.227 Orang	
	24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							9.081 orang	



1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		%	89,26%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								31.855 Orang	
	26	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								114.664 Orang	
	27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		%	99,33%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								30.573 Orang	
	28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		%	54,99%	56%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								68.973 Orang	
	29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								8.143 Orang	
	30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								339 Orang	
	31	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		%	52,68%	100%	100%	100%	100%		Lppd
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								5.044 Orang	
	32	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		%	100%	100%	100%	100%	100%		Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							5.780 Orang	
33	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	tempat	8	8	8	8	8	8	Lppd
34	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	tempat	8	8	8	8	8	8	Lppd
35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	347	479	330	347	330	330	Lppd
37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	3 Jenis	Lppd
38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	305	454	291	305	291	291	Lppd
39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	305	422	289	305	289	289	Lppd
41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9 jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1068	1253	571	1068	571	571	Lppd
43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	2 jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 jenis	5 Jenis	Lppd
44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	380	1043	371	380	371	371	Lppd
45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	4 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	590	652	578	590	578	578	Lppd
47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1050	1178	1286	1286	1286	1286	Lppd
49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	3 Jenis	Lppd
50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	164	193	156	164	156	156	Lppd
51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	178	207	169	178	169	169	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	22	30	30	30	30	Lppd
55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300	300	748	748	748	748	Lppd
57	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 jenis	4 Jenis	Lppd
58	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	377	367	376	377	376	376	Lppd
59	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.450 Orang	
60	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,29%	100,13%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.338 Orang	
61	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	101,19%	100,53%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							2.227 Orang	
62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100,62%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							9.081 orang	
63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							31.855 Orang	
64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	110,81%	100%	100%	100%		Spm
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							114.664 Orang	
65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	99,33%	102,03%	100%	100%	100%		Spm

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							30.573 Orang	
	66		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	54,99%	56,23%	100%	100%	100%		Spm
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							68.973 Orang	
	67		Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	121,45%	100%	100%	100%		Spm
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							8.143 Orang	
	68		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	115,09%	106,19%	100%	100%	100%		Spm
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							339 Orang	
	69		Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	126,41%	100%	100%	100%		Spm
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberculosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							5.044 Orang	
	70		Persentase orang dengan resiko terinfeksi ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	102,10%	118,49%	100%	100%	100%		Spm
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							5.780 Orang	
	<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>								
	1		Indeks Ketentraman	Indeks	78,74	81,25	77,15	77,15	77,2	77,2	Lanjutan Indikator Tujuan Kota

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Indeks Rasa Aman	Indeks	81	82,18	76,27	76,27	76,35	82,18	Lanjutan Indikator sasaran kota
	4	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	72,45	82	76,2	76,2	76,3	76,3	Indikator Tujuan PD
	5	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,57%	97%	97%	97%	98%	98%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	97%	97%	97%	97%	97%	Indikator Program PD
	8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	97%	97%	97%	97%	97	Lppd
	10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
	13	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		2.876	2.051	2.000	2.000	2.000	2.000	Lppd
	14	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.348 orang	1.348	1.300 orang	1300	1.300 orang	1.300 orang	Lppd
	15	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		93 perda dan perwal	76	76	76	76	76	Lppd
	16	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
	17	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
	18	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
	19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5 layanan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	Ada	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
	21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Ada	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd
	22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		1 pos	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
	23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		11 sarpras	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd
	24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	22 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	21 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	2 kegiatan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	27	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	28	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,84 indeks	108.85 indeks	113 indeks	113 indeks	112 indeks	112 indeks	Indikator Tujuan PD
	32	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	33	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	34	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	35	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	4 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
		Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana	%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	39	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	40	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Indikator Program PD
	41	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	2.575 orang	153.367	845 orang	3.420 orang	845 orang	153,367 orang	Lppd
	42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.101 orang	2.395	50 orang	1151 orang	50 orang	2,395 orang	Lppd
	43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	12 orang	156 orang	400 orang	400 orang	400 orang	156 orang	Lppd
	44	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	45	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	46	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	47	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0%	0%	0%	100%	100%	Lppd
	48	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	44,50%	67,34%	5%	50%	5%	67,34%	Lppd
	49	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	42,76%	58,67%	5%	47%	5%	58,67%	Lppd
	50	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	51	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	0	0	Lppd
	52	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	53	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	Lppd
	54	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	55	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	56	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	57	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
	58	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Spm
<b>2</b>	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>									
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>									
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	8,15	6,39	5,12	6,15	5	5	Lanjutan Indikator sasaran kota
	2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	79,15%	92%	30%	60% (2021: 79%)	30%	30%	Indikator Tujuan PD
	3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	40%	48,90%	50%	50%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
	8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	10%	70,91%	20%	20%	25%	25%	Indikator Sasaran PD
	9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	10%	18,85%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	20%	78,10%	30%	30%	35%	35%	Indikator Program PD
	15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	10%	97,6%	15%	15%	15%	15%	Indikator Program PD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	16	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	16%	30%	16%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
	17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,62%	69,23%	76,92%	84,62%	76,92%	76,92%	Lppd
	18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,17%	69,03%	68%	69,17%	68%	68%	Lppd
	19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10.748.101.000	10,748,101,00	12.750.000.000	12.750.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	Lppd
	20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100%	100%	72,50%	90%	75,00%	75,00%	Lppd
	21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,61%	91,76%	52%	71,61%	53%	53%	Lppd
	22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	Ada	1	1	1	1	Lppd
	23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		0	0	0	0	0	0	Lppd
	24	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.		0	0	12	12	15	15	Lppd
	25	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	44%	70%	30%	44%	30%	30%	Lppd
	26	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100%	59%	30%	64%	30%	30%	Lppd
	27	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	100%	10%	50%	90%	50%	50%	Lppd
	28	Persentase LPK yang terakreditasi	%	36%	34%	40%	40%	40%	40%	Lppd
	29	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	92,86%	41%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	30	Jumlah penganggur yang dilatih	%	90 orang	137 orang	230	230	230	230	Lppd
	31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	32	Persentase penyerapan lulusan	%	100%	83%	20%	90%	20%	20%	Lppd
	33	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	44,44%	73%	20%	44,50%	20%	20%	Lppd
	34	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd
	35	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	0%	1,50%	1,50%	2%	2%	Lppd
	37	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	tidak ada	64%	64%	65,00%	65,00%	Lppd
	38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	20,25%	25%	27%	27%	30%	30%	Lppd
	39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	61,90%	62%	30%	62%	30%	30%	Lppd
	40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		21 SP/SB	21 SP/SB	23	23	23	23	Lppd
	41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	8,96%	11%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100%	100%	73%	100%	75%	75%	Lppd
	43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,52%	2%	4%	4%	3%	3%	Lppd
	44	Jumlah mogok kerja		0	0	4	4	4	4	Lppd
	45	Jumlah penutupan perusahaan		3 perusahaan	0	9	9	9	9	Lppd
	46	Jumlah perselisihan kepentingan		0	0	14	14	13	13	Lppd
	47	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0	1	1	1	1	Lppd
	48	Jumlah perselisihan PHK		8	13	14	8	13	13	Lppd
	49	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		14 orang	34 orang	50	14	40	40	Lppd
	50	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	13	50	50	50	50	Lppd
	51	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		tidak ada	tidak ada	1	1	1	1	Lppd
	52	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100%	100%	70%	90%	70%	70%	Lppd
	53	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		173	188	120	173	125	125	Lppd
	54	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	546 orang	935	350	540	375	375	Lppd
	55	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		19 BKK	21	19	19	19	19	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	56	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0	0	0	0	0	Lppd	
	57	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	2	1	1	1	Lppd	
	58	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		0	0	0	0	0	Lppd	
	59	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.		46 perjanjian	148	50	50	50	Lppd	
	60	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0	0	0	0	0	Lppd	
	61	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	78,26%	0%	10%	78,28%	10%	Lppd	
	62	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		46 orang	120 orang	50	50	50	Lppd	
	63	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		0	0	0	0	0	Lppd	
	64	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		0	0	0	0	0	Lppd	
	65	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		0	0	0	0	0	Lppd	
	66	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		0	0	0	0	0	Lppd	
<b>II</b>		<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
	1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	A-87,44	91,410	A-86	88.00	A-87	91,5	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,47%	98,96	92,72%	96.00	92,98%	92,98	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100%	100%	70,50%	100%	80,00%	100	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	96,48%	97,92	84,50%	97.00	85%	100	Indikator Program PD
	5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,45%	100,00%	94,50%	94,50%	94,75%	100	Indikator Program PD
	6	Akurasi database kependudukan	%	99,44%	99,44	99,15%	99.46	99,20%	99,20	Indikator Program PD
	7	Perekaman KTP elektronik	%	93,19%	93,10%	98,75%	98,75%	99,00%	99,00%	Lppd
	8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	84,68%	88,33%	92,00%	92,00%	94,00%	94,00%	Lppd
	9	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,50%	99,14%	99,10%	99,10%	99,20%	99,20%	Lppd
	10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		37,50%	47,06%	63,63%	63,63%	90,90%	90,90%	Lppd
	11	Penerbitan akta perkawinan	%	100%	100%	99,20%	100%	99,30%	99,30%	Lppd
	12	Penerbitan akta perceraian	%	100%	100%	99,20%	100%	99,30%	99,30%	Lppd
	13	Penerbitan akta kematian	%	100%	100%	99,00%	100%	99,25%	99,25%	Lppd
	14	Penyajian data kependudukan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>								
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,84	85,32	80,94	80,94	81,04	81,04	Indikator Tujuan PD
	2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95,8 indeks	97,1	95,7	95.8 (2021: 95,5)	95,8	95,8	Indikator Sasaran PD
	3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	102,90%	97	100	100	100	100	Indikator Program PD
	4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	94%	98,3	80	80	80	80	Indikator Program PD
	5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	-		25%	25%	22%	22%	Indikator Program PD
	6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	181,01%	80	100	100	100	100	Lppd
	7	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	Ada		tidak	Ada/ 1	tidak	tidak	Lppd
	8	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	Ada	0	1	1	1	1	Lppd
	12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>								
	1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	69,80%	73,32%	63,00%	63,00%	64,00%	73,32%	Indikator Sasaran PD
	3	Menurunnya Unmet Need	%	< 8 %	6,74%	7,50%	7,50%	7,00%	6,74%	Indikator Program PD
	4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	70%	86,16%	82,00%	82,00%	83,00%	86,16%	Indikator Program PD
	5	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	4 SSK	11 SSK	8 SSK	8 SSK	9 SSK	11 SSK	Indikator Program PD
	6	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	3 KAMPUNG KB	7 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	5 KAMPUNG KB	6 KAMPUNG KB	7 Kampung KB	Indikator Program PD
	7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,84%	73,32%	72,79%	72,79%	72,80%	73,32%	Lppd
	8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,90%	6,74%	<7.8%	7,50%	<7.7%	6,74%	Lppd
	9	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		tidak	-	-	-	-	-	Lppd
	10	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		27 tahun	26-30 th	Wanita >21 tahun	24,8	Wanita >21 tahun	Wanita >21 tahun	Lppd
	11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	0,75	3,79	0,52	1,15	0,51	0,51	Lppd
	12	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	13	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	24	27	16	24	16	16	Lppd
	14	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	97,73%	45	97,78%	97,78%	97,78%	97,78%	Lppd
	15	Persentase Peserta KBaktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,13%	<b>32,73%</b>	52,00%	52,00%	53,00%	53%	Lppd
	16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		56 KKBPK	63	56	56	56	56	Lppd
	17	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	48,46%	77,90%	45,02%	48,48%	45,03%	45,03%	Lppd
	18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	69,84%	<b>11,11%</b>	64,96%	18,51%	64,96%	64,96%	Lppd
	19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>								
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06	2,86	2,87 (BAIK)	2,87	2,90 (BAIK)	2,90	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,95	3,37	2,95	2,95	3,1	3,1	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,3	2,18	1,97	2,23	2,01	2,01	Indikator Tujuan PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	97,33	99,25	92	92	93	93	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	83%	89%	80%	83%	82%	82%	Indikator Program PD
		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	100%	74%	100%	75%	75%	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	81,71%	81,71%	81,92%	81,92%	81,95%	80,00%	Lppd
	12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	18,75%	78%	20%	20%	25%	25%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	100%	85%	84%	100%	86%	86%	Lppd
	24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>								
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	20	1	1	1	1	Indikator Program PD
	3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	4	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	1 survey	7	1	1	1	1	Lppd
	6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	1 kompilasi	7	1	1	1	1	Lppd
	7	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	1 survey	20	1	1	1	1	Lppd
	8	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	9	Persentase kelengkapan metadada variabel dari kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VII</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>								
	1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	83,57%	96,74	68%	83.57%	70%	70%	Lppd
	4	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		0%	0	0	0	0	0	Lppd
	5	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	6	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100%	100%	80%	100%	85%	85%	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100%	100%	89,00%	100%	89,50%	89,50%	Lppd
<b>VIII</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>								
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,6	2,7	2,44	2,6	2,46	2,46	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	10,61	18,44	90	90	9,1	9,1	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	6%	16,97%	5,95%	6%	5,95%	5,95%	Indikator Program PD
	4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	37%	51,19%	37%	37%	38%	38%	Indikator Program PD
	5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		379,01%	$(678962/151491) = 4,48\%$	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
	6	Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,70%	$(7139/151491) = 4,71\%$	4,60%	4,70%	4,90%	4,90%	Lppd
	7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0,37%	$(567/151491) = 0,37\%$	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	4 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
	8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	51,93%	-	58%	58%	59%	59%	Lppd
	9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	56 naskah kuno	86	10 eksemplar	0	10 eksemplar	10 eksemplar	Lppd
	10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		56 naskah kuno	NIHIL	NIHIL	0	NIHIL	NIHIL	Lppd
	11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	168	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
	1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan		Indeks	59	79,06	58	59	59	59	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip		%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Skor	100 skor	91,5 skor	88%	100 skor	90%	90%	Indikator Program PD
	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		Skor	83,33%	8,8 skor	8,6	8,6	8,8	8,8	Indikator Program PD
	5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	100%	100%	9%	100%	9%	9%	Lppd
	6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		%	100%	100%	9%	100%	9%	9%	Lppd
	7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		%	100%	100%	6%	100%	6%	6%	Lppd
	8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			belum dilaksanakan pemusnahan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		kali	belum dilaksanakan pemusnahan	1	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Daftar arsip	22 arsip	28	31 daftar arsip yang diselamatkan	31 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
	11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi			1 arsip	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	1 arsip	19	27 arsip hasil alih media	27 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	Lppd
	13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	1 arsip	3	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		1 arsip	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
<b>3</b>		<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>								
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>								
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	2	persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	%	-	20%	20%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	Lppd
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	Lppd
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	Lppd
<b>4</b>		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>								
<b>I</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	65,55%	B (69.26)	(B) 69	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 70,01	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
	2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	70,97	BB (77.15)	BB (79)	BB (71,25)	A (80,01)	A (80,01)	Lanjutan indikator sasaran kota
	3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi/ Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	3,41 (Tinggi)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,456 (baik)	86,964	85 (baik)	86,55	86 (baik)	86,964	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	B	34.73 Istimewa	B	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
	7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	A	A	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
	8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	72%	78,57%	74%	74%	76%	76%	Indikator Tujuan PD
	9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LPPD
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,71%	13,63%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	LPPD
	17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	32,66%	29,93%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	LPPD
<b>II</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>								
	2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90,297	90.299	85	85	86	86	Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Tertib Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	90,297	90.299	81	85	82	85	Indikator Program PD
<b>5</b>		<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>								
<b>III</b>		<b>Perencanaan</b>								
	2	Indeks Perencanaan	Indeks	34	34	35	35	36	36	Indikator Tujuan PD
	5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	35	34	34	36	35	35	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	35	33	34	36	35	35	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	100%	94%	93%	96%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	23,65	24	25	25	25,5	25,5	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
	10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%	92%	100%	93%	93%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>IV</b>		<b>Keuangan</b>								
	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	58,30%	99%	96%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	86,90%	92%	80%	89%	80%	90%	Indikator Sasaran PD
	10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Pengelolaan Aset yang ber kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,66%	17,80%	21,20%	22,40%	21,30%	15,00%	Lppd
	13	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	1,81%	1,67%	2,50%	2,50%	2,50%	1,50%	Lppd
	14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	78,03	75,11%	62,20%	77,29%	63%	83,83%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,79%	-11,08%	80%	80%	80%	-23,70%	Lppd
	16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,06%	-73,96%	102%	102%	103%	-73,96%	Lppd
	17	Manajemen Aset	Ya/ tidak	ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
	18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,23%	15%	19%	19%	18%	10%	Lppd
	20	Capaian Target Pajak Daerah	%	107%	106.000.000.000	100%	100% (Rp. 102.506.770.000)	100%	100% (Rp. 110.000.000.000)	Indikator Tujuan PD
	21	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	7%	7%	5%	7%	5%	5%	Indikator Tujuan PD
	23	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	24	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	25	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	7%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	26	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	7%	10%	10%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
	27	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	16%	41%	42%	42%	43%	43%	Indikator Program PD
<b>IV</b>		<b>Kepegawaian</b>								
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	238	266	220	250	250	250	Indikator Tujuan PD
	4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	71%	63,22%	60%	63,18%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	100%	100%	90%	99,73%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,09%	0,12%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	13	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	14	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,51 skor	87,6	87,7	87,7	87,7	87,7	Indikator Program PD
	15	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	63%	222%	268%	268%	339%	223%	Lppd
	16	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9,72%	22,28%	17%	17%	18%	18%	Lppd
	17	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,54%	100%	84%	84%	87%	87%	Lppd
<b>V</b>		<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>								
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017	%	39,76%	36,26%	35%	35%	37%	37%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	23,07%	16,1%	13%	20%	14%	14%	Indikator Program PD
<b>VI</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>								
	1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2693 (52,99)	(53,96)	1925	58,4	1950	53,96	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks	35	36,6	35	35	36	36	Indikator Sasaran PD
	3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
	4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%	5%	95%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>6</b>		<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>								
<b>VII</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>								
	2	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	-	85,35	83,5	83,5	84	84	Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	-	89,4	90 indeks	90 indeks	91 indeks	91 indeks	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	Nilai	-	4,36	4.2	4.2	4.25	4.25	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	17	Persentase rekomendasi hasil rewiu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	100%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	83,10	75 nilai	75 nilai	81 nilai	81 nilai	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	84,22	79,01	79,01	80,01	80,01	Indikator Sasaran PD
	20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-		2.50	2.50	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
	21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	-	3	2.50	3,6	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
	22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
	23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	94,36%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	24	Persentase rekomendasi hasil reuiu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	100%	65%	65%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
	25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	3,51	3.75	3.75	4.00	4.00	Indikator Sasaran PD
	26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	74%	70%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	-	100%	70%	70%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
	28	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	-	100%	40%	40%	45%	45%	Indikator Program PD
	29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	3	3	3	3	3	3	Lppd
	31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	2+	3	3	3	3	3	Lppd
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>									
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan</b>									
	2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	44%	100%	55%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	33%	89%	55%	55%	66%	66%	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	11%	100%	44%	44%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
	5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	3,08	3,76	3,08	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
	6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	2,9	3,45	2,96	2,96	2,99	2,99	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	3,25	3,27	3,5	3,5	3,7	3,52	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	90,490 skor	90,54	90,03	90.50	90,03	90,03	Indikator Program
	16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,7 skor	87,82	87,8	87.8	87,85	87,85	Indikator Program
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88,117 skor	88,28	88,78	88.78	88,94	88,94	Indikator Program
	18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	19	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	20	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	22	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	23	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman		%	100%		100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>									
	<b>IX</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
	1	Indeks Kerukunan		Indeks	74,36	B (74,40) (Harmoni)	B (74,46) (Harmonis)	B (74,46) (Harmonis)	B (75,00) (Harmonis)	75,68	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	persentase konflik yang tertangani		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum		organisasi	68,80%	2 Organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	Indikator Sasaran PD
	5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya		Kejadian/ konflik	-10	1	-10	-10	-10	-10	Indikator Sasaran PD
	6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	persentase Status Kelembagaan Orkemas		%	69%	68%	69%	69%	70%	70%	Indikator Program PD
	9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase konflik yang terfasilitasi		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>III</b>		<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
	<b>A</b>	<b>Kemampuan Ekonomi</b>									
	<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
	3	persentase Usaha Mikro yang beromset naik		%	0,05%	20,00%	0,09%	0,09%	0,12%	0,12%	Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	80%	85%	85%	85%	87%	87%	Indikator Tujuan PD
	7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	3%	5%	3%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	2,50%	3,60%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	%	15%	25%	15%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7%	20,18%	7,33%	7,33%	8%	8%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	75,00%	98,59%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
	16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,50%	4,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD
	17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	83,33%	84,62%	80,65%	83,33% (2021: 79%)	80,65%	80,65%	Lppd
	18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	12%	0,44%	100% (2021: 0,42)	0,45%	0,45%	Lppd
	19	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0,64%	6%	80%	80%	80%	80%	Lppd
	20	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	0	0	0	0	0	Lppd
	21	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,23%	23,72%	16,13%	19% (2021: 16,13%)	16,13%	16,13%	Lppd
	22	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25,64%	23,72%	19,35%	25.5% (2021: 19,35%)	19,35%	19,35%	Lppd
	23	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	96,15%	71,79%	96,77%	96,77%	96,77%	96,77%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	2,80%	1,29%	2,35%	2,8% (2021: 2,35%)	2,35%	2,35%	Lppd
25	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	22,44%	1,29%	22,58%	22,58%	22,58%	22,58%	Lppd
26	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
27	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	80,77%	85,26%	81,29%	81,29%	81,29%	81,29%	Lppd
28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Hasil sama dengan no.17	74,36	80,65%	83,33% (2021: 79%)	80,65%	80,65%	Lppd
29	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29	1,29%	1,29% (2021: 1,29%)	1,29%	1,29%	Lppd
30	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	89,74%	74,36%	78,71%	89,74% (2021: 78,71%)	78,71%	78,71%	Lppd
31	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
32	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,34%	0,59%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,16%	0,15	0,14%	0,16% (2021: 0,14%)	0,14%	0,14%	Lppd
35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,02%	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,14%	0,06%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
	37	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,76%	0,38%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
	38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,19%	0,14%	0,12%	0,19% (2021: 0,12%)	0,12%	0,12%	Lppd
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>								
	1	ICOR	Poin	0,42		4,58	4,58	4,37		Indikator Tujuan PD
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	202 M	214 M	194 M	194 (2021: 191)	195 M	195 M	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	99,86%	100%	82%	100%	85%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan Wali Kota yang terkait dengan investasi	rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	19%	33%	32%	32%	39%	39%	Indikator Program PD
	8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	99,86%	99,69%	90%	90% (2021: 80%)	95%	95%	Indikator Program PD
	9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	100 perusahaan	110	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	115 perusahaan	Indikator Program PD
	10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	-38,30%	111,00%	0,52%	0,52%	0,52%	113,00%	Lppd
	12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Do kumen	tidak ada insentif	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
	13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Do kumen	tidak ada insentif	0	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	Lppd
	14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Do kumen	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	0	0	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	0	10 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
	18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	206 konsultasi	63 konsultasi	280	280	285	285 konsultasi	Lppd
	19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	2861	6554	1700	3000	1800	4000	Lppd
	20	Laporan realisasi penanaman modal	M	202.144.39 2.038,81	214,4	194 M	194 (2021: 191)	195 M	195 M	Lppd
	21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	21 aparatur	14 Aparatur	15 orang	21	15 orang	15 orang	Lppd
	22	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pe rusahaan	498 perusaha an	520 perusahaan	100 perusahaan	300 (2021: 100, 2022: 300)	100 perusahaan	115 perusahaan	Lppd
	23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>								
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,43%	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35	Indikator Sasaran PD
	2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	277 ton	281	285	285	290	290	Indikator Program PD
	3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita/ tahun	16,1 kg/ kapital/ tahun	16,92	15,8	16.1 (2021: 15,6)	15,9	15,9	Indikator Program PD
	4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	-	93	89	89	89	89	Indikator Program PD
	5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	367 ton	374	375	375	381	381	Lppd
	6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
	7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	orang	180	245	250	250	260	260	Lppd
	10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	450314 ekor	334.325 ekor	517.400 ekor	517.400 ekor	537.406 ekor	537.406 ekor	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>								
	2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	351.554 orang	543.207	425.000	425.000	450.000	450.000	Indikator Tujuan PD
	3	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Destinasi	34 destinasi	35	25 destinasi	34	30 destinaai	30 destinaai	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	%	107%	111,8%	10%	100%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	%	1600%	175%	25%	100%	30%	30%	Indikator Program PD
	8	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	%	50%	111,8%	15%	100%	20%	20%	Indikator Program PD
	10	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	18,68%	11,29%	19,50%	19,50%	20%	20%	Indikator Program PD
	11	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,01%	3475%	2%	2%	3%	3%	Lppd
	12	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,23%	54,96%	9%	9%	10%	10%	Lppd
	13	Tingkat hunian akomodasi	%	69,42%	63,58%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	16,39%		5,10%	16,39%	5,20%	5,20%	Lppd
	15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	265,90%	10,57%	266%	266%	266,10%	266,10%	Lppd
	16	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		34 sarpras	34	0	34	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	17	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		738 TDUP	870	704	738	704	704	Lppd
	18	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	21 orang	3475	925	925	950	950	Lppd
	19	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	6 kegiatan	41	5	6	5	5	Lppd
	20	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	0	0	Lppd
	21	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		0	67	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Lppd
	22	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	19,32%	21,50%	19,50%	19,50%	20%	20%	Lppd
	23	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tempat	34 lokasi	34	3	34	3	3	Lppd
<b>v</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>								
	2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,40%	1,4	1,216	1,216	1,221	1,221	Indikator Sasaran PD
	3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,05	1,115	1,14	1,14	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD
	4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	50%	55	60	60	65	65	Indikator Program PD
	5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	50%	50	75	75	100	100	Indikator Program PD
		persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10%	10	10	10	10	10	Indikator Program PD
	8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	89,50%	72	74	74	76	76	Indikator Program PD
	9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	10	12	12	15	15	Indikator Program PD
		persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	15%	20	20	20	20	20	Indikator Program PD
	11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		17.776	6,95	-	7,12 (2021: 7,21)	-	-	Lppd
	12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	1	2	2	2	2	2	Lppd
	13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	1 unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
	14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	1	2	2	2	2	Lppd
	15	Persentase prasarana yang digunakan	%	66,70%		75	75	75	75	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-		50	50	50	50	Lppd
	17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	70,29%		50	50	50	50	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>								
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,16	7,98	2,91	10.16 (2021: 2,16)	3,16	7,98	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	11,32	21,57	0,84	11.32 (2021: 0,58)	1,02	21,57	Indikator Sasaran Kota
	5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		25,25	26,64	24,05	25.25 (2021: 24,05)	24,05	24,05	Indikator Tujuan PD
	6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	1,30%	2,01	0,7	0,7	0,8	0,8	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi		-	102%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat		-	23,69%	5%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	114%	100%	100%	100% (2021: 100%)	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100%	101,6%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100%	1005%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	16	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	23,89%	26,46%	100%	100%	100%	30%	Lppd
	17	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	53,09%	42,29%	100%	100%	100%	50%	Lppd
	18	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	116,94%	101,6%	100%	100% (2021: 100%)	100%	100%	Lppd
	19	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	a. Pusat perbelanjaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd	
	b. Toko swalayan	%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd	
	20	Persentase penerbitan TDG	%	33,33%	60%	100%	100%	100%	60%	Lppd
	21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	56,33%	61,72%	100%	100%	100%	60%	Lppd
	22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	100%	100%	tidak ada	tidak ada	Lppd
	24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Lppd
	25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	100%	50%	100% (2021: 100%)	50%	100%	Lppd
	26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	Lppd
	27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	79,44%	42,29%	100%	100%	100%	50%	Lppd
	38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VII</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>									
	2	persentase IKM yang berstandarisasi	%	40%	82%	44%	44%	45%	45%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	70%	81,61%	80%	80%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	90%	100,00%	90%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	9%	16,67%	10%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	12,83%	15,14%	10,00%	12.83% (2021: 10%)	10,00%	10,00%	Indikator Program PD
	11	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	2,50%	9,38%	5%	5%	5%	5%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	3,85%	2,72%	0,02%	3.8% (2021: 0,02%)	0,03%	0,03%	Lppd
	13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	Lppd
	14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100%	25%	90% (2021: 25%)	25%	25%	Lppd
	15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	810%	416	45%	864 (2021: 45%)	45%	45%	Lppd
	18	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Lppd
	19	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	14,29%	100%	50%	50%	50%	50%	Lppd
	21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	tidak ada	0%	0%	0%	0%	Lppd
	22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	2,47%	6,49%	1,20%	4.32% (2021: 1%)	1,20%	1,20%	Lppd
<b>B</b>		<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>								

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
		1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	89,40	90,33	88,6	89,4	89,01	89,01	Indikator Tujuan Kota
	<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>								
		1	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,99	98,27	98,42	98,42	98,59	98,59	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	80,70%	81,74%	81,58%	81,58%	82,82%	82,82%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
		4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	94,03%	95,03%	95,50%	95,50%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	94,50%	95,03%	95,50%	95,50%	96%	96%	Indikator Program PD
		8	Persentase rawan banjir/genangan	%	19,30%	18,26	18,47	18,47	17,34	17,34	Indikator Program PD
		9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95%	62,83%	77,98%	77,98%	94,95%	94,95%	Indikator Program PD
		10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	98,14%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,03%	81,04%	80,09%	80,09%	80,12%	80,12%	Indikator Program PD
		12	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100%	100%	79.47%	80.09 %	79.47%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	0	0	Lppd
	16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0	0	0	0	0	Lppd
	17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,14%	100,00%	100%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,02%	99,72%	99%	99%	99%	Lppd
	19	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	99,52%	100%	72,69	72,69	72,7	Lppd
	20	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	99,06%	95,03%	94,06%	95.5 %	94,08%	Lppd
	21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95%	95%	67.8%	77.98 %	59%	Lppd
	22	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	6,7	6,07	3,3Km	6.12	3,2 Km	Lppd
	23	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72.776	72,776	19.334 M	58.290	19.334 M	Lppd
	24	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)		0	0	0	0	0	Lppd
	25	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		0	0	0	0	0	Lppd
	26	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	27	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	28	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		ada 6 pintu air, 4 pompa banjir, 9	62	0	0	0	Lppd



1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kolam retensi						
		29	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0	0	0	0	0	0	Lppd
		30	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	0	Lppd
		31	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0	0	0	0	0	Lppd
		32	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		33	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		34	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		1 BUMD	1	1	1	1	1	Lppd
		35	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		0	0	0	0	0	0	Lppd
		36	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		0	0	0	0	0	0	Lppd
		37	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		0	0	0	0	0	0	Lppd
		38	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		0	0	0	0	0	0	Lppd
		39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		0	0	0	0	0	0	Lppd
		40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	0	0	Lppd
		41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	0	0	Lppd
		42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		0	0	0	0	0	0	Lppd
		43	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	98,02	100	100	100	100	100	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	44	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		0	0	0	0	0	0	Lppd
	45	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		0	0	0	0	0	0	Lppd
	46	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		0	0	0	0	0	0	Lppd
	47	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		0	0	0	0	0	0	Lppd
	48	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0	0	0	0	0	0	Lppd
	49	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		0	0	0	0	0	0	Lppd
	50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	0	0	0	Lppd
	51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	19,13%	100%	98%	98%	100%	100%	Lppd
	52	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	171	234	420	420	425	250	Lppd
	53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	54	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 unit	20	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 unit	20	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	230	230	Lppd
	58	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	23 unit	38	5 Unit	26	5 Unit	5 Unit	Lppd
	59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485 Km	433,485	433,095 Km	433.095	433,095 Km	433,095 Km	Lppd
	60	Panjang jalan yang dibangun	km	1,888 Km	4.6km	0,45 km	0.45	0,4 km	0,4 km	Lppd
	61	Panjang jembatan yang dibangun	m	31,8 m	43 m	20 m	20	10 m	10 m	Lppd
	62	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	2,391 km	5.2 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	3,5 km	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0	10 m	0	0	0	0	Lppd
64	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	8,563 km	13.27km	5 km	5	5 km	5 km	Lppd
65	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	0	0	0	0	0	Lppd
66	Panjang jalan yang dipelihara	km	51 km	52 km	40 km	40	40 km	40 km	Lppd
67	Panjang jembatan yang dipelihara	Km	3,9 km	3,95 km	3,8 km	3.8	3,8 km	3,8 km	Lppd
68	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Kali	2 orang	0	3	3	3	3	Lppd
69	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	495 orang	236	125	125	130	80	Lppd
70	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	236 orang	236	30	30	30	80	Lppd
71	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
72	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
73	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
74	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
75	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
76	Tersedianya data dan profil OPD sub- urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	data	1	Ada	1	1	Ada	Ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	77	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	78	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	79	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	80	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	81	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	82	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	83	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	84	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	85	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		165 badan usaha	100	100	100	115	100	Lppd
	86	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	Lppd

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	87	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			80 badan usaha	60	50	50	50	50	Lppd
	88	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			165 badan usaha	100	100	100	100	100	Lppd
	89	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			0	0	30	30	30	30	Lppd
	90	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	0	50	50	50	50	Lppd
	91	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	0	0	0	0	0	Lppd
	92	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		%	0	0	100	100	100	100	Lppd
	93	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		%	98,13%	98,17%	100	100	100	100	SPM
	94	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		%	98,02%	99,72%	90	90	90	90	SPM
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
	1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman		Indeks	89,22	90,55	91,17	91,17	92,19	92,19	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Perumahan Permukiman		Indeks	99,74%	99,77	99,80	99,80	99,90	99,90	Lanjutan Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman		Indeks	76,47%	79,27	80,62	80,62	82,76	82,76	Lanjutan Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	99,39%	99,49%	99,50%	99,50%	100%	100%	Indikator Program PD
6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	0	0	0	0	lppd
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kk	65	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	68,32%	98,59%	74,55%	74,55%	100%	100%	lppd
10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	133	64 unit	100 unit	100	100 unit	100 unit	lppd
11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	41	45	45	50	50	lppd
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	0	0	0	0	0	lppd
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	0	0	0	0	0	lppd
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	0	0	lppd
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	0	lppd
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	0	lppd
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	0	0	0	lppd
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	0	0	0	0	lppd
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0	0	0	0	0	lppd
20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	0	lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	0	lppd
	22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	0	lppd
	23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	65 rumah tangga	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
	24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	0	0	0	lppd
	25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	0	0	0	0	0	lppd
	26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	64,49 Ha	0,91 ha	16,41 ha	16,41 ha	0 ha	0 ha	lppd
	27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	133 unit	64 unit	100 unit	100	100 unit	100 unit	lppd
	28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	31,98 Ha	19,52 ha	12,08 ha	12,08	0 ha	0 ha	lppd
	29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	41.409 rumah	44.831	42.429	42.429	42.479	42.479	lppd
	30	Jumlah unit PK RTLH	unit	133 rumah	64	100 unit	100	100 unit	100 unit	lppd
	31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	133 rumah	190	140 unit	140 unit	40 unit	40 unit	lppd
	32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	0	0	lppd
	33	Rasio rumah dan KK	%	125,98%	119,08%	170%	170%	170%	170%	lppd
	34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	120 rumah	145 rumah	50	50	50	50	lppd
	35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	41 rumah	41 perumahan	45	45	50	50	lppd
	36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	5948 unit	5948 unit	lppd
	37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	5948 unit	5948 unit	lppd
	38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948	5948 unit	5948 unit	lppd
	39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	unit	41 pengembangan	41 perumahan	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6096 rumah	6097 rumah	5948 unit	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
	41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	50	50	lppd
	42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	50	50	lppd
	43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	orang	41 pengembang	41 pengembang	45	45	50	50	lppd
	44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0		0	0	0	0	Spm
	45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0		0	0	0	0	spm
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>								
	1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	persentase Penatagunaan Tanah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52	30,52	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
	6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		100%	0	0	0	0	0	Lppd
	7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	0	0	Lppd
	8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	0	0	Lppd
	9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	1	5	1	1	2	2	Lppd



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Dokumen	100	0	1	1	1	1	Lppd
	11	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		tidak ada	0	0	0	0	0	Lppd
	12	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		tidak ada	0	0	0	0	0	Lppd
	13	Dokumen Izin membuka tanah		tidak ada	0	0	0	0	0	Lppd
	14	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		tidak ada	0	0	0	0	0	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>								
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99%	58,13	57,85	57,85	57,93	57,93	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,61	50	51,31	51,31	51,32	50	Indikator sasaran PD
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,78	84,17	83,09	83,09	83,26	84,17	Indikator sasaran PD
	4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	98,04%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	Indikator sasaran PD
	5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	69,23%	71,79%	79,49%	79,49%	79,50%	87,18%	Indikator Program PD
	6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	55,90%	49,23%	50%	50%	50,10%	50%	Indikator Program PD
	7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	94,32%	96,59%	97,20%	97,20%	100%	100,00%	Indikator Program PD
	8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	72,50%	74%	75%	75%	78%	78%	Indikator Program PD
	9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	54,65%	64,70%	76,47%	76,47%	88,20%	88,20%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	140%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73,98%	72,98%	72%	72%	71%	71%	Indikator Program PD
13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98,04%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	Lppd
14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		ada	ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
16	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,576	1,603	1,603	1,603	1,602	1,603	Lppd
17	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	5,99	6,25	5,982	5,982	5,98	5,98	Lppd
18	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan		belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd
19	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00%	100%	76,47%	100%	88,20%	88,20%	Lppd
20	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		tidak ada	ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
21	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
22	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
23	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
	24	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Indeks	-	23,94	22,41	22,41	23	23	Indikator sasaran PD
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>									
	1	Kinerja ruas jalan		%	0,34	0,34	0,41	0,41	0,4	0,4	Indikator Tujuan PD
	2	Kecepatan lalu lintas		Km/ jam	38,05 kam/ jam	39 km/jam	40 km/jam	40 km/jam	41 km/jam	41 km/jam	Indikator Sasaran PD
	3	Kinerja Angkutan Umum		%	40%	70%	42%	42%	43%	71%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas		%	84%	100%	92%	92%	96%	96%	Indikator Program PD
	5	Rasio konektivitas kabupaten/kota			0		-	-	-	-	Lppd
	6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		%	0,34%	0,34	0,41	0,41	0,4	0,4	Lppd
	7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	8	Terlaksananya pelayanan uji berkala		%	106,63%	115,13%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	9	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd
	10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Lppd

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2023 dan BPS Kota Madiun, 2023

Catatan :

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaannya.

Penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan melalui tahapan Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diikuti oleh berbagai profesi mulai dari perwakilan organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan dunia usaha, serta masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaksanaan forum Musrenbang dimaksud dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Seluruh masukan/saran, aspirasinya berupa tanggapan serta pertimbangan-pertimbangan yang riil terhadap kebijakan pemerintah daerah, telah menjadi masukan untuk menyempurnakan dokumen RKPD tahun 2024 ini.

Penyusunan RKPD 2024 telah mengikuti berbagai pendekatan yaitu : pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas - bawah dan bawah - atas (*top down* dan *bottom up*). Hal ini menunjukkan, bahwa semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2024. Dalam penyusunan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini senantiasa memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dalam upaya untuk menjamin adanya keselarasan, sinergi dan harmonisasi antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan tingkatan pemerintahan.

Dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam dokumen RKPD ini memuat dan mengintegrasikan pula program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Madiun dalam rangka mendukung program prioritas Kota Madiun.

Demikian RKPD Kota Madiun Tahun 2024 yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Dengan ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2024 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan, dan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009